



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan

berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Kementerian/Lembaga adalah lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB, dan RAD TPB yang telah selesai.
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dalam Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB; dan
- b. penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

BAB II

TIM KOORDINASI NASIONAL PELAKSANAAN TPB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB bertugas:

- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

Pasal 4

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Tim Pakar.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana merangkap Anggota, dan Anggota.

Pasal 6

- (1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan.
- (2) Koordinator Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
 - h. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah; dan
- j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diketuai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beranggotakan unsur Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
 - b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
 - c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

- g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja;
- j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) Pilar Kelompok Kerja, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
 - b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
 - c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 - d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
- (2) Kelompok Kerja bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;

- b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dengan Sekretariat.
- (4) Empat Pilar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 17 (tujuh belas) Sub Kelompok Kerja sesuai dengan TPB.

Pasal 9

Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan TPB;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang terkait dengan pencapaian pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin pencapaian pelaksanaan TPB.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tim Koordinasi Nasional TPB dibantu oleh

Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB.
- (4) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris I dan Pelaksana Tugas Sekretaris II.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan kebijakan dan administratif.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris I melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Tugas Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substansi dan teknis.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris II melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris I.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas oleh unsur-unsur oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar TPB dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Pengambilan keputusan oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar TPB dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar

Pasal 15

- (1) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana mengoordinasikan penyusunan susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan secara bergilir setiap 2 (dua) tahun dengan memerhatikan keterwakilan unsur nonpemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana.

BAB III

TATA CARA KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PETA JALAN NASIONAL TPB, RAN TPB, DAN RAD TPB

Bagian Kesatu

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB

Pasal 16

- (1) Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk menjadi acuan arahan pelaksanaan pencapaian sasaran Nasional TPB (RAN TPB

dan RAD TPB), pengembangan indikator, serta acuan rencana kerja Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

- (2) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dalam Peraturan Menteri Perencanaan tersendiri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Peta Jalan TPB Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Terhadap Peta Jalan Nasional TPB dapat dilakukan kaji ulang apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Peta Jalan Nasional TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN TPB

Pasal 18

- (1) RAN TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan TPB tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pencapaian TPB;
 - b. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;
 - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peta

Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;

- d. meningkatkan peran dan komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta Masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan
 - e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD TPB.
- (2) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB;
 - c. target dan arah kebijakan pencapaian TPB;
 - d. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB; dan
 - e. penutup.
- (3) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB, Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Terhadap RAN TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan RAD TPB

Pasal 23

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu RAD TPB Provinsi.

- (2) RAD TPB disusun oleh gubernur bersama bupati/wali kota di wilayahnya dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
- (3) RAD TPB Provinsi disusun dengan mengacu kepada Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (4) Gubernur menetapkan RAD TPB dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB provinsi kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan
RAD TPB

Pasal 27

Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB dan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 583

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

1.2 Tujuan

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan, sistematika dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

1.4 Landasan Hukum

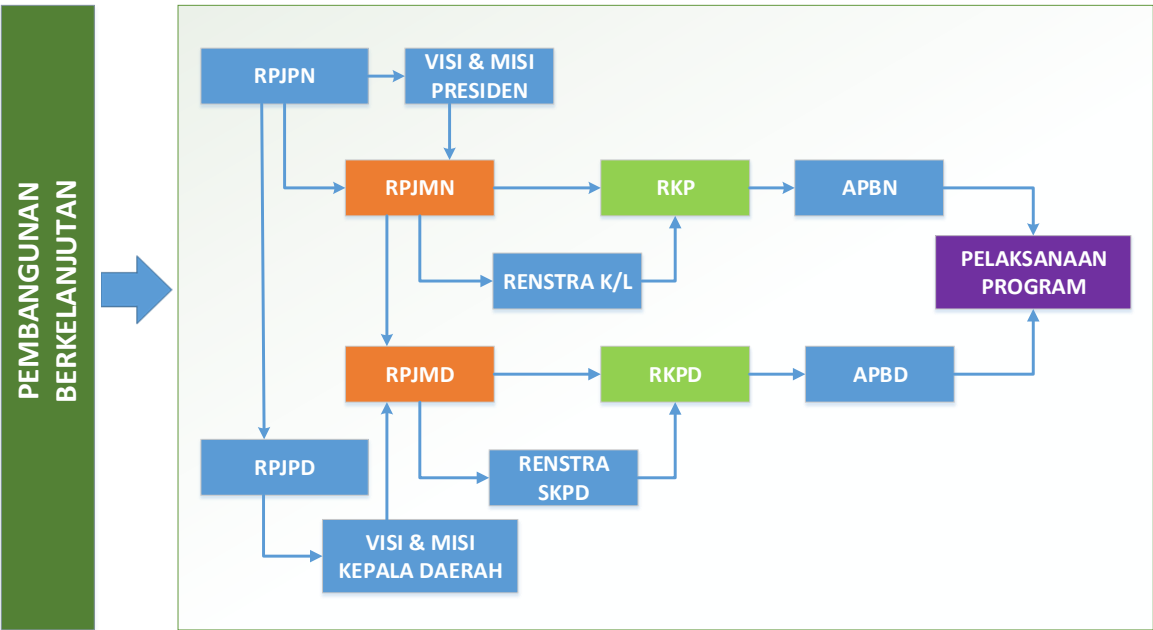
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan,

termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (viii) Pembangunan taman tekno dan taman sains;

(ix) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (x) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xi) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v)

Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan *open government*; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix)

Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband*; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

3.1.1 Tingkat Nasional

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN Tahun 2015-2019

Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019

Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan

Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs.

4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia

Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan.

6. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait

a. Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua

tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020. RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.
- c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024. RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif.

RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).

- d. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB). Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019. RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025. Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

- g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019. RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab.
- h. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020. Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, Dokumen RPJMN 2015-2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.

3.1.2 Tingkat Daerah

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;
4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;
5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
7. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah;
8. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi

Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2015-2019, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;
- Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs
- Langkah 4: Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;
- Langkah 5: Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;
- Langkah 6: Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

Langkah 7: Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat daerah.

Langkah 8: Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

Langkah 9: Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3.4 Jadual Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs

[illegible]

[illegible]

BAB IV. SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs

4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- 2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesenjaraan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019
- 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
- 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Penjelasan penulisan:

1. BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap Nawacita, RPJMN, dan RPJMD.

- 1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs

Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannya, serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menyempurnakan MDGs secara lebih luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

1.5. Pembiayaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dituliskan secara terkonsolidasi.

3. BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (tabel 2 format matriks bagian 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan/atau RPJMD yang berlaku.

4. BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

2) Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

3) Waktu pelaksanaan.

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

5. BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang

2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (*trust building*); Kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan.

Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

6. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya

Renaksi TPB/SDGs dituliskan dalam bentuk matrik berikut:

Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs

NAMA TUJUAN

Kode Indikator(1)	Indikator (3)	Sumber Data (4)	Satuan (5)	Tahun Dasar (6)	Target Pencapaian (7)			
					2016	2017	2018	2019
Target (2)								

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMERINTAH										
INDIKATOR TPB/SDGs 1:										
PROGRAM 1:										
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan									
	1.2. Output Kegiatan									
Kegiatan 2	2.1. Output Kegiatan									
	2.2. Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
INDIKATOR TPB/SDGs 1:											
PROGRAM 1 :											
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
	2.2 Output Kegiatan										

Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan berasal dari nasional/daerah (K/L/OPD terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional/daerah maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matrik
 - a. Tabel Bagian 1 (merupakan bagian dari BAB III):
 - Kode Indikator (1): Berisi nomor indikator TPB/SDGs
 - Target (2): Nama target TPB/SDGs global
 - Indikator (3): Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator
 - Sumber Data (4): Berisi sumber data untuk tahun dasar dan target indikator
 - Satuan (5): Berisi satuan dari indikator
 - Tahun Dasar (6): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
 - Target (7): Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir
 - b. Tabel Bagian 2:

- Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1): Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi;
- Satuan (2): Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Tahun Dasar (3): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Target Tahunan (4): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Indikatif Alokasi Anggaran (5): Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan;
- Sumber Pendanaan (6): Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Instansi Pelaksana (7): Berisi nama K/L atau SKPD/OPD yang melaksanakan program tersebut.

c. Tabel Bagian 3:

- Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1): Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Tahun Dasar (3): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Target Tahunan (4): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Indikatif Alokasi Anggaran (5): Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;

- Sumber Pendanaan (6): Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
- Lokasi (7): Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Instansi Pelaksana (8): Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

5.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas:

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,
Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas:

- Ketua : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

3. Kelompok Kerja

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial

- Ketua : Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
- Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

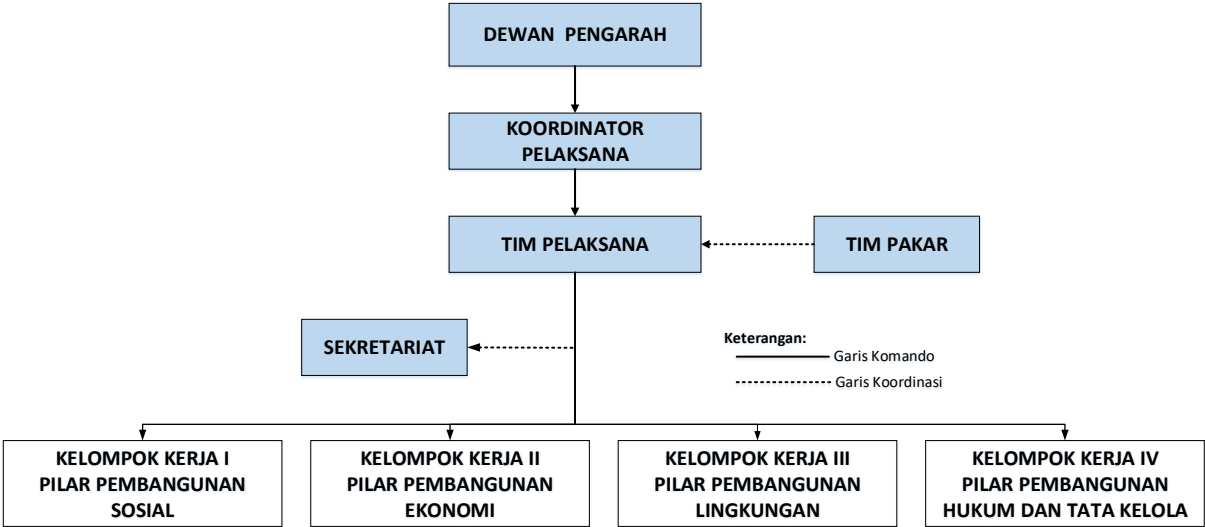
c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas

- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekretaris : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar



Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
POKJA I Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5	Ketua	: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II	: Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Sekretaris	: Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota	: Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7 Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 17	Ketua	: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua III	: Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
		Wakil Ketua IV :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
		Sekretaris :	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6 Tujuan 11 Tujuan 12 Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15	Ketua :	Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
		Sekretaris :	Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS da media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	Ketua :	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Sekretaris :	Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

5.2 Uraian Tugas

1. Tim Pengarah:

- Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia
- Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden

2. Tim Pelaksana:

- Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi TPB/SDGs

- b. Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi penyusunan Renaksi TPB/SDGs
 - c. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs
 - d. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Kelompok Kerja:
- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
 - d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
 - e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
 - g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Mekanisme Kerja

- a. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- b. Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;
- c. Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs;
- d. Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs;
- e. Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;
- f. Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- g. Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs.

5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.

BAB VI. PENUTUP

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI,
PERENCANAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
2017-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita
Agenda pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 merupakan penjabaran operasional dari Nawacita. Sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dilakukan melalui Nawacita yang merupakan arah untuk meneguhkan kembali jalan ideologis supaya Indonesia terus mampu bertahan terhadap berbagai deraan gelombang sejarah dan menyongsong perubahan.

Nawacita atau Sembilan Cita tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita secara lebih operasional diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang diluncurkan pada 8 Januari 2015 dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJMN 2015-2019 dirumuskan dengan memperhatikan

elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam bidang-bidang pembangunan yang relevan dengan agenda pembangunan nasional.

Pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMN 2015-2019, pada tingkat global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

TPB/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. *Sustainable Development Goals*

Tujuan SDGs	
1)	Tanpa Kemiskinan
2)	Tanpa Kelaparan
3)	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4)	Pendidikan Berkualitas
5)	Kesetaraan Gender
6)	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7)	Energi Bersih dan Terjangkau
8)	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9)	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10)	Berkurangnya Kesenjangan
11)	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13)	Penanganan Perubahan Iklim
14)	Ekosistem Lautan
15)	Ekosistem Daratan
16)	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan SDGs	
17)	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini menunjukkan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019, 94 target dari 169 target TPB/SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Sinergi antara Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
1) Menghadirkan kembali negara untuk	Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa	G1 Tanpa Kemiskinan

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif• Memperkuat sistem pertahanan• Memperkuat jati diri sebagai negara maritim• Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri• Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran• Memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional• Meminimalisasi dampak globalisasi• Membangun industri pertahanan nasional• Membangun Polri yang profesional• Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan	G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Bab 6.2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya <ul style="list-style-type: none">• Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik• Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan• Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan• Penyempurnaan dan peningkatan kualitas	G5 Kesenjangan Gender G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
	Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik	
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Bab 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan <ul style="list-style-type: none">• Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris• Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia• Menanggulangi kemiskinan	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesenjaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjaraan G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Bab 6.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan• Pencegahan dan pemberantasan korupsi• Pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar, dan Penambangan Liar	G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G5 Kesenjaraan Gender G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Darat G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberantasan penyalahgunaan narkoba• Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah• Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal	
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	<p>Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none">• Membangun kependudukan dan keluarga berencana• Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar• Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat• Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan	<p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p>
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	<p>Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan• Membangun transportasi umum masal perkotaan• Membangun perumahan dan kawasan permukiman• Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur• Memperkuat investasi• Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan	<p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p>

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi • Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional • Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional • Meningkatkan daya saing tenaga kerja • Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 	G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kedaulatan pangan • Membangun ketahanan air • Membangun kedaulatan energi • Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana • Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan • Memperkuat sektor keuangan • Memperkuat kapasitas fiskal negara 	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan G13 Penanganan Perubahan Iklim G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Daratan G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
8) Melakukan revolusi karakter bangsa	Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
		G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.	Bab 6.9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesenjaraan Gender G10 Berkurangnya Kesenjaraan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: Buku Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan SDGs - yang telah disempurnakan

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal”. Sebagai contoh,

target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) Angka Kematian Bayi dan Balita, 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, 2) Angka Kematian Ibu, 3) prevelansi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Hal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat

Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Presiden RI mengarahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Nonpemerintah.

1.5. Pembiayaan SDGs

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

Optimalisasi Penerimaan Negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan

dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu enam bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019 harus ditetapkan. Perpres merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, setiap tahap penyusunan RAN TPB/SDGs melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAN TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAN serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
2. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAN. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antara BAPPENAS, selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs, dengan pihak-pihak nonpemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3.
3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun waktu (*series*) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2019.
4. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah

melalui sistem daring (*online*) lewat laman (*website*) dan surat elektronik (*email*). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAN.

1.7. Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Indonesia terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita, bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAN juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2019.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAN ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAN TPB/SDGs 2017-2019. Bab ini berisi mekanisme

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

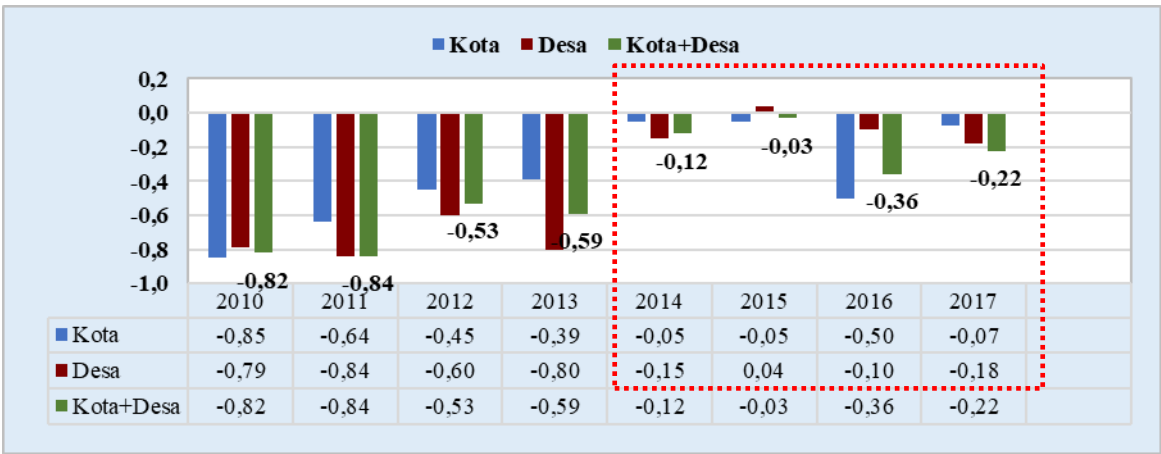
BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2017 (BPS, angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 31,02 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 27,7 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 600 ribu jiwa/tahun.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,84%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,03% terjadi pada tahun 2015. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2015-2016.



Gambar 1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010-2017
Sumber: BPS 2017, diolah Bappenas

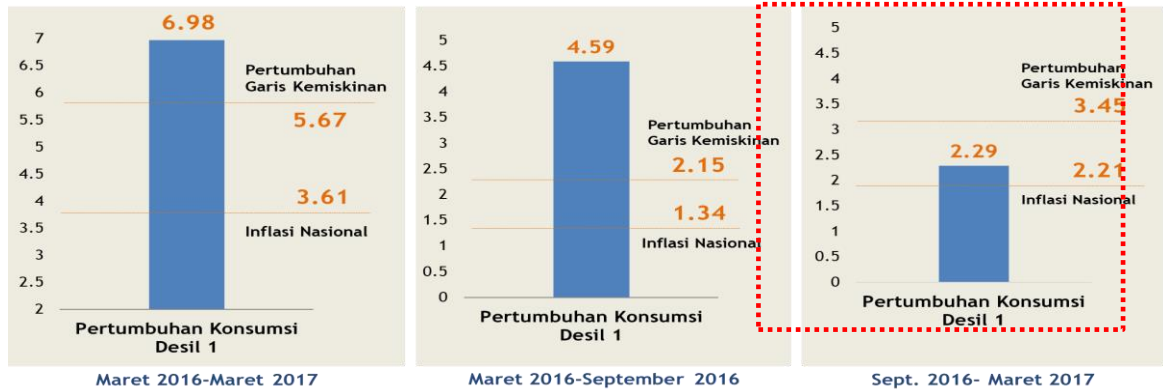
Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Secara umum, selama periode

Maret 2016 terhadap Maret 2017, rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi yang diindikasikan dengan kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 6,92%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada 20% kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah mengalami peningkatan.



Gambar 2. Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat, Maret 2016 – Maret 2017
Sumber: TNP2K, 2017

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Selama tiga periode publikasi angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara umum. Bahkan pada periode September 2016 terhadap Maret 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok 10% terbawah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan garis kemiskinan.



Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Miskin, 2016-2017
Sumber: TNP2K, 2017

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih

terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah. Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Pada aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan, meningkat dari 79,82% pada tahun 2010 menjadi 74,89% pada tahun 2017. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB cenderung menurun, yaitu sebesar 69,94% pada tahun 2010 menjadi 59,7% pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia pada aspek pemenuhan hak reproduksi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk, disamping adanya kesenjangan pencapaian aksesibilitas kesehatan antarwilayah.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 46,26%. Disisi lain, akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 35,06% pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,81% pada tahun 2017. Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antarprovinsi dan antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang layak antarwilayah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penerangan yang bersumber dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 94,52% pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 90,23% pada tahun 2010.

Akses Pelayanan Pendidikan, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 2,80%, atau meningkat menjadi 97,21% pada tahun 2017 dari sebelumnya 94,41% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 13,04% dari sebelumnya 63,51% pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 76,55% pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi juga pada jenjang pendidikan menengah atas yaitu SMA/SMK/MA/ sederajat yang ditunjukkan dengan APM pada tahun 2010 adalah 32,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,21%.

Masalah yang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2011-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, proporsi tersebut adalah sebesar 19,54% dan terus menurun menjadi sebesar 12,69% pada tahun 2016 (Susenas). Pola yang sama terjadi pada seluruh kelompok pendapatan. Pada kelompok penduduk termiskin (kuintil 1), proporsi penduduk rawan pangan pada tahun 2011 adalah sebesar 37,3%, kemudian meningkat menjadi 41,8% (2012), dan selanjutnya menurun hingga menjadi 32,8% (2016). Selain itu, masih ditemukan penduduk dengan konsumsi kalori perkapita per hari <1400 kkal pada kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5).

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2)

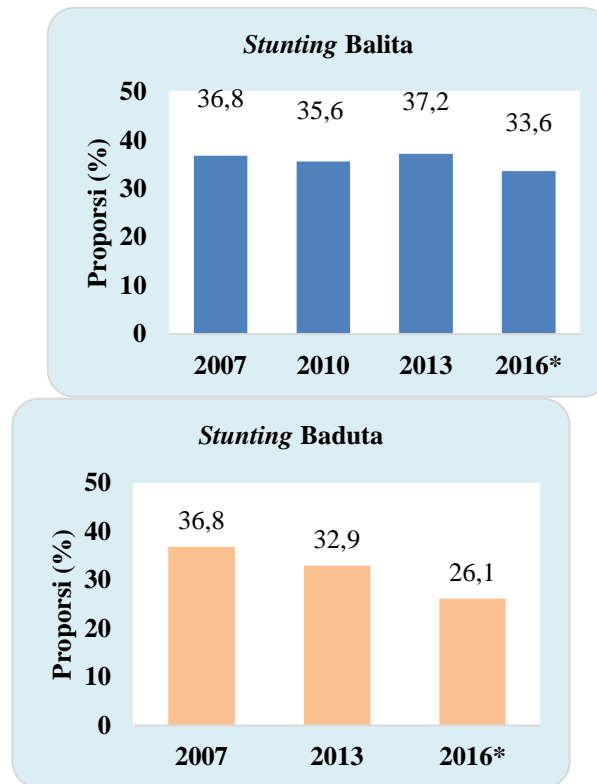
permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi *stunting* pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2010-2016. Pada tahun 2016 proporsi *stunting* pada anak balita adalah sebesar 33,6% (Sirkesnas) menurun dari angka 35,6% (Riskesdas, 2010). Sementara pada anak baduta, proporsi *stunting* adalah sebesar 26,1% (Sirkesnas, 2016) menurun dari 32,9% (Riskesdas, 2013). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup signifikan dari 13,3% (Riskesdas, 2010) menjadi 9,8% (Sirkesnas, 2016). Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Namun, prevalensi anemia pada ibu hamil menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 24,5% (Riskesdas, 2007) menjadi 54,9% (Sirkesnas, 2016). Cakupan ASI eksklusif juga berfluktuasi dari sebesar 15,3% (Riskesdas, 2010) meningkat menjadi 38% (Riskesdas, 2013), kemudian turun kembali menjadi 22,8% (Sirkesnas, 2016).

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Pada tahun 2013, 11,8% anak balita mengalami obesitas. Hal yang sama terjadi pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun). Prevalensi obesitas pada kelompok ini meningkat dari 11,7% (Riskesdas, 2010) menjadi 15,4% (Riskesdas, 2013), dan meningkat kembali menjadi 20,7% (Sirkesnas, 2016). Dengan memperhatikan masalah gizi, saat

ini Indonesia menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.



Gambar 4. Prevalensi Stunting pada Balita dan Baduta, 2007-2016
Sumber: Riskesdas Tahun 2007, 2010, dan 2013, *Hasil Sementara Sirkesnas 2016

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (*Desirable Dietary Pattern*). Skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Selama periode 2009-2016 kualitas konsumsi pangan masyarakat berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 82,9% dan pada tahun 2016 skor PPH mencapai 86,0% (Badan Ketahanan Pangan). Pengetahuan pangan dan gizi masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang (B2SA) masih rendah. Hal inilah yang mempengaruhi pola permintaan pangan rumah tangga yang belum berkualitas.

Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Pada periode 2010-2016, produksi padi meningkat rata-rata per tahun sekitar 2,99% dan jagung 4,27%, sementara produksi kedelai cenderung menurun. Untuk bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai merah) rata-rata pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 5,82% per tahun dan 8,81% per tahun.

Produksi sumber protein hewani asal ternak yaitu daging sapi, daging ayam, dan daging lainnya rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 4,27% dan telur (ayam ras, ayam kampung, itik/bebek, dan puyuh) sebesar 6,35%. Produksi sumber protein hewani asal ikan pertumbuhannya meningkat pesat, yaitu untuk perikanan tangkap rata-rata per tahun sebesar 4,06% dan perikanan budidaya sekitar 18,30% (Pusat Data dan Statistik Pertanian, Kementan; dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP).

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau *breeder*) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional. Selama periode 2010-2016, pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10 varietas di lahan tadah

hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 varietas berupa jenis VUB hibrida.

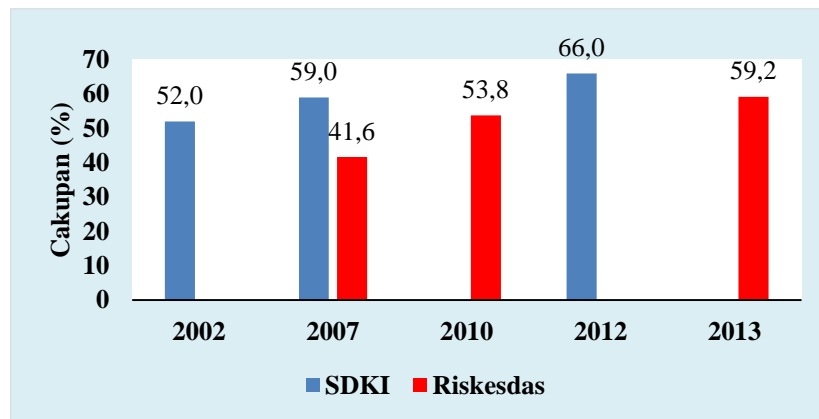
Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu ternak domba komposit Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% *St. Croix*, 25 *Barbados Blackbelly*).

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dari 46% (2007) menjadi 63,2% (2012). Selanjutnya, data Susenas menunjukkan peningkatan menjadi 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI juga meningkat dari 73% (2007) menjadi 83% (2012). Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual Reduction Rate/ARR*). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa) terus menurun, walaupun melambat sejak tahun 2002. Sementara itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami stagnasi sejak tahun 2007, dengan ARR sebesar 0,5% per tahun. Dibutuhkan ARR sebesar 3% untuk mencapai target TPB/SDGs sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030. Sementara, data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan

imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan (Gambar 5). Dalam SDKI, imunisasi dasar lengkap (IDL) didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 12-23 bulan sudah mendapatkan semua jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.



Gambar 5. Imunisasi Dasar Lengkap
Sumber: SDKI (2002-2012), Riskesdas (2007-2013)

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang menerima pengobatan ARV terus meningkat dari 2.381 orang (2010) menjadi 77.748

orang (2016). Hasil survei khusus prevalensi *tuberculosis* (TB) dengan metode mikroskopis menunjukkan bahwa prevalensi TB menurun dari 297 (2013) menjadi 257 per 100.000 penduduk (2016). Diperlukan upaya keras untuk mencapai target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 245 per 100.000 penduduk. Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. Kecenderungan angka kesakitan malaria berdasarkan *Annual Paracite Incidence* (API) menurun dari 1,75 (2011) menjadi 0,85 per 1000 penduduk (2015). Sampai dengan Oktober 2017, sebanyak 262 kabupaten/kota telah menerima sertifikat eliminasi malaria dan masuk dalam tahap pemeliharaan/bebas penularan malaria. Provinsi dengan eliminasi kusta meningkat dari 20 provinsi (2014) menjadi 23 provinsi (2016). Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi filariasis meningkat dari 8 kabupaten/kota (2014) menjadi 12 kabupaten/kota (2016).

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% atau hampir 40 juta penduduk di atas 18 tahun dan Diabetes Melitus (DM) sebesar 6,9%. Prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013). Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sebesar 26,1% penduduk kurang aktivitas fisik dan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur (2013). Sementara, 4,6% penduduk mengonsumsi alkohol (2007), dimana 0,6% diantaranya mengonsumsi hingga level yang berbahaya menurut standar WHO.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *diagnostic kit*) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas

SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Berdasarkan SDKI, angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,6 anak per 1.000 perempuan, dari target RPJMN sebesar 2,3 anak per 1.000 perempuan. Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR) menurun dari 51 (2007) menjadi 48 kelahiran per 1.000 perempuan (2012). Diperlukan upaya untuk memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 38 kelahiran per 1.000 perempuan. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) semua cara meningkat dari 61,4% (2007) menjadi 61,9% (2012). Namun, capaian tersebut menurun sepanjang tahun 2013-2015, dari 61,98% menjadi 59,98% (Susenas). Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

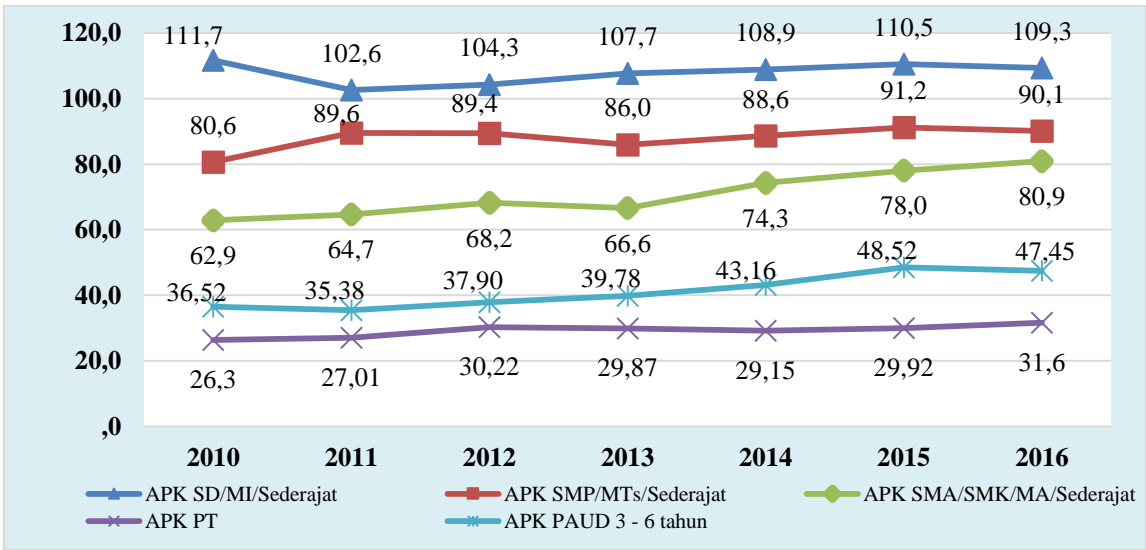
Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 187,9 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Pulau Jawa menempati jumlah terbesar (46,76%), diikuti Sumatera (26,30%), Sulawesi (9,41%), Kalimantan (7,79%), Bali dan Nusa Tenggara (5,96%), serta Maluku dan Papua (3,78%) (Kementerian Kesehatan, 2015). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar 10,93% dari 36,52% (2010) menjadi 47,45% (2016). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Podes 2014, sebesar 94,72% PAUD diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.



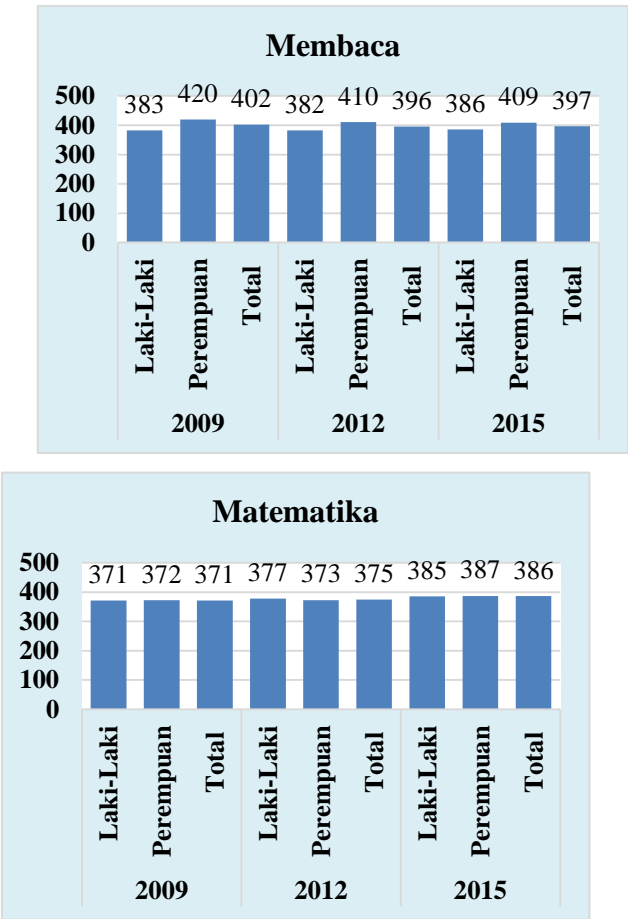
Gambar 6. Angka Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/Sederajat sampai dengan Pendidikan Tinggi, 2010-2016
Sumber: Susenas 2010-2016 (diolah) dan Kemristekdikti (APK PT)

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi terus meningkat. Gambar 6 menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat hingga jenjang Pendidikan Tinggi tahun 2010-2016. Partisipasi pendidikan pada jenjang

SD/MI/ sederajat sudah mencapai lebih dari 100%. APK SMP/MTs/ sederajat terus mengalami peningkatan dari 80,6% pada tahun 2010 menjadi 90,1% (2016). Tingkat partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 62,9% (2010) menjadi 80,9% (2016). APK pendidikan tinggi meningkat dari 26,3% (2010) menjadi 31,6% (2016).

Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

Kemampuan siswa Indonesia. Kemampuan siswa diukur dengan menggunakan *The OECD Programme for International Student Assessment* (PISA). Secara spesifik PISA mengevaluasi tiga hal yaitu kemampuan membaca, matematika, dan sains yang telah dimulai sejak tahun 2000.

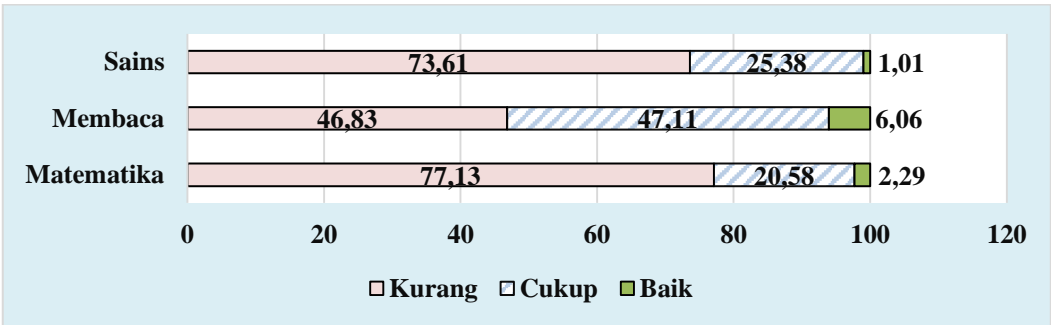


Gambar 7. Nilai Rata-Rata Tes PISA Indonesia Kemampuan Membaca dan Matematika
Sumber: Data OECD 2009-2015

Gambar 7 memperlihatkan capaian PISA Indonesia pada tahun 2009 hingga 2015 untuk kemampuan membaca dan matematika. Dalam hal kemampuan membaca, terlihat penurunan skor dari 402 pada tahun 2009 menjadi 397 pada tahun 2015. Sementara itu capaian kemampuan matematika menunjukkan kecenderungan meningkat dari 371 pada tahun 2009 menjadi 386 pada tahun 2015. Dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa nilai rata-rata PISA laki-laki lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata PISA perempuan. Secara umum, hasil PISA Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD. Pada tahun 2015, rata-rata capaian negara OECD untuk kemampuan membaca adalah 493 dan matematika 490.

Selaras dengan hasil PISA, hasil *Indonesian National Assessment Programme* (INAP) tahun 2016 menunjukkan bahwa kemampuan sains, membaca dan matematika siswa di Indonesia masih rendah. Untuk kemampuan sains hanya 1,01% siswa yang memiliki kemampuan baik, 25,38% cukup dan 73,61% memiliki kemampuan kurang dalam subyek tersebut. Untuk kemampuan membaca 6,06% berkemampuan baik,

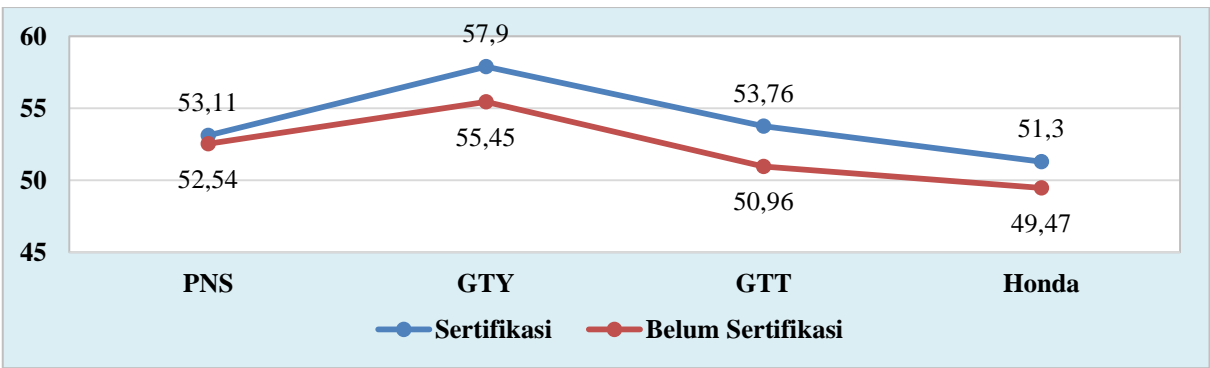
sementara siswa dengan kemampuan cukup dan kurang berturut-turut sebesar 47,11% dan 46,83%. Dalam subyek matematika, hanya 2,29% yang berkemampuan baik, 20,58% berkemampuan cukup, dan 73,61% kurang.



Gambar 8. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI/INAP) 2016

Sumber: <http://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/kategori>

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Gambar 10 menunjukkan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru yang telah memiliki sertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki sertifikat, baik guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), maupun Guru Honor Daerah (Honda). Sementara, berdasarkan data Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.

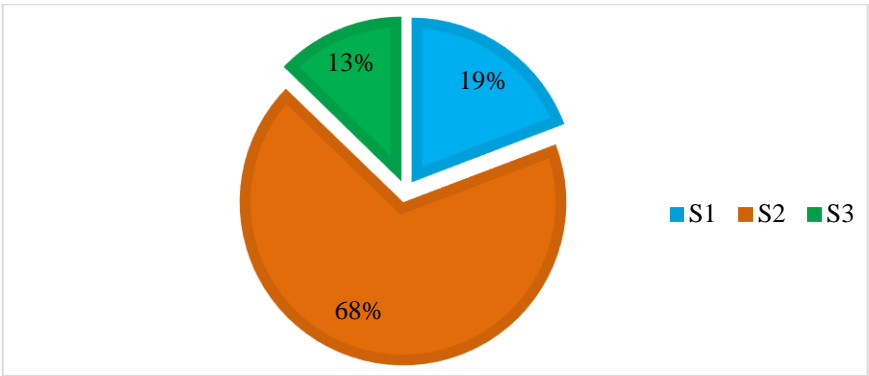


Gambar 9. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Berdasarkan Status Sertifikasi

Sumber: Kemdikbud

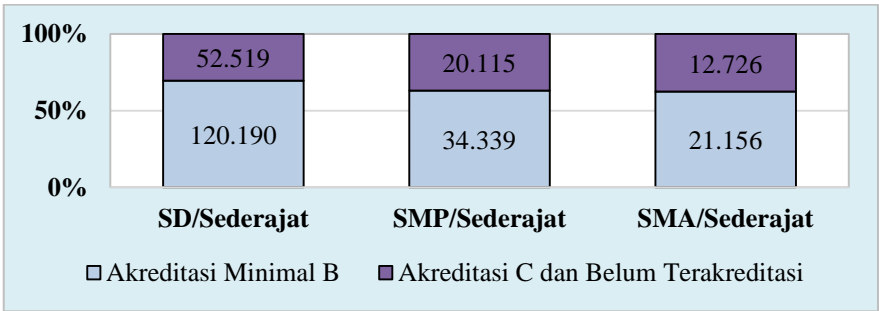
Sementara, ketersediaan dosen yang memiliki standar dan memenuhi kualifikasi minimal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Hingga Januari 2017, mayoritas dosen telah memiliki kualifikasi pendidikan S2, yakni sebanyak

163.537 orang atau sekitar 68% dari total 249.385 dosen perguruan tinggi umum maupun keagamaan (Gambar 11). Sedangkan untuk dosen berkualifikasi S3, jumlahnya baru mencapai sekitar 31.789 orang atau 13%. Pemerintah melalui Kemristekdikti, terus berupaya meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 melalui penyediaan beasiswa program Pascasarjana di dalam dan di luar negeri.



Gambar 10. Persentase Dosen menurut Kualifikasi Akademik
Sumber: diolah dari data forlap.ristekdikti.go.id, 12 Januari 2017

Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan. Parameter penting untuk mengukur kualitas institusi pendidikan adalah akreditasi kelebagaannya. Dari Gambar 12 dapat terlihat bahwa di tingkat satuan pendidikan jenjang SD, SMP maupun SMA, sudah banyak satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik. Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B mencapai lebih dari 60%.



Gambar 11. Akreditasi Satuan Pendidikan
Sumber: Dapodik Kemdikbud dan EMIS Kemenag

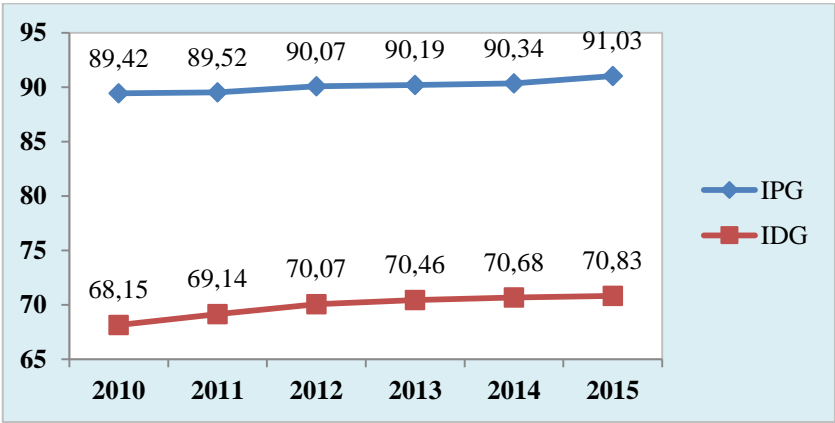
Sementara, akreditasi institusi pendidikan tinggi minimal B baru mencapai sekitar 34,6% atau sebanyak 387 dari 1.120 pendidikan tinggi yang sudah terakreditasi (Gambar 13). Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi nasional perlu terus didorong agar penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku.



Gambar 12. Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi
Sumber: diolah dari data forlap.ristekdikti.go.id, 11 Januari 2017

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Indonesia meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua indeks tersebut, walaupun kemajuan pencapaiannya kurang signifikan. Pada tahun 2014, IPG Indonesia adalah 90,34 dan naik menjadi 91,03 pada tahun 2015. Selain itu, disparitas pencapaian IPG antarprovinsi juga cukup tajam, capaian IPG tertinggi sebesar 94,74 untuk Sumatera Barat dan terendah 78,52 untuk Papua. Demikian pula dengan IDG, terdapat kenaikan dari 70,68 pada tahun 2014 menjadi 70,83 pada tahun 2015. Disparitas IDG antarprovinsi juga terlihat lebar, IDG Sulawesi Utara tertinggi dengan 79,82 dan Papua Barat terendah dengan pencapaian IDG sebesar 48,19.



Gambar 13. Trend IPG dan IDG Tahun 2010-2015

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan: (a) sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (4,9%); serta (b) sekitar 28,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.
2. Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun) mengalami penurunan dalam 8 tahun terakhir. Data tahun 2016

menunjukkan sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%. Penurunan yang lebih cepat terjadi pada usia perkawinan pertama kurang dari 15 tahun, yaitu menjadi 1,1% dari sekitar 3% pada periode yang sama (Susenas, BPS). Menurunnya prevalensi perkawinan usia anak tersebut meningkatkan median umur kawin pertama perempuan dari 19,8 tahun pada tahun 2007 menjadi 20,1 tahun pada 2012. Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS). Sejak tahun 2011, rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai sekitar 100, yang berarti partisipasi perempuan pada jenjang sekolah menengah sama dengan laki-laki. Selanjutnya, penurunan perkawinan usia anak dan peningkatan median usia kawin pertama perempuan menurunkan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun, dari 62 tahun 1997 menjadi 48 tahun 2012.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Pada Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di DPR baru mencapai 17,32% di DPD sekitar 25,8% (BPS 2015). Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah juga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselon I adalah 15,6% sedangkan di eselon II adalah 22,28% (BKN, 2016). Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam

meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan *Unmet Need* pelayanan KB telah menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari 94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016. Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016 (Susenas 2015-2016). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

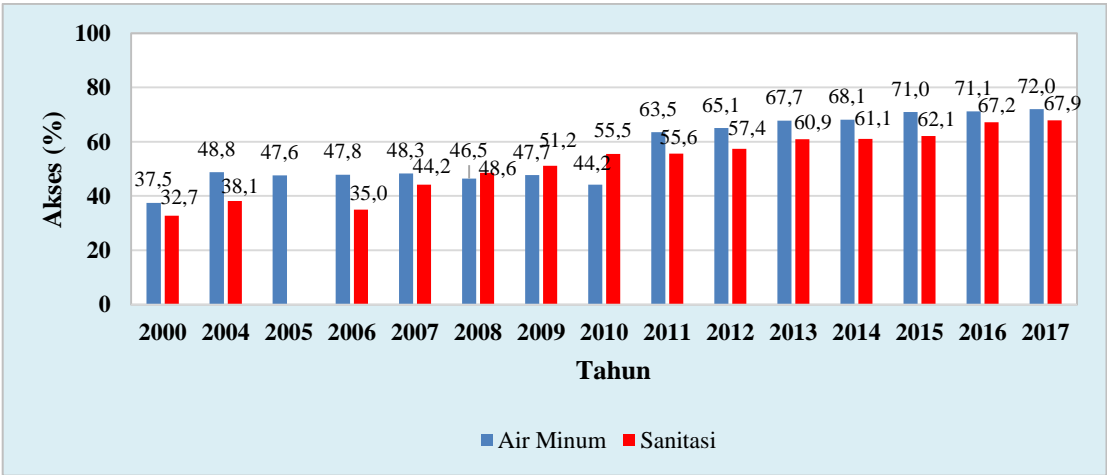
Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan infrastruktur antara lain diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan dan

keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Target yang harus dicapai adalah meningkatnya akses terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi semua.

Pada saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDGs), proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan adalah 70,97%. Angka ini melampaui target MDGs sebesar 68,87%. Namun demikian, capaian air minum untuk kawasan perdesaan adalah 60,58%, masih di bawah target MDGs sebesar 65,81%. Menurut Laporan yang sama, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sejak tahun 2000 sampai 2015 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan sampai tahun 2010 perkembangannya memperlihatkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2012 sampai 2015 terjadi perubahan pencapaian yang positif setelah dilakukan koreksi BPS terhadap definisi tentang akses air minum layak. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. Peningkatan akses sanitasi layak sejak tahun 2000 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.



Gambar 14. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2000 – 2017

Dalam rangka peningkatan ketahanan air, arah kebijakan pemerintah adalah memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistemnya melalui penanganan DAS termasuk penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air melalui

konservasi sumber daya air, mengurangi luasan kawasan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS, serta internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

Dalam upaya mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 21 waduk dan 3 diantaranya telah selesai, sehingga jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 adalah 208 buah. Untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya, sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah, rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 74 kawasan. Untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak, telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M³/detik dalam periode 2010-2014, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tersebut mencapai 171,44 M³/detik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain: (1) cakupan layanan sanitasi nasional yang masih rendah dan belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan); (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah; (3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih ada yang belum berkualitas

baik atau tidak diimplementasikan dengan baik; (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan (6) perlunya peningkatan manajemen asset (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019). Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free/ODF*), dari 500 desa pada tahun 2007 menjadi lebih dari 8.400 desa pada tahun 2017.

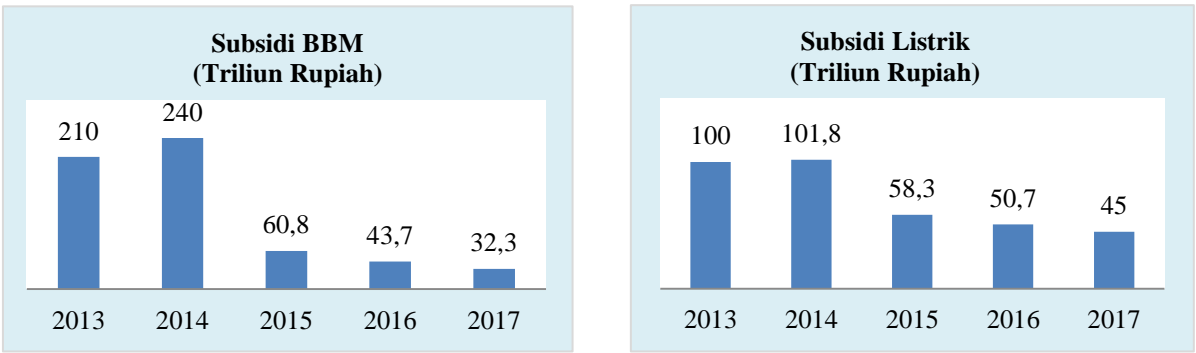
Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah domestik, dan parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

Pada akhir 2013, kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk PDAM adalah sebesar 36,83 M³/detik, sehingga tantangannya adalah memanfaatkan kapasitas air baku yang sudah tersedia. Permasalahan lainnya adalah lokasi potensi sumber-sumber air baku tidak selalu berdekatan dengan lokasi kawasan perkotaan dan permukiman, sehingga di beberapa daerah masih terjadi kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air telah banyak diterbitkan. Dengan telah dibatalkannya UU No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka PP No. 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, yang merupakan salah satu turunan UU No. 7/2004 juga turut batal demi hukum. Meskipun sudah terbit PP No 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, akan tetapi Undang-undang yang baru pengganti UU No 7/2004 masih tetap diperlukan.

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Salah satu wujud dari komitmen ini adalah dengan adanya target penurunan belanja subsidi energi dari 1,3% PDB pada tahun 2015 menjadi 0,6% PDB pada tahun 2019.



Gambar 15. Subsidi BBM dan Listrik
Sumber: Nota APBN, Kementerian Keuangan 2018

Kebutuhan Energi Nasional. Selama lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5-6% untuk energi primer dan 7-8% per tahun untuk energi final. Meningkatnya kebutuhan energi ini menuntut tersedianya sumberdaya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai. Selain itu, harga energi perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dengan tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 3. Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi

Indikator	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Target)	2018 (Target)	2019 (Target)
Produksi Sumberdaya Energi					
Minyak Bumi (ribu BM/hari)	786	820	803	800	580
Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.450	1.182	1.140	1.200	1.295
Batubara (juta ton)	461	434	461	406	400
Penggunaan Dalam Negeri (DMO)					
Gas Bumi (%)	55	59	62	61	62
Batubara (%)	20	27	21	32	60
Listrik					
Rasio Elektrifikasi (%)	88,3	91,16	95,35	95,15	96,61
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	918	956	1.012	1.129	1.200
Penambahan Kapasitas Pembangkit (Termasuk yang sedang Konstruksi 2014) (MW)	2.463,8	4,128,2	835,35	5.956	18.666
Infrastruktur Energi					
Kilang Minyak (unit)	Perpres Kilang dan Studi Pra FS	-	-	Pelaksanaan EPC dan PMC	1
FSRU/ Regasifikasi/ LNG Receiving Terminal (unit)	1	2	1	2	2
Jaringan Pipa Gas (kumulatif km)	9.169	15.330	15.364	15.046** *	18.322** *
SPBG (unit)*	18	21	25	22	15
Jaringan Gas Kota (SR)	20.363	-	-	306.000* 80.000**	374.000* 80.000**
Energi Baru Terbarukan					
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	5,8	7	15	15	16

* Termasuk BUMN

2018

** APBN

*** Target RPJMN 2015-2019

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah

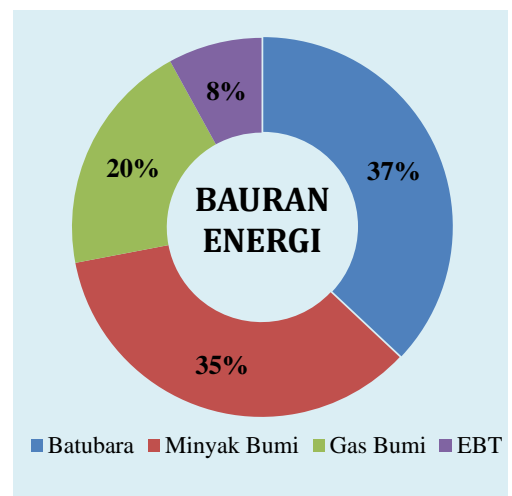
Produksi dan Penggunaan Energi. Produksi minyak bumi ditargetkan menurun dari 786 ribu BM/hari pada tahun 2015 menjadi 580 ribu BM/hari pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas akibat sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*). Sekitar 60% dari total lapangan minyak saat ini, terus mengalami penurunan tingkat produksinya (*natural depletion*). Mulai tahun 2013, asumsi makro pembangunan telah memasukkan produksi gas bumi. Meskipun relatif stabil, produksi gas bumi juga mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun 2015, produksi gas bumi mencapai 1.450

ribu barrel setara minyak (SBM) per hari, namun kemudian turun menjadi 1.182 ribu SBM per hari pada tahun 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan penggunaan gas masih dapat dipenuhi oleh produksi gas yang meningkat dari 56% pada tahun 2015 menjadi 59% pada tahun 2016. Peningkatan penggunaan gas tidak lepas dari peningkatan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas).

Produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Pada tahun 2010, produksi batubara mencapai 275 juta ton, dan pada tahun 2015 meningkat mencapai 461 juta ton. Pada kurun waktu yang sama, ekspor batubara juga meningkat dari 208 juta ton menjadi 375 juta ton, namun penggunaannya di dalam negeri hanya 20% dari total produksi batubara nasional. Kondisi ekspor batubara yang lebih besar daripada penggunaan dalam negeri akan mengganggu ketahanan energi untuk jangka panjang, untuk itu perlu meningkatkan porsi pemanfaatan batubara dalam negeri. Pemerintah mulai menerapkan peningkatan *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara dari 20% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2019 serta menurunkan target produksi batubara dari 461 juta ton ke 400 juta ton pada tahun 2019.

Bauran energi nasional minyak bumi tahun 2017 mencapai 35%, sedangkan energi baru dan terbarukan hanya sebesar 8%. Pada tahun 2025, energi baru terbarukan diharapkan meningkat menjadi 23% dan minyak bumi turun menjadi 25%.

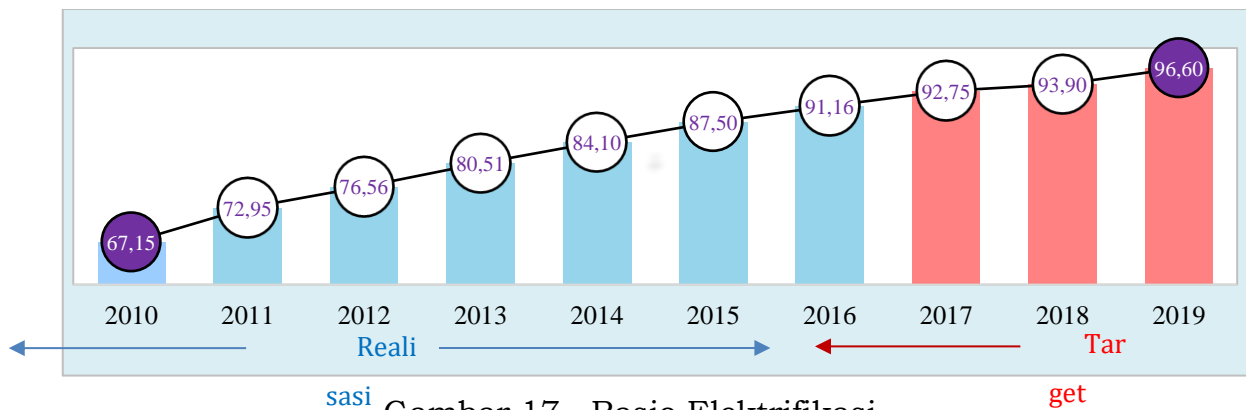
Energi Baru dan Terbarukan (EBT). EBT seperti panas bumi masih mengalami hambatan dalam pengembangan pembangkit listrik. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 29.000 MW, namun sampai saat ini energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik hanya sebesar 1.346 MW (4,8%). Dalam lima tahun terakhir, penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hanya mencapai 157 MW. Lapangan panas bumi umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan konservasi, sehingga menimbulkan konflik lahan dalam proses pengembangan. Saat ini, insentif dan instrumen



Gambar 16. Bauran Energi pada Tahun 2017
Sumber: Kebijakan Energi Nasional, 2014

fiskal telah diterapkan, baik berupa penyiapan dana eksplorasi terbatas guna memitigasi sebagian risiko eksplorasi, maupun *feed-in tariff*. Selain konflik lahan, pengembangan lapangan panas bumi juga mengalami hambatan dari perizinan, birokrasi dan non-teknis lainnya. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar terkendala pada harga indeks BBN yang lebih rendah dari harga pasar internasional. Demikian pula pengembangan EBT lain juga memerlukan subsidi harga untuk mendorong produksi dan pasokan EBT.

Aksesibilitas Listrik masih mengalami ketimpangan. Beberapa daerah masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi di bawah 60% pada tahun 2017, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 59,17% dan Provinsi Papua sebesar 48,74%. Tingkat layanan ketenagalistrikan yang masih relatif rendah juga ditunjukkan dengan besaran konsumsi tenaga listrik per kapita sebesar 918 kWh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 176,47 ribu GWh pada tahun 2015.



Gambar 17. Rasio Elektrifikasi
Sumber: Evaluasi Paruh Waktu RPJMN Tahun 2015-2019

Intensitas dan efisiensi energi dalam proses penyediaan energi masih tinggi. Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah, dan intensitas energi final nilainya sekitar 325 SBM/miliar rupiah (Buku II RPJMN 2015-2019 halaman 10-18). Perbedaan yang besar antara intensitas energi primer dan energi final menunjukkan adanya inefisiensi dalam proses konversi energi. Selain itu, *losses* selama transmisi dan distribusi energi, terutama pada listrik masih tinggi. *Capacity Factor* dari seluruh jenis pembangkit listrik sekitar 52%. *Losses* dan *own use* selama transmisi dan distribusi listrik ke konsumen cukup bervariasi antara 9-11% (Statistik PT. PLN Tahun 2016). Di samping inefisiensi dalam penyediaan listrik, inefisiensi juga terjadi dalam proses konversi minyak mentah ke BBM. Rata-rata *refinery*

fuel dan *losses* kilang minyak nasional saat ini mencapai 84 ribu bph atau sekitar 8,1% terhadap produksi kilang minyak sedangkan efisiensi proses konversi gas alam ke LNG di Kilang LNG rata-rata 84%.

Penghematan konsumsi energi masih rendah walaupun mempunyai potensi penghematan mencapai 10-15% dari total konsumsi energi (Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019). Audit energi telah dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan energi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi untuk industri manufaktur strategis, seperti industri baja, aluminium, pulp/kertas, pertambangan dan tekstil.

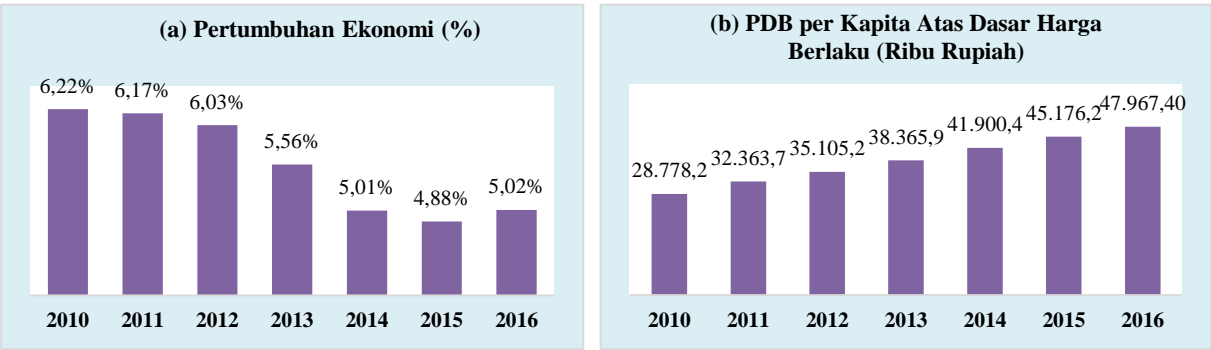
Permasalahan utama jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan adalah akses gas bumi untuk rumah tangga dan akses tenaga listrik. Di wilayah tengah dan timur Indonesia akses tersebut masih terbatas dan menunjukkan ketimpangan. Demikian pula dalam hal penyediaan infrastruktur gas bumi khususnya untuk rumah tangga, industri dan transportasi masih relatif belum merata dan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan atau regional tertentu. Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) masih tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya EBT dalam bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses terhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih terdapat rumah tangga yang belum mendapat listrik; (4) harga energi terbarukan belum kompetitif dan subsidi belum tepat sasaran; (5) cadangan energi nasional terus menurun; dan (6) sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan.

Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15%, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah: (1) kurangnya insentif kepada pelaku industri untuk melakukan penghematan energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti *project financing* dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan efisiensi energi dari lembaga keuangan belum tersedia; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi; dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan

pemerintah daerah dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.

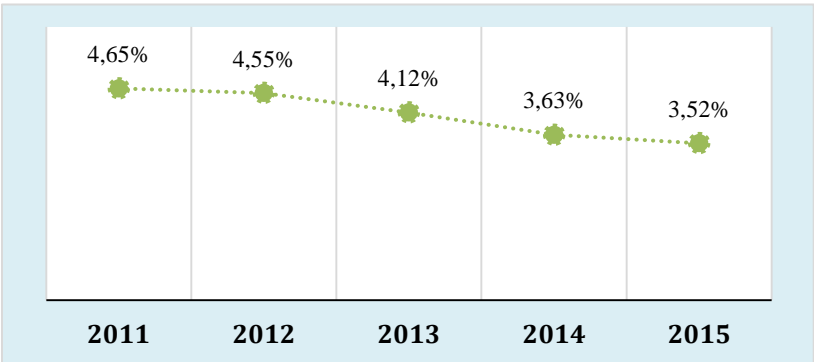
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Perkembangan Ekonomi Makro. Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa triwulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada 2016. Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, berkurangnya defisit transaksi berjalan dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD). Demikian pula PDB per kapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDB per kapita Indonesia sebesar 28,77 juta rupiah dan terus meningkat sampai mencapai 47,96 juta rupiah pada tahun 2016.



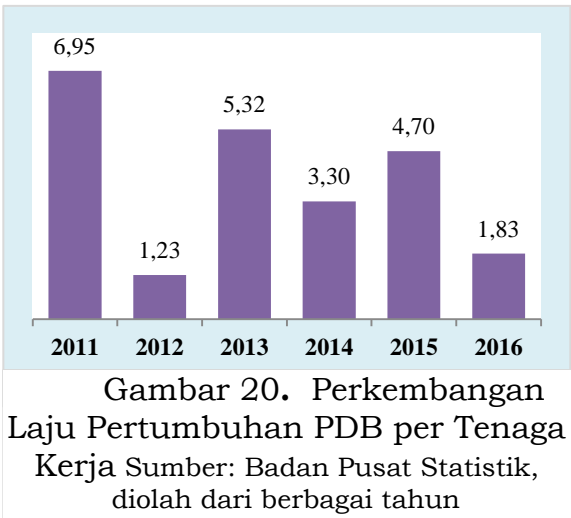
Gambar 18. (a) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2016 dan (b) PDB per Kapita ADHB
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

Walaupun terjadi peningkatan PDB per kapita setiap tahunnya, namun kondisi ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan PDB per kapita tahun 2015 terus mengalami penurunan 1,13%



Gambar 19. Laju Pertumbuhan PDB per Kapita
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

jika dibandingkan dengan tahun 2011.



Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang dilihat dari PDB per tenaga kerja menunjukkan arah yang serupa dengan laju pertumbuhan PDB per kapita yaitu tetap tumbuh namun cenderung stagnan dan melambat.

Laju pertumbuhan PDB menurut sektor dari periode 1990-2000 ke periode 2000-2016 memiliki nilai yang bervariasi. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian dan jasa menunjukkan peningkatan yang nyata, sedangkan terjadi penurunan laju pertumbuhan bagi sektor industri dan manufaktur.

Tabel 4. Persentase Pertumbuhan PDB Rata-rata per Tahun menurut Sektor

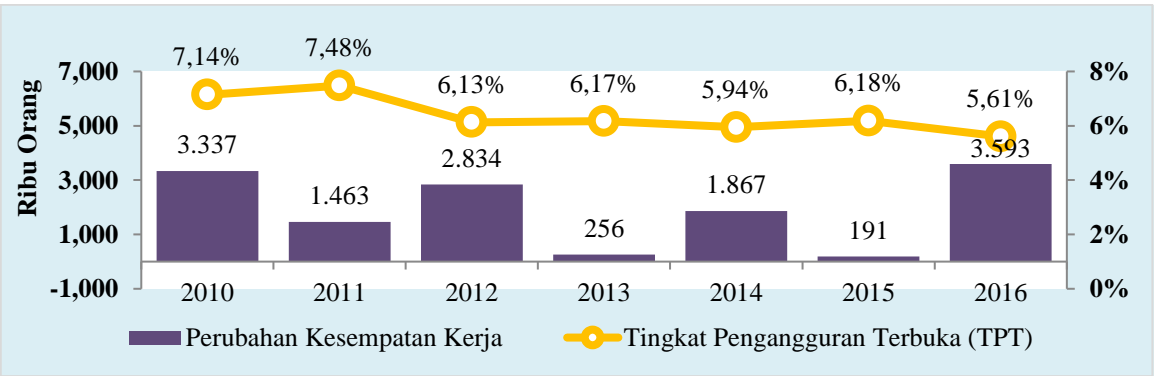
PDB Sektor	Periode	Pertumbuhan Rata-rata (%)
PDB Nasional	1990-2000	3,9
	2000-2016	5,5
Pertanian	1990-2000	2,1
	2000-2016	3,7
Industri	1990-2000	5,3
	2000-2016	4,4
Manufaktur	1990-2000	6,7
	2000-2016	4,6
Jasa	1990-2000	3,4
	2000-2016	7,2

Sumber: *World Development Indicator*, diolah dari berbagai tahun

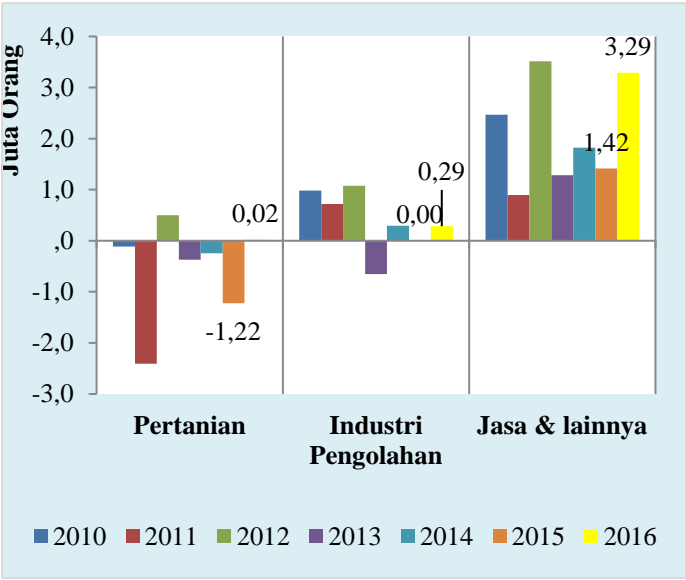
Secara umum Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat dan meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama sehingga menghambat aktivitas perdagangan global;
2. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah;
3. Belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kondisi peningkatan rasio penerimaan perpajakan;
4. Pengaruh cuaca ekstrim pada tahun 2016 yang menjadi penyebab utama turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura dan mundurnya musim panen;
5. Produktivitas nasional yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2016 berdampak pada terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61% pada Agustus 2016. Penurunan tersebut sejalan dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta pekerja. Walaupun demikian, angka TPT pada tahun 2016 masih belum memenuhi sasaran kuantitatif pada RKP 2016, yaitu sekitar 5,2-5,5%.



Gambar 21. Perkembangan Tambahan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2016 (Agustus)
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

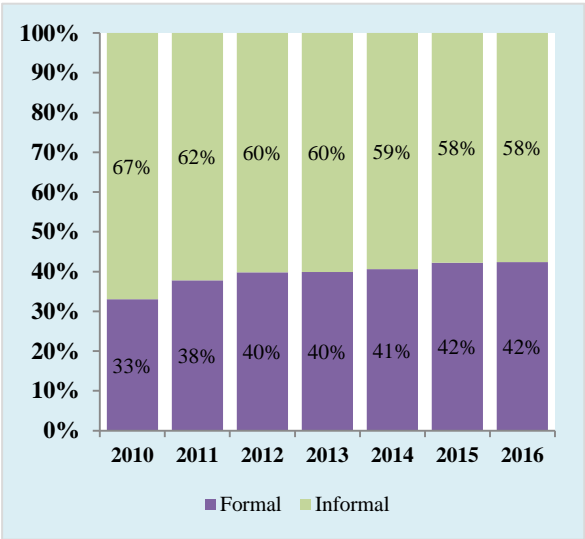


Gambar 22. Tambahan Pekerja Berdasarkan Tiga Sektor Lapangan Kerja
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari

sekitar 191.173 ribu. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai 3,29 juta pekerja atau sebesar 91,4%. Kemudian pada sektor industri hanya menyerap sekitar 7,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016.

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Kerentanan dan ketidakpastian kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, masih perlu upaya besar untuk mencapai target TPT sesuai RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,0-5,0%. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan rendahnya penambahan kesempatan kerja yang jauh dari target 2 juta per tahun, yaitu hanya



Gambar 23. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal (Agustus)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

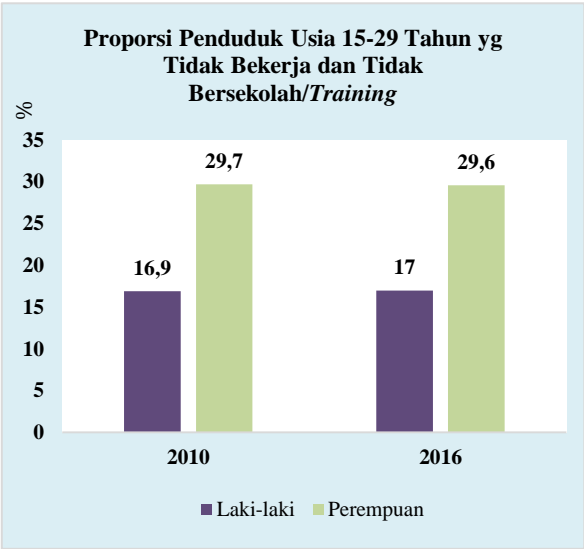
Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari 40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja informal juga menurun dari 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja informal mencapai 49%

berada pada sektor pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada sektor formal. Meningkatnya persentase tenaga kerja formal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) pada tahun 2016 masih relatif besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar 25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Tabel 5 menunjukkan perkembangan upah yang diperoleh pekerja berdasarkan sektor, apabila dilihat pada indeks upah riil. Pada sektor pertambangan non-migas terjadi penurunan upah riil pada tahun 2014, hal ini bersamaan dengan momentum lemahnya harga komoditas pertambangan di pasar global beberapa tahun terakhir ini. Namun, lain halnya pada sektor pariwisata, meningkatnya promosi pariwisata Indonesia mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja sektor perhotelan dan upah riil.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi konflik hubungan industrial termasuk demonstrasi tuntutan pekerja/ buruh yang erat kaitannya dengan pengupahan atau kenaikan upah minimum yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, perkembangan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial masih bersifat fluktuatif. Terjadi penurunan jumlah kasus dari 2.628 kasus pada tahun 2014 menjadi 1.680 kasus pada tahun 2016.



Gambar 24. Proporsi Penduduk Muda NEET
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

Tabel 5. Indeks Upah Riil Pekerja Produksi/Pelaksana Lebih Rendah dari Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan

Sektor	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	100	105,84	113,48
Hotel	100	107,95	115,55
Pertambangan Non-migas	100	102,34	99,91
Perdagangan	100	104,45	114,58

Sektor	2012	2013	2014
Peternakan & Perikanan	100	104,11	112,04

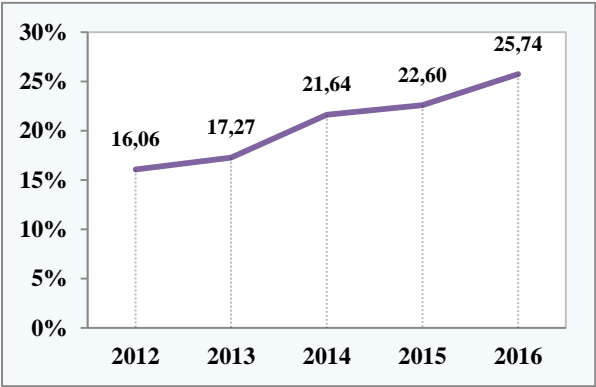
Sumber : Statistik Upah, Badan Pusat Statistik (2015)

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

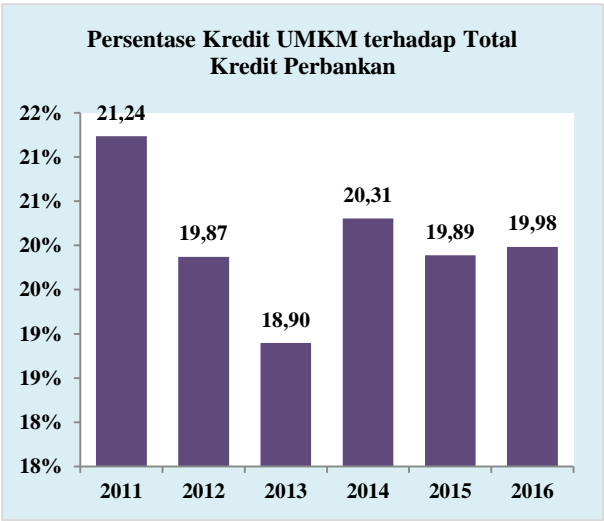
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) non-pertanian mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, yaitu sebesar 76,28% dengan tiga wilayah penyebaran yang paling besar adalah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

Mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi, khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat



Gambar 25. Perkembangan Akses UMKM ke Layanan Keuangan
Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (2017)

mendorong keberlanjutan UMKM. Salah satu upaya dalam mendorong UMKM adalah memastikan terwujudnya kemudahan dalam mengakses pembiayaan atau permodalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan, sejak tahun 2007 Pemerintah melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total penyaluran KUR tahun 2017, sebaran tertinggi adalah Pulau Jawa diikuti Pulau Sumatera. Sektor terbesar yang mengakses KUR adalah sektor perdagangan sebesar 57%, selanjutnya sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 23%. Sumber pembiayaan lain bagi UMKM adalah penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Untuk mempercepat peningkatan daya saing dan kemandirian UMKM, pemerintah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai wadah bagi mereka berkonsultasi dalam mengembangkan usahanya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah PLUT yang telah dibangun sebanyak 51 unit di 31 provinsi.



Gambar 26. Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan
Sumber: Perkembangan Baki Debet

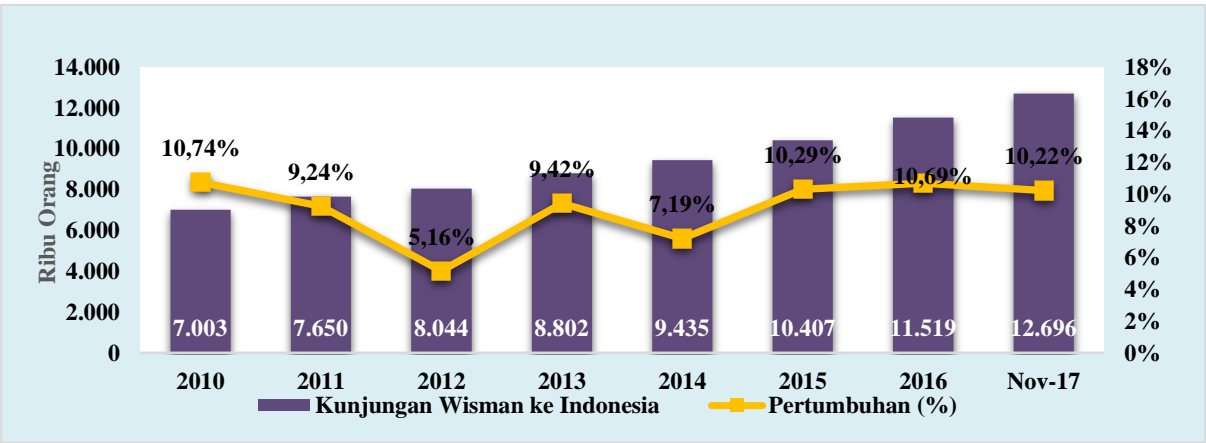
Penyaluran kredit UMKM pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015. Posisi kredit UMKM pada tahun 2016 mencapai Rp 857 triliun atau 19,98% dari total kredit perbankan nasional. Kredit UMKM pada 2016 tumbuh sebesar 8,4% atau tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 8,0%. Peningkatan kredit UMKM tersebut didorong oleh penurunan suku bunga kredit, dan peningkatan penyaluran KUR.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan pada akses pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan

teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya :

- 1. Regulasi dan kebijakan yang belum efektif memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM;
- 2. Rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Peningkatan Pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan kontribusinya dalam perekonomian dan mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendorong pengembangan 10 destinasi wisata prioritas yaitu: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Pulau Morotai. Pengembangan 10 destinasi pariwisata tersebut diperkuat dengan percepatan pembangunan aksesibilitas (infrastruktur konektivitas), amenitas dan atraksi, serta didukung dengan pembentukan lembaga pengelola destinasi seperti Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Peraturan Presiden No. 49/2016) dan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Peraturan Presiden No. 46/2017). Percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pembangunan internasional, terutama dalam pengembangan *integrated tourism masterplan* untuk setiap destinasi prioritas dan percepatan pembangunan infrastruktur.

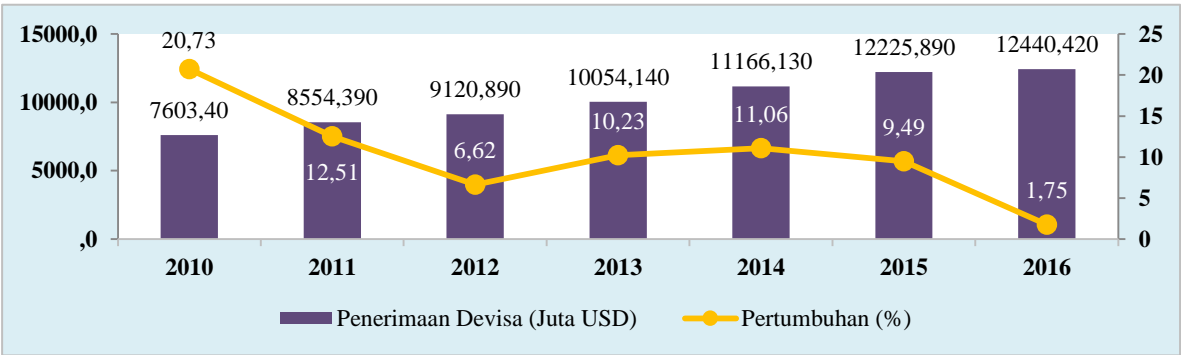


Gambar 27. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Sumber: Statistik *Passenger Exit Survey*, Kementerian Pariwisata (2016)

Perkembangan pariwisata dalam lima tahun terakhir ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan rata-rata sebesar 9,5% untuk

wisatawan mancanegara dan 2,0% untuk wisatawan nusantara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara bahkan mencapai 2 digit dalam tiga tahun terakhir (Gambar 28) yang menjadikan pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Peningkatan aktivitas pariwisata juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata sehingga pada tahun 2016 mencapai sekitar 12,27 juta orang, atau 10,37% dari total tenaga kerja nasional. Serapan tenaga kerja sektor pariwisata tersebut meningkat sebesar 1,34% dibandingkan dengan serapan tenaga kerja pada tahun 2015. Pertumbuhan investasi sektor pariwisata juga terus meningkat dan pada triwulan I tahun 2017 tercatat sebesar USD 525,94 juta atau meningkat 95,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016. Secara nominal, devisa yang disumbangkan sektor pariwisata terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan devisa pariwisata cenderung mengalami penurunan. Data *UNWTO Tourism Highlights 2017* juga menunjukkan bahwa penerimaan devisa pariwisata Indonesia hanya setengah dari Malaysia dan seperempat dari Thailand.



Gambar 28. Perkembangan Devisa Pariwisata Indonesia Tahun 2010-2016 (Juta USD)

Sumber: Statistik *Passenger Exit Survey*, Kementerian Pariwisata (2016)

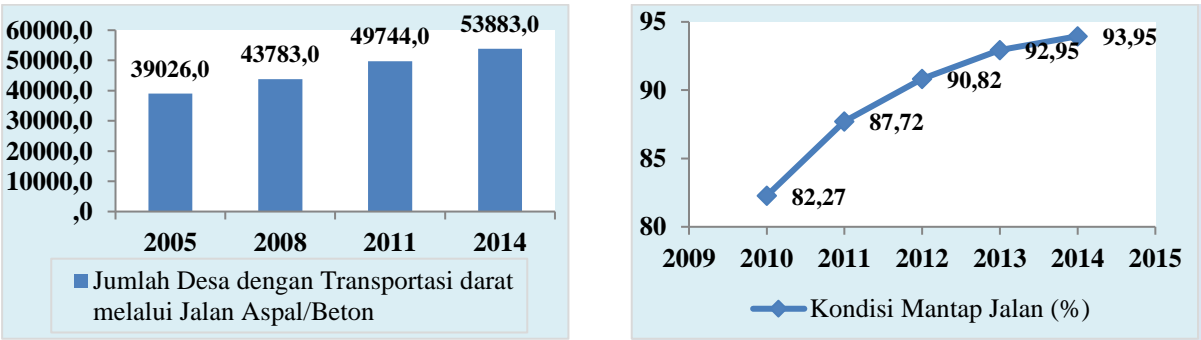
Perkembangan sektor pariwisata secara umum masih menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dalam lima tahun terakhir belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara (peningkatan devisa). Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat. Kedua tantangan ini membutuhkan strategi pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh (i) kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan

layanan wisata, serta (ii) pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan.

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

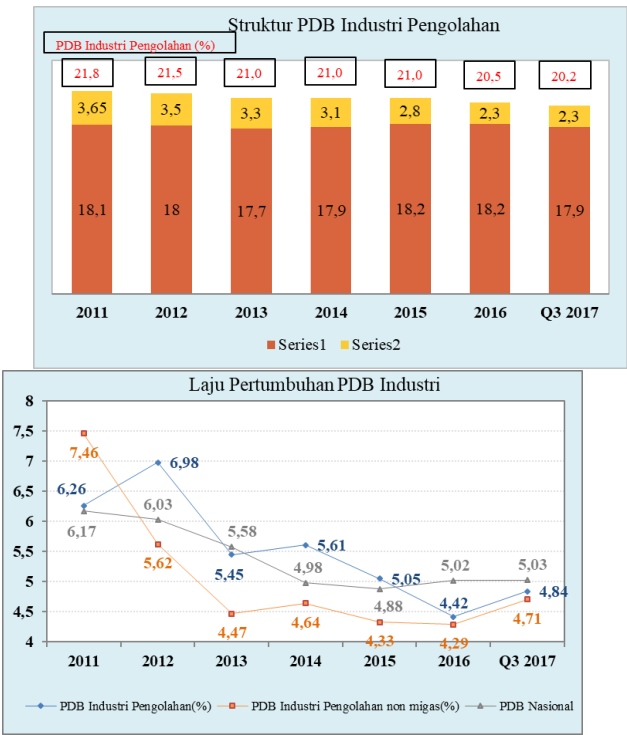
Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Data Statistik Potensi Desa Indonesia (Gambar 30) menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa dengan akses darat yang menggunakan jalan layak (aspal/beton). Kondisi mantap jalan nasional juga terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mencapai 98% pada tahun 2019.

Jumlah penumpang yang menggunakan kereta api, kapal laut dan angkutan udara, serta volume pengangkutan barang dengan menggunakan moda transportasi udara dan kereta api menunjukkan kecenderungan peningkatan (BPS, 2017). Pada tahun 2010, jumlah penumpang yang diangkut sebesar 58,3 juta orang dan barang sebesar 554,6 juta ton dan meningkat menjadi 86,2 juta orang dan 79,5 juta ton pada tahun 2015. Sementara itu penggunaan moda transportasi lain masih belum optimal. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur terutama dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan terjangkau untuk mendukung penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas dan kinerja sektor-sektor produktif. Percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kepulauan kecil, kawasan terdepan dan kawasan terluar Indonesia.



Gambar 29. Jumlah Desa dengan Akses Jalan dan Kondisi Mantap Jalan Nasional
Sumber: BPS dan Kementerian PUPR (2015)

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan, akses pada bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam sehingga mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Kecenderungan kontribusi dan pertumbuhan PDB pengolahan dapat dilihat pada Gambar 31. Pertumbuhan industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mencapai 17,0 juta orang, atau meningkat sebesar 9,5% dari periode yang sama di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan meningkat sebesar 26,9%.



Gambar 30. Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari Industri skala Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil dan Statistik Industri Besar dan Sedang (BPS, 2015), pada periode 2011 – 2015, nilai tambah IKM terhadap PDB industri memiliki nilai terendah sebesar 1,09% pada tahun 2011, dan nilai tertinggi sebesar 6,28% pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 3,74%. Fluktuasi kinerja IKM ini salah satunya dipengaruhi oleh terbatasnya akses ke

pembiayaan formal karena kendala penyediaan agunan dan kelayakan usaha. Pemerintah mengupayakan penanganan atas kendala tersebut melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan realisasi per 31 Oktober 2017 sebesar Rp.79,6 triliun, termasuk Rp.4,9 triliun (6%) disalurkan untuk IKM (Kemenko Perekonomian, 2017). Volume penyaluran KUR untuk IKM sampai bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp.3,9 triliun (4% dari total KUR). Peningkatan penyaluran KUR juga diikuti dengan peningkatan jumlah akun kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk di sektor industri, dari 8,4 juta rekening pada tahun 2010 meningkat menjadi 15,4 juta rekening pada tahun 2016 (Bank Indonesia, 2016). Berdasarkan data tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan IKM adalah upaya mendorong peningkatan kinerja IKM melalui optimalisasi penyerapan kredit untuk sektor produksi/industri.

Industri nasional juga telah menerapkan praktik produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Data Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan rasio emisi terhadap nilai tambah industri dari 0,13% pada tahun 2010 menjadi 0,12% pada tahun 2014. Selain itu selama periode 2010 hingga 2014 terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan emisi CO₂ per kapita dari -5,21% pada tahun 2010 menjadi -6,46% pada tahun 2014. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi agar penurunan emisi gas rumah kaca terus berkelanjutan adalah dengan menyesuaikan seluruh teknologi industri/produksi, transportasi dan rumah tangga agar efisien dan ramah lingkungan terutama di sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah.

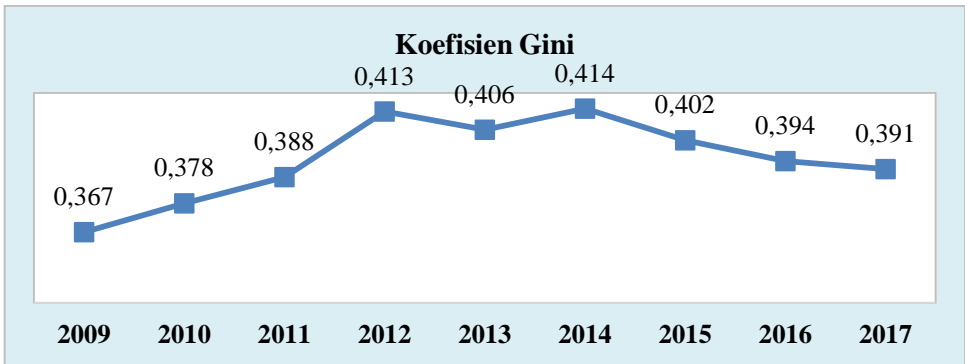
Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi. Data dari IMF dan Bank Dunia dalam *R&D Magazine* menunjukkan bahwa proporsi anggaran Litbang terhadap PDB di Indonesia meningkat dari 0,08% pada tahun 2013 menjadi 0,3% pada tahun 2016. Kinerja ini diikuti dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia dari ranking ke-51 pada tahun 2012 menjadi ranking ke-35 pada tahun 2017 (WEF, 2017). Walaupun demikian, proporsi anggaran Litbang masih kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan Iptek dan inovasi yang didukung alokasi anggaran yang memadai melalui pelibatan swasta

dalam pendanaan Litbang, serta adanya keterkaitan antara SDM berkualitas, Litbang dan kebutuhan pengembangan industri.

Penguasaan Iptek juga ditunjukkan oleh penguasaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikatornya yaitu proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Selama periode 2009 - 2014, jumlah penduduk yang terlayani jaringan pita lebar meningkat dari 1,86% menjadi 6,66% (Kemenkominfo, 2015). Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler juga terus meningkat dari 38,5% pada tahun 2010 menjadi 58,3% pada tahun 2016 (Susenas, 2016). Indonesia tercatat sebagai negara urutan ke-8 di dunia dengan penduduk terbanyak pengguna internet (*Internet World Statistic*). Kondisi ini didukung oleh perluasan jumlah kabupaten/kota yang dijangkau *backbone* serat optik pita lebar nasional hingga mencapai 72% pada tahun 2014 (Kemenkominfo, 2015). Pada tahun 2019, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet ditargetkan mencapai 100% di wilayah *Universal Service Obligation* (USO). Tantangan yang dihadapi dalam akses teknologi dan informasi adalah peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing industri, serta perluasan akses ke pasar.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

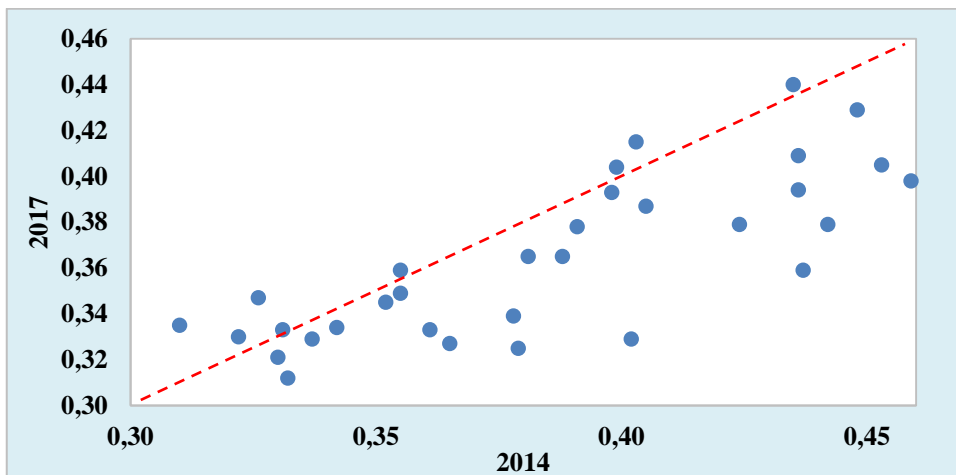
Dilihat dari Koefisien Gini, kesenjangan di Indonesia cenderung turun dalam dua tahun terakhir. Koefisien Gini terus meningkat dari sebesar 0,367 pada tahun 2009 menjadi 0,414 pada tahun 2014. Koefisien Gini pada tahun 2017 berhasil diturunkan menjadi 0,391 (Susenas, September 2017). Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan kesenjangan yang merupakan prioritas pembangunan pada tahun 2016-2017.



Gambar 31. Tren Koefisien Gini Tahun 2009-2017
Sumber: BPS, 2009-2017

Untuk mencapai target Koefisien Gini sebesar 0,36 pada tahun 2019 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi di daerah-daerah terpencil.

Kesenjangan tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kesenjangan di sebagian besar provinsi terjadi dalam kurun waktu yang sama dengan periode kenaikan Koefisien Gini nasional yaitu 2009-2012. Sementara itu, pada periode 2013-2017, sebagian provinsi mengalami penurunan yang cukup baik. Namun, 8 provinsi mengalami kenaikan Koefisien Gini yaitu provinsi Sumatera Utara, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

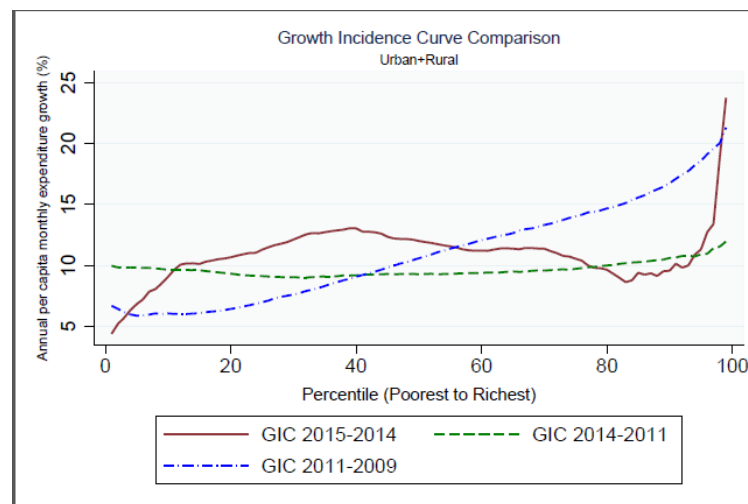


Gambar 32. Koefisien Gini di Provinsi Tahun 2014 dan 2017
Sumber: BPS, 2014 dan 2017

Ketimpangan masih terjadi di Indonesia. Ketimpangan disebabkan adanya pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk tingkat ekonomi atas relatif lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluaran penduduk miskin terutama pada periode 2009-2011. *Growth Incidence Curve* (GIC adalah kurva yang secara visual memetakan pertumbuhan pengeluaran per kapita untuk setiap kelompok penduduk yang berada pada persentil terbawah (paling miskin) hingga persentil teratas (paling sejahtera). menunjukkan bahwa pada periode tersebut tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk pada persentil atas jauh lebih tinggi daripada penduduk pada 20-40 persentil

terbawah. Kurva GIC pada periode 2011-2014 menunjukkan distribusi pertumbuhan yang lebih merata. Sedangkan pada periode 2014-2015, GIC memperlihatkan pergerakan pertumbuhan pengeluaran per kapita pada persentil bawah dan menengah, walaupun pertumbuhan penduduk persentil paling atas tetap jauh lebih tinggi.

Perbedaan pertumbuhan yang cukup signifikan antarkelompok pendapatan disebabkan oleh tidak meratanya akses dan kualitas layanan pelayanan dasar sebagai penyebab ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*), keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, serta belum optimalnya sistem perpajakan di Indonesia dalam membantu mewujudkan kebijakan redistribusi yang adil.



Gambar 33. *Growth Incidence Curve* Periode 2009-2015
Sumber: BPS, 2009-2015

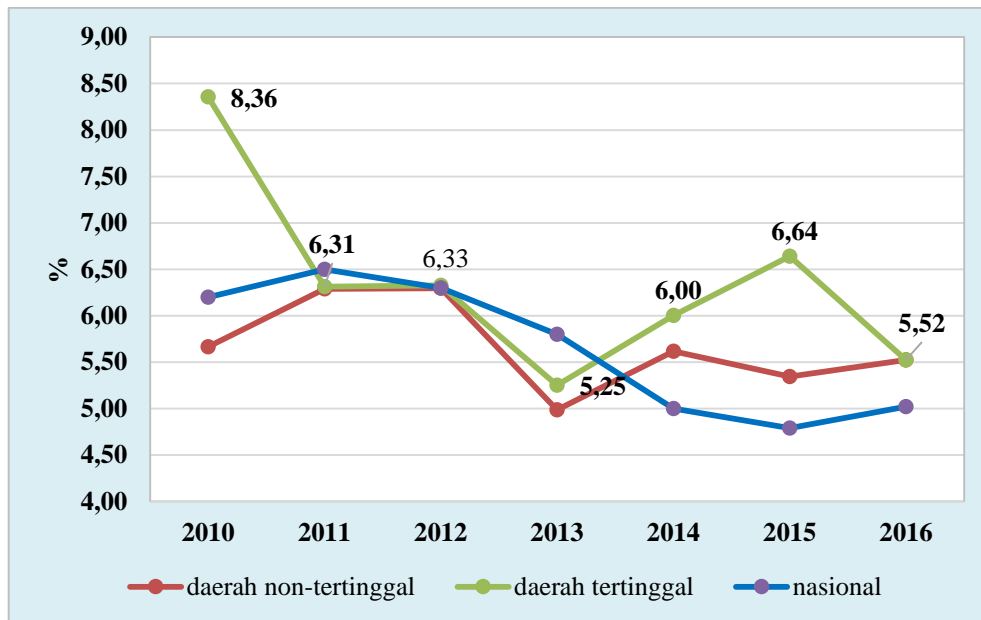
Selain kesenjangan antarkelompok pendapatan, Indonesia juga menghadapi masalah kesenjangan antarwilayah. Kesenjangan antarwilayah ini meliputi kesenjangan antara desa dan kota, wilayah pinggiran dan non-pinggiran, Jawa dan luar Jawa, serta Kawasan Barat dan Timur Indonesia. RPJMN 2015-2019 memberikan amanat untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan terluar.

Sejak tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria dan jumlah daerah tertinggal setiap lima tahun sekali. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Beberapa kriteria

yang digunakan untuk menetapkan daerah tertinggal adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang semuanya itu diukur berdasarkan indikator dan sub-indikator.

Jumlah daerah tertinggal di Indonesia menurun selama periode 2004-2014. Berdasarkan Perpres No. 131/2015 jumlah daerah tertinggal pada periode 2015-2019 sebanyak 122 kabupaten. Jumlah ini berkurang dari 199 kabupaten pada periode 2004-2009 dan 183 kabupaten pada periode 2010-2014. Sebagian besar dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang ditetapkan pada periode 2015-2019 berada di luar Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Terdapat 6 kabupaten yang ada di pulau Jawa; 4 kabupaten di provinsi Jawa Timur dan 2 kabupaten di provinsi Banten. Adapun pada tahun 2018, pembangunan daerah tertinggal akan difokuskan pada 80 kabupaten tertinggal.

Selama enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami fluktuasi. Pada periode 2010-2016 pertumbuhan angka rata-rata daerah tertinggal selalu melampaui angka rata-rata daerah non tertinggal, sedangkan pada tahun 2016 rata-rata pertumbuhan daerah tertinggal mengalami penurunan meskipun rata-rata nasional dan daerah non-tertinggal mengalami kenaikan. Salah satu faktor utama perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah ketergantungan perekonomiannya pada sektor primer dan sekunder sehingga adanya penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini berpengaruh terhadap perlambatan tersebut.

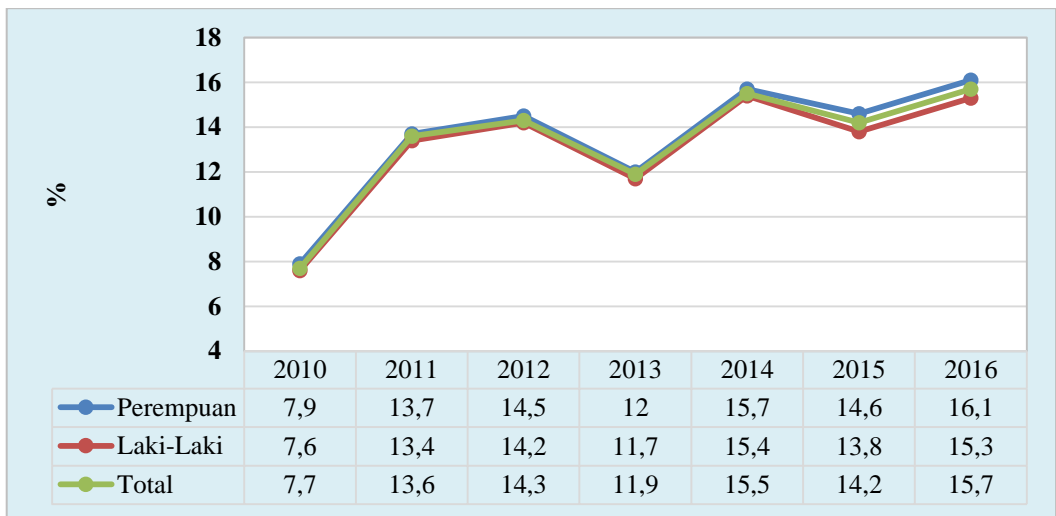


Gambar 34. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BPS, 2010-2016

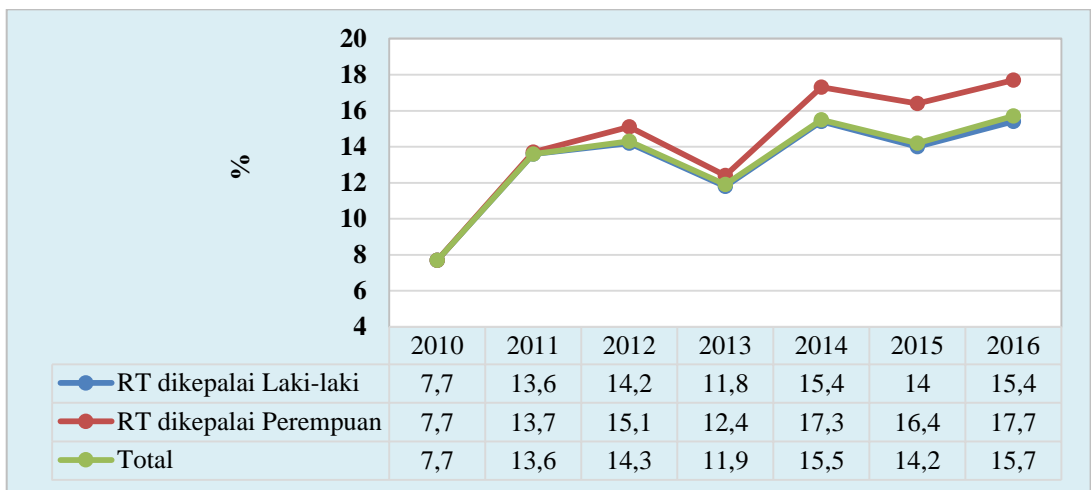
Belum optimalnya beberapa indikator keluaran daerah tertinggal di atas tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Kendala dalam hal perencanaan dan koordinasi antara lain belum optimalnya kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal adalah belum adanya insentif untuk sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar, rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan tidak memiliki perbedaan signifikan (Data pendapatan didekati dengan data pengeluaran konsumsi yang ada di SUSENAS). Pada periode 2010-2016 proporsi penduduk perempuan dan laki-laki yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan tidak memperlihatkan perbedaan signifikan (Gambar 36). Meskipun demikian, jika dilihat menurut jenis kelamin kepala keluarga, proporsi kepala keluarga perempuan lebih besar daripada kepala keluarga laki-laki (Gambar 37). Kesenjangan antara rumah

tangga yang dikepalai perempuan dan yang dikepalai laki-laki ini juga cenderung semakin meningkat sejak tahun 2014.



Gambar 35. Proporsi Penduduk di Bawah 50 persen Median Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Kelamin (Sumber: BPS, 2010-2016)

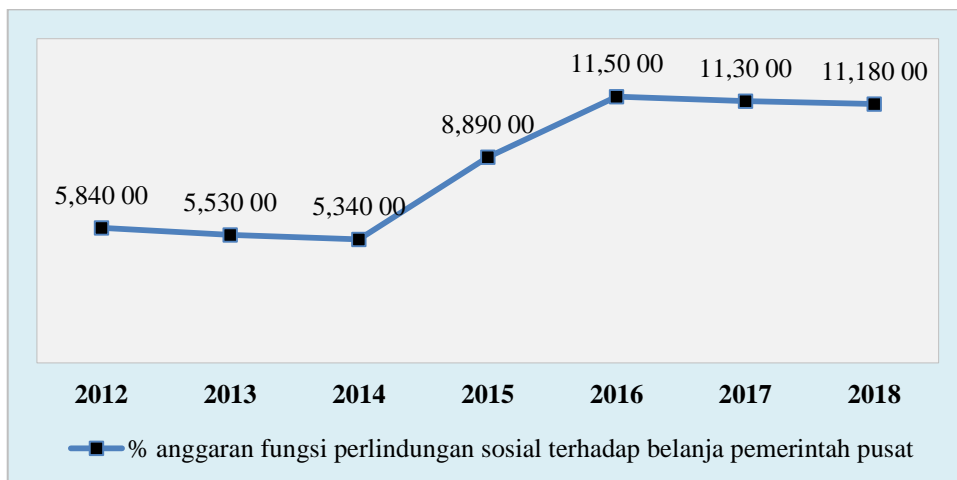


Gambar 36. Proporsi Penduduk di Bawah 50 persen Median Pendapatan Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (Sumber: BPS, 2010-2016)

Kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif adalah upaya yang sedang dibangun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam RPJMN 2015-2019, upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan strukturisasi program bantuan sosial yang terintegrasi. Dilihat dari kebijakan fiskal yang sudah ada, pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial sebagai bentuk afirmasi pencapaian kesetaraan yang lebih besar pada beberapa tahun terakhir (Gambar 38). Selama periode 2016-2018, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial berkisar 11% dari total belanja pemerintah pusat,

meningkat dari kisaran 5-6% dari total anggaran pada periode 2012-2014 (APBN 2012-2014, APBN-P 2016, APBN-P 2017, APBN 2018).

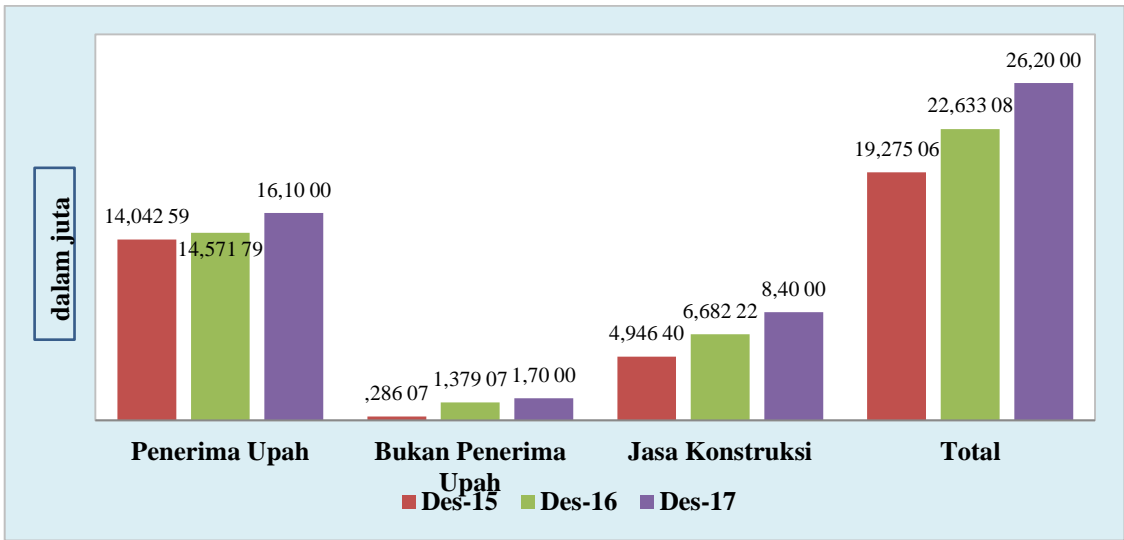
Walaupun anggaran fungsi perlindungan sosial meningkat setiap tahun, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya mengurangi ketimpangan, penanggulangan kemiskinan dan kerentanan. Tantangan utama tersebut adalah (1) pemutakhiran data penerima program yang belum sesuai dengan kondisi dinamis di lapangan, dan (2) keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan yang mengawal program-program ini seperti pendamping/fasilitator, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang terdidik, terlatih, serta memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan tantangan di daerah.



Gambar 37. Perkembangan Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012-2018

Sumber: APBN 2012-2014, APBN-P 2016, APBN-P 2017, APBN 2018

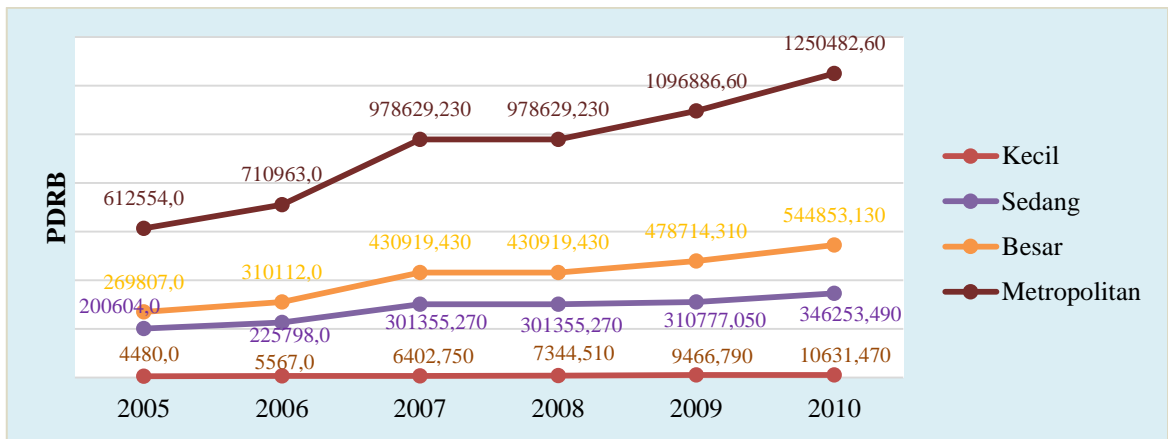
Kepesertaan aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meningkat dalam periode 2015-2017. Jumlah peserta aktif Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan meningkat dari 19,3 juta orang pada tahun 2015 menjadi 26,2 juta orang per Desember 2017. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini tidak luput dari dua kendala utama yaitu perluasan peserta pekerja dari sektor informal yang merupakan porsi terbesar (sekitar 67%) ketenagakerjaan di Indonesia, dan penegakan sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta.



Gambar 38. Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2015-2017

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan dicegah, lebih dari setengah populasi penduduk di dunia telah tinggal di perkotaan. BPS mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 54% pada tahun 2015 dan akan bertambah menjadi 67% pada tahun 2035 (Bappenas, BPS, United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS). Dalam periode tahun 1970-2012, setiap pertambahan 1% urbanisasi di Indonesia, akan menambah 2% PDB dan 4% PDB per kapita (WB, 2014) dan belum sebaik negara-negara di Asia lainnya (7% di Thailand, 8% di Vietnam, 10% di Tiongkok, dan 13% di India) (Bank Dunia. 2016. *Kisah Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia). Perekonomian Indonesia ditopang oleh aktivitas ekonomi di perkotaan yang ditunjukkan dengan kontribusi PDB perkotaan mencapai 40% pada periode 2005-2010 (Bappenas, 2014). Dari 40% kontribusi PDRB perkotaan, PDRB dari metropolitan menyumbang porsi yang paling besar, yakni berkisar 56-58% (Gambar 40). Urbanisasi dan pembangunan perkotaan merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai pada tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.



Gambar 39. Kontribusi PDRB Perkotaan

Sumber: Bappenas, 2014

Hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk di perkotaan. Di Indonesia, belum semua penduduk dapat menghuni hunian layak yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan dasar. Sesuai dengan Tujuan 11, selain menyediakan hunian layak dan terjangkau, infrastruktur perkotaan yang menjadi perhatian antara lain air minum dan sanitasi (Target 11.1), transportasi (Target 11.2), warisan budaya (Target 11.4), dan ruang publik (Target 11.7). Di bidang perumahan dan permukiman, masih banyak rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta kondisi bangunan yang tidak layak dan tanpa kepastian bermukim. Di bidang transportasi, proporsi pengguna angkutan umum di kota masih sangat rendah. Di bidang warisan budaya, upaya membangun kota pusaka harus diperluas.

Tantangan yang dihadapi: (1) penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah; (2) infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh; (3) penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan; (4) terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (5) konektivitas dalam kota dan antar kota yang masih belum memadai; (6) terbatasnya sumber daya untuk mewujudkan kota pusaka; dan (7) belum optimalnya upaya untuk menyediakan RTH/ruang publik di perkotaan hingga memenuhi 30% dari total luas wilayah.

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat semakin banyaknya penduduk perkotaan. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan

keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Target 11.5 dan 11.6). Dalam kurun waktu 2009-2014 (Tabel 6) kualitas lingkungan hidup meningkat, namun kualitas udara semakin memburuk yang kemungkinan besar disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Tabel 6. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

Komponen	2009	2014
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,79	63,42
Indeks Kualitas Udara	94,68	80,54
Indeks Kualitas Air	42,26	52,19
Indeks Tutupan Hutan	59,23	59,01
Laju deforestasi	0,83 juta ha/tahun	0,61 juta ha/tahun

Sumber: Diolah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2013 memperlihatkan bahwa 80% kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi. Tantangan untuk mewujudkan pembangunan kota-kota yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim, antara lain: (1) terbatasnya kajian risiko bencana dan peta risiko bencana hingga tingkat kabupaten/kota; (2) belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim; (3) meningkatnya konsentrasi NO₂, SO₂, dan CO₂, yang sumbangan terbesarnya dari kendaraan bermotor; dan (4) menurunnya kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan, sehingga berimplikasi pada kuantitas dan kualitas air minum.

Pembangunan kota yang terpadu dan inklusif. Untuk mengukur proses pembangunan perkotaan yang inklusif (Target 11.3), digunakan ukuran keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, komunitas filantropi, serta akademisi dalam proses perencanaan pembangunan seperti misalnya dalam Musrenbang. Namun, ukuran keterwakilan para pemangku kepentingan masih perlu diperjelas. Tantangan multi-dimensi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, diantaranya: (1) kesenjangan yang tinggi antarkota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali; (2) kesenjangan antara perkotaan dan daerah sekitarnya; (3) tidak inklusifnya proses pembangunan yang terjadi di kota-kota Indonesia,

sehingga tidak semua kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama dalam mengakses pelayanan dasar perkotaan.

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "*The Future We Want*" yang merupakan hasil Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan *10 Year Framework of Programme on SCP* (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional.

Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001, dan menjadi tuan rumah *Asia Pasific Roundtable on Sustainable Consumption and Production* (APRSCP) ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013 Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan *United Nations High Level Panel of Eminent Persons* (UN HLPEP) "*Post-2015 Development Agenda*" di Bali, Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam "*Post-2015 Development Agenda*". Selanjutnya, SCP juga telah dimasukkan sebagai salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

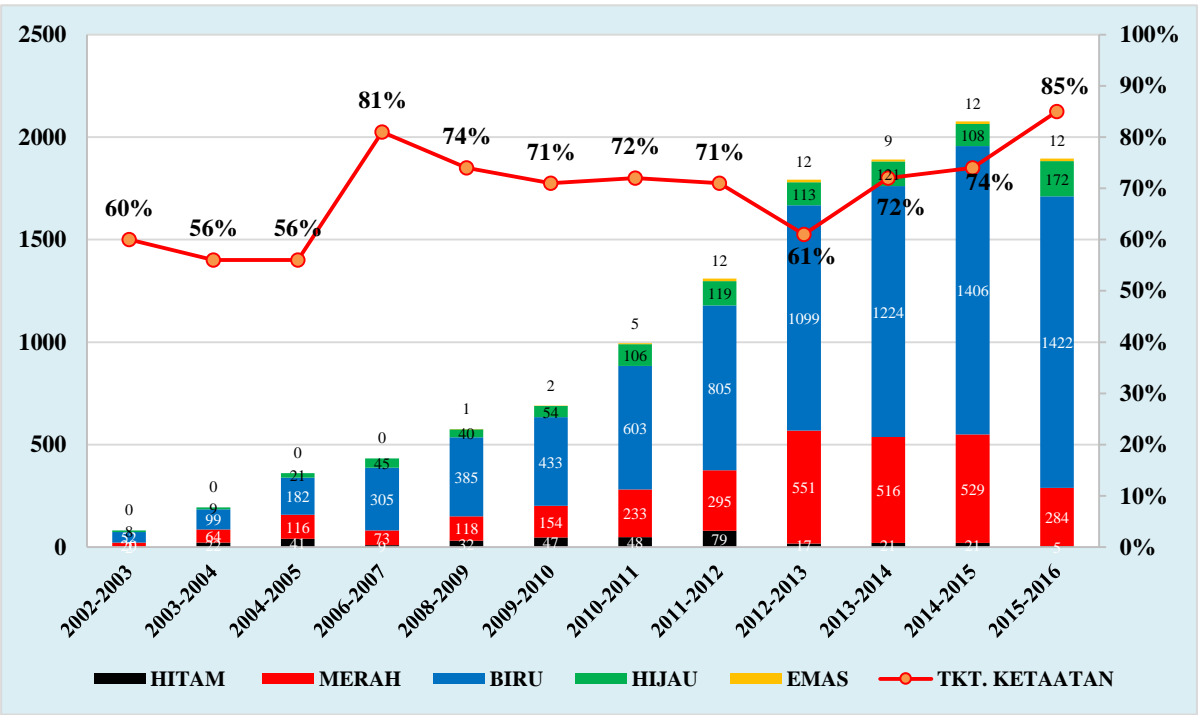
Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi), (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, (3) kriteria ecolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan, (4) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (5) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (*green*

banking), serta (6) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia antara lain (1) perlu intervensi kebijakan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan, (2) perlu menghilangkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam. (3) perlu menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mengubah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan (konsep “*de-coupling*”) menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper). Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahaannya. Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah (Kategori Emas untuk industri yang telah konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Kategori Hijau bagi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan juga telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggungjawab sosial dengan baik. Kategori Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori Merah untuk yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kategori Hitam, diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatannya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundangan yang

berlaku). Jumlah perusahaan yang menerima Proper untuk masing-masing kategorinya pada tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 12 Emas, 172 Hijau, 1.422 Biru, 284 Merah, dan sebanyak 3 (tiga) perusahaan mendapat kategori Hitam (Gambar 41).



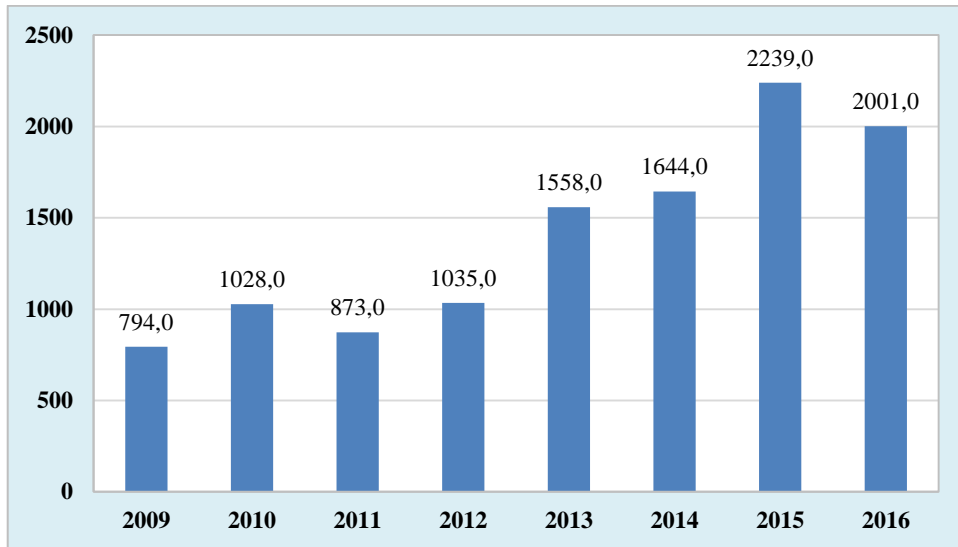
Gambar 40. Ketaatan Proper 2002-2016
Sumber: KLHK, 2017

Secara umum penerima Proper Biru meningkat dari 52 perusahaan pada tahun 2002-2003 menjadi 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016. 12 perusahaan Peringkat Emas yang terdiri atas 7 (tujuh) perusahaan migas, 2 (dua) perusahaan panas bumi, 1 (satu) perusahaan farmasi, 1 (satu) perusahaan tambang, dan 1 (satu) perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Terdapat 5 (lima) perusahaan berperingkat hitam yang terdiri atas perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan peleburan logam, perusahaan pengolahan ikan, dan perusahaan briket arang (KLHK 2016). Tingkat ketaatan perusahaan terhadap Proper tahun 2015-2016 mengalami peningkatan menjadi 85% dari sebelumnya 74% pada tahun 2014-2015, namun tantangan yang dihadapi antara lain perlunya upaya untuk mendorong perusahaan besar melaksanakan praktek usaha berkelanjutan dan pelibatan perusahaan lainnya dalam program Proper. Selain itu, saat ini telah dicetuskan program *Green Industry* melalui *Green Industry Award* oleh Kementerian Perindustrian. Program ini merupakan bentuk insentif nonfinansial kepada perusahaan ramah lingkungan dengan

karakteristik yang mirip dengan Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Kedua program tersebut perlu dilakukan sinkronisasi agar memberi nilai tambah bagi industri.

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Hingga tahun 2017 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) melalui beroperasinya 3 (tiga) unit pusat daur ulang skala kota dengan kapasitas masing-masing 20, 10 dan 5 (lima) ton per hari yang berpotensi mengurangi timbunan sampah sebesar 12.775 ton/tahun. Selain itu, sebanyak 5.244 unit Bank Sampah telah dibangun untuk mengelola sampah sebanyak 4.402.643 ton selama kurun waktu 2014-2017. Tantangan penerapan prinsip 3R di bank sampah hanya mampu mengelola 1,7% dari total timbunan sampah nasional. Untuk itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R secara lebih luas.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dari tahun 2009-2015 jumlah perusahaan yang telah memiliki sertifikat SML terus meningkat. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 2.001 perusahaan telah memiliki Sertifikat SML (Gambar 42.). Permasalahan penerapan SNI ISO 14001, meskipun telah menunjukkan adanya peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi, masih terdapat peluang besar untuk ditingkatkan. Tantangan untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 adalah aspek manfaat bisnis, dimana sertifikasi ISO 14001 masih dipandang tidak memberikan manfaat langsung dari sisi pendapatan usaha, sehingga perusahaan akan mengutamakan sertifikasi yang bersifat mandatori, maupun yang memberikan manfaat bisnis secara langsung.



Gambar 41. Jumlah Perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
Sumber: ISO Survey, 2017

Sistem label ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan ditujukan untuk mendukung dan mendorong perubahan perilaku dari sisi konsumsi maupun produksi. Dari sisi konsumsi (*demand*) perubahan operasional di pihak pemerintah diindikaasikan menjadi lebih ramah lingkungan termasuk yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara pada sisi produksi (*supply*) diarahkan untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan beralih menghasilkan barang dan jasa ramah lingkungan, menumbuhkan pasar hijau, mengembangkan *circular economy*, dan mendapatkan insentif.

Dalam hal pengadaan barang, jasa ramah lingkungan dan pengembangan sistem label ramah lingkungan telah diamanatkan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32, pasal 31-37 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengatur sistem label ramah lingkungan, pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan sebagai instrumen insentif.

Daftar rujukan barang dan jasa ramah lingkungan untuk penerapan *Green Public Procurement* (GPP) berasal dari berbagai skema standar dan verifikasi/registrasi yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga sesuai substansi kewenangannya dan memenuhi kriteria dalam Pasal 34 PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada tahap awal, skema untuk menyusun daftar rujukan barang/jasa dan teknologi ramah lingkungan adalah skema yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Ekolabel, Verifikasi Teknologi

Ramah Lingkungan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Kementerian ESDM, dan *Green Hotel* Kementerian Pariwisata.

Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup (RPJMN 2015-2019) sehingga perubahan perilaku masyarakat yang pro-lingkungan (*pro-environment awareness*) sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Fasilitas publik merupakan tempat ideal untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan karena fasilitas publik merupakan tempat pertemuan antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik.

Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik (SPM-FP) mendorong tersedianya informasi, edukasi, dan sarana untuk perubahan perilaku di fasilitas publik. Fokus besar SPM-FP terletak pada perubahan perilaku di fasilitas publik sejalan dengan Program Gerakan Indonesia Bersih dan Program Gerakan Indonesia Tertib, sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, tidak hanya dilakukan melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga dilakukan di fasilitas publik.

SPM-FP merupakan standar khusus yang ditetapkan KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.90/MenLHK/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. SPM-FP bertujuan antara lain untuk menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu, menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan, serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Isu perubahan iklim merupakan isu yang tak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Laporan akhir dari *IPCC Assessment Report 5 (AR5)* dengan beberapa skenario perubahan iklim *Representative Concentration Pathways (RCP)* telah menjelaskan bukti-bukti bahwa perubahan iklim telah benar-benar terjadi. Dalam kurun waktu satu abad terakhir, suhu bumi telah

meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius, dan skenario pemodelan RCP memperkirakan bahwa pada tahun 2100 suhu bumi akan terus meningkat sekitar 1,8 hingga 4 derajat Celcius jika dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999, atau setara dengan kenaikan 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius apabila dibandingkan dengan periode pra-industri. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya perubahan iklim di berbagai belahan bumi. Dampak negatif dari perubahan iklim dapat dirasakan baik secara fisik/lingkungan, maupun secara sosial dan ekonomi. Kawasan-kawasan tropis di dunia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan menghadapi dampak yang lebih parah dibandingkan dengan kawasan lainnya di dunia.

Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Fenomena iklim yang ekstrim, seperti semakin panjangnya bulan kering dan basah, kenaikan temperatur permukaan laut, perubahan pola dan intensitas curah hujan, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi, akan berdampak secara luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada sektor ekonomi, dan juga target pembangunan lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan bidang kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem. Dampak perubahan iklim pada bidang-bidang pembangunan dipetakan sebagai berikut:

Tabel 7. Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait

Indikator Perubahan Iklim	Bahaya Potensial Perubahan Iklim	Bidang Terkena Dampak									
		Ketahanan	Energi	Kesehatan	Infrastruktur	Permukiman	Ekosistem	Kehutanan	Perkebunan	Perkotaan	Pesisir
Suhu permukaan	Peningkatan evapotranspirasi dapat menyebabkan kekeringan	√	√				√	√	√		
	Penurunan produksi pertanian akibat kenaikan suhu	√		√							
	Pemanasan setempat akibat meningkatnya suhu udara pada siang hari		√	√		√	√	√		√	
	Meluasnya sebaran populasi serangga vektor penyakit			√		√	√			√	√
	Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara			√		√	√				

Indikator Perubahan Iklim	Bahaya Potensial Perubahan Iklim	Bidang Terkena Dampak									
		Ketahanan	Energi	Kesehatan	Infrastruktur	Permukiman	Ekosistem	Kehutanan	Perkebunan	Perkotaan	Pesisir
	Perubahan pola perkembangan populasi dan migrasi hama dan penyakit tumbuhan	√									
Curah hujan (CH)	Kekeringan akibat jumlah presipitasi yang defisit	√	√	√			√	√	√	√	
	Penurunan ketersediaan air (PKA) akibat jumlah presipitasi yang defisit	√	√		√	√	√	√	√	√	√
	Banjir akibat peningkatan jumlah, durasi, dan intensitas hujan	√	√	√	√	√	√			√	
	Tanah longsor	√		√	√	√	√	√	√	√	
	Penurunan produksi pertanian akibat perubahan curah hujan	√		√							
	Meningkatnya populasi nyamuk akibat banyaknya genangan air			√		√	√			√	√
	Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara dan genangan air			√		√	√			√	√
Kejadian iklim ekstrem <ul style="list-style-type: none">• ENSO• IOD/DMI• PIO/IPO	Terjadinya tahun kering secara berturut-turut				√						√
	Perubahan/pergeseran pola hujan musiman	√	√						√	√	
	Peningkatan peluang terjadinya hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai	√			√						√
Kejadian cuaca ekstrem <ul style="list-style-type: none">• Hujan lebat• Badai• Angin kencang• Gelombang badai	Meningkatnya frekuensi dan intensitas erosi dan abrasi (akibat perubahan arus sejajar dan tegak lurus pantai) sehingga menyebabkan perubahan garis pantai	√					√				√
	Meningkatnya peluang kejadian banjir rob akibat badai dan gelombang badai	√	√	√	√	√	√			√	√
	Meningkatnya kerusakan pada sarana dan prasarana publik	√	√		√	√				√	√

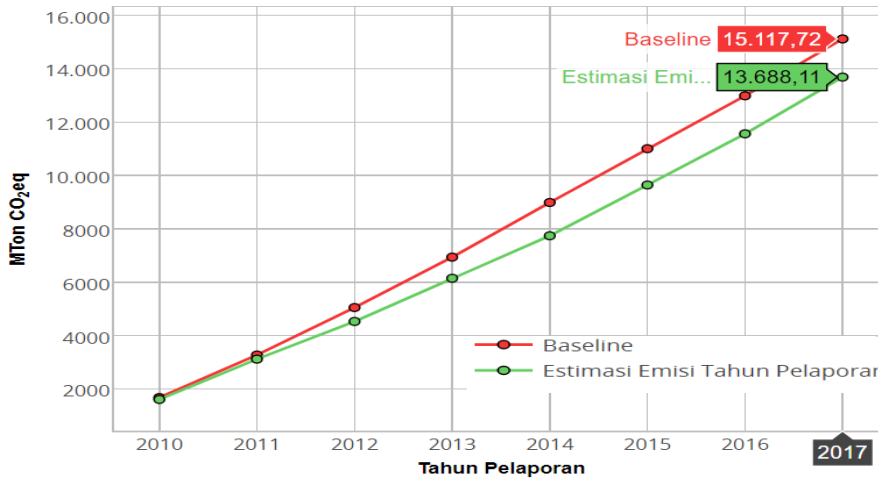
Sumber: Bappenas, 2014 - RAN API dengan *updating* data

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perencanaan

pembangunan tahunan (RKP). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR).

Untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario *fair*/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

Tahun 2016 merupakan tahun keenam pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. K/L terkait serta Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan RAN dan RAD-GRK, yang didukung dengan pembiayaan APBN, APBD, swasta, masyarakat dan berbagai program dukungan kerjasama internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Hingga tahun 2016, didapatkan hasil penurunan emisi sebesar 13,47%, dengan grafik perbandingan *baseline* dan potensi penurunan emisi tersaji dalam Gambar 43. Tantangan ke depan adalah diperlukannya sinergitas antar sektor, swasta dan masyarakat untuk mempercepat upaya penurunan emisi dengan perubahan pola aktivitas yang rendah karbon.



Gambar 42. Grafik Perbandingan Baseline dan Potensi Penurunan Emisi GRK tahun 2010-2017
Sumber: Bappenas, 2017

Selanjutnya, upaya adaptasi perubahan iklim, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang juga perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat termiskin dan menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim, termasuk penyusunan dokumen kebijakan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti *Indonesia Adaptation Strategy* (Bappenas, 2011), *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia* (DNPI, 2011), *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map* (Bappenas, 2010), *Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim* (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007) dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga.

Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang disahkan pada Februari 2014 kemudian menjadi alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan adaptasi yang sudah ada. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam RAN API bertujuan untuk mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan dan peningkatan ketahanan (*resilience*) masyarakat, terutama pada 5 (lima) bidang ketahanan. Kelima bidang ketahanan tersebut meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan ekosistem, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan wilayah khusus dan ketahanan sistem pendukung di 15 daerah rentan prioritas. Saat ini sedang dilakukan kaji ulang RAN API untuk mendapatkan pertimbangan ilmiah dalam penyusunan strategi dan kebijakan melalui penyempurnaan proyeksi iklim, kajian risiko dan dampak

perubahan iklim, serta pengembangan indeks resiliensi secara nasional. Hasil kaji ulang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kerangka kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024. Tantangan yang dihadapi mendatang adalah terus diperlukannya upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dan internalisasi kriteria pembangunan berketahanan iklim baik di pusat dan di daerah.

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor. Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Namun demikian, hingga akhir tahun 2016, tercatat jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

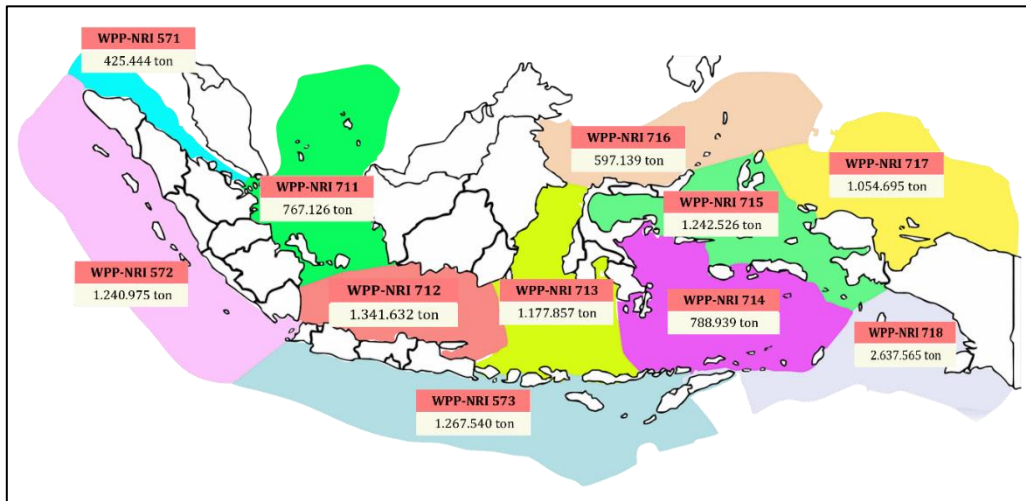
Penyusunan Tata Ruang Laut. Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Laut

Nasional (RTRLN) melalui proses sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. RTRLN ini sudah masuk proses formalisasi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pada akhir 2017, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah terkait RZWP3K dan ditargetkan seluruh provinsi pada tahun 2019 akan memiliki RZWP3K. Melalui penerbitan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup sampai 12 mil dari garis pantai.

Maksud RTRLN dan RZWP3K adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Selanjutnya, Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No.78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No. 82/2016 (WPP 715), No. 83/2016 (WPP 716), No. 84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718)). RPP ini selain menetapkan status perikanan, juga mengatur pelibatan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi nonpemerintah dalam operasionalisasi RPP. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan WPP, dimana saat ini organisasinya masih dalam kendali dan instruksi dari pusat. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai *platform*

kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*).



Gambar 43. Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Penangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis yang Aman. Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarnya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,3 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,9 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY meningkat menjadi 12,5 juta ton (Kepmen KP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Peningkatan nilai MSY ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, pencatatan kapal, perbaikan metodologi perhitungan, dan masuknya spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Meskipun demikian, penyempurnaan metode pengambilan data terus dilakukan melalui penguatan peran *enumerator*, *observer*, pembuatan *Log Book* perikanan dan *Vessel Monitoring System* yang kemudian masuk dalam sistem satu data.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing* terus ditingkatkan. Pemberantasan IUU *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam UU No. 31/2004 j.o UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Untuk memerangi IUU *fishing* Pemerintah Indonesia telah melakukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dengan negara-negara asing dalam memerangi IUU *fishing*, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Selain itu Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi *illegal fishing* melalui Perpres No. 115 Tahun 2015. Adapun tantangan selanjutnya adalah adanya potensi peningkatan produksi yang perlu dimanfaatkan secara optimal akibat adanya peningkatan pemberantasan IUU *fishing*. Untuk itu diperlukan pelibatan inklusif semua pelaku perikanan dalam memanfaatkan potensi perikanan secara *legal, reported* dan *regulated*.

Peningkatan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki 20 juta hektar kawasan KKL. Selain upaya untuk meningkatkan luas KKL, juga dilakukan pengukuran kualitas pengelolaannya dengan mengembangkan alat ukur/evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebut dengan E-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi perairan daerah. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan mengacu pada Permen KP No. 2/2009. Sampai tahun 2017 telah dicapai kawasan konservasi perairan seluas 19,1 juta hektar yang terdiri atas 168 KKL. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial juga terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 1990 sebesar 0,14% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,67%. Namun demikian, efektivitas pengelolaan KKL masih perlu ditingkatkan. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Indonesia juga terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil, antara lain: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuhkan kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Akses pendanaan untuk nelayan skala kecil juga terus ditingkatkan. Selama periode 2012-2016, kredit kecil untuk sektor perikanan telah berkembang rata-rata 10% per tahun. Selama periode yang sama, jumlah penerima kredit kecil di sektor perikanan juga meningkat secara signifikan. Dari 6.644 penerima (2012) menjadi 16.532 penerima (2014) dan melonjak menjadi 48.513 penerima pada tahun 2016 (Sistem Informasi Kelautan Perikanan 2016). Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan wilayah tangkap, sehingga dapat menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hingga akhir tahun 2016, telah beroperasi 135 KPH yang terdiri atas 111 unit KPHP dan

24 unit KPHL dan terbentuk 89 unit KPHK serta telah beroperasinya 57 unit KPHK nonTaman Nasional. Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu *illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Pada periode 2011-2015, telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 2.326.812 hektar, dan pemberian izin konsesi untuk restorasi ekosistem seluas 623.075 hektar.

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Pada RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 25 jenis satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya, yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani. Dari 25 jenis satwa tersebut, 10 jenis satwa berhasil ditingkatkan populasinya, yaitu: harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, bekantan, komodo, jalak bali, burung maleo, tarsius, dan monyet hitam sulawesi. Satwa dengan jumlah populasi tetap adalah banteng dan elang, sedangkan yang mengalami penurunan populasi adalah orangutan, babirusa dan anoa. Perdagangan tanaman dan satwa liar secara ilegal, dan perburuan ilegal di kawasan konservasi masih menjadi masalah dan ancaman yang sangat serius di Indonesia. Selanjutnya, penangkaran spesies terancam punah perlu didorong untuk meningkatkan jumlah populasi spesies tersebut.

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, sesuai kesepakatan dalam *Convention of Biological Diversity (CBD) on Protected Areas*, diukur dengan menggunakan instrumen *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) yang didesain untuk mengevaluasi kinerja secara mandiri (*self assessment*). RPJMN 2015-2019 mengamanatkan peningkatan indeks METT minimal sebesar 70 pada 260 unit kawasan konservasi. Hingga akhir tahun 2016, baru sebesar 40 unit yang memiliki nilai indeks METT di atas 70. Oleh karena itu, merupakan sebuah tantangan bagi pengelola kawasan konservasi di Indonesia khususnya Kementerian LHK untuk dapat memenuhi target 260

unit dari 551 unit kawasan konservasi yang mempunyai nilai indeks METT minimal 70 di akhir tahun 2019.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Dalam dokumen IBSAP 2015-2020 kehati (yang merupakan dokumen pemutakhiran) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keaneragaman jenis adalah keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Tantangan saat ini adalah iklim usaha yang kondusif, serta penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi kehati, pemanfaatan kehati dan jasa lingkungan dan mekanisme insentifnya.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum LHK terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni: (1) pembalakan liar, (2) perambahan hutan, (3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, (4) pencemaran lingkungan, dan (5) kebakaran hutan dan lahan. Kasus terbanyak adalah kasus dengan tipologi pembalakan liar, perambahan hutan dan TSL ilegal. Selama kurun waktu 2015 – 2017 pertengahan, sebanyak 109 kasus peredaran ilegal TSL telah ditangani sampai dengan P.21. Tantangan dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu antara lain adalah cakupan wilayah kerja yang begitu luas di seluruh pelosok nusantara yang harus diawasi dan terbatasnya sumberdaya manusia pelaksananya.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan menurunnya angka kejahatan pembunuhan pada periode tahun 2010-2014. Namun, pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus yang merupakan angka tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir (Statistik Kriminal, BPS, 2016). Indikator utama lainnya adalah kekerasan terhadap anak. Prevalensi kekerasan terhadap anak menunjukkan 20,48% dialami oleh anak perempuan dan 38,62% dialami oleh anak laki-laki (SKtA, 2013).

Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, pemerintah melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Peraturan Menteri Pendidikan No.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; (2) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh; (3) penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan Kota Layak Anak.

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) peningkatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan; (2) pelayanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan Telepon Pelayanan Sosial Anak (TepSA) yaitu saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; (3) penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteraan sosial anak – integratif

dan penguatan; (4) penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan didukung Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA); (5) pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan perundungan (*anti-bullying*); (6) penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui peningkatan peran dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); serta (7) peningkatan partisipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan.

Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dalam rangka penegakan hukum. Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya-upaya pemerintah diwujudkan melalui program bantuan hukum dan pelayanan bantuan hukum di pengadilan dan di luar gedung pengadilan, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, serta penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya bantuan hukum untuk melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara diwujudkan melalui:

1. Program Bantuan Hukum sejak 2012 berdasarkan UU No.16/2011 bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada tahun 2016, bantuan hukum litigasi telah dimanfaatkan oleh 10.053 orang masyarakat miskin (BPHN, 2016) dan berhasil melampaui capaian Target RPJMN 2015-2019 pada tahun 2016 yaitu 6.350 orang. Sedangkan tingkat pelayanan hukum nonlitigasi bagi orang atau kelompok

miskin pada tahun 2016 mencapai 2.399 kegiatan (BPHN, 2016) dan belum berhasil melampaui capaian target RPJMN 2015-2019 pada tahun 2016 yaitu 7.240 kegiatan.

2. Program Pelayanan Hukum di Lingkungan Peradilan berdasarkan Perma No.1/2014 tentang bantuan hukum di pengadilan, meliputi sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pelayanan hukum melalui pos pelayanan di pengadilan. Pada tahun 2016 pelayanan sidang di luar gedung pengadilan mencapai 27.229 perkara oleh peradilan umum dan 84.382 perkara oleh peradilan agama. Upaya pembebasan biaya perkara oleh lembaga peradilan mencapai 113.148 perkara oleh peradilan umum dan 26.451 perkara oleh peradilan agama. Upaya Pos Layanan Hukum mencapai 9.897 orang (peradilan umum), 195.023 orang (peradilan agama), dan 13 orang (peradilan tata usaha negara). Hal ini menunjukkan upaya bantuan hukum di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara belum optimal. Selain itu, kontribusi lembaga peradilan dilakukan melalui pelayanan terpadu bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dukcapil. Pelayanan ini dalam bentuk pelaksanaan sidang itsbat nikah/penetapan perkawinan bagi pasangan dari masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki akta nikah melalui pengadilan agama maupun pengadilan umum. Proses ini dilanjutkan dengan pemberian Buku Nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemberian Akta Kelahiran bagi keturunan pasangan tersebut.

Akses keadilan kepada semua yang ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun pada kelompok penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah) telah mencapai 76,46%, sedangkan untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun (40% penduduk berpendapatan terendah) mencapai 67,60%. Pencapaian ini dapat dilaksanakan karena dukungan nota kesepahaman antara 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak pada tahun 2015 dan Permendagri No.9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memfasilitasi kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran serta pengembangan berbagai model pendekatan untuk mengakselerasi cakupan

pencatatan kelahiran. Disamping itu, pemerintah sedang menyusun strategi pencatatan sipil dan statistik hayati yang komprehensif termasuk di dalamnya terkait percepatan pencatatan kelahiran terutama bagi kelompok marginal.

Salah satu wujud dari upaya menjamin akses keadilan untuk semua adalah penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Jumlah pengaduan semakin meningkat, sebagaimana diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Ditjen HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sejalan dengan *Paris Principles* dan terakreditasi A. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM mencapai angka di atas 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat sekitar 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu (dari dalam negeri dan luar negeri) maupun oleh pihak yang diadukan.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat di antaranya (1) persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia; (2) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; (3) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.

Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Secara umum upaya untuk menggem-bangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut:

1. Perilaku anti korupsi di Indonesia;
2. Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah;

3. Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik;
5. Kondisi demokrasi di Indonesia.

Pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi cenderung meningkat yaitu 3,55 (2012) menjadi 3,71 (2017). Hal ini menunjukkan bahwa *zero tolerance* terhadap korupsi makin melekat di masyarakat.

Dalam rangka menilai akuntabilitas lembaga pemerintahan maka Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tahun 2016, BPK telah memeriksa 86 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) dan 1 LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara). Hasil pemeriksaan menunjukkan 84% LKKL dan LKBUN memperoleh opini WTP, 9% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7% memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Adapun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Hal tersebut telah melampaui target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 tentang keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Salah satu alat ukur akuntabilitas lainnya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016, persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari

tahun 2015 yaitu 85,37% K/L, 64,71% provinsi, dan 14,53% kabupaten/kota. Secara spesifik peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (*cascading*) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Untuk mengukur transparansi lembaga pemerintah maka kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik menjadi acuan. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI pada tahun 2016, tingkat kepatuhan di tingkat kementerian mencapai 44% (belum sesuai target RPJMN 2015-2019), lembaga 66,7% (berhasil), provinsi 39,39% (belum berhasil), kabupaten 18% (belum berhasil) dan kota 29% (berhasil). Namun, upaya belum optimal untuk mencegah potensi maladministrasi dan perilaku koruptif, termasuk konsistensi peraturan yang relevan. Selain itu, belum terpenuhinya hak pengguna berkebutuhan khusus, belum terpublikasikannya tata cara dan mekanisme pengaduan, serta belum adanya sarana pengukuran kepuasan pelanggan.

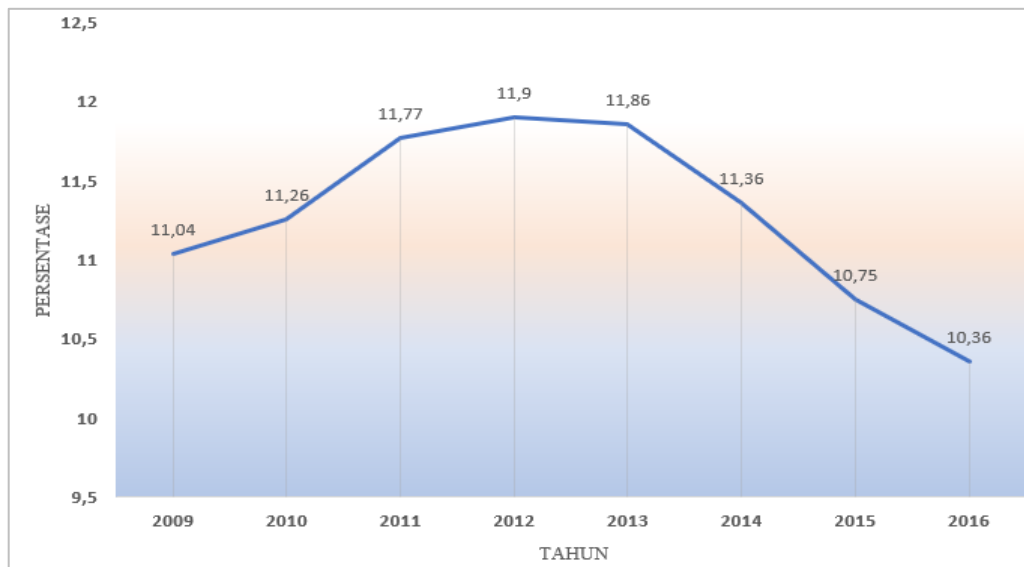
Di bidang politik, kondisi demokrasi Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-hak Politik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 sebesar 70,09, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 72,82. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Indonesia masih dalam kategori “sedang”. IDI dirancang untuk memotret kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi (*evidence based*). IDI perlu terus dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah. Salah satu upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Mobilisasi Sumber Daya Domestik. Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik adalah rasio

penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Pendapatan negara dari pajak berkisar antara 85-86% dari total penerimaan negara dalam periode 2016-2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia antara tahun 2010 hingga tahun 2017 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada periode 2010-2013 sempat mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi sebesar 11,90% pada tahun 2012, namun nilai rasio tersebut terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2016 yang hanya 10,36%. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor yang kompleks seperti: (i) perlambatan laju pertumbuhan ekonomi baik karena faktor domestik maupun faktor global dan (ii) sumber-sumber pajak yang belum tergali secara optimal baik dari sektor unggulan maupun sektor informal (RKP 2014).

Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5%. Hal ini disebabkan oleh faktor global seperti (i) pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih karena ada kecenderungan peningkatan proteksi atau *inward looking* yang semakin menguat; (ii) harga komoditas di pasar global yang masih rendah; dan (iii) ketidakpastian kebijakan global terkait dengan isu regulasi dan kebijakan fiskal Amerika Serikat, negosiasi setelah Brexit, dan resiko geopolitik seperti gejolak di Semenanjung Korea.



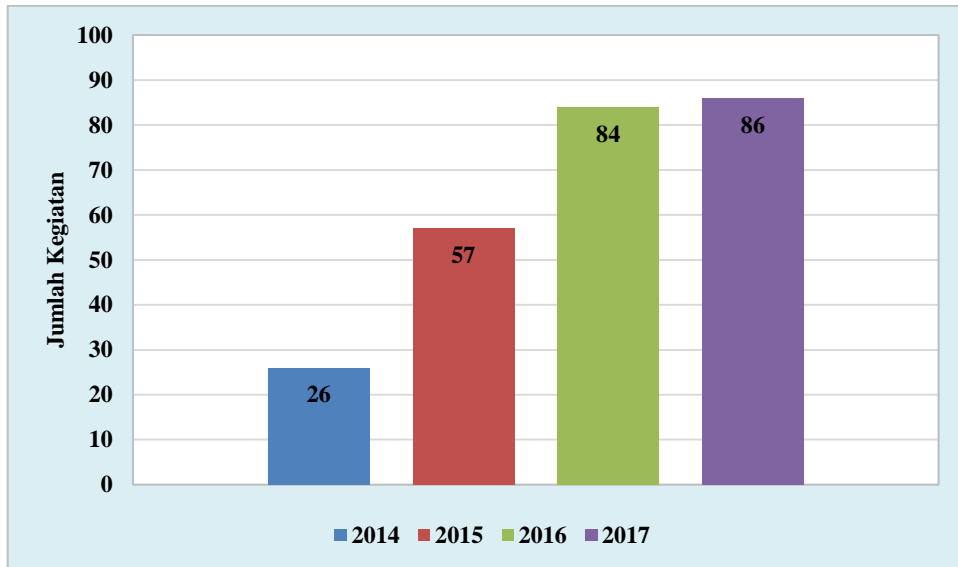
Gambar 44. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB
Sumber: LKPP dan BPS (diolah)

Kemitraan Multipihak. Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan. Kerjasama pembangunan internasional merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target lain dalam SDGs. Salah satu pelaksanaan kerjasama internasional diwujudkan dalam kemitraan global melalui kerjasama pembangunan global, kerjasama pembangunan regional, dan kerjasama pembangunan bilateral. Salah satu bentuk kerjasama pembangunan global yang sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Penguatan peran Indonesia dalam KSST diukur melalui indikator kuantitatif yang menghitung jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Indonesia berkomitmen meningkatkan perannya dalam KSST dengan meningkatkan jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, dilaksanakan 57 kegiatan berbagi pengetahuan dalam KSST. Kerja sama ini meningkat di tahun 2016 yang mencapai 84 kegiatan. Pada tahun 2017, kegiatan berbagi pengetahuan meningkat menjadi 86 kegiatan.

Pada tahun 2019 ditargetkan agar kegiatan KSST terus meningkat sebagai wujud penguatan peran Indonesia dalam KSST. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat koordinasi melalui *one gate policy* sebagai persiapan

pembentukan lembaga khusus melaksanakan KSST (*Single Agency*). Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia terus mendorong partisipasi organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan KSST. Hal ini semakin diperkuat pada saat penyusunan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019-banyak organisasi nonpemerintah lainnya yang mempunyai program pelaksanaan KSST. Beberapa organisasi nonpemerintah yang telah aktif melaksanakan KSST antara lain, dari sektor swasta, CV. KHS (QUICK), Biofarma, dan semi-swasta lain seperti Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), sementara itu dari Perguruan Tinggi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya dan Philantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Indonesia Global Compact Network (IGCN) serta Organisasi Kemasyarakatan, Muhammadiyah dan OHANA yang telah melakukan program pelaksanaan KSST. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjadi *knowledge hub* dalam kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara Selatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyusun buku *Resource Centers* untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman pembangunan.

Pelaksanaan KSST masih menghadapi beberapa tantangan yaitu: (i) belum terstrukturanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSST di Kementerian/Lembaga (K/L), (ii) alokasi pendanaan KSST yang belum ideal, (iii) strategi komunikasi (aktivitas promosi dan *public relations*) yang belum komprehensif baik secara internal maupun eksternal, sehingga masyarakat umum serta aktor nonpemerintah belum mengetahui KSST, (iv) kurangnya keterlibatan instansi nonpemerintah (*non-state actors*) dalam mendukung KSST, dan (v) belum adanya pengaturan/regulasi agar instansi nonpemerintah dapat berperan dalam KSST serta belum terharmonisasinya negara tujuan pemberian bantuan.



Gambar 45. Jumlah Kegiatan Saling Berbagi Pengetahuan dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
Sumber: Laporan KSST

Selain kemitraan global, capaian di bidang kerja sama juga ditunjukkan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kerja sama pemerintah swasta (KPS) dan masyarakat sipil merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya mewujudkan TPB/SDGs. Indikator yang dinilai sangat penting adalah jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu bentuk KPBU yang kini terus ditingkatkan adalah dalam bidang infrastruktur karena kualitas infrastruktur yang memadai merupakan salah faktor penentu dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs. Di sisi lain pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kemampuan pendanaan dari pemerintah terbatas. Sebagai contoh, kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2015-2019 adalah sekitar Rp 4.796 Triliun, sedangkan anggaran pemerintah (APBN dan APBD) hanya dapat menutupi sekitar 41,3% dari kebutuhan tersebut. Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Dalam meningkatkan KPBU di masa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti (i) masih belum optimalnya koordinasi dan perencanaan terutama koordinasi yang berkaitan dengan prioritisasi proyek dan alokasi dana; (ii) kesenjangan peraturan antarsektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme

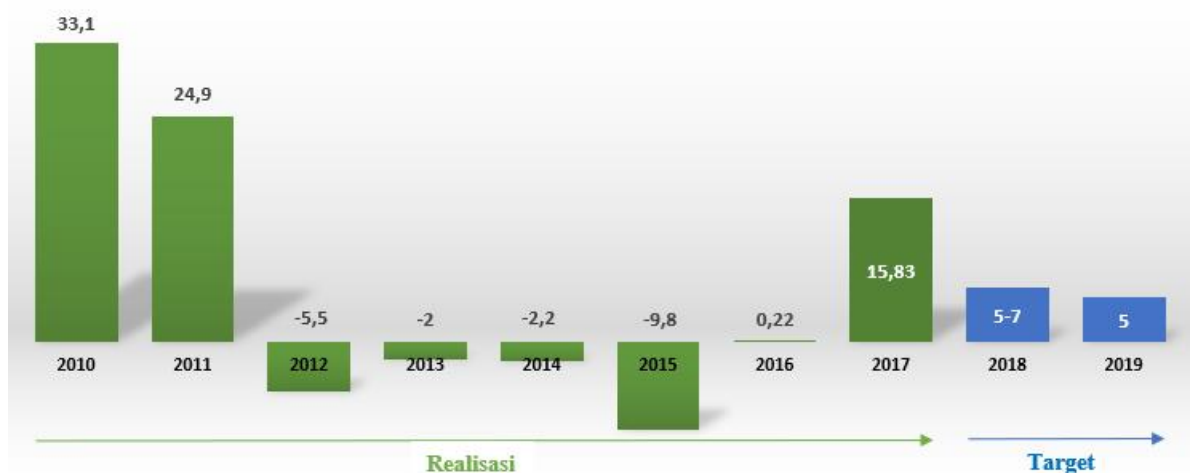
pembiayaan; dan (iii) belum memadainya kapasitas kelembagaan terkait tatakelola, sumber daya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta (iv) tersebarnya kewenangan yang tidak diimbangi dengan kemampuan atau mekanisme koordinasi yang baik.

Teknologi Informasi. Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang juga sangat penting untuk mewujudkan TPB/SDGs. Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan internet. Proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia sangat memuaskan. Selama kurun waktu lima tahun (2012-2017), jumlah pengguna internet di Indonesia melonjak hingga lebih dari 9,1% per tahun, yaitu dari 72,8 juta pada tahun 2012 menjadi 112,6 juta pada tahun 2017 (Sumber BPS). Indonesia merupakan negara keempat terbesar di Asia berdasarkan jumlah pengguna internet (<https://web.kominfo.go.id/sites>). Untuk masa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi tantangan dalam hal penggunaan internet yaitu penyalahgunaan media sosial yang terus meningkat.

Perdagangan Internasional. Salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Target yang relevan dengan hal ini antara lain target kerjasama perdagangan internasional terutama penurunan tarif dan peningkatan ekspor. Indonesia saat ini mengukur kinerja perdagangannya dengan indikator rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) di enam negara yaitu: Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok. Pada tahun 2015, nilai-rata-rata tarif terbobot di enam negara mitra mencapai 9,05%. Sesuai dengan komitmen penurunan tarif, rata-rata tarif terbobot terus menurun dan pada tahun 2017 sudah menurun menjadi 7,92% (Rencana Strategis Kementerian Perdagangan).

Untuk meningkatkan ekspor, salah satu indikator penting bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekspor produk nonmigas. Pada tahun 2010, ekspor nonmigas Indonesia meningkat tajam dengan laju sebesar 33,1%. Akibat krisis global yang dimulai tahun 2010, laju ekspor nonmigas Indonesia terus menurun dan mencapai titik terendah tahun 2015 dengan penurunan sebesar minus 9,8%. Ekspor nonmigas Indonesia mulai mengalami perbaikan

kinerja pada tahun 2016 sebesar 0,22% dan seiring dengan kenaikan harga komoditas, kinerja ekspor Indonesia kembali meningkat pada tahun 2017, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,83%.



Gambar 46. Jumlah Pertumbuhan Ekspor Produk nonMigas
Sumber: BPS

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk nonmigas antara lain: (i) pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik; (ii) kebijakan *inward looking* yang menguat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat; (iii) masih berlangsungnya penyelesaian proses perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional maupun bilateral; serta (iv) pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

Ketersediaan Data. Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator proksi penting dari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama. Pada tahun 2016 sebanyak 91,35% pengguna data menjadikan data dan informasi BPS sebagai rujukan utama, yang merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Terlebih lagi, tingkat kepuasan pengguna data BPS pada tahun 2016 sudah mencapai 89,3% (BPS, 2017).

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data TPB/SDGs di Indonesia diantaranya adalah (i) keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah); (ii) munculnya daerah administrasi baru karena

sistem desentralisasi pemerintah; (iii) belum maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa K/L; dan (iv) belum tersedianya data untuk beberapa indikator global TPB/SDGs.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs



3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015–2019 diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
2. Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menyasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Program Tujuan 1. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) penanganan fakir miskin; (2) jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (3) pemenuhan kebutuhan dasar; (4) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi; (5) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (6) pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); (7) program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (8) penataan kelembagaan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN); (9) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (10) koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; (11) pemenuhan kebutuhan dasar; (12) bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (13) pembinaan kesehatan masyarakat; (14) pembinaan surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra; (15) pencegahan dan pengendalian penyakit; (16) kefarmasian dan alat kesehatan; (17) kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; (18) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (19) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (20) penyehatan lingkungan; (21) pengembangan perumahan; (22) pengembangan pembiayaan perumahan; (23) pemberdayaan sosial; (24) penyediaan perumahan layak; (25) pendidikan dasar dan menengah: penjaminan kepastian layanan pendidikan SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, SMA/MA/SMK dan sederajat; (26) penataan administrasi kependudukan; (27) perlindungan anak; (28) pengelolaan ketenagalistrikan; (29) koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana; (30) koordinasi kebijakan penanganan pascabencana; dan (31) perlindungan dan jaminan sosial: perlindungan sosial korban bencana.

Selain melalui program kementerian/lembaga, terdapat tiga program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program tersebut adalah (1) *Youth in Action for Urban Resilience* yang merupakan kontribusi Pusat Inkubasi Usaha Kecil Konsulindo (PINBUKINDO); (2) Sosialisasi penghimpunan dana ZISWAF untuk penyediaan energi dan air di perdesaan dengan menggunakan panel surya yang merupakan program kontribusi lembaga di bawah Majelis Ulama

Indonesia; dan (3) *Emergency Situation Training* (EST) yang merupakan program kontribusi Sekolah Relawan.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 8. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 8. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	% (kondisi maret)	11,22	10,86a	10,64a	7,5-8,5	7,0-8,0
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	61,5	66,5a	71,8a	85	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS	Formal (%)	6	22,59a	24,73a	27,15	100
			Informal (%)	1	1,17a	1,41a	1,98	10
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	PBDT PMKS Kementerian Sosial	%	0,83	0,84a	0,49	0,50	0,57
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	PBDT PMKS Kementerian Sosial	Jiwa	3,51 Juta	3,51a Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di	Susenas BPS	%	70,25	73,05a	74,89a	67,2	70

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)							
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	SDKI BKKBN dan BPS	%	54,9 (2012)	59,5	60,7	61,8	63
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	SDKI	%	61,9 (2012)	65,4	65,6	65,8	66
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	61,15	61,57a	62,75a	91,14	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	47,08	53,05a	53,81a	84,05	100
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	13,8	11,44a	10,44a	PM	0
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	96,86	96,93a	97,21a	94,03	94,78
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	74,21	74,98a	76,55a	82	82,02

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	(kelompok penduduk 40% terbawah)							
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	49,82	49,9a	52,21a	65,29	67,48
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	71,59	74,06a	74,46a	76	77,40
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	95,58	95,97a	94,52a	98,95	100
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Jiwa	PM	PM	PM	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BNPB	Lokasi	35	39	39	39	39
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Kementerian Sosial; BNPB; Podes	Jiwa	16 Juta	9.500a	37.500	137.000	140.000
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Kementerian Sosial; BNPB; Podes	Jiwa			3.364	3.700	3.800

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; BNPB; Podes	Daerah	100	450	450	450	450
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BNPB	Indeks risiko	169,4 (2014)	159,2a	154	149	144
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	DIBI BNPB	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BNPB; Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	Tingkat Nasional Tersedia (2014)	PM	PM	PM	PM
Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Kementerian Keuangan	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Kementerian Keuangan	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan	156.186,9	143.262,1	143.140,9	147.562,0	PM
			Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	24.208,5	66.069,8	61.724,5	65.066,2	PM
			Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial	22.615,8	150.841,7	157.689,2	162.557,3	PM

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*



3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, diantaranya: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan

pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, *long storage*, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyakan benih tanaman VUB yang memiliki kemampuan adaptif terhadap cekaman lingkungan dan sesuai minat pengguna/petani; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; (5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8) Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (9) Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani kecil/keompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal; (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

(5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMN 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak; (b) penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3) peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4) pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah; (6) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9) perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Susenas BPS; Riskesdas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU	%	16,46 (2011)	PM	7,8a	PM	PM
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	19,6 (2013)	21,0a	PM	PM	17,0
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan Pangan.	Susenas BPS	%	9,76 (2017)	PM	9,76a	PM	PM
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Susenas BPS; Laporan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian	%	12,96	12,69a	Laju penurunan 1%	Laju penurunan 1%	8,5
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	37,2 (2013)	33,6a	PM	PM	PM
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	32,9 (2013)	26,1a	29,6	28,8	28,0

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	% (Wasting)	12,1 (2013)	9,8a	PM	PM	9,5
			% (Obesitas)	11,8 (2013)	6,1a	PM	PM	PM
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	37,1 (2013)	54,9a	PM	PM	28,0
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan; Susenas BPS	%	38,0 (2013)	22,8a	44,0	47,0	50,0
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Laporan Kementerian Pertanian	Skor	85,2	86,2	88,4	90,5	92,5
			Kg/Kapita /Tahun	40,9	43,88	47,12	50,65	54,5
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Rupiah/ tenaga kerja	41.213,77	44.118,3a	PM	PM	PM
Target 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.								
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Kementerian Pertanian	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	16	17	17	17	17
			Kumulatif VUB Hewan	5 (2014-2016)a	5a	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
			untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumatera)					
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Kementerian Pertanian	Hewan Ternak	1	PM	PM	PM	PM

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*.



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 7) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Kebijakan RPJMN untuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi diarahkan pada: 1) menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat; 2) menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; 3) meningkatkan pemahaman remaja

mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga; 4) meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; 5) menguatkan landasan hukum dan menyeraskan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana; 6) menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah; dan 7) meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pelayanan kesehatan jiwa; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan SDM kesehatan.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel 10. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	SP/SUPAS	kematian per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010) /305 (SUPAS 2015)	-	-	-	306
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS	%	91,51	92,6a	PM	PM	PM
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS	%	77,63	79,7a	79	82	85
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	40 (2012)	-	-	PM	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	19 (2012)	-	-	PM	-
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	32 (2012)	-	-	PM	24
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kemenkes	%	66 (2015)	80,7a	85	90	95

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kemenkes	%	0,33	0,33a	<0,5	<0,5	<0,5
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kemenkes	%	395	391	379	364	344
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kemenkes	API per 1000 penduduk	0,85	0,84a	<1	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	232	247a	265	285	300
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Kemenkes	%	5,84	17,12a	30	60	80
3.3.5*	Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kemenkes	Juta Orang (Filariasis)	21,6	35,5	36,6	35,9	27,5
			Orang (Kusta)	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Kemenkes	provinsi	22 (2015)	23a	25	26	34
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	17	12a	15	24	35
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Riskesdas	%	7,2 (2013)	8,8a	5,9	5,6	5,4
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Riskesdas dan Sirkesnas	%	25,8 (2013)	32,4a	24,2	23,8	23,4
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Riskesdas	%	15,4 (2013)	20,7a	15,4	15,4	15,4
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Sistem Registrasi Sampel	Kematian per 100.000 penduduk	1,77 (2014)	PM	1,73	1,7	1,66

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kemenkes	Kabupaten /Kota	80 (2015)	130	180	230	280
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	LapTah Dit P2MKJN SELARAS Badan Narkotika Nasional	orang	Kemenkes : 4500 BNN: 19000	Kemenkes: 6028a; BNN: 16000	Kemenkes: 7000; BNN: 21000	Kemenkes: 8000; BNN: 8750	Kemenkes: 9000; BNN: 9500
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Laporan BNN	orang	10000 (2015)	16000	11300	6448	22000
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Laporan Kemensos	orang	PM	210	210	210	210
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	Laporan BNN	orang	PM	76	77	80	85
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Laporan BNN	%	1,7	PM	PM	PM	0,02
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas BPS	liter per kapita	0,47	0,33a	PM	PM	PM
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	SDKI dan Survey Kinerja dan akuntabilitas program (SKAP)	%	57,9 (2012)	60,7	60,9a	61,1	61,3

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	menggunakan alat kontrasepsi metode modern.							
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI dan SKAP	%	61,9 (2012)	65,4	65,6a	65,8	66
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	SDKI dan SKAP	%	18,3 (2012)	21,19	21,7a	22,3	23,5
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun	48 (2012)	44	42a	40	38
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	SENSUS, SUPAS, SDKI dan SKAP	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,6 (2012)	2,36	2,33a	2,31	2,28
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Susenas BPS	%	4,66 (2015)	4,33a	PM	PM	1
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Susenas BPS	Juta Penduduk	613,75	664,62a	262	265	268
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	61,5	66,5a	71,8a	85	85

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Sistem Registrasi Sampel	%	1 (2014)	PM	PM	PM	PM
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	%	30,08	28,97a	PM	PM	PM
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Kemenkes	%	79,38	81,57a	83	86	90
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.							
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	dokter spesialis per 1.000 penduduk	0,127	0,104	0,106	0,108	0,110
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	dokter umum per 1.000 penduduk	0,429	0,420	0,430	0,440	0,450
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	dokter gigi per 1.000 penduduk	0,105	0,124	0,126	0,128	0,130
	Kepadatan dan distribusi perawat	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	perawat per 1.000 penduduk	1,507	1,668	1,712	1,756	1,800
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	perawat gigi per 1.000 penduduk	0,067	0,162	0,168	0,174	0,180

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	Kepadatan dan distribusi bidan	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	bidan per 1.000 penduduk	1,448	1,080	1,120	1,160	1,200
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga gizi per 1.000 penduduk	0,102	0,116	0,124	0,132	0,140
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga kesehatan lingkungan per 1.000 penduduk	0,057	0,162	0,168	0,174	0,180
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga keterampilan fisik per 1.000 penduduk	0,044	0,044	0,046	0,048	0,050
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisian medis	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga keteknisian medis per 1.000 penduduk	0,075	0,148	0,152	0,156	0,160
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	0,088	0,162	0,168	0,174	0,180

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*.



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata; (4) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun; (7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan; (8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan

lingkungan belajar yang baik bagi siswa; dan (9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan perlindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.							
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	INAP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	53,17 (2016)	53,17a	-	-	-
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	INAP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	22,87 (2016)	22,87a	-	-	-
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	86,43	74,66a	-	-	-
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	40,5	36,52a	-	-	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	63,9	69,59a	79	81,6	84,2
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	61,45	63,05a	74,8	77,9	81
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	63,87	67,15a	80,9	82,8	84,6
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Susenas BPS	%	110,5	109,31a	111,43	113,41	114,09
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	91,17	90,12a	105,29	106,7	106,94
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	78,02	80,89a	88,14	89,74	91,63
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	Tahun	8,25	8,36a	8,6	8,7	8,8
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Susenas BPS	%	48,52	47,45a	72,97	75,07	77,23
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	78,02	80,89a	88,14	89,74	91,63

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Pusdatin Kemristekdikti	%	29,92	31,6a	32,95	34,84	36,73
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas BPS	% remaja (15-24)	51,83	58,21a	PM	PM	PM
			% dewasa (15-59)	27,40	31,83a	PM	PM	PM
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	100,33	99,7a	100	100	100
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Susenas BPS	%	104,45	104,89a	100	100	100
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas BPS	%	103,45	105,54a	100	100	100
	Rasio APK Perempuan/laki-laki di PT	Susenas BPS	%	119,36	115,6a	100	100	100
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	%	95,22	95,38 (a)	95,4	95,8	96,1
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas BPS	% (umur 15-24 tahun)	98,90	99,00 (a)	PM	PM	PM
		Susenas BPS	% (umur 15-59 tahun)	88,11	93,62 (a)	97	97	98

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).							
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	SD 90,77 SMP 93,60 SMA 97,19 SMK 97,83 SLB NA	SD 93,27a SMP 96,16a SMA 98,17a SMK 99,23a SLB	SD 93,94a SMP 95,97a SMA 97,41a SMK 97,87a SLB 94,29a	NA	NA
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	SD 5,98 SMP 29,85 SMA 83,17 SMK 86,62 SLB	NA	SD 48,93a SMP 49,59a SMA 62,48a SMK 63,34a SLB 50,83a	NA	NA
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	SD 32,05 SMP 43,31 SMA 55,02 SMK 60,90 SLB NA	NA	SD 92,68a SMP 65,03a SMA 46,47a SMK 40,59a SLB 81,08a	NA	NA
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	NA	NA	NA	NA	NA
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	Tahun 2016 SD 68,15 SMP 69,75 SMA 73,97 SMK 77,77 SLB 77,97	SD 68,15a SMP 69,75a SMA 73,97a SMK 77,77a SLB 77,97a	SD 86,88a SMP 57,34a SMA 58,36a SMK 59,31a SLB 64,95a	SD 72,38 SMP 67,52 SMA 72,70 SMK 77,33 SLB 67,38	SD 80 SMP 70 SMA 75 SMK 80 SLB 70
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	Tahun 2016 SD 45,98 SMP 60,11 SMA 45,64 SMK 50,73 SLB 36,28	SD 45.98a SMP 60,11a SMA 45,64a SMK 50,73a SLB 36,28a	SD 51,55a SMP 65,31a SMA 56,38a SMK 60,01a SLB 70,38a	SD 12,06 SMP 16,65 SMA 17,80 SMK 21,29 SLB 12,70	SD 15 SMP 20 SMA 20 SMK 25 SLB 15

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	Tahun 2016 SD 65,10 SMP 60,19 SMA 68,72 SMK 68,86 SLB 77,83	SD 65,10a SMP 60,19a SMA 68,72a SMK 68,86a SLB 77,83a	NA	SD 67,55 SMP 62,60 SMA 71,86 SMK 71,93 SLB 81,42	SD 70 SMP 65 SMA 75 SMK 75 SLB 85
Target 4.b. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.								
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Laporan PKLN Kemdikbud	Mahasiswa	PM	500	500	500	500
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	53,40	48,12a	46,15a	69,90	77,20
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	95.376	111.459	135.572	180.086	217.233
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	743.163	755.424	764.538	773.652	782.766
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	317.034	322.802	327.090	331.378	335.666
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	148.931	153.502	156.900	160.298	163.696

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	Jumlah guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	100.787	103.182	104.962	106.742	108.522
	Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	31	34,2	41,5	48,9	52,4
	Jumlah guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	Orang	130.648	136.296	139.120	141.944	144.768
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	68,1	70,2	88,12a	74,5	76,5
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	62,8	84,21a	86,03a	68,9	70,9
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	81,7	92,11a	93,16a	88,7	91,0
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	92	94	96,01a	98	99
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	96	96,88a	97,39a	98	99
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	89	93,96a	94,55a	98	99

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*; dan “NA” adalah *Not Available*.



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2) peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan

kelompok keluarga remaja; dan (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1) pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4) penyediaan bantuan operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus.

Keempat, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif; (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. ^[1]_{SEP}

Kelima, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui: (1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga(KKBPK); dan (2) penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.

Keenam, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PP dan PA); (2) Program perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PP dan PA, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia; (3) Program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan di laksanakan oleh Kementerian PP dan PA; (4) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Dalam Negeri; (5) Program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (6) Program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Nasional Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Program manajemen peradilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; (8) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Sekretariat Negara yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (9) Program lidik sidik tindak pidana yang akan dilaksanakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri; (10) Program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (11) Program pendidikan menengah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (12) Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan; (13) Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang akan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; serta (14) Program pengembangan aplikasi informatika yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam matriks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari Pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matriks terlampir.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel 12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	KPPPA; Kemhukham; Kemdagri; Komnas Perempuan; Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	19	22	22	18	16
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SPHPN BPS	%	10,4 (2016)	10,4a	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	SKtA BPS	%	20,48 (2013)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SPHPN BPS	%	4,66 (2016)	4,66a	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Menggunakan Data Lampiran Perpres (RPJMN 2015-2019) - Selanjutnya akan menggunakan data SPHPN jika sudah diolah	%	50	PM	PM	PM	70

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	0,57	1,08a	Menurun	Menurun	Menurun
			% (sebelum umur 18 tahun)	11,56	22,35a	Menurun	Menurun	Menurun
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SDKI BKKBN dan BPS	Tahun	20,1 (2012)	20,7	20,8	20,9	21
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SDKI BKKBN dan BPS; SP dan SUPAS BPS	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun	48 (2012)	44	42	40	38
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	78,02	80,89a	88,14a	89,74	91,63
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	KPU; Sekretariat DPD; BKN	%	DPR= 17,32 (2014)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
				DPRD Prov= 16 (2014)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
				DPRD Kab/kota= 14 (2014)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
				DPD= 25,8 (2014)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKN; Sakernas BPS	%	Eselon I= 20,66	15,6a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
				Eselon II=16,39 (2014)	22,28a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,	SDKI BKKBN dan BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.							
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SDKI BKKBN dan BPS	%	11,4 (2012)	10,48	10,26	10,14	9,91
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SDKI BKKBN dan BPS	%	98,9 (2012)	PM	PM	PM	PM
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kemhukham; BKKBN; Kementerian Kesehatan; KPPPA; Kemdikbud	Dokumen	UU = 1	1	1	1	1
				PP = 1				
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Susenas BPS	%	56,92	58,30a	PM	PM	PM

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*.



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019), indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait Tujuan 6 adalah: (i) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Program Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi; (b) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (c) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan; serta (d) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyehatan Lingkungan; (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air; serta (5) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; (b) Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS; serta (c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 13. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 13. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor, BPS	%	70,97	71,14a	72,04a	92	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	m3/detik	58,41/6,97	64,56/6,15a	84,3/11,3a	97,08/12,78	118,6/21,52
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor, BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS	%	-	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	62,14	67,2a	67,89	79,07	85
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	26.417	33.803a	35.000	40.000	45.000
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten/ Kota (Skala Kota)	2	2a	2a	9	9

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Kabupaten/ Kota (Skala Kawasan)	22	15a	19a	37	17
			Kabupaten/ Kota (Skala Komunal)	206	197a	158a	165	89
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	2	PM	PM	PM	12,5
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten/ Kota	37	53a	65	52	41
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	60,14	PM	PM	PM	72,5
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau Prioritas	0 (2014)	6	9	12	15
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sungai	0 (2014)	6	9	12	15
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Kementerian ESDM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RPDAST	0 (2014)	40	60	80	108
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	stasiun	PM	PM	PM	PM	PM
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	wilayah Sungai	2 (2014)	PM	PM	PM	8
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAS Lintas Negara (dengan MoU)	0 (2014)	7	11	15	19
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ha	500,000 (2014)	PM	PM	PM	12.700.000
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	wilayah Sungai	3 (2014)	PM	PM	PM	10

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lembaga	PM	PM	PM	PM	PM
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAS	0 (2014)	7	10	12	15
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAS	0 (2014)	7	10	12	15
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	6	9	12	15
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	6	9	12	15
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	6	9	12	15
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ha	0,5 juta (2014)	2.500.000	3.750.000	5.000.000	5.500.000
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAS Prioritas	0 (2014)	7	10	12	15

Keterangan: “a” adalah data realisasi; dan “PM” adalah *Prememory*.



3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 meliputi :

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti *Coalbed Methane* (CBM) dan *shale gas*; dan (iv) penerapan *improved oil recovery* untuk lapangan produksi;
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi, melalui: (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG); (ii) mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan; dan (v) pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar;

3. Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi, melalui: (a) perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; dan (b) peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi;
4. Menyempurnakan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang andal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah, melalui: (a) penyempurnaan regulasi; dan (b) struktur industri penyempurnaan kelembagaan;
5. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi, melalui: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *Fuel-Blending* biodiesel dan bioetanol;
6. Meningkatkan aksesibilitas energi, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan antara lain energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi BBM (depo BBM) terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan; (iv) meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM;
7. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, melalui kebijakan operasional sebagai berikut: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* – ESCO); dan (v) mengembangkan penggunaan

sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri; serta (vi) Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi;

8. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi; dan
9. Memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv) sinkronisasi pola dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

Program Tujuan 7. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang mendukung pencapaian target 7.1
2. Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas yang mendukung pencapaian target 7.2
3. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang mendukung pencapaian target 7.3

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah yang mendukung pencapaian Tujuan 7 salah satunya adalah pembangunan biogas yang dilakukan di tingkat kabupaten, pembangunan jaringan gas rumah tangga, serta konsultasi ke pemangku kepentingan terkait pemanfaatan energi.

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 14. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 14. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016	% (Persen)	88,3	91,16a	95,35	95,15	96,61
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016	kWh	918	956a	1.012	1.129	1.200
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	RKP 2017	SR (Sambungan Rumah Tangga)	20.363	88.915a	41.934	306.000* 80.000**	374.000* 80.000**
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	RKP 2017 Rancangan RKP 2018	% (Persen)	5,8	7a	15	15	16
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer.	RPJMN 2015-2019	SBM (Setara Barrel Minyak)	501	440,3a	472,6	467,8	463,2

Keterangan: “a” adalah data realisasi



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 15.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan;

(2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

I. Pertumbuhan Ekonomi Makro

1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;
4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;
6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan *smelter*, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

II. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;
5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
6. Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip *collective bargaining* dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;
7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja;
8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

III. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.

IV. Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan

1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;
2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;
3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta

meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;

4. Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

V. Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan

1. Meningkatkan koordinasi kebijakan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;
2. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
3. Penguatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan nasional melalui penguatan struktur industri keuangan, permodalan nasional dan kualitas manajemen. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, dilakukan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan;
4. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi melalui peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta perluasan akses layanan keuangan yang dilakukan tanpa melalui kantor bank (cara nonkonvensional) dengan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan-bank (antara lain: asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investmen bank*) sebagai sumber pembiayaan pembangunan;

6. Meningkatkan indeks literasi dan utilitas industri perbankan melalui upaya peningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa, khususnya pada industri asuransi, industri jasa pasar modal, industri jasa pembiayaan;
7. Meningkatkan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama surat perbendaharaan negara dan obligasi korporasi;
8. Mengembangkan keuangan syariah melalui: (i) pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah; (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah; (iii) edukasi keuangan syariah bagi masyarakat; (iv) penempatan sebagian dana pemerintah untuk ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah; dan (v) mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui lembaga keuangan syariah.

Program Tujuan 8. Berbagai kementerian/lembaga memiliki program dan kegiatan yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB/SDGs. Berikut ini adalah program dan kegiatan sebagaimana secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Pilar Ekonomi Tujuan 8.

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka Industri dari Kementerian Perindustrian. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan revitalisasi dan penumbuhan industri yang dilakukan terhadap standar produk, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana industri.
- 2) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya.
- 3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja.
- 4) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, melalui kegiatan peningkatan akses KUMKM pada asuransi, penjaminan dan pasar modal

- 5) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya dalam perluasan kesempatan kerja dan perlindungan upah bagi kelompok rentan, dengan salah satu kegiatannya bertujuan memastikan perusahaan menerapkan struktur dan skala upah yang tepat.
- 6) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja dengan kegiatan padat karya.
- 7) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan standarisasi kompetensi yang juga ditujukan kepada tenaga kerja muda, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta mengurangi pengangguran terhadap kaum muda
- 8) Program Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada angkatan kerja muda agar memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan wirausaha.
- 9) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui kegiatan revitalisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM UMKM dan Koperasi.
- 10) Program Perlindungan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, khususnya penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak sebagaimana terdapat dalam target 8.7 didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui;
- 11) Program Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial
- 12) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 14) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Program Perlindungan Tenaga Kerja

dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja;

15) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan.

17) Program Pengembangan Kepariwisata dari Kementerian Pariwisata yang didukung oleh kegiatan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara, pengembangan infrastruktur dan ekosistem serta peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs sebagaimana termuat dalam matriks 2. Beberapa program dan kegiatan organisasi nonpemerintah tersebut, antara lain: (1) studi dan pemberdayaan keperantaraan sektor kopi sebagai upaya meningkatkan nilai lebih bagi petani; (2) survei dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha (terutama perempuan) dalam rantai hulu hilir usaha sektor kopi, garmen, dan alas kaki; (3) penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; (4) identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, dan kelembagaan) di daerah; (5) asistensi terhadap pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah terkait pelatihan kerja; (6) pembangunan kemitraan multipihak dalam pelatihan kerja; serta (7) menyusun panduan teknis pelaksanaan Tujuan 8 TPB/SDGs untuk pemerintah daerah.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 15. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 15. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	% (Persen)	3,52	3,7a	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS (Statistik Indonesia)	Juta Rupiah	45,2	47,957a	51,89a	64,721	72,217
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS (Statistik Indonesia; Sakernas)	% (Persen)	4,70 (Tahun dasar 2010)	1,85a	2,80a	2,79	PM
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (Sakernas)	% (Persen)	43,37 Laki-laki: 40,66 Perempuan: 47,84	43,09a Laki-laki: 40,02 Perempuan: 47,80	43,75a Laki-laki: 40,3 Perempuan: 49,04	PM	PM
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (Sakernas)	% (Persen)	42,2	42,4a	42.97a	48	51
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (Sakernas)	% (Persen)	87,12 Laki-laki: 83,73 Perempuan: 93,19	88,59a Laki-laki: 85,32 Perempuan: 94,32	89,50a Laki-laki: 85,69 Perempuan: 93,59	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bank Indonesia (SSKI); BPS-Kemen KUKM	% (Persen)	22,6	25,74a	25,76a (April 2017)	25	25
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (Sakernas)	Rupiah	11.388,56	13.888,50a	PM	PM	PM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS(Sakernas)	% (Persen)	6,18 Laki-laki: 6,07 Perempuan: 6,37 Usia 15-24: 22,59 Usia 25+: 2,91	5,6a Laki-laki: 5,70 Perempuan: 5,45 Usia 15-24: 19,45 Usia 25+: 2,83	5,50a Laki-laki: 5,53 Perempuan: 5,44 Usia 15-24: 20,44 Usia 25+: 2,68	5,0-5,3	4,0-5,0
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (Sakernas)	% (Persen)	8,48	7,58a	7,55a	PM	PM
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (Sakernas)	% (Persen)	24,77	23,19a	21,81a	PM	PM
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Kementerian Ketenagakerjaan	Perusahaan	700	848	901	480	500

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	% (Persen)	4,25	4,25a	PM	6,5	8
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS (Statistik Pariwisata)	Juta Orang	10,4	11,52a	12,7a (per November 17)	17	20
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Juta Orang	255	263a	PM	270	275
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS (Statistik Pariwisata)	Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000)	163,7	163,8a	PM	223	260
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nesparnas)	% (Persen)	9,03	10,37a	PM	PM	PM
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	53	55a	55a (per November 17)	PM	PM
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	16	16a	16a (per November 17)	PM	PM
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (Podes)	Km	Rata-rata Daerah Tertinggal: 45,02 (2011) Rata-rata Nasional: 24,92 (2011)	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Data UMKM)	% (Persen)	19,89	19,98a	20,12a (per April 2017)	PM	PM

Keterangan: “a” adalah data realisasi



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 9 berjumlah 17 sebagaimana tertera pada tabel 16.

Kebijakan Tujuan 9. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMN 2015-2019, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mempromosikan industri inklusif, peningkatan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, pelestarian sumber daya alam dan riset, teknologi dan inovasi.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,

Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
6. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan SDM;
8. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband ready*;
9. Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar dan membangun prasarana pita lebar di daerah perbatasan negara; serta
10. Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Pengembangan perwilayahan industri.

Program pemerintah diarahkan pada pembangunan fasilitas pembangunan 14 kawasan industri dan 22 sentra IKM, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung;

2. Penumbuhan populasi industri.

Program pemerintah diarahkan pada penumbuhan 9.000 industri berskala besar dan sedang melalui investasi dan pembinaan IKM di seluruh Indonesia

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri.

Program pemerintah diarahkan pada peningkatan efisiensi (revitalisasi permesinan, keterampilan SDM, klaster), penguasaan iptek dan inovasi (infrastruktur mutu, perekayasaan, riset, *technopreneur*), *new product development*, pembangunan faktor input: kualitas SDM, akses pembiayaan, dan penyediaan insentif untuk industri strategis berdasarkan Kebijakan Industri Nasional, industri maritim, dan industri padat karya.

Untuk meningkatkan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, beberapa arah kebijakan dan kebijakan operasional untuk mendorong akses

tersebut pada periode 2015-2019 dan sesuai dengan target TPB/SDGs, di antaranya:

1. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan melalui (i) peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM, termasuk di sektor industri, oleh bank umum, dan (ii) perluasan akses layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-money* dan kerjasama keagenan (*branchless banking*).
2. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (pembiayaan infrastruktur, pertanian dan kemaritiman dan UMKM), yang disertai dengan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang dikelola oleh bank umum dan BPR.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi:

1. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan;
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas udara melalui (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan, (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien;
3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
4. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif, Pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. Penegakan hukum lingkungan.

Untuk memperkuat riset ilmiah, peningkatan teknologi industri dan inovasi, kebijakan pemerintah RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di berbagai sektor strategis seperti riset untuk ketahanan pangan, energi dan pertahanan dan keamanan; layanan perekayasa teknologi; layanan infrastruktur mutu; layanan pengawasan tenaga nuklir; penguatan kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi;

2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam (hayati, nirhayati), penginderaan jarak jauh, dan mitigasi penginderaan jauh;
3. Penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia;
4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar untuk (i) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek); (iii) pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; serta (iv) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset; dan
5. Pembangunan *Techno Park* dan *Science Centre*.

Program Tujuan 9. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9, sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah: (1) penguatan konektivitas nasional yang turut mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, rel kereta, dermaga penyeberangan dan pelabuhan strategis. Selain pembangunan infrastruktur, program penguatan konektivitas nasional juga turut mendukung jaringan telekomunikasi; (2) pengembangan SDM industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas terkait dengan SDM industri, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah terkait pengembangan usaha kecil dan menengah; (3) penelitian dan pengembangan dari berbagai kementerian terkait inovasi yang diturunkan menjadi indikator anggaran riset dan jumlah peneliti; serta (4) pengembangan teknologi dan kebijakan industri terkait pengurangan emisi CO₂ yang ditimbulkan oleh sektor industri.

Kebijakan terkait memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi, serta secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, maka kebijakan dan program pada target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, serta target 9.5 yaitu memperkuat riset ilmiah dan meningkatkan kapabilitas sektor industri, sudah dapat menjadi solusi untuk permasalahan. Adapun kebijakan dan program untuk mendorong akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, perlu ada pemerataan

jaringan dan komunikasi, perlu ada pemerataan jaringan infrastruktur pita lebar (*broadband*) di seluruh Indonesia untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi bagi masyarakat.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 16. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 16. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Renstra Kementerian PUPR 2015-2019	%	92-93	90,3a	94	97	98
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	RKP 2018	km	820 (2014, kumulatif)	104a	253	379	1.000 (kumulatif)
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	RKP 2018	km	954,43 (2014, kumulatif)	542,27a	902,3	1.353,17	3.258 (kumulatif)
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	RKP 2017	unit	237 (2014)	15 (kumulatif)			252 (kumulatif)
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	RKP 2018	unit	210 (2014)	23a	15	16	270 (kumulatif)
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	RPJMN 2015-2019	lokasi	PM	24 (kumulatif)			
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Renstra Kemenperin 2015-2019	%	18 (2015)	18,2a	18,4	18,6	18,8
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	1. RKP 2015-2019 2. Renstra Kemenperin 2015-2019	%	6,2 (2015)	6,6a	5,2	5,4	5,7
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	1. RPJMN 2015-2019 2. Renstra Kemenperin 2015-2019	%	12,8 (2015)	13,1a	13,4	13,6	13,9

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS diolah Ditjen IKM Kementerian Perindustrian	%	11,8	11,9a	12	12,1	12,2
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta)	567.100	3.662.779a	3.866.275	PM	PM
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	%	17,3	17,4a	18,2	18,1	18
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	RPJMN 2015-2019	%	15,5	Mendekati 26 (kumulatif)			
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Pusdatin Kemenristekdikti dan Survei LIPI ¹	%	0,2	0,25a	0,32	0,55	0,71 (Target 2020: 0.85)
			%	0,15	0,16 - 0,17	0,17 - 0,18	0,18 - 0,19	0,19 - 0,20
		DIPA BBI Kemenperin	%	0,00016	0,00017a	0,00055	0,001	0,002
		RKAKL BLI dan Renstra BLI	Rupiah	212.500.672.000	320.470.977.000a	281.529.922.000	284.837.618.000	738.000.000.000
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		%	93 (2015)	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor BPS	%	56,92	58,30a	PM	PM	PM
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Susenas Kor BPS	%	21,98	25,37a	PM	PM	PM

Keterangan: “a” adalah data realisasi



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 10 target dan 11 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 10 berjumlah 16 sebagaimana tertera pada tabel 17.

Kebijakan Tujuan 10. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya TPB/SDGs, Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian lebih pada tren peningkatan kesenjangan (Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan pendapatan dengan proksi pengeluaran/konsumsi, diukur berdasar Koefisien Gini pengeluaran/konsumsi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)) yang ada di Indonesia. Pengurangan kesenjangan menjadi salah satu target dalam dokumen utama perencanaan Pemerintah saat ini, yaitu RPJMN 2015-2019. Target pengurangan ketimpangan, dalam hal ini diukur dengan Koefisien Gini, menurun dari 0,41 di tahun 2014 menjadi 0,36 pada tahun 2019. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target Koefisien Gini ditetapkan menjadi 0,38. Kebijakan penurunan ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial di masyarakat.

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah yaitu kesenjangan antarkelompok pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut perlu dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan,

peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti:

1. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, peningkatan *collection rate*, serta redistribusi sistem pendapatan yang merata.
2. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
3. Memperbesar investasi padat pekerja;
4. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
5. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;
6. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
7. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;

8. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan
9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Selain itu, kebijakan afirmatif yang secara khusus difokuskan untuk pemerataan antarkelompok pendapatan dan percepatan penurunan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya terpadu berdasarkan tiga isu strategis, meliputi: (1) Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk mempertahankan daya beli dan menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi; (2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan kehidupan terhadap berbagai goncangan ekonomi dan sosial; serta (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan ekonomi produktif berdasarkan lima aset dasar yang dimiliki (aset alam, SDM, fisik, finansial, dan sosial).

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua sasaran utama, meliputi sasaran individu, keluarga, dan rumah tangga (*individual targeting*) untuk mengurangi ketimpangan individu dan sasaran wilayah (*geographic targeting*) dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di KTI, menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, serta orientasi pertumbuhan/pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang sebagian besar berada di KTI juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah tertinggal dan pusat pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal akses layanan dasar dan konektivitas ekonomi di daerah tertinggal.

Terkait dengan kesenjangan kepemilikan aset tanah, redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan prioritas yang tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Redistribusi tanah merupakan kegiatan pemberian tanah kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah secara produktif dan mengurangi rasio gini kepemilikan tanah. Secara khusus, reforma agraria juga dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria.

Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan yang terlampir dalam matriks Bagian 2, antara lain: (1) Program dalam mendukung pencapaian pertumbuhan pendapatan penduduk adalah (i) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, (ii) pengembangan penghidupan berkelanjutan, (iii) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (iv) pembangunan kawasan perdesaan, (v) pembangunan daerah tertinggal dan (vi) pengembangan daerah tertentu; (2) Program dalam menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan adalah (i) penanganan kekerasan terhadap perempuan, (ii) perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, (iii) peningkatan pemajuan dan penegakan HAM, (iv) penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi, (v) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (vi) pembinaan hukum nasional, dan (vii) penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program dalam mengadopsi kebijakan adalah (i) pemantapan peran Indonesia di ASEAN, (ii) peningkatan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, (iii) peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, dan (iv) peningkatan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM; (4) Program dalam memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia adalah (i) peningkatan fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI dan (ii) penempatan dan perluasan kesempatan kerja; (5) Dalam mendukung pencapaian prinsip perlakuan khusus, program pemerintah yang mendukung adalah peningkatan kerjasama perdagangan internasional; serta (6) Dalam mendukung pencapaian pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja, program pemerintah yang mendukung adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah yang turut mendukung pencapaian Tujuan 10, antara lain: (i) advokasi kebijakan mengenai perlindungan buruh migran Indonesia, (ii) pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena masalah, serta (iii) dukungan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 17. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,402 (September)	0,394a	0,391a	0,38	0,36
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,13 (September)	10,7a	10,12a	9,5 - 10	7,0-8,0
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BAPPENAS dan BPS	kabupaten	70 (2014)	PM	PM	PM	80
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BAPPENAS dan BPS	desa	20.432 (2014)	1.500 Desa terentaskan	3.000 Desa terentaskan	4.500 Desa terentaskan	5.000 Desa terentaskan
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	BAPPENAS dan BPS	desa	50.763 (2014)	600 Penambahan Desa Mandiri	1.200 Penambahan Desa Mandiri	1.800 Penambahan Desa Mandiri	2.000 Penambahan Desa Mandiri
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BAPPENAS dan BPS	%	5,39 (2014)	6 - 6,2	6,4 - 6,6	6,7 - 6,9	6,9 - 7,1
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BAPPENAS dan BPS	%	18 (2014)	17,5 - 18	16 - 16,5	15,5 - 16	15 - 15,5
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas	%	PM	PM	PM	PM	PM
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kementerian Polhukam dan BPS	indeks	80,3 (2015)	76,45a	85	86	87
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komnas HA Ditjen HAM (Kemenkumham)	Berkas Pengaduan	Komnas HAM : 4.295 Kemenkumham : 658	Komnas HAM : 3.751	Komnas HAM : 2.176 Kemenkumham : 780	7.000	7.000
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	-	-	90	90	90
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	18 (2010-2015)	15	Menurun	Menurun	Menurun
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Kementerian Keuangan	Persen	8,89 (2015)	11,5a	11,3a	11,18	PM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS	Formal (%)	6	22,59a	24,73a	27,15	100
			Informal (%)	1	1,17a	1,41a	1,98	10
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.								
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	BNP2TKI	Penambahan dokumen	98 (2015)	10	12	14	15

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Kementerian Ketenagakerjaan	Fasilitasi TKLN	100	100	100	100	100

Keterangan: “a” adalah data realisasi



3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 34 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 11. Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 tercakup dalam bidang: (1) pembangunan perkotaan; (2) pembangunan perumahan dan permukiman; (3) transportasi; serta (3) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan, antara lain: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (2) percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (3) pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (4) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (5) peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan; dan (6) pengembangan wilayah perkotaan metropolitan dan besar, perkotaan sedang dan kecil, kota pusaka berbasis karakter sosial budaya, serta kawasan perkotaan di kabupaten.

Kebijakan pembangunan transportasi perkotaan, antara lain: (1) mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota; serta (3) mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan.

Kebijakan penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan, antara lain: (1) penanganan perubahan

iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan: dan (2) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Program Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; (2) bina pembangunan daerah; (3) pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (4) pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (5) perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur; (6) pengurangan risiko bencana; (7) peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; (8) pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 18. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 18. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	PM	PM	PM	PM	100
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan	PM	3	3	3	2
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang & Kota Baru	PM	8 & 5	8 & 5	8 & 5	8 & 5
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a).	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Kementerian Perhubungan	%	24	26	28	30	32
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Besar	3	5	7	7	10

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a).	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang	43 kota belum optimal perannya (2014)	5	10	15	20 Kota dioptimalkan perannya
11.3.1.(b).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Metropolitan baru	2 (2014)	2	3	3	3
11.3.2.(a).	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Kementerian PPN/Bappenas	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11.3.2.(b).	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Kementerian Keuangan	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Pusaka	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(a).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	indeks	151,6	146,9	142,2	137,5	132,8
11.5.1.(b).	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Kota Tangguh	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(c).	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana (BNPB)	Sistem Peringatan Dini	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.2.(a).	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana (BNPB)	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	46 (2013)	30	45	62	80
11.6.1.(b).	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kota Hijau	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan/ Kota Sedang	PM	PM	PM	PM	12/20
11.7.2.(a).	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Statistik Kriminal (BPS)	%	1,04	0,06	PM	PM	PM
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .								
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bappenas	%	PM	PM	PM	PM	PM
11.b.2*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Dokumen	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:“PM” adalah *Prememory*



3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 12. Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab telah diinisiasi oleh pemerintah dengan kebijakan terkait Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dalam dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan SCP, dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

A. Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (10Y SCP Indonesia)

Visi Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (*10 Years SCP Indonesia*) adalah mewujudkan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perubahan perilaku produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun Misi *10 Years SCP Indonesia* 2013 – 2023 adalah menjadi tahap pertama integrasi penerapan SCP dalam beberapa program nasional "*Quick Wins*" dan menyediakan model bagi integrasi penerapan SCP dalam program nasional lainnya.

Sasaran Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 untuk Fase I (2013-2015), adalah:

1. Pengarusutamaan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019)

2. Pengembangan dan pelaksanaan “*SCP Resource Pool Indonesia*”, yaitu fasilitas informasi dan layanan penerapan SCP
3. Pelaksanaan kegiatan SCP kepada masyarakat melalui beberapa program utama atau *Quick Wins*, seperti Ekolabel dan Pengadaan Barang/Jasa ramah lingkungan oleh Pemerintah, Industri Hijau (*Green Industry*), Bangunan Hijau (*Green Building*), Pariwisata Berkelanjutan (*Ecotourism*) dan Pengelolaan Sampah.

Pada Fase II (2016–2020) 10 Years SCP Indonesia diarahkan pada sasaran:

1. Memasukkan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
2. Melengkapi “*SCP Resource Pool Indonesia*” dan meningkatkan pemanfaatan
3. Menerapkan pemantauan dan evaluasi program dengan indikator SCP pada program “*Quick Wins*”;
4. Menyiapkan penerapan indikator SCP untuk program kerja pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 yang berkorelasi dengan “*post-2015 development agenda*”.

Sedangkan pada Fase III (2021-2023) 10 Years SCP Indonesia diarahkan pada sasaran sebagai berikut:

1. Menerapkan pemantauan dan evaluasi dengan indikator SCP pada pelaksanaan RPJMN 2020-2024 (“*Quick Wins*” sudah termasuk di dalamnya);
2. Perbaikan berkelanjutan terhadap “*SCP Resource Pool Indonesia*”; dan

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Penerapan SCP diperkuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dengan masuknya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim, dan Agenda Pembangunan Nasional dengan arah kebijakan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan kebijakan operasional:

1. Perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye;
2. Penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam *business cycle* dan *business process*;
3. Pengembangan standar produk yang ramah lingkungan; dan
4. Pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan juga diatur dalam Agenda Pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan:

1. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan
3. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan operasional yang akan ditempuh yakni melalui:

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melalui berbagai media;
3. Penyediaan pusat-pusat pelayanan masyarakat;
4. Penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam hal pendanaan;
5. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah;
6. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan
7. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Khusus terkait dengan upaya penerapan Program Proper, Pengelolaan B3 dan Sampah, pada RPJMN 2015-2019 terdapat arah kebijakan:

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan salah satunya melalui kebijakan operasional: memperluas

cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;

2. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui kebijakan operasional: (a) menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (b) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melalui kebijakan operasional: (a) pengembangan upaya 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); (b) pengembangan bank sampah dan pengomposan; (c) pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional; (d) peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaan sampah.

Program Tujuan 12. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain:

1. Target melaksanakan *the 10-YSCP* diimplementasikan oleh Program Nasional 10 tahun SCP 2013-2023 melalui kegiatan pertemuan dalam rangka pemutakhiran kolaborasi SCP, dengan pelaksana adalah KLHK.
2. Target mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, dilaksanakan dengan: (1) program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah, dan B3 melalui: (a) kegiatan pengendalian pencemaran udara, dengan indikator output proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri; (b) kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, dengan indikator output proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai; serta (c) kegiatan pengendalian pencemaran air; (2) program pengelolaan sampah, limbah, dan B3, melalui: (a) kegiatan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3; (b) kegiatan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3; serta (c) kegiatan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3.
3. Target mengurangi produksi limbah melalui program pengelolaan sampah, limbah, dan B3, melalui kegiatan pengelolaan sampah.
4. Target mendorong perusahaan, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dilakukan dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK melalui: (a) kegiatan penerapan

SNI ISO 14001 bagi perusahaan; dan (b) . kegiatan pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

5. Target meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, direncanakan akan diusung program pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Target menjamin masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam, dilaksanakan melalui program pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah sebagai berikut:

1. Target peningkatan peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru, program yang dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia adalah Mengikuti penghargaan Proper yang dilakukan oleh KLHK melalui Kegiatan Mengikuti Penghargaan PROPER.
2. Target pengolahan limbah B3 yang sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dengan program yang di buat oleh PT. Sucofindo (Persero) adalah validasi dan verifikasi gas rumah kaca melalui kegiatan sampling kualitas tanah dan air untuk mengetahui kadar pencemaran limbah B3 dan logam berat.
3. Target peningkatan timbulan sampah yang didaur ulang dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dengan: (1) program pembangunan depo pendidikan pelestarian lingkungan, melalui kegiatan: (a) pembangunan depo pendidikan pelestarian lingkungan dan. (b) pembangunan titik pemilahan sampah daur; (2) sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan melalui kegiatan: (a) sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan bagi siswa di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi; (b) sosialisasi gaya hidup pelestaraian lingkungan bagi komunitas masyarakat, sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan; (c) penerapan gaya hidup pelestarian lingkungan sebagai bagian dari *basic knowledge* relawan.
4. Target peningkatan perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, program yang dilaksanakan oleh PT. SUCOFINDO (Persero) adalah: (1) program implementasi dari ISO 14001 melalui kegiatan penerapan ISO 14001 di setiap area operasional Nestlé; serta (b) program sertifikasi sistem

manajemen (ISO 14001, OHSAS 18001, ISPO/RSPO, dll.), melalui kegiatan: identifikasi aspek lingkungan, membuat indikator kinerja, dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kemampuan organisasi terhadap aspek lingkungan yang terkait lingkup aktivitasnya.

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 19. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 19. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kolaborasi tematik	4	5	6	7	8
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta Proper	1.406	1.422	1.500	1.500	1.500
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Juta ton	100	120	130	140	150
Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Juta ton	13,5	30	34	47.2	61.5
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	PM	PM	PM	PM	25
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk Ramah Lingkungan	-	-	-	2	4
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	-	-	-	10	20

Keterangan: “PM” adalah *Prememory*.



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 13. Kebijakan dalam rangka mendukung TPB – Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, baik dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Bidang, serta terinternalkan dalam pembangunan sektor. Selain itu, penanganan perubahan iklim juga dimuat dalam Pembangunan Lintas Bidang.

Sasaran (target) yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan kebencanaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;
2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG); dan
5. Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui kebijakan operasional: (i) mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon; (ii) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (iii) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (v) mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah; (vi) melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui kebijakan operasional: (i) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (iii) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; (v) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antarinstansi terkait; dan (vi) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i) mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat; (ii) mendiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan (iii) mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan
4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i)

meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomasi/digital; (ii) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (iii) memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana; pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan reviu RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui upaya antara lain: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi; menyediakan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; meningkatkan kerja sama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana; meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; memelihara dan menata lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan membangun serta menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui: penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penang-gulangan bencana di pusat dan daerah; penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana; pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana; pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Lebih jauh lagi, khusus untuk perubahan iklim, terdapat sasaran dan arah kebijakan dalam pembangunan lintas bidang yaitu:

1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, mendekati 26% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya terlaksananya langkah-langkah di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim, yakni

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK, dengan kebijakan operasional: (i) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii) meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal dan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF); dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15 daerah percontohan, dengan kebijakan operasional: (i) mengarusutamakan RAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklim seperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) menyusun kajian kerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerah percontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi; dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.

Program Tujuan 13. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah dipetakan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, rencana strategis kementerian/lembaga terkait, atau dokumen lain yang relevan. Pada TPB/SDGs dengan target terkait penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi khususnya

ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah maka program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator dimaksud adalah Program Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Adapun instansi pelaksana program dan kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara khusus untuk upaya mengurangi jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator dimaksud adalah Program Penanggulangan Bencana dengan BNPB melalui kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

Upaya pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional dilaporkan ke tingkat global dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia dan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan. Adapun program dan kegiatan utama untuk mencapai target dan indikator meliputi Program Pengendalian Perubahan Iklim melalui kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi. Instansi pelaksana program dan kegiatan ini adalah KLHK.

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain:

A. Target penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam antara lain meliputi:

1. Program Masjid Ramah Lingkungan melalui kegiatan Sosialisasi menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inisiatif pelaksanaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Program *Role of Religious Places in Disaster Situation II, Indonesia* melalui kegiatan Membentuk tim siaga bencana di tingkat komunitas berbasis rumah ibadah serta Program Respon Bencana di Wilayah Indonesia melalui kegiatan Pembagian bahan makanan pokok kepada korban bencana alam di Indonesia. Kedua program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh *Islamic Relief Indonesia*;
3. Program Mendukung Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Perubahan Iklim melalui kegiatan Fasilitasi penilaian Kota Tangguh

Bencana dan uji coba indikatornya dan kegiatan Pengusulan hasil ujicoba indikator untuk Kota Berkelanjutan, serta Program *Partners for Resilience - Strategic Partnership* melalui kegiatan Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah dan kegiatan Pengusulan hasil pembelajaran penyusunan rencana penanggulangan bencana (PB) untuk perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB. Program-program dan kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Yayasan Karina;

B. Target pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional:

1. Program Masjid Ramah Lingkungan melalui kegiatan Sosialisasi menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inisiatif pelaksanaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Program *Green Management* melalui kegiatan *Green building, green industry, green port, eco industry park*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. Sucofindo;
3. Program Mendorong Inisiatif Jurisdiksional Untuk Hutan dan Iklim melalui kegiatan Pembuatan kesepakatan pembangunan hijau di Kalimantan Timur, yang dilaksanakan oleh TNC Indonesia;
4. Program Mendukung Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Perubahan Iklim melalui kegiatan-kegiatan i) Mendukung petani sawah tadah hujan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, ii) Mendukung petani garam dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, dan iii) Mendukung petani Ikan Gerapu dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan dalam program dimaksud dilaksanakan oleh *Islamic Relief Indonesia*;
5. Program *Nestlé Policy in Environmental Sustainability* melalui kegiatan-kegiatan i) Penurunan emisi gas rumah kaca di pabrik, ii) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Panjang, Lampung, iii) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Kejayan, Jawa Timur, dan iv) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Cikupa, Banten. Kegiatan-kegiatan dalam program dimaksud dilaksanakan oleh PT Nestlé Indonesia.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13

tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAN TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 13 dalam Buku Matriks RAN TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 20. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Dokumen	69	40	40	40	69
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM	PM	PM	PM	PM
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	RPJMN 2015-2019	Dokumen BUR ke-	1	2a	-	3	-
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	RPJMN 2015-2019	Dokumen	1	1a	1	1	1

Keterangan: “a” adalah data realisasi.



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan nasional ini diwujudkan dalam bentuk agenda pembangunan nasional terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 – Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta (2) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam. Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya;
2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, dengan strategi,

- termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya;
3. Mengendalikan IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak di laut;
 4. Memperkuat peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim.
 5. Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;
 6. Mengelola perikanan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) berbasis WPP, pemberantasan IUU *fishing*, hingga pemanfaatan potensi ZEE dan laut lepas (*high seas*);
 7. Memperbaiki tata kelola perikanan, untuk terciptanya iklim yang kondusif guna mewujudkan kinerja, efektivitas kerja sama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan, yang dilakukan antara lain melalui reformasi pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP;
 8. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah/pemasar produk ikan, antara lain melalui penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitasi kredit yang murah, mudah dan aksesibel, serta penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi.

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (2) pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; (3) riset dan sumber daya manusia; (4) pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 21. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 21. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

[illegible]

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Regulasi /Kebijakan	-	2a	3	3	3
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	lokasi	34	34a	34	34	34
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	orang	20,000	22.500a	25.000	27.500	28.000
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari <i>"The future we want"</i> .								
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Dokumen Ratifikasi	1 (1985)	-	-	-	-

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terdiri dari kebijakan tata kelola hutan, peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Tata Kelola Kehutanan. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk menuju hal tersebut, arah kebijakan sektor kehutanan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, pembentukan dan operasionalisasi KPH, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan.

Kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. Permenhut P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,

Permenhut No. P.36/Menhut-1I/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 jo. PermenLHK No. P.16/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 jo. Permenhut No. P.XX/Menhut-II/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

2. Revisi PP No. 38/2007 tentang Pembagian Wewenang Pusat-Daerah Bidang Kehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
3. Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan lembaga dan pengangkatan hakim perkara.
4. PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai pengganti PP No. 10/2010; serta PP No. 105/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai tindak lanjut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dalam rangka pembenahan peraturan penggunaan kawasan hutan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan yang ditetapkan adalah memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan konservasi.

Beberapa kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Revisi terhadap UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Turunan regulasi yang mengatur tentang jasa lingkungan dari hutan dan kawasan konservasi pada khususnya.
3. Sinkronisasi antara peraturan mengenai kehutanan dan minerba dalam pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi (Revisi PP No. 28/2011 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagai turunan UU No. 2/1990).

4. Peraturan turunan dari *Protocol Cartagena* yang mengatur perlindungan dari keanekaragaman hayati meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua Organisme Hasil Modifikasi Genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Kerangka regulasi yang diperlukan: dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati, yaitu: percepatan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik, sebagai tindak lanjut dan upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Indonesia.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut, saling terkait, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan faktor tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3)

pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (4) pengendalian DAS dan hutan lindung; (5) pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (6) peningkatan kualitas perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; (7) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 22. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	50,6	50,7	50,6	50,6	50,6
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1.(a).	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hektar	10,000	40,000	60,000	80,000	100,000
15.2.1.(b).	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPA	20	100	150	200	260
15.2.1.(d).	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPHK	20	30	50	80	100
			KPHL	40	80	120	160	182
			KPHP	40	147	212	269	347
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3.1.(a).	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000	5,500,000

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.								
15.5.1*.	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	2	4	6	8	10
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	PIC	1	3	5	7	10
			Unit	1	1	1	1	1
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.								
15.7.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	75	75	75	75	75
15.7.1.(b).	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Spesies	2	4	6	8	10
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.								
15.8.1.(a).	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan,	Kementerian Pertanian	Dokumen Karantina Hewan	3	3	3	3	3

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	serta keamanan hayati hewani dan nabati.		Dokumen Karantina Tumbuhan	3	3	3	3	3
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen	3	2	2	2	2
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.								
15.c.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	75	75	75	75	75



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 34 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (2) menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (3) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang selaras adalah:

Pertama, arah kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian meliputi: (1) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak

kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (4) meningkatkan kualitas penegakan hukum, melalui peningkatan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan sistem peradilan anak.

Kedua, arah kebijakan terkait jaminan kesamaan akses pada keadilan adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui penegakan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pendidikan HAM.

Ketiga, arah kebijakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, meliputi: (1) peningkatan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi; (2) penerapan pengawasan yang independen, professional dan sinergis; (3) peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; (4) peningkatan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa; (5) penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya; (6) penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif; (7) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; (8) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (9) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (10) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; serta (11) menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) perlindungan anak; (3) penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, beberapa program yang akan dilaksanakan

ialah: (1) program pembinaan hukum nasional; (2) program peningkatan manajemen peradilan agama; (3) program peningkatan manajemen peradilan umum; (4) program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta (5) program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM.

Program untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, yang akan dilaksanakan yaitu: (1) program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (2) program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; (3) program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) program bina otonomi daerah; (5) program pengawasan pelayanan publik; (6) program bina pembangunan daerah; (7) program pembinaan politik dan pemberdayaan pemerintah umum; (8) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; (9) program pengawasan penyelenggaraan pemilu; (10) program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan; (11) program perluasan pelayanan dasar; (12) program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Adapun program-program terkait yang dilakukan oleh berbagai organisasi nonpemerintah dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan 16, beberapa diantaranya adalah: (1) program membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis ormas dan pondok pesantren; (2) program penguatan dukungan masyarakat sipil dan partisipasi anak untuk menegakkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak anak dari resiko migran, eksploitasi dan perdagangan anak; (3) program menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; (4) program pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi korban & pejuang terkait pelanggaran HAM; dan (5) sosialisasi program-program unggul pemerintah terhadap layanan publik.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 23. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 16 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata

Kelola - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 3.



Tabel 23. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	1491	PM	PM	PM	PM
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	SOPS Polri	Kematian/ 100.000 Penduduk	18	PM	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal (BPS)	Persentase	1,04	0,6	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Susenas Model Hansos (BPS)	Persentase	73,57 (2014)	PM	PM	PM	PM
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	Persentase	54,98 (2014) (Anak umur 1-14 tahun)	PM	PM	PM	PM
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase	Anak laki-laki: 38,62; Anak perempuan: 20,48 (2013)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan	Kementerian Sosial, KPPPA, BPS, BAPPENAS	Persentase	Perempuan: 6,28 dan Laki-Laki: 6,37	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	seksual sebelum umur 18 tahun.							
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Robinops SOPS PPA	Persentase	43,58 (BPS)	PM	PM	PM	PM
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	BPHN (Kementerian hukum dan HAM)	Orang	litigasi 3.450; nonlitigasi 259	litigasi 8.005a; nonlitigasi 1.188a	litigasi 6.365; nonlitigasi 7.245	litigasi 6.375; nonlitigasi 7.250	litigasi 3.021; nonlitigasi 3.645
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Badilag, Badilum dan Badimiltun MA	Perkara	sidang di luar gedung pengadilan dan Pos layanan hukum 119.175; pembebasan biaya perkara 114.122	sidang di luar gedung pengadilan 111.611a; pembebasan biaya perkara 139.599a; pos layanan hukum 197.137a	sidang di luar gedung pengadilan 113.702a; pembebasan biaya perkara 114.080a; Pos layanan hukum 158.610a	sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara 945; Pos layanan hukum 24.171	sidang di luar gedung pengadilan 55.665; pembebasan biaya perkara 3.200; Pos layanan hukum 96.500
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Ditjen Pemasyarakatan (Kemenkumham)	Persentase	2,6	2,9a	3,1a	Menurun	Menurun
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	3,59	-	3,71a	-	4
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Kementerian Keuangan	Persentase	91,05*	89,5	PM	PM	PM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase	K/L : 65 Provinsi : 85 Kabupaten : 54 Kota : 65	K/L : 84a Provinsi : 91a Kabupaten : 66a Kota : 77a	K/L : 87 Provinsi : 73 Kabupaten : 48 Kota : 56	K/L : 91 Provinsi : 78 Kabupaten : 54 Kota : 61	K/L : 95 Provinsi : 85 Kabupaten : 60 Kota : 65
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	KemenPAN RB	Persentase	K/L : 76.62 Provinsi : 50 Kab/Kota : 8.60	K/L : 85.37a Provinsi : 64.71a Kab/Kota : 14.53a	K/L : 75 Provinsi : 57 Kab/Kota : 30.5	K/L : 80 Provinsi : 66 Kab/Kota : 40	K/L : 85 Provinsi : 75 Kab/Kota : 50
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase	27.20	39.31a	60	70	80
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	KemenPAN RB	Persentase	K/L : 86.84 Provinsi : 8.82 Kab/Kota : 9.60	K/L : 92.68a Provinsi : 38.24a Kab/Kota : 37.29a	K/L : 64 Provinsi : 40 Kab/Kota : 25	K/L : 69 Provinsi : 50 Kab/Kota : 35	K/L : 75 Provinsi : 60 Kab/Kota : 45
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	Persentase	Kementerian : 27.27 Lembaga : 20 Provinsi : 9 Kab/Kota : 5.26	Kementerian : 44a Lembaga : 66.67a Provinsi : 39.39a Kab/Kota : 22.14a	Kementerian : 58 Lembaga : 55 Provinsi : 54.5 Kab/Kota : 30.5	Kementerian : 78 Lembaga : 77.5 Provinsi : 77.25 Kab/Kota : 45.24	Kementerian : 100 Lembaga : 100 Provinsi : 100 Kab/Kota : 60
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	KPU	Persentase	16,6 DPR RI (2014) 16 DPRD Provinsi (2014) 14 DPRD	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)			

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
				Kab/Kota (2014)				
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKN; Sakernas BPS	Persentase	Eselon I = 20,66 dan Eselon II = 16,39 (2014)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	66,87	62,05a	77	78	79
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	80,30	76,45a	85	86	87
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	70,63	70.11a	66	67	68
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS)	Persen	74,27a	74,5a	75.41a	NA	NA
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial)	Persen	NA	NA	NA	NA	77,4 (RPJMN)
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS)	Persen	79,92	81,68a	83,33a	82	85
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	Komnas HAM : 4.295 Kemenkumham : 658	Komnas HAM : 3.751a	Komnas HAM : 2.176a Kemenkumham : 780a	7.000	7.000
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas Perempuan	Persentase	88,75	90,78a	80,7a	90	90

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.							
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan Institusi Riset, Komisi Informasi Pusat	Negara	1	1a	1	1	1
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Persentase	47	50,38a	70	75	80
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Persentase	56,63	54,02a	65	65	65
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	-	-	-	Perumusan skema proses sertifikasi untuk PPID	*target akan disesuaikan dengan hasil perumusan skema sertifikasi pada tahun 2018
Target 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.								
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komnas HAM	Lembaga	1	1a	1a	1a	1
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	Komnas Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	18 (2010-2015)	15a	Menurun	Menurun	Menurun

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*; dan “ NA” *adalah Not Available*.



3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 17. Tujuan 17 meliputi beberapa kluster kebijakan penting yaitu: (1) mobilisasi sumberdaya domestik; (2) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (3) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (4) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (5) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah:

Pertama, arah kebijakan fiskal untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik adalah reformasi kebijakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Reformasi kebijakan secara komprehensif tersebut dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: (a) bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan; (b) bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait; dan (c) bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakan nasional. Adapun reformasi

perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi perpajakan dilakukan dengan penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari remitansi didukung oleh upaya memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja dengan perluasan jaringan cabang bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima remitansi.

Dalam rangka pengelolaan anggaran negara, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, fokus utama dalam Tujuan 17 bidang kerjasama multipihak meliputi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan KPBU. KSST merupakan bagian pembangunan bidang politik luar negeri dengan arah kebijakan pada RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Kebijakan operasional yang akan dilakukan adalah (a) intervensi kebijakan pengembangan KSST; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. KSST akan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (i) penyusunan mekanisme pemberian fasilitasi dan insentif kepada sektor swasta untuk melaksanakan KSST. Saat ini sedang dikembangkan model insentif bagi swasta melalui kajian *Private Sectors Engagement*, (ii) mendorong pelibatan universitas dalam penyusunan kajian tentang KSST serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara Selatan di Indonesia, (iii) penguatan kerangka regulasi melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang pemberian bantuan internasional dan penguatan kerangka pendanaan melalui pembentukan unit khusus yang menjalankan fungsi pendanaan, (iv) pengembangan skema kerjasama pembangunan yang inovatif berupa kerangka kerjasama pembangunan *Reverse Linkage*.

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta antara lain dengan meningkatkan skema pembiayaan pembangunan alternatif melalui skema KPBU. Arah kebijakan dalam RPJMN

2015-2019 yang terkait bidang ini adalah meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) pengarusutamaan skema KPS sebagai salah satu pendekatan pembangunan infrastuktur; (2) penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS; (3) pengembangan alternatif pembiayaan infrastuktur; (4) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan KPS; (5) pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*); (6) Kerjasama Pemerintah dan Swasta skala kecil dan menengah; (7) implementasi prinsip *Value for Money* (VFM); dan (8) realisasi proyek investasi swasta strategis.

Sedangkan kebijakan operasional dalam rangka mencapai sasaran Kerjasama Pemerintah Swasta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 yang selaras dengan program Kerjasama Pemerintah Swasta dalam RPJMN 2015-2019 antara lain (i) mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun); (ii) mengkaji dan menguji-cobakan berbagai model KPBU berbasis pendanaan pemerintah (*innovative financing scheme*); (iii) mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD; (iv) menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF); (v) penyediaan dana untuk dukungan dan jaminan pemerintah untuk proyek KPBU; dan (vi) pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infastruktur dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk mendorong proyek-proyek dengan skema KPBU.

Ketiga, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah (1) memperkuat daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; dan (2) mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kebijakan operasional yaitu: (i) menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk

Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*); (ii) meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*); (iii) mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*); dan (iv) meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*).

Keempat, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terkait dengan peningkatan TIK dan konektivitas di bidang informatika: (1) mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) menjadi *pitalebar-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO; (2) mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas; (3) mendorong pembangunan akses tetap pitalebar, arah kebijakan ini didasarkan pada pembangunan infrastruktur *wireline* memanfaatkan kabel optik dapat membuat kualitas akses koneksi lebih bagus dibandingkan dengan *wireless broadband*; (4) membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara; (5) mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik; (6) mendorong tingkat literasi TIK; dan (7) mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri.

Kelima, sejalan dengan arah RPJMN 2015 – 2019 yang terkait dengan pembangunan statistik, arah kebijakan antara lain mencakup (i) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; (ii) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta; (iii) meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data; (iv) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas, dan amanah; serta (v) peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.

Program Tujuan 17. Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Aksi Tujuan 17 yang tertuang pada matriks 2 diantaranya adalah (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, (2) pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, (3) perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, (4) pengelolaan anggaran negara, (5) program

penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, (6) program pengelolaan biaya dan risiko, (7) program peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan Dan Triangular yang akan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan lokakarya serta pengiriman tenaga ahli. Sebanyak 50% kegiatan dalam kerangka KSST berupa pelatihan, diikuti kegiatan lokakarya/*workshop* sebanyak 18%, pengiriman tenaga ahli dan pemberian beasiswa masing-masing sebesar 11%, dan sisanya berupa kegiatan penyusunan kebijakan termasuk strategi komunikasi, serta promosi dan pelaporan. (8) program penyelenggaraan pos dan informatika, (9) program perundingan perdagangan internasional, (10) program pengembangan ekspor nasional, (11) program peningkatan kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, (12) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik, (13) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPS lainnya, serta (14) program perluasan pelayanan dasar.

Pelaksanaan program-program tersebut semakin diperkuat dengan program organisasi nonpemerintah lainnya yaitu, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, kerja sama di bidang perdagangan, dan proram kemitraan antara pemuda dengan filantropi dan pelaku usaha.

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 24. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 17 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 24. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS: Statistik Keuangan	Persentase	13,08	12,54a	12,75	12,76	PM
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Persentase	10,75	10,36a	10,82	10,9	>12
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan	Persentase	66,73	67,02a	70,41	71,12	PM
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	Persentase	1,09	0,93a	0,85	0,82	0,79
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.								
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Bank Indonesia	Persentase	30,57	35,35a	PM	PM	PM
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	57	84a	86a	82	150
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	Persentase	77,8 (400 Kab/Kota)	82,5 (424 Kab/Kota)	446 Kab/Kota	479 Kab/Kota	100 (514 Kab/Kota)
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen	Persentase	38% perkotaan	49% perkotaan	53% perkotaan	60% perkotaan	71% perkotaan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
		Penyelenggaraan Pos dan Informatika) dan BPS		;26% perdesaan	;34% perdesaan	;37% perdesaan	;41% perdesaan	;49% perdesaan
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	Persentase	93	100	100	100	100
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS Susenas KOR	Persentase	21,98	25,37a	PM	PM	PM
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	Persentase	99 (2016)	99a	PM	PM	100
Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Milyar	110,5	74a	83,3a	105,6	120
Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .								
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbebaskan di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Kementerian Perdagangan, World Bank, WTO, UNCTAD-TRAINS	Rata-rata tarif terbebaskan	9,05	8,47a	7,92a	7,33	6,78
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	Persentase	-9,8	0,22a	15,83a	5-7	5
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.								
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, BPS, dan BI	Dashboard	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Keuangan; BAPPENAS;	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	1	0a	1a	1	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Pemerintah Daerah.						
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Alokasi	PM	PM	PM	PM	PM
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen.	Persentase	89,3 (2016)	89,3a	85	85	85
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	Persentase	91,35 (2016)	91,35a	90	90	90
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik: 1. SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik); 2. Kuesioner metadata statistik dasar, sektoral dan khusus.	Metadata	850 (2016)	850a	900	900	900
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Pusat Statistik.	Persen	-	90	96	98	100
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Badan Pusat Statistik.	UU	1 (1997)	-	-	-	-
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Badan Pusat Statistik mengajukan review melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).	Review	-	-	-	-	1
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Badan Pusat Statistik.	Strategi Nasional	-	-	-	-	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	Pegawai	3.728 (2016)	3.728a	6.000	6.000	6.000
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	Persen	-	-	70	70	70
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	Persen	-	-	30	30	30
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	2010	-	-	-	-
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri.	Data Registrasi	-	-	-	-	1
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik : 1. Statistik pengunjung web: Informasi publik; 2. Berkala: Laporan Pelayanan Data; 3. Website Badan Pusat Statistik.	Pengunjung	-	825.000	835.000	850.000	865.000
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	Persentase	94,88	96,49a	76	76	80
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	Persentase	Perencanaan (36) dan M/E (27) (2015)	16,7	44	46	48

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*; dan “NA” adalah *Not Available*.

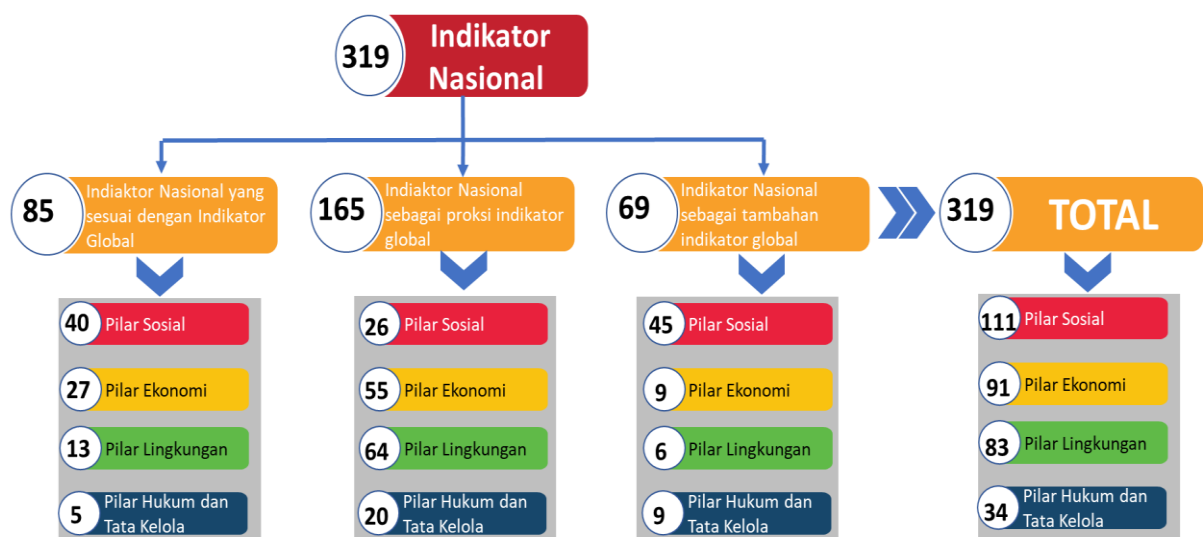
BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.



Gambar 47. Target dan Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Pilar Pembangunan

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan global dan 94 target nasional yang selaras dengan target global yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 94 target nasional diukur dengan 319 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar (Gambar 48.). Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.

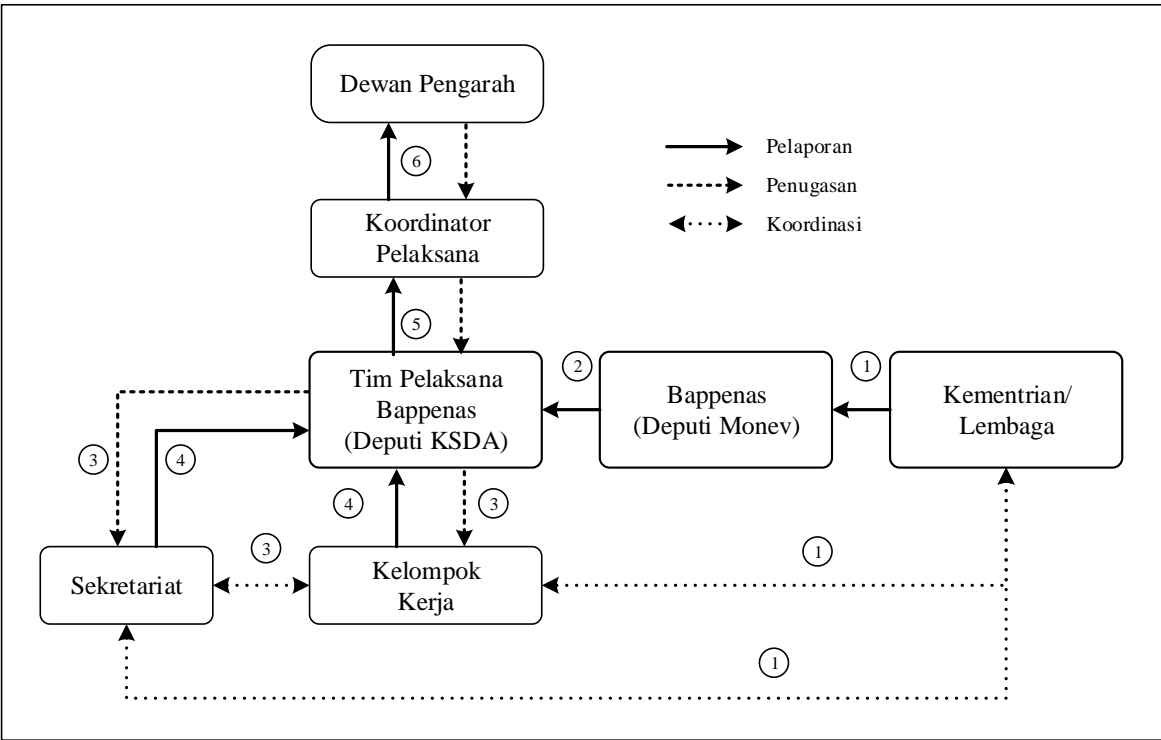
Merujuk kepada konsep dan cara pengukurannya, 319 Indikator TPB/SDGs Indonesia dapat dipetakan menjadi 3 kategori: *Pertama*, indikator nasional yang sesuai dengan indikator global berjumlah 85 indikator; *Kedua*, indikator nasional sebagai proksi indikator global, yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab indikator global sebanyak 165; dan *Ketiga*, indikator nasional sebagai pelengkap indikator global sebanyak 69. Indikator-indikator tersebut terpetakan ke dalam pilar sosial sebanyak 111, pilar ekonomi sebanyak 91, pilar lingkungan sebanyak 83 dan pilar hukum dan tata kelola sebanyak 34.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.1.1 Mekanisme Pemantauan RAN

Alur pemantauan RAN dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden 59 tahun 2017 dan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No.....Tahun 2018 tentang.....

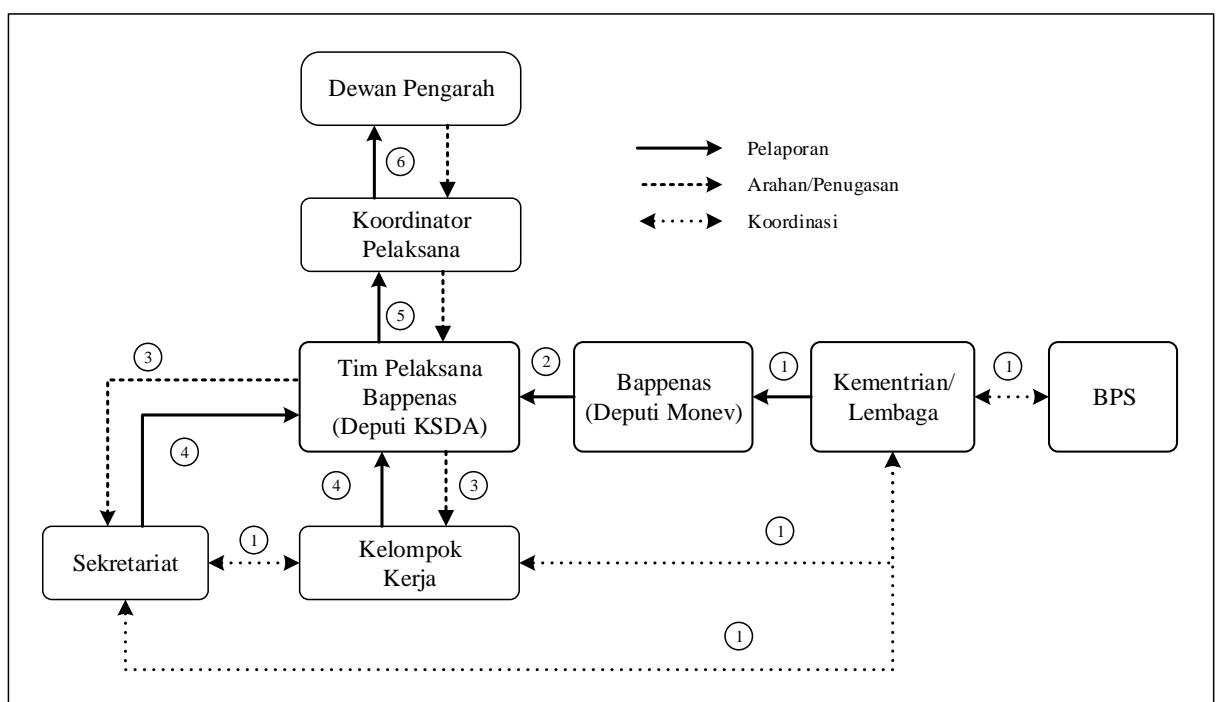


Gambar 48. Alur Informasi Pemantauan untuk RAN (Matriks RAN)

Alur pelaporan dalam pemantauan RAN (Gambar 49.) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS sesuai dengan Permen PPN No.1 Tahun 2017. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (*Langkah 3*).

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAN juga mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No....Tahun 2018 tentang..... Evaluasi RAN dilakukan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMN (kaji ulang pertengahan dan akhir) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGS serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi dari indikator-indikator yang ada. (Gambar 50).



Gambar 49. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN

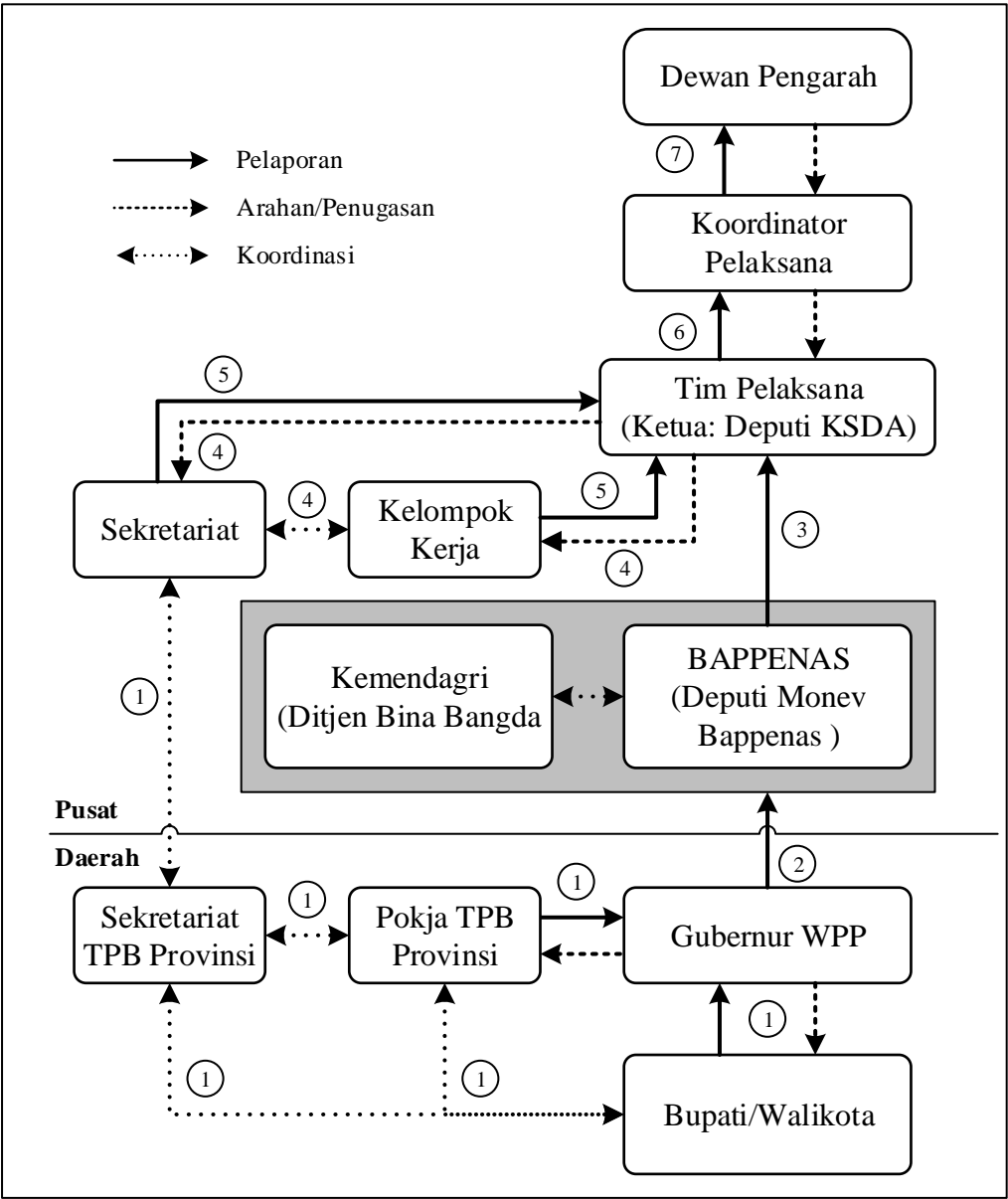
Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah (Gambar 50) sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan sesuai Permen PPN No.1 Tahun 2017 (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/BAPPENAS c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGS dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGS Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGS Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

4.1.3 Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi

kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.



Gambar 50. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah (Gambar 51) sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator

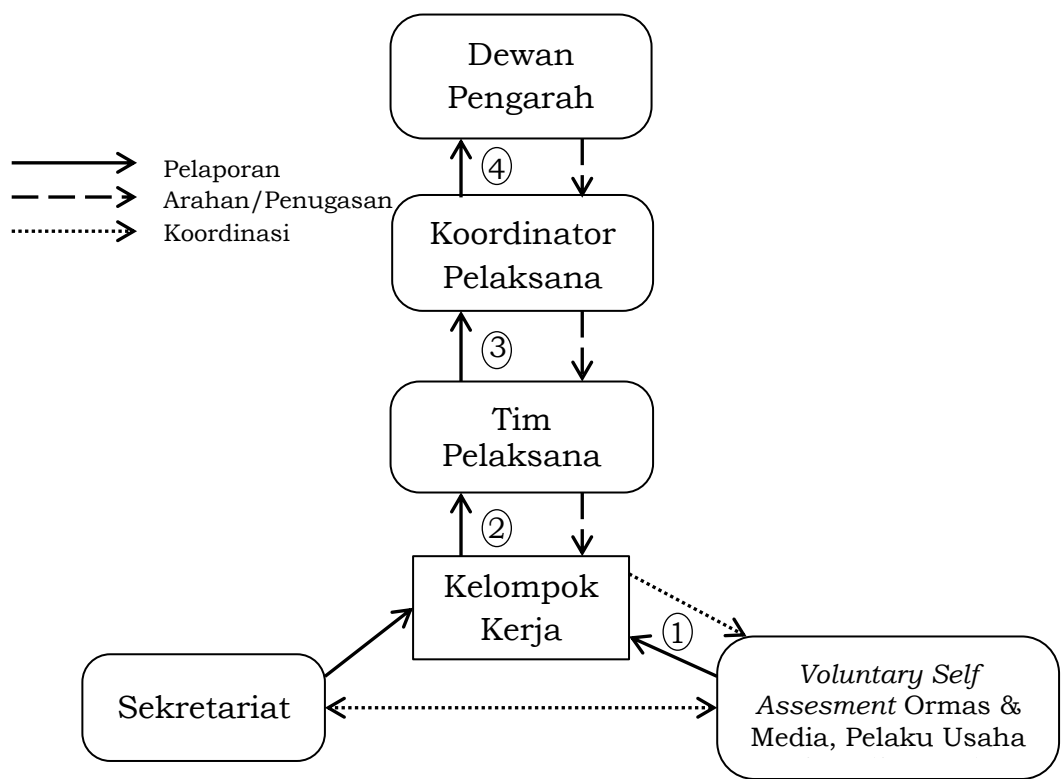
serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 6*).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7*).

4.1.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat

sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 51. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 52) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assesment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada KetuaTim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target

TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.



Gambar 52. Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB/SDGS Nasional dan Daerah

4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman [sdgs.BAPPENAS.go.id](https://sdgs.bappenas.go.id) sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/*Goal* tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/*Goal* yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAN, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAN TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk

mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, akan ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat pusat dengan Keputusan Menteri, yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya. Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat daerah akan ditetapkan dengan peraturan gubernur (Pergub). Sementara itu, tata cara

koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen Strategi Komunikasi TPB/SDGs yang perlu dijabarkan secara lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAN TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

DAFTAR ANAK LAMPIRAN

1. Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial.....	281
a. Matriks Bagian 1-Program dan Kegiatan Pemerintah.....	282
b. Matriks Bagian 2-Program dan Kegiatan NonPemerintah....	474
c. Matriks Bagian 3-Indikator TPB/SDGs yang akan dikembangkan.....	709
2. Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi.....	714
a. Matriks Bagian 1-Program dan Kegiatan Pemerintah.....	715
b. Matriks Bagian 2-Program dan Kegiatan NonPemerintah...	930
c. Matriks Bagian 3-Indikator TPB/SDGs yang akan dikembangkan.....	1051
3. Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup.....	1057
a. Matriks Bagian 1-Program dan Kegiatan Pemerintah.....	1058
b. Matriks Bagian 2-Program dan Kegiatan NonPemerintah....	1136
c. Matriks Bagian 3-Indikator TPB/SDGs yang akan dikembangkan.....	1280

4. Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	1285
a. Matriks Bagian 1-Program dan Kegiatan Pemerintah.....	1286
b. Matriks Bagian 2-Program dan Kegiatan NonPemerintah...	1326
c. Matriks Bagian 3-Indikator TPB/SDGs yang akan dikembangkan.....	1350

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan)	Unit	170	30	20	30	30	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan)	Unit	12003	5350	1000	7300	7300	-	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 2: Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	2.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Pesisir, PPK, dan PAN)	Unit	0	0	0	100	100	-	APBN	Kementerian Sosial
	2.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan	Unit	0	410	710	3475	3475	-	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pesisir, PPK dan PAN)									
PROGRAM 3: Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran										
Kegiatan 1: Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan	1.1 Terlaksananya subsidi pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Juta Rumah Tangga	15,5	15,5	14,2	5,5	3	64.387.000	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	Kab/Kota	0	0	44 Kota	98 Kota dan 217 Kabupa ten	Semua Kota dan Sebagia n Besar Kabupa ten	-		
Kegiatan 2: Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	2.1 Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin (PKH).	Keluarga	2.8 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta	-	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

[illegible]

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran	1.1 Terlaksananya subsidi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan.	Triliun Rp	85,75	69,76	48,56	52,66	52,66	108,8 (sama dengan anggaran Keg. 1 dibawah dikarenakan merupakan satu unit eselon II)	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Terlaksananya subsidi (BBM) dan elpiji 3 kg bagi rumah tangga miskin dan rentan serta UKM.	Triliun Rp	229	65	30.12	10.298	10.298	185,96		
PROGRAM 5: Pemenuhan Kebutuhan Dasar										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Dasar	1.1 Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.	orang	52333	53307	28366	28383	31220	1.911.323,96	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas	orang	0	0	2500	3000	3500	24.191,88	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	2.1 Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	Kab/kota	0	50	70	130	150	75.000	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 6: Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran	Provinsi	-	-	-	9	9	10.175.000	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Pelayanan terpadu pencatatan sipil	Daerah	548	548	548	548	548	83.361.513	APBN	Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan 2: Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2.1. Terwujudnya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik	Kegiatan	-	-	1	1	1	6.387.500	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	dengan K/L untuk pelayanan publik									
PROGRAM 7: Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	1.1 KUKM yang difasilitasi peningkatan produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), standarisasi mutu, dan sertifikasi produk	KUMKM	1450	-	-	-	-	10.560,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.2 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk	KUMKM	-	500	200	150 /1980	150	10.249	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.3 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi merek dan pengemasan	KUMKM	-	350	1000	1314	684	8.446,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan, dan Obat, SVLK, Iso, dll)	KUMKM	-	1000	900	300	300	10.745,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.5 KUKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk untuk ekspor	KUMKM	-	-	-	180	180	5.604	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.6 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi untuk ekspor	KUMKM	-	-	-	340	340	3.196	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.7 Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar melalui koperasi	Unit	65	-	-	-	-	58.500	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.8 Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi melalui pasar rakyat	UMI	1015	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.9 Jumlah PKL yang difasilitasi memperoleh kepastiaan tempat usaha	UMI	1730	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.10 Koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan manajemen	Unit	-	75	-	-	-	86.542,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.11 Pedagangan skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang di fasilitasi penataan lokasi, sarana usaha dan promosi	UMI	-	40	-	-	-	1.885,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.12 Revitalisasi pasar rakyat yang di kelola koperasi	Unit	-	-	36	26	26	97.000	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.13 Revitalisasi pasar rakyat yang di kelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Unit	-	-	14	25	25	67.500	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.14 Pedagangan skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang di fasilitasi penataan lokasi dan promosi	Orang	-	-	380	1000	1000	26.360	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.15 Meningkatkan volume usaha dan tenaga kerja koperasi produksi/ sentra usaha mikro yang diperkuat sistim bisnis dan kapasitas produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan, industri, kerajinan, dan pertambangan, ketenagalistrikan dan aneka usaha	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	103	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.16 Meningkatkannya volume usaha dan tenaga kerja koperasi produksi yang diperkuat kapasitasnya dalam pengadaan sarana produksi, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan pendampingan, pendataan, skema manajemen, penguatan kapasitas, pendampingan, pendataan	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	15	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.16 Meningkatnya volume usaha dan tenaga kerja koperasi pengelolaan jasa wisata yang ditingkatkan kapasitas usahanya	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	6	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.17 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang diperkuat sistim bisnisnya	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	53	-	-	-	7.396,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.18 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang di fasilitasi penerapan teknologi tepat guna	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	109	-	-	-	11.571,9	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.19 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang di fasilitasi pengembangan jasa pertanian dan aneka jasa	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	5	-	-	-	1.031,4	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.20 Koperasi / sentra usaha mikro tanaman pangan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	20	11	11	2.869,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
1.21 Koperasi / sentra usaha mikro holtikultura yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	10	5	5	1.206,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.22 Koperasi / sentra usaha mikro perkebunan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	10	9	9	3.430	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.23 Koperasi / sentra usaha mikro perikanan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	20	8	8	2.658,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.24 Koperasi / sentra usaha mikro peternakan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	20	8	8	2.487,4	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
1.25 Koperasi / sentra usaha mikro pengolahan hasil perikanan dan peternakan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	12	6	6	1.851	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.26 Koperasi / sentra usaha mikro industri manufaktur yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	25	16	16	3.692,3	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.27 Koperasi / sentra usaha mikro industri kreatif yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	-	11	11	556,5	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
1.28 Koperasi / sentra usaha mikro jasa dan aneka usaha yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	-	-	25	10	10	2.495,9	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.29 Jumlah KUKM yang mengikuti pameran (Smesco Festival)	KUKM	780	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.30 Fasilitasi KUKM untuk partisipasi pada pameran nasional dan regional	KUKM	412	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.31 Jumlah KUKM yang mendapat fasilitasi akses ekspor (melalui pameran luar negeri dan peningkatan daya saing)	KUKM	350	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.32 Jumlah KUKM yang difasilitasi Kemitraan (Kemitraan Waralaba dan Sub Kontrak)	KUMKM	800	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.33 Jumlah KUKM yang difasilitasi temu konsultasi pengembangan kemitraan KUMKM berbasis investasi	KUMKM	240	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.34 Trading House Koperasi dan UMKM	Unit	-	1	1	1	1	39.122	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.35 Fasilitas promosi dan pemasaran produk KUKM	Bulan	-	12	12	12	12	25.596,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.36 Promosi dan Pemasaran dalam negeri	KUMKM	-	830	400	700	700	39.769,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.37 Promosi dan pemasaran luar negeri	KUKM	-	150	60	34	30	24.613,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.38 Fasilitas penerapan e-commerce	KUMKM	-	200	300	700	700	5.822,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.39 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran	KUMKM	-	1000	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.40 Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai/pasok	Koperasi	-	200	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Perluasan Akses Pembiayaan	2.1 UMKM yang di dampingi untuk mengkases program KUR	UMKM	18836	-	-	-	-	6.397,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.2 Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit	Usaha Mikro	-	27520	-	-	-	15.600	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.3 Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola (KUR)	Usaha Mikro	-	-	27520	15000	15000	27.009	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.4 Wirausaha pemula yang mendapatkan start up capital	Wirausaha Pemula	8362	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.5 Wirausaha pemula yang di dukung modal awal usaha	Orang	-	400	1200	1831	2000	98.850,3	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
Kegiatan 3: Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	3.1 Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Unit	-	5	3	5	5	70.600	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Pengembangan Kewirausahaan	4.1 Jumlah peserta masyarakat dan pengembangan kewirausahaan	Orang	11770	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.2 Peserta pelatihan kewirausahaan	Orang	-	5000	5800	5010	4850	136.949,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.3 Peserta pelatihan Technopreneur	Orang	-	400	1000	2000	2000	42.734	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.4 Fasilitasi Inkubator bisnis dan teknologi	Inkubator	-	20	2	10	10	8.493,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.5 Peserta Labotarium Kewirausahaan	Unit	-	-	2	-	-	375,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
Kegiatan 5: Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan, dan perlindungan Usaha	5.1 Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi	Laporan	-	1	-	-	-	1.285	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	5.2 Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi	Koperasi	-	-	1256	1000	1000	3.323,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	1.1 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terpadu jaminan kesehatan nasional	persen	100	100	100	100	100	107.800	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	1.2 Tersusunnya studi dan kajian di bidang sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN	Dokumen	5	5	5	5	5			
INDIKATOR SDGs:	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									
PROGRAM 1: PENATAAN KELEMBAGAAN JAMINAN SOSIAL (SJSN)										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial secara terpadu	1.1 Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial ketenagakerjaan	persen	50	100	100	100	1	107,800	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	1.2 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi terpadu SJSN bidang ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	2	2	2			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penyusunan Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	2.1 Jumlah draft t peraturan pelaksanaan SJSN	Dokumen	6	6	6	6	6		APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan
Kegiatan 3: Pelaksanaan sosialisasi SJSN	3.1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan , pameran, foum komunikasi dan kerjasama	Dokumen	6	6	6	6	6		APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan
PROGRAM 2: PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.1. Peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	orang	5600	6687	7985	9535	11386	340.240	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	7500	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	-	9312	-	-			
	1.4 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	-	-	4615	4615			
	1.5 Jumlah NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	2	-	-	-			
	1.6 NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	-	2	-	-			
	1.7 NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	-	-	4	4			
	1.8 Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam perluasan	bulan	-	12	-	-	-			
	1.9 Peningkatan koordinasi	bulan	-	-	12	-	-			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	antarlembaga dalam perluasan									
	1.10 Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam perluasan	orang	-	-	-	1480	1480			
	1.11 Analisis pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja	Naskah	2	2	2	3	3			
	1.12 Informasi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja	Naskah	1	1	1	1	1			
PROGRAM 3: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	perusaha an	180	190	200	210	220	127.350 (RPJMN)	APBN	Kementerian Ketenagakerja an

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Jumlah sosialisasi penerapan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja sebagai implementasi SJSN	wilayah	-	34	34	34	34			
INDIKATOR SDGs:	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.									
PROGRAM 1: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	1.1 Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	-	94400000	-	-	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 2: REHABILITASI SOSIAL										
Kegiatan 1: Rehabilitasi sosial lanjut usia	1.1 Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial	Orang	56384	52439	35044	40340	44370	781.328,53	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 2: Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	2.1 Jenis literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik (kitab suci, buku pelajaran, modul	Paket literasi	15	18	35	35	35	10.803,12	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanganan fakir miskin perkotaan	1.1 Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar di perkotaan	KK	100350	30400	36800	30000	30000	-	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 3: PEMBERDAYAAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	1.1 Bantuan rumah bagi keluarga komunitas adat terpencil (KAT)	KK	2150	2099	2019	2099	2099	511.100	APBN	Kementerian Sosial
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
PROGRAM 1: BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK										
Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.1 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	87,5	85,35	76	78	80	2.852.100 (Telah di tag di indikator 3.1.2 (a))	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	84,1	86,1	84	87	90	6.988 (Telah di tag di indikator 3.1.2 (a))	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.3 Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan	%	79,6	89,75	88	95	100	-	APBN	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Pencegahan Komplikasi (P4K)									
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (Matriks KL/II.M.L.024-16)										
Kegiatan 1: Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1.1 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamata n	93 (2015)	1306	1400	2800	5600	15.857.100 (Telah di tag di indikator 3.1.2 (a))	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Unit	212 (2015)	1600	3000	4400	5600		APBN**	Kementerian Kesehatan
Kegiatan 2: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	2.1 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Kab/Kota	28 (2015)	178	287	384	481	79.890.600 (Telah di tag di indikator 3.1.2 (a))	APBN**	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan	%	60 (2015)	70	80	90	95		APBN**	Kementerian Kesehatan
	2.3 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar	RS	50 (2015)	125	125	125	125		APBN**	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR SDGs:		1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.								
PROGRAM 1: PEMBINAAN SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA, DAN KESEHATAN MATRA										
Kegiatan 1: Penurunan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	1.1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90 (2014)	91,5	92	92,5	93	-	APBN	Kementerian Kesehatan
PROGRAM 2: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										
Kegiatan 1: Surveilans dan Karantina Kesehatan	1.1 Kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi	Kab/kota	-	-	140	403	16	-	APBN	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi	Unit	-	-	8	9	10	-		
PROGRAM 3: KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1.1 Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	-	50	55	60	65	13.595.900	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
PROGRAM 1: KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA										
Kegiatan 1: Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	1.1 Persentase faskes jalur pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang memenuhi standar pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	%	27	45	63	82	100	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a)dan tujuan 5	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada 2019 = 45.340 faskes)	%	47	60	73	87	100	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a) dan tujuan 6	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN
	1.3 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	%	33 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a) dan tujuan 7	APBN**	Perwakilan BKKBN Provinsi

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	2.1 Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas (dari 53.342 faskes)	%	8	27	47	66	85	Telah di-tag di indikator 3.7.1 (a) dan tujuan 8	APBN**	Direktorat Kesehatan Reproduksi, BKKBN
Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	4.1 Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	%	82	84	86	88	90	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a) dan tujuan 9	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
	4.2 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari berbagai media	%	6,7	15	20	30	50	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a) dan tujuan 10	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.3. Persentase stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE program KKBPK	%	30	45	60	70	80	Telah di-tag di indikator 3.7.1(a)dan tujuan 11	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE,BKKBN
INDIKATOR SDGs:		1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.1 Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Regional	SR	1 (kawasan) n)*	300 (ltr/detik))*	750 (ltr/deti k)*	280000	240000	124.885,4 (Telah di-tag di Goal 6)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2 Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan	SR	237 (IKK)*	3,184 (ltr/detik))*	3,078 (ltr/deti k)*	320000 0	272800 0			
	1.3 Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan	SR				116000 0	114880 0			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: DAK Bidang Air Minum	1.1. Peningkatan cakupan sistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui	jiwa	PM	1763476 *	783470 *	970262	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.1.1 Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komuna l	jiwa	PM				PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.1.2 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	jiwa	PM				PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (SPAM JP dan SPAM BJP)	jiwa	PM	1428702 *	381896 *	590157	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1.1 Jumlah Kota/Kab yang terlayani infrstruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota	Kota/Kab	-	68	95	120	95	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2 Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala komunal	Kota/Kab	206*	197*	158*	165	89	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3 Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kawasan	Kota/Kab	22*	15*	19*	37	17	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)										
Kegiatan 1: DAK Bidang Sanitasi	1.1. Pembangunan IPAL Kawasan	Jiwa	NA	7600	93000	PM	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Pembangunan IPAL Komunal	Jiwa	199650	243182	134706	PM	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.3. Pengembangan SR	Jiwa	800	30910	19106	PM	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.4 Pembangunan MCK+ dan MCK ++	Jiwa	695230	94237	153660	PM	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
	1.5 Pembangunan MCK Kombinasi IPAL	Jiwa	NA	217515	57731	PM	PM	PM	APBN	Kementerian Keuangan
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.									
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.1. Jumlah rumah tangga (RT) berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Tapak dan Sarusun (termasuk sewa beli)	RT	130000	175000	225000	250000	120000	1049,4 (Telah di-tag di Goal 6)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Jumlah rumah tapak yang mendapat fasilitas Kredit Konstruksi	RT	0	1000	1500	2000	1500		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Swadaya	RT	0	50000	150000	200000	50000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan uang muka	RT	55000	106500	124250	124370	65880		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan,	1.1 Luas kawasan kumuh perkotaan	Ha	1610	8975	9956	9500	8390	46.448.000 (Telah di-tag di Goal 6)	APBN	Kementerian Pekerjaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.1. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan)	Unit	170	30	20	30	30	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.2. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan)	Unit	12003	5350	1000	7300	7300	-		
Kegiatan 2: Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	2.1. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Pesisir, PPK, dan PAN)	Unit	0	0	0	100	100	-	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pesisir, PPK dan PAN)	Unit	0	410	710	3475	3475	-		
PROGRAM 5: PEMBERDAYAAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	1.1 Bantuan rumah bagi keluarga komunitas adat terpencil (KAT)	rumah	-	-	-	243	-	-	APBN	Kementerian Sosial
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.									
PROGRAM 1: PENDIDIKAN DASAR										
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	1.1 Siswa SD penerima BOS	Siswa	261598 69	2604800 4	253690 94	268799 92	268799 92	188.812.555	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
	1.2 RKB SD yang dibangun	ruang	2015	2015	200	205	200			
	1.3 Sekolah SD baru yang dibangun	sekolah	15	15	11	11	10			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Pembangunan Perpustakaan SD	ruang	1452	621	424	2000	2000			
	1.5 Siswa SD penerima bantuan KIP	orang	10685613	10360614	10360614	10360614				
	1.6 Sekolah yang melaksanakan K 13	Sekolah	8880	31526	68535	123168	148053			
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.1 Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	11575	9500	6000	5100	5100	36.157	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.									
PROGRAM 1: PENDIDIKAN DASAR										
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	1.1 Jumlah Sekolah Berasrama yang dibangun	Sekolah	17	25	10	23	25	444.921,81	APBN	Kementerian Pendidikan dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Jumlah SMP yang dibangun	Sekolah	100	196	50	190	190	2.298.305,96		Kebudayaan, Dit PSMP
	1.3 Jumlah Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun	Sekolah	80	109	50	130	140	851.314		
	1.4 Jumlah Ruang Kelas SMP yang dibangun	Ruang	2813	2882	300	3386	3386	2.855.284,27		
	1.5 Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	Siswa	4675885	4369968	4369968	4694968	4694968	16.429.221,85		
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.1. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	652213	71529	67120	57052	57052	1.266.952	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Kegiatan 3: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	3.1 Jumlah unit sekolah baru PKLK yang dibangun	Unit	16	20	11	13	15	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	Siswa	113562	123992	158080	166169	175516	7.233.400		Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
	3.3 Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB/ SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS	Sekolah	2285	2338	2100	2100	2100	7.233.400		
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.									
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH (Matriks KL/II.M.L.023-10)										
Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	1.1 Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Unit	12311	12461	12611	13459	13459	47.816.700	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA
	1.2 Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	4535644	4473868	4563345	4868654	4868654	-		
	1.3 Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Unit	60	103	75	18	18	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	Siswa	425033	1367560	1375458	1367559	1692559	-		
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.4 Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	Orang	35070	95900	109500	93075	93075	725.254	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Kegiatan 3: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	3.1 Jumlah siswa SMK penerima BOS SM	Siswa	4472995	4682381	4785108	4990089	5197373	28.393.192,85	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK
	3.2 Jumlah unit SMK baru yang dibangun	Sekolah	35	214	75	25	20	1.333.200		
	3.3 Jumlah siswa SMK penerima bantuan melalui KIP	Siswa	1912192	1829167	1829167	1829167	1829167	11.698.104,6		
	3.4 Jumlah RKB SMK yang dibangun	Ruang	3100	5461	1000	1500	1500	3.288.810		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.5 Rehabilitasi ruang pembelajaran SMK	Paket	130	999	3298	2000	2100	519.420		
Kegiatan 4: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	4.1 Jumlah unit sekolah baru PKLK yang dibangun	Unit	16	20	11	13	15	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	34	21.065.959 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase	72,3	74	75	76	77,4	16.654.602 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))		
	1.3 Tersedianya kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak yang lengkap dan harmonis	Kebijakan	1	-	-	-	-	129,3 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.4 Terlaksananya sosialisasi di 34 provinsi tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Daerah	-	-	548	548	548	2.978.037 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Kependudukan	2.1 Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Dokumentasi Kebijakan Informasi Kependudukan	Laporan	6	6	3	3	3	16.125.267 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	3.1 Sarpras Siak Di 514 Kab/Kota, serta DC dan DRC Kependudukan	Kab/Kota	514	514	514	514	514	372.591.186 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri
PROGRAM 2: PERLUASAN PELAYANAN DASAR										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Dasar	1.1 Terwujudnya kepemilikan akta kelahiran pada 40% penduduk miskin (anak usia 0-17 tahun)	persen	71.59	74,06 (a)	76,46 (a)	76	77,40	22.200 (Telah di tag di indikator 16.9.1(a))	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (Usia 0-17 tahun)	persen	79.92	81,68 (a)	83,33 (a)	82	85			
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.									
PROGRAM 1: PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN										
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1.1 Pangsa Energi Primer BBM Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8.58	6.96	5.81	2,08	2,04	19.830 (Telah di tag indikator 7.1.1*)	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8.87	8,65	9,6*)	8,24	8,18			Kementerian ESDM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Subsidi Listrik	Triliun	58.60	59.23	52.28	80,6	89,41			Kementerian ESDM
Kegiatan 2: Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	2.1. Fasilitas pembangunan pembangkit listrik (penambahan kapasitas)	MW	53585	4212	2693	5956	18666	17.710 (Telah di tag indikator 7.1.1*)	APBN	Kementerian ESDM
	2.2. Fasilitas pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN & Non APBN) (MVA)	MVA	5655	15971	14280	-	-		APBN	Kementerian ESDM
	2.3. Fasilitas pembangunan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN & Non APBN) (KMS)	KMS	2525	8295	15377	12681	13410		APBN	Kementerian ESDM
	2.4. Perencanaan Program Ketenagalistrikan (RUPTL)	Dokumen	1	1	1	1	1		APBN	Kementerian ESDM
	2.5. Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)	Unit	118460	-	-	-	-		APBN	Kementerian ESDM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Indikator Program	1.1. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	16.06	11.82	11.82	11.82	11.82	-	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 1: Perlindungan sosial korban bencana alam	1.1 Bantuan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Paket	-	-	-	150000	-	-	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 2: PENANGGULANGAN BENCANA										
Kegiatan 1: Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	1.1 Jumlah rekomendasi pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomen dasi	-	-	-	40	40	2702 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomen dasi	-	-	-	46	46	9296 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
	1.3 Jumlah lokasi yang menerima penyaluran bantuan darurat	Lokasi	74	35	99	-	-	8350 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana	2.1 Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik	Lokasi	33	134	134	136	136	368684 (Telah di- tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 3: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana	3.1 Jumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik	Lokasi	1	1	3	3	3	15300 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 4: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana	4.1 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah pascabencana	Lokasi	14	14	20	38	38	107389 (Telah di- tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
	4.2 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan sosial di daerah pascabencana	Lokasi	3	3	6	12	12	30854 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 5: Penanganan pengungsi akibat bencana	5.1 Jumlah layanan penanganan pengungsi akibat bencana	Lokasi	3	13	15	36	36	19595 (Telah di-tag di indikator 11.5.1*)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.								
PROGRAM 1: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
Kegiatan 1: Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1.1 Jumlah sistem peringatan dini terpasang	Lokasi	-	-	36	20	20	43,700	APBN	BNPB
	1.2 Jumlah dokumen rencana kontijensi tersusun	Dokumen	-	-	26	17	17	37,400	APBN	
	1.3 Jumlah lokasi rambu yang terpasang	Lokasi	-	-	14	10	10	21,360	APBN	
	1.4 Jumlah lokasi yang mendapatkan fasilitasi kesiapsiagaan	Lokasi	110	25	-	-	-	111,135	APBN	
Kegiatan 2: Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	2.1 Jumlah kajian risiko bencana	Dokumen	10	12	34	44	44	67,118	APBN	BNPB
	2.2 Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	Dokumen	10	-	45	26	26	37,100	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.3 Standarisasi pengurangan risiko bencana	Dokumen	5	5	3	2	2	6,625	APBN	
	2.4 Jumlah lokasi layanan mitigasi bencana	Lokasi	9	28	13	26	26	58,055	APBN	
	2.5 Jumlah dokumen pengelolaan risiko bencana yang disusun	Dokumen	-	-	-	15	15	11,800	APBN	
	2.6 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	Lokasi	30	-	-	-	-	20,000	APBN	
Kegiatan 3: Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	3.1 Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dan dikembangkan	Desa	82	368	150	362	362	264,625	APBN	BNPB
	3.2 Jumlah relawan yang difasilitasi dan dikembangkan kapasitasnya	Relawan	2000	2000	960	200	200	24,476	APBN	
	3.3 Jumlah forum PRB yang dibentuk dan dikembangkan	Forum	6	8	3	7	7	12,793	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan	4.1 Jumlah lokasi pusat pengendali operasi (Pusdalops) yang terbangun	Lokasi	2	10	-	40	40	184,000	APBN	BNPB
INDIKATOR SDGs:	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.									
PROGRAM 1: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Perlindungan sosial korban bencana alam	1.2 Pendampingan psikososial bagi korban bencana alam	pendampi ngan	-	-	-	2500	-	-	APBN	Kementerian Sosial
INDIKATOR SDGs:	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.									
PROGRAM 1: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1.1 Korban bencana alam nasional yang memperoleh bantuan darurat	orang	-	-	-	135000	-	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Korban bencana alam nasional yang memperoleh bantuan darurat	orang	-	-	-	1725	-	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.3 Pengerahan taruna siaga bencana	orang	-	-	-	32947	-	-	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiata 1: Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	dokumen	69	40	40	40	69	52.000 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))	APBN	Badan Nasional Penanggulang an Bencana (BNPb)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dokumen	10	17	19	19	19	32.700 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.3. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	35	39	39	39	39	115.200 (Telah di- tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.4. Jumlah lokasi fasilitasi penerapan mitigasi bencana	lokasi	31	39	41	41	41	74.300 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.5. Jumlah lokasi fasilitasi pengurangan risiko bencana regional	lokasi	3	4	4	4	4	18.000 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.6. Jumlah dokumen pedoman dan standardisasi pengurangan risiko bencana	dokumen	5	4	5	5	5	7.300 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana	laporan	6	6	6	6	8	3.700 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.8. Jumlah relawan PB	relawan	2000	2000	2000	2000	2000	36.200 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.9. Jumlah dokumen forum PRB	dokumen	6	8	10	12	14	28.100 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.10. Jumlah desa tangguh bencana	desa	70	80	90	100	100	290.100 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.11. Jumlah dokumen pedoman pemberdayaan masyarakat	dokumen	3	3	3	3	3	18.500 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		
	1.12. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	kegiatan	3	3	3	3	3	39.100 (Telah di-tag di indikator 11.5.1(a))		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR		1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global 1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.								
PROGRAM 1: PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA										
Kegiatan 1:	1.1. Jumlah penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana	-	1	1	1	1	-	19,6 (Telah di-tag di indikator 11.5.2(c))	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah kegiatan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi	-	2	2	2	2	-	6 (Telah di-tag di indikator 11.5.2(c))		
INDIKATOR:		1.5.3* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah								
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah kajian risiko bencana	dokumen	10	12	34	44	44	67.118 (Telah di-tag di indikator 13.1.1*)	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dokumen	10	-	45	26	26	37.100 (Telah di-tag di indikator 13.1.1*)		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan produksi gula tebu.	1.1 Produksi gula kristal putih	juta t	2,62	2,80	2,95	3,30	3,80	39.703.830*	APBN, APBD (anggara n total program)	Kementerian Pertanian
PROGRAM 4. Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.										
Kegiatan 1: Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau	1.1 Produksi daging sapi dan kerbau	ribu t karkas	556	589	640	695	755	19.199.570	APBN, APBD (anggara n total program)	Kementerian Pertanian
PROGRAM 5: Peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat.										
Kegiatan 1: Pengembangan ketersediaan dan penanganan	1.1. Jumlah kawasan mandiri pangan (KMP)	Lokasi/ta hun	-	-	78	20	20	118	APBN, APBD	Kementerian Pertanian
Kegiatan 2: Peningkatan akses dan pemanfaatan pangan dan gizi	1.2. Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)	Unit/ tahun	20	1000	406/81 2	500/10 00	500/10 00	-	APBN, APBD	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDG :		2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 2.1.2* Prevalensi kekurangan gizi (underwight) pada anak balita 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak balita, berdasarkan tipe. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil 2.2.2.(b) Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif									
PROGRAM 1: Pembinaan kesehatan masyarakat											
Kegiatan 1: Pembinaan gizi masyarakat		1.1. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	32,7	79,3	65	80	95	3.800,3	APBN (anggara n total kegiatan)	Kementerian Kesehatan
		1.2. Persentase Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	75,4	80,4	90	95	98			
		1.3. Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	%	14,1	15	20	25	30			
		1.4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	30,2	22,8	44	47	50			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	34,5	42,7	44	47	50			
	1.6. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	46,4	36,8	80	85	90			
Kegiatan 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga	2.1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	84,1	86,1	84	87	90	5.614,0 (anggaran total kegiatan)	APBN	Kementerian Kesehatan
	2.2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4)	%	87,5	85,4	76	78	80			
	2.3. Persentase kunjungan neonatal 1 (KN1)	%	83,7	91,1	81	85	90			
	2.4. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 (%)	%	56,9	73,5	60	65	70			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	1.1 Jumlah sosialisasi terkait stunting pada media cetak, elektronik , dan media sosial (Melalui radio nasional, infografis, videografis, banner website, media cetak, PSA di Televisi)	kegiatan	-	-	-	26	32	104,3 (anggaran total kegiatan)	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika
PROGRAM 8: Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga										
Kegiatan 1: Pembinaan keluarga balita dan anak	1.1 Persentase keluarga balita dan anak yang ikut bina keluarga balita (BKB)	%	50,5 (2015)	55,5	60,5	65,5	70,5	Anggaran sudah di tag di Tujuan 5	APBN	Direktorat Bina Keluarga Balita dan Perwakilan BKKBN Provinsi
	1.2 Persentase Kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK	%	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5			
	1.3 Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	juta keluarga	-	-	-	2,35	Belum ditetapkan	28.200		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Pembinaan Ketahanan Remaja	2.1 Indeks kesehatan reproduksi remaja (KRR) melalui generasi berencana (genre)	Indeks (0-100)	48,4 (2015)	49	50	51	52	Anggaran sudah di tag di Tujuan 5	APBN	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
PROGRAM 9: Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah										
Kegiatan 1: Peningkatan kualitas keluarga sakinah	1.1 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitasi kursus pra-nikah	juta	-	-	2,40	2,45	2,50	-	APBN	Kementerian Agama
Kegiatan 2: Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.2 Jumlah Keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia	juta	-	-	13	13	13	-	APBN	Kementerian Agama
Kegiatan 3: Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu	1.3 Jumlah pembinaan keluarga sukinah	juta	-	-	5	5	5	-	APBN	Kementerian Agama
PROGRAM 10: Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman										
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengembangan	1.1. Persentase peningkatan	%	70,97 (2015)	82	88	94	100	Anggaran sudah di tag di Tujuan 6	APBN	Kementerian Pekerjaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Penyehatan Lingkungan Permukiman	cakupan pelayanan akses air minum									Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	73,68 (2015)	72	85	92	100	Anggaran sudah di tag di Tujuan 6		
Kegiatan 2: Pengaturan, pembinaan dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan	1.1. Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Air Limbah Berbasis Masyarakat (SANIMAS)							35.645,0 (anggaran total kegiatan)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	a. Kawasan	kawasan	-	-	552	762	682			
	b. Kab/Kota	kab/kota	-	-	158	165	89			
	1.2. Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan		-	-	-	-	-			
	a. Kawasan	kawasan	-	-	21	37	17			
	b. Kab/Kota	kab/kota	-	-	21	24	17			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan1: Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	1.1. Jumlah desa pangan aman	desa	100 (2015)	100	100	100	100	203,9 (anggaran total kegiatan)	APBN	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	1.2. Jumlah kab/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	kab/kota	20 (2015)	20	20	20	20			
Kegiatan 2: Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/ Balai POM	2.1 Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	13974 (2015)	15706	24772	24952	24952	4.030,4 (anggaran total kegiatan)	APBN	Badan Pengawas Obat dan Makanan
INDIKATOR SDG:	2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.									
PROGRAM 1:										
Kegiatan 1: Litbang bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian	1.1. Jumlah sumber daya genetika terkarakterisasi dan terdokumentasi	Akses/ tahun	1340	1340	1340	1350	1350	-	APBN	Kementerian Pertanian
	1.2. Jumlah galur harapan unggul tanaman	Galur/ tahun	18	19	21	21	23			
Kegiatan 2: Litbang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.1. Jumlah varietas tanaman unggul baru (Tanaman Pangan,	Varietas/ tahun	45	47	45	48	50	-	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Hortikultura dan Perkebunan)									
Kegiatan 3: Litbang peternakan	3.1. Jumlah galur unggul/harapan ternak	Galur/ tahun	2	0	2	6	6	-	APBN	Kementerian Pertanian
	3.2. Jumlah bibit sumber ternak	ekor	11675	13500	14235	14570	14960			
INDIKATOR SDG:	2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.									
PROGRAM 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN (Lampiran Renstra Kementan Revisi hal.310)										
Kegiatan 1: Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner mendukung ketersediaan protein hewani	1.1. Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem	Galur/ Rumpun	16	16	16	16	16	615.723	APBN	Kementerian Pertanian
	1.2 Jumlah bibit sumber ternak	Ekor	11675	13905	14235	14570	14960			
	1.3 Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri,	Teknologi	34	34	34	34	34			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	bioscience dan bioengineering									
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
INDIKATOR SDGs:	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi									
PROGRAM 1: PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Matriks KL/II.M.L.024-13)										
Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat	1.1 Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	%	32,7	79,3	65	80	95	3.800.300	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	30,2 (2013)	54	44	47	50			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	%	75,4	80,4	90	95	98			
Kegiatan 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga	2.1 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	87,5	85,35	76	78	80	2.852.100	APBN**	Kementerian Kesehatan
	2.2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	84,1	86,1	84	87	90	6.988	APBN	Kementerian Kesehatan
	2.3 Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	79,6	89,75	88	95	100	-	APBN	Kementerian Kesehatan
Kegiatan 3: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	3.1 Persentase Puskesmas yang mendapatkan BOK	%	-	85	90	95	98	-	APBN**	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja	4.1 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	83,7	91,1	81	85	90	2.761.900	APBN**	Kementerian Kesehatan
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (Matriks KL/II.M.L.024-16)										
Kegiatan 1: Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1.1 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamata n	93 (2015)	1306	1400	2800	5600	15.857.100	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Unit	212 (2015)	1600	3000	4400	5600		APBN**	Kementerian Kesehatan
Kegiatan 2: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	2.1 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Kab/Kota	28 (2015)	178	287	384	481	79.890.600	APBN**	Kementerian Kesehatan
	2.2 Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan	%	60 (2015)	70	80	90	95		APBN**	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	akses layanan rujukan									
	2.3 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar	RS	50 (2015)	125	125	125	125		APBN**	Kementerian Kesehatan
PROGRAM 3: PROGRAM PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN (Matriks KL/II.M.L.024-22)										
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	1.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	40,01 (2015)	45,39	50	55	60	73.200	APBN**	Kementerian Kesehatan
PROGRAM 4: PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (Matriks KL/II.M.L.024-19)										
Kegiatan 1: Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	1.1 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	86,5 (2015)	91,6	92	92,5	93	3.142.800	APBN**	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:	3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 3.3.4(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 3.3.5(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)									
PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (Matriks KL/II.M.L.024-19)										
Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.1 Persentase kasus HIV yang diobati	%	47,3 (2015)	47,01	50	52	55	2.960.000	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Persentase keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) minimal 85 persen	%	84	85	87	89	90			
	1.3 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	78,39 (2015)	85	88	91	95			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (Matriks KL/II.M.L.024-19)										
Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.1 Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah	%	8,37 (2015)	21,2	30	40	50	3.025.000	APBN**	Kementerian Kesehatan
	1.2 Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	35,44 (2015)	49,24	30	40	50			
INDIKATOR SDGs:	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri 3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa									
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN										
Kegiatan 1: Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa	1.1 Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kab/Kota	82 (2015)	130	180	230	280	1.124.000 (total anggaran kegiatan)	APBN	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis 3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. 3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan 3.5.1. (d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu								
PROGRAM 1 : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA										
Kegiatan 1: Pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	1.1 Jumlah orang yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	-	16000	11300	6448	22000	178.014	APBN	BNN
Kegiatan 2: Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah	2.1 Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yang terbentuk	Lembaga	-	43	46	50	53	2.014.600 (anggaran total kegiatan)	APBN	BNN
	2.2 Jumlah pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi rawat jalan	Orang	-	4319	4599	4989	5302			
	2.3 Jumlah pecandu narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif	Orang	-	538	658	724	796			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas	1.1 Jumlah pelayanan pengaturan, pengawasan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlintas	Layanan	-	12	12	12	12	14.772.600	APBN	Kepolisian RI
INDIKATOR SDGs:	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern; 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin; 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern; 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR); 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).									
PROGRAM 1: PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Matriks KL/II.M.L.068-1)										
Kegiatan 1: Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	1.1 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)	%	-	53,5	54	54,5	55	45.991	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Persentase faskes jalur pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang memenuhi standar pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	%	27	45	63	82	100	-	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN
	1.3 Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada 2019 = 45.340 faskes)	%	47	60	73	87	100	-	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	%	33 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	-	APBN**	Perwakilan BKKBN Provinsi
Kegiatan 2: Pembinaan Ketahanan Remaja	2.1 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	Indeks (0-100)	48,4 (2015)	49	50	51	52	28,134 (Telah di tag di indikator 5.3.1(b))	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
	2.2 Persentase remaja yang mengakses Pusat Informasi dan Konseling/PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	%	22,8	24	26	28	30	-	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
	2.3 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan	%	100	100	100	100	100	-	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)									Remaja, BKKBN
	2.4 Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	%	-	74,5	75	75,5	76	11.794	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
Kegiatan 3: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	3.1 Persentase Peserta KB (PBI dan nonPBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	%	-	61,5	63	64,5	66	10.615	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta, BKKBN
Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	4.1 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini	%	-	76	78	80	82	495.934	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)									
	4.2 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	%	-	49,1	59,1	69,1	79,1	33.024	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
	4.1 Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	%	82	84	86	88	90	-	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE,BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.1 Persentase Puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	-	30	35	40	45	6.550,3***	APBN	Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.									
PROGRAM 1: PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL										
Kegiatan 1: Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS	1.1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS	Orang	87,82	91,1 (a)	92,38 (a)	92,4 (b)	107,2	148.106.200	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.									
PROGRAM 1: PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN B3										
Kegiatan 1: Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	1.1. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengumpulan limbah B3.	%	-	60	-	-	-	5,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengangkutan limbah B3.	%	-	90	-	-	-	5,000		
	1.3. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pemanfaatan limbah B3	%	-	90	-	-	-	5,000		
	1.4. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengolahan limbah B3.	%	-	80	-	-	-	5,000		
	1.5. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan verifikasi penimbunan limbah B3.	%	-	60	-	-	-	5,000		
	1.6. Meningkatnya persentase pencapaian target	%	-	90	-	-	-	5,000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
	kegiatan verifikasi dumping limbah B3								
	1.7. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan penetapan limbah B3 dan limbah non B3	%	-	30	-	-	-	5,000	
	1.8. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan notifikasi limbah B3 dan limbah non B3	%	-	95	-	-	-	5,000	
	1.9. Meningkatnya volume dan Jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya setiap tahun	ton dan jenis	-	196.000 dan 35	-	-	-	20,000	
	1.10. Pelayanan izin pengelolaan limbah B3 termasuk rekomendasi pengangkutan penetapan limbah B3 sebanyak 400	izin/reko mendasi	-	-	400	400	400	5,000	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	izin dan rekomendasi									
Kegiatan 2: Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	2.1. Terdatanya timbulan jenis dan jumlah limbah B3 dan limbah Non B3 dari industri yang dipantau pada setiap sektor	industri	-	235	-	-	-	40,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.2. Teranalisisnya jumlah limbah B3 terkelola setiap sektor	juta ton	-	75100	-	-	-	40,000		
	2.3. Tersedianya data limbah B3 cair dan padat yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pada setiap sektor	ton	-	601,498.50	-	-	-	20,000		
	2.4. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan	fasilitas	-	-	1	1	2	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.5. Peningkatan pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 sebagai sumber energi atau bahan baku	unit	-	-	1	6	5	-		
	2.6. Peningkatan kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3	industri	-	-	400	400	400	-		
Kegiatan 3: Pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah B3	3.1. Sistem dan mekanisme inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi Limbah B3 tersedia	%	-	100	-	-	-	15,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.2. Lahan Terkontaminasi Limbah B3 terinventarisasi dan teridentifikasi setiap tahun	Ekoregion	-	1 ekoregion (Sumatera)	-	-	-	50,000		
	3.3. Lahan terkontaminasi Limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan	ton	-	90,000	-	-	-	100,000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	meningkat setiap tahun									
	3.4. Lahan terkontaminasi Limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun	ton	-	4,500	-	-	-	100,000		
	3.5. Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah B3 tersedia dan beroperasi	%	-	100	-	-	-	-		
	3.6. Pemulihan lahan terkontaminasi meningkat sebesar 500 ton	ton	-	-	500	1 lokasi	1 lokasi	-		
	3.7. Pemulihan lahan terkontaminasi oleh penanggung jawab usaha/kegiatan meningkat sebesar 100,000 ton	ton	-	-	100,000	100,000	100,000	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.8. Penyediaan data inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3	dokumen	-	-	2	2	2	-		
	3.9. Penerapan sistem tanggap darurat limbah B3	dokumen	-	-	2	2	2	-		
INDIKATOR SDGs:		3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas								
PROGRAM 1: PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN										
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	1.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Persen	79,38	81,53	83	86	90	13.595.900	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR SDGs:		3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan								
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
Kegiatan 1: Perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan	1.1 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	3116	20600	21700	22800	24000	13.016.200	APBN	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Pelaksanaan internship tenaga kesehatan	2.1 Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship	Orang	8312	6500	6500	6500	6500	3.550.000	APBN	Kementerian Kesehatan
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR SDGs:	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika									
PROGRAM 1: PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Matriks KL/II.M.L.023-23)								5.194.328	APBN	
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.1 Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya (Matematika dan Bahasa)	Orang	-	151359	154702	158112	161589	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen GTK, UPT PPPTK Bahasa dan PPPPTK Matematika
Kegiatan 2: Ujicoba soal matematika di Asia Tenggara untuk kelas 4, 6 dan 9	2.1 Jumlah siswa yang meningkat kemampuannya di 11 Negara Anggota SEAMEO	orang	-	990	990	1650	1650	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SEAMEO QITEP in Mathematic (SEAQIM)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) sebagai Strategi Pengajaran Bahasa	3.1 Jumlah guru yang meningkat kemampuan mengajarnya dengan menggunakan HOTS.	orang	-	0	30	186	210	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL)
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA (Matriks KL/II.M.L.023-37)										
Kegiatan 1: Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia	1.1 Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Acuan	-	3	3	3	3	241.859	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembang an dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembang an dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, 30
	1.2 Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	Terbitan	-	10	28	28	28			
	1.3 Jumlah Kosakata Indonesia	Kosakata	-	28967	43000	2000	2000			
Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia	2.1 Jumlah Fasilitator Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	Orang	-	24871	24134	1500	1500			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Jumlah Generasi Muda/Masyarakat Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	Orang	-	97174	109430	109430	109430			Balai/Kantor Bahasa
	2.3 Jumlah Bahan, Modul, dan Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra	Naskah	-	69	69	69	69			
INDIKATOR SDGs:		4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B								
PROGRAM 1: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Matriks KL/II.M.L.023-1)										
Kegiatan 1: Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	1.1 Jumlah Sekolah/Madrasah yang diakreditasi sesuai SNP	Satuan Pendidikan	-	51823	32550	54000	52368	1.679.838	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Balitbang
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (Matriks KL/II.M.L.023-4)										
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	1.1 Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai	Sekolah	-	31526	68535	123168	148053	943.993.000	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Kurikulum yang berlaku									Dikdasmen, Dit PSD
Kegiatan 2: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	2.1 Jumlah SMP yang menerapkan Kurikulum yang berlaku	sekolah	-	7760	13911	24040	38558	35.675.200	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	2.2 Ruang belajar yang direhabilitasi	ruang	-	5350	16315	3000	3000	1.471.329,93	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	2.3 Ruang perpustakaan yang dibangun	ruang	-	564	350	700	700	2.230.643,095	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	2.4 Ruang laboratorium IPA yang dibangun	ruang	-	562	440	1500	1500	1.822.055,29	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.5 Sekolah yang dibina menjadi sekolah rujukan	Sekolah	-	514	514	770	770	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
Kegiatan 3: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	3.1 Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	Sekolah	-	2019	2020	2025	2030	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
PROGRAM 3: PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH (Matriks KL/II.M.L.023-10)										
Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	1.1 Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Unit	-	12461	12611	13459	13459	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	2.1 Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	-	11384	11459	11484	11504	35.675.200	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMK
	2.2 Pembangunan prasarana pembelajaran SMK	Ruang	-	1095	1387	2500	3000	2.236.140	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMK
	2.3 Pengadaan sarana pembelajaran	Paket	-	2398	3883	4500	5100	4.657.932	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMK

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	3.1 Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	Sekolah	-	2019	2020	2025	2030	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
PROGRAM 4: PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1.1 SMAK yang disiapkan terakreditasi minimal B	Lembaga	-	3	3	25	-	646.871	APBN	Kementerian Agama: (Direktorat Pendidikan Katolik)
PROGRAM 5: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Mutu, dan Relevansi Madrasah	1.1 Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI	Sekolah/ Guru*	5631	10000	10000	7500	7500	70.000	APBN	Kementerian Agama: Ditjen Pendidikan Islam
	2.1 Jumlah MAK yang dibangun	Lembaga	0	5	10	10	10	57.500	APBN	Kementerian Agama, Ditjen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah										Pendidikan Islam
	2.2 Jumlah MA Penyelenggara Program Keterampilan yang diberikan penguatan	Madrasah	0	0	5	20	20	66.500	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.3 Jumlah Ruang Kelas MI yang direhabilitasi	Madrasah	1,150	400	653	425	500	192.325	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.4 Jumlah Ruang Kelas MTs yang direhabilitasi	Madrasah	1,250	400	650	525	600	234.925	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.5 Jumlah Ruang Kelas MA yang direhabilitasi	Madrasah	625	200	650	475	500	219.175	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.6 Jumlah perpustakaan MI yang dibangun	Madrasah	100	0	0	0	0	20.000	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.7 Jumlah perpustakaan MTs yang dibangun	Madrasah	100	75	0	0	0	38.224	APBN	Kementerian Agama, Ditjen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										Pendidikan Islam
	2.8 Jumlah perpustakaan MA yang dibangun	Madrasah	100	75	0	0	0	38.203	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.9 Jumlah Asrama yang dibangun	Madrasah	20	10	8	0	0	57.000	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.10 Jumlah Laboratorium IPA MTs yang Dibangun	Madrasah	100	75	0	0	0	40.677	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.11 Jumlah Laboratorium IPA MA yang dibangun	Madrasah	100	75	0	0	0	40.677	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
Kegiatan 3: Peningkatan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren	3.1 Jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun	Lembaga	100	200	600	675	675	399.166	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	3.2 Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab	Lembaga	300	200	600	675	675	227.000	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 6: BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (025.05.09)										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (2136)	1.1 Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	unit	230	256	317	335	366	8.750.100	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.2 Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	unit	35	40	45	50	55	1.750.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.3 Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	unit	50	60	70	80	90	14.234.495	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
PROGRAM 7: BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (025.07.11)										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2142)	1.1 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	lembaga	-	-	2000	-	-	2.004.800	APBN	Kementerian Agama: Bimas Hindu
	1.2 Penguatan KKG/MGMP	kelompok	-	-	66	66	66	560.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Hindu

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat 4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat								
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (Matriks KL/II.M.L.023-4)										
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	1.1 Siswa SD penerima BOS	Siswa	-	2604800 4	253690 94	268799 92	268799 92	188.812.555	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
	1.2 RKB SD yang dibangun	ruang	-	2015	200	205	200		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
	1.3 Sekolah SD baru yang dibangun	sekolah	-	15	11	11	10		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
	1.4 Pembangunan Perpustakaan SD	ruang	-	621	424	2000	2000		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5 Siswa SD penerima bantuan KIP	orang	-	10360614	10360614	10360614	10360614		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
	1.6 Sekolah yang melaksanakan K 13	Sekolah	-	31526	68535	123168	148053		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSD
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.2. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	-	9500	6000	5100	5100	36.157	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Kegiatan 3: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	3.1 Jumlah Sekolah Berasrama yang dibangun	Sekolah	-	25	10	23	25	444.921,81	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Jumlah SMP yang dibangun	Sekolah	-	196	50	190	190	2.298.305,96	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	3.3 Jumlah Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun	Sekolah	-	109	50	130	140	851.314	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	3.4 Jumlah Ruang Kelas SMP yang dibangun	Ruang	-	2882	300	3386	3386	2.855.284,27	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP
	3.5 Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	Siswa	-	4369968	4369968	4694968	4694968	16.429.221,85	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dit PSMP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMP LB	4.1 Jumlah unit sekolah baru PKLK yang dibangun	Unit	-	20	11	13	15	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
	4.2 Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	Siswa	-	123992	158080	166169	175516	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.3 Jumlah SDLB/SMPLB/SML B/SLB/ SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS	Sekolah	-	2338	2100	2100	2100	7.233.400	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
Kegiatan 5: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	5.1 Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	-	71529	67120	57052	57052	1.266.952	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu,	1.1 Jumlah Santri PPS Ula/Sederajat Penerima BOS	santri	53064	54266	29862	27540	27540	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam										Pendidikan Islam
	1.2 Jumlah Santri PPS Wustha/Sederajat Penerima BOS	santri	147416	145213	112521	114517	114517		APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.3 Jumlah Santri PPS Ula/Sederajat Penerima PIP	santri	51375	38935	34574	30176	30176		APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.4 Jumlah Santri PPS Wustha/Sederajat Penerima PIP	santri	246875	131014	106214	105100	105100		APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.5 Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Keagamaan Islam yang dibangun	ruang	100	14	315	325	325		APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
Kegiatan 2: Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	2.1 Jumlah Siswa MI Penerima BOS	siswa	356369 4	3551177	367808 8	385857 4	385857 4	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.2 Jumlah Siswa MI Penerima KIP	siswa	826467	528527	684472	617367	617367		APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	1.1 Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Unit	-	12461	12611	13459	13459	47.816.700	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMA
	1.2 Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	-	4473868	456334 5	486865 4	486865 4		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMA
	1.3 Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Unit	-	103	75	18	18		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	Siswa	-	1367560	1375458	1367559	1692559		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.1 Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	Orang	-	95900	109500	93075	93075	725.254	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Kegiatan 3: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	3.1 Jumlah siswa SMK penerima BOS SM	Siswa	-	4682381	4785108	4990089	5197373	28.156.417,85	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										Pembinaan SMK
	3.2 Jumlah unit SMK baru yang dibangun	Sekolah	-	214	75	25	20	1.217.700	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK
	3.3 Jumlah siswa SMK penerima bantuan melalui KIP	Siswa	-	1829167	1829167	1829167	1829167	9.690.303	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK
	3.4 Jumlah RKB SMK yang dibangun	Ruang	-	5461	1000	1500	1500	2.637.810	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1.1 Siswa SMAK penerima bantuan PIP (porgram indonesia pintar)	Orang	-	815	600	600	-	600	APBN	Kementerian Agama: (Direktorat Pendidikan Katolik)
	1.2 Siswa SMAK penerima BOS	Orang	-	0	2500	2500	-	3.500		
	1.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	Lokasi	-	23	23	22	-	1.002		
	1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	Lembaga	-	23	23	31	-	15.799		
	1.5 Dukungan layanan pendidikan katolik (buku SMAK)	Layanan	-	-	-	229	-	39.775		
PROGRAM 3: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.1 Jumlah Santri PPS Ulya/Sederajat Penerima BOS	santri	9678	10727	14081	18562	18562	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.2 Jumlah Santri PPS Ulya/Sederajat Penerima PIP	santri	194691	66185	53541	53556	53556	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										Pendidikan Islam
Kegiatan 2: Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	2.1 Jumlah Siswa MA Penerima BOS	siswa	121146 6	1255775	138652 4	149437 5	149437 5	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.2 Jumlah Siswa MA Penerima KIP	siswa	356429	308608	319259	317259	317259	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.3 Jumlah Ruang Kelas MA yang dibangun	ruang	500	300	730	500	500	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	2.4 Jumlah MA Insan Cendekia yang dibangun	lembaga	5	12	22	16	16	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
PROGRAM 4: BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (025.05.09)										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (2136)	1.1 Siswa SMTK penerima KIP	orang	680	730	780	830	880	5.980.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.2 Siswa SMTK Penerima BOS	orang	3320	3420	3600	3730	3950	9.956.800	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL(Matriks KL/II.M.L.023-16)										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Paud	1.1 Jumlah Anak Usia Dini memperoleh BOP PAUD	anak	-	3600000	5970000	6180000	7230000	-	APBN	Kemdikbud, Ditjen PAUD dan Dikmas Direktorat Pembinaan PAUD
	1.2 Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	kab/kota	-	10	40	100	200			Kemdikbud, Ditjen PAUD dan Dikmas Direktorat Pembinaan PAUD
	1.3 Persentase (%) lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	Persentase	-	0	20	50	70			Kemdikbud, Ditjen PAUD dan Dikmas Direktorat Pembinaan PAUD
	1.4 Persentase (%) lembaga PAUD menyelenggarakan Pendidikan Karakter Berkualitas	Persentase	-	0	60	75	100			Kemdikbud, Ditjen PAUD dan Dikmas Direktorat

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										Pembinaan PAUD
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga *)	2.1 Jumlah lembaga/satuan pendidikan memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik	Lembaga	-	58416	57100	60000	63000	1.270.000	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
	2.2 Jumlah lembaga/satuan pendidikan memiliki fasilitas/sarana untuk mendukung menyelenggarakan pendidikan keluarga	Lembaga	-	3000	4000	4060	5700		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.3 Jumlah komite sekolah yang melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter dan budaya literasi	Lembaga	-	42	1626	2000	2400		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
	2.4 Jumlah Konten/Materi diunggah ke Kanal Pendidikan Keluarga	Judul/topik	-	165	185	215	225		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Kegiatan 3: Peningkatan Mutu Satuan PAUD-Dikmas berstandar nasional	3.1. Jumlah satuan PAUD-Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional	Lembaga	-	6707	8093	12140	18209	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, UPT PP/BP PAUD-Dikmas

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari (Paud)	Lembaga	-	3	6	15	-	600	APBN	Kementerian Agama: (Direktorat Pendidikan Katolik)
	1.2 Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari (Paud)	Lembaga	-	0	6	15	-	180		
	1.3 Dukungan layanan pendidikan katolik (Taman Seminari)*	Layanan	-	-	-	229	-	39.775		
PROGRAM 3: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	1.1 Jumlah Siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP)	siswa	120361 5	1196917	125572 3	133120 7	133120 7	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.2 Jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA	ruang	-	-	100	50	50			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran	lembaga	500	100	500	350	350			
	1.4 Jumlah ruang kelas RA yang direhab	ruang	500	0	50	50	50			
INDIKATOR SDGs:		4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi								
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI (Matriks KL/II.M.L.042-1)										
Indikator Program	1.1 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah	Mahasisw a	-	243154	268750	294345	319940	-	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Indikator Program	1.2 Jumlah Prodi PT Berakreditasi Minimal Baik Sekali (B)	Prodi	-	9707	9939	10173	11660	-	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Indikator Program	1.3 Jumlah Prodi dengan Akreditasi Unggul (A) di Luar Jawa	Prodi	-	612	804	1158	1424	-	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	1.1 Dosen PTA Katolik Tersertifikasi	Orang	-	83	50	50	-	225	APBN	Kementerian Agama: (Direktorat Pendidikan Katolik)
	1.2 Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	160	200	635	-	5.903		
	1.3 Dosen PTA Katolik yang Ditingkatkan kualifikasinya	Orang	-	0	40	47	-	1.645		
	1.4 Mahasiswa PTA Katolik penerima beasiswa miskin	Orang	-	2500	2000	2000	-	5.000		
	1.5 Mahasiswa penerima bidik misi	Orang	-	0	0	10	-	120		
	1.6 PTA Katolik Negeri penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BPOTN)	Orang	-	0	0	310	-	527		
	1.7 PTA Katolik Swasta yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	-	20	23	22	-	220		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.8 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada PTA Katolik	Lembaga	-	22	23	21	-	25.400		
	1.9 PTA Katolik Swasta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan	Lembaga	-	0	23	22	-	4.620		
	1.10 PTA Katolik yang dipersiapkan terakreditasi minimal B	Lembaga	-	10	0	5	-	1.000		
	1.11 Dukungan layanan pendidikan tinggi katolik	Layanan	-	-	-	2	-	14.574		
PROGRAM 3: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam	1.1 Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI	mahasiswa	14216	19196	24096	30220	38000	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam
	1.2 Jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis)	mahasiswa	150	120	200	100	100			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	mahasiswa	1000	15000	12500	13000	15000			
	1.4 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an	mahasiswa	-	2000	2000	2000	2000			
	1.5 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka	mahasiswa	-	-	1000	2000	2000			
	1.6 Jumlah Pendirian PTKI baru	lembaga	2	-	2	-	-			
	1.7 Jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya	lembaga	55	55	56	57	57			
	1.8 Jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B	prodi	250	500	500	500	500			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.9 Jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B	lembaga	6	-	-	-	6			
PROGRAM 4: BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (025.05.09)										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen (5101)	1.1 Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	orang	771	850	900	950	1075	17.866.800	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.2 Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	orang	1500	1750	2000	2250	2500	6.196.800	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.3 Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi	orang	644	744	844	944	1044	27.048.307	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.4 PTA Penerima BOPTN	orang	7	7	8	9	10	20.357.500	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.5 Sarana dan Prasarana PTT/AK yang memenuhi Standar	unit	50	100	150	200	300	71.129.626	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.6 Dosen Non PNS berkualifikasi S2/S3	orang	-	100	100	100	100	2.300.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.7 Dosen yang bersertifikat	orang	100	100	100	100	100	300.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.8 Dosen PNS berkualifikasi S2/S3	orang	-	-	50	-	-	1.250.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.9 Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	orang	100	150	200	250	300	3.550.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.10 Mahasiswa yang mengikuti Program Pengabdian Masyarakat	orang	-	-	17600	-	-	4.400.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.11 Penelitian yang Bermutu	dokumen	100	150	200	250	300	3.750.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.12 PTT/AK yang terakreditasi Minimal B	unit	32	40	50	60	70	4.249.300	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.13 Dukungan Layanan Pendidikan Tinggi	layanan	-	-	1680	-	-	38.912.974	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.14 Prodi PTT/AK yang terakreditasi Minimal B	prodi	40	50	100	150	200	6.000.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.15 Layanan Internal (Overhead)	layanan	-	-	576	-	-	6.600.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
PROGRAM 5: BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (025.07.11)										
Kegiatan 1: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu (5104)	1.1 Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu Yang Dibina	orang	-	-	-	-	-	1.386.730.800	APBN	Kementerian Agama: Bimas Hindu
	1.2 Beasiswa BIDIK MISI	orang	240	450	650	850	1050	246.775.200		
	1.3 Beasiswa Prodi Langka	orang	-	-	24	-	-	63.071.400		
	1.4 Beasiswa Mahasiswa Miskin	orang	2473	2500	2600	2700	3000	227.614.800		
	1.5 Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	orang	-	500	600	700	800	136.572.800		
	1.6 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Dibina	orang	-	-	6600	-	-	56.860.000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.7 Kualifikasi S3 Dosen	orang	97	120	140	160	180	45.500.000		
	1.8 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	orang	-	-	45	-	-	115.853.400		
	1.9 Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu Yang Dibina	lembaga	-	-	156	-	-	231.742.500		
	1.10 Penelitian Yang Dilakukan	judul	-	-	2000	-	-	25.984.500		
	1.11 Pengabdian Masyarakat	lokasi	-	-	750	-	-	30.781.700		
	1.12 Prodi Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	prodi	20	24	25	26	27	107.000.000		
	1.13 Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu	lokasi	12	12	12	12	12	55.000.000		
	1.14 Sertifikasi Dosen	orang	-	100	100	100	125	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara	1.1 PTK yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	orang	-	4771	5346	5921	6496	320	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6 SEAMEO Centre di Indonesia (RECFON, SEAMOLEC, BIOTROP, SEAQIL, SEAQIM, SEAQIS)
	1.2 Bantuan Khusus terkait TIK	orang	-	-	-	-	-			
	1.3 Pelatihan GTK berbasis IT	orang	-	-	-	-	-			
INDIKATOR SDGs:	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun									
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL(Matriks KL/II.M.L.023-16)										
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	1.1 Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Orang	-	64280	53700	56250	56250	171.452	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	1.1 Beasiswa Darmasiswa RI non- degree yang diberikan kepada mahasiswa asing untuk belajar Bahasa Indonesia dan Seni Budaya Indonesia	Orang	-	638	650	650	650	174.246.449	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro PKLN, Setjen
	1.2 Beasiswa Unggulan kepada mahasiswa asing Kemitraan Negara Berkembang	Orang	-	0	0	0	0	0	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro PKLN, Setjen
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI (Matriks KL/II.M.L.042-1)										
Kegiatan 1: Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	1.1 Jumlah Mahasiswa Asing (KNB) Penerima Beasiswa	Mahasisw a	-	450	516	560	560	116.530	APBN**	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
INDIKATOR SDGs:	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik									
PROGRAM 1: PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN(Matriks KL/II.M.L.023-23)										
Kegiatan 1: Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru	1.1 Jumlah guru TK bersertifikat pendidik	Orang	-	108274	109619	110964	112309	5.194.328	APBN	Kementerian Pendidikan dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas	1.2 Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik	Orang	-	1810	1345	1345	1345			Kebudayaan, Ditjen GTK, Direktorat Paud dan Dikmas
	1.3 Jumlah guru TK/TPA/KB berkualifikasi D4/S1	Orang	-	135045	139120	141944	144768			
	1.4 Jumlah guru TK/TKLB yang berkualifikasi D4/S1	Orang	-	-	-	-	-			
Kegiatan 2: Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru pendidikan dasar	2.1 Jumlah guru Dikdas bersertifikat pendidik	Orang	-	1078688	1091628	1105030	1118432		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen GTK, Direktorat Dikdas
	2.2 Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik	Orang	-	12261	9114	9114	9114			
	2.3 Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik	Orang	-	5768	4288	4288	4288			
	2.4 Jumlah guru Dikdas	Orang	-	1591960	1618425	1628602	1638779			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	berkualifikasi D4/S1									
	2.5 Jumlah guru SD/SDLB yang berkualifikasi D4/S1	Orang	-	-	-	-	-			
	2.6 Jumlah guru SMP/SMPLB yang berkualifikasi D4/S1	Orang	-	-	-	-	-			
Kegiatan 3: Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru pendidikan menengah	3.1 Jumlah guru Dikmen bersertifikat pendidik	Orang	-	256684	261862	267040	272218		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen GTK, Direktorat Dikmen
	3.2 Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik	Orang	-	4571	3398	3398	3398			
	3.3 Jumlah guru SMK yang bersertifikat pendidik	Orang	-	2395	1780	1780	1780			
	3.4 Jumlah guru Dikmen berkualifikasi D4/S1	Orang	-	367843	482789	488096	493403			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.5 Jumlah guru SMA/SMALB yang berkualifikasi D4/S1	Orang	-	-	-	-	-			
	3.6 Jumlah guru SMK yang berkualifikasi D4/S1	Orang	-	-	-	-	-			
PROGRAM 2: PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1.1 Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya (SD Negeri/swasta - SMP)	Orang	-	-	2774	2947	-	9.052	APBN	Kementerian Agama: (Direktorat Pendidikan Katolik)
	1.2 Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang meningkatkan kompetensinya (SMAK)	Orang	-	-	90	140	-	1.494		
	1.3 Pengawas pendidikan agama katolik yang meningkatkan kompetensinya	Orang	-	0	120	120	-	885		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) katolik yang menerima bantuan	Lokasi	-	-	174	205	-	3.140		
PROGRAM 3: BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (025.05.09)										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (2136)	1.1 Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	orang	1547	1779	2100	2400	2600	39.684.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Kristen
	1.2 Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	orang	380	1500	2000	2500	3000	15.303.600		
	1.3 Guru yang mengikuti Program PLPG	orang	25	30	35	40	50	7.200.000		
	1.4 Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	orang	9530	6982	2110	2000	2000	28.946.100		
	1.5 Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	orang	-	-	255	-	-	1.620.000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6 Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	orang	15	17	19	23	25	4.075.900		
	1.7 Guru Non PNS yang menerima Tunjangan Khusus	orang	-	1500	1500	1500	1500	720.000		
PROGRAM 4: BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (025.07.11)										
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2142)	1.1 Guru PA Hindu Penerima Tunjangan Profesi	orang	-	-	2944	-	-	399.774.000	APBN	Kementerian Agama: Bimas Hindu
	1.2 Guru PA Hindu Penerima Insentif	orang	-	-	28800	-	-	116.600.000		
	1.3 Peningkatan Kompetensi Guru	orang	-	-	154000	-	-	280.111.800		
	1.4 Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	orang	57	75	100	125	150	1.137.500		
PROGRAM 5: PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										
Kegiatan 1: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.1 Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya	orang	-	4000	6000	3000	3000	-	APBN	Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	1.1 Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak*	Dokumen	1	-	1	-	-	500	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Pengarusutamaan gender bidang hukum	2.1 Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	1	1	1	1	1.800	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3: Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	3.1 Jumlah kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1	3.490	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 4: Pengarusutamaan gender bidang IPTEK	4.1 Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk	Kebijakan	1	2	2	1	1	3.380	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	diharmonisasikan menjadi responsif gender*									
Kegiatan 5: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan	5.1 Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	4.100	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 6: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	6.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	4	4	2	2	3.350	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 7: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	7.1 Jumlah kebijakan yang disusun untuk mendukung Industri Rumah Tangga di tingkat Pusat	Kebijakan	1	2	1	1	1	3.380	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 8: Pengarusutamaan gender bidang Pendidikan	8.1 Jumlah kebijakan bidang pendidikan dan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	2.250	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 9: Pengarusutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	9.1 Jumlah kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	3	3	3	2	5.900	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 10: Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	10.1 Jumlah kebijakan yang ditelaah tentang 30% keterwakilan	Kebijakan	2	2	2	1	1	2.100	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Perempuan di Lembaga Legislatif									
Kegiatan 11: Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	11.1 Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	3	4	3	5060	APBN	Kementerian PP dan PA
PROGRAM 2: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Kenaikan Jumlah kebijakan konduusif yang didokumentasikan	Kebijakan	-	2	2	2	2	5.000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.1(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir								
PROGRAM 1: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Matriks KL/II.M.L.047-1)										
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	1.1 Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak*	Survei	1	1	1	1	-	26.000	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2.1 Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan*	Kebijakan	2	2	1	2	2	2.470	APBN	Kementerian PP dan PA
	2.2 Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan*	Dokumen	1	1	1	1	1	600	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 2.2 Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	340	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.2 Jumlah dokumen profil Perlindungan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	1.250	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.2 Jumlah profil kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui elektronik (termasuk TPPO)**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	1.500	APBN	Kementerian PP dan PA
	2.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan*	Kegiatan	2	2	2	2	2	1.190	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 2.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga**	Kegiatan	-	-	2	NA	NA	6.600	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang**	Kegiatan	-	-	2	NA	NA	4.243	APBN	Kementerian PP dan PA
	2.4 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti*	Dokumen	2	2	2	2	2	2.550	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 2.4. Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang ditindaklanjuti**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	860	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.4 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi bidang perlindungan hak pekerja perempuan yang ditindaklanjuti**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	1.000	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3: Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah	3.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan*	Provinsi	28	30	32	34	34	100.000	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapat sosialisasi/advokasit entang kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan**	K/L dan Pemda	-	-	10	NA	NA	3.250	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang disosialisasikan tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus**	K/L dan Pemda	-	-	6	NA	NA	900	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang**	K/L dan Pemda	-	-	6	NA	NA	4.243	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi**	K/L dan Pemda	-	-	23	NA	NA	3.500	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 3.1 Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**	K/L dan Pemda	-	-	12	NA	NA	2.650	APBN	Kementerian PP dan PA
PROGRAM 2: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK (Matriks KL/II.M.L.047-30)										
Kegiatan 1: Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	1.1 Jumlah kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan*	Kebijakan	3	2	1	1	1	3.400 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus yang di review**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	450 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	147 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan**	Kebijakan	-	-	2	NA	NA	500 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak*	Dokumen	2	3	3	3	3	950 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum**	Dokumen	2	1	1	1	1	1.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil ABK di 6 provinsi**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	450 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	455 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah profil pornografi anak**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah profil perlindungan anak dalam konflik sosial**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	1.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan	Kegiatan	5	7	6	6	6	3.150 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kekerasan terhadap anak*									
	(Baru) 1.3 Jumlah KIE terkait isu penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif**	Kegiatan	-	-	1	NA	NA	150 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus di desa model PATBM**	Kegiatan	-	-	32	NA	NA	4.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui radio elektronik dan media publik tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak**	Kegiatan	-	-	3	NA	NA	9.123 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak	Media	-	-	5	NA	NA	3.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	dari pornografi di 9 provinsi**									
	1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti*	Dokumen	6	6	6	6	6	2.750 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi pelaksanaan penanganan anak korban stigmatisasi dan anak korban jaringan terorisme**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan ABK**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 1.4 Hasil pemantauan dan evaluasi PATBM**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	1.212 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang ditindaklanjuti**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	100 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan Anak di daerah	2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya*	Provinsi	28	30	32	34	34	100.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 2.1 Jumlah kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum yang di review**	Provinsi	-	-	8	NA	NA	1.200 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan sarana bermain bagi anak yang bisa diakses anak berkebutuhan khusus dan minoritas di daerah perbatasan**	Provinsi	-	-	4	NA	NA	1.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Stranas PKtA bagi Kabupaten/Kota**	Provinsi	-	-	10	NA	NA	2.000 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak**	Provinsi	-	-	9	NA	NA	400 (Telah di tag di indikator 16.2.1(b))	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Pengguna	-	10	10	10	10	500	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 jumlah pengguna layanan usia 15-64 tahun yang mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan	Orang	-	100	100	100	100	500	APBN	Komnas Perempuan
	1.3 jumlah pengguna layanan usia 18-24 tahun yang mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan	Orang	-	100	100	100	100	500	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Pengembangan konsep penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Konsep	-	1	1	1	1	2000	APBN	Komnas Perempuan
	1.5 Jumlah laporan pemantauan yang dihasilkan dalam satu tahun	Laporan	-	1	1	1	1	2000	APBN	Komnas Perempuan
	1.6 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	-	10	10	10	10	1000	APBN	Komnas Perempuan
PROGRAM 5: PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/kelompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendukung kerja-	Inisiatif	-	1	3	3	3	1000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kerja perempuan pembela HAM									
	1.2 Jumlah rekomendasi pelaksanaan prinsip dan hukum ham internasional yang diterima oleh Indonesia	Rekomen dasi	-	2	2	2	2	1000	APBN	Komnas Perempuan
PROGRAM 6: LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA										
Kegiatan 1 : Peningkatan ketersediaan data KDRT oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	1.1. Peningkatan ketersediaan data kasus KDRT.	Dokumen (Laporan)	-	10444	-	-	-	-	APBN	BARESKRIM
Kegiatan 2 : Peningkatan ketersediaan data kasus KTA.	2.1. Terinventarisir data kasus KTA.	Dokumen	-	9895	-	-	-	-	APBN	BARESKRIM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3 : Peningkatan ketersediaan data kasus kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	3.1. Peningkatan ketersediaan data kasus kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Dokumen	-	1798	6028	-	-	-	APBN	BARESKRIM
INDIKATOR SDGs:	5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif									
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Matriks KL/II.M.L.027-9)										
Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	1.1 Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat rehabilitasi psikososial di RPTC dan LKS	Orang	-	9700	9700	9700	9700	208.500	APBN**	Kementerian Sosial
PROGRAM 2: PROGRAM PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM (Matriks KL/II.M.L.074-1)										
Kegiatan 1: Penanganan kekerasan terhadap Perempuan	1.1 Terselenggaranya kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya	Kebijakan	-	1	1	1	1	250	APBN	Komnas Hak Asasi Manusia
	1.2 Prosentase pengaduan	%	-	90	90	90	90	500	APBN	Komnas Hak Asasi Manusia

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	masyarakat yang ditindaklanjuti									
	1.3 Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan	Sistem	-	1	1	1	1	200	APBN	Komnas Hak Asasi Manusia
PROGRAM 3: Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Pengembangan Konsep penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Konsep	-	1	2	2	2	2000	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/kelompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Inisiatif	-	1	3	3	3	1000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	1.1 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)	%	-	53,5	54	54,5	55	45,991 (Telah di tag di indikator 3.7.2*)	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN
	1.2 Persentase faskes jalur pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang memenuhi standar pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah	%	27	45	63	82	100	-	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN
	1.3 Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada	%	47	60	73	87	100	-	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2019 = 45.340 faskes)									
	1.4 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	%	33 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	-	APBN**	Perwakilan BKKBN Provinsi
Kegiatan 2: Pembinaan Ketahanan Remaja	2.1 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	Indeks (0-100)	48,4 (2015)	49	50	51	52	28.134	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Persentase remaja yang mengakses Pusat Informasi dan Konseling/PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	%	22,8	24	26	28	30	-	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
	2.3 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	%	100	100	100	100	100	-	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
	2.4 Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	%	-	74,5	75	75,5	76	11,794 (Telah di tag di indikator 3.7.2*)	APBN**	Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
Kegiatan 3: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	3.1 Persentase Peserta KB (PBI dan nonPBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	%	-	61,5	63	64,5	66	10,615 (Telah di tag di indikator 3.7.2*)	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	4.1 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	%	-	76	78	80	82	495,934 (Telah di tag di indikator 3.7.2*)	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
	4.2 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	%	-	49,1	59,1	69,1	79,1	33,024 (Telah di tag di indikator 3.7.2*)	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
	4.1 Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan	%	82	84	86	88	90	-	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE,BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kabupaten kota yang terpapar program KKBPk									
	4.2 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPk dari berbagai media	%	6,7	15	20	30	50	-	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE,BKKBN
	4.3. Persentase stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE program KKBPk	%	30	45	60	70	80	-	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE,BKKBN
PROGRAM 2: PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK										
Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.1 Persentase Puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	-	30	35	40	45	6.550,3***	APBN	Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs:		5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun 5.3.1(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat								
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH (Matriks KL/II.M.L.023-10)										
Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	1.1 Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Unit	-	12461	12611	13459	13459	47.816.700 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA
	1.2 Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	-	4473868	4563345	4868654	4868654		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Unit	-	103	75	18	18		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA
	1.4 Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	Siswa	-	1367560	1375458	1367559	1692559		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMA
Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	2.1 Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	Orang	-	95900	109500	93075	93075	725.254 (Telah ditag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										dan Kesetaraan
Kegiatan 3: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	3.1 Jumlah siswa SMK penerima BOS SM	Siswa	-	4682381	4785108	4990089	5197373	28.156.417,85 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMK
	3.2 Jumlah unit SMK baru yang dibangun	Sekolah	-	214	75	25	20	1.217.700 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasme n, Dit Pembinaan SMK

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.3 Jumlah siswa SMK penerima bantuan melalui KIP	Siswa	-	1829167	1829167	1829167	1829167	9.690.303 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK
	3.4 Jumlah RKB SMK yang dibangun	Ruang	-	5461	1000	1500	1500	2.637.810 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK
	3.5 Rehabilitasi ruang pembelajaran SMK	Paket	-	999	3298	2000	2100	511,62 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Mandikdasmen, Dit Pembinaan SMK

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	4.1 Jumlah unit sekolah baru PKLK yang dibangun	Unit	-	20	11	13	15	7.233.400 (Telah di tag di indikator 4.1.1 (f) dan 4.3.1 (a))	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan PKLK
INDIKATOR SDGs:	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah									
PROGRAM 1: (Matriks KL/II.M.L.059-23)										
Kegiatan 1: Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan	1.1 Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	-	2	2	1	1	2.100	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengarusutamaan gender bidang hukum	1.1 Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	1	1	1	1	1800 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	2.1 Jumlah kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1	3490 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3 Pengarusutamaan gender bidang IPTEK	3.1 Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	2	2	1	1	3380 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan	4.1 Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	4100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 5: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	5.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	4	4	2	2	3350 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 6: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	6.1 Jumlah kebijakan yang disusun untuk mendukung Industri Rumah Tangga di tingkat Pusat	Kebijakan	1	2	1	1	1	3380	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 7: Pengarusutamaan gender bidang Pendidikan	7.1 Jumlah kebijakan bidang pendidikan dan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	2250 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 8: Pengarusutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	8.1 Jumlah kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	3	3	3	2	5900 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 9: Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	9.1 Jumlah kebijakan yang ditelaah tentang 30% keterwakilan	Kebijakan	2	2	2	1	1	2100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Perempuan di Lembaga Legislatif									
Kegiatan 10: Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	10.1 Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	3	4	3	5060 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
INDIKATOR SDGs:	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).									
PROGRAM 1: PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Matriks KL/II.M.L.068-1)										
Kegiatan 1: Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	1.1 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon)	%	-	53,5	54	54,5	55	45.990,952	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	melalui SJSN Kesehatan (PBI)									
	1.2 Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)	%	-	43,3	57,2	71,1	85	3.338.692	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN
Kegiatan 2: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	2.1 Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN	%	-	27	47	66	85	25.740	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)									
	2.2 Persentase Peserta KB (PBI dan nonPBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	%	-	61,5	63	64,5	66	10.615	APBN**	Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta, BKKBN
Kegiatan 3: Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3.1 Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas	%	-	27	47	66	85	14.005	APBN**	Direktorat Kesehatan Reproduksi, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKR-BKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar)	%	-	10% dari 265.045 kelompok sasaran	15% dari 265.045 kelompok sasaran	20% dari 265.045 kelompok sasaran	25% dari 265.045 kelompok sasaran	8.982	APBN**	Direktorat Kesehatan Reproduksi, BKKBN
Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	4.1 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	%	-	76	78	80	82	495.934	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.2 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	%	-	49,1	59,1	69,1	79,1	33.024	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
PROGRAM 2: Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak										
Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	-	81	84	87	90	6.550,3	APBN**	Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
	1.2 Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	-	83	88	95	0			Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
	1.3 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	-	74	76	78	80			Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDGs:		5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.									
PROGRAM 1: PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Matriks KL/II.M.L.068-1)											
Kegiatan 1: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga		1.1 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	%	-	76	78	80	82	495.934	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN
		1.2 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	%	-	49,1	59,1	69,1	79,1	33.024	APBN**	Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja	2.1 Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	%	-	55	70	80	90	14.097	APBN**	Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, BKKBN
Kegiatan 3: Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	3.1 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan Peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah (Perubahan revisi Renstra)	Provinsi	-	34	34	34	34	2.544.536	APBN*	Perwakilan BKKBN Provinsi
	3.2 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak- hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	%	-	27	47	66	85	196.069,06	APBN*	Perwakilan BKKBN Provinsi

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan pemberdayaan TIK bagi responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	Orang	-	500	500	500	500	5.980	APBN*	Kementerian Komunikasi dan Informatika
PROGRAM 2: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL (MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HAL II.9.M-21)										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.1 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi	BTS	125	125 (250 kumulati f)	125 (375 kumula tif)	125 (500 kumula tif)	125 (625 kumula tif)	4,424	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN											
INDIKATOR SDGs:		1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
PROGRAM 1: Zakat Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan 1: Bantuan Modal Usaha	1.1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan modal bantuan usaha	Jiwa	-	-	2770 00	2770 00	2770 00	10.040.625	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah Baznas dan Laznas) (I= Tersedia)	Nasional = 34 Provinsi	Baznas Pusat; Baznas Provinsi dan Kab/Kota
PROGRAM 2: Layanan Langsung Mustahik (Penerima)											
Kegiatan 1: Bantuan Langsung Tunai	1.1 Jumlah mustahik yang dilayani secara nasional	Jiwa	-	-	8000 000	8000 000	8000 000	2.230.000	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah Baznas dan Laznas) (I= Tersedia)	Nasional = 34 Provinsi	Baznas Pusat; Baznas Provinsi dan Kab/Kota
PROGRAM 3: Mustahik Move to Muzakki (M3)											
Kegiatan 1: Pendampingan dan pemberian modal usaha	1.1 Meningkatkan pendapatan mustahik diatas UMR	Jiwa	35079	4194 6	1313 2	2223 6	2607 6	93.385	Dana Zakat Infaq Sedekah, wakaf dan CSR (I=Tersedia)	34 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 4: Layanan Mustahik dan Layanan Dakwah (LAMUSTA)											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan layanan langsung mustahik	1.1 Jumlah masyarakat miskin yang dibantu secara langsung	Jiwa	23011	2608 6	2928 0	3509 3	4000 0	41.645	Dana Zakat Infaq Sedekah (I=Tersedia)	34 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 5: BACK TO MASJID											
Kegiatan 1: Penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin di sekitar masjid	1.1 Jumlah bantuan yang didistribusikan	paket	-	250	250	250	250	200	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, TA'MIR MASJID
INDIKATOR SDGs:	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan										
PROGRAM 1: Peduli Kesehatan											
Kegiatan 1: membantu biaya pengobatan pasien miskin	1. 1 jumlah penduduk yang dibantu	orang	-	100	100	100	100	400	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPKU
Kegiatan 2: membantu biaya pendampingan pasien dari keluarga tidak mampu	2.1 jumlah penduduk yang dibantu	orang	-	50	50	50	50	100	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPKU
Kegiatan 3: membantu kampanye peduli kesehatan	3.1 jumlah kegiatan yang dibantu	kegiatan	-	10	10	10	10	40	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPKU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 2: Model Pemantauan Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif											
Kegiatan 1: Menyusun konsep dan tools pemantauan	1.1 Jumlah pertemuan penyusunan modul pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif	kegiatan	-	4	-	-	-	6	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2 Jumlah modul dan tools pemantauan yang akan digunakan sebagai bahan penguatan kapasitas untuk Komite Pemantau (AGBK Tahap 1 dan 2)	Dokume n	-	2	-	-	-	3	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.3 Persentase organisasi mitra yang meningkat kapasitasnya dalam memahami modul pemantauan responsif gender, inklusif, dan transformatif	Persen	-	80	-	-	-	35	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSPDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.4 Persentase kemampuan organisasi mitra yang memfasilitasi penggunaan modul pemantauan kepada komite pemantau	Persen	-	80	-	-	-	30	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	1.5 Jumlah uji coba modul pemantauan responsif gender, inklusif, dan transformatif	kegiatan	-	6	-	-	-	250	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
Kegiatan 2: Memberikan penguatan kapasitas kepada Komite Pemantau	2.1 Mengkoordinir pembentukan Tim Pemantau Komunitas di 6 provinsi	Orang	-	829	-	-	-	154	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	2.2 Mengkoordinir pembentukan Tim Pemantau Kabupaten di 6 provinsi	Orang	-	87	-	-	-	13	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
										Pergerakan, PBT
2.3. Mengkoordinir Training Tim Pemantau Komunitas di 6 provinsi	Kegiatan	-	6	-	-	-	75	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
2.4 Workshop Nasional penguatan kapasitas Komite Pemantau dari 6 provinsi	Kegiatan	-	1	-	-	-	50	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan
2.5. Jumlah anggota Komite Pemantau dari 6 propinsi yang mendapatkan penguatan kapasitas melalui workshop Komite Pemantau	Orang	-	916	120	-	-	137	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Melakukan pemantauan dengan metode monitoring	3.1 Penulisan profil wilayah pemantauan di 6 provinsi	Dokumen	-	6	-	-	-	5	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.2 Jumlah pertemuan persiapan pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif di 6 provinsi (AGBK Tahap 1)	kegiatan	-	18	-	-	-	18	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.3 Jumlah pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 1) di 6 provinsi	Kegiatan	-	6	-	-	-	360	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
3.4 Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 1) di 6 propinsi	kegiatan	-	5	-	-	-	15	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
3.5 Jumlah uji publik data hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 1) di 6 propinsi	kegiatan	-	5	-	-	-	86	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
3.6 Jumlah laporan hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 1) di 6 propinsi	kegiatan	-	6	-	-	-	12	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
3.7 Jumlah publikasi hasil-hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan	kegiatan	-	6	-	-	-	213	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K,

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	transformatif (AGBK Tahap 1)										Pondok Pergerakan, PBT
	3.8 Jumlah pertemuan persiapan pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif di 6 provinsi (AGBK Tahap 2)	kegiatan	-	-	18	-	-	97	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.9 Jumlah pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2) di 6 provinsi	Kegiatan	-	-	6	-	-	360	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.10 Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2) di 6 propinsi	kegiatan	-	-	-	6	-	15	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.11 Jumlah uji publik data hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2) di 6 propinsi	kegiatan	-	-	-	6	-	86	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.12 Jumlah laporan hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2) di 6 propinsi	laporan	-	-	-	6	-	12	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
	3.13 Jumlah publikasi hasil-hasil pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2)	dokumen	-	-	-	6	6	213	Program MAMPU - DFAT (I=Tersedia)	Sulsel, NTB, NTT, Jawa Timur, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan , YKPM, LPSDM, KPS2K, Pondok Pergerakan, PBT
PROGRAM 3 : LAYANAN BPJS MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1: Layanan BPJS Muslimat NU	1.1 Jumlah kegiatan	kegiatan	-	-	-	2500 000	2500 000	55.000	II-Masih diusulkan (BPJS)	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDGs:		1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.									
PROGRAM 1: ADVOKASI PENYANDANG SOSIAL											
Kegiatan 1: Workshop dan Public Hearing tentang masyarakat penyandang sosial	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan				1	1	100	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
Kegiatan 2: Memberikan pendampingan bagi masyarakat penyandang sosial	2. 1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok				20	20	200	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
Kegiatan 3: Memberikan pembinaan bagi masyarakat penyandang sosial	3. 1 Jumlah kelompok yang dibina	kelompok				20	20	200	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
PROGRAM 2: Kesehatan untuk Kelompok Disabilitas											
Kegiatan 1 : Inclusive hospitals	1.1. Ada buku pedoman yang dapat menjadi referensi/acuan bagi faskes	buku	-	-	-	-	1		Mitra - PELKESI-Gereja (I= Tersedia)	4 rumah sakit	Seknas & Pelkesi Wilayah I-V

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2. Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih	%	-	-	-	100	100		Mitra - PELKESI-Gereja (I= Tersedia)	4 rumah sakit	Seknas & Pelkesi Wilayah I-V
	1.3. Jumlah penggerakkan ke masyarakat mengenai aksesibititas layanan kesehatan bagi kelompok disabilitas	%	-	-	-	25	50		Mitra - PELKESI-Gereja (I= Tersedia)	4 kabupaten	Seknas & Pelkesi Wilayah I-V
PROGRAM 3: Advokasi sistem dan kebijakan layanan kursi roda dalam mendukung akses perkotaan dan transportasi publik yang aksesibel											
Kegiatan 1: Seating Clinic	1.1 Terdapat 220 orang yang mengakses kursi roda yang sesuai kebutuhan dan aksesibilitas	Orang	-	-	-	220	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	-	OHANA, Global Mobiliy USA, PERDIK, LPA Waingapu
	1.2 di berbagai wilayah di Indonesia (Barat dan Timur)	Wilayah	-	-	-	5	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	-	OHANA, Global Mobiliy USA, PERDIK, LPA Waingapu

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Advokasi Sistem layanan kursi roda	2.1 Terdapat paling sedikit 30 organisasi yang dilatih	Organisasi	-	-	-	30	-	750	(II= masih diusulkan)	DIY, Jawa Tengah, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur	OHANA, Global Mobiliy USA, PERDIK, LPA Waingapu
	2.2 terdapat 10 Dinas Sosial yang menandatangani MoU kerjasama advokasi	Dokumen	-	-	-	5	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	-	OHANA, Global Mobiliy USA, PERDIK, LPA Waingapu
PROGRAM 4: FASILITASI KERJA PENYANDANG DISABILITAS MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1: Pelatihan pekerja penyandang disabilitas di perusahaan sekitar tempat tinggal penyandang disabilitas.	1.1 Jumlah kegiatan pelatihan	kegiatan	-	-	-	30	30	1.000	III- Belum tersedia sumber	Jabodetabek, Tangerang Selatan dan Cilegon	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs:	1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)										
PROGRAM 1: Klinik Pratama RBG											
Kegiatan 1: Layanan Bersalin	1.1 Jumlah ibu hamil yang melahirkan di	Orang	789 (2016)	789	828	868	-	9.636,6	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	fasilitas kesehatan Rumah Zakat										
INDIKATOR SDGs:	1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)										
PROGRAM 1: Klinik Pratama RBG											
Kegiatan 1: Layanan Imunisasi	1.1 Jumlah anak yang menerima imunisasi di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	3506 (2016)	3506	3681	3857	-	9,637	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 2: Bakti Sosial Kesehatan											
Kegiatan 1: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.1 Imunisasi Bayi dan Balita	orang	-	-	-	5000	5000	300	Swadaya Iuran Aanggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
PROGRAM 3 : PELAYANAN KESEHATAN DASAR MUSLIMAT NU											
Kegiatan1 : Sosialisasi dan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	1.1 Jumlah orang tua yang memiliki anak umur 0-23 bulan	jiwa	-	-	-	5000 00	5000 00	100.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Banten	Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Rumah Sakit, Klinik dan BKIA Muslimat NU	1.2 Jumlah anak umur 0-11 bulan yang telah diimunisasi dasar lengkap	jiwa	-	-	-	2500 0	2500 0	25.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Banten	Muslimat NU
	1.3 Jumlah anak umur 12-23 bulan yang telah diimunisasi dasar lengkap	jiwa	-	-	-	2500 0	2500 0	25.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Banten	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs:		1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)									
PROGRAM 1: Klinik Pratama RBG											
Kegiatan 1: Layanan KB	1.1 Jumlah orang yang menggunakan KB di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	4943 (orang)	4943	5190	5437		9.636.600	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 2: Assessment Pengetahuan dan Cakupan Program Layanan Kesehatan Reproduksi di 9 Propinsi											
Kegiatan 1: Penelitian di 9 Provinsi	1.1 jml copy dokumen	copies (soft file)	-	-	-	-	-	Yayasan WRI (budget indikatof dan		Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku	Yayasan WRI (budget indikatof dan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Seminar untuk Memaparkan Hasil Assessment di Jakarta	2.1 jml partisipan pelatihan	orang	-	-	-	-	-	target Lihat pada Goals 5 indikator 5.6.1 dan 5.6.1(b)	Palladium & USAID (I=Tersedia)	Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat & DKI Jakarta	target Lihat pada Goals 5 indikator 5.6.1 dan 5.6.1(b)
PROGRAM 3: Pembentukan & Pendampingan Kelompok Remaja untuk memperkuat Pengetahuan dan Akses Program Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kabupaten Gunung Kidul, Bandung & DKI Jakarta											
Kegiatan 1: Pembentukan & Pendampingan Kelompok Remaja dua desa di Kab. Gunung Kidul, dua desa Kabupaten Bandung, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Timur	1.1 jumlah anggota kelompok	orang	-	-	-	-	-	yasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5 indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b))	FORD Foundation (I=Tersedia)	Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Timur	Yayasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5 indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b))
Kegiatan 2: Representasi kelompok remaja dalam Musrembang kab. Gunung Kidul	2.1 jmlh anggota yang merepresentasikan kelompok dalam Musrembang	orang	-	-	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Advokasi Peningkatan Anggaran oleh Representasi Kelompok Remaja di Kab. Gunung Kidul untuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Kab. Gunung Kidul	3.1 jml copy dokumen dan vidio yang dilihat oleh publik melalui youtubedan website WRI	soft copies & hit di You tube serta website WRI	-	-	-	-	-				
Kegiatan 4: Video tentang Perkawinan Di bawah Umur, Akses & Pengetahuan Kesehatan Reproduksi di Gunung Kidul	4.1 jml copy dokumen dan vidio yang dilihat oleh publik melalui youtubedan website WRI	soft copies & hit di You tube serta website WRI	-	-	-	-	-				
PROGRAM 4: Penelitian tentang Pengetahuan dan Akses Program Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kabupaten Gunung Kidul, Bandung & DKI Jakarta											
Kegiatan 1: Penelitian di 3 akabupaten	1.1 tersedianya laporan penelitian yang diolah menjadi bahan panduan bagi Remaja	Copy dokume n	-	-	-	-	-	yasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5	FORD Foundation (I=Tersedia)	Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kotamadya	Yayasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Seminar untuk Memaparkan Hasil Penelitian di Jakarta & Peluncuran Panduan bagi Remaja	2.1 jml partisipan	orang	-	-	-	-	-	indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b)		Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Timur	indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b)
PROGRAM 5: Better Life Options and Opportunities Model (BLOOM)											
Pelatihan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja yang melibatkan pria, wanita, anak lelaki dan perempuan	Advokasi tingkat nasional dan sub- nasional yang komprehensif tentang hak hak kespro	-	-	-	-	-	-	-	INGO (I=Tersedia)	Pemerintah Pusat, Lembata, Sikka Nagekeo (NTT) - Scale-up Nasional	Yayasan Plan Internasional Indonesia (Mitra: CIS Timor)
PROGRAM 6: Peningkatan Kualitas reproduksi perempuan											
Kegiatan 1: Pelatihan pendampingan Kespro untuk menciptakan kantong-kantong pendamping komunitas dalam memberikan pendidikan kespro dan advokasi hak-hak kespro	1. 1 Prosentase provinsi yang telah melakukan pelatihan pendampingan kespro	%	-	25	50	75	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1. 2 komunitas nasyiah pendamping Kespro yang memberikan pendidikan dan advokasi hak hak	komunitas	-	40	60	80	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	kespro bagi masyarakat										
Kegiatan 2: Seminar kesehatan reproduksi	2.1 jumlah provinsi yang melaksanakan seminar kesehatan reproduksi	provinsi	-	15	20	28	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
PROGRAM 7: Family Learning Center (FLC) sebagai pusat belajar keluarga yang bebas dari KDRT											
Kegiatan 1: penyusunan panduan pembentukan FLC	1.1 prosentase terbentuknya panduan komprehensif mengenai tata cara relasi berkeluarga yang sakinah, ma wadhah warahmah	%	-	50	75	100	100	20	- (II= masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
	1.2. deseminasi panduan FLC terkait pola relasi keluarga yang sehat, bebas tekanan dan sadar gender di setiap provinsi	provinsi	-	0	0	15	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	Nasyiatul Aisyiyah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 8: Mengatasi persoalan remaja dengan posyandu remaja PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik NA)											
Kegiatan 1: Membuat konsep dan materi pelatihan motivator, kader, tenaga konselor dan medis PASHMINA	1.1 Prosentase penyusuna buku panduan PASHMINA	%	-	100	100	100	100	20	- (II= masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
	1.2. setiap provinsi memiliki tim motivator berkualitas sesuai dengan konsep PASHMINA	provinsi	-	5	25	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1.3 setiap provinsi memiliki Tim Penggerak PASHMINA	provinsi	-	5	20	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	Nasyiatul Aisyiyah
Kegiatan 2: Layanan PASHMINA	2.1 Setiap provinsi dapat memiliki layanan PASHMINA yang dapat bermanfaat bagi Remaja dan berkelanjutan	provinsi	-	5	20	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.1 Pelayanan KB	orang	-	-	-	5000	5000	1.250	Swadaya Iuran Aanggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
PROGRAM 11: AYO BER-KB MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Layanan KB Muslimat NU	1.1 Jumlah akseptor KB	jiwa	-	-	-	5000 00	5000 00	1.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40% terbawah)										
PROGRAM 1: Air Untuk Kehidupan (AUK)											
Kegiatan 1 : Mendirikan sumur tadah hujan, sedekah pohon dan	1.1 Jumlah titik sumur yang dibuat dan lokasi penghijuan yang dilakukan	Lokasi	7	8	10	10	10	8.644	Kemitraan (I=Tersedia)	6 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 2: Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM)											
Kegiatan 1 : Memberikan layanan langsung mustahik	1.1 Masyarakat yang mengikuti program STBM DD	Jiwa		2738	2687	2500		450	Dana Infaq dan	NTT dan Tangerang Selatan	DOMPET DHUAFA

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
									Kemitraan (I=Tersedia)		
PROGRAM 3:											
Kegiatan 1: WASH@workplace, Penyediaan air, sanitasi dan higienitas dilokasi kerja sesuai standar WBCSD	1.1 Target Sasaran adalah lebih dari 12 000 karyawan Aqua memiliki akses terhadap air, sanitasi dan kebersihan sesuai standar WBCSD di lokasi kerja. Kegiatan tidak hanya terkait perbaikan sarana air bersih dan sanitasi, tetapi juga adanya perubahan perilaku bersih dan sehat yang juga diharapkan dapat dibawa ke lingkungan rumah tangga dan masyarakat sekitar	Skor rata rata (Max 100)	-	-	79	90	95	-	Danone (I=Tersedia)	44 Lokasi Kerja (Pabrik, Depo dan Kantor) Danone Indonesia	Danone

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Water Access, Sanitation and Hygiene (WASH)	2.1 Peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi dan Higienitas di masyarakat sekitar area operasional Aqua dan daerah lain yang membutuhkan	Jiwa	120000	135000	149487	180817	209817	-	Danone (I=Tersedia)	17 Kab	Danone, Mitra LSM Nasional
PROGRAM 4: Access to Clean Water											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, penetapan dan pelatihan tentang komite air dan sistem manajemen air bersih	1.1 kelompok masyarakat yang dilatih di komite air	Kelompok		N/A	N/A	10	26	500	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	1.2 % komite air yang berfungsi	Komite		N/A	N/A	1	1		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	1.3 % dari keluarga yang terdaftar untuk mendapat layanan air masyarakat	Keluarga		N/A	N/A	0	0		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Masyarakat membangun fasilitas air bersih dan sanitasi	2.1 populasi sasaran dengan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik	Keluarga		N/A	1	1	1	1.000	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	2.2 populasi sasaran dengan akses terhadap peningkatan sumber air minum yang lebih baik	Keluarga		N/A	1	1	1		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	2.3 rumah tangga yang di sosialisasi yang memiliki fasilitas cuci tangan	Keluarga		N/A	0	1	1		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	2.4 rumah tangga yang di sosialisasi dengan teknologi pengolahan air minum yang disarankan dan yang digunakan	Keluarga		N/A	1	1	1		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 3: Kaji lapangan dan pelatihan penyediaan sanitasi	3.1 keluarga menggunakan dengan tepat teknologi sanitasi	Sistem		N/A	N/A	N/A	N/A	200	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Kemandirian Sanitasi											
Kegiatan 1: Penyuluhan dan pendampingan	1.1 Perubahan perilaku masyarakat	Kapita	-	0	50	2000	2000	6.249,425	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
	1.2 Peningkatan pengetahuan	Kapita	-	0	50	2000	2000		Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 2: Pembangunan sanitasi/jamban	2.1 Indikator Kegiatan : jumlah sanitasi layak dalam satu desa berdaya (% cakupan sanitasi layak)	keluarga	-	0	50	500	500		Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 2: Kemandirian Sanitasi											
Kegiatan 1: Penyuluhan dan pendampingan	1.1 Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Orang	1050 (2017)	0	1050	2000	-	6.249,425	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1.2 Jumlah orang yang mengalami peningkatan pengetahuan	Orang	1050 (2017)	0	1050	2000	-		Donasi Program (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pembangunan sanitasi/jamban	2.1 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki saintasi layak	Rumah Tangga	50 (2017)	0	50	500	-		Donasi Program (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
PROGRAM 3:											
Kegiatan 1: WASH@workplace, Penyediaan air, sanitasi dan higienitas dilokasi kerja sesuai standar WBCSD	1.1 Target Sasaran adalah lebih dari 12 000 karyawan Aqua memiliki akses terhadap air, sanitasi dan kebersihan sesuai standar WBCSD di lokasi kerja. Kegiatan tidak hanya terkait perbaikan sarana air bersih dan sanitasi, tetapi juga adanya perubahan perilaku bersih dan sehat yang juga diharapkan dapat dibawa ke lingkungan rumah tangga dan masyarakat sekitar	Skor rata rata (Max 100)	-	-	79	90	95	-	Danone (I=Tersedia)	44 Lokasi Kerja (Pabrik, Depo dan Kantor) Danone Indonesia	Danone

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Water Access, Sanitation and Hygiene (WASH)	2.1 Peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi dan Higienitas di masyarakat sekitar area operasional Aqua dan daerah lain yang membutuhkan	Jiwa	120000	135000	149487	180817	209817	-	Danone (I=Tersedia)	17 Kab	Danone, Mitra LSM Nasional
PROGRAM 4: Parenting Program											
Kegiatan 1: Melaksanakan STBM yang inklusif dan berbasis gender	1.1 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum	Jumlah Rumah Tangga	-	-	-	150000	250000	-	Plan International (I=Tersedia)	NTT & NTB	Yayasan Plan International Indonesia
	1.2 Desa/ keluarahan yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa/ Keluarahan	-	-	-	60	120	-	Plan International (I=Tersedia)	NTT & NTB	Yayasan Plan International Indonesia
PROGRAM 5: Community Based Total Sanitation (CBTS)											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan materi komunikasi perubahan perilaku, memicu kebersihan dan sanitasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan perubahan perilaku	1.1 % kelompok masyarakat dipicu untuk CBTS-Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (ODF- Open Defecation Free/buang air besar tidak sembarangan).	Kelompok	-	-	50	75	100	300	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Lokakarya dan pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/CBTS untuk Relawan Kesehatan Masyarakat - Community Health Volunteers (CHVs)	2.1 Relawan Kesehatan Masyarakat (CHVs) yang telah menyelesaikan Pelatihan Fasilitator (ToF) tentang STBM menggunakan kurikulum standar.	Orang	-	-	-	100	150	1.000	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
	2.2 relawan Kesehatan Masyarakat terlatih (CHVs) yang memfasilitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masyarakat (pemicuan, advokasi dan kemitraan)	Orang	-	-	-	70	100		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 3: Pelatihan, pertemuan, pendampingan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki kebijakan lokal tentang kebersihan & sanitasi	3.1 kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Buang air besar tidak sembarangan atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kebijaka n	-	-	-	6	13	300	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I=Tersedia)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 6: Pelatihan Dai Sanitasi											
Kegiatan 1: Pelatihan Dai sanitasi untuk pemician dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	belum ada output kegiatan	Orang	-	-	120	200	250	900	- (II= masih diusulkan)	Indonesia	MUI
PROGRAM 7: Pelatihan Dai Sanitasi											
Kegiatan 1: Pelatihan Dai sanitasi untuk pemician dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	belum ada output kegiatan	Orang	-	-	120	200	250	900	- (II= masih diusulkan)	Indonesia	MUI
PROGRAM 7: PELAYANAN KESEHATAN DASAR MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Pembuatan jamban dan saluran pembuangan rumah tangga	1.1 Jumlah jamban rumah tangga	unit	-	-	-	1,00 0	1,00 0	3,000	III- Belum tersedia sumber	2 Provinsi : Jawa Timur, Papua	Muslimat NU
Kegiatan 2 : Pelatihan Da'iyah/ penyuluh dan pendamping Desa Sehat Layak Huni (sanitasi)	2.1. Kegiatan pelatihan Da'iyah/penyuluh dan pendamping Desa Sehat Layak Huni	Kegiatan	-	-	-	18	17	5,250	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pemberian beasiswa untuk anak sekolah dasar	1.1 Jumlah anak penerima beasiswa sekolah dasar	anak	-	100	0	0	0	100	JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional	JAPFA Foundation
PROGRAM 3: Bantuan Keuangan dan Beasiswa											
Kegiatan 1: Pemberian beasiswa untuk tingkat SMK jurusan agrikultur dan agroteknologi	1.1 Jumlah siswa penerima beasiswa SMK Agribisnis dan Agroteknologi	Siswa	-	0	48	50	50	1200-1400	JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional (14 kab/kota (9 Prov)	JAPFA Foundation
PROGRAM 4: Beasiswa											
Kegiatan 1: Beasiswa Anak Juara	1.1 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	8396 (2016)	8396	8816	9236	-	22.587,744	Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 2: Beasiswa Sekolah Juara	2.1 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Juara Rumah Zakat	Orang	1605 (2016)	1605	1685	1766	-	13.206,006	Donasi Program (I= Tersedia)	15 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 3: Beasiswa Anak Juara	3.1 Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	5123 (2016)	5123	5379	5635	-	22.587,744	Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Beasiswa Anak Juara	4.1 Jumlah anak usia 16-18 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	3613 (2016)	3613	3794	3974	-	22.587,744	Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 5: Beasiswa Mentari (Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA))											
Kegiatan 1: Memberikan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat miskin	1. 1 Jumlah siswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang	-	1000	1000	1000	1000	4.000	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS DIKDASMEN
PROGRAM 6: Save Our School											
Kegiatan 1: Membantu pembangunan infrastruktur sekolah	1. 1 Jumlah sekolah yang dibantu	unit	-	10	10	10	10	4.000	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS DIKDASMEN
PROGRAM 7: Santri Tahfidz											
Kegiatan 1: membantu biaya pendidikan santri tahfidz	1. 1 Jumlah siswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang	-	50	250	250	250	550	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH
Kegiatan 2: membantu biaya operasional pesantren tahfidz	2.1 Jumlah pesantren yang dibantu biaya operasionalnya	unit	-	5	5	5	5	750	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 8: Beastudi Indonesia											
Kegiatan 1: Memberikan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin	1.1 Jumlah Penerima Manfaat yang dikelola	Jiwa	4535	5490	6717	7000	7350	35.085	Dana ZIS dan Kemitraan (I=Tersedia)	14 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 9: Bantuan Pendidikan Anak											
Kegiatan 1: Bantuan pendidikan anak	1.1 1000 lebih family support tiap cabang dan ranting	Anak	-	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0		SWADAYA, DINSOS (III- Belum tersedia sumber)	seluruh indonesia	AISYIYAH
INDIKATOR SDGs: 1.4.1. (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)											
PROGRAM 1: PROGRAM PENCATATAN KELAHIRAN BERBASIS MASYARAKAT											
Kegiatan 1: Melaksanakan Pencatatan kelahiran berbasis masyarakat	1.1 kelompok perlindungan anak desa (KPAD) yang berfungsi memberikan pelayanan pencatatan kelahiran berbasis masyarakat	Jumlah KPAD	-	-	-	254	224	-	Plan International (I=Tersedia)	NTT (akan di scale- up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
	1.2 Anak (perempuan & laki- laki) yang	Jumlah Anak	-	-	-	3638 9	1932 80	-	Plan International (I=Tersedia)	NTT (akan di scale- up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	mendapatkan akta kelahiran										
PROGRAM 2: LAYANAN AKTA KELAHIRAN ANAK MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1: Layanan pengurusan akta kelahiran bagi masyarakat miskin	1.1. jumlah anak	jiwa	-	-	-	1000	1000	1	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
PROGRAM 1: TANGGAP DARURAT BENCANA											
Kegiatan 1: Edukasi tentang kebencanaan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	4	4	4	4	160	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB
Kegiatan 2: Membangun posko kebencanaan	2. 1 Jumlah posko yang dibangun di lokasi bencana	unit	-	10	10	10	10	2.804	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB
Kegiatan 3: menyalurkan bantuan darurat kebencanaan	3. 1 Jumlah paket bantuan yang didistribusikan	paket	-	1000	1000	1000	1000	866	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Bantuan Dana dan Logistik	1.1 Penyaluran Bantuan khusus Perempuan, anak, lansia dan difabel	orang	500	700	800	900	1,000	70	SWADAYA (I=Tersedia)	SUMUT, NTB, BABEL, ACEH, SUMBAR, KEPRI, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, BALI, SULTRA	AISYIYAH
Kegiatan 2: Penyusunan Panduan pengelolaan bencana untuk kelompok rentan (Dokumen pengurangan risiko bencana)	2.1 Draft panduan pengelolaan bencana & Pengurangan risiko bencana	buku	1	1	100	150	200	2	SWADAYA (I=Tersedia)	SELURUH INDONESIA	AISYIYAH
PROGRAM 4: MUHAMMADIYAH AID											
Kegiatan 1: penghimpunan donasi untuk bencana global	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	5	5	5	5	500	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS
Kegiatan 2: penyaluran bantuan ke daerah bencana/konflik sosial	2. 1 Jumlah bantuan yang didistribusikan	paket	-	-	-	-	-	-	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS
Kegiatan 3: melakukan pendampingan di	3. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	5	5	5	5	200	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Program Keuangan Mikro Syariah	1.1 Membuat koperasi di wilayah paska bencana	KK	355	388	407	-	-	5.000	Dana ZIS dan Kemitraan (I=Tersedia)	Wasior, Manado, Balikpapan, Mentawai, Padang, tasik, Kupang, Banten, Bali	DOMPET DHUAFA
Kegiatan 2: Pendirian Sekolah Darurat di daerah bencana	2.1 Pendirian sekolah darurat di wilayah bencana	Lokasi	5	6	6	-	-	3.000	Dana Infaq dan Kemitraan (I=Tersedia)	6 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 9: Peningkatan kapasitas Nasyiah dalam menghadapi bencana alam dan sosial											
Kegiatan 1: Pelatihan Penanggulangan Bencana Berperspektif Perempuan dan Anak	1.1 (a) mewujudkan penanganan pasca bencana alam dan sosial yang responsif terhadap kebutuhan dasar perempuan dan anak (sanitasi, kesehatan reproduksi, pendidikan, kesetaraan upah sebagai pekerja,) (b) tersosialisasikannya penanganan bencana ala dan sosial yang holistik seperti data base gender yang terpilah, kebijakan	provinsi (jumlah provinsi yang melakuk an pelatiha n)	-	5	15	20	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan Nasyiatul Aisyiyah (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penyusunan Panduan respon bencana ramah perempuan dan anak	Setiap provinsi dapat: 2.1 (a) terbentuknya panduan yang sesuai dengan arah kebijakan penanganan pasca bencana yang berkeadilan, memihak penyintas (perempuan dan anak) serta mampu menjawab kebutuhan dasar perempuan dan anak saat bencana (b) mendiseminasikan pada semua pihak tentang langkah- langkah respon bencana yang ramah anak dan perempuan	provinsi (jumlah provinsi yang melakuk an pelatiha n)	-	5	15	20	34	25	- (II= masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
PROGRAM 10: Safari PRB											
Kegiatan 1: Pelatihan dan Simulasi	1.1 Jumlah daerah yang beresiko mengalami bencana mengembangkan sosialisasi tentang PRB	wilaya/ propinsi				5	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Banda Aceh	PERTUNI, YEU, YAKKUM, YOUNG VOICE (usulan OHANA)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 1: Sekolah Ceria											
Kegiatan 1: melakukan kegiatan belajar, bermain dengan anak-anak korban bencana	1.1 Anak-anak yang didamping selama masa darurat	Jiwa	254	267	321			600	Dana Infaq dan Kemitraan (I=Tersedia)	34 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 2: Program Kemanusiaan PKBI - Respon Bencana											
Kegiatan 1:	1.1 Mencegah Penularan HIV, Kematian Ibu dan Anak pada saat Bencana	Orang yang mengak ses layanan kespro pada situasi bencana	-	-	-	525	-	-	IPPF (I=Tersedia)	Riau (Kampar), Jawa Tengah (Purworejo), Jawabarat (Garut), Sumatera Barat (Solok), Aceh (Pidie Jaya), Nusa Tenggara Barat (Bima), Jawa Barat (Kuningan), Sumatera Barat (50 Kota), Yogyakarta, Bali, Aceh tengah, Bener Meriah, Sumut,	PKBI berkerjasama dengan PKBI Daerah
	1.2 Mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual dan memberikan penanganan pada penyintas pada saat situasi bencana	Jumlah KIE	-	-	-	-	-	-	IPPF (I=Tersedia)		PKBI berkerjasama dengan PKBI Daerah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Memberikan penguatan kapasitas dalam merespon bencana dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait	Jumlah Training	-	-	-	-	-	-	IPPF (I=Tersedia)	Jakarta, Jombang (Jatim), Pengalengan (Jabar), Solo- Jawa Tengah, Riau- Pekanbaru, Jambi, Solo, Banjar Negara- Jateng	PKBI berkerjasama dengan PKBI Daerah
PROGRAM 3: Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam PRB - API											
Kegiatan 1: Workshop PB & PRB di daerah target	1.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan PRB	orang	-	120	120	120	120	25.000	DFAT (I=Tersedia)	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Parepare)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan 2: Kampanye media isu PRB di daerah target : a. Pelatihan Media Sosial	2.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan Medsos terdiri dari beberapa aktor, Aparatur 15%, Media 45% Organisasi Kaum Disabilitas 5% Ormas 35&	orang	-	110	110	110	110				
Kegiatan 3: Kampanye media isu PRB di daerah target :	3.1 Jumlah Portal Bencana di 4 (empat) Kabupaten	unit	-	4	4	4	4				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
b. Pembuatan Medsos /Facebook di 4 (empat) Kabupaten	3.2 Jumlah follower di 4 (empat) kabupaten	orang	-	8000	8000	8000	8000				
Kegiatan 4: Pertemuan Rutin Stakeholder di daerah target	4.1 Jumlah peserta yang hadir dalam pertemuan di 4 (empat) kabupaten. (Aktor yang sering terlibat bencana di tingkat kabupaten terdiri dari SKPD/OPD, Media Massa, Organ Kebencanaan, Tokoh Masyarakat dan Dunia Usaha)	orang	-	100	100	100	100			Jateng (Kudus, Jepara); Sulsel (Barru & Wajo)	
Kegiatan 5: Pembentukan Forum PRB di daerah target	5.1 Jumlah pembentukan forum dan jumlah Dokumen Deklarasi FPRB di 4 Kabupaten	forum dan dokume n	-	4	4	4	4				
Kegiatan 6: Pelatihan PRB dan PDRA	6.1 Jumlah Kajian Risiko desa yang berhasil dibuat oleh alumni	dokume n	-	4	4	4	4			a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene	
	6.2 Jumlah peserta pelatihan	orang	-	100	100	100	100				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 7: Pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana dan Sphere	7.1 jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	-	110	110	110	110			Kepulauan & Pare- pare)	
Kegiatan 8: Pelatihan Teknik Tanggap Darurat Bencana	8.1 Jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	-	110	110	110	110				
Kegiatan 9: Pembentukan Tim Respon Bencana Komunitas	9.1 Jumlah Tim Respon Bencana Komunitas di 4 (empat) kabupaten	lembaga	-	120	120	120	120				
	9.2 Jumlah dokumen komitmen	dokumen	-	4	4	4	4				
Kegiatan 10: Workshop metodologi kajian risiko bencana	10.1 Jumlah peserta workshop di 4 (empat) kabupaten	orang	-	140	140	140	140				
Kegiatan 11: Pelatihan penyusunan kajian risiko bencana	11.1 Jumlah peserta pelatihan di 4 (empat) kabupaten	orang	-	44	44	44	44				
	11.2 Jumlah dokumen kajian risiko	dokumen	-	4	4	4	4				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 12: Rapat Penyusunan kajian risiko bencana	12.1 Jumlah Tim Penyusun dokumen kajian risiko bencana di 4 (empat) kabupaten	orang	-	22	22	22	22				
	12.2 Jumlah Dokumen kajian risiko berbasis teknologi informasi di 4 (empat) kabupaten	dokume n	-	4	4	4	4				
	12.3 Jumlah kabupaten yang mengadopsi dokumen kajian risiko berbasis teknologi informasi di 4 (empat) kabupaten	kabupat en	-	4	4	4	4				
	12.4 Jumlah Desa yang mengadopsi dokumen kajian risiko berbasis teknolgi informasi di 4 (empat) kabupaten	Desa	-	11	11	11	11				
Kegiatan 13: Pelatihan Penyusunan Sistem Peringatan Dini	13.1 Jumlah peserta pelatihan di 4 (empat) kabupaten	orang	-	140	140	140	140				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
di daerah Target (Workshop : Pembentukan Tim SPDT: Rancangan SPDT dst)	13.2 Jumlah Dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	dokume n	-	4	4	4	4				
	13.3 Jumlah pemerintah kabupaten yang mengadopsi dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	Pemerin tah kabupat en	-	4	4	4	4				
	13.4 Jumlah Desa yang mengadopsi dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	Desa	-	11	11	11	11				
Kegiatan 14: Pembuatan peta dan rute evakuasi di daerah target	14.1 Jumlah Peta dan Rute evakuasi di 4 (empat) kabupaten	Peta	-	11	11	11	11				
	14.2 Jumlah warga desa didaerah kawasan bencana banjir yang dapat mengakses alat peringatan dini	orang	-	3200 0	3200 0	3200 0	3200 0				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	banjir di 4 (empat) kabupaten										
Kegiatan 15: Pembuatan dan pemasangan alat peringatan dini di daerah target (pengadaan: pemasangan:ujicoba)	15.1 Jumlah lokasi pemasangan alat peringatan dini di 4 (empat) kabupaten	titik	-	160	160	160	160				
Kegiatan 16: Pelatihan Penyusunan mekanisme tanggap darurat bencana di daerah target	16.1 jumlah peserta pelatihan yang terlibat di 4 (empat) kabupaten	orang	-	100	100	100	100				
Kegiatan 17: Penyusunan SOP Kedaruratan Bencana di daerah target (workshop penyusunan dokument SOP)	17.1 Jumlah peserta yang terlibat di 4 (empat) kabupaten	orang	-	70	70	70	70				
	17.2 Jumlah SOP Kedaruratan Bencana di 4 (empat) kabupaten	dokumen	-	4	4	4	4				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	-	100	100	100	100	15.000	Swadaya (I=Tersedia)	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupat en	-	30	30	30	30				
Kegiatan 2: Pelatihan PRB - API	2.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	-	30	30	30	30				
	2.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupat en	-	50	50	50	50				
Kegiatan 3: Penyusunan Rencana PRB - API Sekolah dan Madrasah	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	-	30	30	30	30				
	3.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupat en	-	50	50	50	50				
Kegiatan 4: Penyusunan SOP dan	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di	orang	-	30	30	30	30				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Mekanisme Penanganan Bencana	masing-masing sekolah/madrasah										
	4.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupat en	-	50	50	50	50				
Kegiatan 5: Simulasi Penanganan Bencana di Sekolah dan Madrasah	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang	-	150	150	150	150				
	5.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupat en	-	50	50	50	50				
PROGRAM 5: Aksi Kemanusiaan Bencana di Indonesia											
Kegiatan 1: Assesment dan Penyusunan Rencana Penanganan Darurat	1.1 Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokume n	-	60	60	60	60	30.000	Swadaya (I=Tersedia)	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
	1.2 Koordinasi Relawan dan stakeholder di daerah terdampak bencana	kabupat en	-	60	60	60	60				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
INDIKATOR 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. SDGs:											
PROGRAM 1: Panti dan Santunan Keluarga Aisiyiah											
Kegiatan 1: Santunan Keluarga Aisiyiah	1.1 296 Panti dan 1000 Lebih Santunan Keluarga	Anak	57760	5000 0	5000 0	5000 0	5000 0	-	SWADAYA, DINSOS (I= Tersedia)	30 PROVINSI	AISIYIAH
Kegiatan 2: Bantuan Vitamin dan Family Support	2.1 1000 lebih family support tiap cabang dan ranting	Anak	30000	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0	-	SWADAYA, DINSOS (I= Tersedia)	seluruh indonesia	AISIYIAH
PROGRAM 2: Ketahanan Keluarga											
Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang	1.1 Sosialisasi Pola asuh anak 1000 HPK	Orang	300 (2017)	-	300	-	-	PM	BKKBN	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
Kegiatan 2: GEMARIKAN	1.1 Sosialisasi GEMARIKAN	Orang	200	-	-	-	-	PM	KKP	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
PROGRAM 3: Infant & Young Child Feeding (IYCF)											
Kegiatan 1: Pelatihan konseling IYCF untuk petugas kesehatan dan relawan	1.1ibu hamil dan ibu / pengasuh dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat	ibu/pen gasuh/ Orang	-	-	70	200	250	1.500	Multi funding dari dalam dan luar negeri (II=	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
kesehatan masyarakat (Community Health Volunteers / CHVs)	bimbingan/konseling gizi								masih diusulkan)		
	1.2 Jumlah anggota masyarakat / relawan kesehatan masyarakat (CHV) yang dijangkau melalui sesi peningkatan kesadaran dan akses terhadap informasi perlindungan anak	Anggota masyara kat	-	-	-	200	250	-			
Kegiatan 2: Pelatihan, kampanye, pengembangan bahan BCC, kompetisi praktik IYCF untuk orang tua dan pengasuh untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik	2.1 orang tua dan pengasuh yang telah meningkat pengetahuannya tentang pesan utama IYCF	Orang tua/pen gasuh	-	-	-	50	75	2.000			
	2.2 rumah tangga dengan anak balita mampu menyediakan makanan melalui Produksi makanan Homestead (Homestead Food Production)	Keluarg a	-	-	-	10	20	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pelatihan, pertemuan, dan pemantauan untuk pemimpin masyarakat, pemimpin adat, pemimpin agama untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah mengenai Kesehatan dan Nutrisi Kesehatan Ibu (MCHN)/Maternal Child and Health Nutrition)	3.1 proses pemantauan dan dialog / lobi yang dipimpin oleh masyarakat dan pertemuan mengenai isu-isu MCHN yang dilakukan oleh masyarakat, dipilah berdasarkan apakah pertemuan tersebut dilakukan dengan atau tanpa dukungan Wahana Visi Indonesia	Pertemu an	-	-	0	13	39	500			
	3.2 rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau peningkatan layanan yang muncul dari rencana aksi masyarakat yang dipresentasikan kepada pemerintah daerah / pengambil keputusan mengenai perlindungan anak	Rekome ndasi	-	-	0	6	13	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana untuk kesehatan dan gizi	4.1 desa yang memiliki rencana kesiapsiagaan bencana tentang masalah kesehatan dan gizi.	Dokume n	-	-	1	6	13	200			
PROGRAM 4: Household practice proper healthy behavior											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pelatihan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terintegrasi Penyakit Anak Berbasis Masyarakat (C-IMCI) berbasis Komunitas untuk Relawan Kesehatan Masyarakat (CHVs) memiliki kapasitas untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit untuk melatih orang tua dan perawat	1.1 relawan kesehatan masyarakat / relawan kesehatan masyarakat / pengunjung rumah / pendidik sebaya yang telah menyelesaikan kursus pelatihan pengelolaan kasus masyarakat (community case management / CCM) berdasarkan jenis kelamin	Orang	-	-	-	200	250	400	Multi funding dari dalam dan luar negeri (II= masih diusulkan)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Kesadaran akan pentingnya pemantauan	2.1 anak-anak U5 yang dipantau pertumbuhannya	%	-	-	50	60	75	600			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
perkembangan dan pertumbuhan anak untuk orang tua & pengasuh	2.2 anak berusia 3 - 5 tahun (termasuk yang paling rentan) yang saat ini menghadiri pusat Perkembangan Perawatan Anak Usia Dini (ECCD Early Childhood Care Development)	Anak	-	-	50	70	80	-			
Kegiatan 3: Kaji lapangan, pelatihan, kelas, dan pemantauan Possitive Deviance (PD) / Pos Gizi untuk relawan kesehatan masyarakat (CHV)	3.1 anak-anak U5 berpartisipasi dalam sesi PD / 'Pos Gizi' yang bertambah 400 gram berat badannya dalam satu bulan	Anak	-	-	30	50	60	200			
	3.2 dari pengasuh terdaftar yang menyiapkan makanan padat gizi di rumahnya	Pengasuh	-	-	50	60	80	-			
INDIKATOR SDGs: 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.											
PROGRAM 1: 1000 Beasiswa											
Kegiatan 1: Konferensi Indonesia Bergizi	1.1. Jumlah organisasi yang memiliki komitmen melalui inisiatif	organisasi	-	7	22	0	0	6.000-7.000	JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional	JAPFA Foundation

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	peningkatan gizi di Indonesia										
Kegiatan 2: Kompetisi Indonesia Bergizi (INZI Creative)	2.1. Jumlah tim yang ikut serta dalam kompetisi membangun solusi inovatif untuk peningkatan gizi di masyarakat	organisasi	-	7	174	0	0		JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional	JAPFA Foundation
PROGRAM 2: Tebar Hewan Kurban											
Kegiatan 1: Pembagian Daging Kurban dihari Idul Adha	1.1 Daging terbagikan ke masyarakat	Jiwa	815345	862044	876082	900000	950000	60.000	Dana Kurban (I= Tersedia)	34 Provinsi	DOMPET DHUAFA
PROGRAM 3: Kios Hidmat Muslimat NU											
Kegiatan 1: Kios Hidmat Muslimat NU menyediakan bahan pangan pokok bagi masyarakat	1.1. jumlah kios	unit	-	-	-	100	200	1.500	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 4: Ketahanan Keluarga											
Kegiatan 1: GEMARIKAN	1.1 Sosialisasi GEMARIKAN	Orang	200	-	-	-	-	PM	KKP	Nasional	Dharma Wanita

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
											Persatuan Pusat
PROGRAM 5: Mothers Programme											
Kegiatan 1: pembekalan pengetahuan mengenai sarapan yang bernutrisi	1.1 150,000 ibu mengalami peningkatan pengetahuan mengenai sarapan yang bernutrisi bagi keluarga, khususnya anak	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)	Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kota Tangerang, Kota Gorontalo, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Ternate, Kota Manado	Yayasan Unilever Indonesia, PDGI, Tim Penggerak Pemberdayaa n dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dan Daerah, kader PKK dan posyandu
	1.2 150,000 ibu mengalami peningkatan sikap untuk mengonsumsi sarapan yang bernutrisi dan menyediakan sarapan yang bernutrisi bagi keluarga	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)		
	1.3 150,000 ibu mengalami peningkatan perilaku mengonsumsi sarapan yang bernutrisi dan	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	menyediakan sarapan yang bernutrisi bagi keluarga										
Kegiatan 2: pembekalan pengetahuan mengenai pangan jajanan sekolah yang bergizi	2.1 150,000 ibu mengalami peningkatan pengetahuan mengenai pangan jajanan sekolah yang bergizi	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)		
	2.2 150,000 ibu mengalami peningkatan sikap untuk memastikan anak mereka mengkonsumsi pangan jajanan sekolah yang bergizi	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)		
	2.3 150,000 ibu mengalami peningkatan perilaku untuk memastikan anak mereka mengkonsumsi pangan jajanan sekolah yang bergizi	Jumlah Ibu	-	n/a	1500 00	1500 00	1500 00	-	(III- Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
PROGRAM 1: Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan											
Kegiatan 1: Program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan program peningkatan kesadaran masyarakat oleh agent of change tentang pentingnya upaya persiapan yang dilakukan pada 1000 hari pertama dalam kehidupan, yang didukung oleh kerjasama para stakeholder.	Program bertujuan untuk: 1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya intervensi pada periode 1000 hari pertama kehidupan	Duta	100	-	-	tbc	tbc	-	Danone (I= Tersedia)	1. Kabupaten Lebak; 2. Kabupaten Cianjur; 3. Kota Serang; 4. Kota Cilegon; 5. Kabupaten Tangerang; 6. Kota Cirebon; 7. Kota Bekasi; 8. Kota Tasikmalaya; 9. Kota Tangerang; 10. Kabupaten Purwakarta; 11. Kabupaten Kuningan; 12. Indramayu; 13. Kabupaten Sumedang; 14. Kabupaten Pangandaran; 15. Kabupaten	Danone Indonesia, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, IBI, IDAI, PDGMI, HOGSI, Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Banten
		Pendidik	2000	-	-	tbc	tbc	-			
	1.2. Meningkatkan potensi kerja sama para pihak terutama dunia usaha, akademisi, praktisi kesehatan untuk mengoptimalkan kampanye edukasi tahapan 1000 hari pertama kehidupan di berbagai lapisan masyarakat	Fasilitat or	-	1000	0	tbc	tbc	-			
		Ibu yang tereduk asi	-	1000 00	#REF !	tbc	tbc	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3. Mengembangkan "centre of excellence" untuk meningkatkan status gizi bangsa melalui percepatan pencapaian target 1000 hari pertama kehidupan	-	-	-	-	-	-	-		Majalengka; 16. Kabupaten Pandeglang; 17. Kabupaten Subang; 18. Kabupaten Purwakarta; 19. Kota Sukabumi; 20. Kota Banjar	
PROGRAM 2: Ketahanan Keluarga											
Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang	1.1 Sosialisasi Pola asuh anak 1000 HPK	Orang	300 (2017)	-	300	-	-	PM	BKKBN	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
Kegiatan 2: GEMARIKAN	1.1 Sosialisasi GEMARIKAN	Orang	200	-	-	-	-	PM	KKP	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
PROGRAM 3: Infant & Young Child Feeding (IYCF)											
Kegiatan 1: Pelatihan konseling IYCF untuk petugas kesehatan dan relawan kesehatan masyarakat (Community Health Volunteers / CHVs)	1.1 ibu hamil dan ibu / pengasuh dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat bimbingan/konseling gizi	ibu/pen gasuh/ Orang	-	-	70	200	250	Sama dengan 2.1.1 (a)	Multi funding dari dalam dan luar negeri (II= masih diusulkan)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah anggota masyarakat / relawan kesehatan masyarakat (CHV) yang dijangkau melalui sesi peningkatan kesadaran dan akses terhadap informasi perlindungan anak	Anggota masyarakat	-	-	-	200	250	Sama dengan 2.1.1 (a)			
Kegiatan 2: Pelatihan, kampanye, pengembangan bahan BCC, kompetisi praktik IYCF untuk orang tua dan pengasuh untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik	2.1 orang tua dan pengasuh yang telah meningkat pengetahuannya tentang pesan utama IYCF	Orang tua/pengasuh	-	-	-	50	75	Sama dengan 2.1.1 (a)			
	2.2 rumah tangga dengan anak balita mampu menyediakan makanan melalui Produksi makanan Homestead (Homestead Food Production)	Keluarga	-	-	-	10	20	Sama dengan 2.1.1 (a)			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pelatihan, pertemuan, dan pemantauan untuk pemimpin masyarakat, pemimpin adat, pemimpin agama untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah mengenai Kesehatan dan Nutrisi Kesehatan Ibu (MCHN)/Maternal Child and Health Nutrition)	3.1 proses pemantauan dan dialog / lobi yang dipimpin oleh masyarakat dan pertemuan mengenai isu-isu MCHN yang dilakukan oleh masyarakat, dipilah berdasarkan apakah pertemuan tersebut dilakukan dengan atau tanpa dukungan Wahana Visi Indonesia	Pertemu an	-	-	0	13	39	Sama dengan 2.1.1 (a)			
	3.2 rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau peningkatan layanan yang muncul dari rencana aksi masyarakat yang dipresentasikan kepada pemerintah daerah / pengambil keputusan mengenai perlindungan anak	Rekome ndasi	-	-	0	6	13	Sama dengan 2.1.1 (a)			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana untuk kesehatan dan gizi	4.1 desa yang memiliki rencana kesiapsiagaan bencana tentang masalah kesehatan dan gizi.	Dokume n	-	-	1	6	13	Sama dengan 2.1.1 (a)			
PROGRAM 4: Household practice proper healthy behavior											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pelatihan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terintegrasi Penyakit Anak Berbasis Masyarakat (C-IMCI) berbasis Komunitas untuk Relawan Kesehatan Masyarakat (CHVs) memiliki kapasitas untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit untuk melatih orang tua dan perawat	1.1 relawan kesehatan masyarakat / relawan kesehatan masyarakat / pengunjung rumah / pendidik sebaya yang telah menyelesaikan kursus pelatihan pengelolaan kasus masyarakat (community case management / CCM) berdasarkan jenis kelamin	Orang	-	-	-	200	250	Sama dengan 2.1.1 (a)	Multi funding dari dalam dan luar negeri (II= masih diusulkan)	7 propinsi 18 Kabupaten	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Kaji lapangan, pelatihan, perubahan perilaku komunikasi tentang pencegahan penyakit dan perilaku	2.1 Anak-anak dirujuk untuk perawatan khusus (untuk Diare, dugaan pneumonia dan demam)	Anak	-	-	50	60	75	Sama dengan 2.1.1 (a)			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
sehat untuk orang tua & pengasuh.	2.2 * Opsional, berdasarkan konteks (area endemik daerah dengan prevalensi tinggi) a. anak 0-23 bulan yang tidur menggunakan kelambu yang sudah diinsektisida/berobat b. anak 0 - 5 yo yang terdaftar di DOTS? TB c. wanita yang saat ini hamil yang ditawarkan dan menerima konseling dan tes untuk HIV dan menerima hasil tes mereka	Anak	-	-	50	70	80	Sama dengan 2.1.1 (a)		
Kegiatan 3: Kesadaran akan pentingnya pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak untuk orang tua & pengasuh	3.1 anak-anak U5 yang dipantau pertumbuhannya	%	-	-	30	50	60	Sama dengan 2.1.1 (a)		
	3.2 anak berusia 3 - 5 tahun (termasuk yang paling rentan) yang saat ini menghadiri pusat Perkembangan Perawatan Anak Usia Dini (ECCD Early	Anak	-	-	50	60	80	Sama dengan 2.1.1 (a)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
	Childhood Care Development)									
PROGRAM 5: Children from conception to 2 years old of age (the first 1000 days) exposed to quality program in MIYCN										
Kegiatan 1: Prenagen Pregnancy Education Center Obstetry	1.1 Memberikan edukasi kehamilan	orang	-	2991	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	27 kota di Indonesia Kalbe Nutritionals
PROGRAM 6: PENINGKATAN STATUS GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT										
Kegiatan 1 : Penyuluhan a. Gizi Balita b. Malnutrisi pada balita c. Pencegahan anemia pada ibu hamil d. Penyuluhan ASI Eksklusif e. Pencegahan anemia pada remaja perempuan f. Kesehatan pada Manula	1.1 jumlah keluarga yang tersuluh	keluarga	-	-	-	5000 00	5000 00	1.000	III- Belum tersedia sumber	7 Provinsi : DKI, Banten Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sumatera Utara, Papua Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi	2.1. jumlah anak penerima PMT	jiwa	-	-	-	1000 0	1000 0	1.000			
Kegiatan 3 : Pemberian TTD bagi ibu hamil dan remaja perempuan	3.1 jumlah ibu hamil dan remaja perempuan dan penerima TTD	jiwa	-	-	-	1000 0	1000 0	1.000			
Kegiatan 4: Pendampingan terhadap keluarga miskin dengan gizi buruk	4.1 jumlah keluarga yang didampingi	keluarga	-	-	-	1000 0	1000 0	1.000			
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.											
PROGRAM 1: PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
Kegiatan 1: Pelatihan Konselor ASI	1.1 Memberi pedoman kepada penyelenggara pelatihan konseling menyusui dan pelatihan fasilitator konseling menyusui agar mampu menyelenggarakan pelatihan sesuai standar	Kegiatan	-	2	2	2	2	400	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	MPKU PPM dan PP Aisyiyah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Health Campaign	1.1 . Jumlah kunjungan ANC ke Posyandu/Faskes	prosentase	-	80	85	90	95	300	Mitra - PELKESI-Gereja (I=Tersedia)	5 kabupaten (DeliSerdang, Katingan, Sumba Barat, Purworejo, Tanah Toraja), Kab Mimika	Seknas & Pelkesi Wilayah
	1.2. Prosentase alokasi biaya kesehatan tingkat desa	prosentase	-	5	10	10	10		Mitra - PELKESI-Gereja (I=Tersedia)	5 kabupaten (DeliSerdang, Katingan, Sumba Barat, Purworejo, Tanah Toraja)	Seknas & Pelkesi Wilayah
Kegiatan 2: Gender Responsive hospitals	2.1. Ada buku pedoman yang dapat menjadi referensi/acuan bagi Faskes	buku	-	-	-	-	1	500	Mitra - PELKESI-Gereja (I=Tersedia)	4 rumah sakit	Seknas & Pelkesi Wilayah I-V
	2.2. Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih	%	-	-	-	100	-		Mitra - PELKESI-Gereja (I=Tersedia)	4 rumah sakit	Seknas & Pelkesi Wilayah I-V

PROGRAM 2: Child Survival Advocacy

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengembangan modul materi ajar pendidikan D3 kebidanan tentang kesehatan reproduksi berbasis gender dan hak asasi manusia (HAM)	1.1. prosentase terbentuknya panduan bagi para pengajar program D3 kebidanan dalam menyampaikan materi ajar terkait dengan kesehatan reproduksi berbasis gender dan HAM yang telah diperbaharui	prosentase	10 modul	-	-	100	100	100	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional (11 propinsi)	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
	1.2. diseminasi panduan materi ajar kesehatan reproduksi berbasis gender dan HAM ke akademi bidan di Indonesia	provinsi	11 propinsi	-	-	11	34	20	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
Kegiatan 2: pelatihan bagi dosen Akademi Kebidanan tentang kesehatan reproduksi berbasis gender dan HAM	2.1 Jumlah Dosen Akademi Kebidanan yang telah dilatih cara menyampaikan materi ajar tentang kesehatan reproduksi berbasis gender dan HAM kepada mahasiswanya	Jiwa	206 dosen dari 45 akbid	-	-	50	50	450	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pemberian beasiswa jenjang pendidikan D3 Kebidanan	3.1. angka penerima bantuan untuk mendapatkan akses pendidikan jenjang D3 Kebidanan	Jiwa	227 peremp uan dari keluarga tidak mampu	-	-		30	2000-2500	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
Kegiatan 4: Pelatihan pendidik sebayu kesehatan reproduksi remaja oleh bidan muda	4.1 Jumlah bidan muda yang telah dilatih cara menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi berbasis gender dan HAM kepada remaja	Jiwa	250 bidan muda	-	-	46	46	100-150	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
Kegiatan 5: Pelatihan keterlibatan laki-laki dalam peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan oleh bidan	5.1 Jumlah bidan yang telah dilatih cara menyampaikan materi tentang meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan	Jiwa	250 bidan	-	-	46	46	100-150	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
Kegiatan 6: Pelatihan kepemimpinan bidan	6.1 Jumlah bidan yang memiliki pengetahuan dan	Jiwa	-	-	-	68	68	Rp200	(III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Pendidikan Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.1 Pemeriksaan Kehamilan	orang	-	-	-	1000 0	1000 0	500	Swadaya Iuran Aanggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Kegiatan 2: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	2.1 Penyuluhan Kesehatan	Lokasi (Kab/Ko ta)	-	-	-	100	100	200	Swadaya Iuran Aanggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
PROGRAM 7 : Pendampingan Kedaruratan Kelahiran dan Bayi Baru Lahir											
Kegiatan 1: Layanan Kedaruratan Kelahiran dan Bayi Baru Lahir	1.1 Jumlah kegiatan pelatihan Nakes untuk Kedaruratan Kelahiran dan Bayi Baru Lahir	kegiatan	-	-	-	1252 5	1252 5	25.050	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 8: Advokasi alokasi anggaran kesehatan											
Kegiatan 1:	1.1 Mendorong terbitnya peraturan nasional dan daerah untuk alokasi anggaran kesehatan bagi ibu hamil	Peratura n Nasional dan Daerah	-	-	-	5 % dari APB D	-	-	Fund Raising (II - Masih diusulkan)	Nasional dan Daerah (Aceh, Jogja, Riau, NTB)	PKBI berkerjasama dengan PKBI Daerah (25 Provinsi)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Melakukan penelitian terkait kebutuhan layanan kesehatan	Jumlah Peneliti n	-	-	-	2	-	-	Fund Raising (II - Masih diusulkan)	Nasional dan Daerah (Aceh, Jogja, Riau, NTB)	PKBI berkerjasama dengan PKBI Daerah (25 Provinsi)
INDIKATOR SDGs: 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
PROGRAM 1: Klinik Pratama RBG											
Kegiatan 1: Layanan Bersalin	1.1 Jumlah ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	0 (2016)	0	0	0	-	9,6*	Donasi Program (I= Tersedia)	8 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
INDIKATOR SDGs: 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.											
PROGRAM 1: Siaga Posyandu											
Kegiatan 1: Penyuluhan dan Pendampingan	1.1. Jumlah Orang tua balita yang mengikuti penyuluhan	Orang	15.661 (2016)	1566 1	1644 4	1722 7	-	6.484,765	Donasi Program (I= Tersedia)	147 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
	1.2. Jumlah Balita yang datang ke Posyandu	Orang	15.661 (2016)	1566 1	1644 4	1722 7	-				
Kegiatan 2: Pelatihan Kader	2.1 Jumlah kader yang mengikuti pelatihan	Orang	1.013 (2016)	1013	1064	1114	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Layanan Imunisasi	1.1 Jumlah anak yang menerima imunisasi di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	3506 (2016)	3506	3681	3857	-	9,637	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 2: Bakti Sosial Kesehatan											
Kegiatan 2: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.1 Imunisasi Bayi dan Balita	orang	-	-	-	5000	5000	300	Swadaya Iuran Anggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
PROGRAM 3: Pelayanan Kesehatan Dasar Muslimat NU											
Kegiatan1 : Sosialisasi dan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	1.1 Jumlah orang tua yang memiliki anak umur 0-23 bulan	jiwa	-	-	-	5000 00	5000 00	100.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Banten	Muslimat NU
Kegiatan 2 : Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Rumah Sakit, Klinik dan BKIA Muslimat NU	1.2 Jumlah anak umur 0-11 bulan yang telah diimunisasi dasar lengkap	jiwa	-	-	-	2500 0	2500 0	25.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Banten	Muslimat NU
	1.3 Jumlah anak umur 12-23 bulan yang telah	jiwa	-	-	-	2500 0	2500 0	25.000	III- Belum tersedia sumber		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	diimunisasi dasar lengkap										
INDIKATOR SDGs: 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.											
PROGRAM 1: Penanggulangan TB, HIV, Malaria , Diare											
Kegiatan 1: Penanggulangan TB - HIV	1.1 . Jumlah penjarangan suspek	persentase	-	-	60	70	-	1.000	Mitra - PELKESI (I= Tersedia)	Sulawesi Utara, Kab.Mimika (5 distrik)	Seknas & Pelkesi Wilayah V
	1.2. Jumlah pasien yang diobati	persentase	-	-	80	90	-		Mitra - PELKESI (I= Tersedia)		
Kegiatan 2: Penanggulangan HIV	2.1. Jumlah penjarangan suspek dan pengobatan ARV	persentase							Mitra - PELKESI (I= Tersedia)	5 Distrik di Kab Mimika	Seknas Pelkesi
Kegiatan 3: Penyuluhan Kesehatan di Masyarakat	3.1 Banyaknya penyuluhan ke masyarakat	kampung		28	20	20			Mitra - PELKESI (I= Tersedia)		
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
PROGRAM 1: Penanggulangan TB, HIV, Malaria , Diare											
	1.1 . Jumlah penjarangan suspek	persentase	-	-	60	70	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penanggulangan TB - HIV	1.2. Jumlah pasien yang diobati	persenta se	-	-	80	90	-	-	Mitra - PELKESI (I= Tersedia)	Sulawesi Utara, Kab.Mimika (5 distrik)	Seknas & Pelkesi Wilayah V
PROGRAM 2: COMMUNITY TB CARE - NFM											
Perlu diisi nama kegiatannya	Jumlah Terduga TB yang dirujuk oleh kader komunitas dan melakukan tes	orang	-	1375 02	9995 9	3069 54	-	-	Global Fund (III- Belum tersedia sumber)	23 provinsi (159 kota/kab)	Aisiyiah Wilayah, daerah, cabang dan ranting
Perlu diisi nama kegiatannya	Jumlah Pasien TB (semua tipe) yang dirujuk oleh kader komunitas	orang	-	2291 7	1870 7	5115 9	-	-	Global Fund (III- Belum tersedia sumber)	23 provinsi (159 kota/kab)	Aisiyiah Wilayah, daerah, cabang dan ranting
Perlu diisi nama kegiatannya	Persentase keberhasilan pengobatan dari kasus TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed - hasil rujukan dari komunitas	persenta se	-	90	86	90	-	-	Global Fund (III- Belum tersedia sumber)	23 provinsi (159 kota/kab)	Aisiyiah Wilayah, daerah, cabang dan ranting
Perlu diisi nama kegiatannya	Jumlah dan Persentase Pasien TB yang mengetahui hasil Tes HIV	orang	-	1337 1	2443	2809 7	-	-	Global Fund (III- Belum tersedia sumber)	23 provinsi (159 kota/kab)	Aisiyiah Wilayah, daerah,

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Ibu dan Balita Sehat											
Kegiatan 1: pembekalan pengetahuan mengenai cara memberantas sarang nyamuk kepada ibu	1.1 ibu mengalami peningkatan pengetahuan mengenai cara memberantas sarang nyamuk di rumah	Jumlah Ibu	-	-	1500 00	1500 00	1500 00	-	Internal Perusahaan (I= Tersedia)	Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kota Tangerang, Kota Gorontalo, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Ternate, Kota Manado	Yayasan Unilever Indonesia, PDGI, Tim Penggerak Pemberdayaa n dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dan Daerah, kader PKK dan posyandu
	1.2 ibu mengalami peningkatan sikap untuk memberantas sarang nyamuk di rumah										
	1.3 ibu mengalami peningkatan perilaku pemberantasan sarang nyamuk di rumah										
PROGRAM 2: Sekolah Sehat											
Kegiatan 1: pembekalan pengetahuan mengenai cara memberantas sarang nyamuk kepada anak di sekolah dasar	1.1 anak mengalami peningkatan pengetahuan mengenai cara memberantas sarang nyamuk	Jumlah anak	-	-	1586 898	1500 000	1500 000	-	Internal Perusahaan (I= Tersedia)	Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa tengah, NTT, Kalimantan Timur,	Yayasan Unilever Indonesia, Dinas Pendidikan dan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Event yang memberikan apresiasi kepada pria-pria di Indonesia bahwa hidup sehat dapat dicapai dengan nutrisi yang baik dan aktifitas olahraga yang digemari dan menyenangkan untuk dilakukan, salah satunya adalah olahraga basket. Selain itu, untuk menginspirasi para pria muda di Indonesia untuk rajin berolahraga dan hidup sehat.	1.1 Jumlah peserta yang terlibat	Orang	2016	1500	NA	TBD	TBD	-	Nutrifood (I= Tersedia)	Malang, Yogyakarta, Semarang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, Bandung, Jakarta	Nutrifood
PROGRAM 4: L-Men Awards 2017											
Kegiatan 1: Penghargaan kepada inspirator hidup sehat di Indonesia yang telah mampu menjadi inspirator dan memiliki dampak yang luas bagi penyebaran inspirasi hidup sehat di Indonesia, baik dari	1.1 Jumlah inspirator hidup sehat	Orang	2017	NA	36	TBD	TBD	-	Nutrifood (I= Tersedia)	Nasional	Nutrifood

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Gerakan masyarakat hidup sehat	1.1 Pelatihan Petugas Posbindu	Orang	60 (2016)	60	60	60	60	344	Kementerian Kesehatan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.2 Pemeriksaan IVA test	Orang	1000 (2016)	1000	2000	-	-	PM	BPJS Kesehatan dan DWP Pusat	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.3 Pemeriksaan IVA test pada tingkat kementerian	Orang	40000 (2017)	-	4000 0	-	-	PM	BPJS kesehatan dan Kementerian	Nasional	DWP IPP dan Lembaga
	1.4 Pemeriksaan Mamografi	Orang	300 (2016)	300	-	-	-	PM	Yayasan Kanker Indonesia	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.5 Sosialisasi kalahkan kanker	Kegiatan	2 (2016)	2	1	2	2	560	DWP Pusat dan PT Roche Indonesia	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.6 Media Kesehatan (buku dan flyer, banner, dll)	dokume n	6000 (2016)	6000	6000	6000	6000	260	Kementerian Kesehatan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.7 Sosialisasi Germas melalui media elektronik	kegiatan	3	4	5	5	5	PM	DWP Pusat	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.8 Pameran Kesehatan	kegiatan	1	1	1	1	1	200	Kementerian Kesehatan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat dan DWP IPP
	1.9 Sosialisasi dan Imunisasi Difteri	orang	1000 (2017)	-	1000	3000	-	PM	Kementerian Kesehatan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat dan DWP IPP
	1.10 Seminar Lansia Tangguh	kegiatan	1	1	-	2	2	PM	BKKBN, Kementerian Kesehatan dan Alumni FK UNPAD '68	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
PROGRAM 8 : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT											
Kegiatan 1 : Workshop Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.1 Jumlah kegiatan workshop GERMAS	kegiatan	-	-	-	10	10	3.000	II - Masih diusulkan (Promkes)	TBD	Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Mobilisasi massa GERMAS	1.2 Jumlah kegiatan mobilisasi massa GERMAS	kegiatan	2	-	-	10	10	4.000	II - Masih diusulkan (Promkes)	TBD	Muslimat NU
PROGRAM 9: Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Kegiatan 1: Deteksi Dini wujudkan wanita Indonesia bebas Kanker Servik dan Payudara	1.1 Menurunnya Jumlah anggota yang terindikasi Kanker Servik dan Kanker Payudara	%	-	35	50	-	-	-	Dinas (III- Belum tersedia sumber)	Dharma Pertiwi seluruh Indonesia	Data Anggota Dharma Pertiwi tahun 2017
PROGRAM 10:											
Kegiatan 1: Edukasi Kesehatan	1.1 Memberi Edukasi kesehatan & pelayanan kesehatan gratis	orang	-	-	4159	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	45 titik Nasional	Saka Farma
Kegiatan 2: Edukasi Kesehatan	2.1 Edukasi Kesehatan dengan materi: - Gizi seimbang - Melahirkan dengan aman - Pola Hidup Bersih dan Sehat	orang	-	-	19000	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia (Nasional)	Kalbe Farma
PROGRAM 11:											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Program #GenerAKSISEHATIndo nesia	1.1 Menggugah foto atau video berisi komitmen sehat atau kegiatan gaya hidup sehat di media sosial dimana jumlah dipostingn tersebut dikonversikan menjadi kaca mata bagi siswa-siswi di Indonesia	anak	-	1504 8	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	Sabang, Kep Natuna, Nunukan, Entikong, Jakarta, Rote Ndao, Kep. Talaud, Atambua, Merauke	Astra International
Kegiatan 2: Kampung Berseri Astra	2.1 Kampung Berseri Astra merupakan program Corporate Social Responsibility Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar CSR Astra yaitu Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan. - Pilar Kesehatan : pengentasan gizi buruk, PHBS dan peningkatan strata posyandu	Kampun g	-	49	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	17 Provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jayapura)	Astra International

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 12: Bakti Sosial Kesehatan											
Kegiatan 1: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.1 Pemeriksaan IVA Test pada perempuan di seluruh provinsi	orang			91000	10000	10000	600	Swadaya Iuran Anggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
INDIKATOR SDGs: 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.											
PROGRAM 1: Edukasi Bahaya Merokok											
Kegiatan 1: Penelitian Prevalensi Merokok di kalangan Remaja	1.1 YPKP dan PDK3MI melakukan survei prevalensi merokok di kalangan remaja	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	1.2 YPKP, POI dan PDGI melakukan uji klinis dan faktor penyebab merokok di kalangan remaja	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
Kegiatan 2: Workshop Bahaya Merokok dan MPOWER	2.1 YPKP dan PDK3GMI melakukan Workshop MPOWER di lingkungan Akademisi	Orang	-	50	50	50	50	70	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 YPKP dan PDK3MI melakukan Workshop Bahaya Merokok di Lingkungan Masyarakat	Orang	-	300	300	300	300	130	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
PROGRAM 2: Upaya Pengurangan Bahaya Tembakau & Berhenti Merokok											
Kegiatan 1: Peneltian Upaya Pengurangan Bahaya Tembakau	1.1 YPKP dan PDGI melakukan penelitian longitudinal dan uji klinis berdasarkan ilmu kedokteran gigi	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	1.2 YPKP dan POI melakukan penelitian longitudinal dan uji klinis berdasarkan ilmu penyakit dalam (Onkologi)	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
Kegiatan 2: Penyuluhan Berhenti Merokok	2.1 YPKP dan PDK3GMI melakukan Penyuluhan Berhenti Merokok di lingkungan akademisi	Orang	-	50	50	50	50	70	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 YPKP dan PDK3GMI melakukan Penyuluhan Berhenti Merokok di lingkungan masyarakat	Orang	-	300	300	300	300	130	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
PROGRAM 3: Advokasi Kebijakan Pengendalian Tembakau											
Kegiatan 1: Pelibatan Partisipasi Perempuan dalam Mendesak Akses FCTC	1.1 Jumlah pelaksanaan kampanye advokasi dampak tembakau terhadap perempuan dan anak-anak melalui konferensi pers, publikasi media sosial dan media cetak, radio dan televisi	Kegiatan	-	6	6	-	-	-	Jaringan TC (I= Tersedia)	JAKARTA	SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia) INDONESIA dan JP3T (Jaringan Perempuan Peduli

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Pertemuan audiensi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak Perlindungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya, Kantor Staf Presiden untuk sosialisasi pentingnya ratifikasi FCTC	Pertemuan	-	20	50	80	100	-			Pengendalian Tembakau)
Kegiatan 2: Workshop Seri Diskusi Suara Perempuan: Dampak Tembakau	2.1 Jumlah organisasi perempuan dan anak yang terlibat advokasi	Lembaga	-	20	50	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Workshop dampak dari merokok melalui Peer Educator	1.1 Advokasi tingkat nasional dan sub- nasional yang komprehensif tentang bahaya merokok	Peremp uan Muda	-	-	-	5000	1200 0	-	INGO (I= Tersedia)	Pemerintah Pusat, Provinsi & Kab/Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTB	Yayasan Plan Internasional Indonesia (Mitra sedang diidentifikasi)
PROGRAM 5: Advokasi Kebijakan Pengendalain Tembakau											
Kegiatan 1: Menyusun Advokasi Kebijakan Tentang Urgensi Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau/Rokok	1.1 Penyusunan Kompilasi data dan informasi tentang TAPS Ban	Data informas i	-	-	-	100	-	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/Angkata n MudaMuham madiyah(AMM)
	1.2 Penyusunan Policy Paper tentang Urgensi TAPS ban : Presiden, DPR, Kementerian- Lembaga Pemerintah	Naskah	-	-	-	100	-	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/Angkata n MudaMuham madiyah(AMM)
	1.3 Pertemuan Konsultasi dengan stakeholders	Pertemu an	-	-	50	80	100	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/Angkata n MudaMuham madiyah(AMM)
	1.4 Sosialisasi Bupati /walikota tentang TAPS ban	Pertemu an	-	-	-	30	70	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional	IISD/Angkata n MudaMuham

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Meningkatkan pembangunan kesehatan	1.1 Sosialisasi P4GN Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	kegiatan	1	1	-	-	-	PM	BNN	Nasional	DWP Pusat
PROGRAM 2: LASKAR ANTI NARKOBA											
Kegiatan 1: Laskar Anti Narkoba	1.1 Jumlah Da'iyah/Penyuluh	jiwa	2000	-	-	5000	5000	50.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs:		3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
PROGRAM 1: Klinik Pratama RBG											
Kegiatan 1: Layanan KB	1.1 Jumlah orang yang menggunakan KB di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	4943 (orang)	4943	5190	5437		9,637	Donasi Program (I= Tersedia)	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 2: Assessment Pengetahuan dan Cakupan Program Layanan Kesehatan Reproduksi di 9 Propinsi											
Kegiatan 1: Penelitian di 9 Provinsi	1.1 jml copy dokumen	copies (soft file)	-	-	-	-	-	Yayasan WRI (budget indikatof dan		Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku	Yayasan WRI (budget indikatof dan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Seminar untuk Memaparkan Hasil Assessment di Jakarta	2.1 jml partisipan pelatihan	orang	-	-	-	-	-	target Lihat pada Goals 5 indikator 5.6.1 dan 5.6.1(b)	Palladium & USAID (I= Tersedia)	Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat & DKI Jakarta	target Lihat pada Goals 5 indikator 5.6.1 dan 5.6.1(b)
PROGRAM 3: Pembentukan & Pendampingan Kelompok Remaja untuk memperkuat Pengetahuan dan Akses Program Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kabupaten Gunung Kidul, Bandung & DKI Jakarta											
Kegiatan 1: Pembentukan & Pendampingan Kelompok Remaja dua desa di Kab. Gunung Kidul, dua desa Kabupaten Bandung, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Timur	1.1 jumlah anggota kelompok	orang	-	-	-	-	-	yasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5 indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b))	FORD Foundation (I=Tersedia)	Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Timur	Yayasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5 indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b))
Kegiatan 2: Representasi kelompok remaja dalam Musrembang kab. Gunung Kidul	2.1 jmlh anggota yang merepresentasikan kelompok dalam Musrembang	orang	-	-	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Advokasi Peningkatan Anggaran oleh Representasi Kelompok Remaja di Kab. Gunung Kidul untuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Kab. Gunung Kidul	3.1 jml copy dokumen dan vidio yang dilihat oleh publik melalui youtubedan website WRI	soft copies & hit di You tube serta website WRI	-	-	-	-	-				
Kegiatan 4: Video tentang Perkawinan Di bawah Umur, Akses & Pengetahuan Kesehatan Reproduksi di Gunung Kidul	4.1 jml copy dokumen dan vidio yang dilihat oleh publik melalui youtubedan website WRI	soft copies & hit di You tube serta website WRI	-	-	-	-	-				
PROGRAM 4: Penelitian tentang Pengetahuan dan Akses Program Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kabupaten Gunung Kidul, Bandung & DKI Jakarta											
Kegiatan 1: Penelitian di 3 akabupaten	1.1 tersedianya laporan penelitian yang diolah menjadi bahan panduan bagi Remaja	Copy dokume n	-	-	-	-	-	yasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5	FORD Foundation (I=Tersedia)	Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kotamadya	Yayasan WRI (budget indikatof dan target Lihat pada Goals 5

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Seminar untuk Memaparkan Hasil Penelitian di Jakarta & Peluncuran Panduan bagi Remaja	2.1 jml partisipan	orang	-	-	-	-	-	indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b)		Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Timur	indikator 5.1.1, 5.6.1 dan 5.6.1(b)
PROGRAM 5: Better Life Options and Opportunities Model (BLOOM)											
Kegiatan 1: Pelatihan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja yang melibatkan pria, wanita, anak lelaki dan perempuan	1.1 Advokasi tingkat nasional dan sub- nasional yang komprehensif tentang hak hak kespro	-	-	-	-	-	-	-	INGO (I=Tersedia)	Pemerintah Pusat, Lembata, Sikka Nagekeo (NTT)	Yayasan Plan Internasional Indonesia (Mitra: CIS Timor)
PROGRAM 6: Peningkatan Kualitas reproduksi perempuan											
Kegiatan 1: Pelatihan pendampingan Kespro untuk menciptakan kantong-kantong pendamping komunitas dalam memberikan pendidikan kespro dan advokasi hak-hak kespro	1. 1 Prosentase provinsi yang telah melakukan pelatihan pendampingan kespro	%	-	25	50	75	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1. 2. komunitas nasyiah pendamping Kespro yang memberikan pendidikan dan advokasi hak hak	komunit as	-	40	60	80	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	kespro bagi masyarakat										
Kegiatan 2: Seminar kesehatan reproduksi	2.1 jumlah provinsi yang melaksanakan seminar kesehatan reproduksi	provinsi	-	15	20	28	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
PROGRAM 7: Family Learning Center (FLC) sebagai pusat belajar keluarga yang bebas dari KDRT											
Kegiatan 1: penyusunan panduan pembentukan FLC	1.1 prosentase terbentuknya panduan komprehensif mengenai tata cara relasi berkeluarga yang sakinah, ma wadhah warahmah	%	-	50	75	100	100	20	- (II= masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
	1.2. deseminasi panduan FLC terkait pola relasi keluarga yang sehat, bebas tekanan dan sadar gender di setiap provinsi	provinsi	-	0	0	15	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	Nasyiatul Aisyiyah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 8: Mengatasi persoalan remaja dengan posyandu remaja PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik NA)											
Kegiatan 1: Membuat konsep dan materi pelatihan motivator, kader, tenaga konselor dan medis PASHMINA	1.1 Prosentase penyusuna buku panduan PASHMINA	%	-	100	100	100	100	20	- (II= masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
	1.2. setiap provinsi memiliki tim motivator berkualitas sesuai dengan konsep PASHMINA	provinsi	-	5	25	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1.3 setiap provinsi memiliki Tim Penggerak PASHMINA	provinsi	-	5	20	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	Nasyiatul Aisyiyah
Kegiatan 2: Layanan PASHMINA	2.1 Setiap provinsi dapat memiliki layanan PASHMINA yang dapat bermanfaat bagi Remaja dan berkelanjutan	provinsi	-	5	20	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak	1.3 Pelayanan KB	orang	-	-	-	5,000	5,000	Rp. 1.250	Swadaya Iuran Anggota IBI (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
PROGRAM 11 : AYO BER-KB MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Layanan KB Muslimat NU	1.1 Jumlah akseptor KB	jiwa	-	-	-	500000	500000	1.000	III- Belum tersedia sumber	5 provinsi : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan											
PROGRAM 1: Rumah Sehat BAZNAS (RSB)											
Kegiatan 1: Pemberian Layanan Kesehatan bagi Para Mustahik	1.1 Layanan Dalam Gedung	Jiwa	-	90701	isi target	isi target	isi target	12.667 (tahun 2016)	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) (I= Tersedia)	Nasional	Baznas Pusat
	1.2 Layanan Luar Gedung yang didatangi Tim RSB	Jiwa	-	120296	isi target	isi target	isi target				
PROGRAM 2: Bakti Sosial Kesehatan											
Kegiatan 1: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Skala Besar	1.1 Pengobatan/Tindakan Operasi Penyakit Bibir Sumbing	Orang		31	76	80	84	1.218	Yayasan Buddha Tzu Chi	Nasional	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (Tzu Chi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Pengobatan/Tindakan Operasi Penyakit Minor	Orang		194	142	149	156		Indonesia (I= Tersedia)		International Medical Association Indonesia)
	1.3 Pengobatan/Tindakan Operasi Penyakit Katarak	Orang		1113	849	890	936				
	1.4 Pengobatan Penyakit /Tindakan Operasi Pterygium	Orang		270	250	262	275				
	1.5 Pengobatan Penyakit/Tindakan Operasi Hernia	Orang		134	56	59	62				
Kegiatan 2: Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Umum dan Gigi	2.1 Pemeriksaan Kesehatan Umum	Orang		13887	11398	11968	12566				
	2.2 Pemeriksaan Kesehatan Gigi	Orang		1350	1588	1667	1750				
Kegiatan 3 : Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Penyakit Degeneratif	3.1 Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Degeneratif	Orang		17486	18360	19278	20242				
	3.2 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Degeneratif		-	-	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 3: Klinik Apung Said Tuhuleley											
Kegiatan 1: pengadaan Kapal untuk digunakan sebagai klinik apung	1. 1 Jumlah pengadaan kapal	unit	-	1	1	1	1	6.000	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, SAMUDERA INDONESIA
Kegiatan 2: melaksanakan bakti sosial di daerah 3T	2.1 jumlah penduduk yang dibantu	orang	-	500	500	500	500	450	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, SAMUDERA INDONESIA, MPKU, LPB, PTM, DINKES PROVINSI
Kegiatan 3: melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di daerah 3T	3.1 jumlah penduduk yang dibantu	orang	-	500	500	500	500	300	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, SAMUDERA INDONESIA, MPKU, LPB, PTM, DINKES PROVINSI
PROGRAM 4: Indonesia Mobile Clinic											
Kegiatan 1: pengadaan mobil Ambulan	1. 1 Jumlah pengadaan mobil ambulance	mobil	-	5	5	5	5	3750	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPKU
Kegiatan 2: melakukan promosi kesehatan di daerah- daerah padat penduduk	2.1 jumlah penduduk yang dibantu	orang	-	-	1200 0	1200 0	1200 0	1260	donasi masyarakat (I=Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPKU, AISYIYAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Revitalisasi fisik dan bangunan dan pengadaan perlengkapan posyandu	1.1 Jumlah posyandu yang direvitalisasi	Posyandu	2013	206	206	206	206	-	(III- Belum tersedia sumber)	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan	Indofood PDRC FKM Universitas Indonesia
PROGRAM 9: Pembangunan Rumah Sakit Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng											
Kegiatan 1: Rumah Singgah Alfamart - Alfamidi	1.1 Pendirian rumah singgah dan seminar kanker		-	-	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Midi Utama Indonesia (Alfamidi)
Kegiatan 2: Bright Eyes, Bright Future	2.1 Pembagian 30.000 kacamata minus dan 120.000 pemeriksaan mata gratis	anak	-	-	-	-	-	-	Hasil donasi yang terkumpul diserahkan kepada Yayasa Berani Bhakti Bangsa (III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Midi Utama Indonesia (Alfamidi)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Berbagi Bersama Masyarakat	3.1 5.000 alat bantu bagi penyandang cacat disabilitas prasejahtera hasil rekomendasi masyarakat, serta pembangunan fasilitas umum di pelosok daerah.		-	-	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Midi Utama Indonesia (Alfamidi)
Kegiatan 4: “Alfamart Alfamidi Care”.	4.1 Memberikan kendaraan ambulans serta bantuan sosial lainnya yang akan dialokasikan ke PMI daerah		-	-	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Midi Utama Indonesia (Alfamidi)
Kegiatan 5: Pelayanan kesehatan masyarakat - Mobil Kesehatan Astra (Mokesa)	5.1 layanan kesehatan bebas biaya seperti pemeriksaan dasar, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan gigi bagi siswa PAUD	pasien	-	-	83,8 49	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	32 Provinsi di Indonesia	Astra International
Kegiatan 6: Posyandu Binaan	6.1 Melakukan pembinaan melalui pemberian pelatihan kepada kader, bantuan alat posyandu, penyuluhan	Posyand u	-	-	904	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	28 Provinsi di Indonesia	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	kesehatan, perbaikan gizi dll										
PROGRAM 10: Pelayanan Kesehatan Dasar Muslimat NU											
Kegiatan 1: Pendirian Klinik Pratama	1.1 Jumlah Klinik Pratama yang memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan universal	unit	-	-	-	25	25	55.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1: Melakukan pemantaun terhadap program pemerintah dalam upaya penurunan AKI (seperti: Antenatal care)	1.1. Survey program pemerintah terkait antenatal care	kegiatan	-	-	-	-	-	-	Swadaya (III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
	1.2 Sosialisasi hasil survey ke pemerintah untuk dijadikan masukan perbaikan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	Swadaya (III- Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Sosialisasi ke masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan program pemerintah selanjutnya	kegiatan	-	-	-	-	-	-	swadaya (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP
PROGRAM 2: Mengukur kualitas layanan Kespro dalam skema JKN											
Kegiatan 1: Pengumpulan Data: YKP bersama 15 CSO di daerah dengan latar belakang Gender, Perempuan dan Kespro membentuk suatu jaringan yg disebut Jaringan perempuan Peduli Kesehatan (JP2K)	1.1 Survey Kualitas Layanan Kespro dalam Skema JKN di 15 Kota oleh JP2K	kegiatan	-	1	-	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah (Aceh, Medan, Padang, Jambi, Lampung, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali, Lombok, Makasar, Manado dan Ambon)	YKP & Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K)
	1.2. FGD (pendalaman data kualitatif)	kegiatan	-	-	15	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah	YKP & JP2K
	1.3. Sosialisasi hasil penelitian kepada stakeholder terkait dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah	kegiatan	-	-	15	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah	YKP & JP2K

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Advokasi kualitas layanan Kepsro dalam skema JKN: Melakukan upaya advokasi pada layanan Kespro yang berkualitas (preventif & kuratif)	2.1. Membuat materi advokasi	kegiatan	-	-	3	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP & JP2K
	2.2. Memberikan masukan perbaikan layanan JKN kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS	kegiatan	-	-	2	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP & JP2K
	2.3. Memberikan masukan perbaikan layanan JKN kepada Dinas Kesehatan dan Dinas BPJS Daerah	kegiatan	-	-	15	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah	YKP & JP2K
Kegiatan 3: Penguatan Kapasitas Jaringan: Memfasilitasi forum diskusi jaringan sebagai upaya penguatan kapasitas terkait isu-isu seputar perempuan dan Kespro	3.1.Lokal Forum (3 bulan sekali)	kegiatan	-	-	2	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP & JP2K
	3.2. Nasional Forum (6 bulan sekali)	kegiatan	-	-	1	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	YKP & JP2K

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3. Jumlah kegiatan-kegiatan di komunitas dalam rangka pemenuhan layanan Kespro yang berkualitas yang ditanggung BPJS	kegiatan	-	-	15	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah	YKP & JP2K
Kegiatan 4: Posko Pengaduan: Sebagai wadah menerima pengaduan masyarakat terkait layanan JKN dan monitorig layanan JKN di daerah	4.1 Membangun mekanisme pengaduan di 15 kota/kabupaten	kegiatan	-	-	15	-	-	-	MAMPU (III-Belum tersedia sumber)	15 daerah	JP2K
PROGRAM 3 : LAYANAN BPJS MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1: Layanan BPJS Muslimat NU	1. 1 Jumlah kegiatan	kegiatan	-	-	-	2500 000	2500 000	55.000	II-Masih diusulkan (BPJS)	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 3.9.1 Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien. (INDIKATOR YANG DIKEMBANGKAN)											
Program 1: Sampling, Analisis Dan Monitoring Kualitas Udara Ambient, Indoor Air Quality, Kebisingan Dan Emisi Serta Kajiannya											
Kegiatan 1: sampling udara yang di sekitar kawasan industri untuk	1.1 COA (certificate of analysis)	Sertifikasi	2016	2217	2351	3000	3500	160.000	Biaya Operasional (II= masih diusulkan)	Seluruh Indonesia	PT SUCOFINDO (Persero)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
mengetahui kualitas udara											
INDIKATOR SDGs: 3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis. (INDIKATOR YANG DIKEMBANGKAN)											
Program 1: Sampling, Analisis Dan Monitoring Kualitas Air Permukaan, Konsumsi, Limbah Dan Air Laut											
Kegiatan 1: sampling air pada badan air untuk mengetahui kualitas air	1.1 COA (certificate of analysis)	Sertifikat	2016	3702	3886	4000	4200	240.000	Biaya Operasional (II= masih diusulkan)	Seluruh Indonesia	PT SUCOFINDO (Persero)
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
PROGRAM 1: Edukasi Bahaya Merokok											
Kegiatan 1: Penelitian Prevalensi Merokok di kalangan Remaja	1.1 YPKP dan PDK3MI melakukan survei prevalensi merokok di kalangan remaja	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	1.2 YPKP, POI dan PDGI melakukan uji klinis dan faktor penyebab merokok di kalangan remaja	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Workshop Bahaya Merokok dan MPOWER	2.1 YPKP dan PDK3GMI melakukan Workshop MPOWER di lingkungan Akademisi	Orang	-	50	50	50	50	70	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	2.2 YPKP dan PDK3MI melakukan Workshop Bahaya Merokok di Lingkungan Masyarakat	Orang	-	300	300	300	300	130	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
PROGRAM 2: Upaya Pengurangan Bahaya Tembakau & Berhenti Merokok											
Kegiatan 1: Peneltian Upaya Pengurangan Bahaya Tembakau	1.1 YPKP dan PDGI melakukan penelitian longitudinal dan uji klinis berdasarkan ilmu kedokteran gigi	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	1.2 YPKP dan POI melakukan penelitian longitudinal dan uji klinis berdasarkan ilmu penyakit dalam (Onkologi)	Orang	-	25	25	25	25	200	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penyuluhan Berhenti Merokok	2.1 YPKP dan PDK3GMI melakukan Penyuluhan Berhenti Merokok di lingkungan akademisi	Orang	-	50	50	50	50	70	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
	2.2 YPKP dan PDK3GMI melakukan Penyuluhan Berhenti Merokok di lingkungan masyarakat	Orang	-	300	300	300	300	130	Crowdfundin g & Bantuan Dana (I= Tersedia)	Jawa & Sumatra	Koalisi YPKP
PROGRAM 3: Advokasi Kebijakan Pengendalian Tembakau											
Kegiatan 1: Pelibatan Partisipasi Perempuan dalam Mendesak Akses FCTC	1.1. Jumlah pelaksanaan kampanye advokasi dampak tembakau terhadap perempuan dan anak-anak melalui konferensi pers, publikasi media sosial dan media cetak, radio dan televisi	Kegiatan	-	6	6	-	-	-	Jaringan TC (I= Tersedia)	JAKARTA	SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia) INDONESIA dan JP3T (Jaringan Perempuan Peduli

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2. Pertemuan audiensi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak Perlindungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya, Kantor Staf Presiden untuk sosialisasi pentingnya ratifikasi FCTC	Pertemuan	-	20	50	80	100	-			Pengendalian Tembakau)
Kegiatan 2: Workshop Seri Diskusi Suara Perempuan: Dampak Tembakau	2.1 Jumlah organisasi perempuan dan anak yang terlibat advokasi	Lembaga	-	20	50	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Workshop dampak dari merokok melalui Peer Educator	1.1 Advokasi tingkat nasional dan sub-nasional yang komprehensif tentang bahaya merokok	Perempuan Muda	-	-	-	5000	12000	-	INGO (I= Tersedia)	Pemerintah Pusat, Provinsi & Kab/Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTB (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan Internasional Indonesia (Mitra sedang diidentifikasi)
PROGRAM 5: Advokasi Kebijakan Pengendalian Tembakau											
Kegiatan 1: Menyusun Advokasi Kebijakan Tentang Urgensi Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau/Rokok	1.1 Penyusunan Kompilasi data dan informasi tentang TAPS Ban	Data informasi	-	-	-	100	-	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/ Angkatan MudaMuhammadiyah(AMM)
	1.2 Penyusunan Policy Paper tentang Urgensi TAPS ban : Presiden, DPR, Kementerian- Lembaga Pemerintah	Naskah	-	-	-	100	-	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/ Angkatan MudaMuhammadiyah(AMM)
	1.3 Pertemuan Konsultasi dengan stakeholders	Pertemuan	-	-	50	80	100	-	Jaringan TC (III- Belum tersedia sumber)	Nasional/Pusat	IISD/ Angkatan MudaMuhammadiyah(AMM)
	1.4 Sosialisasi Bupati / walikota tentang TAPS ban	Pertemuan	-	-	-	30	70	-	Jaringan TC (III- Belum	Nasional	IISD/ Angkatan MudaMuham

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Partners for Resilience - Strategic Partnership											
Kegiatan 1: Pengusulan hasil pembelajaran penyusunan rencana PB untuk perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB	1.1. Indikator kegiatan: Policy brief untuk usulan perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Yayasan KARINA (III-Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan KARINA
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS											
INDIKATOR SDGs:		4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.									
PROGRAM 1 : National/ district education support for children's learning improvement											
Kegiatan 1: Pembentukan koalisi pendidikan daerah dalam mendukung peningkatan pembelajaran	1.1.1 Indikator Kegiatan : # mitra, koalisi, champion atau pemberi pengaruh utama yang bekerja dengan Kelompok Kerja CVA-(Citizen Voice and Action) untuk secara kolektif mempengaruhi tingkat lokal dan tingkat tinggi	Mitra	-	-	-	-	-	2.500	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I= Tersedia)	Kalimantan Barat (Kab. Landak, Kab. Sambas), NTT (Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo), Sumatera Utara (Nias), Papua (Sentani, Jayawijaya), Papua	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	pemerintahan terhadap pendidikan									Barat (Biak Numfor)	
Kegiatan 2 : Pelatihan, pertemuan, lokakarya dengan dinas pendidikan kabupaten untuk meningkatkan dukungan terhadap manajemen sekolah yang berkualitas	2.1 Proporsi Kepala Sekolah yang mengembangkan SIP (School Improvement Plan-Rencana Perbaikan Sekolah)	Kepala Sekolah	-	-	-	-	-	3.250	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I= Tersedia)		
	2.2 Number or % of schools receiving supervision by local education authority										
Kegiatan 3: Pelatihan, lokakarya, pertemuan dengan pemerintah untuk mendukung implementasi dan replikasi pendidikan karakter	3.1 Jumlah sekolah menerapkan/implementasi pendidikan karakter	Sekolah	-	-	-	-	-	1.500	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I= Tersedia)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pemberian beasiswa untuk anak sekolah dasar	1.1 Jumlah anak penerima beasiswa sekolah dasar	anak	-	100	0	0	0	100	JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional	JAPFA Foundation
PROGRAM 3: Bantuan Keuangan dan Beasiswa											
Kegiatan 1: Pemberian beasiswa untuk tingkat SMK jurusan agrikultur dan agroteknologi	1.1 Jumlah siswa penerima beasiswa SMK Agribisnis dan Agroteknologi	Siswa	-	0	48	50	50	1200-1400	JAPFA Group (I= Tersedia)	Nasional (14 kab/kota (9 Prov)	JAPFA Foundation
PROGRAM 4: Beasiswa											
Kegiatan 1: Beasiswa Anak Juara	1.1 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	-	8396	8816	9236	-	22.587,7	Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 2: Beasiswa Anak Juara	2.1 Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	-	5123	5379	5635	-		Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 3: Beasiswa Anak Juara	3.1 Jumlah anak usia 16-18 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	-	3613	3794	3974	-		Donasi Program (I= Tersedia)	293 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Beasiswa Sekolah Juara	4.1 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Juara Rumah Zakat	Orang	-	1605	1685	1766	-	13.206	Donasi Program (I= Tersedia)	15 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Kegiatan 5: Beasiswa Sekolah Juara	5.1 Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP Juara Rumah Zakat	Orang	-	295	310	325	-		Donasi Program (I= Tersedia)	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
PROGRAM 5: Beasiswa Mentari (Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA))											
Kegiatan 1: Memberikan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat miskin	1. 1 Jumlah siswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang		1000	1000	1000	1000	4.000	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS DIKDASMEN
PROGRAM 6: Save Our School											
Kegiatan 1: Membantu pembangunan infrastruktur sekolah	1. 1 Jumlah sekolah yang dibantu	unit		10	10	10	10	4.000	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS DIKDASMEN
PROGRAM 7: Santri Tahfizd											
Kegiatan 1: membantu biaya	1. 1 Jumlah siswa yang dibantu biaya pendidikannya	orang		50	250	250	250	550	donasi masyarakat (I= Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Beasiswa supersemar	1.1. Jumlah anggota, dan keluarga DWP serta masyarakat yang mendapat manfaat dari beasiswa	orang	250	-	-	-	-	590	Yayasan Supersemar	Nasional	DWP Pusat
Kegiatan 2: Santunan Pendidikan	2.1. Jumlah anggota, dan keluarga DWP yang mendapat santunan pendidikan	orang	21	21	27	27	27	11.6	DWP Pusat	Nasional	DWP Pusat
Kegiatan 3: Wajib belajar	3.1. Monitoring dan evaluasi	Orang	158 (2016)	158	-	-	-	PM	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	DWP Pusat
Kegiatan 4: Lomba karya tulis siswa (LKTS) --> Lomba Menulis Essai	4.1 Keikutsertaan siswa SMP Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	228 (2017)	-	228	500	500	PM	DWP Pusat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	DWP Pusat
Kegiatan 5: Pendidikan Keterampilan bagi SMP binaan DWP	1.1. Jumlah anggota, dan keluarga DWP serta masyarakat yang mendapat manfaat dari program pendidikan,	unit sekolah	10 (2016)	10	-	-	-	300	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	DWP Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Kampung Berseri Astra	1.1 Kampung Berseri Astra merupakan program Corporate Social Responsibility Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar CSR Astra yaitu Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan. - Pilar Pendidikan : Fokus pada pengentasan buta huruf dan peningkatan angka partisipasi sekolah	Kampung	-	49	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	17 Provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jayapura)	Astra International
INDIKATOR SDGs: 4.2.2. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
PROGRAM 1: PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini- Holistik Integratif)											
Kegiatan 1: Pelaksanaan PAUD HI	1.1 organisasi berbasis masyarakat yang melaksanakan PAUD HI secara efektif	Jumlah	-	-	-	361	249	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Desa yang memiliki PAUD HI	Jumlah	-	-	-	396	249	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
	1.3 Kebijakan ditingkat nasional dan ditingkat lokal yang mendukung pelaksanaan PAUD HI.	Jumlah kebijakan	-	-	-	4	4	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
	1.4 Alokasi Anggaran ditingkat nasional dan ditingkat lokal yang mendukung pelaksanaan PAUD HI	Jumlah lembaga pemerintah	-	-	-	4	4	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
PROGRAM 2: Pendidikan Non Formal dan Informal											
Kegiatan 1: PAUD	1.1 Sosialisasi peningkatan PAUD berkualitas melalui radio	kegiatan	1	-	-	-	-	PM	-	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.2 Sosialisasi dan pelatihan peningkatan PAUD berkualitas	Orang	134 (2016)	134	110	100	100	310	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Pelatihan program parenting	Orang	500	185	210	185	185	400	Swadaya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat bekerja sama dengan OASE dan Kemendikbud
	1.4 Rekapitulasi jumlah PAUD yang dikelola oleh unsur pelaksana	Unit	32	52	52	52	67	PM	DWP Pusat	nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
PROGRAM 3: PAUD BERKUALITAS MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1: Layanan PAUD Muslimat NU	1.1 Jumlah PAUD Muslimat NU	unit	17200	-	-	8000	8000	468.000	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 Provinsi	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 4.3.1 (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
PROGRAM 1: National Champions Scholarship (Beasiswa Unggulan Nasional Tanoto Foundation)											
Kegiatan 1: Penyediaan Beasiswa bagi mahasiswa/I pilihan di 12 Perguruan Tinggi pilihan	1.1 Jumlah penerima beasiswa	Orang	-	270	271	275	150	95.000	Tanoto Foundation (I= Tersedia)	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan	Tanoto Foundation

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah Perguruan Tinggi Mitra	Perguruan Tinggi	-	12	12	12	9	5.000	Tanoto Foundation (I= Tersedia)	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan	Tanoto Foundation
PROGRAM 2: Mengembangkan sistem dan strategi implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang holistik integralistik (menyeluruh dan terpadu), dan berta-takelola baik menuju Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan islam berkemajuan.											
Kegiatan 1: Menyusun Filsafat Pendidikan Muhammadiyah sebagai tindak lanjut keputusan Muktamar Muhammadiyah 2010 dan penyempunaan Putusan Muktamar 2015 Tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah	1.1 Buku Filsafat Pendidikan Muhammadiyah	Dokumen	-	1	1	1	1	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Dikti dan PTM
Kegiatan 2: Penyusunan road map dan clustering PTM sampai tahun 2025	2.1 Data base perguruan Tinggi Muhammadiyah	Dokumen	-	1	1	1	1	1000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diklitbangi dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pelatihan penyusunan road map PTM dilanjutkan dengan pendampingan dalam penyusunan renstra PTM	3.1 Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah	Dokume n	-		40	80	120	1500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PP M , PTM dan Majelis Dikti Litbang
Kegiatan 4: Lokakarya tentang model pengembangan kampus Islami di PTM	4.1 jumlah orang	Orang	-		75	150	225	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Dikti Litbang dan PTM,
Kegiatan 5: Menyusun panduan pengembangan kampus Islam untuk PTM	5.1 Naskah Pedoman Kampus Islami	Dokume n	-		1	1	1	750	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis DIKTILITBAN G, dan PTM
Kegiatan 6: Lokakarya tentang penembangan kurikulum integratif untuk PTM	6.1 Buku Kurikulum	Dokume n	-		1	1	1	500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang dan PTM
Kegiatan 7: Menyusun pedoman penyusunan kurikulum integratif PTM	7.1 BukuPedoman Penyusunan Kurikulum	Dokume n	-	1	1	1	1	500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 8: Penyusunan standar remunerasi pimpinan, dosen dan karyawan PTM berdasar RAPB, jumlah mahasiswa dan jumlah pegawai	8.1 Buku Pedoman Remunerasi	Dokumen	-			1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang
Kegiatan 9: Menyusun pedoman protokoler PTM (wisuda, pelantikan, angkat janji milad, dll) sesuai perkembangan regulasi PT	9.1 Buku Pedoman Protoler PTM	Dokumen	-		1	1	1	150	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang
PROGRAM 3:Mengembangkan sistem manajemen dan kepemimpinan yang dinamis, produktif dan berdaya saing dalam meningkatkan kualitas Catur Dharma (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Al Islam-Kemuhammadiyah (AIK) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah											
Kegiatan 1: Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum AIK yang lebih aplikatif dan efektif	1.1 Naskah Kurikulum AIK	Dokumen	-	-	1	1	1	500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Dikti dan PTM
Kegiatan 2: Penerbitan buku referensi (buku induk) AIK	2.1 Buku AIK	Buku	-	-	1	2	4	1	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Menyusun Standar Darma Al-Islam Kemuhammadiyah PTM	3.1 Buku Standar AIK PTM	Dokume n	-	-		1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasionanl	Majelis Diktilitbang
Kegiatan 4: Pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan PTM	4.1 Jumlah Peserta Pelatihan	Pimpina n PTM	-	-	40	80	120	1.250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang
Kegiatan 5: Penerbitan buku tentang Muhammadiyah dalam Bhs Arab dan Inggris	5.1 Jumlah Buku	Dokume n	-	-	5	10	15	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang
Kegiatan 6: Penyusunan pedoman pengelolaan asrama	6.1 Buku Pedoman Pengelolaan Asrama	Dokume n	-	-	1	1	1	500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelisdiktilit bang
Kegiatan 7: Pelatihan pengelolaan asrama sebagai ujung tombak kaderisasi melalui PTM	7.1 Jumlah Pimpinan ASRAMA	orang	-	50	100	250	300	1.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelisdiktilit bang
Kegiatan 8: Pelatihan (TOT)	8.1 Jumlah Musrif (orang)	orang	-	-	100	200	300	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelisdiktilit

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
pelatih/musyrif asrama PTM											bang dan Asosiasi
Kegiatan 9: Pembinaan pengembangan usaha PTM berdasar prinsip social entrepreneurship	9.1 Jumlah PTM	Lembaga	-	-		25	50	750	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan majelis Diktilitbang
Kegiatan 10: Workshop pengembangan usaha (level kebijakan dan level pelaksana)	10.1 Jumlah Pimpinan PTM	orang	-	-		40	80	1.200	Muhammadiyah (I= Tersedia)	nasional	PTM dan Majeisdiktitbang
Kegiatan 11: Penyusunan ketentuan unit usaha di lingkungan PTM	11.1 Buku Peraturan	Dokumen	-	-		1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelisdiktilitbang
Kegiatan 12: Inisiasi terbentuknya Sekolah Kepemimpinan Muhammadiyah (SKM)	12.1 Jumlah Pimpinan PTM	orang	-	-	40	80	120	1.200	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelis
Kegiatan 13: Meningkatkan kajian	13.1 JumlahPenenliti	orang	-	-	100	100	100	3.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelis

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
dan penelitian berbasis Muhammadiyah											
Kegiatan 14: Meningkatkan kualitas penelitian melalui hibah bersaing antar dosen PTM	14.1 Jumlah Dosen	orang	-	-	50	100	150	3.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelis
Kegiatan 15: Pengembangan database PTM dan penerbitan buku direktori PTM	15.1 Jumlah Data Base dan Buku	Dokumen	-	-	1	1	1	500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelis
Kegiatan 16: Membentuk centre of excellence dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di PTM unggulan.	16.1 Jumlah Pusat Kajian	Lembaga	-	-	5	8	10	1.300	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan Majelis
PROGRAM 4: Meningkatkan sinergi antara PTM dengan : PTM, Pimpinan Persyarikatan disegala tingkat (PW,PD,PC,PR), pemerintah, PerguruanTinggi Dalam Negeri, dan memperluas jejaring PTM dengan PergururuanTinggi di Luar Negeri.											
Kegiatan 1: Studi pascasarjana bagi guru sekolah dasar dan menengah di PTM	1.1 Jumlah Guru	orang	-	40	80	120	160	10.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	PTM dan majelis Diktilitbang

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Menyusun model riset dan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan dakwah komunitas oleh PTM bekerjasama dengan LPCR	2.1 Buku Panduan Riset	Dokume n	-	-	1	1	1	100	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis Diktilitbang
Kegiatan 3: Peningkatan peranan asosiasi program studi dan fakultas dalam meningkatkan kapasitas SPMI dan status akreditasi	3.1 Jumlah Asosiasi Prodi	Lembag a	-	-	17	34	50	750	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang
Kegiatan 4: Peningkatan kapasitas Lembaga/Badan Penjaminan Mutu dalam bentuk pelatihan dan penyusunan SPMI	4.1 Jumlah Orang	orang	-	50	75	100	150	600	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 5: Peningkatan kerjasama antar PTM	5.1 Jumlah PTM	Lembag a	-	20	60	100	150	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 6: Peningkatan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai instansi dalam dan luar negeri	6.1 Jumlah PTM	Lembag a	-	20	60	100	150	15.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 7: Workshop pengelolaan website PTM	7.1 Jumlah peserta (orang)	orang	-	-		60	90	150	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 8: Peningkatan diseminasi informasi sumber scholarships bagi dosen PTM	8.1 Jumlah Penenrma Bea Siswa	orang	-	-	25	50	75	1.500	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 9: Pembentukan jaringan Alumni PTM melalui Tracer Study	9.1 Jumlah Alumni		-	-	-	-	-	-	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 10: Peningkatan sinergi dan komunikasi antara PTM, Persyarikatan- Majelis, dan BPH	10.1 Jumlah Kerjasama	Lembag a	-	-	30	60	90	1.800	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 5: Mengembangkan sistem dan strategi implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang holistik integralistik (menyeluruh dan terpadu), dan berta-takelola baik menuju Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan Islam berkembang											
Kegiatan 1: Rekrutmen pegawai Diktilitbang	1.1 jumlah orang	orang	-	2	3	2	3	440	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 2: Pengumpulan data dan analisis data keuangan	2.1 Buku Analisis Keuangan PTM	Dokumen	-	-		1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 3: Pengumpulan data dan analisis pelaporan kinerja PTM	3.1 Data bases PTM	Naskah	-	-		1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 4: Pembuatan system informasi pelaporan PTM	4.1 Data bases PTM	Data base	-	-	1	1	1	250	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 5: Pendampingan penulisan artikel ilmiah dosen PTM per wilayah kerja	5.1 Jumlah orang	Naskah	-	-	50	100	200	350	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 6: Menyusun Pola Pembinaan Mahasiswa dan Kader di PTM	6.1 Buku Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan	Naskah	-	-	-	1	1	150	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 7: Menyusun Model Pembibitan Dosen Unggul PTM	7.1 Buku Pedoman	Naskah	-	-	-	1	1	150	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 8: Penguatan PT melalui Rotasi SDM Pimpinan PTM	8.1 Buku Pedoaman	Naskah	-	-	1	5	10	10.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 9: Peningkatan Kualitas Rekrutmen SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan PTM	9.1 Pedoman Rekrutmen SDM	Dokumen	-	-	-	1	1	100	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
PROGRAM 6: Meningkatkan mutu dan jumlah PTM yang memenuhi kualifikasi akreditasi institusi, akreditasi prodi dan akreditasi internasional, dengan meningkatkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah, serta menampilkan identitas pendidikan Muhammadiyah											
Kegiatan 1: Pelatihan dan workshop akreditasi program studi, institusi, dan akreditasi internasional;	1.1 jumlah Kaprodi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Orang	-	100	200	300	400	3.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 2: Pendampingan penyusunan borang akreditasi program	2.1 Jumlah Kaprodi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	oang	-	-	50	100	150	2.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
studi, institusi, internasional											
Kegiatan 3: Meningkatkan jumlah PTM yang terakreditasi institusi “A”	3.1 Jumlah PTM	lembaga	-	2	4	6	8	1.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 4: Meningkatkan jumlah PTM yang terakreditasi institusi “B”	4.1 Jumlah PTM	lembaga	-	-	45	73	103	5.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 5: Meningkatkan jumlah prodi di lingkungan PTM yang terakreditasi B	5.1 Jumlah Prodi	lembaga	-	-	709	850	1000	100.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM
Kegiatan 6: Meningkatkan jumlah prodi di lingkungan PTM yang terakreditasi internasional	6.1 Jumlah Prodi	lembaga	-	-	-	2	4	60.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilibang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 7: Melakukan inisiasi program studi baru dan PTM baru	7.1 Jumlah Prodi Baru	lembaga	-	2	2	2	2	240.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 8: Pendirian PTM di kawasan 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)	8.1 Jumlah PTM	lembaga	-	-	2	2	2	300.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 9: Percepatan dan penambahan program studi di Pascasarjana PTM	9.1 Jumlah Prodi Baru	lembaga	-	-	17	22	27	27.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 10: Merintis Prodi Filsafat dan Ilmu-Ilmu Murni untuk S1 dan S2 di lingkungan PTM	10.1 jumlah prodi	Lembaga	-	-	-	1	2	3.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM
Kegiatan 11: Merintis dibuka nya program Dokter Spesialis di lingkungan PTM	11.1 Jumlah Prodi Dokter Spesialis	lembaga	-	-	-	-	1	100.000	Muhammadiyah (I= Tersedia)	Nasional	Majelis diktilitbang dan PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pendidikan masyarakat	1.1 Kursus dan keterampilan kerja sama dengan kemenaker	Orang	40	40	-	-	-	120	Kementerian Tenaga Kerja	nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.2 Kursus dan keterampilan kerja sama dengan kemendikbud	orang	20	20	-	-	-	128.995	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
	1.3 Kursus dan keterampilan (mandiri)	orang	60 (2016)	60	20	20	20	46.48	Swadaya Peserta	nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat
PROGRAM 5: Advokasi dan Pelatihan penyusunan Kurikulum											
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan tentang kurikulum yang bermuatan Islam Wasathiyah (Moderat)	1.1 Jumlah sekolah yang diadvokasi dan dilatih	Lembaga	-	-	-	68	68	1.360	BAPPENNAS (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI
Kegiatan 2: Advokasi dan pelatihan pengajaran agama diajarkan oleh guru seagama	2.1 Jumlah guru yang advokasi dan dilatih	orang	-	-	-	68	132	1.000	BAPPENNAS (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Kampung Berseri Astra	1.1 Kampung Berseri Astra merupakan program Corporate Social Responsibility Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar CSR Astra yaitu Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan. - Pilar Pendidikan : Fokus pada pengentasan buta huruf dan peningkatan angka partisipasi sekolah	Kampung	-	49	-	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	17 Provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jayapura)	Astra International
INDIKATOR SDGs:		4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))									
PROGRAM 1: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (Renstra Kemendikbud/ 01)											
Kegiatan 1: Hari Cuci Tangan Sedunia	1.1 cuci tangan bersama dengan sabun dan edukasi	siswa	-	-	20000	-	-	-	(III- Belum tersedia sumber)	14 kota di 16 provinsi	Unilever

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan untuk mendorong program, kegiatan, pemerintah mulai level desa hingga provinsi mempertimbangkan dan menjamin akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat bagi perempuan, anak perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya	1. Jumlah kebijakan yang diadvokasi 2. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam setiap level pembangunan 3. Jumlah perempuan yang dapat mengakses anggaran 4. Jumlah perempuan yang terdampak dari kebijakan, program, dan kegiatan	Kegiatan	-	1	2	4	2	50	Kementerian Luar Negeri Belanda (I= Tersedia)	National	CARE International Indonesia
PROGRAM 3: Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan											
Kegiatan 1: Memfasilitasi dalam persiapan dan pengurusan izin kelola HKm/Hutan Nagari	1.1 Luas hektar lahan yang dikelola secara berkelanjutan melalui mekanisme perhutanan sosial	Hektar	-	-	6364	-	-	6.524	MCAI Indonesia (I=Tersedia)	Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan)	Yayasan WRI, Walhi Sumatera Barat, dan perkumpulan Pena)
Kegiatan 2: Pelatihan advokasi anggaran dan kepemimpinan perempuan	2.1 Jumlah masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	peremp uan	-	-	363	-	-			Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sintang	Konsorsium Yayasan WRI (Yayasan WRI, Walhi Sumatera Barat, dan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
											perkumpulan Pena)
Kegiatan 3: Meningkatkan akses perempuan terhadap infrastruktur produksi dan pemasaran	3.1 Jumlah masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	peremp uan	-	-	363	-	-			Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sintang	Konsorsium Yayasan WRI (Yayasan WRI, Walhi Sumatera Barat, dan perkumpulan Pena)
Kegiatan 4: Memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola lahan dengan Penyediaan Bibit untuk budidaya dalam mendorong pertanian berkelanjutan	4.1 Luas Hektar lahan yang yang dikelola secara berkelanjutan	Hektar	-	-	147. 57	-	-			Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sintang	Konsorsium Yayasan WRI (Yayasan WRI, Walhi Sumatera Barat, dan perkumpulan Pena)
Kegiatan 5: Pelatihan keterampilan pengelolaan lahan dan hasil hutan non kayu (produksi, pemanfaatan sisa produksi)	5.1 Jumlah masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	peremp uan	-	-	363	-	-			Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sintang	Konsorsium Yayasan WRI (Yayasan WRI, Walhi Sumatera Barat, dan perkumpulan Pena)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 4: Analisis Situasi Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia											
Kegiatan 1: Penelitian untuk mengidentifikasi situasi perempuan muda dan anak perempuan di Indonesia pada bidang pendidikan, kesehatan, kerentanan, dan kekerasan berbasis gender	1.1 Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian	orang	-	-	24	-	-	110	Korean Women's Development Institute (I=Tersedia)	Jakarta Timur dan Lebak	Yayasan WRI
Kegiatan 2: Penyusunan Kajian Analisi Situasi Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia terkait (Pendidikan, Kesehatan, Kerentanan, dan Kekerasan Berbasis Gender)	2.1 Jumlah dokumentasi yang dihasilkan	Dokumen	-	-	1	-	-				
PROGRAM 5: Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi pada Perempuan											
Kegiatan 1: Pelatihan Gender dan Dampak Korupsi pada Perempuan	1.1 Jumlah partisipan pelatihan	orang	-	-	198	-	-	697	USAID CEGAH (I=Tersedia)	Jakarta, Medan, Banten, Jember, Ternate, dan Malang	Yayasan WRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penyusunan Modul Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi pada Perempuan	2.1 Jumlah modul yang dihasilkan	modul	-	-	1	-	-				
PROGRAM 6: Mempromosikan Kesetaraan Gender: Memberdayakan Perempuan untuk Melakukan Advokasi Berbasis Data & Mempromosikan Transparansi yang Lebih Luas pada Pemberian Izin Konsesi di Riau											
Kegiatan 1: Penyusunan Dokumentasi Pesan Advokasi Berbasis Data	1.1 Jumlah dokumentasi yang dihasilkan	Dokumen	-	2	-	-	-	416	World Resources Institute (I=Tersedia)	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau)	Yayasan WRI
Kegiatan 2: Pelatihan Advokasi Berbasis Data	2.1 Jumlah partisipan pelatihan	orang	-	30	-	-	-				
PROGRAM 7: Studi Mendalam terkait Perbedaan Dampak Korupsi pada Sektor Kesehatan antara Laki-laki dan Perempuan di Banten dan Maluku Utara											
Kegiatan 1: Penelitian untuk mengidentifikasi Perbedaan Dampak Korupsi pada Sektor Kesehatan antara Laki-laki dan Perempuan di Banten dan Maluku Utara	1.1 jml orang yang dilibatkan dalam penelitian	orang	-	-	-	40	-	798	USAID CEGAH (II: Masih Diusulkan) (I=Tersedia)	Banten dan Maluku Utara	Yayasan WRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penyusunan Modul Dampak Korupsi pada Sektor Kesehatan bagi Laki-laki dan Perempuan	2.1 jml modul yang dihasilkan	modul	-	-	-	1	-				
Kegiatan 3: Pengembangan Boardgame Dampak Korupsi pada Sektor Kesehatan bagi Laki-laki dan Perempuan	3.1 jml boardgame yang dihasilkan	board game	-	-	-	300	-				
Kegiatan 4: Penyusunan Infografis Dampak Korupsi pada Sektor Kesehatan bagi Laki-laki dan Perempuan	4.1 jml dokumen infografis yang dihasilkan	dokumen	-	-	-	1000	-				
PROGRAM 8: Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan gender budget statement dalam pembuatan alokasi anggaran daerah											
Kegiatan 1: Kurikulum dan Modul Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Merumuskan Gender Budget Statement dalam Anggaran Daerah	1.1 jml copy dokumen	copies (soft file)	-	100	-	-	-	326	SAPA Indonesia dan Kemnterian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan	Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Kebumen	Yayasan WRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pelatihan at Daerah bagi Perangdalam Merumuskan Gender Budget Statement dalam Anggaran Daerah	2.1 jml partisipan pelatihan	orang	-	60	-	-	-		Kebudayaan (I=Tersedia)		
Kegiatan 3: Workshop Merumuskan Gender Budget Statement dalam Anggaran Daerah di Kemenkokesra	3.1 jml partisipan pelatihan	orang	-	100	-	-	-			Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan	
PROGRAM 9: Memperkuat Kapasitas Perempuan untuk Membangun Ketahanan Komunitas dalam Periode Asap dengan Menggunggunakan Global Forest Watch											
Kegiatan 1: Pengembangan video media edukasi terkait penanggulangan kebakaran hutan dan dampak kabut asap khususnya bagi perempuan	1.1 jenis media edukasi yang dihasilkan	jenis	-	-	-	2	-	520	World Resources Institute (I=tersedia dan III=Belum Tersedia Sumber)	Riau	Yayasan WRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Sosialisasi media edukasi penanggulangan kebakaran hutan dan dampak kabut asap khususnya bagi perempuan	2.1 jml kegiatan sosialisasi	kegiatan	-	-	-	1	4				
PROGRAM 10: Model Pemantauan Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif											
Kegiatan 1: Menginisiasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pencapaian SDGs Tujuan 1 yang responsif gender	1.1 Menyiapkan konsep dan model kerjasama pembentukan Pusat Kajian Gender dan Pembangunan Berkelanjutan	Pertemu an	-	6	2	-	-	3,6	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	NTB	Institut KAPAL Perempuan, LPSPDM dan Universitas Hamzanwadi
	1.2 Menyelenggarakan Workshop Penguatan Kapasitas Akademisi Universitas Hamzanwadi untuk pembentukan Pusat Kajian Gender dan Pembangunan Berkelanjutan	Dokume n	-	-	-	1	-	20,45	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	NTB	Institut KAPAL Perempuan, LPSPDM dan Universitas Hamzanwadi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
	1.3 Menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Hamzanwadi, LPSDM dalam pembentukan Pusat Kajian Gender dan Pembangunan Berkelanjutan	Dokumen	-	-	1	-	9	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	NTB	Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan Universitas Hamzanwadi
	1.4 Memfasilitasi penguatan kapasitas tim Pusat Kajian Gender dan Pembangunan Berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan dari road map yang telah disusun periode 2018 sampai 2023	Kegiatan	-	-	2	2	-	Belum ada pendanaan (III=Belum Tersedia Sumber)	NTB	Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan Universitas Hamzanwadi
	1.5 Memfasilitasi penguatan jaringan yang relevan untuk Pusat Kajian Gender dan Pembangunan Berkelanjutan	Kegiatan	-	-	2	2	-	Belum ada pendanaan (III=Belum Tersedia Sumber)	NTB	Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan Universitas Hamzanwadi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
	1.6 Menyiapkan konsep dan model kerjasama Pengembangan Kajian Perlindungan Sosial dan Gender di Universitas Negri Makassar	Kegiatan	-	-	2	2	14,6	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	Sulawesi Selatan	Institut KAPAL Perempuan, YKPM dan Universitas Negri Makassar
	1.7 Menyelenggarakan Workshop Penguatan Kapasitas Akademisi Universitas Negri Makassar untuk Pengembangan Kajian Perlindungan Sosial dan Gender	Dokumen	-	-	1		26,72	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	Sulawesi Selatan	Institut KAPAL Perempuan, YKPM dan Universitas Negri Makassar
	1.8 Menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Negri Makassar, YKPM dalam Pengembangan Kajian Perlindungan Sosial dan Gender	Dokumen	-	-	1		30	MAMPU DFAT (I=Tersedia)	Sulawesi Selatan	Institut KAPAL Perempuan, YKPM dan Universitas Negri Makassar

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.9 Memfasilitasi penguatan kapasitas tim Pengembangan Kajian Perlindungan Sosial dan Gender untuk memastikan pelaksanaan dari road map yang telah disusun periode 2018 sampai 2023	Kegiatan	-	-	-	2	2	-	Belum ada pendanaan (III=Belum Tersedia Sumber)	Sulawesi Selatan	Institut KAPAL Perempuan, YKPM dan Universitas Negeri Makassar
	1.10 Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara periodik		-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM 11: Advokasi di tingkat Nasional											
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan untuk Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak	1.1 Jumlah pelaksanaan kampanye penghapusan perkawinan anak dengan jaringan Indonesia BERAGAM melalui konferensi pers, aksi damai, publikasi media sosial dan media cetak, radio dan televisi	kegiatan	-	-	6	6	6	-	25% dana DFAT Program MAMPU dan Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Presentase kelompok sasaran yang memberikan respons terhadap kampanye publik pencegahan dan penghapusan perkawinan anak melalui publikasi media (menulis di media cetak nasional, media sosial, wawancara radio dan televisi)	%	-	-	50	50	50	-	40% dana EM2030 dan Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.3 Pelaksanaan dialog untuk mendesak pemerintah agar menerbitkan PERPPU Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan anak atau peraturan lainnya (advokasi ini dilakukan atas nama jaringan yang diinisiasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dengan Deputy Tumbuh	kegiatan	-	-	5	5	5	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Kembang Anak-KPP-PA)										
	1.4 Presentase jaringan organisasi perempuan di berbagai wilayah yang aktif terlibat dalam sosialisasi dan diskusi penajaman draft usulan PERPPU	%	-	-	80	80	80	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.5 Presentase keterlibatan publik terutama perempuan dari kalangan akar rumput untuk menulis 1.000 surat kepada Presiden RI agar memberikan kebijakan penghentian perkawinan anak di Indonesia	%	-	-	80	80	80	-	20% dana DFAT Program MAMPU (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 2: Terlibat dalam jaringan JALA PRT untuk mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)	2.1 Jumlah pelaksanaan kampanye melalui media sosial, surat kabar, radio dan televisi tentang pentingnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan perempuan sesuai dengan janji dalam Nawacita	kegiatan	-	-	12	12	12	30	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 jumlah kegiatan yang diikuti dalam aksi-aksi JALA PRT untuk mendesakkan pengesahan RUU PPRT	kegiatan	-	-	4	4	4	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
	2.3 Presentase jaringan nasional yang dapat diperluas untuk memberikan dukungan terhadap advokasi RUU PPRT melalui jaringan Indonesia BERAGAM dan GENDERANG Perdamaian	%	-	-	50	50	50	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 3: Kampanye tentang pentingnya pengesahan RUU Keadilan Gender (RUU KKG) sebagai payung hukum yang mempercepat capaian kesetaraan gender	3.1 Dokumen analisis pro-kontra RUU KKG dan argumen-argumen yang dikembangkan	eksemplar	-	-	2	2	2	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
	3.2 Jumlah diskusi membangun diskursus pentingnya UU KKG penajaman konten RUU KKG yang dapat mempengaruhi publik	kegiatan	-	-	6	6	6	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3 Presentase kelompok sasaran yang merespons kampanye melalui media sosial, surat kabar, radio dan televisi tentang pentingnya UU KKG	%	-	-	50	50	50	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 4: Kampanye pentingnya pengarusutamaan gender dalam pendidikan	4.1 Dokumen hasil kajian tentang kesenjangan gender dalam pendidikan terutama pendidikan non formal untuk pemberdayaan perempuan yang dikembangkan melalui model Sekolah Perempuan	eksemplar	-	-	2	2	2	10	(II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan
	4.2 presentase sasaran yang merespons kampanye yang dilakukan melalui media sosial, surat kabar, radio dan televisi tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam	%	-	-	50	50	50	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	pendidikan formal maupun non formal										
PROGRAM 12: Advokasi di tingkat Nasional											
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan untuk Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak di pesantren, madrasah, dan sekolah	1.1 Jumlah pelaksanaan penyuluhan penghapusan perkawinan anak di pesantren, madrasah, dan sekolah melalui konferensi pers, aksi damai, publikasi media sosial dan media cetak, radio dan televisi.	kegiatan /provinsi	-	-	6	12	12	480	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah jaringan organisasi masyarakat Islam (ormas) perempuan di berbagai wilayah yang aktif terlibat dalam sosialisasi dan diskusi penajaman draft usulan peraturan perundang-undangan	Kegiatan	-	-	3	6	6	240	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI
	1.3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui media sosial, surat kabar, radio dan televisi tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak di pesantren, madrasah, dan sekolah	kegiatan	-	-	12	12	12		Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Kampanye tentang pentingnya pengesahan RUU Keadilan Gender (RUU KKG) sebagai payung hukum yang mempercepat capaian kesetaraan gender	2.1 Jumlah diskusi membangun diskursus pentingnya UU KKG penajaman konten RUU KKG yang dapat mempengaruhi publik	kegiatan	-	-	6	6	6	240	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI
Kegiatan 3: Kampanye pentingnya pengarusutamaan gender dalam pesantren, dan madrasah	3.1 Penelitian tentang kesenjangan gender dalam pendidikan formal dan non formal di pesantren dan madrasah untuk pemberdayaan perempuan.	penelitian	-	-	0	2	2	1.200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Indonesia barat, tengah, timur	MUI
PROGRAM 13: Advokasi ditingkat Nasional											
Kegiatan 1: Terlibat dalam jaringan JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	1.1 Jumlah pelaksanaan kampanye melalui konferensi pers, aksi damai, publikasi media sosial dan media cetak, radio dan televisi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia) INDONESIA, JKP3, Forum Pengada

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Dokumen Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Masyarakat Sipil dan argumen-argumen yang dikembangkan	Dokumen	-	-	1	-	-	-		Nasional	Layanan, Jaringan GERAK BERSAMA
	1.3 Jumlah kegiatan yang diikuti untuk mendesakkan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui jaringan GERAK BERSAMA dan Forum Pengada Layanan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-		Nasional	
Kegiatan 2: Terlibat Advokasi Kebijakan untuk Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak bersama Jaringan AKSI Remaja Indonesia	2.1.Jumlah pelaksanaan kampanye penghapusan perkawinan anak dengan jaringan AKSI REMAJA Indonesia melalui konferensi pers, aksi damai, publikasi media sosial dan media cetak, radio	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	SAPA INDONESIA dan Jaringan AKSI Remaja

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Terlibat dalam jaringan JALA PRT untuk mendesakkan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)	3.1 Jumlah kegiatan yang diikuti dalam aksi-aksi JALA PRT untuk mendesakkan pengesahan RUU PPRT	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Swadaya (II- masih diusulkan)	Nasional	JALA PRT, JKP3
Kegiatan 4: Kampanye tentang pentingnya pengesahan RUU Keadilan dan Keadilan Gender (RUU KKG) sebagai payung hukum yang mempercepat capaian kesetaraan gender	4.1 Dokumen analisis pro-kontra RUU KKG dan argumen-argumen yang dikembangkan	Kegiatan	-	-	12	12	12	30	Swadaya (II- masih diusulkan)	Nasional	SAPA INDONESIA dan JKP3
PROGRAM 14: Pemantauan terhadap Kebijakan Responsif Gender dan Kebijakan yang Membatasi Pemberdayaan Perempuan Adat											
Kegiatan 1: Identifikasi kebijakan responsif gender dan kebijakan yang membatasi pemberdayaan perempuan adat	1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender untuk pemberdayaan perempuan adat	komunitas adat	-	-	-	5	5	150	(III-belum tersedia sumber)	Nasional & Daerah	PEREMPUAN AMAN
	1.2 Jumlah kebijakan yang membatasi	komunitas adat	-	-	-	5	5	-	(III-belum tersedia sumber)	Nasional & Daerah	PEREMPUAN AMAN

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelaksanaan Maternity Protection Policy	1.1 Cuti melahirkan diberikan selama enam bulan	Pemberl akukan kebijaka n	-	-	Diber laku kan	-	-	-	PT Nestlé Indonesia (III- Belum tersedia sumber)	Seluruh area operasional PT Nestle Indonesia, termasuk di dalamnya kantor pusat, pabrik, pusat distribusi dan juga perwakilan kantor penjualan	PT Nestlé Indonesia
	1.2 Setiap ibu menyusui berhak untuk melakukan kegiatan laktasi kapan saja pada saat waktu bekerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM 17: Advokasi Kebijakan											
Kegiatan 1: Merubah hukum dan kebijakan yang memberikan perlindungan dan non diskriminatif terhadap pemenuhan SRHR melalui kerja-kerja advokasi dan pembentukan Opini	1.1 Terbitnya 4 kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang pro pemenuhan HKSR (penanganan KTD, RKUHP, perkawinan anak, CSE masuk kurikulum nasional) pada tahun 2018	Peratura n	-	-	-	1	-	-	-	Nasional	PKBI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Publik di level daerah dan nasional.	1.2 Terbitnya 8 kebijakan atau kesepakatan di Daerah yang mendukung CSE masuk kurikulum, Anggaran Kespro 1% pada APBD atau merubah kebijakan Daerah yang diskriminatif, dan penghapusan perkawinan anak pada 2018	-	-	-	-	4	-	-	-	10 Provinsi = Jakarta (Nasional), Aceh, Bengkulu, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan	PKBI
INDIKATOR SDGs:		5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.1(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir									
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK ESKA (Eksplorasi Seks Komersial Anak)											
Kegiatan 1: Pemberdayaan Anak	1.1 Anak yang berpartisipasi dalam perlindungan anak	Jumlah Anak	-	-	-	550	650	-	Plan International (I= Tersedia)	NTB & DKI Jakarta (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
	1.2 Anak yang mendapatkan informasi tentang hak anak dan hak	Jumlah Anak	-	-	-	635	745	-	Plan International (I= Tersedia)	NTB & DKI Jakarta (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	kesehatan reproduksi										
Kegiatan 2: Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat	2.1 keluarga dan masyarakat yang aktif dalam pemenuhan hak anak	# keluarga	-	-	-	125	190	-	Plan International (I= Tersedia)	NTB & DKI Jakarta (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
Kegiatan 3: Penguatan KPAD	3.1 KPAD yang aktif dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial anak	# KPAD	-	-	-	24	24	-	Plan International (I= Tersedia)	NTB & DKI Jakarta (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
Kegiatan 4: Kemitraan dengan sektor private	4.1 private sektor yang berperan aktif dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial terhadap anak	#private sektor	-	-	-	20	20	-	Plan International (I= Tersedia)	NTB & DKI Jakarta (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
PROGRAM 2: PARENTING PROGRAM											
Kegiatan 1: Melaksanakan Parenting Berbasis Masyarakat	1.1 Orang tua/pengasuh (laki-laki & Perempuan) yang melaksanakan parenting terhadap anak usia 0-6 tahun	Jumlah Orang tua	-	-	-	2154 3	1545 3	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Anak (perempuan & laki-laki) yang mendapatkan hak pengasuhan orang tuanya	Jumlah Anak	-	-	-	47784	73320	-	Plan International (I= Tersedia)	NTT (akan di scale-up nasional)	Yayasan Plan International Indonesia
PROGRAM 3: Safe and Free From Violence School											
Kegiatan 1: Pelatihan hak anak dan perlindungan anak bagi anggota sekolah (guru dan kepala sekolah)	1.1 Jumlah anggota sekolah (guru dan kepala sekolah) dicapai melalui sesi peningkatan kesadaran dan akses terhadap informasi perlindungan anak	Anggota komunitas	-	-	-	-	-	300	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I= Tersedia)	NA	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 4: Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui ormas lintas agama dan berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat Desa sampai Kabupaten											
Kegiatan 1: Kemitraan dengan organisasi lokal: Membangun kerjasama dengan organisasi Islam dan lintas agama yaitu, BKMT, ICMI, BMOIWI, IWAPI, PGI, KWI, , PHDI, Walubi dan lainnya untuk melakukan pemberdayaan perempuan, sehingga	1.1 Jumlah pertemuan dengan organisasi mitra tentang program kerja yang berkomitmen dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, sunat perempuan dan peningkatan	Kegiatan	-	-	0	3	3	1.200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Indonesia barat, tengah, timur	MUI dan ormas lintas agama

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs	partisipasi perempuan										
	1.2 Memfasilitasi ormas perempuan untuk mendorong terlaksananya Musrenbang Perempuan di tingkat Desa/Kabupaten	kegiatan	-	-	-	100	100	200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	200 desa	MUI
Kegiatan 2: Penguatan mental spiritual: menyusun buku penguatan mental spiritual dalam pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	2.1 Jumlah buku tentang penguatan mental spiritual dalam pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	eksemplar	-	-	-	1,500	1,500	1.200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (II-masih diusulkan)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	1.1 Tersosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	Kegiatan Nasional dan provinsi	-	3	1 nasio nal, 10 provi nsi	1 nasio nal, 14 provi nsi	1 nasio nal, 10 provi nsi	0	PGRI bekerja sama dengan instansi/ organisasi terkait (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus Besar PGRI dan 34 Pengurus PGRI Provinsi
Kegiatan 2: Melakukan survei materi buku teks dan referensi pada SD, SMP, SMA, SMK tentang ketidak kesetaraan dan ketidakadilan gender	2.1 Terlaksananya Melakukan survei materi buku teks dan referensi pada SD, SMP, SMA, SMK tentang ketidak kesetaraan dan ketidakadilan gender	Kegiatan	-	3	3	3	3	0	Pengurus PGRI dengan instansi terkait (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus PGRI dengan instansi terkait
Kegiatan 3: Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.1 Terjalannya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kegiatan	-	3	3	3	3	0	Pengurus PGRI dengan instansi terkait (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus PGRI dengan instansi terkait

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh instansi dan organisasi terkait	4.1 Terlaksananya program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh instansi dan organisasi terkait	Kegiatan	-	6	6	6	6	-	Pengurus PGRI dengan instansi terkait (III-belum tersedia sumber)	Jakarta	Pengurus Besar PGRI dan instansi terkait
PROGRAM 6: Penguatan Dukungan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Anak untuk Menegakkan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Resiko Migran, Eksploitasi dan Perdagangan Anak											
Kegiatan 1: Prevention : Memperkuat komunitas, Anak, OMS dalam pencegahan melalui pendidikan komunitas, peer watch, kampanye, publikasi	1.1 1870 anak terlibat di dalam usaha penyadaran terhadap bahaya perdagangan anak dan mengetahui kerentanan anak yang bermigrasi	Anak	-	1870	-	-	-	5.273,5	TDH NL (I= Tersedia)	kepulauan riau dan kalimantan, Kota Semarang, Kubu Raya- Pontianak, Kendal- Jawa tengah, Sungai Bunru- Karawang, Bantul dan Guunung Kidul Yogja, Jakarta Utara, Surabaya, Mataram, Kupang, Indramayu	indonesia ACT
	1.2 Inisiasi dan penguatan 20 forum anak di tingkat desa/kelurahan	forum	-	20	-	-	-				
	1.3 penguatan Jaringan perlindungan anak di 27 desa/kelurahan	desa/kelurahan	-	27	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
melalui "Sekolah Perempuan" di 78 desa											
Kegiatan 1: Pengembangan Media: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pengembangan koran Sekolah Perempuan, radio komunitas, media sosial, dll untuk mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan	1.1 Penyusunan konsep pengembangan koran Sekolah Perempuan, Radio Komunitas, Media Sosial, dll untuk mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan	dokumen	0	1	1	0	0	0	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2 Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	0	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	Kegiatan 2: Layanan Pengaduan: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi Sekolah Perempuan untuk memberikan pelayanan pengaduan kekerasan	dokumen	0	1	1	0	0	0.3	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
terhadap perempuan di komunitas	2.2 Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	0	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
PROGRAM 2: Ketahanan Keluarga											
Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang	1.1 Sosialisasi tentang peran P2TP2A terkait KDRT	kegiatan	1	-	-	-	-	PM	P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	Nasional	DWP Pusat
	1.2 Pelatihan bagi petugas pos pengaduan KDRT	kegiatan	2 (2016)	2	-	-	-	PM	P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	Nasional	DWP Pusat
PROGRAM 3: Peningkatan Pemahaman, kemampuan, dan peran advokasi Nasyiah pada persoalan KtPA											
Kegiatan 1: Pelatihan Paralegal Nasyiah	1.1 menggiatkan advokasi untuk korban KtPAAnak dan perempuan 2.menguatkan respon kader nasyiatul aisyiah terhadap isu-isu kekerasan pada perempuan dan anak	provinsi (jumlah provinsi yang melakukan pelatihan)	-	4	10	18	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan Nasyiatul Aisyiyah (II-masih diusulkan)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pelatihan Advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.1 mensosialisasikan pentingnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.2 terbentuknya kader nasyiatul aisyiyah yang terampil melakukan advokasi prihak KtPA anak dan perempuan	provinsi (jumlah provinsi yang melakukan pelatihan)	-	4	10	18	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan Nasyiatul Aisyiyah (II-masih diusulkan)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
Kegiatan 3: Pembentukan Rumah Aduan di PDNA dan Biro PWNA	3.1 Nasyiah sebagai sumber rujukan utama perempuan dan anak dalam mengentaskan kasus-kasus KtPA	provinsi (jumlah provinsi yang memiliki Rumah)	-	4	10	18	34	500	Twin Sharing Pemerintah dan Nasyiatul Aisyiyah (II-masih diusulkan)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	3.2 Nasyiah sebagai partner perempuan dan anak dalam pendampingan kasus-kasus KtPA	-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM 4:											
Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan Pelaksanaan PP 61 tahun 2014 tentang	5.2.1. Pelaksanaan dialog dan lobby dengan Kementerian Kesehatan untuk	kegiatan			2	2	2	5	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kesehatan Reproduksi & PMK No 3 tahun 2016	mendorong pelaksanaan PMK										
	5.2.2. Pelaksanaan dialog dan lobby dengan BARESKRIM untuk tidak mengkirimanalisisasi pelaku aborsi aman berbasis PP 61 tahun 2014	kegiatan			2	2	2	5	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	YKP
	5.2.3. Menyusun strategi bersama dengan stakeholder (POGI, IBI, HOGSI dan organisasi perempuan)	kegiatan			2	2	2	5	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	YKP
	5.2.4. Advokasi RKHUP terkait pasal-pasal aborsi aman	kegiatan			2	2	2	5	Swadaya (II-masih diusulkan)	Nasional	YKP
PROGRAM 5: Pemantauan terhadap layanan komprehensif yang bisa diakses oleh Perempuan Adat											
Kegiatan 1: Pemantauan atas kasus kekerasan terhadap perempuan adat	1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Adat yang masuk ke	komunitas adat	-	-	-	5	5	100	(III-belum tersedia sumber)	Nasional & Daerah	PEREMPUAN AMAN

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	dalam Sistem Pengaduan										
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun											
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen untuk melakukan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak "Sekolah Perempuan" di 78 desa											
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk pencegahan dan penghapusan perkawinan anak perempuan	1.1. Penyusunan konsep pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk pencegahan dan penghapusan perkawinan anak perempuan	dokumen		1	1			0,35	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2 Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan		3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pengembangan Media Kampanye: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pengembangan koran Sekolah Perempuan, radio komunitas, media sosial, dll untuk mengkampanyekan penghapusan perkawinan anak perempuan	2.1 Penyusunan konsep pengembangan koran Sekolah Perempuan, radio komunitas, media sosial, dll untuk mengkampanyekan penghapusan perkawinan anak perempuan	dokumen		1	1			0,3	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	2.2 Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan		3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
PROGRAM 2:											
Kegiatan 1: Sosialisasi penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	1.1 Tersosialisasinya penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan kepada pengurus dan anggota PGRI	provinsi	-	1	34	34	34	0	Pengurus Besar PGRI dan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/k ota PGRI (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus Besar PGRI dan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/k ota PGRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan sunat perempuan melalui "Sekolah Perempuan" di 78 desa											
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk penghapusan sunat perempuan	1.1. Penyusunan konsep fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk penghapusan sunat perempuan	dokume n		1	1			<1	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	%		80	80	80	80	702	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSPDM, KAP2K, Pondok PERGERAKA N dan PBT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
1.3. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	%		60	60	60	60	877			
1.4. Jumlah pertemuan anggota Sekolah Perempuan untuk pembahasan materi pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	kegiatan		234	234	234	234	702			
1.5. Jumlah anggota yang mengikuti proses penyadaran pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	person		5850	5850	5850	5850	877			
1.6. Prosentase kasus sunat perempuan yang didata oleh anggota Sekolah Perempuan	%		100	100	100	100	60			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.7. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan		3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 2: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi Sekolah Perempuan untuk sosialisasi tentang penghapusan sunat perempuan di komunitas	2.1. Penyusunan konsep fasilitasi Sekolah Perempuan untuk sosialisasi tentang penghapusan sunat perempuan di komunitas	dokumen		1	1			<1	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
	2.2. Penyusunan konsep pengembangan koran Sekolah Perempuan, radio komunitas, media sosial, dll untuk mengkampanyekan penghapusan perkawinan anak perempuan	eksemplar		15	15	15	15	15	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, KAP2K, Pondok PERGERAKAN dan PBT
	2.3. Prosentasi masyarakat di komunitas yang mendapatkan sosialisasi	%		25	25	25	25	60			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Sosialisasi Pemahaman tentang Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi	1.1 Tersosialisasi Pemahaman tentang Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	provinsi	-	1	34	34	34	0	Pengurus Besar PGRI dan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/k ota PGRI (II- masih diusulkan)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus Besar PGRI dan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/k ota PGRI
PROGRAM 2: Membangun kesadaran dan komitmen untuk memahami beban kerja perempuan yang diakibatkan oleh pembagian kerja berdasar jenis kelamin dan memberikan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar kepada perempuan melalui "Sekolah Perempuan" di 78 desa											
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk membangun kesadaran	1.1. Penyusunan konsep fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk membangun kesadaran tentang beban kerja perempuan dalam rumah tangga	dokume n		1	1			<1	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
tentang beban kerja perempuan dalam rumah tangga	1.2. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami perhitungan pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi	%		80	80	80	80	702	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSPDM, KAP2K, Pondok PERGERAKAN dan PBT
	1.3. Presentasi peserta yang memahami dampak dari pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang dibebankan kepada perempuan	%		80	80	80	80	702			
	1.4. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan		3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pengumpulan Data: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi Sekolah Perempuan dalam menyediakan data tentang beban kerja perempuan dalam rumah tangga dengan menggunakan alat analisis aktivitas harian	2.1. Penyusunan konsep fasilitasi Sekolah Perempuan dalam menyediakan data tentang beban kerja perempuan dalam rumah tangga dengan menggunakan alat analisis aktivitas harian	dokume n		1	1			<1	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
	2.2. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami teknik menghitung perbandingan beban kerja perempuan dan laki-laki melalui metode kalender harian	percent		50	50	50	50	900	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSPDM, KAP2K, Pondok PERGERAKA N dan PBT
	2.3. presentase anggota Sekolah Perempuan yang melakukan pengumpulan data tentang beban kerja	percent		40	40	40	40	720			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.4. presentase data yang telah dikumpulkan, digunakan sebagai alat advokasi	percent		25	25	25	25	522			
	2.5. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan		3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.											
PROGRAM 1: Representasi Politik Perempuan Indonesia: Kebijakan Afiriasi Partai Politik untuk Pemilihan Mendatang Tahun 2019											
Kegiatan 1: Penyusunan Dokumentasi Pesan Advokasi Berbasis Data	1.1 Jumlah dokumentasi yang dihasilkan	Dokumen	-	2	-	-	-	464	World Resources Institute (I=Tersedia)	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau)	Yayasan WRI
Kegiatan 2: Pelatihan Advokasi Berbasis Data	2.1 Jumlah partisipan pelatihan	orang	-	30	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Penelitian untuk mengidentifikasi kebijakn afirmasi partai politik di Indonesia yang mendorong representasi politik perempuan di Indonesia	3.1 Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian	orang	-	37	-	-	-	107	Korean Women's Development Institute (I= Tersedia)	Jakarta	Yayasan WRI
PROGRAM 2: Representasi dan Partisipasi Perempuan Adat di Legislatif dan Eksekutif											
Kegiatan 1: Pendataan Representasi Perempuan Adat di parlemen pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	1.1 Jumlah perempuan adat di parlemen pusat	Nasional	-	-	-	1		100	(III-belum tersedia sumber)	Nasional	PEREMPUAN AMAN
	1.2 Jumlah perempuan adat di parlemen daerah	Kab/Kota	-	-	-	5	5	-	(III-belum tersedia sumber)	Daerah	PEREMPUAN AMAN
	1.3 Jumlah perempuan adat di pemerintah daerah	Kab/Kota	-	-	-	5	5	-	(III-belum tersedia sumber)	Daerah	PEREMPUAN AMAN
INDIKATOR TPB: 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial											
PROGRAM 1: Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan PGRI dan Partisipasi aktif dalam forum organisasi											
Kegiatan 1: Pelatihan peningkatan Kapasitas pengurus dan kepemimpinan PGRI	1.1 Peningkatan kapasitas pengurus dan kepemimpinan	Kegiatan Nasional dan Provinsi	-	16	12	12	12	4.680	PGRI dan EIAP (Education Internasional)	34 Provinsi	PGRI dan EIAP (Education

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi anggota Sekolah Perempuan untuk merumuskan isu- isu perempuan yang diusulkan dalam Musrenbang dari Desa sampai Kabupaten	1.1. Penyusunan konsep fasilitasi anggota Sekolah Perempuan untuk merumuskan isu-isu perempuan yang diusulkan dalam Musrenbang dari Desa sampai Kabupaten	dokume n	-	1	1			0,35	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki pemahaman tentang Musrenbang dan pentingnya perempuan terlibat aktif dalam Musrenbang	percent	-	40	40	40	40	54	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, KAP2K, Pondok PERGERAKA N dan PBT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
	1.3. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki kemampuan merumuskan isu-isu perempuan yang penting diusulkan dalam Musrenbang (penghapusan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan, sunat perempuan, beban ganda perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan)	percent	-	20	20	20	20	13,5		
	1.4. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami cara mengawal usulan dalam Musrenbang	percent	-	20	20	20	20	54		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.5. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami arti penting mendesakkan Musrenbang Perempuan sebagai strategi mempercepat advokasi isu-isu perempuan	percent	-	50	50	50	50	54			
	1.6. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	-	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 2: Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi anggota Sekolah Perempuan	2.1. Penyusunan konsep fasilitasi anggota Sekolah Perempuan untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat Desa sampai Kabupaten	dokumen	-	1	1			0,35	Dana DFAT Program MAMPU	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat Desa sampai Kabupaten	2.2. Jumlah delegasi dari anggota Sekolah Perempuan yang terlibat aktif mengikuti Musrenbang tingkat desa-kabupaten	orang	-	156	156	156	156	14,04	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, KAP2K, Pondok PERGERAKAN dan PBT
	2.3. presentase delegasi Sekolah Perempuan yang aktif mempengaruhi pengambilan keputusan dalam Musrenbang	percent	-	156	156	156	156	14,04			
	2.4. Jumlah usulan yang masuk dalam musrenbang	item	-	10	10	10	10	1,3			
	2.5. Jumlah usulan yang berhasil dimasukkan sebagai program dan disediakan anggaran oleh pemerintah	item	-	3	3	3	3	1,3			
	2.6. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3	kegiatan	-	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)										
Kegiatan 3: Musrenbang Perempuan: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi anggota Sekolah Perempuan untuk mendorong terlaksananya Musrenbang Perempuan di tingkat Desa/Kabupaten	3.1. Penyusunan konsep fasilitasi anggota Sekolah Perempuan untuk mendorong terlaksananya Musrenbang Perempuan di tingkat Desa/Kabupaten	dokumen	-	1	1			0	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	3.2. Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami musrenbang perempuan sebagai upaya strategis dalam menyalurkan aspirasi kepentingan perempuan	percent	-	40	40	40	40	375	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSPM, KAP2K, Pondok PERGERAKA N dan PBT
	3.3. Presentase usulan Musrenbang yang mencerminkan target dan indikator SDGs Goal 5	percent	-	80	80	80	80	375			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.4. Presentase usulan musrenbang perempuan yang berhasil dimasukkan dalam musrenbang reguler	percent	-	10	10	10	10	375			
	3.5. Prosentase kader Sekolah Perempuan yang mengikuti Musrenbang perempuan	percent	-	10	10	10	10	375			
	3.6. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	-	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 4: Penguatan jaringan multipihak: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pertemuan multistakeholder dari tingkat Desa sampai Kabupaten untuk advokasi terbitnya peraturan yang	4.1. Penyusunan konsep fasilitasi pertemuan multistakeholder dari tingkat Desa sampai Kabupaten untuk advokasi terbitnya peraturan yang responsif gender terutama pencegahan dan	dokumen	-	1	1			0	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
responsif gender terutama pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	penghapusan perkawinan anak										
	4.2. Jumlah anggota forum multipihak yang terdiri dari pemerintah, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, akademisi yang membahas isu-isu terkait dengan goal 5 SDGs	orang	-	60	60	60	60	72	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSDM, KAP2K, Pondok PERGERAKAN dan PBT
	4.3. Presentase anggota forum multipihak yang aktif mendukung advokasi yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan terkait goal 5 SDGs	percent	-	50	50	50	50	72			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	4.4. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	-	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
Kegiatan 5: Asistensi penyusunan kebijakan yang responsif gender: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan capaian SDGs goal 5 terutama pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	5.1. Penyusunan konsep fasilitasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan capaian SDGs goal 5 terutama pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	dokumen	-	1	1			0	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	5.2. Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan kebijakan daerah	kegiatan	-	10	10	10	10	6	60% dana DFAT Program MAMPU, 20% APBD dan Swadaya	Sulsel, NTT,NTB, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	KAPAL Perempuan, YKPM, LPSPD, KAP2K, Pondok PERGERAKAN dan PBT
	5.3. Prosentase pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pencapaian target	percent	-	20	20	20	20	504			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	dan indikator goal 5 SDGs										
	5.4. Presentase pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk menerbitkan kebijakan untuk mendukung pencapaian target dan indikator SDGs	percent	-	50	50	50	50	504			
	5.5. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	-	3	3	3	3	100	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
PROGRAM 3: Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan PGRI dan Partisipasi aktif dalam forum organisasi											
Kegiatan 1: Pelatihan peningkatan Kapasitas pengurus dan kepemimpinan PGRI	1.1 Peningkatan kapasitas pengurus dan kepemimpinan PGRI (Piloting district training)	Kegiatan Nasional dan Provinsi	-	16	12	12	12	4680	PGRI dan EIAP (Education Internasional	34 Provinsi	PGRI dan EIAP (Education Internasional Asia Pasific)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Memfasilitasi pertemuan reguler ormas perempuan untuk membangun kesadaran tentang otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	1.1 Jumlah pertemuan ormas perempuan yang mengikuti proses penyadaran tentang hak atas otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	kegiatan	-	-	20	70	70	1.400	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (I= Tersedia)	70 ormas di lingkungan MUI	MUI
PROGRAM 3: Membangun kesadaran dan komitmen untuk membuat keputusan terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi melalui "Sekolah Perempuan" di 78 desa											
Kegiatan 1: Pertemuan Reguler: Menyiapkan konsep, mengkoordinir dan monev terhadap fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk membangun kesadaran tentang otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	1.1. Penyusunan konsep fasilitasi pertemuan reguler Sekolah Perempuan untuk membangun kesadaran tentang otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	dokume n	-	1	1	-	-	-	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan
	1.2. Melakukan koordinasi dan monev secara periodik (bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan)	kegiatan	-	3	3	3	3	100000000	Dana DFAT Program MAMPU (I= Tersedia)	Nasional	KAPAL Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelatihan pendampingan Kespro untuk menciptakan kantung-kantung pendamping komunitas dalam memberikan pendidikan kespro dan advokasi hak-hak kespro	1. 1 Prosentase provinsi yang telah melakukan pelatihan pendampingan kespro	%	-	25	50	75	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
	1. 2. komunitas nasyiah pendamping Kespro yang memberikan pendidikan dan advokasi hak hak kespro bagi masyarakat	komunitas	-	40	60	80	100	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
Kegiatan 2: Seminar kesehatan reproduksi	2.1 jumlah provinsi yang melaksanakan seminar kesehatan reproduksi	provinsi	-	15	20	28	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH
PROGRAM 6: Family Learning Center (FLC) sebagai pusat belajar keluarga yang bebas dari KDRT											
Kegiatan 1: penyusunan panduan pembentukan FLC	1.1 prosentase terbentuknya panduan komprehensif mengenai tata cara relasi berkeluarga	prosentase	-	50	75	100	100	20	Twin Sharing Pemerintah dan NA (II- masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	yang sakinah, ma wadhah warahmah										
	1.2. deseminasi panduan FLC terkait pola relasi keluarga yang sehat, bebas tekanan dan sadar gender di setiap provinsi	provinsi	-	0	0	15	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	Nasyiatul Aisyiyah
PROGRAM 7: Mengatasi persoalan remaja dengan posyandu remaja PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik NA)											
Kegiatan 1: Membuat konsep dan materi pelatihan motivator, kader, tenaga konselor dan medis PASHMINA	1.1 Prosentase penyusuna buku panduan PASHMINA	prosentase	-	100	100	100	100	20	Twin Sharing Pemerintah dan NA (II- masih diusulkan)	Pimpinan Pusat	NASYIATUL AISYIAH
	1.2. setiap provinsi memiliki tim motivator berkualitas sesuai dengan konsep PASHMINA	provinsi	-	5	25	34	34	-	Twin Sharing Pemerintah dan NA (III- belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	NASYIATUL AISYIAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan											
Kegiatan 1: Melakukan advokasi dan memastikan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha	1.1 Terselenggaranya pelatihan bagi guru perempuan pelaku usaha	Kegiatan	-	8	10	10	6	-	PGRI bekerja sama dengan instansi & organisasi terkait (III- belum tersedia sumber)	34 provinsi	PGRI bekerja sama dengan instansi & organisasi terkait
	1.2 Terlaksananya advokasi untuk memastikan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha	Kegiatan	-	1	1	34	34	-	PGRI (III- belum tersedia sumber)	34 provinsi	Pengurus Besar PGRI, Pengurus Provinsi, dan Kabupaten/K ota, PGRI
Kegiatan 2: Melakukan advokasi memastikan kepada pemerintah tentang setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan	2.1 Terselenggaranya advokasi memastikan kepada pemerintah tentang setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan	Kegiatan	-	0	1	1	1	-	Pengurus Besar PGRI (III-belum tersedia sumber)	34 provinsi	Pengurus Besar PGRI, Pengurus Provinsi, dan Kabupaten/K ota, PGRI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Establishment of YCG at Provincial level	1.1 YCG yang terbentuk di tingkat provinsi	institusi	-	-	-	4	-	202	Yayasan Plan International Indonesia (Project : Youth Voice's for Girls Rights and Equality)	16 Provinsi	Youth Coalition for Girls (YCG)
	1.2 anak dan orang muda terutama perempuan yang tergabung dalam YCG	child and youth	-	-	-	40	-				
Kegiatan 2: Youth Camp for YCG at Province level	2.1 anak dan orang muda yang berpartisipasi dalam kegiatan youth camp di tingkat provinsi	child and youth	-	-	-	100	-	205			
Kegiatan 3: Basic Organisational Training for YCG National and Province	3.1 anak dan orang muda yang pengetahuan dan kapasitasnya meningkat tentang manajemen organisasi	child and youth	-	-	-	100	-	270			
Kegiatan 4: YCG Participation on the development of RAD on SDG	4.1 rekomendasi anak muda dari hasil monitoring pencapaian hasil SDG's	document	-	-	-	125	-	200			
Kegiatan 1.5 Provide seedgrant for	5.1 campaign girls right and equality	event	-	-	-	4	4	375			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
awareness raising to YCG	5.2 anggota masyarakat yang terjangkau melalui kegiatan kampanye yang dilakukan oleh YCG	peoples	-	-	-	2500	2500				
PROGRAM 2: Bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan organisasi terkait											
Kegiatan 1: Melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memastikan dukungan dana dan sarana alternatif bagi perempuan inovator	1.1 Tersosialisasi dukungan dana dan sarana alternatif bagi perempuan inovator dari pemerintah	Kegiatan	-	8	10	10	6	-	PGRI bekerja sama dengan instansi & organisasi terkait (III-belum tersedia sumber)	34 provinsi	PGRI bekerja sama dengan instansi & organisasi terkait
PROGRAM 3: Gender Budget yang sensitif terhadap Kebutuhan Khusus Perempuan Adat											
Kegiatan 1: Identifikasi gender budget yang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan adat di tingkat nasional, lokal hingga kampung	1.1 Jumlah gender budget yang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan adat di tingkat nasional	nasional	-	-	1		150	-	-	Nasional	PEREMPUAN AMAN
	1.2 Jumlah gender budget yang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan adat di lokal	kab/kota	-	-	2	3	-	-	-	Daerah	PEREMPUAN AMAN

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Jumlah gender budget yang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan adat di tingkat desa	desa	-	-	5	5	-	-	-	Daerah	PEREMPUAN AMAN
	1.4 Proporsi gender budget yang diperuntukan kebutuhan khusus perempuan adat	%	-	-	50	50	-	-	-	Nasional	PEREMPUAN AMAN

MATRIKS BAGIAN 3: INDIKATOR TPB/SDGs YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Belum semua indikator TBP/SDGs Indonesia sudah dirumuskan metadatanya karena masih menunggu kesepakatan global tentang indikator tersebut (sebagian besar adalah indikator SDGs Tier III) atau karena pada saat perumusan indikator, Tim belum berhasil merumuskan metadatanya. Dalam buku “Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia”, indikator tersebut termasuk kategori “indikator yang akan dikembangkan”. Secara bertahap indikator dengan kategori akan dikembangkan tersebut akan dirumuskan metadatanya melalui proses pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan dunia usaha, pakar dan akademisi) dibantu oleh Organisasi PBB yang mengampu indikator tersebut. Meski masih dalam kategori “indikator yang akan dikembangkan”, sudah terdapat program atau kegiatan yang diindikasikan terkait dengan beberapa indikator tersebut, baik dikerjakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Seperti halnya perumusan metadata tahap pertama, perumusan metadata tahap kedua akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi baik offline maupun online untuk disepakati bersama. Berikut adalah daftar indikator yang akan dikembangkan untuk Pilar Pembangunan Sosial:

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kode Indikator	Nama Indikator
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.
2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.

Kode Indikator	Nama Indikator
2.c.1	Indikator anomali harga pangan.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).
3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.

Kode Indikator	Nama Indikator
3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan
3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.
3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

SALINAN
ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. Rasio Elektrifikasi										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. (a) Konsumsi Listrik per Kapita										
PROGRAM 1:PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN										
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1.1 Pangsa Energi Primer BBM Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,58	6,96	5,81	2,08	2,04	19.830	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,87	8,65	9,6*)	8,24	8,18			
	1.3 Subsidi Listrik	Triliun	58,60	59,23	52,28	80,6	89,41			
Kegiatan 2 : Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	2.1 Rasio Elektrifikasi	%	88,30	91,16	93,35	95,15	96,61	17.710	APBN	
	2.2 Rasio Desa Berlistrik	%	97,39	96,95	97,09	99	100			
	2.3 Penambahan Kapasitas Pembangkit	MW	2.463,8	4.128,20	835,35	5.956	18.964			
	2.4 Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	KMS	3.941	2.116	3.240,50	12.681	13.410			
	2.5 Penambahan Kapasitas Gardu Induk	MVA	6.179	15.828	11.020	34.552	29.812			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.6 Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik yang Laik Operasi	%	59,94	86,32	100	90	90			
	2.7 Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik Yang Laik Operasi	%	8,31	34,19	100	90	90			
	2.8 Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/Kapita	910,20	956,36	1.011,50	1.129	1.200			
PROGRAM 2: PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	1.1 Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terevaluasi TKDN	PLTU	-	-	-	10	5	8.300.000	APBN	Kemenperin
INDIKATOR SDGs: 7.1.2.(a) Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MIGAS										
Kegiatan 1: Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1.1 Jumlah penawaran WK Migas Konvensional (Wilayah Kerja)	WK	8	14	10	8	8	2.022.176	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 WK Migas Konvensional yang dilakukan	KKKS	8	6	-	6	6			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	eksplorasi dan eksploitasi									
	1.3 Jumlah penawaran WK Migas Non-Konvensional (Wilayah Kerja)	WK	3	3	5	4	4			
	1.4 WK Migas Non Konvensional yang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi	KKKS	4	2	-	2	2			
Kegiatan 2: Perencanaan, Pengadaan, Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas dan Gas Bumi	2.1 Persentase alokasi gas domestik	%	55	59	61	61	62			
	2.2 Rumah Tangga Tersambung Gas Kota	RT	20,363	99,151	63,551	306,000	374,000			
	2.3 Jumlah Wilayah dibangun Jaringan Gas Kota	Wilayah	2	6	0	16				
	2.4 Kapasitas Terpasang Kilang LPG	MMSCFD / juta MT	4,64	4,49	4,63	4,66	4,68			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.5 Pembangunan FSRU atau Regasification Onshore LNG Terminal	Unit	1	1	1	1	2			
	2.6 Volume LPG Bersubsidi	Juta Ton	5,57	6,01	4,7	7,9	8,6			
	2.7 Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	-	-	-	-	-			
INDIKATOR SDGs: 7.2.1. Bauran Energi Terbarukan										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI										
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	1.1 Jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi	MW	2	1.787,9	1,838	2,03	2,03	5.226.590	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Jumlah produksi Biofuel	Juta KL	1,62	3,65	3,23	5,7	7,2			
	1.3 Jumlah produksi Biogas	Ribu M3	19	22,8	24,6	24,7	-			
Kegiatan 2 : Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	2.1 Jumlah kapasitas terpasang PLT Air	MW	5	2,81	110,6	5,6	5,6			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Jumlah kapasitas terpasang PLT Surya	MW	85	6,62	6,28	54,2	54,2	123.042		
Kegiatan 3 : Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	3.1 Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)	WKP	5	8	8	5	5			
	3.2 Pembinaan Investasi	Miliar US\$	1	1,13	1,1	1,91	1,28			
	3.3 Jumlah kapasitas terpasang PLT Panas Bumi	MW	1.438,5	1.643.5	1.808,5	2.053,50	2.053,50			
INDIKATOR SDGs: 7.3.1. Intensitas Energi Primer										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI										
Kegiatan 1 : Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	1.1 Penurunan emisi CO2	Juta Ton	29,6	31,6	33	23,57	28,48	415.678	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Intensitas Energi Primer (Penurunan Rata-Rata 1% per tahun	SBM/Miliar	501	438	434	431	463,2			
PROGRAM 2: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI										
	1.1 Penghargaan Industri Hijau	Penghargaan	-	1	0	130	150	3.788.000	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	1.2 Kebijakan Penurunan Emisi GRK	Kebijaka n	-	6	5	5	5	12.404.200	APBN	
	1.3 Infrastruktur Industri Hijau	Infrastr uktur	-	5	4	4	5		APBN	
	Capacity Building Industri Hijau	orang	-	2	0	0	75		APBN	
	Kerja sama dan sosialisasi penerapan industri hijau	Kerja sama	-	3	1	2	2	17.830.400	APBN	
TUJUAN 8										
INDIKATOR SDGs: 8.1.1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
INDIKATOR SDGs: 8.1.1.(a). PDB per kapita										
PROGRAM 1: PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	1.1 Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka	Perusah aan	-	40	-	-	-	18.027,5	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Sertifikasi Sumber Daya Manusia Industri Tekstil dan Aneka	orang	-	400	-	-	-	3.498,7	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Standar Nasional Indonesia Produk Industri Tekstil dan Aneka	SNI	-	5	15	12	30	9.429,9	APBN	
	1.3 Pengembangan Merk (Branding) Industri Tekstil dan Aneka	Perusahaan	-	20	-	20	30	58.230,7	APBN	
	1.4 Pendirian Bufferstock Kapas dan Material Center	Bufferstock	-	2	2	-	-	9.385,9	APBN	
	1.5 SDM Industri yang mengikuti Diklat	orang	-	-	550	200	1000	15.000,6	APBN	
	1.6 Jumlah SNI Industri Tekstil, Kulit, alas kaki dan aneka	SNI Wajib	-	-	-	2	2	1.361,6	APBN	
	1.7 Pusat desain, bahan baku dan inovasi produk Industri TPT dan Alas kaki	Unit	-	-	-	1	1	4.900,0	APBN	
Kegiatan 2: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir (Baru)	2.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia Produk Industri Kimia Hilir	RSNI	-	10	10	8	10	6.646,6	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Standar Nasional Indonesia Wajib Produk Industri Kimia Hilir	SNI Wajib	-	1	2	1	2	4.167,1	APBN	
	2.3 Fasilitasi Industri Kimia Hilir	Komoditi	-	5	-	-	-	7.372,8	APBN	
	2.4 Bantuan mesin dan peralatan	Unit	-	1	1	18	12	17.166,7	APBN	
	2.5 Bimbingan Teknis Industri Kimia Hilir	Orang	-	20	-	-	-	1.272,5	APBN	
	2.6 Pengawasan SNI Wajib Industri Kimia Hilir	Perusahaan	-	-	5	5	5	1.487,1	APBN	
	2.7 SDM Industri kimia hilir yang disertifikasi	Orang	-	-	40	40	40	2.435,1	APBN	
	2.8 SDM industri kimia hilir yang mengikuti diklat	Orang	-	-	60	-	40	948,1	APBN	
	2.9 Produk industri kimia hilir yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	-	100	50	150	1.410,2	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.10 Branding produk industri kimia hilir	Merk	-	-	4	3	4	2.285,2	APBN	
	2.11 Perusahaan yang terfasilitasi Penerapan dan Pembinaan Kesehatan Melalui CPOTB, CPOB dan CPKB kepada Industri Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional	Perusahaan	-	-	-	100	50	9.000,0	APBN	
Kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu	3.1 Rancangan SNI	RSNI	-	6	6	6	6	4.628,8	APBN	Kementerian Perindustrian
	3.2 Peningkatan Kompetensi SDM Industri	orang	-	85	-	-	-	621,2	APBN	
	3.3 Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia	Dokumen	-	3	-	1	1	9.569,4	APBN	
	3.4 Pengoperasian Center of Excellence Industri Petrokimia	COE	-	1	-	-	-	2.380,9	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.5 Bantuan Peralatan/Mesin dalam Rangka Optimalisasi Pupuk Organik	Pabrik	-	2	-	-	-	907,0	APBN	
	3.6 SNI Wajib Industri Kimia Hulu	SNI Wajib	-	-	3	1	1	826,4	APBN	
	3.7 SDM Industri Kimia Hulu Yang Disertifikasi	orang	-	-	85	-	-	600,0	APBN	
	3.8 Produk industri kimia hulu yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	-	25	25	35	381,1	APBN	
Kegiatan 4: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-Logam	4.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia industri bahan galian nonlogam	RSNI	-	6	4	4	3	4.053,3	APBN	Kementerian Perindustrian
	4.2 SNI Wajib industri bahan galian nonlogam	SNI Wajib	-	3	2	2	2	1.564,8	APBN	
	4.3 Pengawasan SNI Wajib industri	Perusahaan	-	30	20	10	10	1.401,7	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	bahan galian nonlogam									
	4.4 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) industri bahan galian nonlogam	RSKKNI	-	2	1	1	1	1.742,3	APBN	
	4.5 SDM industri bahan galian nonlogam yang disertifikasi	orang	-	60	-	-	-	745,7	APBN	
	4.6 Mesin/Peralatan Uji dalam rangka penerapan standard mutu	Unit	-	-	1	-	-	5.842,4	APBN	
	4.7 SDM Industri bahan galian yang mengikuti diklat	orang	-	-	110	40	40	2.585,3	APBN	
	4.8 Produk industri IBGNL yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	-	10	10	10	129,2	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.9 Bantuan Mesin/Peralatan dalam rangka penumbuhan populasi IBGNL	Unit	-	-	-	1	1	907,0	APBN	
	4.10 Pilot Project IBGNL (Prioritas Nasional)	Pilot Project	-	-	-	1	-	3.025,0	APBN	
	4.11 Bantuan mesin peralatan dalam rangka pengembangan industri bahan galian non logam	Unit	-	-	-	1	1	3.065,0	APBN	
PROGRAM 2: PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1.1 Standar Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan Perkebunan	SNI	-	15	15	17	17	8.632,8	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Orang	-	300	125	50	150	1.896,0	APBN	
	1.3 Perusahaan yang mendapatkan fasilitas promosi	Perusahaan	-	150	24	-	-	13.220,3	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	produk dan investasi									
	1.4 Calon Investor yang memperoleh informasi potensi investasi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Calon Investor	-	100	50	-	-	2.422,4	APBN	
	1.5 Pilot Project/Mini Plant Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pilot Project	-	1	-	-	-	4.217,5	APBN	
	1.6 Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Prototipe	-	20	15	6	15	1.521,3	APBN	
	1.7 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Unit	-	2	1	1	1	4.895,8	APBN	
	2.1 Standar Nasional Indonesia pada industri	SNI	-	5	5	5	5	4.735,9	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Minuman dan Tembakau									
	2.2 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Minuman dan Tembakau	orang	-	25	125	92	75	2.175,3	APBN	
	2.3 Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas promosi produk dan investasi	Perusahaan	-	60	15	-	-	4.162,0	APBN	
	2.4 Calon Investor yang memperoleh informasi potensi investasi di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Calon Investor	-	50	-	-	-	879,3	APBN	
	2.5 Pusat Pengembangan Teknologi Proses dan Produk di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Pusat Pengembangan	-	-	1	1	1	107.887,8	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.6 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Mesin/Alat	-	-	5	2	4	13.980,8	APBN	
Kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	3.1 Standar pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	SNI/RSNI	-	8	8	6	8	7.112,7	APBN	Kementerian Perindustrian
	3.2 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	orang	-	250	-	-	-	825,6	APBN	
	3.3 Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas promosi produk dan investasi	Perusahaan	-	50	-	-	-	166,6	APBN	
	3.4 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Unit	-	3	3	2	1	63.290,1	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.5 Perusahaan yang difasilitasi pada Promosi/pameran Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Perusahaan	-	50	10	10	10	6.783,4	APBN	
PROGRAM 3: PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	1.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	RSNI	-	1	-	3	4	4.463,2	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	SNI Wajib	-	1	-	-	-	861,9	APBN	
	1.3 Perusahaan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang menerapkan standar mutu dan proses produksi	Perusahaan	-	4	2	-	4	2.845,6	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang disertifikasi	orang	-	140	220	-	220	9.881,7	APBN	
	1.5 SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang terlatih	Orang	-	80	-	-	-	852,5	APBN	
	1.6 Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Teknologi	-	3	3	1	2	12.872,7	APBN	
	1.7 Pusat Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Unit	-	2	1	-	2	5.635,2	APBN	
	1.8 Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang tersertifikasi Tingkat Komponen	Produk	-	15	100	-	50	2.700,1	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Dalam Negeri (TKDN)									
	1.9 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Promosi	-	10	3	3	10	6.833,1	APBN	
	1.10 Produk Industri berbasis Rel dalam rangka konektivitas antar wilayah/ kawasan jarak pendek - menengah untuk menunjang transportasi massal	Produk	-	-	-	4	4	8.000,0	APBN	
	1.11 Rekomendasi Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Galangan Kapal	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	4	4	8.500,0	APBN	
	1.12 Standar produk kapal nasional	Dokumen Standari	-	-	-	1	3	5.560,0	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
		sasi Kapal								
Kegiatan 2: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronik dan Telematika (Baru)	2.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Elektronik dan Telematika	RSNI	-	2	3	2	2	2.093,8	APBN	Kementerian Perindustrian
	2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Elektronik dan Telematika	SNI	-	2	2	1	1	1.773,5	APBN	
	2.3 Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka penerapan standar mutu	Unit	-	1	2	0	0	5.882,5	APBN	
	2.4 SDM Industri Elektronik dan Telematika yang disertifikasi	Orang	-	40	-	-	-	124,6	APBN	
	2.5 SDM Industri Elektronik dan Telematika yang terlatih	Orang	-	220	-	-	-	2.610,9	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.6 Pusat Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika	Unit	-	2	5	4	4	43.731,1	APBN	
	2.7 Produk Industri Elektronika dan Telematika yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	2	150	100	150	1.720,1	APBN	
	2.8 Bantuan mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	unit	-	5	-	-	-	134,3	APBN	
	2.9 Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika	Promosi	-	3	2	2	2	6.785,4	APBN	
Kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (Baru)	3.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Permesinan dan	RSNI	-	10	8	8	8	5.536,1	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Alat Mesin Pertanian									
	3.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	SNI Wajib	-	-	3	1	1	1.176,8	APBN	
	3.3 Pengawasan SNI Wajib Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Perusahaan	-	-	2	2	2	1.201,6	APBN	
	3.4 SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang disertifikasi	orang	-	280	280	320	320	14.184,0	APBN	
	3.5 Teknologi sektor industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Teknologi	-	5	-	-	-	22.851,1	APBN	
	3.6 Promosi kemampuan industri permesinan dan	Perusahaan	-	13	30	1	1	6.353,1	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Alat Mesin Pertanian									
	3.7 SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terlatih	orang	-	-	100	-	100	1.343,2	APBN	
	3.8 Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Pusat Pengembangan	-	-	2	2	2	26.446,0	APBN	
	3.9 Produk Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	-	150	-	150	5.038,2	APBN	
	3.10 Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terevaluasi TKDNI	PLTU	-	-	-	10	5	8.300,0		
	4.1 Rancangan Standar Nasional	RSNI	-	3	6	5	5	4.649,8	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam	Indonesia (RSNI) Industri Logam									Kementerian Perindustrian
	4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Logam	SNI Wajib	-	2	3	3	3	4.136,1	APBN	
	4.3 Perusahaan Industri Logam yang menerapkan standar mutu dan proses produksi	Perusahaan	-	5	20	-	-	1.226,4	APBN	
	4.4 Pengawasan SNI Wajib Industri Logam	Perusahaan	-	10	15	20	30	6.026,7	APBN	
	4.5 Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka penerapan standar mutu Industri Logam	Unit	-	1	-	-	-	1.031,1	APBN	
	4.6 SDM industri logam yang terlatih	orang	-	20	50	-	-	820,5	APBN	
	4.7 Produk industri logam yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	-	1	50	100	100	4.094,2	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.1 Jumlah sentra pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Sentra	-	121	10	20	22	25.565,1	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Jumlah wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	1.084	800	400	500	126.893,7	APBN	
	1.3 Jumlah ikm pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	197	15	90	90	22.029,9	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Jumlah ikm pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan	IKM	-	503	35	200	240	14.501,7	APBN	
	1.5 Jumlah ikm pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan	IKM	-	15	65	40	50	29.649,6	APBN	
	1.6 Jumlah ikm pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan	UPT	-	10	3	6	6	7.851,4	APBN	
Kegiatan 2: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan	2.1 Sentra kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan	Sentra	-	17	13	91	91	29.495,9	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kelembagaan dan mesin/peralatan									
	2.2 Wirausaha industri kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	605	800	2.144	2.144	113.196,7	APBN	
	2.3 Ikm kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mendapatkan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	75	124	150	171	34.400,5	APBN	
	2.4 Ikm kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mendapatkan penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan	IKM	-	400	112	200	227	22.656,1	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.5 Ikm kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan	IKM	-	20	65	82	82	32.055,1	APBN	
	2.6 Upt kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mendapatkan pelatihan manajemen dan penguatan mesin/peralatan	UPT	-	2	4	8	8	12.296,2	APBN	
Kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	3.1 Sentra logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Sentra	-	10	20	15	15	22.085,1	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Wirausaha industri logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	697	780	350	350	140.939,6	APBN	
	3.3 Ikm logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	20	18	40	40	10.145,8	APBN	
	3.4 Ikm logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan	IKM	-	75	25	200	200	21.689,4	APBN	
	3.5 ikm logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mengikuti program	IKM	-	20	33	30	30	17.843,4	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	restrukturisasi mesin/peralatan									
	3.6 upt logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan manajemen dan penguatan mesin/peralatan	UPT	-	6	4	4	4	11.014,2	APBN	
PROGRAM 5: PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
Kegiatan 1: Pengembangan Wilayah Industri I	1.1 Politeknik Industri Logam Morowali	Paket	-	1	1	1	-	159,3	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Akademi Komunitas Bantaeng	Paket	-	1	1	1	1	112,1	APBN	
Kegiatan 2: Pengembangan Wilayah Industri II	2.1 Politeknik Pendukung Kawasan Industri Dumai	Politeknik	-	-	-	1	-	22,5	APBN	
	2.2 Politeknik Pendukung Kawasan Industri Batu Licin	Politeknik	-	-	-	1	-	22,5	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 6: PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata	1.1 Kesepahaman di bidang industri dan investasi pariwisata	Dokumen	-	2	3	14	-	33,9	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi industri dan investasi pariwisata	Lokasi	-	4	61	10	-	46,4	APBN	
INDIKATOR SDGs: 8.2.1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS										
Kegiatan 1: Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	2.1.Peningkatan produktivitas	orang	-	8.675	3.850	7.890	7.890	36.299,25	APBN	
	2.2 Calon wirausaha baru yang dilatih	orang	-	-	9.400	10.060	10.060	62.993,44	APBN	
	2.3. Perusahaan yang dinilai tingkat kinerjanya	Perusahaan	-	174	204	510	510	14.153,80	APBN	
	2.4. Unit Usaha yang Dibina	Perusahaan	-	647	375	190	190	5.548,19	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.5. Pembinaan desa produktif	Desa	-	-	50	0	0	4.839,70	APBN	
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	3.1. Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Unit/Paket	-	5	1.073	15	19	729.412,15	APBN	
	3.2. Prasarana Balai Latihan Kerja	Lembaga/lokasi	-	2	19	3	3	10.268,36	APBN	
	3.3. Kerjasama Lembaga Pelatihan	dokumen	-	207	15	1	1	5.395,73	APBN	
	3.4. Peralatan Pelatihan	paket	-	95	1	2	2	335.304,00	APBN	
	3.5 Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	lembaga	-	-	371	1.072	1.073	35.153,21	APBN	
	3.6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Bengkel Pelatihan (PN)	unit	-	-	-	126	126	244.012,49	APBN	
	3.7. Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Development Centre)	lokasi	-	-	-	6	6	370.709,71	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	4.1.1 Lembaga Sertifikasi yang terkendali	Lembag a	-	68	250	225	225	8.801,98	APBN	
	4.2.1 Pelaksanaan Sertifikasi	orang	-	10.000	69.937	260.000	260.000	300.951,85	APBN	
PROGRAM 2: PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										
Kegiatan 1: Peningkatan Penggunaan dan Pemasaan Produk Dalam Negeri	1.1 Jumlah Pelaku usaha Binaan yang meningkat omsetnya	PMKM	-	200	300	300	300			
Kegiatan 2: Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan	2.1 Jumlah penyusunan rekomendasi peraturan terkait kebijakan usaha perdagangan	Rekome ndasi Peratura n	-	4	4	4	4			
INDIKATOR SDGs: 8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1 (a): Persentase tenaga kerja formal.										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1 (b): Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA										
Kegiatan 1: Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	1.1. Model Perluasan Kesempatan Kerja	model/r ekomendasi	-	2	10	40	40	2.903,48	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Pengembangan Model Padat Karya Infrastruktur	orang	-	-	19.096	74.500	74.500	33.076,44	APBN	
	1.3.Kerjasama pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	kerjasama	-	-	35	35	35	2.147,89	APBN	
	1.4 Wirausaha Melalui Tenaga Kerja Mandiri dengan Pola Pendampingan bagi Orang Tua Pekerja Anak	orang	-	-	-	40.000	40.000	110.000,00	APBN	
Kegiatan 2: Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	2.2. Job Fair Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	lokasi	-	-	101	50	50	41.224,51	APBN	
	2.3. Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja	orang	-	-	2.250	250	250	12.594,86	APBN	
	2.3. Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD/AKL dan Kelembagaan Penempatan	sistem	-	-	34	34	34	19.986,96	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	3.1 Tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan Padat Karya	orang	-	58.788	54.296	77.140	77.140	409.961,36	APBN	
	3.2 Wirausaha menggunakan Teknologi Sederhana	orang	-	-	1.800	2.500	2.500	32.856,99	APBN	
	3.3 Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan	orang	-	-	-	43.000	43.000	68.479,28	APBN	
	3.4 Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri	orang	-	-	4.340	-	-	15.016,10	APBN	
	3.5 Tenaga pendamping TKM	orang	-		176	1.000	1.000	3.170,10	APBN	
	3.6 TKS Pendamping Wirausaha Mandiri	orang	-	-	110	-	-	2.950,00	APBN	
	3.7 TKS Sebagai Pendamping Wirausaha Baru	orang	-	-	-	900	900	40.000,00	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1 : Peningkatan akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal	1.1 Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR)	Usaha mikro	-	27.520	5.000	15.000	15.000	118.022	APBN	
	1.2 Usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat pendampingan pada tahap pra dan pascasertifikasi hak atas tanah (koordinasi, pendampingan, monev dan pendataan)	UMK	-	10.000	10.000	10.000	10.000	71.200	APBN	
	1.3 Usaha mikro yang mendapat pendampingan sertifikasi tanah	KUMK	-	2.000	10.000	1.000	1.000	11.936	APBN	
	1.4 Koperasi pemula yang mendapatkan bimbingan dan penguatan permodalan	Koperasi	-	100	50	50	100	7.712	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2 : Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro di Bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa	2.1 Kelompok usaha bersama pra-koperasi di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang diperkuat kelembagaannya melalui pemasyarakatan, penyuluhan dan pendampingan berkoperasi (pemasyarakatan, penyuluhan, pendampingan, fasilitasi dan pendataan)	Kelompok pra-koperasi	-	625	100	400	400	7.140	APBN	
Kegiatan 3 : Penguatan sistem pendukung layanan pembiayaan dan keuangan lainnya bagi UMKM dan koperasi	3.1 Fasilitasi pengembangan lembaga penjaminan kredit daerah dan badan layanan umum daerah untuk pembiayaan UMKM dan koperasi (koordinasi dan fasilitasi)	PPKD/B LUD	-	4/6	4/10	4/10	4/8	11.200	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.1 Lembaga penjaminan kredit daerah yang difasilitasi	PPKD	-	4	4	4	4		APBN	
	3.2 Badan layanan umum daerah yang difasilitasi	BLUD	-	-	6	3	3	3.150	APBN	
	3.3 Advokasi, promosi dan intermediasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi yang didukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi	KUMKM	-	300	300	300	300	13.200	APBN	
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF										
Kegiatan 1: Pengembangan Akses Permodalan Sektor Non-Perbankan	1.1 Peningkatan permodalan untuk pelaku ekonomi kreatif pada akses non perbankan	Rp Miliar	-	80	200	220	242	70.000	APBN	Badan Ekonomi Kreatif

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Match making permodalan non perbankan antara pelaku usaha ekraf dengan sumber permodalan melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Orang	-	800	1.500	2.200	2.500	110. 000		
INDIKATOR SDGs: 8.5.1. Upah rata-rata per jam pekerja										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.1 Perusahaan Yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	perusahaan	-	450	190	990	990	9.263,49	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Pejabat HI dan Pegawai Teknis HI yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	orang	-	-	200	150	150	4.608,81	APBN	
	1.3 Pelaku HI Yang Mendapatkan Pemahaman	orang	-	3.946	3.700	500	500	10.638,76	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Mengenai Pengupahan									
	1.4 NSPK Tentang Pengupahan	naskah	-	2	2	2	2	4.005,42	APBN	
PROGRAM 2: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan	perusahaan	-	-	1.710	1.800	1.800	13.202,33	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
PROGRAM 3: PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI										
Kegiatan 1: Pengembangan kewirausahaan yang didukung kerja sama antara Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat										Kementerian Koperasi dan UMKM
	1.1 Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start up Capital)	Orang	-	4.600	6.000	6.000	5.000	732.700	APBN	
PROGRAM 4: PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, MUTU, PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI PERTANIAN										
Kegiatan 5: Pengembangan Pengelolaan Hasil Pertanian								3.025.400	APBN	Kementerian Pertanian
	1.1 Jumlah unit usaha pengolahan hasil	unit	-	263	263	263	263	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	tanaman pangan (unit)									
	1.2 Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit)	unit	-	74	74	74	74	-		
	1.3 Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit)	unit	-	155	155	155	155	-		
	1.4 Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit)	unit	-	185	185	185	185	-		
	1.5 Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian (bulan)	bulan	-	12	12	12	12	-		
INDIKATOR SDGs: 8.5.2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
INDIKATOR SDGs: 8.5.2 (a). Persentase setengah pengangguran.										
PROGRAM 1: PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA										
Kegiatan 1: Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	1.1. Model Perluasan Kesempatan Kerja	model/rekomen dasi	-	2	10	40	40	3.199,85	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Pengembangan Model Padat Karya Infrastruktur	orang	-	-	19.096	74.500	74.500	33.076,44	APBN	
	1.3.Kerjasama pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	kerjasama	-	-	35	35	-	2.147,89	APBN	
	1.4 Wirausaha Melalui Tenaga Kerja Mandiri dengan Pola Pendampingan bagi Orang Tua Pekerja Anak	orang	-	-	-	40.000	40.000	110.000,00	APBN	
Kegiatan 2: Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	2.2. Job Fair Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	lokasi	-	-	101	50	50	41.365,01	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	2.3. Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja	orang	-	-	2.250	250	250	12.594,86	APBN	
	2.6. Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD/AKL dan Kelembagaan Penempatan	sistem	-	-	34	34	34	19.986,96	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	3.1 Tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan Padat Karya	orang	-	58.788	54.296	77.140	77.140	403.613,92	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	3.2 Wirausaha menggunakan Teknologi Sederhana	orang	-	-	1.800	2.500	2.500	33.426,05	APBN	
	3.3 Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan	orang	-	-	0	43.000	43.000	68.479,28	APBN	
	3.4 Wirausahabaru melalui inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja	tenant	-		2.404	6.000	6.000	20.044,58	APBN	
	3.4 Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri	orang	-	-	4.340	-	-	17.953,08	APBN	
	3.5 Tenaga pendamping TKM	orang	-		176	1.000	1.000	20.443,05	APBN	
	3.6 TKS Pendamping Wirausaha Mandiri	orang	-	-	110	-	-	2.950,00	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.1 Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan Peningkatan Usaha dan Pemasaran	PMKM	-	1.200	1.500	1.200	1.200	-	APBN	Kementerian Perdagangan
	1.2 Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Unit	-	2.800	2.800	1.000	1.000	-	APBN	
INDIKATOR SDGs: 8.6.1 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
PROGRAM 1: PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS										
Kegiatan 1: Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	1.1 Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	-	85.515	21.481	30.244	30.244	527.620,91	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Program Pelatihan	Program	-	119	149	151	151	22.679,95	APBN	
	1.3 Penerapan Metode PBK	Lembaga	-	-	1	1	1	11.357,58	APBN	
	1.4 Pengembangan dan Penerapan SKKNI	SKKNI	-	-	45	-	-	870,83	APBN	
Kegiatan 2: Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	2.1 SDM stakeholder pemagangan dalam dan luar negeri	Orang	-	-	1.400	-	-	5.355,14	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	yang ditingkatkan kapasitasnya									
	2.2 Bertambahnya Jejaring Pemagangan	Forum/ Provinsi	-	-	33	32	32	8.889,85	APBN	
	2.3 Peningkatan kuantitas negara penerima pemagangan luar negeri	Negara	-	1	3	-	-	386,60	APBN	
	2.4 Lembaga Penyelenggara Pemagangan yang diverifikasi dan dibina	Lembag a	-	-	22	-	-	1.720,40	APBN	
	2.5 Peserta Pemagangan yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	Orang	-	7.680	7.760	-	-	47.868,09	APBN	
PROGRAM 2: PENYEDIAAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN										
								1.674.557	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha.	1.1 Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	orang	-	90.000	50.000	50.000	70.000			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2 Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha	orang	-	30.000	40.000	70.000	70.000			
	1.3 Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	kab/kota	-	15	20	20	20			
	1.4 Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan	naskah	-	36	40	40	38			
	1.5 Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	orang	-	108.000	140.000	140.000	140.000			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6 Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	lembaga	-	1.022	1.022	1.610	1.610			
	1.7 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang divalidasi	Lembaga	-	5.093	5.194	2.000	2.500			
	1.8 Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	Orang	-	175	205	325	357			
	1.9 Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	orang	-	26.000	30.000	40.000	45.000			
PROGRAM 3: PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN										
Kegiatan 1: Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan jender, dan								1.204.913	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.1 Jumlah SMK yang melaksanakan	SMK	-	73	220	200	200			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	teaching factory/technopark									
	1.2 Jumlah siswa yang melaksanakan praktik kerja industri	Orang	-	154.186	1.435.532	1.497.026	1.559.212			
	1.3 Persentase SMK yang menyediakan layanan BKK yang menjembatani dengan DU/DI	Persen	-	4	20	30	40			
	1.4 Jumlah SMK menyediakan layanan kewirausahaan	SMK	-	137	150	200	250			
	1.5 Jumlah sekolah yang menerapkan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Institusi lainnya	Sekolah	-	2.127	1.540	7.000	8.250			
	1.6 Jumlah SMK pariwisata dan kelautan/maritim yang dikembangkan untuk	SMK	-	105	100	140	140			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing									
	1.7 Jumlah SMK Pertanian yang dikembangkan untuk mendukung poros ketahanan pangan	SMK	-	32	100	160	160			
PROGRAM 4: PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas SDM Industri	1.1 Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	orang	-	1.148	25.000	32.000	32.000	392.151,09	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 SDM Asesor, Wirausaha, dan Konsultan Industri	orang	-	335	656	100	100	15.100,03	APBN	
	1.3 Infrastruktur Kompetensi (SKKNI)	SKKNI	-	34	47	20	20	40.899,91	APBN	
	1.4 Inkubator Bisnis untuk	Unit	-	-	-	2	2	2.102,31	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Pembentukan Wirausaha Industri									
	1.5 SDM Aparatur Lulusan Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis Industri	orang	-	1.148	-	250	250	32.942,31	APBN	
	1.6 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	Unit	-	-	-	10	10	5.518,59	APBN	
	1.7 Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	orang	-	-	-	500	500	1.890,00	APBN	
	1.8 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	476	200	200	41.895,26	APBN	
	1.9 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang difasilitasi	Unit	-	368	-	-	-	16.693,40	APBN	
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri	2.1 SDM Industri Berbasis Kompetensi	Siswa	-	4.493	6.395	6.256	6.256	100.108,27	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Pendidikan Kejuruan									
	2.2 SDM Industri Berbasis Kompetensi Pendidikan Vokasi	Mahasiswa	-	9.873	11.413	11.747	12.047	247.795,76	APBN	
	2.3 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	Dokumen	-	109	162	5	5	87.346,60	APBN	
	2.4 Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri	Unit	-	-	-	5	5	214.027,80	APBN	
	2.5 Peralatan Workshop, Laboratorium, dan TUK Politeknik dan Akademi Komunitas Industri	Unit	-	-	42	10	10	123.211,97	APBN	
	2.6 SDM Industri Berbasis Kompetensi Pendidikan D-1 dan D-2 Industri	orang	-	-	-	310	310	13.172,01	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.7 Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Bahan Ajar Produktif untuk SMK Industri	Kurikulum	-	-	-	18	18	309,75	APBN	
	2.8 Tenaga Pengajar Profesional (Silver Expert) di SMK	Orang	-	1.569	-	1.050	1.050	35.517,10	APBN	
	2.9 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	120	100	100	31.564,97	APBN	
	2.10 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang difasilitasi	unit	-	584	-	-	-	157.216,30	APBN	
PROGRAM 5: PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Kesepahaman di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	-	3	2	-	-	36.000	APBN	Kementerian Pariwisata

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Orang/Lokasi	-	22.835	263	34	-	202.800	APBN	
PROGRAM 6: PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO										
Kegiatan 1 : Peningkatan keterampilan usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usaha	1.1 Peserta pemasyarakatan kewirausahaan	orang	-	-	6.000	3.000	3.000	13.720	APBN	Kementerian Koperasi dan UMKM
	1.2 Peserta pelatihan kewirausahaan	orang	-	-	5.800	5.010	4.850	59.147	APBN	
	1.3 Diklat SDM usaha mikro	orang	-	1.200	-	-	-	10.000	APBN	
	1.4 Kewirausahaan sosial	orang	-	360	1.000	100	100	11.540	APBN	
	1.5 Peserta pelatihan technopreneur	orang	-	400	1.000	2.000	2.000	42.734	APBN	
PROGRAM 7: PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI										
Kegiatan 1 : Revitalisasi penyelenggaraan diklat bagi SDM UMKM dan koperasi	1.1 Lembaga diklat yang direvitalisasi dan dibangun	unit	-	3	0	0	0	30.800	APBN	Kementerian Koperasi dan UMKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(bantuan sarana dan money)									
	1.2 Pengembangan lembaga diklat dan kerjasama diklat	unit	-	1	-	-	-	24.900	APBN	
	1.3 Tenaga pengelola dan instruktur lembaga diklat, penyuluh, pendamping kelompok usaha, dan pendamping PLUT-KUMKM yang dilatih (ToT) (diklat dan pendataan)	orang	-	2.000	2.000	2.000	2.000	113.300	APBN	
	1.4 Standardisasi fasilitator diklat	orang	-	600	-	-	-	5.800	APBN	
	1.5 Kebijakan, kurikulum dan modul diklat	kurikulum/modul	-	20	20	20	20	17.600	APBN	
	1.6 Modul diklat KUMKM	Modul	-	-	10	-	-	295	APBN	
	1.7 SDM KUMKM yang mendapat fasilitasi magang	orang	-	600	500	420	300	10.773	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.8 SDM KUKM yang ditingkatkan kompetensinya melalui SKKNI (penyusunan dan sertifikasi SKKNI)	orang	-	500	500	500	500	37.700	APBN	
	1.9 SDM Koperasi dan UKM yang difasilitasi melalui SKKNI	orang	-	1.680	1.560	840	840	31.917	APBN	
PROGRAM 8: PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)										
Kegiatan 1: Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan								1.120.100	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.1 Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	orang	-	115.000	175.000	150.000	150.000			
Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur								1.421.300	APBN	
	2.1 Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	orang	-	18.000	27.000	36.000	45.000			
								2.283.100	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	3.1 Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	orang	-	2.310	2.550	2.790	3.060			
Kegiatan 4: Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan								13.016.200	APBN	
	4.1 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan	orang	-	20.600	21.700	22.800	24.000	0		
Kegiatan 5: Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan								3.550.000	APBN	
	5.1 Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship	orang	-	6.500	6.500	6.500	6.500	0		
PROGRAM 9: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Kegiatan 1 : Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi BBPPKI								28.700	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	1.1 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi	orang	-	400	500	600	700			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	aparatur pemerintah									
Kegiatan 2: Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPPKI								6.500	APBN	
	2.1 Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	orang	-	600	600	600	600			
Kegiatan 3: Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika								279.900	APBN	
	3.1 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah	orang	-	750	750	750	750			
	3.2 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	orang	-	750	750	750	750			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Rehabilitasi Sosial Anak										Kementerian Sosial
	1.1 Jumlah anak yang memperoleh bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak	anak (jiwa)	-	147.766	78.310	90.000	90.000	570.629,20	APBN	
PROGRAM 3: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak										Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.1 Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpilah, statistik gender dan anak di K/L dan Provinsi	orang	-	375	375	375	375	6.200	APBN	
	1.2 Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak	K/L dan Provinsi	-	10	10	10	9	3.150	APBN	
	1.3 Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan	K/L dan Provinsi	-	4	4	4	4	2.650	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	sistem data gender dan anak									
Kegiatan 2: Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan								35.460	APBN	
	2.1 Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	-	4	4	2	2	3.350	APBN	
	2.2 Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan	K/L dan Provinsi	-	2	2	4	4	3.480	APBN	
	2.3 Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan	Dokumen	-	1	1	1	1	500	APBN	
	2.4 Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan di K/L,	Orang	-	90	90	90	90	6.570	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas									
	2.5 Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Orang	-	11	11	11	11	5.350	APBN	
	2.6 Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	K/L dan Provinsi	-	9	12	14	14	5.330	APBN	
	2.7 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	Kegiatan	-	3	4	5	6	1.400	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan Anak di daerah	2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Provinsi	-	30	32	34	34	100.000	APBN	
INDIKATOR SDGs: 8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran										
PROGRAM 1: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	1.1 Pembinaan Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Pengawas Ketenagakerjaan	-	-	368	345	345	10	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Pembinaan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan	Lembaga	-	-	84	34	34	68.857	APBN	
	1.3 Pembinaan fungsional pengawas ketenagakerjaan	Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	201	130	130	8.995	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.1 Pengkajian keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	perusahaan	-	-	95	100	100	1.000	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	perusahaan	-	-	1.033	650	650	34.256	APBN	
	1.3 Pengembangan SDM keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	perusahaan	-	-	999	650	650	32.602	APBN	
	1.4 Pengembangan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	perusahaan	-	-	162	45	45	2.091	APBN	
	1.5 Pembinaan peran serta masyarakat di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	perusahaan	-	-	230	85	85	10.020	APBN	
	1.6 Penetapan standar keselamatan dan	perusahaan	-	-	22	65	65	1.455	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kehatan kerja (K3)									
INDIKATOR SDGs: 8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3										
PROGRAM 1: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	perusahaan	-	-	2.330	800	800	78.074,09	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	perusahaan	-	-	2.310	2.460	2.460	4.181,68	APBN	
	1.3 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	perusahaan	-	-	2.295	2.460	2.460	3.406,25	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Kesehatan Kerja	perusahaan	-	-	2.265	2.460	2.460	2.449,84	APBN	
	1.5 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	perusahaan	-	-	2.280	2.460	2.460	3.211,54	APBN	
INDIKATOR SDGs: 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA										
Kegiatan 1: Pengelolaan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	1.1 Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi	orang	-	5.014	2.030	5.730	5.730	40.112,49	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Pengusaha, pekerja/SP/SB yang memahami tata cara pembentukan LKS Bipartit	orang	-	1.960	820	250	250	4.781,65	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan	orang	-	5.161	1.550	2.800	2.800	31.190,39	APBN	
	1.5 Pengurus dan anggota organisasi pengusaha yang diberdayakan	orang	-	-	150	100	100	1.386,89	APBN	
	1.6 Anggota LKS Tripartit yang diberdayakan	orang	-	-	290	150	150	8.012,11	APBN	
	1.7 Penyebarluasan informasi tentang HI dan penguatan kelembagaan HI	orang	-	-	2.500	500	500	9.533,18	APBN	
Kegiatan 2: Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	2.1 Pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)	orang	-	-	4.450	400	400	18.592,91	APBN	
	2.2 Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	orang	-	-	170	1.700	1.700	10.213,14	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.3 Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan Pemahaman tentang Kesetaraan di Tempat Kerja	orang	-	650	740	320	320	5.712,72	APBN	
	2.4 Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pemahaman tentang Hubungan Kerja	orang	-	1.535	600	360	360	9.373,26	APBN	
	2.5 Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan Pemahaman tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	orang	-	1.445	500	600	600	6.334,44	APBN	
PROGRAM 2: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat	1.1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja dan	perusahaan	-	-	1.800	1.800	1.800	7.533	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Kebebasan Berserikat									
INDIKATOR SDGs: 8.9.1. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.										
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (a). Jumlah wisatawan mancanegara.										
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (c). Jumlah devisa sektor pariwisata.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN										
Kegiatan 1: Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	1.1 Kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi infrastruktur dan ekosistem pariwisata	Lokasi	-	4	34	34	-	72.000	APBN	Kementerian Pariwisata
Kegiatan 2: Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1 Kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Orang/Lokasi	-	22.835	263	34	-	202.800	APBN	Kementerian Pariwisata

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata	3.1 Kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi industri dan investasi pariwisata	Lokasi	-	4	61	10	-	46.400	APBN	Kementerian Pariwisata
Kegiatan 4: Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara	4.1 Publikasi di Media Elektronik Mancanegara	Media	-	20	17	-	-	489.500	APBN	Kementerian Pariwisata
	4.2 Publikasi di Media Cetak Mancanegara	Media	-	55	50	-	-	271.600	APBN	
	4.3 Publikasi di Media Ruang Mancanegara	Lokasi	-	41	43	-	-	436.400	APBN	
	4.4 Publikasi di Media Digital/Online Mancanegara	Media	-	18	20	-	-	712.500	APBN	
	4.5 Promosi elektronik mancanegara	Unit	-	120.000	5	-	-	82.400	APBN	
	4.6 Promosi cetak mancanegara	Unit	-	57	48	-	-	136.900	APBN	
	4.7 Promosi media ruang mancanegara	Unit	-	5	4	-	-	6.800	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.8 Promosi media online mancanegara	Jenis	-	8	-	-	-	74.900	APBN	
Kegiatan 5: Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara	5.1 Promosi pariwisata Indonesia di Media Elektronik Nusantara	Jumlah Promosi	-	70	40	-	-	360.500	APBN	Kementerian Pariwisata
	5.2 Promosi pariwisata Indonesia di Media Cetak Nusantara	Jumlah Promosi	-	81	80	-	-	61.600	APBN	
	5.3 Promosi pariwisata Indonesia di Media Ruang Nusantara	Jumlah Promosi	-	23	49	-	-	165.600	APBN	
	5.4 Promosi pariwisata Indonesia di Media Online Nusantara	Jumlah Promosi	-	50	10	-	-	157.800	APBN	
	5.5 Promosi pariwisata Indonesia di Media Lainnya Nusantara	Jumlah Promosi	-	30	-	-	-	15.000	APBN	
Kegiatan 6: Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	6.1 SDM yang tersertifikasi	orang	-	5.289	8.080	-	-	7.180	APBN	Kementerian Pariwisata

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pendidikan tinggi pariwisata									
INDIKATOR SDGs: 8.10.1.(b). Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO										
Kegiatan 1 : Peningkatan akses usaha mikro pada pembiayaan dan layanan keuangan lainnya	1.1 Lembaga keuangan mikro (LKM) yang mendapat penguatan (bimbingan dan pendampingan)	LKM	-	200	200	200	200	15.700	APBN	Kementerian KUKM
Kegiatan 2 : Penguatan kapasitas koperasi dan sentra usaha mikro dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan melalui pemanfaatan sumber daya lokal	2.1 Koperasi produksi/sentra usaha mikro yang diperkuat sistem bisnis dan kapasitas produksinya (skema manajemen/sistem bisnis, penguatan kapasitas. Pendampingan dan pendataan)	Koperasi /sentra usaha mikro	-	53	142	84	84	27.852	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2 Koperasi/ sentra usaha mikro/kecil yang difasilitasi pengembangan jasa pertanian dan aneka jasa	Koperasi	-	5	-	-	-	1.031	APBN	
	2.3 Koperasi pengelola jasa wisata yang ditingkatkan kapasitas usahanya (skema manajemen, penguatan kapasitas, pendampingan dan pendataan)	Koperasi	-	11	11	11	11	27.200	APBN	
	2.4 Koperasi pemula yang mendapatkan bimbingan dan penguatan pemodalan	Koperasi	-	100	50	50	100	7.712	APBN	
Kegiatan 3 : Penataan usaha informal/pedagang kaki lima di perkotaan dan daerah tujuan wisata	3.1 Pedagang skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi	PKL	-	40 (Unit)	380	1.000	1.000	28.246	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI										
Kegiatan 1 : Penguatan sistem pendukung layanan pembiayaan dan keuangan lainnya bagi UMKM dan Koperasi	1.1 Penerapan skema restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM	KUMKM	-	-	-	150	150	1.687	APBN	Kementerian KUKM
	1.2 Lembaga penjaminan kredit daerah yang difasilitasi	PPKD	-	4	4	4	4	5.000	APBN	
	1.3 Badan layanan umum daerah yang difasilitasi	BLUD	-	-	6	3	3	3.150	APBN	
	1.4 Koordinasi dan harmonisasi skema pembiayaan dan layanan keungan yang disediakan pemerintah, pemda, dunia usaha, dan lembaga keuangan bank dan non-bank bagi UMKM dan koperasi	Laporan	-	1	4	4	4	15.400	APBN	
	1.5 Advokasi, promosi, dan intermediasi pembiayaan	KUMKM	-	300	200	100	200	13.200	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2 : Penguatan kapasitas koperasi dalam menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya bagi UMKM dan Koperasi	2.1 Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produk dan jasa pembiayaan/keuangan syariah (bimbingan teknis, fasilitasi, dan pendataan)	KSP/USP syariah	-	500	500	500	500	19.700	APBN	Kementerian KUKM
	2.2 Pembiayaan syariah	KJKS / UJKS	-	250	-	-	-	3.550	APBN	
	2.3 Advokasi kerja sama antar lembaga pembiayaan / keuangan syariah	Jaringan	-	-	4	3	3	6.600	APBN	
	2.4 Koperasi dan UKM yang mendapat dukungan pengembangan usaha jasa keuangan (bimbingan teknis dan pendataan)	KUMKM	-	575	600	600	600	15.600	APBN	
	2.5 Jasa keuangan syariah	KJKS / UJKS	-	100	-	-	-	2.039	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	1.1 Terlaksananya pembangunan jalur kereta api	Km'sp	126,99	457,27 / 542,27	790,30 / 902,3	1.058,17 / 1.353,17	1.042,06 / 1.487,06	228.679.400	APBN	Kementerian Perhubungan
	1.2 Terlaksananya pengadaan material rel	Km'sp	2.030	350	550	700	700			
	1.3 Terlaksananya pengadaan material wesel	Unit	600	125	200	250	250			
	1.4 Terlaksananya pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA	Paket	12	14	14	16	16			
	1.5 Terlaksananya pembangunan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik)	Km'sp	17	24,3	32	32	40			
	1.6 Terlaksananya pengadaan dan penertiban lahan untuk kegiatan peningkatan/pembangunan prasarana perkeretaapian	Paket	34	30	31	31	32			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengelolaan Impor	1.1 Peningkatan kontribusi impor barang modal bahan baku dan bahan penolong	%	-	-	93,5	93,7	94		APBN	Kementerian Perdagangan
INDIKATOR SDGs: 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (MATRIKS K/L HAL. I.M.L.019-15)										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas SDM Industri	1.1 Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	orang	15.000	1.148	25.000	32.000	32.000	392.151.100	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 SDM Asesor, Wirausaha, dan Konsultan Industri	orang		335	656	100	100	15.100.000	APBN	
	1.3 Infrastruktur Kompetensi (SKKNI)	SKKNI	-	34	47	20	20	40.899.900	APBN	
	1.4 Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	Unit	-	-	-	2	2	2.102.300	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	Unit	-	-	-	10	10	5.518.600	APBN	
	1.5 Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	orang	-	-	-	500	500	1.890.000	APBN	
	1.7 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	476	200	200	41.895.300	APBN	
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri	2.1 SDM Industri Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	Siswa	1.490	4.493	6.395	6.256	6.256	100.108.300	APBN	
	2.2 SDM Industri Berbasis Kompetensi Pendidikan Vokasi	Mahasiswa	2.050	9.873	11.413	11.747	12.047	247.795.800	APBN	
	2.3 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	Dokumen	-	109	162	5	5	87.346.600	APBN	
	2.4 Bangunan/Gedung	Unit	-	-	-	5	5	214.027.800	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Pendidikan Vokasi Industri									
	2.5 Peralatan Workshop, Laboratorium, dan TUK Politeknik dan Akademi Komunitas Industri	Unit	-	-	42	10	10	123.212.000	APBN	
	2.6 SDM Industri Berbasis Kompetensi Pendidikan D-1 dan D-2 Industri	orang	-	-	-	310	310	13.172.000	APBN	
	2.7 Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Bahan Ajar Produktif untuk SMK Industri	Kurikulum	-	-	-	18	18	309.800	APBN	
	2.8 Tenaga Pengajar Profesional (Silver Expert) di SMK	Orang	-	1.569	-	1.050	1.050	35.517.100	APBN	
	2.9 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	120	100	100	31.565.000	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	1.1 Peningkatan Prasarana Balai Latihan Kerja	lembaga / lokasi		40	19	25	25	15.476,95		
	1.2 Bantuan Gedung/Bangunan Pelatihan	m2 / unit / paket	11.861 m2	2.996 m2	69 unit	50 paket	50 paket	180.974,14		
	1.3 Lembaga pelatihan yang mendapat bantuan peralatan	lembaga / paket	17	95	353	-	-	118.881,11		
	1.4 Peningkatan kerja sama pelatihan dengan industri dan lembaga diklat	lembaga	11	91	2	-	-	1.880,99		
Kegiatan 2: Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan	2.1 Upgading/pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta	orang (orang/angkatan)	1.262/angkatan	199	1.807	48	-	41.800,53		
Kegiatan 3: Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	3.1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	17.712	29.078	21.481	72.000	72.000	159.836,19		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	orang	295.000	28.288	47.900	210.950	200.000	143.579,27		
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri										
PROGRAM 1: PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur	1.1 Sentra pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Sentra	-	121	10	20	22	243.322	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	1084	800	400	500			
	1.3 Bantuan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	197	15	90	90			
	1.4 Penerapan sertifikasi produk	IKM	-	503	35	200	240			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	dan penguatan mesin/peralatan									
	1.5 Restrukturisasi mesin/peralatan	IKM	-	15	65	40	50			
	1.6 Restrukturisasi mesin/peralatan	UPT	-	10	3	6	6			
Kegiatan 2: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan	2.1 Sentra kimia, sandang, aneka dan kerajinan yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Sentra	-	17	13	91	91	253.449	APBN	
	2.2 Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	605	800	2.144	2.144			
	2.3 Bantuan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	75	124	150	171			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.4 Penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan	IKM	-	400	112	200	227			
	2.5 Restrukturisasi mesin/peralatan	IKM	-	20	65	82	82			
	2.6 Restrukturisasi mesin/peralatan	UPT	-	2	4	8	8			
Kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	3.1 sentra logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Sentra	-	10	20	15	15	236.608	APBN	
	3.2 Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Wirausaha	-	697	780	350	350			
	3.3 Bantuan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri	IKM	-	20	18	40	40			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca										
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI										
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	1.1 Penghargaan Industri Hijau	Penghar gaan	-	1	0	130	150	3.788.000	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Kebijakan Penurunan Emisi GRK	Kebijaka n	-	6	5	5	5	12.535.700		
	1.3 Infrastruktur Industri Hijau	Infrastr uktur	-	5	4	4	5	12.404.200		
	1.4 Capacity Building Industri Hijau	Orang	-	2	0	0	75	1.706.500		
	1.5 Kerja sama dan Sosialisasi Penerapan Industri Hijau	Kerja sama	-	3	1	2	2	17.830.400		
INDIKATOR SDGs: 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB										
PROGRAM 1: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN										
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan	1.1 Layanan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Iptek Pertahanan	Kajian/ Rekome ndasi	-	3	6	5	-	45.000.000	APBN	Kementerian Pertahanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: KONTRIBUSI ANGGARAN RISET TERHADAP PDB DARI BERBAGAI SEKTOR										
	Pemerintah Pusat	%	80,97	80,97	80,97	80,97	80,97	124.600.000	APBN	Kementerian Ristek dan Dikti
	Pemerintah Daerah	%	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	4.450.000	APBD	
	Perguruan Tinggi	%	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	4.050.000	APBN-Hibah	
	Industri Manufaktur	%	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	20.700.000	Swasta	
	Litbang Swasta	%	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33		Swasta	
PROGRAM 3: PROGRAM PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	BOPTN (Penelitian)	Judul	19579	18104	9049	15921	15921	631.202,99	APBN	Kementerian Ristek dan Dikti
		PTNBH	7	7	11	11	11		APBN	
	Insentif Riset SINas (Insinas)	Paket	250	250	250	250	250	431.000	APBN	
	Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI)	Prototyp e	3	15	69	25	25	194.378	APBN	
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL										
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	peneliti a n	5	5	5	6	7	10.000	APBN	Badan Standardisasi Nasional

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 5: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI										
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	1.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia dan Kemasan	Hasil Litbang	-	6	4	0	7	1.390	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 2: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	2.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil	Hasil Litbang	-	13	11	6	0	2.374	APBN	
Kegiatan 3: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	3.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	Hasil Litbang	-	10	7	4	4	2.109	APBN	
Kegiatan 4: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	4.1 Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri agro	Hasil Litbang	-	13	5	2	2	3.115	APBN	
Kegiatan 5: Penelitian dan Pengembangan Teknologi PULP dan Kertas	5.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas	Hasil Litbang	-	14	8	0	0	1.683	APBN	
Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	6.1 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Perkebunan	Hasil Litbang	-	7	2	0	0	779	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 7: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	7.1 Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri logam dan mesin	Hasil Litbang	-	9	4	-	-	3.429	APBN	
Kegiatan 8: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	8.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Keramik	Hasil Litbang	-	7	6	5	5	2.825	APBN	
Kegiatan 9: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	9.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik Industri	Hasil Litbang	-	10	7	3	3	3.420	APBN	
Kegiatan 10: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	10.1 Hasil Kajian Penelitian Penguasaan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	Hasil Litbang	-	6	4	0	0	1.673	APBN	
Kegiatan 11: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	11.1 Hasil Kajian Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik	Hasil Litbang	-	11	8	0	0	1.099	APBN	
Kegiatan 12: Riset dan Standardisasi Bidang Industri	12.1 Hasil Penelitian dan	Hasil Litbang	-	75	34	25	26	12.582	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Pengembangan Teknologi Industri									
PROGRAM 6: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Kegiatan 1: Penelitian dan pengembangan inovasi daerah dan aparatur	1.1. Penghargaan innovative government award bagi daerah yang melakukan inovasi	Provinsi /Kab/Kota	-	-	3 Provinsi dan 10 Kabupaten dan 10 Kota	-	-	2.500	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Replikasi inovasi daerah bidang pelayanan perizinan di daerah tertinggal	Daerah Tertinggal	-	-	2	2	-	3.000	APBN	
PROGRAM 7: BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	1.1 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan,	Provinsi / Kab/Kota	34 Provinsi	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	30.500	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penelitian Pengelolaan Hutan	1.1 Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan	Sintesa hasil penelitian	6	6	6	6	6	337.700	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan riset (penelitian)
	1.2 Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di Taman Nasional	Rancangan	3	4	7	9	12			
	1.3 Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK	Pilot IPTEK KPH	5	5	8	5	5			
	1.4 Jumlah Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian	KHDTK	4	4	4	4	4			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	2.1 Capaian IPTEK dan Persen Kemanfaatan IPTEK Revitalisasi Pemanfaatan Energi, Pangan dan Obat-obatan Alternatif Dari Hutan	Sintesa hasil penelitian	3	3	3	3	3	228.500	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan riset (penelitian)
	2.2 Pengembangan IPTEK LHK dan KPH Melalui Pilot IPTEK	Pilot IPTEK	1	1	4	1	1			
Kegiatan 3: Penelitian Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	3.1 Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH; Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan; dan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	Sintesa hasil penelitian	3	3	3	3	3	233.800	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan riset (penelitian)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Pengembangan IPTEK LHK Melalui Pilot IPTEK	Pilot IPTEK KPH	0	0	2	1	1			
	3.3 Pengelolaan laboratorium rujukan	Laboratorium	1	1	1	1	1			
	3.4 Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi	Provinsi	3	7	11	15	0			
Kegiatan 4: Penelitian Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim	4.1 Capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK Sosekjak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Sintesa hasil penelitian	3	3	3	3	3	213.200	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan riset (penelitian)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.2 Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK	Pilot IPTEK KPH	1	1	4	1	1			
	4.3 Rekomendasi kebijakan bidang LHK	Paket rekomen dasi	1	2	3	4	5			
Kegiatan 5: Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang KLHK di Daerah (15 Satker)	5.1 Bahan Sintesa Hasil Peneltian terintergrasi di seluruh Satker, Balai Besar/Balai sebanyak 75 paket	Bahan sintesa hasil peneltia n	15	30	45	60	75	1.569.600	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan riset (penelitian)
	5.2 Pilot IPTEK Satker BLI di daerah	IPTEK	15	27	50	15	15			
	5.3 Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian	KHDTK	30	30	30	30	30			
INDIKATOR SDGs: 9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk										
PROGRAM 1: PENINGKATAN JUMLAH PENELITI										
Kegiatan 1: Peningkatan jumlah peneliti dari sektor pemerintah	1.1. SDM Iptek dari Fungsional Peneliti	orang	9.308	9.556	9.556	9.556	9.556	5.000.000	APBN	LIPI dan Semua instansi yang memiliki

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
										Fungsional Peneliti
	1.2. SDM Iptek dari Fungsional Perekayasa	orang	2.332	2.295	2.295	2.295	2.295	3.000.000	APBN	BPPT dan Semua instansi yang memiliki Fungsional Perekayasa
	1.3. SDM Iptek dari Fungsional Dosen	orang	219.797	243.451	268.294	280.786	280.786		APBN	Perguruan Tinggi dan Semua instansi yang memiliki Fungsional Dosen
	1.4. SDM Iptek dari Fungsional Serumpun (Pengawas radiasi, pranata nuklir, surveyor pemetaan, analis kebijakan, dll)	orang	185	185	185	185	185		APBN	BAPETEN, BATAN, BIG, dan Semua instansi yang memiliki Fungsional serumpun
	1.5. Beasiswa SDM Iptek S2/S3 dalam negeri	orang	318	252	302	302	302	112.330	APBN	Kementerian Ristek dan Dikti

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6. Beasiswa SDM Iptek S2/S3 luar negeri	orang	220	298	348	348	348	961.123	APBN	
	1.7. Beasiswa SDM Dikti S2/S3	orang	21.343	11.930	12.640	9.266	9.266	4.481.246	APBN	
	1.8. Sertifikasi Dosen	Dosen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000	APBN	
Kegiatan 2: Peningkatan jumlah peneliti dari sektor swasta	2.1. SDM Iptek dari litbang sektor swasta	orang	2.402	2.500	2.600	2.700	2.800		Swasta	Swasta
PROGRAM 2: PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO INDUSTRI BERKELANJUTAN										
Kegiatan 1. Penelitian dan pengembangan Pertanian	1.1. Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Orang	1.859	1.807	1.804	1.782	1.792	3.456.130	APBN	Kementerian Pertanian
INDIKATOR SDGs: 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah										
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI										
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	1.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia dan Kemasan	Hasil Litbang	-	6	4	0	7	1.389.700	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 2: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	2.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan	Hasil Litbang	-	13	11	6	0	2.374.200	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Teknologi Industri Tekstil									
Kegiatan 3: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	3.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	Hasil Litbang	-	10	7	4	4	2.109.300	APBN	
Kegiatan 4: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	4.1 Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri agro	Hasil Litbang	-	13	5	2	2	3.115.200	APBN	
Kegiatan 5: Penelitian dan Pengembangan Teknologi PULP dan Kertas	5.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas	Hasil Litbang	-	14	8	0	0	1.683.400	APBN	
Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	6.1 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Perkebunan	Hasil Litbang	-	7	2	0	0	778.600	APBN	
Kegiatan 7: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	7.1 Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri logam dan mesin	Hasil Litbang	-	9	4			3.429.000	APBN	
Kegiatan 8: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	8.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan	Hasil Litbang	-	7	6	5	5	2.825.300	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penelitian Pengelolaan Hutan	1.1 Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan	Orang	500	500	497	530	530	337.500	APBN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Seluruh Kementerian/Lembaga yang melakukan riset (penelitian) 1. Balitbang KLHK
	1.2 Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di Taman Nasional									
	1.3 Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK									
	1.4 Jumlah Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian									

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Penelitian Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	3.2 Pengembangan IPTEK LHK Melalui Pilot IPTEK							233.900	APBN	
	3.3 Pengelolaan laboratorium rujukan									
	3.4 Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi									
Kegiatan 4: Penelitian Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim	4.1 Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK Sosekjak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan							213.800	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				2016	2017	2018	2019									
	4.2 Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK															
	4.3 Rekomendasi kebijakan bidang LHK															
Kegiatan 5: Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang KLHK di Daerah (15 Satker)	5.1 Bahan Sintesis Hasil Penelitian terintegrasi di seluruh Satker, Balai Besar/Balai sebanyak 75 paket														1.569	APBN
	5.2 Pilot IPTEK Satker BLI di daerah															
	5.3 Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian															
PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL																
Kegiatan 1: Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Regulasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Peraturan	1	1	2 permen 1 perpres	11	13	7.000	APBN	Badan Standardisasi Nasional						
Kegiatan 2: Perumusan Standar	Standar Nasional Indonesia (SNI)	SNI	500	500	500	500	500	40.000	APBN							

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Peningkatan Penerapan Standar	Skema penerapan standar	Skema	25	25	50	75	75	20.000	APBN	
	Prasarana penerapan standar	Organisasi	15	15	20	25	30	7.500	APBN	
INDIKATOR SDGs: 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband										
PROGRAM 1: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL (MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HAL II.9.M-21)										
Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.1 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	%	20	30	50	70	100	9.172*	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kegiatan 2: Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran	2.1 Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional	%	82	82	86	93	100	7.810.000* (Estimasi)		
PROGRAM 2: PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA										
Kegiatan 1: Pelayanan Layanan Telekomunikasi Universal di daerah 3T	1.1 Penyediaan Akses BTS (di daerah USO)	Lokasi	125	125	125	125	125	4424*	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam										
PROGRAM 1: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL (MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HAL II.9.M-21)										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.1 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi	BTS	125	125 (250 kumulatif)	125 (375 kumulatif)	125 (500 kumulatif)	125 (625 kumulatif)	4.424	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet										
PROGRAM 1: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL (MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HAL II.9.M-21)										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.1 Jumlah penyediaan akses internet	Lokasi	800	800	800	800	800	6250*	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kegiatan 2: Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran	2.1 Jumlah rusunawa yang terlayani internet	Rusunawa	-	-	-	-	-			
	2.2 Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses internet	Lokasi	20	20	30	30	30			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan)	Unit	170	30	20	30	30	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan)	Unit	12.003	5.350	1.000	7.300	7.300	-	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 2: Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	2.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Pesisir, PPK, dan PAN)	Unit	0	0	0	100	100	-	APBN	Kementerian Sosial

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pesisir, PPK dan PAN)	Unit	0	410	710	3475	3475	-	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 3: JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN										
Kegiatan 1: Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan	1.1 Terlaksananya subsidi pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Juta Rumah Tangga	15,5	15,5	14,2	5,5	3	64.387.000	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	Kab/Kota	0	0	44 Kota	98 Kota dan 217 Kabupaten	Semua Kota dan Sebagian Besar Kabupaten	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	2.1 Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin (PKH).	Keluarga	2.8 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta	-	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 3: Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	3.1 Terlaksananya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi penduduk miskin dan rentan	Juta Orang	87,8	91,1 (a)	92,38 (a)	92.4 (b)	107,2	-	APBN	Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, DJSN
	3.2 Proporsi peserta formal Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase	6	22,59 (a)	24,73 (a)	27,15	100	-	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, DJSN
	3.3 Proporsi peserta informal Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase	1	1,17 (a)	1,41 (a)	1,98	10	-	APBN	Kementerian Koordinator Bidang PMK, DJSN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah	4.1 Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagianak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin.	Orang	11 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 4: JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN										
Kegiatan 1: Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran	1.1 Terlaksananya subsidi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan.	Triliun Rp	85,75	69,76	48,56	52,66	52,66	108,8 (sama dengan anggaran Keg. 1 dibawah dikarenakan merupakan satu unit eselon II)	APBN	Kementerian ESDM
	1.2 Terlaksananya subsidi (BBM) dan elpiji 3 kg bagi rumah tangga miskin dan rentan serta UKM.	Triliun Rp	229	65	30,12	10,298	10,298	185,96		
PROGRAM 5: PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Dasar	1.1 Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.	orang	52.333	53.307	28.366	28.383	31.220	1.911.323,96	APBN	Kementerian Sosial
	1.2 Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas	orang	0	0	2.500	3.000	3.500	24.191,88	APBN	Kementerian Sosial
Kegiatan 2: Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	2.1 Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	Kab/kota	0	50	70	130	150	75,000	APBN	Kementerian Sosial
PROGRAM 6: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran	Provinsi	-	-	-	9	9	10.175.000	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Pelayanan terpadu pencatatan sipil	Daerah	548	548	548	548	548	83.361.513	APBN	Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan 2: Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2.1. Terwujudnya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan K/L untuk pelayanan publik	Kegiatan	-	-	1	1	1	6.387.500	APBN	Kementerian Dalam Negeri
PROGRAM 7: PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	1.1 KUKM yang difasilitasi peningkatan produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), standarisasi mutu, dan sertifikasi produk	KUMKM	1450	-	-	-	-	10.560,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.2 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk	KUMKM	-	500	200	150 /1980	150	10,249	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi merek dan pengemasan	KUMKM	-	350	1.000	1.314	684	8.446,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.4 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan, dan Obat, SVLK, Iso, dll)	KUMKM	-	1.000	900	300	300	10.745,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.5 KUKM yang difasilitasi standarisasi dan mutu produk untuk ekspor	KUMKM	-	-	-	180	180	5,604	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.6 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi sertifikasi untuk ekspor	KUMKM	-	-	-	340	340	3,196	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.7 Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar melalui koperasi	Unit	65	-	-	-	-	58,500	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.8 Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi melalui pasar rakyat	UMI	1015	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.9 Jumlah PKL yang difasilitasi memperoleh kepastiaan tempat usaha	UMI	1730	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.10 Koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan manajemen	Unit	-	75	-	-	-	86.542,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.11 Pedagangan skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang di fasilitasi penataan lokasi, sarana usaha dan promosi	UMI	-	40	-	-	-	1.885,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.12 Revitalisasi pasar rakyat yang di kelola koperasi	Unit	-	-	36	26	26	97,000	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.13 Revitalisasi pasar rakyat yang di kelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Unit	-	-	14	25	25	67,500	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.14 Pedagangan skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang di fasilitasi penataan lokasi dan promosi	Orang	-	-	380	1000	1000	26,360	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.15 Meningkatkan volume usaha dan tenaga kerja koperasi produksi/ sentra usaha mikro yang diperkuat sistim bisnis dan kapasitas produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan, industri, kerajinan, dan pertambangan,	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	103	-	-	-	-		APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	ketenagalistrikan dan aneka usaha									
	1.16 Meningkatkan volume usaha dan tenaga kerja koperasi produksi yang diperkuat kapasitasnya dalam pengadaan sarana produksi, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan pendampingan, pendataan, skema manajemen, penguatan kapasitas,	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	15	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pendampingan, pendataan									
	1.16 Meningkatnya volume usaha dan tenaga kerja koperasi pengelolaan jasa wisata yang ditingkatkan kapasitas usahanya	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	6	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.17 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang diperkuat sistim bisnisnya	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	53	-	-	-	7.396,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.18 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang di fasilitasi penerapan	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	109	-	-	-	11.571,9	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	teknologi tepat guna									
	1.19 Koperasi/ sentra usaha mikro/ kecil yang di fasilitasi pengembangan jasa pertanian dan aneka jasa	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	5	-	-	-	1.031,4	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.20 Koperasi / sentra usaha mikro tanaman pangan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	20	11	11	2.869,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.21 Koperasi / sentra usaha mikro hortikultura yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	10	5	5	1.206,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.22 Koperasi / sentra usaha mikro perkebunan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	10	9	9	3,430	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.23 Koperasi / sentra usaha mikro perikanan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	20	8	8	2.658,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.24 Koperasi / sentra usaha mikro peternakan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	20	8	8	2.487,4	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.25 Koperasi / sentra usaha mikro pengolahan hasil perikanan dan peternakan yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	12	6	6	1,851	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.26 Koperasi / sentra usaha mikro industri manufaktur yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	25	16	16	3.692,3	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.27 Koperasi / sentra usaha mikro industri kreatif yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	-	11	11	556,5	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.28 Koperasi / sentra usaha mikro jasa dan aneka usaha yang diperkuat sistem bisnis	Koperasi / Sentra Usaha Mikro	-	-	25	10	10	2.495,9	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.29 Jumlah KUKM yang mengikuti pameran (Smesco Festival)	KUKM	780	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.30 Fasilitasi KUKM untuk partisipasi pada pameran nasional dan regional	KUKM	412	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.31 Jumlah KUKM yang mendapat fasilitasi akses ekspor (melalui pameran luar negeri dan peningkatan daya saing)	KUKM	350	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.32 Jumlah KUKM yang difasilitasi Kemitraan (Kemitraan Waralaba dan Sub Kontrak)	KUMKM	800	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.33 Jumlah KUKM yang difasilitasi temu konsultasi pengembangan kemitraan KUMKM berbasis investasi	KUMKM	240	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.34 Trading House Koperasi dan UMKM	Unit	-	1	1	1	1	39,122	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.35 Fasilitasi promosi dan pemasaran produk KUKM	Bulan	-	12	12	12	12	25.596,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.36 Promosi dan Pemasaran dalam negeri	KUMKM	-	830	400	700	700	39.769,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.37 Promosi dan pemasaran luar negeri	KUKM	-	150	60	34	30	24.613,6	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.38 Fasilitasi penerapan e-commerce	KUMKM	-	200	300	700	700	5.822,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	1.39 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran	KUMKM	-	1000	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.40 Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai/pasok	Koperasi	-	200	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
Kegiatan 2: Perluasan Akses Pembiayaan	2.1 UMKM yang di dampingi untuk mengkases program KUR	UMKM	18836	-	-	-	-	6.397,7	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.2 Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit	Usaha Mikro	-	27520	-	-	-	15,600	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.3 Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola (KUR)	Usaha Mikro	-	-	27520	15000	15000	27,009	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.4 Wirausaha pemula yang mendapatkan start up capital	Wirausaha Pemula	8362	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	2.5 Wirausaha pemula yang di dukung modal awal usaha	Orang	-	400	1200	1831	2000	98.850,3	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	3.1 Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Unit	-	5	3	5	5	70,600	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
Kegiatan 4: Pengembangan Kewirausahaan	4.1 Jumlah peserta pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	11770	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.2 Peserta pelatihan kewirausahaan	Orang	-	5000	5800	5010	4850	136.949,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.3 Peserta pelatihan Technopreneur	Orang	-	400	1000	2000	2000	42,734	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.4 Fasilitasi Inkubator bisnis dan teknologi	Inkubator	-	20	2	10	10	8.493,1	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	4.5 Peserta Labotarium Kewirausahaan	Unit	-	-	2	-	-	375,8	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
Kegiatan 5: Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan, dan perlindungan Usaha	5.1 Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi	Laporan	-	1	-	-	-	1,285	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM
	5.2 Penggabungan, peleburan, dan	Koperasi	-	-	1256	1000	1000	3.323,2	APBN	Kementerian Koperasi dan UKM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	1.1 Jumlah kecamatan yang tercakup dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) di kawasan perdesaan dan dukungan sarana dan prasarana.	Kecamatan	183	1	3	8	8	530.000	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal										
PROGRAM 1: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MATRIKS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA HAL II.M.L-067-21)										
Kegiatan 1: Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	1.1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pengembangan ekonomi di daerah tertinggal	kabupaten	94	75	42	16	16	391.700	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kegiatan 2: Pengembangan SDA dan LH di Daerah Tertinggal	2.1 Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SDA dan LH	kabupaten	55	60	24	10	10	201.100		
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MATRIKS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA)										
Kegiatan 1: Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	1.1 Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	kabupaten	71	75	32	37	37	960.400	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PROGRAM 2: PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU (MATRIKS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA)										
Kegiatan 1: Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.1 Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan	kabupaten	16	25	18	27	27	152.100	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kegiatan 2: Pengembangan Daerah Perbatasan	2.1 Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan	kabupaten	20	35	25	16	16	770.800		
Kegiatan 3: Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	3.1 Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	kabupaten	20	63	33	20	20	303.890		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs: 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM										
Kegiatan 1 Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai KtP	Pengguna	10	10	10	10	10	500 (Telah di-tag di indikator 16.b.1)	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah pengguna layanan usia 18-24 ahun yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan	Orang	10	10	10	10	10	500 (Telah di-tag di indikator 16.b.1)	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil										
PROGRAM 1: PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (KEMENKO POLHUKAM)										
Kegiatan 1 : Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	1.1 Indeks Kebebasan Sipil	Skor	80,3	76,45	85	86	87	52.107,773 (Telah di-tag di indikator 16.7.2)	APBN	Kemenko Polhukam

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: PEMBINAAN POLITIK DAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN UMUM (DITJEN POLPUM, KEMENDAGRI)										
Kegiatan 1: Fasilitasi Politik Dalam Negeri	1.1 Penguatan Pokja Demokrasi (Bimbingan, Supervisi dan evaluasi kinerja pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI))	Provinsi	34	34	34	10	15	10.024 (Telah di-tag di indikator 16.7.2)	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
PROGRAM 1: PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM										
Kegiatan 1: Penyelesaian Pelanggaran HAM	1.1 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Paniai	Kasus	-	-	-	3	3	3.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.2 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	Penyelidikan	3 (2015)	3	4	4	4	7.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.3 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	Kasus	400 (2015)	3.850	1.024	600	610	27.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Pengaduan yang dikelola oleh Komnas HAM	Pengaduan	-	7.500	7.500	7.500	7.500	6.700 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.5 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi	Kasus	48 (2016)	48	102	77	85	8.800 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
PROGRAM 2: PROGRAM PEMAJUAN HAM. (MATRIKS HAL. II.M.L.013-40)										
Kegiatan 1: Program Pemajuan HAM.	1.1 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	Persentase	50	50	50	50	50	4.400 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Kemenkumham (Ditjen HAM)
Kegiatan 2: Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1.2 Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM	Kasus	180 (2017)	-	180	180	180			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 3: PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. (MATRIKS KL HAL. II.M.L.006-22)										
Kegiatan 1: Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	1.1 Jumlah penanganan perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat, dan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara	-	-	-	-	-	200 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.a)	APBN	Kejaksaan Republik Indonesia
INDIKATOR 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM (MATRIKS KL HAL. II.M.L.074-7)										
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah laporan pemantauan yang dihasilkan dalam 12 bulan terakhir	Laporan	1	1	1	1	1	2.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.b)	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 12 bulan terakhir	Pengaduan	10	10	10	10	10	1.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.b)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai KtP	Pengguna	10	10	10	10	10	1.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.b)	APBN	
PROGRAM 2: PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Pengembangan Konsep penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Konsep	1	1	2	2	2	2.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.b)	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/kelompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendukung kerja-	Inisiatif	1	1	3	3	3	1.000 (Telah di-tag di indikator 16.10.1.b)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	1.1 Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hak asasi manusia yang responsif gender	Rekomendasi	-	-	20	20	20	5.500	APBN	Kemenkumham
PROGRAM 3: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. (MATRIKS HAL. II.M.L.047-1)										
Kegiatan 1: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.1 Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	19	22	22	18	16	15.310 (Indikator) 529.680 (Program)	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.2 Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	K/L Prov/Kab/Kota Organisasi	K/L: 40 Prov/Kab/Kota: 34 Organisasi: 20	K/L: 45 Prov/Kab/Kota: 34 Organisasi: 20	K/L: 50 Prov/Kab/Kota: 34 Organisasi: 20	K/L: 55 Prov/Kab/Kota: 34 Organisasi: 20	K/L: 60 Prov/Kab/Kota: 34 Organisasi: 20	K/L: 18.530 (Indikator) Prov/Kab/Kota: 43.130 (Indikator) Organisasi: 10.850 (Indikator) 529.680 (Program)		
	1.3 Jumlah kebijakan yang melaksanakan	Kebijakan	9	7	5	4	4	16.620 (Indikator)		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	perlindungan perempuan							529.680 (Program)		
	1.4 Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	K/L Prov Organisasi	K/L : 10 Prov : 20 Organisasi : 10	K/L : 15 Prov : 25 Organisasi : 10	K/L : 15 Prov : 30 Organisasi : 10	K/L : 20 Prov : 34 Organisasi : 10	K/L : 20 Prov : 34 Organisasi : 10	K/L : 50.940 (Indikator) Prov : 39.620 (Indikator) Organisasi : 5.100 (Indikator) 529.680 (Program)		
	1.5 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	50	55	60	65	70	20.230 (Indikator) 529.680 (Program)		
PROGRAM 4: PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Rekomendasi	-	-	2	2	-	-	APBN	Komnas Perempuan
PROGRAM 5: PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

[illegible]

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR 10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB. INDIKATOR 10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. INDIKATOR 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
PROGRAM 1: PENATAAN KELEMBAGAAN JAMINAN SOSIAL (SJSN)										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial secara terpadu	1.1 Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial ketenagakerjaan	persen	50	100	100	100	1	107.800 (Telah di-tag di indikator 1.3.1(b))	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	1.2 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi terpadu SJSN bidang ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2: Penyusunan Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	2.1 Jumlah draft t peraturan pelaksanaan SJSN	Dokumen	6	6	6	6	6		APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kegiatan 3: Pelaksanaan sosialisasi SJSN	3.1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan , pameran,	Dokumen	6	6	6	6	6		APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	foum komunikasi dan kerjasama									
PROGRAM 2: PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.1. Peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	orang	5600	6687	7985	9535	11386	340.240 (Telah di-tag di indikator 1.3.1(b))	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	7500	-	-	-			
	1.3 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	-	9312	-	-			
	1.4 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial	orang	-	-	-	4615	4615			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5 Jumlah NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	2	-	-	-			
	1.6 NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	-	2	-	-			
	1.7 NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja	naskah	-	-	-	4	4			
	1.8 Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam perluasan	bulan	-	12	-	-	-			
	1.9 Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam perluasan	bulan	-	-	12	-	-			
	1.10 Peningkatan koordinasi antarlembaga dalam perluasan	orang	-	-	-	1480	1480			
	1.11 Analisis pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja	Naskah	2	2	2	3	3			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	1.1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN	Persentase	90	92	94	95	96	230.800	APBN	Kementerian Luar Negeri
	1.2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN	Persentase	90	92	94	95	96	0		
	1.3 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar ekonomi ASEAN	Persentase	85	85	87	87	90	33.800		
	1.4 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya ASEAN	Persentase	85	87	89	91	93	28.000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: PENINGKATAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL. II.5.M-24)										
Kegiatan 1: Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	1.1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral	Persentase	84	84	84	84	84	2.927.400	APBN	Kementerian Luar Negeri
	1.2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral	Persentase	78	78	78	78	78			
	1.3 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme	Persentase	90	90	90	90	90	35.900		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme	Persentase	90	90	90	90	90			
Kegiatan 2: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	2.1 Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima di Pertemuan Fora Kerjasama Intra-kawasan dan ditindaklanjuti/diimplementasikan	Persentase	60	60	60	60	60	18.900		
Kegiatan 3: Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	3.1 Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang	Persentase	80	80	80	80	80	5.600		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	disampaikan ke stakeholders.									
Kegiatan 4: Peningkatan Kemenlu Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	4.1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI	Persentase	80	80	80	80	80	14.800		
	4.2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI	Persentase	70	70	70	70	70	1.400		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	4.3 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup	Persentase	85	85	85	85	85	24.400		
	4.4 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup	Persentase	80	80	80	80	80			
Kegiatan 5: Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	5.1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN.	Persentase	85	87	90	93	95			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 6: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	6.1 Persentase prakarsa / inisiatif / rekomendasi Indonesia yang diterima di Pertemuan Fora Kerjasama Intra-kawasan	Persentase	90	90	90	90	90	49.300		
	6.2 Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima di Pertemuan Fora Kerjasama Intra-kawasan dan ditindaklanjuti/diimplementasikan	Persentase	60	60	60	60	60	18.900		
Kegiatan 7: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	7.1 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	Persentase	100	-	-	-	-	1.740		
	7.2 Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora kerja sama		9	-	-	-	-	1.700		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	intrakawasan Amerika dan Eropa									
Kegiatan 8: Optimalisasi Diplomasi Kemenlu Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional	8.1 Persentase pendapat hukum dalam proses perumusan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	19.600		
	8.2 Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya yang disampaikan ke stakeholders	Persentase	100	-	-	-	-	19.600		
PROGRAM 3: PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL. II.5.M-37)										
Kegiatan 1: Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	1.1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi	Persentase	80	80	80	80	80	17.300	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	internasional negara berkembang									
	1.2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	Persentase	70	70	70	70	70			
PROGRAM 4: PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMAJUAN DEMOKRASI DAN HAM (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL. II.5.M-39)										
Kegiatan 1: Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	1.1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta	Persentase	85	85	85	85	85		APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	1.1 Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan	Dokumen kerjasama	10	10	12	14	15	29.800		BNP2TKI
PROGRAM 2: PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL.II.3.M-73)										
Kegiatan 1: Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	1.1 Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran	lokasi/negara	-	13	13 (b)	13 (b)	13			Kementerian Ketenagakerjaan
	2.1 Jumlah fasilitasi kerjasama internasional dalam rangka penguatan penempatan dan perlindungan TKI	Dokumen kerjasama	5	5	5	5	5			
	3.1 Nota kesepakatan bilatera dengan negara tujuan yang menjamin perlindungan pekerja migran	dokumen	-	-	2	5	8			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	3.2 Merevisi dan menyepakati nota kesepakatan bilateral dengan negara tujuan	Negara	5	3	2	2	2			
INDIKATOR 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI										
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Pengaduan	1.1 Persentase pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	Persentase	100	100	100	100	100	53.900		BNP2TKI
PROGRAM 2: PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL.II.3.M-73)										
Kegiatan 1: Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	1.1 Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	kasus	100	100	100	100	100	-		Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Jumlah fasilitasi perlindungan TKLN	lokasi	100	100	100	100	100	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2.1 Satuan Tugas Pencegahan TKI Non-Presedural (Laporan 2015 dan 2016, serta RKA K/L 2017)	lokasi	-	21	21	-	-	-		
	1.2.2 Pelayanan terhadap TKI bermasalah (RKA K/L 2017)	lokasi	-	-	15	-	-	-		
	1.2.3 Perlindungan TKLN (KRISNA)	lokasi	-	-	-	100	100	-		
	1.3 Jumlah layanan perizinan dan pembinaan kelembagaan dan penunjangnya	izin	-	300	300 (RKA K/L 2017)	300 (KRISNA)	300 (KRISNA)	-		
	1.3.1 Pelayanan Terpadu Satu Atap	lokasi	-	-	10 (RKA K/L 2017)	-	-	-		
	1.3.2 Pembinaan kelembagaan dan penunjangnya	lokasi	-	-	20	20	-	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKLN	kegiatan	-	-	1		-	-		
	1.5 Menyusun grand design mekanisme penempatan pekerja migran		Grand design - - mekanisme perlindungan dan penempatan	-	-	-	-	-		
	1.6 Memperbaiki tata kelola kelembagaan pelayanan pekerja migran			-	-	-	-	-		
	1.7 Amandemen UU 39/2004 dan menyusun aturan turunannya		Persiapan	Amandemen UU 39/2004	Aturan turunan	Aturan turunan	Aturan turunan	-		
	1.8 Jumlah dinas kabupaten/kota memberi pelayanan pekerja migran, melakukan sosialisasi pemilihan pekerjaan dan prosedur bekerja di luar negeri di	Kabupaten/Kota	100	50	100	150	150	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	daerah kantong pekerja migran									
Kegiatan 2: Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	2.1 Jumlah lokasi pelaksanaan informasi pasar kerja di negara tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan calon pekerja migran	Lokasi	5	9	9	9	9	571.680		
INDIKATOR 10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL										
Kegiatan 1: Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	1.1 Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)		9,05	8,47	7,92	7,33	6,78	574.200	APBN	Kementerian Perdagangan
	1.2 Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013		38,32	33,74	29,16	24,58	20			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR 10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (MATRIKS PEMBANGUNAN HAL. II.3.M-52)										
Kegiatan 1: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	1.1 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti	Persentase	85	85	85	85	90	5.500	APBN	Kementerian Koordinator Perekonomian
TUJUAN 17										
INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP menurut sumbernya;										
INDIKATOR 17.1.1. (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB;										
INDIKATOR 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK										
Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin	Persen	-	100	100	100	100	38.931,34	APBN	Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, DJP, Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR 17.3.2. (a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap total GDP.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA										
Kegiatan 1: Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	1.1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Penempatan TKLN Berdasarkan Okupasi (RPJMN)	Kasus	-	100	100	100	100	863.370 (RPJMN)	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	1.2 Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran (RPJMN)	Lokasi/ Negara	-	13	13	13	13			
	1.3 Jumlah Fasilitas Perlindungan TKLN (RPJMN)	Lokasi	-	100	100	100	100			
	1.4 Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural (Laporan 2016 dan RKA KL 2017)	Lokasi	-	21	21	-	-			
	1.5 Pelayanan terhadap TKI bermasalah (RKA KL 2017)	Lokasi	-	-	15	-	-			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6 Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (KRISNA)	Lokasi	-	-	-	100	100			
	1.7 Jumlah Layanan Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan dan Penunjangnya	Izin	-	300	300	300	300			
	1.8 Pelayanan Terpadu Satu Atap (RKA KL 2017)	Lokasi	-	-	10	-	-			
	1.9 Pembinaan Kelembagaan dan Penunjangnya (KRISNA)	Lokasi	-	-	20	20	-			
	1.10 Jumlah Fasilitas Kerjasama Internasional Dalam Rangka Penguatan Penempatan dan Perlindungan TKI (RPJMN)	Dokumen	-	5	5	5	5			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.11 Nota Kesepakatan Bilateral dengan Negara Tujuan yang Menjamin Perlindungan Pekerja Migran (RKAKL 2017 dan KRISNA)	Dokume n	-	-	2	5	8			
	1.12 Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri	Kegiatan	-	-	1	-	-			
INDIKATOR 17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO										
Kegiatan 1: Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang	1.1 Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang	Persen	100	100	100	100	100	8.314,67	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 2: 1. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan 2. Pengelolaan Pinjaman 3. Pengelolaan Surat Utang Negara 4. Pengelolaan Pembiayaan Syariah	2.1 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan	Persen	100	100	100	100	100	54.782,56	APBN	Kementerian Keuangan
	2.2 Persentase pencapaian target	Persen	100	100	100	100	100	28.712,53	APBN	Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	tingkat likuiditas pasar SBN									
	2.3 Persentase pencapaian target risiko portofolio utang	Persen	100	100	100	100	100	21.183,96	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 3: Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	3.1 Persentase pencapaian target rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan	Persen	-	80	80	100	100	17.322,87	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 4: Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	4.1 Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah	Persen	-	80	100	100	100	16.243,92	APBN	Kementerian Keuangan
INDIKATOR 17.6.1. (a) Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;										
INDIKATOR 17.9.1. (a) Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM KERANGKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR										
Kegiatan 1: Training on Records and Archives Management	1.1 Jumlah training on Records and Archives Management	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	2.652	APBN	ANRI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Kegiatan Workshop KSST	2.1 Jumlah Workshop KSST	Worksh op	-	-	1	-	-	194,57	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 3: Pelatihan internasional dalam rangka KSST	3.1 Jumlah Pelatihan dalam rangka KSST	Training / Pelatiha n	-	-	1	3	-	2.337,14	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 4: Tim Pembangunan Institusi Badan Pemberian Bantuan Teknis Indonesia dalam Kerangka KSST	4.1 Pembentukan tim pembangunan institusi Badan Pemberian Bantuan Teknis Indonesia dalam Kerangka KSST	Institusi	-	-	1	-	-	254,1	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 5: Penyusunan buku Laporan Pelaksanaan kegiatan KSST TA 2017	5.1 Jumlah buku laporan pelaksanaan kegiatan KSST TA 2017	Dokume n	-	-	-	1	-	50	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 6: Penyusunan Buku Keunggulan Komparatif KSST Kementerian Keuangan TA 2018	6.1 Jumlah buku keunggulan komparatif KSST Kementerian Keuangan TA 2018	Dokume n	-	-	-	1	-	46	APBN	Kementerian Keuangan
Kegiatan 7: Pendampingan Penyusunan Regulasi Teknis di bidang Metrologi Legal di Timor Leste	7.1 Jumlah pendampingan penyusunan regulasi teknis di	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	2000	APBN	Kementerian Perdagangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	bidang Metrologi Legal di Timor Leste									
Kegiatan 8: Bimbingan Teknis Penyusunan Regulasi di Bidang Pengawasan Metrologi Legal di Timor Leste	8.1 Jumlah bimbingan teknis penyusunan regulasi di bidang pengawasan metrologi legal di Timor Leste	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	500	APBN	Kementerian Perdagangan
Kegiatan 9: Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Pemberian Bantuan Pos Ukur Ulang untuk PTU di Timor Leste	9.1 Jumlah pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Pemberian bantuan pos ukur ulang untuk PTU di Timor Leste	PTU	-	-	-	1	-	1000	APBN	Kementerian Perdagangan
Kegiatan 10: Sosialisasi Budaya Tertib Ukur Bidang Perdagangan di Timor Leste	10.1 Jumlah sosialisasi budaya tertib ukur bidang perdagangan di Timor Leste	Seminar Capacity Building	-	-	-	1	-	500	APBN	Kementerian Perdagangan
Kegiatan 11: Keseekretariatan Kerjasama Bidang Infrastruktur Indonesia-Timor Leste tahun 2017	11.1 Jumlah koordinasi melalui keseekretariatan kerjasama bidang infrastruktur	Kegiatan	-	-	1	-	-	750	APBN	Kementerian PU-PERA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Indonesia Timor Leste tahun 2017									
Kegiatan 12: Sarana Penunjang Bimbingan Teknis	12.1 Jumlah dokumen sarana penunjang bimbingan teknis	Dokumen	-	-	1	-	-	200	APBN	Kementerian PU-PERA
Kegiatan 13: Koordinasi kemitraan Lingkup Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi kemitraan dengan K/L atau mitra dalam penyediaan perumahan	13.1 Jumlah koordinasi kemitraan	Koordinasi	-	-	1	-	-	750	APBN	Kementerian PU-PERA
Kegiatan 14: Kerjasama dalam dan luar negeri	14.1 Kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri	Kegiatan	-	-	1	-	-	300	APBN	Kementerian PU-PERA
Kegiatan 15: Pendampingan kerjasama pelatihan	15.1 Kegiatan pendampingan kerjasama pelatihan	Training / Pelatihan	-	-	1	-	-	400	APBN	Kementerian PU-PERA
Kegiatan 16: Dukungan kerjasama regional dan global pengembangan infrastruktur	16.1 Jumlah koordinasi pendukung kerjasama regional dan global pengembangan infrastruktur	Koordinasi	-	-	1	-	-	454	APBN	Kementerian PU-PERA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 17: Beasiswa Program Darmasiswa RI	17.1 Jumlah program beasiswa Darmasiswa RI	Program Beasiswa	-	-	1	1	-	85.454,54	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 18: Beasiswa Unggulan	18.1 Jumlah program beasiswa unggulan	Program Beasiswa	-	-	1	1	-	2000	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 19: International Training on Firefighting for Timor Leste	19.1 Jumlah International Training on Firefighting for Timor Leste	Training / Pelatihan	-	-	1	-	-	1.024,68	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 20: Dispatch Expert on Conference and Protocol Management for PNG	20.1 Jumlah Dispatch Expert on Conference and Protocol Management for PNG	Expert Dispatch	-	-	1	-	-	988,134	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 21: International Training on Anti-riot Terror for MSG and Pasific Islands Development Forum	21.1 Jumlah International Training on Anti-riot Terror for MSG and Pasific Islands Development Forum	Training / Pelatihan	-	-	1	-	-	965	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 22: Dispatch Expert on Bamboo and Wood Crafting for MSG and PIDF Countries and Establishing Bamboo Center	22.1 Jumlah Dispatch Expert on Bamboo and Wood Crafting for MSG and PIDF Countries and Establishing Bamboo Center	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	1.093,60	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 23: Dispatch Experts on Seashell Crafting for MSG and PIDF Countries	23.1 Jumlah Dispatch Experts on Seashell Crafting for MSG and PIDF Countries	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	927,3	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 24: Pelatihan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat (untuk kaum gereja bagi negara-negara di kawasan Pasifik)	24.1 Jumlah Pelatihan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat (untuk kaum gereja bagi negara-negara di kawasan Pasifik)	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	900	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 25: Dispatch Experts on Kerupuk Ikan and Seaweed Product Development for MSG and PIDF Countries	25.1 Jumlah Dispatch Experts on Kerupuk Ikan and Seaweed Product Development for MSG and PIDF Countries	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	1.507	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 26: International Training on Marine and Fisheries for African Countries	26.1 Jumlah International Training on Marine and Fisheries for African Countries	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.426,50	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 27: Multimedia Training Course for Timor Leste, CLM, South and Central Asian Countries	27.1 Jumlah Multimedia Training Course for Timor Leste, CLM, South and Central Asian Countries	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.361,10	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 28: International Training for Palestinian Police Force	28.1 Jumlah International Training for Palestinian Police Force	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	3.108,87	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 29: International Training on Agriculture Sector for African and Middle East Countries in Gambia	29.1 Jumlah International Training on Agriculture Sector for African and Middle East Countries in Gambia	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.831,79	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 30: Dispatch Expert on Good Governance to Madagascar	30.1 Jumlah Dispatch Expert on Good Governance to Madagascar	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	841,93	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 31: International Training Workshop for Palestinian on Artificial Insemination in Malang	31.1 Jumlah International Training Workshop for Palestinian on Artificial Insemination in Malang	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.218,40	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 32: International Training Workshop on Freshwater Fisheries in Sukabumi	32.1 Jumlah International Training Workshop on Freshwater Fisheries in Sukabumi	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.324,68	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 33: International Training on on Port Management	33.1 Jumlah International Training on on Port Management	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	3.118,59	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 34: International Training on Ecotourism	34.1 Jumlah International Training on Ecotourism	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.080,50	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 35: Disaster Risk Management untuk negara-negara IORA dan Karibia	35.1 Jumlah Disaster Risk Management untuk negara-negara IORA dan Karibia	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	589,1	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 36: Training for Trainers di Bidang Bahasa Inggris untuk Implementing Agency dalam rangka Penguatan Kapasitas KSS TA 2017	36.1 Jumlah Training for Trainers di Bidang Bahasa Inggris untuk Implementing Agency dalam rangka Penguatan Kapasitas KSS TA 2017	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	789,5	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 37: Penguatan Koordinasi Kerjasama Teknik melalui Pengenalan Protap, Pemutakhiran Mapping dan Prioritas Bantuan Kerjasama	37.1 Jumlah Penguatan Koordinasi Kerjasama Teknik melalui Pengenalan Protap, Pemutakhiran Mapping dan Prioritas Bantuan Kerjasama	Kegiatan	-	-	1	-	-	275,5	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 38: Penerbitan Buletin KST	38.1 Jumlah Buletin KST	Dokume n	-	-	1	-	-	161,1	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 39: Dukungan untuk Penyusunan Draf Peraturan Pembentukan Lembaga Bantuan Kerjasama Teknik Indonesia	39.1 Jumlah Koordinasi dukungan utk penyusunan draf peraturan pembentukan lembaga bantuan	Koordin asi	-	-	1	-	-	618,6	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kerjasama teknik indonesia									
Kegiatan 40: Promosi KSST Indonesia	40.1 Jumlah promosi KSST Indonesia	Kegiatan Promosi	-	-	1	-	-	576,1	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 41: Penguatan dan Penjajakan Triangular dengan Sejumlah Donor Potensial	41.1 Jumlah pelaksanaan penguatan dan penjajakan triangular dengan donor potensial	Kegiatan	-	-	1	-	-	600,1	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 42: Dukungan bagi Peran Capturing Demand Mitra Triangular	42.1 Jumlah koordinasi dukungan bagi peran capturing demand mitra triangular	Koordinasi	-	-	1	-	-	340,8	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 43: Dukungan bagi Penyusunan Perjanjian di bidang Kerja Sama Teknik	43.1 Jumlah koordiansi dukungan bagi penyusunan perjanjian di bidang kerjasama teknik	Koordinasi	-	-	1	-	-	532,4	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 44: Dukungan bagi Kerjasama Perundingan Bilateral di bidang Peningkatan Kapasitas (SKB) (Capacity Building)	44.1 Jumlah koordinasi dukungan bagi kerjasama perundingan bilateral di bidang peningkatan kapasitas (Capacity building)	Koordinasi	-	-	1	-	-	556,6	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 45: Lokakarya Potensi Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) dalam Mendukung Program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia	45.1 Jumlah Lokakarya Potensi Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) dalam Mendukung Program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia	Workshop	-	-	1	-	-	600	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 46: International Training for Small and Medium-sized Enterprises for Palestinian	46.1 Jumlah International Training for Small and Medium-sized Enterprises for Palestinian	Training / Pelatihan	-	-	-	1	-	1.393,77	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 47: International Workshop on Disaster Risk Management for Central, South American, and the Carribean Countries	47.1 Jumlah International Workshop on Disaster Risk Management for Central, South American, and the Carribean Countries	Worksh op	-	-	-	1	-	1.669,70	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 48: International Training & Dispatch Expert on Social Cohesion for Myanmar	48.1 Jumlah International Training & Dispatch Expert on Social Cohesion for Myanmar	Expert Dispatc h	-	-	-	1	-	1.634,60	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 49: Training for Trainers on Health Education for Pacific Countries	49.1 Jumlah Training for Trainers on Health Education for Pacific Countries	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	1.840	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 50: Dispatch Expert on Coastal Abrasion and Mangrove Product Development	50.1 Jumlah Dispatch Expert on Coastal Abrasion and Mangrove Product Development	Expert Dispatc h	-	-	-	1	-	1.938,59	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 51: International Training on Agriculture for African & Middle East	51.1 Jumlah International Training on Agriculture for	Training /	-	-	-	1	-	1.475,75	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	African & Middle East	Pelatihan								
Kegiatan 52: Dispatch of Experts on Agriculture to Africa (Madagascar)	52.1 Jumlah Dispatch of Experts on Agriculture to Africa (Madagascar)	Expert Dispatch	-	-	-	1	-	1.395,60	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 53: Dispatch of Experts on Agriculture to Africa (Gambia)	53.1 Jumlah Dispatch of Experts on Agriculture to Africa (Gambia)	Expert Dispatch	-	-	-	1	-	1.169,10	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 54: International Training Workshop on Marine Fisheries for African & Middle East Countries	54.1 Jumlah International Training Workshop on Marine Fisheries for African & Middle East Countries	Training / Pelatihan	-	-	-	1	-	1.788,95	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 55: International Training on Coconut Product Development for Asia Pacific	55.1 Jumlah International Training on Coconut Product Development for Asia Pacific	Training / Pelatihan	-	-	-	1	-	3.132,81	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 56: International Workshop on Fisheries Management for Pacific Countries	56.1 Jumlah International Workshop on Fisheries	Workshop	-	-	-	1	-	1.362,92	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Management for Pacific Countries									
Kegiatan 57: International Training on Ecotourism for MSG/Pacific Countries	57.1 Jumlah International Training on Ecotourism for MSG/Pacific Countries	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	1.274	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 58: Training of Trainers on Small and Medium Size Enterprises Empowerment for Timor Leste	58.1 Jumlah Training of Trainers on Small and Medium Size Enterprises Empowerment for Timor Leste	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	540,2	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 59: Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and PNG	59.1 Jumlah Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and PNG	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	1.171,10	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 60: Pemuktahiran Mapping Prioritas Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) TA 2018	60.1 Jumlah dokumen Mapping Prioritas Kerja Sama Selatan-	Dokume n	-	-	-	1	-	343,18	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Selatan (KSS) TA 2018									
Kegiatan 61: Buletin Direktorat Kerja Sama Teknik, Jendela, dan Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia	61.1 Jumlah Buletin Direktorat Kerja Sama Teknik, Jendela, dan Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia	Dokumen	-	-	-	3	-	214,9	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 62: Dukungan terhadap Operasional Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam Transisi Menuju Single Agency	62.1 Jumlah koordinasi Dukungan terhadap Operasional Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam Transisi Menuju Single Agency	Kegiatan	-	-	-	1	-	804,66	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 63: Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia	63.1 Jumlah peningkatan kapasitas penyelenggara kerjasama selatan selatan Indonesia	Capacity Building	-	-	-	1	-	792,52	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 64: Promosi Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia	64.1 Jumlah promosi KSS Indonesia	Kegiatan	-	-	-	1	-	619,08	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 65: Penyusunan Peraturan Pendukung Lembaga Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan	65.1 Jumlah Peraturan pendukung lembaga bantuan KSS	Dokumen	-	-	-	1	-	1185,34	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 66: Penjajakan dan Penguatan Kerja Sama dengan K/L Mitra Pelaksana Program KSS	66.1 Jumlah Penjajakan dan Penguatan Kerja Sama dengan K/L Mitra Pelaksana Program KSS	Kegiatan	-	-	-	1	-	243,66	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 67: Dukungan bagi Penyusunan Perjanjian dan Perundingan Bilateral di Bidang Kerja Sama Teknik	67.1 Jumlah koordinasi Dukungan bagi Penyusunan Perjanjian dan Perundingan Bilateral di Bidang Kerja Sama Teknik	Koordinasi	-	-	-	1	-	701,33	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 68: Penguatan dan Penjajakan Kerja Sama Triangular dengan Sejumlah Donor Potensial	68.1 Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Penjajakan Kerja Sama Triangular dengan Sejumlah Donor Potensial	Kegiatan	-	-	-	1	-	622,83	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 69: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium di Timor Leste dengan menghadirkan 2 orang ahli dari Indonesia	69.1 Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium di Timor Leste dengan menghadirkan 2 orang ahli dari Indonesia	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	119,84	APBN	BPOM
Kegiatan 70: Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	70.1 Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Kegiatan	-	-	-	1	-	987,85	APBN	BPOM
Kegiatan 71: Pelatihan Penanganan tindak pidana perikanan	71.1 Jumlah Pelatihan Penanganan tindak pidana perikanan	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	96,75	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 72: Pelatihan Teknis budidaya perikanan laut	72.1 Jumlah Pelatihan Teknis budidaya perikanan laut	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	96,75	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 73: Penangkapan perikanan / perikanan budidaya / pengolahan produk perikanan / konservasi / pengawasan SDA KP	73.1 Jumlah Training Penangkapan perikanan / perikanan budidaya / pengolahan produk perikanan / konservasi /	Training / Pelatiha n	-	-	-	2	-	500	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pengawasan SDA KP									
Kegiatan 74: Training Course on Strategic Partnership with Moslem Religious Leaders (MRLs) on Family Planning Program	74.1 Jumlah Training Course on Strategic Partnership with Moslem Religious Leaders (MRLs) on Family Planning Program	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	917,8	APBN	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependuduka n dan Keluarga Berencana
Kegiatan 75: Training Course on Empowering Women through Family Planning and Economic Development Intervention	75.1 Jumlah Training Course on Empowering Women through Family Planning and Economic Development Intervention	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	917,8	APBN	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependuduka n dan Keluarga Berencana
Kegiatan 76: Training on Comprehensive Righ- Based Family Planning Services (Center of Excellence)	76.1 Jumlah Training on Comprehensive Righ- Based Family Planning Services (Center of Excellence)	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	407,9	APBN	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependuduka n dan Keluarga Berencana

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 77: Internship for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Youth Moslem Leaders Piliipines	77.1 Jumlah Internship for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Youth Moslem Leaders Piliipines	Internship Program	-	-	1	1	-	917,8	APBN	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kegiatan 78: OST on Population Reproductive Health and Family Planning for General Office Population and Family Planning of Vietnam	78.1 Jumlah OST on Population Reproductive Health and Family Planning for General Office Population and Family Planning of Vietnam	Training / Pelatihan	-	-	1	1	-	917,8	APBN	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kegiatan 79: Koordinasi Kegiatan Reverse Linkage IDB Dalam Rangka KSST	79.1 Jumlah pengkoordinasian kegiatan RL IDB dalam rangka KSST	Koordinasi	-	-	1	1	-	1.356,34	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan 80: Pendukung Hibah Luar Negeri Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	80.1 Jumlah pemantauan dan evaluasi Hibah Luar Negeri Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular	Pemantauan dan Evaluasi	-	-	1	1	-	615,23	APBN	Kementerian PPN/Bappenas

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 81: Koordinasi Strategis Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	81.1 Jumlah koordinasi strategis KSST	Koordinasi	-	-	1	1	-	636,06	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan 82: Roadmap Pemanfaatan KSST bagi Sektor Swasta	82.1 Jumlah kajian roadmap pemanfaatan KSST bagi Swasta	Kajian	-	-	-	1	-	1.000	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan 83: Training Course on Empowering Women Through Family Planning	83.1 Jumlah Training Course on Empowering Women Through Family Planning	Training / Pelatihan	-	-	1	1	-	1.315,70	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 84: Sharing Best Practices on Women Empowerment and Child Protection	84.1 Jumlah Sharing Best Practices on Women Empowerment and Child Protection	Seminar Capacity Building	-	-	1	1	-	1.249,82	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 85: Capacity Building Program on Enhancing the Development of SMI	85.1 Jumlah Capacity Building Program on Enhancing the Development of SMI	Seminar Capacity Building	-	-	1	1	-	1.264,07	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 86: Training on Quality Assurance of Vaccines	86.1 Jumlah Training on Quality Assurance of Vaccines	Training / Pelatihan	-	-	1	1	-	494,1	APBN	Kementerian Sekretariat Negara

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 87: International Training on Disaster Risk Management for MSG Gountries	87.1 Jumlah International Training on Disaster Risk Management for MSG Gountries	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	1.787,33	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 88: Capacity Building Program on Information and Technology	88.1 Jumlah Capacity Building Program on Information and Technology	Seminar Capacity Building	-	-	1	1	-	957,67	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 89: TCTP on Enhancing the Quality of Maternal and Child Health Program & the Implementation of Maternal and Child Handbook	89.1 Jumlah TCTP on Enhancing the Quality of Maternal and Child Health Program & the Implementation of Maternal and Child Handbook	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	403,75	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 90: Training Course on Strategic Partnership in Family Planning with Faith-Base Organization and Muslim Religious Leaders	90.1 Jumlah Training Course on Strategic Partnership in Family Planning with Faith-Base Organization and Muslim Religious Leaders	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	908,4	APBN	Kementerian Sekretariat Negara

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 91: Capacity Building Programme in Family Planning for the Phillipines	91.1 Jumlah Capacity Building Programme in Family Planning for the Phillipines	Seminar Capacity Building	-	-	1	1	-	1.061,17	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 92: Asian African Conference 2015 Commitment: TCTP on Rice Cultivation for Asian and African Countries	92.1 Jumlah Asian African Conference 2015 Commitment: TCTP on Rice Cultivation for Asian and African Countries	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	746,14	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 93: Asian African Conference 2015 Commitment: TCTP on Coconut Coir Processed as Non Apparel Textile for Asian and African Countries	93.1 Jumlah Asian African Conference 2015 Commitment: TCTP on Coconut Coir Processed as Non Apparel Textile for Asian and African Countries	Training / Pelatiha n	-	-	1	1	-	338,27	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 94: Indonesia SSTC Flagship Program: Artificial Insemination on Dairy Cattle for Cambodia and Laos	94.1 Jumlah Indonesia SSTC Flagship Program: Artificial Insemination on Dairy Cattle for Cambodia and Laos	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	634,9	APBN	Kementerian Sekretariat Negara

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 95: Training on TV Documentary Production	95.1 Jumlah Training on TV Documentary Production	Training /pelatihan	-	-	1	-	-	822,28	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 96: Workshop on Strengthening National Regulatory Authorities in the Area of Vaccine	96.1 Jumlah Workshop on Strengthening National Regulatory Authorities in the Area of Vaccine	Workshop	-	-	1	1	-	483,7	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 97: International Training on Comprehensive Right-Based Family Planning	97.1 Jumlah International Training on Comprehensive Right-Based Family Planning	Training / Pelatihan	-	-	1	1	-	430,5	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 98: Capacity Building Program on Energy and Mineral Resources for Asia and African Countries	98.1 Jumlah Capacity Building Program on Energy and Mineral Resources for Asia and African Countries	Seminar Capacity Building	-	-	-	1	-	504,52	APBN	Kementerian Sekretariat Negara
Kegiatan 99: Capacity Building on Technology of food processing for Cassava, Maize and sweet potato for RDTL	99.1 Jumlah Capacity Building on Technology of food processing for Cassava, Maize and	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	sweet potato for RDTL									
Kegiatan 100: Agro Food Processing for Cassava (14 product) in Center of Agro Food Processing in Natarbora, Timor Leste (SSCT)	100.1 Jumlah training Agro Food Processing for Cassava (14 product) in Center of Agro Food Processing in Natarbora, Timor Leste (SSCT)	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 101: Agro Food Processing for Banana (14 product) in Center of Agro Food Processing in Natarbora, Timor Leste (SSCT)	101.1 Jumlah training Agro Food Processing for Banana (14 product) in Center of Agro Food Processing in Natarbora, Timor Leste (SSCT)	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 102: Training of Gugus Kendali Mutu (GKM untuk Timor Leste	102.1 Jumlah Training of Gugus Kendali Mutu (GKM untuk Timor Leste	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 103: Internship for packaging for Timor Leste, Oktober 2017	103.1 Jumlah Internship for packaging for Timor Leste, Oktober 2017	Internship Program	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 104: Program Peningkatan Kapasitas Institusi untuk Timor Leste	104.1 Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Institusi untuk Timor Leste	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 105: Developing welding industry in Timor Leste 2018.	105.1 Jumlah training Developing welding industry in Timor Leste 2018.	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 106: Developing Marbel processing business in Timor Leste 2018.	106.1 Jumlah training on Developing Marbel processing business in Timor Leste 2018.	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 107: Training Program on the Improvement of Agricultural Products Processing and Marketing based on Local Resources for African Countries	107.1 Jumlah Training Program on the Improvement of Agricultural Products Processing and Marketing based on Local Resources for African Countries	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 108: Learning from Indonesia, how to improve the capacity and capability of SMIs for Palestina	108.1 Jumlah capacity building on Learning from Indonesia, how to improve the capacity and capability of SMIs for Palestina	Seminar Capacity Building	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 109: South-South Cooperation in the Energy-Saving and Environmentally-Friendly Industry	109.1 Jumlah Training South-South Cooperation in the Energy-Saving and Environmentally-Friendly Industry	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian Perindustrian
Kegiatan 110: International Training On Agriculture For African Countries, di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Cara Tani, Kuningan, Jawa Barat	110.1 Jumlah International Training On Agriculture For African Countries, di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Cara Tani, Kuningan, Jawa Barat	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 111: Dispatch Of Experts On Agriculture To Africa dalam Rangka Penyelenggaraan International Training On Agriculture For African Countries, di Farmer's Agriculture and Rural Training Centre (FARTC)	111.1 Jumlah Dispatch Of Experts On Agriculture To Africa dalam Rangka Penyelenggaraan International Training On Agriculture For African Countries, di Farmer's Agriculture and Rural Training Centre (FARTC)	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	1.445,31	APBN	Kementerian Pertanian
Kegiatan 112: International Training on Coconut Product Development 2017	112.1 Jumlah International Training on Coconut Product Development 2017	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	1.251,90	APBN	Kementerian Pertanian
Kegiatan 113: Tim Kementerian Pertanian RI melakukan Diagnostic Mission ke Suriname pada 21 April -1 Mei 2017, dalam rangka proyek kerjasama Reverse Linkage Program on Artificial Insemination in Republic of Suriname, antara Indonesia (Kementerian Pertanian dan Bappenas), IDB dan Pemerintah Suriname	113.1 Jumlah Diagnostic Mission ke Suriname proyek kerjasama Reverse Linkage Program on Artificial Insemination in Republic of Suriname, antara Indonesia (Kementerian Pertanian dan	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	302,033	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Bappenas), IDB dan Pemerintah Suriname									
Kegiatan 114: Training Course on Strengthening on the Artificial Insemination Management and Conservation of Livestock Genetic Resources for Palestine, Malang, November 2017.	114.1 Jumlah Training Course on Strengthening on the Artificial Insemination Management and Conservation of Livestock Genetic Resources for Palestine, Malang, November 2017.	Training / Pelatiha n	-	-	1	-	-	951,227	APBN	Kementerian Pertanian
Kegiatan 115: Sosialisasi Strategi Komunikasi dan Promosi KSST Indonesia Bidang Pertanian	115.1 Jumlah Sosialisasi Strategi Komunikasi dan Promosi KSST Indonesia Bidang Pertanian	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	78.650.000	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 116: Pengiriman Tenaga Ahli Produksi Semen Beku dan Tim Monitoring Evaluasi Kementerian Pertanian ke Kyrgyzstan dalam rangka proyek kerjasama Reverse Linkage on Strengthening Artificial Insemination for Kyrgyz Republic, antara Indonesia (Kementerian Pertanian dan Bappenas), IDB dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan.	116.1 Jumlah Pengiriman Tenaga Ahli Produksi Semen Beku dan Tim Monitoring Evaluasi Kementerian Pertanian ke Kyrgyzstan dalam rangka proyek kerjasama Reverse Linkage on Strengthening Artificial Insemination for Kyrgyz Republic, antara Indonesia (Kementerian Pertanian dan Bappenas), IDB dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan.	Expert Dispatc h	-	-	1	-	-	571,32	APBN	Kementerian Pertanian
Kegiatan 117: Training Program on the Improvement of Agricultural Products Processing and Marketing Based on Local Resources for African Countries	117.1 Jumlah Training Program on the Improvement of Agricultural Products Processing and Marketing Based on Local Resources for African Countries	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	1	TBC	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 118: Focus Group Discussion (FGD) Strategi Komunikasi dan Promosi KSST Indonesia Bidang Pertanian	118.1 Jumlah Focus Group Discussion (FGD) Strategi Komunikasi dan Promosi KSST Indonesia Bidang Pertanian	Workshop	-	-	-	1	-	136,25	APBN	Kementerian Pertanian
Kegiatan 119: Sharing Knowledge Delegasi Pejabat Kementerian Pertanian Peternakan dan Perikanan Kenya ke Indonesia untuk mempelajari penerapan kebijakan ketahanan pangan dan nutrisi di era desentralisasi, khususnya terkait peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah	119.1 Jumlah Sharing Knowledge Delegasi Pejabat Kementerian Pertanian Peternakan dan Perikanan Kenya ke Indonesia untuk mempelajari penerapan kebijakan ketahanan pangan dan nutrisi di era desentralisasi, khususnya terkait peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	40	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 120: Kegiatan Sharing Best Practices on the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting, Kerjasama KPP-PA, Kementerian Setneg dan Sekretariat Colombo Plan.	120.1 Jumlah Kegiatan Sharing Best Practices on the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting, Kerjasama KPP-PA, Kementerian Setneg dan Sekretariat Colombo Plan.	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian PPPA
Kegiatan 121: Training of Trainers on Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) for Fiji Development Officials held in Indonesia, Kerjasama KPP-PA, Kementerian Setneg dan USAID	121.1 Jumlah Training of Trainers on Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) for Fiji Development Officials held in Indonesia, Kerjasama KPP-PA, Kementerian Setneg dan USAID	Training / Pelatihan	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian PPPA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 122: Sharing best practices with Afghan, Thailand, the Philippines and Malaysia on women as messengers of peace Kerjasama KPP-PA dengan KUPI (Konggres Ulama Perempuan Indonesia)	122.1 Jumlah Sharing best practices with Afghan, Thailand, the Philippines and Malaysia on women as messengers of peace Kerjasama KPP-PA dengan KUPI (Konggres Ulama Perempuan Indonesia)	Seminar Capacity Building	-	-	1	-	-	TBC	APBN	Kementerian PPPA
Kegiatan 123: Kegiatan Sharing Best Practices on Child Protection and Child Friendly City	123.1 Jumlah Kegiatan Sharing Best Practices on Child Protection and Child Friendly City	Seminar Capacity Building	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPPA
Kegiatan 124: Training on GRPB for Fiji Development Officials held in Fiji	124.1 Jumlah Training on GRPB for Fiji Development Officials held in Fiji	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPPA
Kegiatan 125: GRPB Implementation Assistantship for Fiji.	125.1 Jumlah GRPB Implementation Assistantship for Fiji.	Training / Pelatiha n	-	-	-	1	-	TBC		Kementerian PPPA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 126: Training on GRPB for Pacific Countries with Fiji as the hub. Graduates of ToT trainings in both Indonesia and Fiji will be trainers in this training with assistantship from Indonesia	126.1 Jumlah Training on GRPB for Pacific Countries with Fiji as the hub. Graduates of ToT trainings in both Indonesia and Fiji will be trainers in this training with assistantship from Indonesia	Training / Pelatiha n	-	-	-	-	1	TBC		Kementerian PPPA
Kegiatan 127: Program Beasiswa dunia ketiga dan Kerjasama Selatan-Selatan bidang SDM Perhubungan Darat	127.1 Jumlah Program Beasiswa dunia ketiga dan Kerjasama Selatan-Selatan bidang SDM Perhubungan Darat	Program Beasisw a	-	-	-	6	-	6.450		Kementerian Perhubungan
Kegiatan 128: Bantuan Ambulans dan Alat Kesehatan	128.1 Jumlah kegiatan bantuan ambulans dan alat kesehatan	Kegiatan	-	-	-	1	-	1.422,96	APBN	Kementerian Kesehatan
Kegiatan 129: Bantuan Peralatan Kesehatan	129.1 Jumlah kegiatan pemberian peralatan kesehatan	Kegiatan	-	-	-	1	-	1.882,70	APBN	Kementerian Kesehatan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.1 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	Persentase (%)	20	30	50	70	100	9.172 (Telah ditag di Indikator 9.c.1*)	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kegiatan 2: Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran	2.1 Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional	Persentase (%)	82	82	86	93	100	7.810.000 (estimasi) (Telah di-tag di Indikator 9.c.1*)		
PROGRAM 2: PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA										
Kegiatan 1: Pelayanan Layanan Telekomunikasi Universal di daerah 3T	1.1 Penyediaan Akses BTS (di daerah USO)	Lokasi	125	125	125	125	125	4.424 (Telah ditag di Indikator 9.c.1*)	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	1.2 Pengadaan Akses Internet (di daerah USO)	Lokasi	800	800	800	800	800	6.250 (Telah di-tag di Indikator 9.c.1.(b))	APBN	
INDIKATOR 17.10. 1. (a) Rata-rata tarif terbebani di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).										
PROGRAM 1: PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional	2.1 Rata-rata terbobot penurunan tarif di negara mitra	Rata-rata tarif terbobot	9,05	8,47	7,92	7,33	6,78	280,02	APBN	Kementerian Perdagangan
INDIKATOR 17.11.1. (a) Pertumbuhan ekspor produk non migas.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL										
Kegiatan 1: Pengembangan Ekspor Nasional	1.1 Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persentase (%)	-9,8	0,22	15,83	5,0-7,0	5	1.342,30	APBN	Kementerian Perdagangan
INDIKATOR 17.16.1. Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektivitas pembangunan multi-stakeholders yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (INDIKATOR GLOBAL YANG AKAN DIKEMBANGKAN).										
PROGRAM 1: PENINGKATAN KUALITAS KERJA SAMA GLOBAL UNTUK MEMBANGUN SALING PENGERTIAN ANTARPERADABAN, DAN PERDAMAIAN DUNIA, DAN MENGATASI MASALAH-MASALAH GLOBAL YANG MENGANCAM UMAT MANUSIA.										
Kegiatan 1: Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional	1.1 Jumlah koordinasi pelaksanaan SDGs untuk bidang KPI	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan 2: Pelaksanaan kerja sama dan penguatan peran Indonesia pada ASEAN	2.1 Jumlah koordinasi Pelaksanaan kerja sama dan penguatan peran Indonesia pada ASEAN	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pelaksanaan koordinasi penyusunan intervensi Indonesia dalam G20	3.1 Jumlah koordinasi pelaksanaan penyusunan intervensi Indonesia dalam G20	Kegiatan	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 4: Pelaksanaan koordinasi GPEDC	4.1 Jumlah koordinasi pelaksanaan GPEDC	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 5: Pelaksanaan koordinasi GGGI	5.1 Jumlah koordinasi Pelaksanaan GGGI	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 6: Pelaksanaan koordinasi APEC	6.1 Jumlah koordinasi Pelaksanaan APEC	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 7: Pelaksanaan koordinasi IORA	7.1 Jumlah koordinasi Pelaksanaan IORA	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian Luar Negeri
Kegiatan 8: Pelaksanaan koordinasi Peace Corps	8.1 Jumlah koordinasi	Koordinasi	-	-	1	1	-	TBC	APBN	Kementerian Luar Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR 17.18.1. (b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK										
Kegiatan 1: 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	1.1 Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	511	511	511	511	7.738.620,61	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 2: 2896 Pengembangan dan Analisis Statistik	2.1 Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	22	30	24	24	22.246,00	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 3: 2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	3.1 Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	20	21	21	20	96.034,81	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 4: 2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	4.1 Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	24	23	18	17	34.175,30	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 5: 2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	5.1 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	-	100	100	100	100	12.793,64	APBN	Badan Pusat Statistik

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 6: 2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	6.1 Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu	Persen	-	95	96	98	99	307.845,73	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 7: 2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	7.1 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	76	83	83	43	420.791,24	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 8: 2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	8.1 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	45	119	24	21	53.385,20	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 9: 2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	9.1 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	59	52	59	31	45.954,41	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 10: 2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	10.1 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	Publikas i/ Laporan	-	45	18	15	15	1.643.905,56	APBN	Badan Pusat Statistik

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat	1.2 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	Publikasi	-	3	1	2	3	221.344,61	APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 2: Pengembangan analisis statistik	2.1 Jumlah Indikator/data yang terkait SGD yang terdapat pada publikasi	Indikator/ Data	-	-	110	110	110	4.826,80	APBN	Badan Pusat Statistik
INDIKATOR 17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.										
PROGRAM 1: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS										
Kegiatan 1: 2882 Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	1.1 Persentase Terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan	Persen	-	100	100	100	100	38.746,20	APBN	Badan Pusat Statistik
INDIKATOR 17.18.3. (a) Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS). Instansi BPS.										
PROGRAM 1: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS										
Kegiatan 1: 2881 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	1.1 Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen/ Laporan	-	9	9	9	9	747.955,55	APBN	Badan Pusat Statistik

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR 17.19.1. (a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga;										
INDIKATOR 17.19.1. (b) Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer;										
INDIKATOR 17.19.1. (c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.										
PROGRAM 1: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS										
Kegiatan 1: 2883 Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	1.1 Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	-	5.700	6.000	6.000	6.000	85.111,48	APBN	Badan Pusat Statistik
	1.2 Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	-	-	70	70	70			
	1.3 Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	-	-	30	30	30			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: 2887 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	2.1 Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	-	92	95	95	95	287.750,36	APBN	Badan Pusat Statistik
	2.2 Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	-	100	200	200	200		APBN	Badan Pusat Statistik
Kegiatan 3: 2888 Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	3.1 Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	-	98	98	98	98	326.185,60	APBN	Badan Pusat Statistik
INDIKATOR 17.19.2. Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian;										
INDIKATOR 17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK										
Kegiatan 1: 2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1.1 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu (SP 2020)	Publikasi/ Laporan	-	-	-	1 (tahap an persia pan)	1 (tahap an persia pan)	10.209,842 * hanya untuk pembiayaan tahun 2018	APBN	Budan Pusat Statistik

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1: PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK										
Kegiatan 1: Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	1.1 Sistem Metadata yang dikembangkan	Sistem	-	1	1	1	1	4.528,00	APBN	Badan Pusat Statistik
	1.2 Sistem Pendukung layanan untuk diseminasi data dan Informasi statistik yang dikembangkan dan dipelihara	Sistem	-	4	4	4	4	43.349,64	APBN	Badan Pusat Statistik

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Menginisiasi dan mengimplementasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap	1.1 Jumlah instalasi listrik surya atap terpasang [Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap)	MWp	-	-	3	297	700	18.000.000	Individu, industri/komersial, BUMN, Pemda, CSR/organisasi filantropi (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	Asosiasi Energi Surya Indonesia, EcoMasjid/MUI, PPLSA, individu, industri/komersial, Pemda, IESR
Kegiatan 2: Sumba Iconic Island (Pilot Program) (www.sumbaiconicisland.org)	2.1 25 instalasi solar PV kapasitas @1-1,5 kW di sekolah dalam konteks Sumba Iconic Island	instalasi	-	25		-		USD 300,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO
	2.2 30 instalasi solar PV kios energi kapasitas @400Wp di 30 desa dalam program Sumba Iconic Island	instalasi	-	30		-	-	USD 148,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO
	2.3 50 PV agro-processing kapastias @250Wp bersama agents di 50 desa di	instalasi	-	-	50		-	USD 350,000	MCAI; VIA (I - Tersedia)	Sumba Tengah	Hivos; VIA; RESCO

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Sumba (Sumba Iconic Island)										
	2.4 7,500 penyewaan lampu surya isi ulang	instalasi	-	-	6.500	-	1.500	USD 45,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO
PROGRAM 3: ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN ENERGI YANG MEMPRIORITASKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN DAERAH											
Kegiatan 1: Mendorong pemerintah untuk mempermudah/ pemberian insentif penerapan Rooftop PV pada bangunan dengan skema Export-Import (Netmetering) dan/atau pengurangan pajak	1.1 Revisi peraturan menteri atau direksi PLN	Regulasi	-	-	-	1	-	Usulan untuk pemerintah pusat	Usulan untuk pemerintah pusat (II - Masih diusulkan)	Jakarta	Kementerian ESDM dan PLN
	1.2 Review kriteria pajak khusus untuk barang pendukung RE & EE	Dokume n studi	-	-	-	-	1	Usulan untuk pemerintah pusat	Usulan untuk pemerintah pusat (II - Masih diusulkan)	Jakarta	Kementerian Perindustrian dan Keuangan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Melakukan studi transformasi sektor listrik di Indonesia menuju 100% energi terbarukan pada 2050	2.1 Skenario transformasi sektor listrik	Dokumen Studi	-	-	-	1	-	-	belum ada pendanaan (pengembangan konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Nasional	WWF-Indonesia
INDIKATOR SDGs: 7.1.2 Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga											
INDIKATOR SDGs: 7.1.2.(a) Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga											
PROGRAM 1: KONVERSI LPG KE BBG											
Kegiatan 1: Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga	1.1.Pengembangan infrastruktur Jargas	Sambungan Rumah (SR)	-	0	3986	2000	2000	119.790	Pertamina (I - Tersedia)	Prabumulih, Jambi, Palembang, Cikarang	Pertamina
	1.2 Pembangunan infrastruktur Jargas	Sambungan Rumah (SR)	-	39915	31031	26000	25000	1.829.190	APBN (I- Tersedia)	Prabumulih, Cilegon, Balikpapan, Muara Enim, PALI, Bontang, Samarinda, Pekanbaru, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Lhokseumawe,	Pertamina

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Palembang, Musi Rawas	
Kegiatan 2: Peningkatan Aksesibilitas Energi untuk Rumah Tangga	2.1. Terbangunnya Jaringan Gas Kota melalui penugasan	Sambun gan Rumah (SR)	-	49,016	28,778	29.100	0 (* note: alokasi Jargas berdasa rkan penugas an yang diberika n oleh Kement erian ESDM)	1.156.230	APBN (I- Tersedia)	Surabaya, Tarakan, Rusun Jabodetabek, Bogor, Cirebon, Sorong, Blora, Semarang, Batam, Rusun Kemayoran, Lampung, Musi, Banyuasin, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo Serang	PGN

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Rumah Tapak PGN Sayang Ibu	3.1 Terbangunnya jaringan gas rumah tangga	Sambungan Rumah (SR)	-	22.709 (total akumulatif dari 2015 – 2016)	828	550	0* (* note: pengembangan difokuskan untuk mendukung program Jargas Pemerintah)	512	PGN (I - Tersedia)	Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Palembang, Batam	PGN
PROGRAM 2: KONVERSI BBM KE BBG											
Kegiatan 1: Pembangunan SPBG Ecostation	1.1 Percepatan Pengembangan SPBG Ecostation	Unit	-	3	0	0	0	52.246	Pertamina (I - Tersedia)	Jakarta Selatan, Depok	Pertamina
	1.2 Kerjasama Bilateral Pembangunan SPBG (Jepang & Indonesia)	Unit	-	0	0	0	2	19.000	Pertamina (I - Tersedia)	Jakarta Pusat, Tangerang	Pertamina
Kegiatan 2: Distribusi Konverter Kit CNG ke Kendaraan Dinas dan Umum	2.1 Distribusi Konverter Kit CNG ke Kendaraan	Unit	-	1000	3000	0	0	81.000	APBN (I- Tersedia)	Jakarta, Depok, Palembang, Balikpapan,	Pertamina

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Dinas dan Umum									Prabumulih, Subang	
Indikator SDGs: 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan											
PROGRAM 1: RESPONSIBLE SOURCING - DEVELOPING SUSTAINABLE AGRICULTURE SYSTEMS											
Kegiatan 1: Program pengembangan peternakan sapi perah rakyat	1.1 Jumlah unit biogas yang dibangun (akumulatif)	Unit	7.000	400	400	400	400	10.000	PT Nestle Indonesia; Yayasan Rumah Energi (I - Tersedia)	15 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Magetan, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Mojokerto, Probolinggo, Lumajang, Jember dan Banyuwangi) dan 1 Kabupaten di Provinsi DIY (Sleman)	PT Nestle Indonesia, Yayasan Rumah Energi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 2: KONSULTASI DI BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN											
Kegiatan 1: Memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait potensi energi, ekplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan energi	1.1 Laporan konsultasi	Laporan	-	3	2	10	20	80.000	PT. Sucofindo (Persero) (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	PT. Sucofindo (Persero)
PROGRAM 3: AKSELERASI PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT											
Kegiatan 1: Menginisiasi dan mengimplementasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap	1.1 Jumlah instalasi listrik surya atap terpasang [Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap)	MWp	-	-	3	297	700	18.000.000	Individu, industri/komersial, BUMN, Pemda, CSR/organisasi filantropi (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	Asosiasi Energi Surya Indonesia, EcoMasjid/MUI, PPLSA, individu, industri/komersial, Pemda, IESR
Kegiatan 2: Sumba Iconic Island (best practice program) (www.sumbaiconicisland.org)	2.1 25 instalasi solar PV kapasitas @1-1,5 kW di sekolah dalam konteks Sumba Iconic Island	instalasi	-	25		-		USD 300,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO
	2.2 30 instalasi solar PV kios energi kapasitas @400Wp di 30	instalasi	-	30		-		USD 148,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	desa dalam program Sumba Iconic Island										
	2.3 50 PV agro- processing kapastias @250Wp bersama agents di 50 desa di Sumba (Sumba Iconic Island)	instalasi	-	-	50		-	USD 350,000	MCAI; VIA (I - Tersedia)	Sumba Tengah	Hivos; VIA; RESCO
	2.4 7,500 penyewaan lampu surya isi ulang	instalasi	-	-	6.500	-	1.500	USD 45,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos; RESCO
Kegiatan 3: Indonesia Domestic Biogas Programme (IDBP) (www.biru.or.id)	3.1 3,200 biogas skala rumah tangga	instalasi	15.000	7.000	4.000	4.000	1.000	59.400	MCAI; Endev; Hivos (I - Tersedia)	Sulawesi Selatan, NTB (Lombok), NTT (Sumba); Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Bali	Yayasan Rumah Energi
Kegiatan 4: Menginisiasi program akselerasi pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat dan konservasi	4.1 Database potensi energi terbarukan berbasis masyarakat dan	databas e	-	-	-	5	5	USD 200,000	belum ada pendanaan (II - Masih diusulkan) (pengembang	Sumatera, Kalimantan, Papua, NTT	WWF- Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
alam (mikrohidro, solar panel, POME, briket)	konservasi serta potensi pendanaannya								an konsep proposal)		
	4.2 Adanya instalasi PLTMH, PLTS, Biomasa	instalasi	-	-	-	-	10		belum ada pendanaan (pengembang an konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Sumatera, Kalimantan, Papua, NTT	WWF-Indonesia Perusahaan Pengembang CSR Perusahaan Pemda
	4.3 Pilot pengembangan 10 POME power plant	instalasi	-	-	-	-	10		belum ada pendanaan (pengembang an konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Sumatera Kalimantan	WWF-Indonesia Pabrik kelapa sawit Pemda Lembaga pembiayaan
Kegiatan 5: Mendorong perencanaan energi berbasis komunitas dan penerapannya dengan metode Energy Delivery Model (EDM) (Pilot Project)	5.1 Jumlah desa yang melakukan perencanaan energi berbasis komunitas dan pemanfaatan energi untuk pengembangan ekonomi dengan metode Energy Delivery Model (EDM)	desa	-	-	1	1	2	20.000	CAFOD, IIED, donor lain	Flores, NTT (2015 - 2017); daerah lain	IESR

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 4: PESANTREN HIJAU											
Kegiatan 1 : mainstreaming pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis pesantren	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75	30.000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan sosialisasi	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 2: Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	2.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 3: Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 4: Pelatihan Konservasi Energi (Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	4.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 5: Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	5.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
PROGRAM 5 : MASJID HIJAU											
Kegiatan 1 : mainstreaming pengelolaan dan	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di	orang	-	75	75	75	75	20.000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat,	LPBI NU Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
perlindungan lingkungan hidup berbasis masjid	masing-masing masjid									Jawa Timur, Jawa Tengah	
	1.2 Jumlah masjid yang mendapatkan sosialisasi	unit	-	30	30	30	30		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 2 : Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	2.1 Jumlah masjid yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 3 : Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	3.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019					
Kegiatan 4 : Pelatihan Konservasi Energi (Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
	4.2 Jumlah Masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
Kegiatan 5 : Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
	5.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat	
PROGRAM 6 : PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN MELALUI PRAKTEK USAHA HIJAU YANG DIDUKUNG ENERGI TERBARUKAN												
Kegiatan 1: Sekolah kader hijau	1.1 Meningkatnya kapasitas kader hijau	orang	-	-	60	-	-		16.000	MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engangement

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Selatan: Bukit Bulek)	
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas kader hijau	2.1 Meningkatnya keterampilan kader hijau	orang	-	-	60	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok Selatan: Bukit Bulek)	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement
Kegiatan 3: Penyusunan kurikulum dan kelembagaan kader hijau	3.1 Kurikulum dan sop kelembagaan kader hijau	eksemplar	-	-	10	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok Selatan: Bukit Bulek)	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement
Kegiatan 4: Assessment Kelembagaan dan rekrutment kader hijau	4.1 Status kelembagaan dan penetapan kader hijau	orang	-	-	60	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Selatan: Bukit Bulek)	
Kegiatan 5: studi kelayakan dan identifikasi fasilitas publik dan industri usaha mikro	5.1 Penetapan fasilitas publik dan usaha hijau yang akan didukung oleh PLTS	lokasi	-	-	3	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok Selatan: Bukit Bulek)	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement
Kegiatan 6: instalasi PLTS	6.1 terpasangnya PLTS di rumah penduduk	PLTS	-	-	300	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok Selatan: Bukit Bulek)	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement
Kegiatan 7: penetapan regulasi desa untuk pemeliharaan PLTS	7.1 Adanya regulasi di desa yang mendukung pemeliharaan PLTS dan usaha hijau oleh masyarakat	Perdes	-	-	3	-	-		MCAI	Jambi (Tanjabtim: Sungai Rambut, Rawa Sari); Sumbar (Solok Selatan: Bukit Bulek)	LAPESDAM, PSE UGM, PUSTEK UGM, Center for Sosial Engagement

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Edukasi dalam program Training GREENSHIP Associate dan GREENSHIP Professional	1.1 Pengenalan isu energi dan potensi RE di Indonesia dalam Training GA	orang	-	-	-	300	300	Alokasi dari organisasi	Donasi peserta dan/atau Sponsor (II - Masih diusulkan)	Jakarta dan Perwakilan GBC-I	GBC Indonesia
	1.2 Satu modul training (60') khusus membahas Renewable Energy dalam Training GP	orang	-	-	-	80	80	Alokasi dari organisasi	Donasi peserta dan/atau Sponsor (II - Masih diusulkan)	Jakarta dan Perwakilan GBC-I	GBC Indonesia
Kegiatan 2: Program Ring of Fire WWF- Indonesia Memperkuat peran organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas masyarakat (CBO) untuk terlibat dalam dialog kebijakan energi baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa	2.1 Adanya learning & action platformmulti hak untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan dan berkelanjutan yang melibatkan kelompok perempuan dan masyarakat adat	Jumlah organisa si masyara kat sipil	-	-	-	22		2018-2019 = Rp. 2,989,000,00 0 2016-2017 Rp. 5,600.000.00 0	WWF- Indonesia SIDA (I - Tersedia)	Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara	WWF- Indonesia Aceh Geothermal Forum, Rumah Kolaborasi (Lampung), Forum Energi Meranging Kerinci (Formerci)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 Terlaksananya seri diskusi untuk CSO dan CBO untuk meningkatkan pemahamannya terkait pengembangan energi terbarukan	Jumlah organisa si masyara kat sipil	-	8	8	8	8				
	2.3 adanya inisiatif masyarakat untuk mendorong kebijakan pengelolaan energi terbarukan yang mempertimbang kan kearifan lokal dan manfaat bagi masyarakat	Naskah akademi k/ kajian dan regulasi	-	-	1	-	1				
Kegiatan 3: Program Ring of Fire WWF-	3.1 Adanya modul pelatihan	modul	-	-	-	1	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Indonesia Memfasilitasi pelatihan (ToT) pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan perencanaan desa bagi organisasi masyarakat sipil di wilayah kerja prioritas WWF-Indonesia	3.2 Terlaksananya seri pelatihan dan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat (tata kelola, resolusi konflik, komunikasi, manajemen, kewirausahaan) yang melibatkan kelompok perempuan dan masyarakat adat	-	-	-	-	8	8				
	3.3 Adanya tenaga terlatih/fasilitat or yang memiliki skill untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat	tenaga terlatih	-	-	-	-	10				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Program Sumba Iconic Island (Pilot Project) (www.sumbaiconicisland.org)	4.1 Pemda satu Pulau Sumba dan operator/OMS di Sumba mengetahui dan mengenal mengenai teknis operasional dan pemeliharaan PLTS dan PLTMH skala kecil	jumlah pelatiha n/ orang	-	250 orang		-	-	USD 10,000	BPSDM Kementerian ESDM; Hivos (I - Tersedia)	Nusa Tenggara Timur	Pemprov NTT, Pemda Sumba, Hivos
	4.2 pelatihan perencanaan energi daerah untuk berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan dalam konteks Sumba Iconic Island (SII)	jumlah pelatiha n/ orang	-	1 kali pelatiha n; 30 orang	2 kali pelatihan; 30 orang	-	-	USD 10,000	MCAI; Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (Pemerintah Belanda) (I - Tersedia)	Nusa Tenggara Timur	Hivos

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	4.3 pelatihan manajemen dan kewirausahaan untuk pemilik kios dan agent-agent di desa dalam konteks Sumba Iconic Island (SII)	jumlah pelatihan/orang	-	89 entrepreneur mikro (56 laki-laki, 33 perempuan)		-	-	USD 10,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos
	4.4 pelatihan pengarusutamaan gender dalam energi terbarukan skala kecil dan kewirausahaan	jumlah pelatihan/orang	-	961 orang (542 laki-laki, 399 perempuan)		-	-	USD 65,000	MCAI; Hivos; DGIS (I - Tersedia)	Tersebar di Pulau Sumba	Hivos
Kegiatan 5: Program Indonesia Domestic Biogas Program atau Biogas Rumah (BIRU) www.biru.or.id	5.1 sejumlah tukang dan penyelia di Indonesia mendapatkan pelatihan terkait dengan biodigester	Orang	-	77 laki-laki, 2 perempuan	49 laki-laki, 1 perempuan	-	-	USD 17,000	MCAI; Hivos; Endev (I - Tersedia)	Sulawesi Selatan, NTB (Lombok), NTT (Sumba)	Yayasan Rumah Energi
	5.2 sejumlah pengguna biodigester mengetahui bagaimana menggunakan	Orang	-	2188 laki-laki, 355 perempuan	884 laki-laki, 498 perempuan	-	-	USD 65,000	MCAI; Hivos; Endev (I - Tersedia)	Sulawesi Selatan, NTB (Lombok), NTT (Sumba)	Yayasan Rumah Energi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	biodigester serta pemeliharaannya										
Kegiatan 6 Replikasi program peningkatan kapasitas masyarakat terkait pemanfaatan panas bumi yang berkelanjutan di Flores	6.1 Capacity assessment organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat di sekitar lokasi WKP Panas Bumi di Flores	Dokumen studi/ analisis	-	-	-	1	-	USD 160,000	belum ada pendanaan (pengembangan konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Flores	WWF-Indonesia
	6.2 Adanya learning platform/ forum organisasi masyarakat sipil di Flores	#organisasi masyarakat sipil yang ada di Flores tergabung dalam forum	-	-	-	10					

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	6.3 Pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat menggunakan Modul pelatihan yang dikembangkan oleh WWF-Indonesia	jumlah pelatihan	-	-	-	5					
INDIKATOR SDGs: 7.3.1* Intensitas Energi Primer											
PROGRAM 1: ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN ENERGI YANG MEMPRIORITASKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN DAERAH											
Kegiatan 1: Melakukan dan memfasilitasi penyusunan studi/rekomendasi/panduan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan	1.1 Adanya Studi Flores sebagai Pulau Panas Bumi sebagai rekomendasi bagi Pemerintah	Dokumen studi	-	1	-	-	-	GBP 98.000	FCO Prosperity Fund (I - Tersedia)	Flores	Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM WWF-Indonesia ARUP
	1.2 Prioritas pengembangan panas bumi di Flores diakomodir dalam regulasi	Regulasi	-	-	1	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Mendorong pemerintah untuk mempermudah/ pemberian insentif penerapan Rooftop PV pada bangunan dengan skema Export-Import (Netmetering) dan/atau pengurangan pajak	1.1 Revisi peraturan menteri atau direksi PLN	Regulasi	-	-	-	1	-	Usulan untuk pemerintah pusat	Usulan untuk pemerintah pusat (II - Masih diusulkan)	Jakarta	Kementerian ESDM dan PLN
	1.2 Review kriteria pajak khusus untuk barang pendukung RE & EE	Dokumen studi	-	-	-	-	1	Usulan untuk pemerintah pusat	Usulan untuk pemerintah pusat (II - Masih diusulkan)	Jakarta	Kementerian Perindustrian dan Keuangan
Kegiatan 3: Melakukan studi transformasi sektor listrik di Indonesia menuju 100% energi terbarukan pada 2050	3.1 Skenario transformasi sektor listrik	Dokumen Studi	-	-	-	1	-	-	belum ada pendanaan (pengembangan konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Nasional	WWF- Indonesia
PROGRAM 4: MEMFASILITASI TERBENTUKNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA “SAFEGUARD” DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN.											
Kegiatan 1: Penggunaan Energi Terbarukan pada Green Building Bangunan Baru (NB) dan Bangunan Terbangun (EB)	1.1 Terbangun (mulai 0.25% kebutuhan daya listrik gedung 1 s/d 5 poin bonus)	Bangunan	-	-	-	Tidak ada target (voluntary basis)	Tidak ada target (voluntary basis)	n/a	Pemilik bangunan atau proyek (III - Belum tersedia sumber)	Lokasi proyek bangunan	Pemilik bangunan atau proyek

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Menginisiasi dan Memfasilitasi Business Forum yang mempertemukan potensi pendanaan dengan potensi sumber daya energi terbarukan	1.1 Terselenggaranya Forum Bisnis untuk Pengembangan Energi Terbarukan	Event	-	-	-	1	1	300	belum ada pendanaan (pengembangan konsep proposal) (II - Masih diusulkan)	Jakarta	WWF-Indonesia; Lembaga Keuangan; Pemda; Bank; Perusahaan Pengembang Energi Terbarukan
PROGRAM 7: MENGKAMPANYEKAN DAN MEMPROMOSIKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN EFISIENSI ENERGI KEPADA MASYARAKAT LUAS											
Kegiatan 1: Kampanye mengenai energi terbarukan di sekolah-sekolah di Pulau Sumba, dalam konteks Sumba Iconic Island (Piot Project)(www.sumbaiconicisland.org)	1.1 sekolah-sekolah dasar terpapar dengan informasi mengenai energi terbarukan	sekolah	-	-	24	-	-	-	MCAI	Seluruh Sumba	Hivos
PROGRAM 8: MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SDG TUJUAN KE-7											
Kegiatan 1: Memastikan inklusifitas dan dilaksanakannya prinsip "no one left behind" pada pencapaian SDG Tujuan ke-7	1.1 Identifikasi kelompok yang masih tertinggal di masing-masing target dan indikator serta	kajian/studi/analisis	-	-	-	-	1	180	belum tersedia (II - Masih diusulkan)	Nasional	Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	usulan/rekome ndasi perbaikan										
Kegiatan 2: Memastikan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan Voluntary National Review dan Roadmap SDG 2030	2.1 Adanya usulan bersama dari organisasi masyarakat sipil	Focus group discussi on/ worksho p	-	-	-	3	3		belum tersedia (II - Masih diusulkan)	Nasional	Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI											
INDIKATOR SDGs: 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita											
INDIKATOR SDGs: 8.1.1.(a) PDB per kapita											
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
PROGRAM 1: PENELITIAN YANG DILAKUKAN PRAKARSA											
Kegiatan 1: Penyusunan Paduan Teknis Goal 8 SDGs : Panduan untuk Pemkab dan Kota	1.1 Dokumen publikasi yang dihasilkan	Dokume n	-	-	1 (Dokumen) Publikasi Buku	-	-	-	Uni Eropa (III - Belum tersedia sumber)	Nasional	Prakarsa, INFID, OXFAM, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Dibantu oleh Uni Eropa

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Asistensi Pemerintah Daerah membuat PERDA tentang Pelatihan Kerja	3.1 Penyusunan draf PERDA/naskah akademik tentang Pelatihan Kerja	Dokumen	-	-	1 (Dokumen) Menyusun naskah kebijakan	1 (Dokumen) Dialog Kebijakan dengan Pemerintah Daerah	1 (Dokumen) Asistensi Pemerintah Daerah menyusun naskah akademik PERDA bersama akademisi	-	(III - Belum tersedia sumber)	Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	Prakarsa dan INFID bekerjasama dengan CSOs lokal
	3.2 Pemerintah Daerah memasukan/me nambahkan anggaran untuk pelatihan kerja	Dokumen	-	-	1 (Dokumen) Menyusun naskah kebijakan	1 (Dokumen) Dialog Kebijakan dengan Pemerintah Daerah	1 (Dokumen) Asistensi Pemerintah Daerah menyusun naskah akademik PERDA bersama	-		Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
							akademi si				
	3.3 Terlibatnya berbagai pihak termasuk swasta dan akademisi dalam kebijakan pelatihan kerja	Dokume n	-	-	1 (Dokumen) Menyusu n kertas kebijakan	1 (Doku men) Dialog Kebija kan denga n Pemer intah Daera h	1 (Dokum en) Asistens i Pemerin tah Daerah menyus un naskah akademi k PERDA bersama akademi si	-		Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pelatihan kerja	3.1 Adanya project percontohan kemitraan di daerah	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi-pihak mengenai pelatihan kerja	Angka anak muda dan perempuan yang tidak bekerja berkurang	-	(III - Belum tersedia sumber)	Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	Prakarsa dan INFID bekerjasama dengan CSOs lokal
	3.2 Adanya dialog reguler antar pihak di daerah	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi-pihak mengenai pelatihan kerja	Angka anak muda dan perempuan yang tidak bekerja berkurang	-		Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	
	3.3 Menguatnya dukungan publik terhadap pelatihan kerja	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi-pihak mengenai pelatihan	Angka anak muda dan perempuan yang tidak bekerja	-		Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
						an kerja	berkura ng				
PROGRAM 2: IDENTIFIKASI DAN PENINGKATAN SDM VOKASI (SMK) FOR FUTURE JOBS											
Kegiatan 1: Identifikasi gap antara (kebutuhan) lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri (dudi)	1.1 Teridentifikasi kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan di daerah	Dokumen	-	-	-	1 (Dokumen) Survei dan Mapping Gap kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan	1 (Dokumen) Survei dan Mapping Gap kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan	-	(III - Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
	1.2 Teridentifikasi peran para pihak	Dokumen	-	-	-			-			
Kegiatan 2: Workshop/ Pelatihan Guru Vokasi for Future Jobs	2.1 Pengalaman dan Skill mengajar Guru Vokasi tentang tantangan saat ini dan masa	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi-pihak mengenai	Dialog reguler multi-pihak mengenai future	-	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	GP Ansor and Partners

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	depan bertambah					future jobs (1000 SMK)	jobs (1500 SMK)				
	2.2 Mengimplement asikan pengalaman dan skill baru kepada peserta didik		-	-	-			-			
Kegiatan 3: Membangun link and match antara (kebutuhan) lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri (dudi); pemerintah daerah, lembaga pendidikan (sekolah, kampus, balai latihan; LKP, LPK) dan sektor swasta dalam pelatihan kerja	3.1 Adanya project percontohan kemitraan di daerah	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi- pihak menge nai pelatih an kerja	Dialog reguler multi- pihak mengen ai pelatiha n kerja	-	(III - Belum tersedia sumber)	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
	3.2 Adanya dialog reguler dan intensif antar pihak di daerah	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi- pihak menge nai pelatih an kerja	Dialog reguler multi- pihak mengen ai pelatiha n kerja	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3 Memperkuat dukungan antar pihak terhadap link and match future jobs	Aktivitas	-	-	-	Dialog reguler multi-pihak mengenai pelatihan kerja	Dialog reguler multi-pihak mengenai pelatihan kerja	-			
PROGRAM 3: PENGUATAN PENDIDIKAN LINK AND MATCH BAGI SMK NU UNTUK MENYIAPKAN TENAGA YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING FOR FUTURE JOBS											
Kegiatan 1: Meningkatkan pelaksanaan Link and Match antara SMK NU dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) baik dalam maupun Luar Negeri	1.1 Meningkatkan pelaksanaan Link and Match antara SMK Muh dengan DuDi	sekolah	-	-	-	20	20	-	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	GP Ansor and Partners
Kegiatan 2: Mendorong SDM Kreatif melalui penciptaan hasil karya Siswa-siswi SMK NU	2.1 Terciptanya hasil karya sekolah yang inovatif dan sesuai kebutuhan	sekolah	-	-	-	10	20	-	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	GP Ansor and Partners
Kegiatan 3: Melakukan alih teknologi dengan mitra di dalam dan luar negeri melalui	3.1 Terwujudnya alih teknologi NU dengan	sekolah	-	-	-	30	50	-	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	GP Ansor and Partners

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
pembentukan Teaching Industry	mitra di dalam dan luar negeri										
PROGRAM 4: PENINGKATAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT, DI KABUPATEN BOJONEGORO DAN KABUPATEN TUBAN											
Kegiatan 1: Penguatan Kapasitas KSM untuk meningkatkan pendapatan (Pilot Project)	1.1 Pendampingan Manajemen Kelompok	Unit	-	-	22	-	-	-	CSR (III - Belum tersedia sumber)	Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban	Yayasan Bina Swadaya
	1.2 Manajemen Kelompok dan Teknis Usaha Produktif (Petrnakan, Perikanan, Pengolahan Makanan, dan Pertanian)	Orang	-	-	100	-	-	-			
	1.3 Munculnya teknologi baru dalam teknis budidaya di usaha produktif	Unit	-	-	11	-	-	-			
	1.4 Terciptanya produk hasil dari penerapan teknologi baru	Jenis	-	-	25	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	di usaha produktif										
PROGRAM 5: TANI BANGKIT											
Kegiatan 1: Pelatihan peningkatan hasil pertanian dan pemasaran produk organik	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	2	2	2	2	400	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 2: Bantuan permodalan bagi petani miskin	2. 1 Jumlah petani yang dibantu	kelompok	-	10	10	10	10	3.920	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 3: Pendampingan petani	3.1 Jumlah petani yang didampingi	kelompok	-	10	10	10	10	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
PROGRAM 6: PEMBERDAYAAN BURUH, TANI DAN NELAYAN											
Kegiatan 1: Pelatihan kewirausahaan bagi buruh tani dan nelayan	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 2: Memberikan permodalan bagi buruh, petani, peternak dan nelayan	1. 2 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Membangun jaringan antara pengusaha dengan buruh, tani dan nelayan	1. 3 Jumlah pertemuan	kegiatan	-	-	-	1	1	50	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
PROGRAM 7: PETERNAKAN MASYARAKAT MANDIRI											
Kegiatan 1: Pelatihan membangun peternakan yang produktif	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 2: Memberikan permodalan bagi peternak	2.1 Jumlah peternak yang dibantu	kelompo k	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 3: pendampingan peternak	3.1 Jumlah peternak yang didampingi	kelompo k	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
PROGRAM 8: KEGIATAN USAHA											
Kegiatan 1 : Pengelolaan Usaha	1.1 Pendataan usaha anggota	Kegiatan	1	1	1	1	1	PM	Swadaya (I - Tersedia)	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengembangan Komunitas UMKM	1.1 Pengembangan pasar komunitas UMKM dan pelatihan manajemen bisnis serta marketing digital dengan melibatkan market place yang ada di Indonesia	Persentase	-	-	-	30	70	1.000	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	Jabodetabek	LKSFI - UHAMKA
	1.2 Mentoring generasi muda/mahasiswa dalam mewujudkan printisan bisnis/usaha	Persentase	-	-	-	20	60	1.000	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	Jabodetabek	LKSFI - UHAMKA
Kegiatan 2: Pelatihan membangun UMKM	2.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK
Kegiatan 3: Memberikan permodalan bagi masyarakat miskin	3.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: pendampingan UMKM	4.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompo k	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK
PROGRAM 2 : PEMBERDAYAAN KAUM DIFABEL											
Kegiatan 1: Pelatihan pengembangan potensi diri dan kewirausahaan bagi kaum difabel	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
Kegiatan 2: bantuan permodalan dan peluang usaha bagi kaum difabel	2.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompo k	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
Kegiatan 3: pendampingan usaha kaum difabel	3.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompo k	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
PROGRAM 3 : PEMBERIAN MODAL USAHA (GHARIMIN)											
Kegiatan 1: Bantuan permodalan bagi ghorimin	1. 1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	20	20	40	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM
Kegiatan 2: Pendampingan usaha	2.1 Jumlah orang yang didampingi	orang	-	-	-	20	20	20	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pembinaan bagi penerima manfaat	3.1 Jumlah orang yang dibina	orang	-	-	-	20	20	20	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM
PROGRAM 4: PEMBERDAYAAN MUALAF											
Kegiatan 1: Pembinaan Muallaf	1.1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	50	100	150	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK
Kegiatan 2: Pelatihan kewirausahaan	2.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK
Kegiatan 3: Bantuan Modal usaha bagi Muallaf	3.1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	50	100	750	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK
PROGRAM 5 : PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN											
Kegiatan 1: Pelatihan Kewirausahaan	2.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM
Kegiatan 2: Bantuan Permodalan	3.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM
Kegiatan 3: Pendampingan usaha dan membuka akses pasar	4.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 6: BUEKA (BINA USAHA EKONOMI KELUARGA)											
Kegiatan 1: Pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	2	2	2	2	400	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH
Kegiatan 2: Bantuan Permodalan	2.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompo k	-	10	10	10	10	3.920	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH
Kegiatan 3: Pembinaan Peserta Program	3.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompo k	-	10	10	10	10	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH
PROGRAM 7 : KOPERASI MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Layanan Koperasi Muslimat NU	1.1 Jumlah unit koperasi	unit	150	-	-	20	20	200	III- Belum tersedia sumber	Nasional = 34 provinsi	Muslimat NU
PROGRAM 8: PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT (ISTRI-ISTRI BARISAN ANSOR SERBAGUNA/ BANSER)											
Kegiatan 1: Pelatihan usaha bagi istri-istri Banser	1.1 Skill dan pengalaman usaha istri-istri Banser semakin bertambah	Aktivitas	-	-	-	500 Istri Banser	1000 Istri Banser	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
Kegiatan 2: Pemberian modal usaha bagi istri-istri Banser	2.1 istri-istri Banser mempunyai usaha	Kepala Keluarg a	-	-	-	500 Istri Banser	1000 Istri Banser	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 Istri-istri Banser mandiri dalam ekonomi		-	-	-			-	III- Belum tersedia sumber		
	2.3 angka kemiskinan dan ketergantungan ekonomi menurun		-	-	-			-	III- Belum tersedia sumber		
Kegiatan 3: Pendampingan UMKM Istri Banser	3.1 Aman dan nyaman menjalankan usaha	Kepala Keluarg a	-	-	-	500 Istri Banser	1000 Istri Banser	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
PROGRAM 9: 1.000 UMKM ANGGOTA ANSOR DAN BANSER MUDA											
Kegiatan 1: Pengembangan dan Pelatihan Membangun Komunitas UMKM	1.1 Berkembangnya pasar komunitas UMKM dan manajemen bisnis serta marketing digital Anggota Banser Muda dan terlibatnya market place yang ada di Indonesia	Persenta se	-	-	-	500	1000	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 ter-Mentoring dan monitoringnya anggota Banser muda mewujudkan printisan bisnis/usaha	Persentase	-	-	-	500	1000	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
PROGRAM 10: PENDAMPINGAN AKSES USAHA											
Kegiatan 1: Pendampingan usaha dan membuka akses pasar	1.1 Berkembangnya dan Terlindunginya pasar komunitas UMKM	kelompok	-	-	-	500	1000	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
Kegiatan 2: Membuka gerai-gerai ritel Ansormart di setiap Stasiun Kereta Api di Indonesia	2.1 Berkembangnya pasar ritel Ansor	komunitas	-	-	-	20	50	-	III- Belum tersedia sumber	Seluruh Indonesia	GP Ansor and Partners
INDIKATOR SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja											
PROGRAM 1: PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DAN STRUKTUR SKALA UPAH											
Kegiatan 1: Workshop upah minimum dan struktur skala upah	1.1 Pekerja/Buruh	Orang	-	-	190	310	400	-	III- Belum tersedia sumber	2017: Jakarta, Banten dan Jawa Barat	KSBSI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelatihan membangun peternakan yang produktif	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 2: Memberikan permodalan bagi peternak	2.1 Jumlah peternak yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
Kegiatan 3: pendampingan peternak	3.1 Jumlah peternak yang didampingi	kelompok	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPM
PROGRAM 5: 1.000 UMKM											
Kegiatan 1: Pengembangan Komunitas UMKM	1.1 Pengembangan pasar komunitas UMKM dan pelatihan manajemen bisnis serta marketing digital dengan melibatkan market place yang ada di Indonesia	Persentase	-	-	-	30	70	1.000	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	Jabodetabek	LKSFI - UHAMKA

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Mentoring generasi muda/mahasiswa dalam mewujudkan printisan bisnis/usaha	Persentase	-	-	-	20	60	1.000	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	Jabodetabek	LKSFI - UHAMKA
Kegiatan 2: Pelatihan membangun UMKM	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK
Kegiatan 2: Memberikan permodalan bagi masyarakat miskin	2.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK
Kegiatan 3: pendampingan UMKM	3.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	-	-	-	10	10	100	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK
PROGRAM 6: PEMBERDAYAAN KAUM DIFABEL											
Kegiatan 1: Pelatihan pengembangan potensi diri dan kewirausahaan bagi kaum difabel	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
Kegiatan 2: bantuan permodalan dan peluang usaha bagi kaum difabel	2.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: pendampingan usaha kaum difabel	3.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	-	-	-	10	10	100	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MPS, MPM
PROGRAM 7: PEMBERIAN MODAL USAHA (GHARIMIN)											
Kegiatan 1: Bantuan permodalan bagi ghorimin	1. 1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	20	20	40	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM
Kegiatan 2: Pendampingan usaha	2.1 Jumlah orang yang didampingi	orang	-	-	-	20	20	20	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM
Kegiatan 3: Pembinaan bagi penerima manfaat	3.1 Jumlah orang yang dibina	orang	-	-	-	20	20	20	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, MPM
PROGRAM 8: PEMBERDAYAAN MUALAF											
Kegiatan 1: Pembinaan Muallaf	1. 1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	50	100	150	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK
Kegiatan 2: Pelatihan kewirausahaan	2.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK
Kegiatan 3: Bantuan Modal usaha bagi Muallaf	3.1 Jumlah orang yang dibantu	orang	-	-	-	50	100	750	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MAJELIS TABLIGH, LDK

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 9: PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN											
Kegiatan 1: Workshop materi pelatihan kewirausahaan	1. 1 tersusunnya modul pelatihan kewirausahaan	buku	-	-	-	2	-	50	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	DKI Jakarta	LAZISMU, MEK, PTM
Kegiatan 2: Pelatihan Kewirausahaan	2.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	2	2	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM
Kegiatan 3: Bantuan Permodalan	3.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	-	-	10	10	1.960	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM
Kegiatan 4: Pendampingan usaha dan membuka akses pasar	4.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	-	-	-	10	10	100	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MEK, PTM
PROGRAM 10 : BUEKA (BINA USAHA EKONOMI KELUARGA)											
Kegiatan 1: Pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga	1. 1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	2	2	2	2	400	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH
Kegiatan 2: Bantuan Permodalan	2.1 Jumlah kelompok yang dibantu	kelompok	-	10	10	10	10	3.920	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH
Kegiatan 3: Pembinaan Peserta Program	3.1 Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	-	10	10	10	10	200	Donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, AISYIYAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
PROGRAM 11: FASILITASI KERJA PENYANDANG DISABILITAS MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Pelatihan pekerja penyandang disabilitas di perusahaan sekitar tempat tinggal penyandang disabilitas.	1.1 Jumlah kegiatan pelatihan	kegiatan	-	-	-	30	30	1000	III- Belum tersedia sumber	Jabodetabek, Tangerang Selatan dan Cilegon	Muslimat NU
INDIKATOR SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)											
PROGRAM 1: ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND SCHOLARSHIP FOR YOUTH (ENVOY)											
Kegiatan 1: Kerjasama dan replikasi program dengan lembaga/institusi lain	1.1 Lembaga/organi sasi lain yang mereplikasi program	Lembag a	-	-	1	3	5	-	Lembaga implementor (III - Belum tersedia sumber)	Nasional	Mien R Uno Foundation dan lembaga implementor
Kegiatan 2: Training dan pendampingan program	2.1 Jumlah pendaftar (peminatan terhadap program MRUF ENVOY)	Orang	-	1.800	1.000	1.500	2.000	7.200	Donor (I - Tersedia)	Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY	Mien R Uno Foundation
	2.2 Jumlah peserta lolos program MRUF ENVOY	Orang	-	27	23	30	30		Donor (I - Tersedia)	Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY	Mien R Uno Foundation

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 2: ALUMNI DEVELOPMENT PROGRAM (ADP)											
Kegiatan 1: Training dan pendampingan	1.1 Jumlah alumni program MRUF ENVOY	Orang	-	291	318	341	371	400	Donor (I - Tersedia)	Nasional	Mien R Uno Foundation
	1.2 Jumlah partisipasi peserta dalam pelatihan dan pendampingan MRUF ADP	Orang	-	30	50	100	150		Donor (I - Tersedia)	Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY	Mien R Uno Foundation
Kegiatan 2: Scale-Up program	2.1 Bekerja sama dengan lembaga lain yang mendukung MRUF ADP	Lembag a	-	-	3	5	7	-	Lembaga implementor (III - Belum tersedia sumber)	Nasional	Mien R Uno Foundation
Program 3: Rancangan Pembangunan BUMDesa Berwatak Kewirausahaan Sosial Menuju Desa Maju Mandiri, (sama dengan indikator 8.9.1*)											
Kegiatan 1: Penguatan Kapasitas Pokdarwis untuk mengelola potensi wisata (Pilot Project)	1.1 Pendampingan Manajemen Kelompok	Unit	-	-	1	12	24	-	Yay. Bina Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Kab. Batang - Jawa Tengah, Kab. Landa - Kalbar, Kab. Mentawai - Sumbar, Gorontalo, Sika,	Yayasan Bina Swadaya
	1.2 Pelatihan Pengelolaan dan pengembangan Wisata	Orang	-	-	30	240	480	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Pelibatan usia muda sebagai pengelola kawasan wisata	Orang	-	-	86	1060	1920	-		Manggarai Barat, Kupang, Pekalongan, Bojonegoro, Kudus, Lamandao - Kalteng, Kab. Toraja - Sumsel; Kab. Donggu - NTB	
PROGRAM 4: RANCANGAN PEMBANGUNAN BUMDESA BERWATAK KEWIRAUSAHAAN SOSIAL MENUJU DESA MAJU MANDIRI, (SAMA DENGAN INDIKATOR 8.9.1*)											
Kegiatan 1: Pemberian keterampilan bekerja untuk penyandang disabilitas yang terkena dampak bencana	1.1 Jumlah penyandang disabilitas diberi keterampilan bekerja	Orang	-	0	300	300	300	6.000	IR Malaysia (I - Tersedia)	Aceh, NTB	Islamic Relief Indonesia
PROGRAM 5: JADI PENGUSAHA MANDIRI (JAPRI)											
Kegiatan 1: Training dan pendampingan	1.1 Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	200	-	-	\$ 213,294 (Pilot phase 18 months, 2017-2018) & \$ 1,351,994 (full phase)	USAID (I - Tersedia)	Bandung, Trenggalek, Surabaya, Malang, Solo, Semarang	Institute of International Education (IIE), Indonesia International Education Foundation (IIEF), Mien R
	1.2 Mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	100	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) 42 months, 2018-2022)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Peningkatan dan pengembangan bisnis	2.1 Pelatihan rencana bisnis dan bantuan pendanaan	Orang	-	-	-	90	-				Uno Foundatio (MRUF), Prestasi Junior Indonesia (PJI)
	2.2 Membangun atau memperluas usaha yang sukses dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif	Orang	-	-	-	68	-				
PROGRAM 6: PENGUATAN PENDIDIKAN LINK AND MATCH BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH UNTUK MENYIAPKAN TENAGA TERAMPIL DAN BERJIWA KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL.											
Kegiatan 1: Meningkatkan pelaksanaan Link and Match antara SMK Muh dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri baik dalam maupun Luar Negeri.	1.1 Meningkatnya pelaksanaan Link and Match antara SMK Muh dengan DuDi	sekolah	-	20	20	20	20	1.000	Muhammadi yah (I - Tersedia)	Nasional	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiya h

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Muhammadiyah Melalui Pembuatan alat Sendiri	2.1 Terciptanya peralatan pendidikan SMK Muh yang Modern oleh guru, siswa dan mitra industri.	sekolah	-	5	5	5	10	5.000	Muhammadiyah (I - Tersedia)	Nasional	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah
Kegiatan 3: Melakukan alih teknologi dengan mitra di dalam dan luar negeri melalui pembentukan Teaching Industry	3.1 Terwujudnya alih teknologi dengan mitra di dalam dan luar negeri dengan membentuk Teaching Industry.	sekolah	-	30	30	30	30	300	Muhammadiyah (I - Tersedia)	Nasional	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah
PROGRAM 7: YOUTH ECONOMIC EMPOWERMENT											
Kegiatan 1 : Youth Economic Empowerment Program (TVET dan Micro Entrepreneurship Development)	1.1 pemuda (laki-laki dan perempuan) yang menyelesaikan program dan mendapatkan pekerjaan penuh waktu atau mendirikan usaha dengan penghasilan per	Orang	-	-	-	2.835	5.180	• Expected 105.000 •Existing 31.185	Sponsor dan Donor Internasional	DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi, Depok, Tangerang), Jawa Tengah (Semarang), NTT (Lembata, Sikka, Nagekeo, TTS, TTU, Malaka,	Yayasan Plan International Indonesia - Mitra: Instansi Pemerintah (BLK, BBPLK) dan LSM (Bengkel APPeK, Kopernik, PPSP Kupang)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	bulan minimal sesuai UMR									Belu, Kupang), NTB (Lombok)	
	1.2 BLK Milik Pemerintah Mengadopsi Model Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda yang dapat memfasilitasi terutama kaum muda yang termarjinalkan dan sensitif gender/ Dokumen Strategi Nasional untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda, sebagai strategi yang terpisah atau	Institusi	-	-	-	-	20	-	Sponsor dan Donor Internasional	Level Nasional: Bappenas dan KM Terkait. DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi, Depok, Tangerang), Jawa Tengah (Semarang), NTT (Lembata, Sikka, Nagekeo, TTS, TTU, Malaka, Belu, Kupang),	Yayasan Plan International Indonesia - Mitra: Instansi Pemerintah (BLK, BBPLK) dan LSM (Bengkel APPeK, Kopernik, PPSP Kupang)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	sebagai bagian dari Strategi Nasional Ketenagakerjaan (mencakup strategi untuk kaum muda rentan dan perempuan)									NTB (Lombok)	
PROGRAM 8: PEMBERDAYAAN / PENGUATAN ORANG MUDA DESA BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL											
Kegiatan 1 : Pelatihan Kewirausahaan pemula/lanjutan para orang muda	1.1 Jumlah Kelompok Usaha Muda Berbasis sumber daya lokal 1.2. Proposal baru akses dana Modal Usaha	kelompok (20-50 orang)	-	0	0	50	100	-	Dana Solidaritas Umat (I = Tersedia)	wilayah Indonesia	Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) KWI.
Kegiatan 2 : Workshop meningkatkan produk-produk khas lokal	2.1 adanya produk-produk unggulan daerah yang bernilai ekonomi tinggi	kelompok (20-50 orang)	-	0	0	100	200	-	(I = Tersedia)	wilayah Indonesia	Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) KWI.
Kegiatan 3 : Youth Social Entrepreneurship Festival (YOSEF)	31. Jumlah Usahawan Muda Baru	orang	-	0	0	500	1000	-	(I = Tersedia)	wilayah Indonesia	Komisi Kepemudaan dan Komisi PSE KWI dan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
											Keuskupan. Daerah
INDIKATOR SDGs: 8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)											
PROGRAM 1: RESPONSIBLE SOURCING - DEVELOPING SUSTAINABLE AGRICULTURE SYSTEM											
Kegiatan 1: No child labour policy	1.1 Penerapan kebijakan tidak memperkerjakan anak-anak di bawah usia di seluruh lini operasional bisnis	Hasil audit internal /eksternal	-	Pass	Pass	Pass	Pass	-	PT Nestle Indonesia (Tidak memerlukan pendanaan)	Seluruh area operasional PT Nestle Indonesia, termasuk di dalamnya kantor pusat, pabrik, pusat distribusi dan juga perwakilan kantor penjualan	PT Nestle Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Penerapan Nestle Supplier Code, yang di dalamnya termasuk klausul tidak diperkenankan mempekerjakan anak di bawah umur bagi vendor yang bekerja sama dengan Nestle	Dokumen yang ditandatangani oleh seluruh vendor yang bekerja sama	-	Pass	Pass	Pass	Pass	-	PT Nestle Indonesia (Tidak memerlukan pendanaan)	Seluruh lokasi vendor PT Nestle Indonesia	PT Nestle Indonesia
INDIKATOR SDGs: 8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran											
INDIKATOR SDGs: 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											
PROGRAM 1: ZERO ACCIDENT											
Kegiatan 1: Think Before Act - 1 menit untuk selamat	1.1 Recordable injury rate	-	-	1,6	<1,6	< dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya	-	-	PT Nestle Indonesia (Tidak memerlukan pendanaan)	Seluruh area operasional PT Nestle Indonesia, termasuk di dalamnya kantor pusat, pabrik, pusat distribusi dan juga perwakilan	PT Nestle Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										kantor penjualan	
PROGRAM 2: AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA											
Kegiatan 1: Audit dokumen, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta identifikasi tindakan pencegahan dan perbaikan, dan memastikan pengelolaan K3 sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar teknis	1.1 Temuan audit	Laporan	-	42	51	70	80	2.880	PT. Sucofindo (Persero) (I = Tersedia)	Nasional	PT. Sucofindo (Persero)
INDIKATOR SDGs: 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait											
PROGRAM 1: PENINGKATAN KAPASITAS NEGOSIASI DAN PENGORGANISASIAN											
Kegiatan 1: Audit gender untuk mengetahui struktur organisasi, persoalan dan hak buruh yang bias gender sebagai preferensi untuk perbaikan ke depan	1.1 Data perusahaan yang terindikasi positif dan negatif gender	perusahaan	-	-	-	200	250	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jabar, Maluku, Kalbar, Jateng, Banten, DKI Jakarta, Sumut, Riau, Sumsel, Jatim, Jambi, Lampung,	KSBSI
	1.2 Jumlah auditor gender di lapangan	orang	-	-	5	8	-	-	(III - Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Batam, Aceh, Sulsel	
Kegiatan 2: Pelatihan buruh untuk peningkatan kapasitas pemimpin perempuan	2.1 Jumlah buruh yang menjadi peserta pelatihan	orang	-	-	-	100	100	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jambi, Jabar, Sumut, Banten	KSBSI
	2.2 Jumlah pemimpin buruh yang terimbas/mener ima manfaat pemahaman	orang	-	-	-	300	400	-	(III - Belum tersedia sumber)		
	2.3 Jumlah negosiator perempuan	orang	-	-	-	40	50	-	(III - Belum tersedia sumber)		
PROGRAM 2: PENINGKATAN KAPASITAS NEGOSIASI DAN PENGORGANISASIAN (JAMINAN SOSIAL DAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING)											
Kegiatan 1: Pelatihan peningkatan kapasitas sosial dialog (pembuatan Perjanjian Kerja Bersama /PKB)	1.1 Terciptanya budaya sosial dialog di tempat kerja (melalui lembaga bipartit)	-	-	-	60	60	60	-	(III - Belum tersedia sumber)	Banten, Jawa Timur, Batam, DKI Jakarta, Kalimantan Barat,	KSBSI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah Perjanjian Bersama yang dihasilkan	-	-	-	5	6	5	-	(III - Belum tersedia sumber)	Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara	
	1.3 MOU, networking dan kesepakatan dengan multi stakeholders (pemerintah dan pengusaha)	-	-	-	7	7	7	-	(III - Belum tersedia sumber)		
	1.4 Jumlah buruh yang dikover dalam Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-	50000	50000	50000	-	(III - Belum tersedia sumber)		
Kegiatan 2: pelatihan pengorganisasian	2.1 Jumlah organisaser yang dilatih	-	-	-	200	200	200	-	(III - Belum tersedia sumber)	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Batam, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,	KSBSI
	2.2 Jumlah buruh yang berserikat di perusahaan Multinasional dan supply chain	-	-	-	50000	50000	50000	-	(III - Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Maluku, Papua Barat dan NTT	
Kegiatan 3: Pelatihan paralegal	3.1 Jumlah pengurus yang dilatih dalam penyelesaian hubungan industrial	-	-	-	100	100	100	-	(III - Belum tersedia sumber)	Riau, Kalimantan barat, Jawa Timur, Batam, Jambi, Sumatra	KSBSI
	3.2 Jumlah perselisihan hubungan	-	-	-	5	5	5	-	(III - Belum tersedia sumber)	Utara, Kalimantan Tengah	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	industrial yang terselesaikan										
PROGRAM 3: PENINGKATAN KAPASITAS NEGOSIASI DAN PENGORGANISASIAN (GENDER)											
Kegiatan 1: Pelatihan buruh untuk peningkatan kapasitas pemimpin perempuan	1.1 Jumlah buruh yang menjadi peserta pelatihan	orang	-	-	-	100	100	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jambi, Jabar, Sumut, Banten	KSBSI
	1.2 Jumlah pemimpin buruh yang terimbas/menerima manfaat pemahaman	orang	-	-	-	300	400	-			
	1.3 Jumlah negosiator perempuan	orang	-	-	-	40	50	-			
Kegiatan 2: Audit gender untuk mengetahui struktur organisasi, persoalan dan hak buruh yang bias gender sebagai referensi untuk perbaikan ke depan	2.1 Data perusahaan yang terindikasi positif dan negatif gender	perusahaan	-	-	-	200	250	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jabar, Maluku, Kalbar, Jateng, Banten, DKI Jakarta, Sumut, Riau, Sumsel, Jatim, Jambi, Lampung,	KSBSI
	2.2 Jumlah auditor gender di lapangan	orang	-	-	5	8	-	-	(III - Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Batam, Aceh, Sulsel	
Kegiatan 3: Pelatihan paralegal	3.1 Jumlah pengurus yang dilatih dalam penyelesaian hubungan industrial	-	-	-	-	-	-	-	(III - Belum tersedia sumber)	Sumut, Jabar, Kalbar, Maluku, Sumsel, Bantne, DKI Jakarta	KSBSI
	3.2 Jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	(III - Belum tersedia sumber)		
PROGRAM 4: PENINGKATAN KAPASITAS NEGOSIASI DAN PENGORGANISASIAN (KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING)											
Kegiatan 1: Pelatihan peningkatan kapasitas sosial dialog (pembuatan Perjanjian Kerja Bersama /PKB)	1.1 Terciptanya budaya sosial dialog di tempat kerja (melalui lembaga bipartit)	-	-	-	60	60	60	-	(III - Belum tersedia sumber)	Banten, Jawa Timur, Batam, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi	KSBSI
	1.2 Jumlah Perjanjian Bersama yang dihasilkan	-	-	-	10	10	10	-	(III - Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 MOU, networking dan kesepakatan dengan multi stakeholders (pemerintah dan pengusaha)	-	-	-	7	7	7	-	(III - Belum tersedia sumber)	Utara, Sumatra Utara	
	1.4 Jumlah buruh yang dikover dalam Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	(III - Belum tersedia sumber)		
Kegiatan 2: pelatihan pengorganisasian	2.1 Jumlah organisaser yang dilatih	-	-	-	200	200	200	-	(III - Belum tersedia sumber)	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Batam, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan	KSBSI
	2.2 Jumlah buruh yang berserikat di perusahaan Multinasional dan supply chain	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	(III - Belum tersedia sumber)		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelaksanaan Program Sosialisasi	1.1 Konfirmasi Narasumber dan alat Peralatan Sosialisasi	Paket	-	N/A	136	136	6.800	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta dan Daerah Tingkat Provinsi	KSPSI-R
	1.2 Konfirmasi Peserta Sosialisasi	Orang	-	N/A	4.760	4.760	4.760	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta dan Daerah Tingkat Provinsi	KSPSI-R
	1.3 Realisasi Pelaksanaan Event Sosialisasi	Event	-	N/A	136	136	6.800	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta dan Daerah Tingkat Provinsi	KSPSI-R
Kegiatan 2: Monitoring dan Evaluasi	2.1 Monitoring	Event	-	N/A	136	136	2.720	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta dan Daerah Tingkat Provinsi	KSPSI-R
	2.2 Evaluasi	Event	-	N/A	4	4	2.720	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta dan Daerah Tingkat Provinsi	KSPSI-R

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pelaporan	3.1 Penyiapan Materi Laporan	Periode	-	N/A	4	4	320	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta	KSPSI-R
	3.2 Pencetakan Laporan	Paket	-	N/A	4	4	200	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta	KSPSI-R
	3.3 Dsitribusi Laporan	Paket	-	N/A	4	4	200	-	Filantropi / Lainnya (III - Belum tersedia sumber)	Jakarta	KSPSI-R
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB											
PROGRAM 1: RANCANGAN PEMBANGUNAN BUMDESA BERWATAK KEWIRAUSAHAAN SOSIAL MENUJU DESA MAJU MANDIRI, KAB. BATANG, PROP. JATENG											
Kegiatan 1: Penguatan Kapasitas Pokdarwis untuk mengelola potensi wisata Sikembang dan Sibiting, Desa Kembang Langit, Kec. Blado	1.1 Pendampingan Manajemen Kelompok	Unit	-	-	1	-	-	-	Yay. Bina Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Kab. Batang - Jawa Tengah	Yayasan Bina Swadaya
	1.2 Pelatihan Pengelolaan dan pengembangan Wisata	Orang	-	-	30	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Pelibatan usia muda sebagai pengelola kawasan wisata	Orang	-	-	86	100	-	-			
INDIKATOR SDGs: 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
PROGRAM 1: RESPONSIBLE SOURCING - DEVELOPING SUSTAINABLE AGRICULTURE SYSTEM											
Kegiatan 1: Program The NESCAFE Plan untuk pengembangan pertanian kopi rakyat	1.1 Jumlah petani yang memiliki rekening (akumulatif)	-	-	6.000	9.000	12.000	15.000	USD 5.000.000.000	PT Nestle Indonesia; BTPN (I - Tersedia)	Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung	PT Nestle Indonesia; BTPN
INDIKATOR SDGs: 8.10.2 Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak											
PROGRAM 1: RESPONSIBLE SOURCING - DEVELOPING SUSTAINABLE AGRICULTURE SYSTEM											
Kegiatan 1: Program The NESCAFE Plan untuk pengembangan pertanian kopi rakyat	1.1 Jumlah petani yang memiliki rekening (akumulatif)	-	-	6.000	9.000	12.000	15.000	USD 5.000.000.000	PT Nestle Indonesia; BTPN (I - Tersedia)	Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung	PT Nestle Indonesia; BTPN

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan			Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 2: PENINGKATAN KAPASITASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PRB - API												
Kegiatan 1: Pelatihan Manajemen Bank Sampah Berbasis Perbankan	1.1 Jumlah Peserta pelatihan	orang	-	25	25	25	25	25.000 (Biaya Program dengan berbagai kegiatan)	BNI 46	DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU dan BNI 46	
	1.2 Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	kabupat en	-	27	27	27	27		BNI 46	DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU dan BNI 46	
	1.3 Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	lembaga	-	375	375	375	375		BNI 46	DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU dan BNI 46	
	1.4 Jumlah Nasabah yang mendapatkan Tabungan & ATM BNI berbasis tabungan sampah di masing-masing bank sampah	orang	-	50	50	50	50		BNI 46	DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU dan BNI 46	
PROGRAM 3: FINANCIAL LITERACY SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN KEMASLAHATAN EKONOMI KELUARGA				-				-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penyusunan Modul Workshop Literasi Finansial untuk Keluarga, dan Modul Training for Facillitators	1.1 prosentase modul Workshop Literasi Finansial untuk Keluarga, dan Modul Training for Facillitators	%	-	100	-	-	-	50	Mitra: Pegadaian	pusat	LKK NU
Kegiatan 2: Training for Facilitators Literasi Finansial untuk Keluarga	2.1. jumlah training for facillitators literasi finansial untuk keluarga NU	aktivitas	-	3	0	6	6	750	mitra: Pegadaian, OJK, CSR	2016: 3 prop, 2018: 6 prop, 2019: 6 prop	LKK NU
	2.2. jumlah fasilitator literasi finansial untuk keluarga NU	orang	-	135	0	240	240		-		
Kegiatan 3: Workshop Literasi Finansial untuk Keluarga	3.1. jumlah workshop literasi finansial untuk keluarga	kegiatan	-	6	32	56	100	3.880	dana mandiri, CSR, pegadaian, financial institutions, OJK	2016: 6 kota 2017: 12 kota, 2018: 20 kota, 2019: 24 kota	LKK NU
	3.2. jumlah peserta workshop	orang	-	360	1600	2800	5000		-		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Melakukan survey, inspeksi, dan verifikasi rancangan pembangunan jalan tol, dermaga penyeberangan, pelabuhan, dan bandara melalui pengujian struktur dan ketahanan bangunan	1.1 Jumlah laporan inspeksi	Laporan	-	4.080	4.134	4.500	5.000	174.000	PT. Sucofindo (Persero) (I = Tersedia)	Nasional	PT. Sucofindo (Persero)
INDIKATOR SDGs: 9.1.2 Jumlah Penumpang dan Volume Pengangkutan, menurut Jenis Transportasi											
PROGRAM 1: MELAKUKAN PENELITIAN MENGENAI KEBUTUHAN TERKAIT SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK DAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK											
Kegiatan 1: Pendataan transportasi publik yang aksesibel untuk DPO (Difabel People Organization)	1.1 Banyaknya transportasi publik yang aksesibel	Jumlah	-	-	-	10	-	100	(III - Belum tersedia sumber)	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	OHANA, PERDIK, YOUNG VOICE,
	1.2 Banyaknya kabupaten/kota yang transportasi publik yang aksesibel	Kabupaten/Kota	-	-	-	5	-	-		Jawa Timur, Makassar, Aceh	PLD Universitas Brawijaya
Kegiatan 2 : Audiensi dan dialogue dengan Pemda Propinsi di Indonesia sebagai best practice dari	2.1 Jumlah Provinsi yang melaksanakan audiensi dan dialog	SKPD Provinsi	-	-	-	5	-	15	(III - Belum tersedia sumber)	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	OHANA, PERDIK, YOUNG VOICE,

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Meningkatkan kajian dan penelitian berbasis Muhammadiyah	1.1 Jumlah Peneliti	Orang	-	-	100	100	100	3.000	Muhammadiyah (I - Tersedia)	Nasional	Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Majelis
Kegiatan 2: Meningkatkan kualitas penelitian melalui hibah bersaing antar dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah	2.1 Jumlah Dosen	Orang	-	-	50	100	150	3.000	Muhammadiyah (I - Tersedia)	Nasional	Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Majelis
PROGRAM 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
Kegiatan 1 : Pengembangan kurikulum, berbasis Penguatan Pendidikan Karakter	1.1 Peningkatkan dan menyempurnakan kurikulum berbasis Penguatan Pendidikan Karakter	Workshop (FGD) /Kegiatan	-	-	3	8	12	1.000	LP. Ma'arif NU (III-belum tersedia sumber)	Nasional	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat
Kegiatan 2 : Pendataan Satuan Pendidikan (Sekolah dan Madrasah Ma'arif NU)	2.1 Membangun data base Satuan Pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU yang berbasis IT	Kegiatan	-	2	5	15	19	1.000	LP. Ma'arif NU (III-belum tersedia sumber)	semua wilayah;	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat/ Wilayah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3 : Pengembangan Pendidikan berbasis Pendidikan Karakter	3.1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Satuan Pendidikan di lingkungan NU yang Berbasis Pendidikan Karakter	Seminar dan Worksh op	-	1	3	5	10	1.500	LP. Ma'arif NU (III-belum tersedia sumber)	semua wilayah;	Lembaga Pendidikan Ma`arif NU Pusat/ Wilayah
Kegiatan 4 : Penelitian pengembangan pendidikan;	4.1 Meningkatkan kemampuan dan hasil Penelitian dalam Pengembangan Pendidikan berbasis ke NU an	Kegiatan	-	1	1	3	5	750	LP. Ma'arif NU (III-belum tersedia sumber)	Nasional	Lembaga Pendidikan Ma`arif NU Pusat
PROGRAM 3: TEMU ILMIAH FORUM SILATURAHMI STUDI EKONOMI ISLAM (FOSSEI)											
Kegiatan 1 : Simposium Nasional	1.1 Usulan Regulasi/Rekom endasi	Proceedi ng /Jurnal	1	1	1	1	1	2015 : 250 juta 2016 : 268 juta 2017 : 335 juta, 2018 : 700 juta, 2019: 700	2015 : 2016 : Baznas, BNIS, Kemenpar 2017 : Baznas, OJK, LPS,	2015 : Universitas Diponogoro, Semarang 2016 : Universitas Muhammadiyah	Fossei Nasional
	1.2 Jumlah Peserta	Orang	300	529	470	550	600				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Business challange/case	2.1 Jumlah Usulan Bisnis	Proposal Bisnis	15	0	16	20	25	juta. TOTAL = 2253 juta	Wardah, BSM	Yogyakarta 2017 : UIN Sunan Kalijaga, Yogayakarta 2018 : UIN Sumatera Utara. Medan. 2019 : -	
Kegiatan 3 : Olimpiade Ekonomi Islam	3.1 Jumlah tim olimpiade Ekonomi Islam	tim	100	129	114	120	130				
Kegiatan 4 : Seminar ekonomi Islam	4.1 Jumlah Peserta	Orang	360	617	657	1000	1000				
INDIKATOR SDGs: 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband											
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet											
PROGRAM 1 : PERPUSERU (PERPUSTAKAAN SERU)											
Kegiatan 1 : Pengembangan masyarakat melalui pengembangan Perpustakaan Daerah (Kabupaten & Desa) menjadi Community Learning Center yang inovatif berbasis Infomasi Teknologi.	1.1 Jumlah lokasi sebaran program	Provinsi	15	2	-	-	-	200.000	Bill & Malinda Gates Foundation	104 Kabupaten di 18 Propinsi. Tersebar dari Jawa, Bali, Lombok, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT & Papua.	Coca-Cola Foundation Indonesia
	1.2 Jumlah Perpustakaan Daerah di tingkat Kabupaten bertansformasi menjadi pusat belajar	Perpust akaan Mitra (Kabupa ten)	34	68	2	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Bantuan Langsung Tunai	1.1 Jumlah mustahik yang dilayani secara nasional	Jiwa	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	10.040.625	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) (I= Tersedia)	Nasional = 34 Provinsi	Baznas Pusat; Baznas Provinsi dan Kab/Kota dan Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional)
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1: Membangun dan Memfasilitasi Forum Dialog antar politisi muda lintas partai di DPR RI untuk membahas isu dan agenda nasional melawan ekstrimisme	1.1 Adanya rekomendasi/us ulan kebijakan melawan ekstrimisme dari proses dialog reguler Forum INSPIRASI politisi muda lintas partai DPR RI	Rekomendasi	-	-	-	4	-	230.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Membangun dan Memfasilitasi Ruang Dialog antara Politisi lintas partai dengan masyarakat sipil dan konstituen	2.1 Adanya masukan kebijakan melawan ekstrimisme yang diterima melalui dialog reguler antara politisi lintas partai dan masyarakat sipil dan konstituen	Rekomendasi	-	-	-	6	-	141.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 3: Melakukan pelatihan tentang penyusunan usulan kebijakan berbasis bukti bagi anggota DPR RI muda lintas partai, perwakilan dari DPP Partai dan Tenaga Ahli Partai	3.1 Jumlah politisi muda lintas partai DPRI, perwakilan DPP partai dan tenaga ahli fraksi yang dilatih tentang penyusunan kebijakan berbasis bukti	Orang	-	-	-	40	-	143.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengumpulan data tentang pengurus SB yang terintimidasi karena berserikat	1.1. Indikator kegiatan: Data yang terkumpul	Kasus	-	-	-	10	15	-	(III - Belum tersedia sumber)	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Batam, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Maluku,	KSBSI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Papua Barat dan NTT	
Kegiatan 2: Advokasi terhadap pengurus SB yang dilaporkan pihak perusahaan karena berserikat	2.1. Indikator kegiatan: Kasus yang diadvokasi	Kasus	-	-	-	10	15	-	(III - Belum tersedia sumber)	Riau, Sumut, Banten, Jatim, DKI Jakarta, Kalbar, Jabar	
PROGRAM 2: ADANYA PIJAKAN KOKOH MENUJU AKSES DAN KENDALI BAGI PEMENUHAN HAK-HAK ASASI KORBAN DAN PEJUANG TERKAIT PELANGGARAN HAM											
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumber daya bagi setiap inisiatif untuk pemenuhan Hak EKOSOB Korban Pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Organisasi korban/lembaga pendamping korban memperoleh dukungan sumber daya untuk membantu korban pelanggaran HAM masa lalu mendapatkan akses dan layanan sosial (Kesehatan,	Lembag a	-	6	6	5	5	3.000.000 - 5.000.000	Lembaga Donor & Donasi Publik (II - Masih diusulkan)	Kabupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dll)										
	1.2 Komunitas korban yang memperoleh akses layanan sosial (kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dll)	Jumlah orang	-	100 - 200	100 - 200	100 - 200	100 - 200	3.000.000 - 5.000.000	Lembaga Donor & Donasi Publik (II - Masih diusulkan)	Kabupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	-	-	1 kebijakan /wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	3.000-5.000	Lembaga Donor & Donasi Publik (II - Masih diusulkan)	Kabupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
PROGRAM 2: PENEGAKAN HUKUM DALAM PENINGKATAN TOLERANSI DAN TANGKAL RADIKALISME											
Kegiatan 1 :Sarasehan Penegakan Hukum dan HAM dalam kehidupan beragama	1.1 Jumlah tokoh masyarakat lintas Agama	orang	-	-	-	250	250	250.000.000	Polisi dan Kemenag (I - Tersedia)	Nasional	MUI
PROGRAM 3: MEMPROMOSIKAN SEKTOR BISNIS YANG AKUNTABEL MELALUI PEMAJUAN PENERAPAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES (UNGP) TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.											
Kegiatan 1: Dialog Multi-pihak	1.1 Indikator Kegiatan: Peningkatan pemahaman terkait konsep Bisnis dan HAM	Jumlah Peserta	-	200	300	400	100	IDR 1,175,564,262	Uni Eropa (EU-EIDHR) & Oxfam GB di Indonesia (I - Tersedia)	DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat	Indonesia Global Compact Network (IGCN), OXFAM GB di

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal dan informal	1.1 Teridentifikasi permasalahan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan	Aktivitas dan dokumen	-	-	-	Survei kualitas implementasi BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal dan informal	Mapping persoalan implementasi BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal dan informal	-	(III - Belum tersedia sumber)	-	Prakarsa
	1.2 Rekomendasi perbaikan pelayanan dan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan	Aktivitas dan dokumen	-	-	-	Survei kualitas implementasi BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal dan informal	2020: Dialog	-	(III - Belum tersedia sumber)	-	Prakarsa

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.3 Dialog kebijakan perbaikan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dengan berbagai pihak	-	-	-	-	Survei kualitas implementasi BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal dan informal	2020: Dialog	-	(III - Belum tersedia sumber)	-	Prakarsa
INDIKATOR SDGs: 10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1: Workshop perlindungan buruh migran	1.1 Jumlah buruh migran dan pengurus SB menjadi peserta workshop	Orang	-	-	-	40	40	-	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional, Sulut, Jabar, Sumsel, Papua, Sumut, Sulteng, Banten, Jatim, Riau	KSBI
	1.2 Terbentuknya	Organisasi	-	-	-	30	30	-		Seluruh Indonesia	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	jaringan buruh migran										
	1.3 Penyusunan Policy Paper	Unit	-	-	-	2	2	-		Jogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Jabar	
Kegiatan 2: Review "Agency Rekrutmen"	2.1 Tersedianya form survey online dan offline	unit	-	-	-	1	1	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta	
	2.2 Jumlah buruh migran yang melakukan review	orang	-	-	-	500	500	-			
	2.3 Tersedianya data review di website	orang	-	-	-	500	500	-			
Kegiatan 3: Kampanye terhadap penggunaan website	3.1 Pencetakan leaflet	lembar	-	-	-	5.000	0	-	(III - Belum tersedia sumber)	Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta	
	3.2 Jumlah buruh migran yang mengetahui website	orang	-	-	-	500	500	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3 Buruh migran mendapat manfaat dari menggunakan website	orang	-	-	-	500	500	-			
Kegiatan 4: Kampanye Jaminan sosial untuk buruh migran	4.1. Pencetakan leaflet	lembar	-	-	-	4.000	4.000	-	(III - Belum tersedia sumber)	Kalbar, NTB, Sulteng, Jateng, Jatim, Lampung, DKI Jakarta	
	4.2 Buruh migran menjadi peserta BPJS TK	orang	-	-	-	1.000	1.000	-			
	4.3. Buruh migran dan keluarga menerima manfaat BPJS TK	orang	-	-	-	10	100	-			
Kegiatan 5: Kampanye UU PPMI	5.1. Cetakan booklet	unit	-	-	-	1.000	0	-	(III - Belum tersedia sumber)	Kalbar, NTB, Sulteng, Jateng, Jatim, Lampung, DKI Jakarta	
	5.2. Buruh migran mengetahui adanya UU baru	orang	-	-	-	100	100	-			
Kegiatan 6: Kampanye K3 untuk sektor migas	6.1. Cetakan leaflet/poster	pcs	-	-	-	1000	1500	-		Riau, Papua, Kaltim	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	6.2. Jumlah perusahaan yang memiliki kelengkapan alat K3	unit	-	-	-	30	30	-	(III - Belum tersedia sumber)		
	6.3. Menurunnya kecelakaan kerja di sektor migas	kasus	-	-	-	8	5	-			
INDIKATOR SDGs: 10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik											
PROGRAM 1: ADVOKASI TKI											
Kegiatan 1: Menyediakan tempat penampungan sementara bagi TKI yang terkena masalah/kasus	1.1 Jumlah penampungan yang disediakan	Kegiatan	-	-	-	1	1	200	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	DKI Jakarta	LAZISMU, MIGRANT CARE, UNIMIG
Kegiatan 2: Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena masalah/kasus	2.1 Jumlah kasus yang ditangani	Kasus	-	-	-	20	20	80	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	LAZISMU, MIGRANT CARE, UNIMIG
Kegiatan 3: Mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang perlindungan terhadap buruh migran	3.1 Jumlah desa yang didorong	Desa	-	-	-	5	5	400	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Timor Tengah Selatan, Nusa	LAZISMU, MIGRANT CARE

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: MENINGKATNYA KONTRIBUSI UNIVERSITAS DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR											
Kegiatan 1: Meningkatnya kegiatan pendidikan gelar dan non gelar bagi mahasiswa dari negara-negara berkembang (negara Selatan)	1.1 Jumlah Universitas yang menyelenggarakan pendidikan gelar (S2 dan S1) bagi mahasiswa beasiswa KNB	Institusi	-	-	16	N/A	N/A	PM	APBN (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	Universitas-universitas Negeri dan Swasta yang melaksanakan KSST
	1.2 Jumlah Mahasiswa dari Negara Berkembang Penerima Beasiswa di Unibraw	Orang	-	-	7	10	14	1.674	DIPA Universitas (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	1.3 Jumlah lulusan dari negara Selatan yang menempuh studi di Unibraw	Orang	-	-	N/A	2	5		DIPA Universitas (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	1.4 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KNB	Orang	-	-	1	5	10	474	DIPA Universitas (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Meningkatnya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) oleh Universitas Brawijaya bagi negara-negara berkembang (negara Selatan)	2.1 Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Universitas bagi peserta dari negara berkembang (Selatan)	Kegiatan	-	-	4	6	8	3.407	European Union (GCCA TL); Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAP) Timor Leste (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	2.2 Jumlah kegiatan pelatihan yang didampingi oleh universitas di negara berkembang	Kegiatan	-	-	2	4	6		Avanza Project, USAID Timor Leste; Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAP) Timor Leste & European Union (CAMOES dan GIZ) (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	2.3 Jumlah Peserta pelatihan yang diselenggarakan Universitas	Orang	-	-	33	50	70		MAP Timor Leste (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.4 Jumlah Peserta pendampingan yang dilakukan di negara berkembang (selatan)	Orang	-	-	313	500	700		AVANSA Project, USAID (Timor Leste) (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
Kegiatan 3: Meningkatkan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan (capacity building) oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bagi negara-negara berkembang (negara Selatan)	3.1 Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bagi peserta dari negara berkembang (Selatan) TCT	Negara participant (Peserta + Modul Praktikum + Akomodasi)	-	-	13	16	18	2.208	JICA (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
		Honor dan Sewa Ruang	-	-	13	16	18	954,1	DIPA Universitas (Setneg) (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
	3.2 Jumlah Peserta Pelatihan yang diselenggarakan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dari Negara	Orang (Incoming)	-	-	4	4	5	162,5	APBN dan Hibah Luar Negeri dari JASO (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
		Orang (Outgoing)	-	-	10	15	20	2.250		Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	Selatan (Student Exchange)										
PROGRAM 2: PENINGKATAN KEGIATAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR											
Kegiatan 1: Mengundang negara untuk melakukan kunjungan ke perusahaan (Factory Visit) KHS	1.1 Jumlah factory visit dari negara anggota Colombo Plan	Kunjungan	-	-	1	-	-	PM	(I - Tersedia)	Yogyakarta	CV. Karya Hidup Sentosa
	1.2 Jumlah factory visit dari negara lain	Kunjungan	-	-	1	1	1	PM	(I - Tersedia)	Yogyakarta	CV. Karya Hidup Sentosa
Kegiatan 2: Workshop dan Pelatihan Mekanisasi Pertanian Negara-Negara Afrika	2.1 Jumlah Workshop dan Pelatihan Mekanisasi Pertanian Negara-Negara Afrika	Training /pelatihan	-	-	1	-	-	PM	(I - Tersedia)	Tanzania	CV. Karya Hidup Sentosa
Kegiatan 3: Workshop dan Pelatihan Operasional Penggunaan Alat Mekanisasi Pertanian dengan negara anggota KSST	3.1 Jumlah Workshop dan Pelatihan Operasional Penggunaan Alat Mekanisasi Pertanian dengan negara anggota KSST	Training /pelatihan	-	-	-	1	1	PM	(I - Tersedia)	Tentatif	CV. Karya Hidup Sentosa

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Pelatihan Operasional Alat dan Mesin Pertanian	4.1 Jumlah Pelatihan Operasional Alat dan Mesin Pertanian	Training /pelatih an	-	-	1	-	-	PM	(I - Tersedia)	Yogyakarta	CV. Karya Hidup Sentosa
Kegiatan 5: Pelatihan Maintenance dan Troubleshooting Alat dan Mesin Pertanian	5.1 Jumlah Pelatihan Maintenance dan Troubleshooting Alat dan Mesin Pertanian	Training /pelatih an	-	-	1	-	-	PM	(I - Tersedia)	Yogyakarta	CV. Karya Hidup Sentosa
Kegiatan 6: Capacity Building dalam Maintenance dan Troubleshooting Alat dan Mesin Pertanian untuk negara anggota KSST	6.1 Jumlah Capacity Building dalam Maintenance dan Troubleshooting Alat dan Mesin Pertanian untuk negara anggota KSST	Seminar Capacity Building	-	-	-	1	1	PM	(I - Tersedia)	Tentatif	CV. Karya Hidup Sentosa
Kegiatan 7: Pendampingan dalam Implementasi Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	7.1 Jumlah Pendampingan dalam Implementasi Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	Training /pelatih an	-	-	-	1	1	PM	(I - Tersedia)	Timor Leste	CV. Karya Hidup Sentosa

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Kerjasama dalam bidang kemanusiaan	1.1 Program bantuan kemanusiaan dan dialog perdamaian di Bangladesh	Bantuan Relawan	-	-	100%	100%	100%	PM	Donatur/Phylantrophy (II - Masih diusulkan)	Bangladesh	Lembaga Kerjasama Hubungan Internasional PP Muhammadiyah
	1.2 Program bantuan kemanusiaan dan dialog perdamaian di Bangsamoro	Bantuan Relawan	100%	100%	100%	100%	100%	PM	Donatur/Phylantrophy (II - Masih diusulkan)	Philipina	Lembaga Kerjasama Hubungan Internasional PP Muhammadiyah
PROGRAM 6: ADVOKASI SISTEM LAYANAN DAN TRAINING KURSI RODA (EXCHANGE WHEELCHAIR TECHNOLOGY)											
Kegiatan 1: Seating Clinic	1.1 Jumlah peserta	Orang	-	-	10	10	-	AUD 56300	DFAT, USCID, APL (I - Tersedia)	Yogyakarta	OHANA
	1.2 Jangkauan wilayah	Wilayah Kabupaten/ Kota	-	-	10	3	-				
Kegiatan 2: Training Kursi Roda dan CRPD	2.1 Jumlah peserta	Orang	-	-	N/A	15	-	350	German Embassy (I - Tersedia)	Vietnam	OHANA
	2.2 Jumlah dokumen	Dokumen	-	-	N/A	1	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengembangan Komunitas UMKM (PKU)	1.1 Pengembangan pasar komunitas UMKM dan pelatihan manajemen bisnis serta marketing digital dengan melibatkan market place yang ada di Indonesia.	Persentase (%)	7 (2017)	-	-	30	70	1.000	LKSFI-UHAMKA (I - Tersedia)	JABODETAB EK	LKSFI-UHAMKA
PROGRAM 2: KNOWLEDGE MANAGEMENT BAGI PENGUATAN DEMOKRASI, AGAMA DAN KEBUDAYAAN											
Kegiatan 1: Digitalisasi Perpustakaan	1.1 Perluasan dan kemudahan akses pustaka dan literasi dengan teknologi digital	Koleksi	Sudah ada 1000 koleksi digital.	500 koleksi	500 koleksi	500 koleksi	500 koleksi	PM	Swadaya dan Kerjasama dengan Swasta (I - Tersedia)	Nasional	LAKPESDAM PBNU
Kegiatan 2: Penambahan Media Pembelajaran Masyarakat melalui Media Sosial	2.1 Ada sejumlah konten media pembelajaran masyarakat, dalam bentuk artikel, film pendek, infografik, review	Koleksi	-	40 koleksi	40 koleksi	40 koleksi	40 koleksi	PM	Swadaya (I - Tersedia)	Nasional	LAKPESDAM PBNU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: TCT	1.1 Training Program On Education for Computer Based industrial Automation	Negara participant (Peserta + Modul Praktikum + Akomodasi	-	-	13	16	18	2.208	JICA (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
		Honor dan Sewa Ruang	-	-	13	16	18	954,1	DIPA Universitas (Setneg) (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
	1.2 Training Course in Information Technology-based for Electric Engineering Education	Negara participant (Peserta + Modul Praktikum + Akomodasi	-	-	13	16	18	2.208	JICA (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
		Honor dan Sewa Ruang	-	-	13	16	18	954,1	DIPA Universitas (Setneg) (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil (OMS/NGO) maupun dari akademisi/pemuda.	1.1 Peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pembangunan	Persentase (%)	-	Pemetaan inisiatif Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemuda	10% - 20%	25%-55%	>60%	50	Donor (I - Tersedia)	Nasional	CISDI
Kegiatan 2: Memetakan setiap inisiatif pembangunan berdasarkan goals SDGs dalam platform Peta Kemitraan	2.1 Ketersediaan data yang berkualitas	Persentase (%)	-	Pemetaan inisiatif Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemuda	10% - 20%	25%-55%	>60%	150	Donor (I - Tersedia)	Nasional	CISDI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Research-based policy making	1.1 Indikator Kegiatan : Tingkat Keterlibatan Lembaga dalam Proses Pembentukan Kemitraan Pemerintah- Swasta-Sipil, Berbentuk Kebijakan, Festival, Lokakarya, dan Penelitian	Rasio	2015	50%	60%	70%%	75%	(III - Belum tersedia sumber)		Nasional	Koalisi Seni dan anggota Koalisi di > 14 provinsi
	1.2 Indikator Kegiatan : Kemitraan antara Pelaku Seni dan Pemerintah, antara lain berbentuk Kebijakan, Festival, Lokakarya, Penelitian, Pendataan	Unit Kegiatan	2015	25	50	75	100	(III - Belum tersedia sumber)			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1 : Pengorganisasian relawan Gerakan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1.1 Relawan Gerakan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Orang	-	-	100	1000	5000	70	Donasi dan sponsorship (II - masih diusulkan)	Nasional	Meetchange dan Kolaborator
Kegiatan 2 : Mensosialisasikan dan mengajak bergabung individu dan organisasi aktor sektor publik dari 4 platform TPB di seluruh Indonesia pada gerakan pembangunan berkelanjutan, dengan mendaftarkan profil organisasi di Meetchange.id.	2.1 Aktor sektor publik yang bergabung di Gerakan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Orang/ Organis asi	-	-	500	50000	200000	250	Donasi dan sponsorship (II - masih diusulkan)	Nasional	Meetchange dan Kolaborator
Kegiatan 3 : Mengumpulkan dan mengumumkan penawaran sumber daya pendanaan, teknologi, sumber daya manusia, dan item spesifik dari aktor sektor publik yang memiliki program di setiap tujuan TPB dari seluruh Indonesia melalui platform Meetchange.id	3.1 Jumlah penawaran sumber daya	Penawar an	-	-	100	2000	8000	200	Donasi dan sponsorship (II - masih diusulkan)	Nasional	Meetchange dan Kolaborator

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4 : Mengumpulkan dan mengumumkan proyek atau program pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh aktor sektor publik yang bergabung di gerakan, termasuk kebutuhan proyek seperti dana, SDM, teknologi, dan item spesifik melalui platform Meetchange.id	4.1 Jumlah proyek/program	Proyek	-	-	100	8000	32000	100	Donasi dan sponsorship (II - masih diusulkan)	Nasional	Meetchange dan Kolaborator
Kegiatan 5 : Mempertemukan pemilik proyek/program pembangunan berkelanjutan dengan pemilik penawaran sumber daya yang relevan sehingga terjalin kesepakatan kemitraan.	5.1 Jumlah komitmen kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat sipil	Pernyataan Komitmen	-	-	100	5000	500000	100	Donasi dan sponsorship (II - masih diusulkan)	Nasional	Meetchange dan Kolaborator
PROGRAM 5: PENGEMBANGAN FORUM STAKEHOLDER FILANTROPI UNTUK IMPLMENETASI PROGRAM-PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS											
Kegiatan 1: Pengembangan data base sektor filantropi sebagai referensi untuk pengembangan peran dan kontribusi lembaga-lembaga filantropi dalam	1.1 Pengembangan database lembaga filantropi	Lembaga	2015	-	200	200	200	PM	Ford Foundation (I - Tersedia)	Nasional	Filantropi Indonesia dan lembaga-lembaga filantropi yang menjadi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1 : Sosialisasi Roadmap Renstra DWP 2015-2019 kepada Mitra Kerja	1.1 Jumlah MoU dengan Mitra	Dokume n	12	13	15	17	17	PM	Swadaya (II - masih diusulkan)	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

MATRIKS BAGIAN 3: INDIKATOR TPB/SDGs YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Belum semua indikator TBP/SDGs Indonesia sudah dirumuskan metadatanya karena masih menunggu kesepakatan global tentang indikator tersebut (sebagian besar adalah indikator SDGs Tier III) atau karena pada saat perumusan indikator, Tim belum berhasil merumuskan metadatanya. Dalam buku “Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia”, indikator tersebut termasuk kategori “indikator yang akan dikembangkan”. Secara bertahap indikator dengan kategori akan dikembangkan tersebut akan dirumuskan metadatanya melalui proses pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan dunia usaha, pakar dan akademisi) dibantu oleh Organisasi PBB yang mengampu indikator tersebut. Meski masih dalam kategori “indikator yang akan dikembangkan”, sudah terdapat program atau kegiatan yang diindikasikan terkait dengan beberapa indikator tersebut, baik dikerjakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Seperti halnya perumusan metadata tahap pertama, perumusan metadata tahap kedua akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi baik offline maupun online untuk disepakati bersama. Berikut adalah daftar indikator yang akan dikembangkan untuk Pilar Pembangunan Ekonomi:

TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih
7.A.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar
7.B.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan

TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)
8.6.1	Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran.
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.
8.A.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
8.B.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.

TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi
9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk
9.A.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.
9.B.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah

TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
10.2.1	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas.
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB
10.5.1	Financial Soundness Indicator
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan
10.A.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen
10.B.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)
10.B.1.(a)	Peningkatan kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
10.C.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan
10.C.1.(a)	Biaya pengiriman remitansi

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.
17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.
17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR
17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).
17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.

SALINAN

ANAK LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Regional	SR	1 (kawasan) *	300 (ltr/ detik)*	750 (ltr/ detik)*	280,00 0	240,00 0	124,885.40	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan	SR	237 (IKK)*	3,184 (ltr/ detik)*	3,078 (ltr/ /detik) *	3,200, 000	2,728, 000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan	SR				1,160, 000	1,148, 800		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Perdesaan berbasis masyarakat	SR	1,449 (Desa)*	-	3,660 (desa)*	2,560, 000	2,978, 560		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.5. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan	SR	246 (Kawasan) *	351 (Kawa- san)*	40 (kawa- san)* & 234	152,00 0	221,60 0		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan nelayan	SR			(ltr/ detik)*	15,990	21,027		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.7. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar	SR				352,00 0	409,28 0		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	70.97*	71.14*	72.04*	94	100	128	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)										
Kegiatan 1: DAK Bidang Air Minum	1.1. Peningkatan cakupan sistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui	jiwa	PM	1.763. 476*	783.47 0*	970,26 2	PM	-	APBN	Kementerian Keuangan
	1.1.1 Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal	jiwa	PM				PM	-	APBN	Kementerian Keuangan
	1.1.2 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume	jiwa	PM				PM	-	APBN	Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	dari sarana dan prasarana SPAM terbangun									
	1.2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (SPAM JP dan SPAM BJP)	jiwa	PM	1.428.702*	381.896*	590,157	PM	-	APBN	Kementerian Keuangan
INDIKATOR: 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR										
Kegiatan 1: Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.1. Jumlah intake air baku yang dibangun	buah	-	37*	100	100	100	19,794,900	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah summur air tanah yang dibangun	buah	4*	54*	128	5	5		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Panjang saluran pembawa yang dibangun	km	554*	899*	665	51	51		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah intake air baku yang ditingkatkan/ direhabilitasi	buah	-	16*	31	64	215		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5. Jumlah summur air tanah yang ditingkatkan/ direhabilitasi	buah	-	303*	59	15	15		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.6. Panjang saluran pembawa yang ditingkatkan/ direhabilitasi	km	1,616*	144*	61	463	1,425		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN										
Kegiatan 1: Penyehatan Lingkungan	1.1. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	43.58*	16.02*	40	45	50	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.2. Persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	61.44*	52.64*	54	56	58	-	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR : 6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN										
Kegiatan.1: Penyehatan Lingkungan	1.1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	desa/kel	26,417*	33,803*	35,000	40,000	45,000	-	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR : 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.										
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber	1.1 Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah	kota/kab	2*	2*	2*	9	9	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1.1. Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota	kota/kab	2*	2*	2*	9	9	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala komunal	kota/kab	206*	197*	158*	165	89	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kawasan	kota/kab	22*	15*	19*	37	17	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)										
Kegiatan 1: DAK Bidang Sanitasi	1.1. Pembangunan IPAL Kawasan	Jiwa	PM	7,600	93,000	PM	PM	-	APBN	Kementerian Keuangan
	1.2. Pembangunan IPAL Komunal	Jiwa	199,650	243,182	134,706	PM	PM	-	APBN	Kementerian Keuangan
	1.3. Pengembangan SR	Jiwa	800	30,910	19,106	PM	PM	-	APBN	Kementerian Keuangan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan, pengendalian kerusakan perairan darat	1.1. Jumlah danau prioritas yang ditingkatkan kualitas air danau dan status tropiknya minimal menjadi mesotrofik sebanyak 15 danau prioritas	danau	1	6	9	12	15	4,835.70	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR : 6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran air	1.1. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	sungai	2	4	8	15	3	640.3	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	sungai	3	3	3	2	5	25,630	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.3. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	sungai	0	2	9	12	15	54,150	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.4. Persentase beban Pencemaran Air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	%	4.26	2	3	4	5	22,415	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR : 6.4.1.(a). Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1:										
Kegiatan 1: Penyusunan peraturan terkait pemanfaatan air tanah khususnya pembatasan penggunaan air tanah oleh industri termasuk insentif dan disinsentif	1.1. Terbitnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait pemanfaatan air tanah (juga memandatkan daerah untuk membuat peraturan)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 2: Analisa penggunaan air tanah dalam program-program pemerintah	2.1. Persentase hasil analisa penggunaan air tanah dalam program pemerintah	%	-	-	10	10	10	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 3: Dokumentasi praktik-praktik yang baik (good practices) pengelolaan air tanah, termasuk efisiensi air	3.1. Dokumen praktik-praktik yang baik (good practices) pengelolaan air tanah	Dokumen	-	-	-	-	1	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 4: Penyediaan data-data sumber dan titik air tanah yang diberikan ke daerah	4.1. Persentase kabupaten /kota yang menerima data sumber air tanah	%	-	-	10	20	30	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung gerakan hemat air melalui menangkap, menyimpan, dan menggunakan kembali air	5.1. Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi Kegiatan	-	-	10	50	50	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kegiatan 6: Studi dampak pengambilan air tanah	6.1. Dokumen hasil studi	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR : 6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.										
PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN										
Kegiatan 1: Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	1.1 Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JIUT,JIDES dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan pekerbunan	Ha	-	1,500,000	350,000	350,000	350,000	-	APBN	Kementerian Pertanian

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyusunan Revisi UU Tata Ruang untuk mendukung tata ruang berbasis DAS	1.1 Dokumen revisi UU Tata Ruang	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kegiatan 2: Penyusunan Permen ATR untuk memastikan Perda tata ruang memasukkan program rehabilitasi lahan	2.1. Dokumen Permen Agraria dan Tata Ruang (ATR)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
INDIKATOR : 6.5.1.(b). Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.										
PROGRAM: Pengelolaan Instrumentasi Rekayasa dan Kalibrasi BMKG										
Kegiatan1: Meningkatnya Layanan Instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi peralatan klimatologi	1.1. Jumlah lokasi peralatan operasional klimatologi di Stasiun Klimatologi, peralatan klimatologi hasil rekayasa yang dapat dioperasikan dengan baik dan lokasi stasiun klimatologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Lokasi	-	362	430	430	430	-	APBN	Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika
INDIKATOR : 6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat	1.1. Jumlah Danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya	Danau	0 (2014)	6	15	15	15	4,835.7 (telah di tag di indikator 6.6.1.(a))	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR : 6.5.1.(d). Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	1.1 Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara	DAS	3	7	11	15	19	4,835.70	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 2: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyusunan panduan Integrasi program sektoral dalam kawasan DAS untuk pemerintah daerah	1.1. Dokumen panduan untuk daerah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bappenas
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait pengetahuan dan teknologi pengelolaan DAS	2.1. Persentase kabupaten/kota yang menerima sosialisasi pengelolaan DAS	%	-	10%	20%	30%	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 3: Penyusunan revisi Peraturan Pemerintah (PP) pengelolaan DAS sesuai kewenangan dalam UU 23/2014	3.1. Dokumen revisi PP Pengelolaan DAS	Dokumen	-	-	-	-	1	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 4: Revitalisasi HKM untuk mendukung konservasi DAS	4.1. Luasan lahan yang dikelola HKM	Hektar	-	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 5: Restorasi sungai di lahan kritis	5.1. Panjang sungai yang direstorasi	km	-	-	-	-	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 6.5.1.(e). Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	1.1. Luas dan produksi HHBK				1,000	1,000	-	2017 (15 miliar), 2018 (18 miliar)	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 2: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyusunan panduan Integrasi program sektoral dalam kawasan DAS untuk pemerintah daerah	1.1. Dokumen panduan untuk daerah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bappenas
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait pengetahuan dan teknologi pengelolaan DAS	2.1. Persentase kabupaten/kota yang menerima sosialisasi pengelolaan DAS	%	-	10%	20%	30%	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	1.1. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019	DAS	0 (2014)	7	15	15	15	4,835.70	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 2: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyusunan panduan Integrasi program sektoral dalam kawasan DAS untuk pemerintah daerah	1.1. Dokumen panduan untuk daerah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bappenas
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait pengetahuan dan teknologi pengelolaan DAS	2.1. Persentase kabupaten/kota yang menerima sosialisasi pengelolaan DAS	%	-	10%	20%	30%	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Penyusunan revisi Peraturan Pemerintah (PP) pengelolaan DAS sesuai kewenangan dalam UU 23/2014	3.1. Dokumen revisi PP Pengelolaan DAS	Dokumen	-	-	-	-	1	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 4: Revitalisasi HKM untuk mendukung konservasi DAS	4.1. Luasan lahan yang dikelola HKM	Hektar	-	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 5: Restorasi sungai di lahan kritis	5.1. Panjang sungai yang direstorasi	km	-	-	-	-	-	-	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 6.5.1.(i). Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	1.1. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019	DAS	0 (2014)	7	15	15	15	4,835.70	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 2: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Penyusunan panduan Integrasi program sektoral dalam kawasan DAS untuk pemerintah daerah	1.1. Dokumen panduan untuk daerah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat	1.1. Jumlah Danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Danau	0 (2014)	6	15	15	15	4,835.70	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR : 6.6.1.(b). Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat	1.1. Jumlah Danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya	Danau	0 (2014)	6	15	15	15	4,835.7 (telah di tag di indikator 6.6.1.(a))	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR: 6.6.1.(c). Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.										
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG										
Kegiatan 1: Pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat	1.1. Jumlah Danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya	Danau	0 (2014)	6	15	15	15	4,835.7 (telah di tag di indikator 6.6.1.(a))	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.1. Jumlah rumah tangga (RT) berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Tapak dan Sarusun (termasuk sewa beli)	RT	130,000	175,000	225,000	250,000	120,000	1,049.4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah rumah tapak yang mendapat fasilitas Kredit Konstruksi	RT	0	1,000	1,500	2,000	1,500		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Swadaya	RT	0	50,000	150,000	200,000	50,000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan uang muka	RT	55,000	106,500	124,250	124,370	65,880		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,	1.1. Luas kawasan kumuh perkotaan	Ha	1,610	8,975	9,956	9,500	8,390	46,448,000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	1.2. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	1,477	1,483	1,633	1,620	1,470			Perumahan Rakyat
PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Kegiatan 1: Pengembangan Perumahan Swadaya	1.1. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya	Unit	20,000	45,000	50,000	60,000	75,000	3,309,900	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	65,000	300,000	350,000	385,000	400,000			
Kegiatan 2: Pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Sewa	2.1. Jumlah unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya	Unit	13,360	134,160	134,160	134,160	134,160			
PROGRAM 3: PENANGANAN FAKIR MISKIN										
Kegiatan 1: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.1. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan)	Unit	170	30	20	30	30	-	APBN	Kementerian Sosial
	1.2. Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan)	Unit	12,003	5,350	1,000	7,300	7,300	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas	1.1. Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas	Kota & Kawasan Perkotaan Metropolitan & Kota/Kawasan Perkotaan	4 & 1 & 112	4 & 3 & 140	4 & 3 & 160	4 & 3 & 166	2 & 2 & 166	124,885.40	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.										
PROGRAM 1: Bina Administrasi Kewilayahan										
Kegiatan 1: Fasilitasi Penataan Perkotaan	1.1. Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP	Kota sedang & Kota baru publik	-	8 & 5	8 & 5	8 & 5	8 & 5	2,261.00	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR: 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT										
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	1.1. Jumlah BRT	Unit	-	50	50	50	50	3,622.88	APBN	Kementerian Perhubungan
	1.2. Jumlah Bus Pemandu Moda	Unit	-	0	0	0	50	54.38		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3. Jumlah Bus Angkutan Umum/ Pelajar/Mahasiswa	Unit	-	50	50	0	200	163.75		
	1.4. Jumlah ATCS (baru)	paket	-	0	0	15	17	533.49		
	1.5. Jumlah ATCS (lanjutan)	paket	-	2	2	8	4	178.92		
	1.6. Jumlah Fasilitas Integrasi Moda	Paket	-	1	0	0	0	42		
INDIKATOR : 11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar										
PROGRAM 1: PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN										
Kegiatan 1: Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	1.1. Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya	Km'sp	194.78	196.07	246.16	279	333.8	4,650.05	APBN	Kementerian Perhubungan
	1.2. Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi	Km'sp	-	542,27	902,2	1.353,17	1.487,06	158,965.52		
	1.3. Jumlah Km'sp jalur lingkaran KA layang yang dibangun	Km'sp	-	-	-	-	-	8,841.00		
	1.4. Jumlah Km'sp pengadaan material rel	Km'sp	2,030	350	550	700	700	5,806.48		
	1.5. Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya	Km'sp	33.9	44.9	45	45	58.95	511.05		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6. Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun	Km'sp	17.35	24.3	32	32	40	5,434.82		
INDIKATOR : 11.3.1.(a) Jumlah kota sedang di luar jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama										
PROGRAM 1: BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengembangan Perkotaan, Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	1.1. Kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan sarana prasarana pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Perkotaan	Kawasan Metropolita n	1	2	3	0	5	-	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR: 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).										
PROGRAM 1: Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang										
Kegiatan 1: Perencanaan Tata Ruang	1.1. Terlaksananya Fasilitasi Legislasi Raperpres RTR KSN Gerbangkertasusila	43 kota belum optimal perannya (2014)	0	0	0	1	1	-	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
INDIKATOR 11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam forum dialog perencanaan pembangunan kota berkelanjutan										
PROGRAM 1: PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG INFRASTRUKTUR										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Indikator Program	Jumlah Kota/Kawasan yang ditata dan ditatat sebagai kota pusaka	Kota/ kawasan	29	29	29	29	29	-	APBN	Kementerian PUPR
INDIKATOR : 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA										
Kegiatan 1: Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	1.1 Jumlah rekomendasi pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomenda si	-	-	-	40	40	2,702	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
	1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomenda si	-	-	-	46	46	9,296	APBN	
	1.3 Jumlah lokasi yang menerima penyaluran bantuan darurat	Lokasi	74	35	99	-	-	8,350	APBN	
Kegiatan 2: Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana	2.1 Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik	Lokasi	33	134	134	136	136	368,684	APBN	
Kegiatan 3: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana	3.1 Jumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik	Lokasi	1	1	3	3	3	15,300	APBN	
Kegiatan 4: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana	4.1 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah pascabencana	Lokasi	14	14	20	38	38	107,389	APBN	
	4.2 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan sosial di daerah pascabencana	Lokasi	3	3	6	12	12	30,854	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Penanganan pengungsi akibat bencana	5.1 Jumlah layanan penanganan pengungsi akibat bencana	Lokasi	3	13	15	36	36	19,595	APBN	
Kegiatan 6: Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	6.1 Jumlah rekomendasi bantuan pendanaan dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi paca bencana	Rekomenda si	-	-	-	2	2	22,548	APBN	
	6.2 Jumlah penilaian kerusakan dan kerugaian serta kebutuhan pascabencana	Laporan	1	1	100	-	-	13,819	APBN	
	6.3 Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Dokumen	1	4	3	-	-	10,965	APBN	
Kegiatan 7: Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana	7.1 Jumlah lokasi yang mendapatkan bantuan peralatan	Lokasi	33	34	60	58	58	1,151,106	APBN	
Kegiatan 8: Tanggap darurat di derah terkena bencana	8.1 Operasi penanganan darurat	Lokasi	33	35	20	20	20	187,560	APBN	
INDIKATOR 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)										
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA										
Kegiatan 1: Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1.1. Jumlah laporan kegiatan koordinasi kesiapsiagaan	laporan	2	2	2	2	2	138	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah lokasi kegiatan fasilitasi kesiapsiagaan	lokasi	25	25	25	25	25	622,6		
	1.3. Jumlah dokumen rencana kontingensi	dokumen	8	8	8	8	8	118		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4. Jumlah dokumen pedoman kesiapsiagaan	dokumen	5	5	5	5	5	83		
	1.5. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan	kegiatan	3	3	3	3	3	391		
PROGRAM 2: PENGURANGAN RISIKO BENCANA										
Kegiata 1: Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	dokumen	69	40	40	40	69	52	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dokumen	10	17	19	19	19	327		
	1.3. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	35	39	39	39	39	1,152		
	1.4. Jumlah lokasi fasilitasi penerapan mitigasi bencana	lokasi	31	39	41	41	41	743		
	1.5. Jumlah lokasi fasilitasi pengurangan risiko bencana regional	lokasi	3	4	4	4	4	180		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.6. Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	dokumen	5	4	5	5	5	730		
	1.7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana	laporan	6	6	6	6	8	370		
	1.8. Jumlah relawan PB	relawan	2000	2000	2000	2000	2000	362		
	1.9. Jumlah dokumen forum PRB	dokumen	6	8	10	12	14	281		
	1.10. Jumlah desa tangguh bencana	desa	70	80	90	100	100	2,901		
	1.11. Jumlah dokumen pedoman pemberdayaan masyarakat	dokumen	3	3	3	3	3	185		
	1.12. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	kegiatan	3	3	3	3	3	391		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR : 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk										
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA /PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
Indikator Program	1.1. Jumlah desa tangguh	desa	-	70	80	90	100	100	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
INDIKATOR : 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA										
Indikator Program	1.1. Persentase akurasi informasi peringatan dini cuaca ektrim untuk 27 propinsi skala kabupaten	%	90	90	91	91	92	-	APBN	Badan Meteorologi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
	1.2. Persentase akurasi informasi cuaca publik 1 hari sebelum kejadian untuk 33 propinsi	%	70	72	75	78	80	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan permukiman	1.1. Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	NSPK	2	2	2	2	2	46,448	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman	Kab/Kota	110	100	100	100	97			
	1.3. Luas peningkatan kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan	Ha	2679.78	9300	9500	8900	8061.47			
	1.4. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan	Kelurahan	1477	1483	1633	1620	1470			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1,299, 641	1,299, 641	610 (telah di tag di indikator 16.3.1.(a)	APBN	POLRI
	1.2 Giat Penyuluhan, dalam rangka Sambang &FGD kontra radikal	Kegiatan	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasar an 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasar an 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasar an 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasar an 120 org) di 13 Polda	847,403 (telah di tag di indikator 16.3.1.(a)	APBN	POLRI
	1.2 Door to door system (DDS)	Kegiatan	8,218,129	50,283 ,521	53,338 ,326	53,338 ,326	53,338 ,326	488,149 ((telah di tag di indikator 16.3.1.(a)	APBN	POLRI
INDIKATOR : 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA /PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
Kegiatan 1: Pengurangan risiko bencana	1.1. Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	Dokumen	52	52	44	34	52	254,483	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	Dokumen	21	21	21	14	14			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: PENANGGULANGAN BENCANA /PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
Kegiatan 1: Pengurangan risiko bencana	1.1. Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	Dokumen	52	52	44	34	52	254,483 (dana telah di tag di indikator 11.b.1*)	APBN	Badan Nasional Penanggulan gan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	Dokumen	21	21	21	14	14			
	1.3. Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan pengurangan risiko bencana	Lokasi	38	38	38	38	24			
	1.4. Jumlah daerah yang menerapkan mitigasi bencana	Lokasi	25	25	25	25	25			
	1.5. Jumlah pertemuan pengurangan risiko bencana regional yang diselenggarakan	Kegiatan	4	4	4	4	4			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5. Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	Dokumen	5	5	5	5	5			
	1.6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	6	6	6	6	6			
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
INDIKATOR : 12.1.1*. Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.										
PROGRAM 1: Program Nasional10 tahun SCP 2013-2023										
Kegiatan 1: Pertemuan dalam rangka Updating kolaborasi SCP	1.1. Jumlah Kolaborasi Pertemuan dalam rangka Updating kolaborasi SCP	Kolaborasi tematik	4	5	6	7	8	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR: 12.4.1.(a). Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
PROGRAM 2: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan										
Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran Udara	1.1. Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri	industri	-	-	188	188	1500	15,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Pemulihan lahan akses terbuka	2.1. Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	industri	-	-	18	18	80	5,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 3: Pengendalian Pencemaran Air	3.1. Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau	industri	-	-	600	1800	1800	26,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR: 12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
PROGRAM 1: Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3										
Kegiatan 1: Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	1.1. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengumpulan limbah B3.	%	-	60	-	-	-	5,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengangkutan limbah B3.	%	-	90	-	-	-	5,000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pemanfaatan limbah B3	%	-	90	-	-	-	5,000		
	1.4. Meningkatnya persentase pencapaian target verifikasi pengolahan limbah B3.	%	-	80	-	-	-	5,000		
	1.5. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan verifikasi penimbunan limbah B3.	%	-	60	-	-	-	5,000		
	1.6. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan verifikasi dumping limbah B3	%	-	90	-	-	-	5,000		
	1.7. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan penetapan limbah B3 dan limbah non B3	%	-	30	-	-	-	5,000		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.8. Meningkatnya persentase pencapaian target kegiatan notifikasi limbah B3 dan limbah non B3	%	-	95	-	-	-	5,000		
	1.9. Meningkatnya volume dan Jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya setiap tahun	ton dan jenis	-	196.000 dan 35	-	-	-	20,000		
	1.10. Pelayanan izin pengelolaan limbah B3 termasuk rekomendasi pengangkutan penetapan limbah B3 sebanyak 400 izin dan rekomendasi	izin/rekomendasi	-	-	400	400	400	5,000		
Kegiatan 2: Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	2.1. Terdatanya timbulan jenis dan jumlah limbah B3 dan limbah Non B3 dari industri yang dipantau pada setiap sektor	industri	-	235	-	-	-	40,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.2. Teranalisisnya jumlah limbah B3 terkelola setiap sektor	juta ton	-	75100	-	-	-	40,000		
	2.3. Tersedianya data limbah B3 cair dan padat yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pada setiap sektor	ton	-	601,49 8.50	-	-	-	20,000		
	2.4. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan	fasilitas	-	-	1	1	2	-		
	2.5. Peningkatan pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 sebagai sumber energi atau bahan baku	unit	-	-	1	6	5	-		
	2.6. Peningkatan kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3	industri	-	-	400	400	400	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah B3	3.1. Sistem dan mekanisme inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi Limbah B3 tersedia	%	-	100	-	-	-	15,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.2. Lahan Terkontaminasi Limbah B3 terinventarisasi dan teridentifikasi setiap tahun	Ekoregion	-	1 ekoregion (Sumatera)	-	-	-	50,000		
	3.3. Lahan terkontaminasi Limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan meningkat setiap tahun	ton	-	90,000	-	-	-	100,000		
	3.4. Lahan terkontaminasi Limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun	ton	-	4,500	-	-	-	100,000		
	3.5. Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah B3 tersedia dan beroperasi	%	-	100	-	-	-	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengelolaan Sampah	1.1. Terkelolanya sampah dari barang dan kemasan melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (EPR)	ton	15	38	60	70	85	20,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.3. Terkelolanya sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana pusat daur ulang	ton	25,550	36,500	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	50,000		
	1.4. Terkelolanya sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana bank sampah	ton	36,500	36,500	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	75,000		
	1.5. Terkelolanya sampah melalui pemantaun dan evaluasi kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan	ton	13,439,212	14,067,190	14,955,644	16,363,967	17,798,961	100,000		
INDIKATOR: 12.6.1.(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										
PROGRAM 1: Dukungan manajemen yang menerapkan tugas teknis lainnya KLHK										
Kegiatan 1: Peningkatan Penerapan SNI ISO 14001 bagi perusahaan	1.1. Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi terkait sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	478	511	556	570	580	-	APBN	Badan Standarisasi Nasional

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2 : Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.1. Jumlah dokumen kebijakan untuk penerapan SNI ISO 14001	Paket	-	-	-	-	1	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.2. Jumlah dokumen pedoman pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Dokumen	-	-	-	-	1	-		
	2.3. Jumlah paket kebijakan yang memberi insentif pada perusahaan penerap SNI ISO 14001	Paket	-	-	-	-	1	-		
	2.4. Jumlah kegiatan fasilitasi penerapan SNI ISO 14001	Kegiatan	-	-	-	1	1	-		
	2.5. Jumlah dokumen pedoman SNI ISO 14001 untuk industri kecil dan menengah	Dokumen	-	-	-	-	1	-		
	2.6. Jumlah kolaborasi stakeholder terkait SNI ISO 14001	Kolaborasi	-	-	-	1	1	-		
	2.7. Jumlah paket kebijakan yang mendukung pengembangan sistem penerapan SNI ISO 14001	Paket	-	-	-	-	1	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.8. Jumlah dokumen informasi tentang perusahaan yang telah menerapkan SNI ISO 14001	Dokumen	-	-	-	1	1	-		
	2.9. Jumlah dokumen informasi tentang perusahaan yang menjadi target penerapan SNI ISO 14001	Dokumen	-	-	-	1	1	-		
	2.10. Jumlah dokumen informasi tentang perusahaan terbaik dan manfaat SNI ISO 14001	Dokumen	-	-	-	-	1	-		
INDIKATOR: 12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.										
PROGRAM: Dukungan Manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK										
Kegiatan 1: Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.1 Jumlah kategori produk berdasarkan skema yang dikembangkan K/L	Kategori Produk	8	2	1	2	1	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2 Jumlah teknologi berdasarkan skema yang dikembangkan K/L	Teknologi	0	16	25	20	20	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah K/L yang memiliki skema label ramah lingkungan	K/L	3	2	1	1	1	-		
	1.4 Jumlah lembaga sertifikasi produk ramah lingkungan	Lembaga Sertifikasi	3	1	1	1	1	-		
	1.5 Jumlah barang ramah lingkungan yang terregistrasi	Barang	18	5	4	6	4	-		
	1.6 Jumlah jasa (lembaga) ramah lingkungan yang terregistrasi	Jasa	18	18	7	5	4	-		
	1.7 Jumlah standar / kriteria yang diterapkan	Standard/Kriteria	11	2	1	2	2	-		
	1.8 Jumlah produk ramah lingkungan yang dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa	Produk	0	0	7	2	4	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.9 Jumlah pengaduan	Pengaduan	0	0	0	2	0	-		
	1.10 Jumlah produk berlabel lingkungan yang dimonitor	Produk	2	2	1	1	1	-		
INDIKATOR: 12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
PROGRAM 1: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK										
Kegiatan 1: Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.1. Jumlah paket kebijakan yang memberi insentif pada fasilitas publik yang menerapkan SPM	Paket	-	-	-	1	3	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2. Jumlah kegiatan fasilitasi penerapan SPM FP	Kegiatan	-	-	-	1	1	-		
	1.3. Jumlah dokumen pendukung penerapan SPM FP	Dokumen	-	-	-	1	1	-		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyediaan akses literasi informasi dengan konten lingkungan dan perubahan iklim	1.1 Jumlah mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	perpustakaan	50	25	20	50	50	-	APBN	Perpustakaan Nasional RI
	1.2 Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan langganan e-jurnal	eksemplar	143,000	144,000	470,800	677,813	677,813	-		
INDIKATOR: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
PROGRAM 1: Penanggulangan Bencana										
Kegiatan 1: Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	1.1 Jumlah rekomendasi pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomendasi	-	-	-	40	40	2,702 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan pemberian bantuan kebutuhan dasar	Rekomendasi	-	-	-	46	46	9,296 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
	1.3 Jumlah lokasi yang menerima penyaluran bantuan darurat	Lokasi	74	35	99	-	-	8,350 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana	2.1 Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik	Lokasi	33	134	134	136	136	368,684 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 3: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana	3.1 Jumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik	Lokasi	1	1	3	3	3	15,300 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 4: Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana	4.1 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah pascabencana	Lokasi	14	14	20	38	38	107,389 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
	4.2 Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan sosial di daerah pascabencana	Lokasi	3	3	6	12	12	30,854 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	
Kegiatan 5: Penanganan pengungsi akibat bencana	5.1 Jumlah layanan penanganan pengungsi akibat bencana	Lokasi	3	13	15	36	36	19,595 (telah di tag di indikator 11.5.1*)	APBN	

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi	1.1. Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan emisi dan serapan GRK) yang termutakhirkan dan/atau dilaporkan melalui NatCom/BUR	Dokumen	1	1	1	1	1	89,000	APBN	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
	1.2. Jumlah Dokumen Laporan Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi dan teregistri dan/atau dilaporkan melalui NatCom/BUR	Dokumen	1	1 doku- men Nat- Com	1 doku- men Lapo- ran Penu- runan Emisi	1 doku- men Lapo- ran Penu- runan Emisi	1 doku- men Lapo- ran Penu- runan Emisi			
TUJUAN 14. EKOSITSEM LAUTAN										
INDIKATOR : 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional										
PROGRAM 1: Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil										
Kegiatan 1: Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.1. Jumlah lokasi laut, selat, teluk antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi	Lokasi	34	1	2	6	9	6,295.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Jumlah provinsi yang memiliki RZWP3K yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Prov.	26	6	8	23	-	7,824.9		
	1.3. Jumlah KSN dan KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Kawasan	4	2	5	47	37	11,655.4		
	1.4. Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi	Kawasan Pesisir	-	-	10	20	30	7,013.0		
	1.5. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil utara Jawa yang direhabilitasi mangrovenya	Batang/lokasi	3,000,000 (Batang)	3,000,000 (Batang)	900,000 (Batang)	6 (Lokasi)	6 (Lokasi)	11,655.5		
	1.6. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Kawasan	48	17	17	11	10	235,852.6		
INDIKATOR : 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1: Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.1. Jumlah laut pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	WPP	5	7	9	10	11	25,000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya	WPP	3	6	9	10	11	25,000		
	1.3. Kelembagaan pengeloaan WPP yang terbentuk	WPP	-	-	11	11	11	25,000		
	1.4. Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikan	WPP	2	4	6	7	7	25,000		
INDIKATOR : 14.4.1* Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman										
PROGRAM 1: Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
Kegiatan 1: Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.1. Produksi Perikanan Tangkap	%	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	-	APBN	Kementerian Kelautan dan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)	WPP	2	5	7	9	11	20,000		Perikanan (KKP)
PROGRAM 2: Riset dan Sumber Daya Manusia										
Kegiatan 1: Riset Perikanan	1.1. Kajian stok sumberdaya perikanan di WPP	WPP	11	11	11	11	11	75,000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
INDIKATOR : 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan										
PROGRAM 1: Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil										
Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	1.1. Jumlah luas kawasan konservasi	Jt Ha	17	18	18	19	20	406,943.1	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan	17	28	30	33	35			
	1.3. Kawasan konservasi yang dimanfaatkan	Kawasan	15	20	20	25	30			
	1.4. Penambahan luas kawasan konservasi	Jt Ha	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	8,461.2	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.5. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis	16	17	18	19	20	53,603.1	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
INDIKATOR : 14.6.1.(a) Jumlah kepatuhan pelaku usaha										
PROGRAM 1: Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
Kegiatan 1: Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.1 Persentase Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	70	73	76	81	87	-	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Persentase cakupan pengawasan WPP-NRI dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	%	56,6	13,41	59,6	66,49	70,41			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3. Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Provinsi	11	15	20	25	34	50,000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Kegiatan 2: Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	2.1. Persentase ketaatan pelaku usaha yang tidak melakukan kerusakan mangrove dan terumbu karang	%	55	60	70	80	90	43,800.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2.2. Operasional kapal pengawas	Hari	270	129	136	145	150	1,487,096.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2.3. Operasional pesawat patroli	Hari	-	-	140	100	100	97,845.8	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2.4. Operasional speed boat	Hari	68	50	50	50	50	121,132.1	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2.5. Speedboat pengawas yang dibangun	Unit	20	5	18	2	10	124,760.2	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2.6. Kapal pengawas yang dibangun	Unit	4	4	3	1	6	970,161.8	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 1: Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	1.1. Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi	nelayan	-	-	-	500	500	2,000.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	Unit	-	-	-	1,100	1,100	10,500.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.3. Kawasan sentra nelayan yang tertata	lokasi	-	-	28	28	34	28,000.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
INDIKATOR : 14.b.1.(a) Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
PROGRAM 1: Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	1.1. Jumlah Peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi	Lokasi	34	34	34	8	8	245,780.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha	Orang	2,040	4,080	6,120	8,160	9,200			
	1.3. Jumlah pengembangan diversifikasi usaha	Orang	1,020	2,040	3,060	4,080	5,050			

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	1.1. Dokumen rencana pengelolaan perikanan di 11 WPP	dokumen (akumulasi)	1	10	11	11	11	22,000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN										
INDIKATOR : 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan										
PROGRAM 1: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan										
Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1.1. Indeks tutupan lahan minimal 62%	%	50.6	50.7	50.6	50.6	50.6	640,300	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya										
PROGRAM 1: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan 1: Pengelolaan Kawasan Konservasi	1.1 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	Hektar	5,454.00	9,225.87	60,000	80,000	100,000	165,470	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi	1.1. Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di tahun 2019 seluas 500.000 Ha	Hektar	553,918	623,058	0	0	0	32,580	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%										
PROGRAM 1: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan 1: Pengelolaan Kawasan Konservasi	1.1 Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia	Unit	12	40	150	200	260	165,470	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kegiatan 2: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	2.1 Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70% pada minimal 210 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia	Unit	12	40	120	160	210	2,543,030	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengelolaan Taman Nasional	3.1 Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia	Unit	12	40	30	40	50	2,387,880	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
PROGRAM 1: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan 1: Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	1.1 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit KPHK	KPHK	20	30	50	100	100	51,290	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kegiatan 2: Pengelolaan Kawasan Konservasi	2.1 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit KPHK	KPHK	20	30	50	80	100	165,470	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	3.1 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit KPHK	KPHK	20	30	50	100	100	2,543,030	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
PROGRAM 2: Pengendalian DAS dan Hutan Lindung										
Kegiatan 1: Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	1.1 Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019	KPHL	40	80	120	160	182	175,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Konservasi Spesies dan Genetik	1.1 Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	4	6	8	10	96,220	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kegiatan 2: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	2.1 Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	4	6	8	10	2,543,030	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 3: Pengelolaan Taman Nasional	3.1 Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	4	6	8	10	2,387,880	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata										
PROGRAM 1: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan 1: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1.1. Jumlah Priority Inform Concent (PIC) pemanfaatan sumber daya genetik yang diterbitkan	PIC	1	3	5	7	10	96,220	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
	1.2. Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis dan sistem kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional	unit	1	1	1	1	1	96,220		

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pembinaan konservasi ekosistem esensial	1.1. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	Dokumen	3	10	19	33	48	97,930	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi										
PROGRAM 1: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
Kegiatan 1: Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.1. Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus	%	75	75	75	75	75	79,960	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
INDIKATOR : 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.											
PROGRAM 1: Ibu dan Balita Sehat											
Kegiatan 1: pembekalan pengetahuan mengenai perilaku minum air yang bebas kuman kepada ibu	1.1 Jumlah ibu mengalami peningkatan pengetahuan mengenai air minum bebas kuman	Orang	-	-	150,00 0	150,000	150,00 0	-	Yayasan Unilever Indonesia	Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kota Tangerang, Kota Gorontalo, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Ternate, Kota Manado	Yayasan Unilever Indonesia, PDGI, Tim Penggerak Pemberdayaa n dan Kesejahteraa n Keluarga (TP PKK) Pusat dan Daerah, kader PKK dan posyandu
	1.2 Jumlah ibu mengalami peningkatan sikap untuk mengkonsumsi air minum bebas kuman	Orang									
	1.3 Jumlah ibu mengalami peningkatan perilaku konsumsi air minum bebas kuman	Orang									

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pembekalan pengetahuan mengenai perilaku minum air yang bebas kuman kepada anak di sekolah menengah	1.1 Jumlah anak mengalami peningkatan pengetahuan mengenai air minum bebas kuman	Orang	-	≈500,00 0	619,64 7	500,000	500,00 0	-	Yayasan Unilever Indonesia	DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat,	Yayasan Unilever Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Persada, Spektra, Heartindo, BMP, ICSD
	1.2 Jumlah anak mengalami peningkatan sikap untuk mengonsumsi air bebas kuman	Orang									
	1.3 Jumlah anak mengalami peningkatan perilaku konsumsi air minum bebas kuman	Orang									
PROGRAM 4: Give Pure Love Pure it											
Kegiatan 1: pemberian produk Pure It sebagai fasilitas penyedia air minum bebas kuman kepada 1000 fasilitas publik (sekolah, masjid,	1.1 Jumlah sarana publik yang menerima produk	Sarana publik	-	-	1,000	-	-	-	Yayasan Unilever Indonesia	Wilayah Jawa	PT Unilever Indonesia, Yayasan Unilever Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga Swadaya

Kegiatan 1: Dukungan untuk penyediaan akses masyarakat (termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) terhadap layanan sumber air minum layak	1.1 Jumlah KK yang mendapatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak	KK	0	-	-	40,000	50,000	-	USAID	32 kota/kab di 8 provinsi: Sumut: Medan, Tebing Tinggi, Pematangsianta r, Sibolga dan Kab. Deli Serd Banten: Kab. Tangerang DKI Jakarta Jabar: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kab. Karawang Jateng: Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Sukoharjo Jatim: Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Gresik, Probolinggo dan Lumajang Sulsel: Kota Makassar, Kab. Barru, Bantaeng dan Bulukumba Maluku: Kab. Maluku Tengah Malut: Kota Ternate Papua: Kota dan Kab Jayapura	USAID IUWASH PLUS
--	--	----	---	---	---	--------	--------	---	-------	--	-------------------------

Kegiatan: Peningkatan kinerja PDAM dalam memberikan layanan air minum bagi masyarakat	Jumlah PDAM yang meningkat kinerjanya dalam memberikan layanan air minum bagi masyarakat	Jumlah PDAM	0	-	-	10	10	-	USAID	30 PDAM Sumut: Medan, Tebing Tinggi, Pematangsianta r, Sibolga dan Kab. Deli Serd Banten: Kab. Tangerang Jabar: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kab. Karawang Jateng: Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Sukoharjo Jatim: Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Gresik, Probolinggo dan Lumajang Sulsel: Kota Makassar, Kab. Barro, Bantaeng dan Bulukumba Maluku: Kab. Maluku Tengah Malut: Kota Ternate Papua: Jayapura	USAID IUWASH PLUS
--	---	----------------	---	---	---	----	----	---	-------	--	-------------------------

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas PDAM untuk mendukung peningkatan kinerja PDAM	Jumlah PDAM yang mendapatkan dukungan bantuan teknis untuk program teknis yang mendukung peningkatan kinerjanya	Jumlah PDAM	0	-	-	10	10	-	USAID		USAID IUWASH PLUS

	1.4. Konservasi lingkungan untuk pemeliharaan mata air										Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten - Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung - Desa Guliling, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat - Desa Pucangsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur - Dusun Krajan, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur - Dusun Kerisik, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung,	- Yayasan FIELD Indonesia - Millenium Challenge Account
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur - Dusun Jurang Kecambah & Dusun Kebon Sari, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur - Dukuh Ampel Gading, Dusun Gading, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur - Dusun Dempok dan Dusun Curah Buntung, Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 8: PENYEDIAAN AIR MINUM LAYAK

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penyediaan air minum layak	1.1 jumlah PC MNU yang memproduksi air minum layak	unit	-	-	-	50	50	2000	III- Belum tersedia sumber	Nasional. Piloting : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah	Muslimat NU
INDIKATOR : 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											
PROGRAM 1: Keran hemat air											
Kegiatan 1: Pembuatan dan pemasangan alat penghemat air keran	1.1 Jumlah pembuatan dan pemasangan alat penghemat air keran	Unit	-	-	200	1000	2000	1,500	-	Pulau Jawa	MUI
PROGRAM 2: Pemanfaat Air Hujan											
Kegiatan 1: Pembuatan dan pemasangan alat pemanen air hujan	1.1 Jumlah alat pemanen air hujan	unit	-	-	1	20	50	1,050	-	Pulau Jawa	MUI
Kegiatan 2: Pembuatan dan pemasangan sumur resapan untuk hujan dan bekas wudhu	2.1 Jumlah sumur resapan untuk hujan dan bekas wudhu	unit	-	-	3	20	50	700	-	Pulau Jawa	MUI
Kegiatan 3: Pembuatan embung desa	3.1 Jumlah embung desa yang dibuat	unit	-	-	1	2	3	1,000	-	Pulau Jawa	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR : 6.1.1.(c) Proporsi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan											
PROGRAM 1: Give Pure Love Pure it											
Kegiatan 1: Pemberian produk Pure It sebagai fasilitas penyedia air minum bebas kuman kepada 1000 fasilitas publik (sekolah, masjid, posyandu, RPTRA)	1.1 Jumlah sarana yang menerima produk	Sarana publik	-	NA	1,000	-	-	-	Yayasan Unilever Indonesia	Wilayah Jawa	PT Unilever Indonesia, Yayasan Unilever Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Persada, Spektra, Yayasan Emmanuel, Yayasan Peduli Negeri, Bina Masyarakat Peduli, ICSD, Heartindo

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 2: Edukasi Hidrasi Sehat											
Kegiatan 1: Bekerja sama dengan HIMPAUDI Pusat	1.1 Jumlah Provinsi yang mengikuti ToT Hidrasi Sehat, Minum 6 gelas Air untuk anak PAUD	Provinsi	0	0	34	34	34	-	Danone	34 provinsi	Danone, HIMPAUDI, PAUD
INDIKATOR : 6.2.1.(a) Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air											
PROGRAM 1: Wash Initiative (LOWI)											
Kegiatan 1: Promosi kesehatan lingkungan dan perubahan	1.1 Jumlah KK yang mendapat promosi kesehatan lingkungan dan perubahan perilaku dibidang WASH	KK	1300 (2015)	-	-	2,000	3,000	dana ada di 6.2.1 (b)	IR Partners	NTB, Banten	Islamic Relief Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
prilaku dibidang WASH											
PROGRAM 2: Pasar Sehat Berdaya											
Kegiatan 1: Pengadaan fasilitas cuci tangan pakai sabun di pasar tradisional yang belum memilikinya	1.1 Jumlah pasar memiliki sarana cuci tangan pakai sabun	Pasar tradisional	-	31 pasar binaan Yayasan Unilever Indonesia				-	Yayasan Unilever Indonesia	Medan, Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan	Yayasan Unilever Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Persada, BMP, YPN, Spektra dan Heartindo, PD Pasar Jaya, Dinas Kesehatan, PKK/ Posyandu setempat
PROGRAM 3: Access to Clean Water											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, penetapan dan pelatihan	1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih di komite air	Kelompok	-	-	-	10	26	500	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara (Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Nias);	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
tentang komite air dan sistem manajemen air bersih	1.2 Persentase komite air yang berfungsi	Komite	-	-	-	70%	100%			Bengkulu (Bengkulu Selatan); Kalimantan Barat (Sekadau, Melawi, Sintang); Jawa Timur	
	1.3 Persentase keluarga yang terdaftar untuk mendapat layanan air masyarakat	Keluarga	-	-	-	30%	40%				
Kegiatan 2: Masyarakat membangun fasilitas air bersih dan sanitasi	2.1 Persentase populasi sasaran dengan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik	Keluarga	-	-	50%	75%	100%	1000		(Surabaya); NTT (Manggarai barat, Sikka, Ngada, Nagekeo, Kupang, Sumba Barat Daya); Maluku Utara (Halmahera Timur); Papua (Biak, Jayawijaya)	Wahana Visi Indonesia
	2.2 Persentase populasi sasaran dengan akses terhadap peningkatan sumber air minum yang lebih baik	Keluarga	-	-	50%	75%	100%				
	2.3 Persentase rumah tangga yang di sosialisasi yang memiliki fasilitas cuci tangan	Keluarga	-	-	30%	50%	60%				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.4 Persentase rumah tangga yang di sosialisasi dengan teknologi pengolahan air minum yang disarankan dan yang digunakan	Keluarga	-	-	50%	75%	100%				
Kegiatan 3: Kaji lapangan dan pelatihan penyediaan sanitasi	3.1 Jumlah keluarga menggunakan dengan tepat teknologi sanitasi dan sistem yang dikembangkan	Sistem	-	-	-	-	-	200			Wahana Visi Indonesia
	3.2 Jumlah kelompok masyarakat dilatih untuk kewirausahaan sanitasi	Kelompok	-	-	-	7	13				
Kegiatan 4: Lokakarya dan pelatihan air dan sanitasi untuk kelompok kerja masyarakat	4.1 Jumlah rencana aksi terkait Air dan Sanitasi yang dikembangkan oleh Kelompok kerja	Rencana Aksi	-	-	-	5	10	500			Wahana Visi Indonesia
	4.2 Persentase rencana aksi terkait Air dan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja	Rencana Aksi	-	-	-	50%	100%				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pelatihan Dai sanitasi untuk pemicuan dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.1 Jumlah Dai yang mendapat sanitasi untuk pemicuan dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Orang	-	-	120	200	250	900	-	Indonesia	MUI
PROGRAM 2: Community Based Total Sanitation (CBTS)											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan materi komunikasi perubahan perilaku, memicu kebersihan dan sanitasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan perubahan perilaku	1.1 Jumlah kelompok masyarakat dipicu untuk CBTS- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (ODF- Open Defecation Free/buang air besar tidak sembarangan).	Kelompok		-	50%	75%	100%	300	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara (Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Nias); Bengkulu (Bengkulu Selatan); Kalimantan Barat (Sekadau, Melawi, Sintang); Jawa Timur (Surabaya); NTT (Manggarai barat, Sikka, Ngada, Nagekeo, Kupang, Sumba Barat Daya); Maluku Utara (Halmahera Timur); Papua	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										(Biak, Jayawijaya)	
Kegiatan 2: Lokakarya dan pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/CB TS untuk Relawan Kesehatan Masyarakat - Community Health Volunteers (CHVs)	2.1 Jumlah Relawan Kesehatan Masyarakat (CHVs) yang telah menyelesaikan Pelatihan Fasilitator (ToF) tentang STBM menggunakan kurikulum standar.	Orang		-	-	100	150	1000			
	2.2 Persentase relawan Kesehatan Masyarakat terlatih (CHVs) yang memfasilitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masyarakat (pemicuan, advokasi dan kemitraan)	Orang		-	-	70%	100%				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pelatihan, pertemuan, pendampingan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki kebijakan lokal tentang kebersihan & sanitasi	3.1 Jumlah kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Buang air besar tidak sembarangan atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kebijakan		-	-	6	13	300			
INDIKATOR : 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
PROGRAM 1: Kemandirian Sanitasi											
Kegiatan 1: Penyuluhan dan pendampingan	1.1 Jumlah per kapita perubahan perilaku masyarakat	Kapita	-	0	50	2000	2000	6,249	Donasi Program	Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah per kapita Peningkatan pengetahuan	Kapita	-	0	50	2000	2000				
Kegiatan 2: pembangunan sanitasi/jamban	2.1 Jumlah KK yang melaksanakan sanitasi layak dalam satu desa berdaya	KK	-	0	50	500	500				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR : 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.											
PROGRAM 1: SAIIG											
Kegiatan 1: memberikan insentif kepada pemda yang membangun IPAL Kawasan/Komunal dan sambungan air limbah bagi masyarakat	1.1 Jumlah Kab/Kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota	Kab/kota		7	1	10	10	400	DFAT	28 kab/kota	CPMU Cipta Karya dan Pemda/PDA M yang berpartisipasi dengan dukungan TA dari IndII/KIAT
INDIKATOR : 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.											
PROGRAM 1: SAIIG											
Kegiatan 1: memberikan insentif kepada pemda yang membangun IPAL Kawasan/Komunal dan sambungan air limbah bagi masyarakat	1.1 Jumlah rumah tangga yang terlayani	Kab/Kota	2013	3,149	2,416	-	-	400 (sudah di tag di indikator 6.2.1.(e))	DFAT	28 Kab/Kota	CPMU Cipta Karya dan Pemda/PDA M yang berpartisipasi dengan dukungan TA dari IndII/KIAT

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengembangan Program LLTT	1.1 Jumlah kota/kabupaten dampingan yang mengembangkan program LLTT	Jumlah Kota dan kab dampingan	0 (2015)	-	-	5	5	-	USAID	32 kota/kab di 8 provinsi: Sumut: Medan, Tebing Tinggi, Pematangsianta r, Sibolga dan Kab. Deli Serd Banten: Kab. Tangerang DKI Jakarta Jabar: Kota Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kab. Karawang Jateng: Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Sukoharjo Jatim: Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Gresik, Probolinggo dan Lumajang Sulsel: Kota Makassar, Kab.	USAID IUWASH PLUS

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Efisiensi Air											
Kegiatan 1: Peningkatan efisiensi proses produksi untuk penghematan penggunaan ai	1.1 Reduksi jumlah pemakaian air per produk	Persentase penurunan terhadap tahun dasar		33.28	-	-	-	-	PT. Unilever Indonesia	Seluruh fasilitas Unilever di Indonesia	PT. Unilever Indonesia
PROGRAM 2: Partners for Resilience - Strategic Partnership											
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung gerakan hemat air melalui menangkap, menyimpan, dan menggunakan kembali air	1.1. Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi kegiatan		7	10	-	-	-	Yayasan KARINA	Sikka dan TTS (NTT) dan Jakarta Utara	Yayasan KARINA
Kegiatan 2: Dokumentasi praktik-praktik baik pengelolaan air tanah, termasuk efisiensi air	2.1 Jumlah dokumen praktik baik pengelolaan air tanah	Dokumen	2016 belum ada	-	-	1	-	-	Yayasan KARINA	NTT	Yayasan KARINA

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Gerakan advokasi kebijakan desa/kelurahan, peraturan adat, kearifan lokal, untuk konservasi DAS dan air tanah	3.1. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki aturan atau program konservasi DAS dan air tanah	Desa /Kelurahan	2016 belum ada	-	7	-	-	-	Yayasan KARINA	Sikka (NTT)	Yayasan KARINA
INDIKATOR: 6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.											
PROGRAM 1: reforestasi daerah aliran sungai											
Kegiatan 1: Penanaman Pohon di area DAS prioritas	1.1. Jumlah pohon yang ditanam di area yang sudah ditetapkan sebagai DAS prioritas	Jumlah pohon	2012	8,000	8,000	8,000	8,000	1,670	PT Nestlé Indonesia	- Daerah Tangkapan Air (DAT) Batu Tegi yang terbentang melewati tiga kecamatan (Air Naningan, Pulau Panggung dan Ulu Belu),	PT Nestlé Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penanaman Pohon di area DAS prioritas	1.1. Jumlah pohon yagn ditanam di area yang sudah ditetapkan sebagai DAS prioritas	Jumlah pohon	2012	8,000	8,000	8,000	8,000	1,670	PT Nestlé Indonesia	- Daerah Tangkapan Air (DAT) Batu Tegi yang terbentang melewati tiga kecamatan (Air Naningan, Pulau Panggung dan Ulu Belu), Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung - Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ngrowo Ngasinan (bagian dari DAS Brantas), Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur	PT Nestlé Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia
	1.2. Jumlah pohon yang dimonitoring pertumbuhannya selama lima tahun	Jumlah pohon	2012	8,000	8,000	8,000	8,000				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 2: Program IUWASH											
Kegiatan 1: Pelaksanaan program IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene)	1.1 Jumlah pembangunan sumur resapan di lokasi yang sesuai dengan rekomendasi teknis dan telah disepakati bersama dengan masyarakat	sumur resapan	2016		100			742	PT Nestlé Indonesia dan USAID Indonesia	Desa Krucil dan Desa Breml, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur	PT Nestlé Indonesia, USAID Indonesia dan Yayasan Forum Fasilitator Malang
PROGRAM 3: Aksi Penanaman pohon di DAS dan Kawasan rawan bencana banjir dan longsor											
Kegiatan 1: Sosialisasi Penanaman Pohon di DAS dan kawasan rawan bencana banjir dan longsor	1.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang	-	60	60	60	60	3,000	Swadaya	Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur	LPBI NU Pusat & Perhutani
	1.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten	-	50	50	50	50				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Aksi Penanaman pohon	2.1 Jumlah Pohon yang ditanam di masing-masing kabupaten	pohon	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Swadaya	Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur	LPBI NU Pusat & Perhutani
	2.2 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam penanaman pohon	orang	-	250	250	250	250				
Kegiatan 3: Pendampingan kepada masyarakat	3.1 Jumlah kabupaten	kabupaten	-	50	50	50	50			Swadaya	Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
INDIKATOR : 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.											
PROGRAM 1: Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah											
Kegiatan 1: Pembangunan Rumah Baru	1.1. Jumlah KK yang menerima pembangunan rumah baru	KK	2015	646	548	660	748	267,258	-	Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Sumatera Utara, Batam, Jawa Barat, Banten	Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia (YHKI)
Kegiatan 2: Merenovasi rumah tidak layak huni	2.1. Jumlah KK yang mendapat renovasi rumah tidak layak huni	KK	2015	919	549	2,660	4,026		-		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Merehabilitasi rumah tidak layak huni	3.1 Jumlah KK yang mendapat renovasi rumah tidak layak huni	KK	2015	103	43	690	782		-		
PROGRAM 2: Urban Development and Management Advisory (UDMA)											
Kegiatan 1: Pendampingan keahlian dan kemitraan dalam kolaborasi penanganan permukiman kumuh	1.1. Jumlah Kegiatan workshop/rapat koordinasi penanganan kumuh di daerah (termasuk pembahasan rencana dan program pembangunan daerah)	kegiatan	12 kali (dilaksana kan 2 kali di tiap kota) - 2015	12	12	12	12	7,500	Kementerian PUPR	1. Kota Banjarmasin, Kalsel 2. Kota Bogor, Jabar 3. Kota Malang, Jatim 4. Kota Palu, Sulteng 5. Kota Mataram, NTB 6. Kota Banda Aceh, Aceh	Pemda Kementerian PUPR Kemitraan Habitat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah dokumen Identifikasi potensi, persoalan dan kebutuhan perencanaan kota tematik (termasuk pembahasan rencana dan program pembangunan daerah)	dokumen	6 unit (disusun 1 dokumen per kota) - 2015	6	review	review	review		Kementerian PUPR		
	1.3 Jumlah pradesain kawasan percontohan dalam penanganan permukiman kumuh, melibatkan perguruan tinggi lokal	kawasan	6 kawasan (dilaksanakan di 1 kawasan percontohan per kota) - 2015	12	6	6	review	1,000	Kementerian PUPR		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.4 Jumlah kegiatan festival Habitat sebagai market place di daerah (dengan sasaran pemerintah pusat, lembaga filantropi dan swasta)	kegiatan	-	-	-	6 kali (terlaksana 1 kali di tiap kota)	6	belum dirancang	Kementerian PUPR		
	1.5 jumlah kawasan Pembangunan fisik melibatkan berbagai pihak	kawasan	-	-	-	6 kawasan (dilaksanakan di 1 kawasan percontohan per kota)	6	belum dirancang	Kementerian PUPR		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pendampingan keahlian dan kemitraan dalam penataan dan revitalisasi kawasan	2.1 Jumlah Proposal dan kriteria kesiapan daerah	dokumen	5 unit (disusun 1 dokumen per kota) - 2017	-	5 dokum en (disus un 1 dokum en per kota di Banjar masin, Bogor, Malan g, Palu, Banda Aceh) - 2017	Menunggu proses negosiasi PHLN di Bappenas. Kota Mataram menjadi prioritas kedua yang diusulkan.		-	Kementerian PUPR	1. Kota Banjarmasin, Kalsel 2. Kota Bogor, Jabar 3. Kota Malang, Jatim 4. Kota Palu, Sulteng 5. Kota Mataram, NTB 6. Kota Banda Aceh, Aceh	Pemda Kementerian PUPR Kemitraan Habitat
	2.2 Jumlah kota/kawasan yang memiliki perencanaan teknis dan manajemen kegiatan	kota/ kawasan	-	-	-			-	Kementerian PUPR		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pendampingan keahlian dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman	3.1 Jumlah dokumen Rencana Kawasan Permukiman	dokumen	-	-	2 unit (dilaks anaka n di Matara m dan Banda Aceh yang termas uk kota mitra KH, serta di Pontia nak)	Menunggu proses negosiasi PHLN di Bappenas. Kota Mataram menjadi prioritas kedua yang diusulkan.		-	Kementerian PUPR	1. Kota Banjarmasin, Kalsel 2. Kota Bogor, Jabar 3. Kota Malang, Jatim 4. Kota Palu, Sulteng 5. Kota Mataram, NTB 6. Kota Banda Aceh, Aceh	Pemda Kementerian PUPR Kemitraan Habitat
	3.2 Jumlah kota yang memiliki Perencanaan teknis dan manajemen kegiatan	kota	-	-	-			-	Kementerian PUPR		

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3 Jumlah kota yang melibatkan berbagai pihak dalam pembangunan fisik kota	kota	-	-	-			-	Kementerian PUPR		
Kegiatan 4: Penguatan Pokja PKP Daerah dan pemberdayaan masyarakat	4.1 jumlah Identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal	kegiatan	6 kali (dilaksanakan 1 kali di tiap kota) - 2015	6	6	Menunggu proses negosiasi PHLN di Bappenas. Kota Mataram menjadi prioritas kedua yang diusulkan.		-	Kementerian PUPR	1. Kota Banjarmasin, Kalsel 2. Kota Bogor, Jabar 3. Kota Malang, Jatim 4. Kota Palu, Sulteng 5. Kota Mataram, NTB	Pemda Kementerian PUPR Kemitraan Habitat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	4.4 Jumlah dokumen Studi dan grand design pengembangan kota berkelanjutan di daerah	dokumen	-	-	-			-	Kementerian PUPR	6. Kota Banda Aceh, Aceh	
PROGRAM 3: Program Pembangunan Perumahan Cinta Kasih											
Kegiatan 1: Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng	1.1 Pengelolaan Perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Unit	2010	-	-	-	-	826	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Daerah	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Kegiatan 2: Perumahan Cinta Kasih Muara Karang	2.1 Pengelolaan Perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Unit	2010	-	-	-	-	-		Daerah	
PROGRAM 1: Program Bebenah Kampung/Rumah											
Kegiatan 1: Bebenah Kampung	1.1. Terbentuknya Rumah yang layak huni, aman dan nyaman	Unit	2010	26	30	33	36	2,820	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Nasional	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
PROGRAM 4 : BEDAH RUMAH MUSLIMAT NU											
Kegiatan 1 : Bedah Rumah untuk	1.1 Jumlah rumah yang direnovasi	unit	-	15	-	20	30	2,000	III- Belum tersedia sumber	2 Provinsi : Jawa Timur, Papua	Muslimat NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
masyarakat miskin											
Kegiatan 2 : Fasilitasi akses kepemilikan rumah subsidi untuk masyarakat dengan pendapatan dibawah Rp.4 juta	1.2. jumlah rumah subsidi	unit	-	-	-	150	150	600	III- Belum tersedia sumber	Nasional. Piloting : Bogor	Muslimat NU
INDIKATOR :11.1.1.(b). Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).											
PROGRAM: Sertifikasi Profesional/ahli Perancang Kota											
Kegiatan 1. Pendirian perkumpulan profesional/ahli perancangan kota Indonesia	1.1. Perkumpulan ahli perancangan kota Indonesia	organisasi	-	-	-	1	-	150	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerjaan/BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penguatan Pokja PKP Daerah dan pemberdayaan masyarakat	1.1 Jumlah keterlibatan praktisi, akademisi/peguruan tinggi lokal, komunitas/keompok masyarakat, dan lembaga filantropi atau swasta lokal	lembaga	-	-	-	Pokja PKP Daerah secara aktif melibatkan praktisi, akademisi/peguruan tinggi lokal, komunitas/keompok masyarakat, dan lembaga filantropi atau swasta lokal.	belum dirancang	Kementerian PUPR, Pemda	1. Kota Banjarmasin, Kalsel 2. Kota Bogor, Jabar 3. Kota Malang, Jatim 4. Kota Palu, Sulteng 5. Kota Mataram, NTB 6. Kota Banda Aceh, Aceh	Pemda Kementerian PUPR Kemitraan Habitat	
	1.2 jumlah kegiatan rutin Pokja PKP Daerah	kegiatan	-	-	-		belum dirancang				
PROGRAM: Sertifikasi Profesional/ahli Perancang Kota											
Kegiatan 1. Pendirian perkumpulan profesional/ahli perancangan kota Indonesia	1.1. Perkumpulan ahli perancangan kota Indonesia	organisasi	-	-	-	1	-	150	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerjaan/BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Sosialisasi Emergency Respon Tanggap Bencana yang Inclusive	1.1. Jumlah propinsi yang mendapat sosialisasi Emergency Respon Tanggap Bencana yang Inclusive dalam rangka penguatan resiko bencana daerah serta ketahanan komunitas rawan bencana	Wilayah/ Propinsi	-	-	-	5	-	Belum tersedia	Belum tersedia	DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Banda Aceh	YEU, CIQAL, SAPDA, PERTUNI
PROGRAM 5: Community Based Disaster Risk Management											
Kegiatan 1: Pengembangan Rencana Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat	1.1 Jumlah Rencana Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat dikembangkan dan difungsikan	Rencana	-	4 (capaian)	-	-	-	1,216	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sumut (Nias, Nias Selatan); Bengkulu (Bengkulu Selatan); Kalbar (Sambas, Kubu Raya, Melawi, Sekadau, Sintang, Bengkayang); Jawa Timur (Surabaya); DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Utara);	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Merekrut dan melatih Tim Manajemen Resiko Bencana Berkas Masyarakat	2.1 Jumlah tim atau komite manajemen risiko berbasis masyarakat berfungsi	Tim	-	4 (capaian)	-	-	-	1,216		Sulawesi Tengah (Rimo, Touna, Sigi, Palu,Donggala); NTT (Ende, Manggarai, MangBar, MangTim, Ngada, Nagakeo, Sikka, Kupang, Belu, TTU, TTS, Sumba Timur, Sumba Barat Daya); Maluku Utara (Haltim, Ternate, Halut); Papua (Biak, Merauke, Sentani, Jayawijaya)	
Kegiatan 3: Tanggap darurat	3.1 Total anak- anak yang rentan terhadap bencana yang ditunjang oleh program-program manajemen kebencanaan Wahana Visi Indonesia	Anak	-	19,479 (capaian)	-	-	-	1,300			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memfasilitasi Inisiatif Sekolah Ramah Anak	1.1 Jumlah sekolah yang sesuai dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak	Sekolah		5	5	12	150	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Wahana Visi Indonesia	1. DKI Jakarta (Jakarta Timur & Jakarta Utara) 2. Banten (Tangsel) 3. Jawa Barat (Kota Bogor)	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM: Sertifikasi Profesional/ahli Perancang Kota											
Kegiatan 1. Pendirian perkumpulan profesional/ahli perancangan kota Indonesia	1.1. Perkumpulan ahli perancangan kota Indonesia	organisasi	-	-	-	1	-	150	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan/BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2. Pembentukan lembaga sertifikasi ahli perancangan kota	1.1. Lembaga sertifikasi ahli perancangan kota Indonesia	sertifikasi	-	-	-	-	1	300	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan/BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki) 3. Perkumpulan profesional/a hli perancangan kota Indonesia
Kegiatan 3. Sertifikasi ahli perancangan kota	1.1. Pemberian sertifikasi kepada ahli perancangan kota	sertifikasi	-	-	-	-	300	900	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan/BNSP 2. Lembaga sertifikasi profesi perancang kota Indonesia
INDIKATOR: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.											
PROGRAM: Bank Sampah											
Kegiatan 1: Edukasi dan pendampingan	1.1. Jumlah bank sampah yang terbentuk	Unit	-	1,633	2,615	2,800	3,400	-	Yayasan Unilever Indonesia	Medan, Jakarta, Bogor, Tangerang,	Yayasan Unilever Indonesia,

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Kampanye	1.1. Perencanaan kota dan ruang terbuka perkotaan bagi semua	wilayah/pr opinsi	-	-	-	5	-	Belum tersedia	Belum tersedia	DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar, Aceh	OHANA, CIQAL, PERSANI, SIGAB, SAPDA, PERDIK , YOUNG VOICE
Kegiatan 2: Advokasi	2.1. Perencanaan kota dan ruang terbuka perkotaan bagi semua	wilayah/pr opinsi	-	-	-	5	-	Belum tersedia	Belum tersedia		
PROGRAM 2: Sertifikasi Profesional/ahli Perancang Kota											
Kegiatan 1. Pendirian perkumpulan profesional/ahli perancangan kota Indonesia	1.1. Perkumpulan ahli perancangan kota Indonesia	organisasi	-	-	-	1	-	150	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan /BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2. Pembentukan lembaga sertifikasi ahli perancangan kota	2.1. Lembaga sertifikasi ahli perancangan kota Indonesia	lembaga	-	-	-	-	1	300	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan/BNSP 2. Alumni Rancang Kota ITB (Arki) 3. Perkumpulan profesional/a hli perancangan kota Indonesia
Kegiatan 3. Sertifikasi ahli perancangan kota	3.1. Pemberian sertifikasi kepada ahli perancangan kota	sertifikasi	-	-	-	-	300	900	APBN	Seluruh Indonesia	1. Kementerian Ketenagakerj aan/BNSP 2. Lembaga sertifikasi profesi perancang kota Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR : 11.7.2.(a). Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											
PROGRAM: Adanya pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi PEREMPUAN korban & pejuang terkait kekerasan dan diskriminasi											
Kegiatan 1 : Memberikan dukungan sumberdaya bagi lembaga pengada layanan / women crisis center untuk penanganan kasus kekerasan terhadap	1.1 Jumlah organisasi lembaga pengada layanan / women crisis center yang memperoleh dukungan sumber daya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Lembaga		6	6	5	5	Rp. 20.s/d Rp. 250.,-	Donasi Publik	Kab/Kota/Desa	Indonesia untuk Kemanusiaa n (Ika)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Development of Community Based Disaster Preparedness Plan	1.1.Number of Community Based Disaster Preparedness Plan are developed and functioned	Plan	-	4 (capaian)	-	-	-	-	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sumut (Nias, Nias Selatan); Bengkulu (Bengkulu Selatan); Kalbar (Sambas, Kubu Raya, Melawi, Sekadau, Sintang, Bengkayang); Jawa Timur (Surabaya); DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Utara); Sulawesi Tengah (Rimo, Touna, Sigi, Palu,Donggala); NTT (Ende, Manggarai, MangBar, MangTim,	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Recruit and Train Community Based Disaster Risk Management Team or committee	2.1. Number of Community Based Disaster Risk Management Team or committee are functioned	Team	-	4 (capaian)	-	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Emergency Response	3.1. # of total children vulnerable to disasters whose well-being are sustained by Wahana Visi Indonesia's disaster management programmes	Children	-	19,479 (capaian)	-	-	-	-		Ngada, Nagakeo, Sikka, Kupang, Belu, TTU, TTS, Sumba Timur, Sumba Barat Daya); Maluku Utara (Haltim, Ternate, Halut); Papua (Biak, Merauke, Sentani, Jayawijaya)	
PROGRAM 2: Child Friendly School											
Kegiatan 1: Facilitate the Child Friendly School Initiatives	1.1. % of schools that align with Child Friendly School Policy	School			5	5	12	Dana ada di 11.5.1.(b)	Multi funding dari dalam dan luar negeri	DKI Jakarta (Jakarta Timur & Jakarta Utara) Banten (Tangsel); Jawa Barat (Kota Bogor)	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Mengikuti penghargaan PROPER	1.1. Peringkat Pabrik Nestlé Kejayan di Jawa Timur mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Hijau	Belum ada hasil pengumuman untuk penghargaan ini			-	PT Nestlé Indonesia	Jalan Raya Pasuruan-Malang Km 9.5, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Kejayan
	1.1. Indikator kegiatan: Pabrik Nestlé Panjang di Lampung mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Biru				-		Jalan Raya Bakauheni Km.13, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Panjang
	1.1. Indikator kegiatan: Pabrik Nestlé Cikupa di Banten mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Biru				-		Jalan Raya Serang Km.12, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Banten	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Cikupa
INDIKATOR: 12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).											
Program 1: Penilaian kualitas tanah dan air											
Kegiatan 1: Sampling kualitas tanah dan air untuk mengetahui kadar pencemaran	1.1. Jumlah sertifikat analisis mengenai kadar pencemaran limbah B3 dan logam berat	Sertifikat	2016	3,702	3,886	4,000	4,200	240,000	PT. SUCOFINDO (Biaya Operasional)	Seluruh Indonesia	PT SUCOFINDO (Persero)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
limbah B3 dan logam berat											
INDIKATOR: 12.5.1.(a). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											
PROGRAM 1: Pembangunan Depo Pendidikan Pelestarian Lingkungan											
Kegiatan 1: Pembangunan Depo Pendidikan Pelestarian Lingkungan	1.1. Jumlah Depo Pendidikan Daur Ulang	Unit	21 (2015)	44	48	50	52	-	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Nasional	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Kegiatan 2: Pembangunan Titik Pemilahan Sampah Daur Ulang	2.1. Jumlah Titik Pemilahan Sampah Daur Ulang	Titik	12 (2015)	14	16	19	20	-			
	2.2. Angka partisipasi pemilahan sampah daur ulang	Orang	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM 2: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan (dengan melakukan penghematan sumber daya alam, mengurangi penggunaan plastik, mendorong pola konsumsi ramah lingkungan (vegetarian).											
Kegiatan 1: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestaraian Lingkungan Bagi Siswa di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi	1.1 Angka partisipasi sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan di sekolah	Orang	-	591	591	609	648	-	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Daerah	Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Sosialisasi Gaya Hidup Pelestaraian Lingkungan Bagi Komuniats Masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perusahaan	2.1 Angka partisipasi kegiatan sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan	Orang	-	-	-	-	-	-		Nasional	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Kegiatan 3: Penerapan Gaya Hidup Pelestarian Lingkungan sebagai bagian dari basic knowledge Relawan	3.1 Angka partisispasi pendidikan pelestarian lingkungan bagi relawan Tzu Chi	Orang	-	8,009	-	-	-	-			
PROGRAM 3: Bank Sampah											
Kegiatan 1: Edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan menerapkan prinsip 3R	1.1 Jumlah bank sampah yang terbentuk	Unit	-	1,633	2,615	2,800	3,400	-	Yayasan Unilever Indonesia	Medan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Magelang, lamongan, Surabaya,	Yayasan Unilever Indonesia, Yayasan Artajaya, Yayasan Rumah Pelangi, LPTT, Persada,
	1.2 Jumlah nasabah bank sampah	Orang	-	73,228	344,27 4	-	-				
	1.3 Jumlah reduksi sampah	Ton	-	4,363	6,125	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.4 Manfaat ekonomi yang diperoleh	Rupiah	-	6,45	8,38	-	-			Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado.	Yayasan Lohjinawi, Wehasta, Spektra, Bali Wastu Lestari, Ecco Walibar, Yayasan Peduli Negeri.
PROGRAM 4: Zero Waste to Landfill											
Kegiatan 1: Pengelolaan limbah yang dihasilkan melalui prinsip 3R sehingga tidak ada limbah yang masuk ke Landfill	1.1 Jumlah limbah yang masuk ke Landfill	Ton	2014	0	0	0	0	-	PT Unilever Indonesia	Seluruh Fasilitas Unilever di Indonesia	PT Unilever Indonesia
PROGRAM 5: Pengelolaan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah Berbasis Masyarakat dan Pesantren											
Kegiatan 1: Sosialisasi Pengelolaan Sampah	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing Sosialisasi	orang		50	50	50	50	15,000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
berbasis masyarakat dan pesantren dengan prinsip 3R	1.2 Jumlah Kabupaten yang telah mendapatkan Sosialisasi	kabupaten		20	30	30	30			Kalimantan Barat, Sumatera Barat	
	1.3 Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten		100	100	250	100				
Kegiatan 2: Pembentukan Bank Sampah	2.1 Jumlah bank sampah yang terbentuk	unit		50	50	50	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU
	2.2 Jumlah nasabah bank sampah di masing-masing bank sampah	orang		50	50	50	50				
	2.3 jumlah reduksi sampah	kilo/minggu		2500	2500	2500	2500				
	2.4 Jumlah manfaat ekonomi yang diperoleh	rupiah/minggu		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000				
Kegiatan 3: Pelatihan Manajemen Bank Sampah Berbasis Perbankan	3.1 Jumlah Peserta pelatihan	orang		25	25	25	25		BNI 46	DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat - BSN LPBI NU dan BNI 46
	3.2 Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	kabupaten		27	27	27	27				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.3 Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	lembaga		375	375	375	375				
	3.4 Jumlah Nasabah yang mendapatkan Tabungan & ATM BNI berbasis tabungan sampah di masing-masing bank sampah	orang		50	50	50	50				
Kegiatan 4: Pelatihan Bisnis Daur Ulang Sampah	4.1 Jumlah peserta pelatihan	orang		50	50	50	50				
	4.2 Jumlah Pesantren, sekolah dan komunitas yang mendapatkan sosialisasi	orang		300	300	300	300				
PROGRAM 6: Pesantren Hijau											
Kegiatan 1: mainstreaming pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis pesantren	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang		75	75	75	75	30,000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan sosialisasi	unit		30	30	40	50				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	2.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang		75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit		30	30	40	50				
Kegiatan 3: Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang		75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	3.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit		30	30	40	50				
Kegiatan 4: Pelatihan Konservasi Energi (Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang		75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	4.2 Jumlah Pesantren yang mendapatkan pelatihan	unit		30	30	40	50				
Kegiatan 5: Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing pesantren	orang		75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: mainstreaming pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis masjid	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75	20,000	Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah masjid yang mendapatkan sosialisasi	unit	-	30	30	30	30				
Kegiatan 2: Pelatihan Pengelolaan sampah (Komposting, Daur Ulang & Ecobricks)	2.1 Jumlah masjid yang terlibat di masing-masing pesantren	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50				
Kegiatan 3: Pelatihan Konservasi Air (Pemanen Air Hujan, Pengelolaan Limbah Air Wudhu & Mandi, Keran Hemat Air)	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
	3.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50				
Kegiatan 4: Pelatihan Konservasi Energi	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
(Penggunaan Lampu LED & SOP Penggunaan energi)	4.2 Jumlah Masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50		Swadaya	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	LPBI NU Pusat
Kegiatan 5: Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing masjid	orang	-	75	75	75	75				
	5.2 Jumlah masjid yang mendapatkan pelatihan	unit	-	30	30	40	50				
PROGRAM 2: Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lindungan Hidup											
Kegiatan 1: Workshop Sosialisasi Modul Peran Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lindungan Hidup	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing kabupaten	orang	-	180	180	180	-	800	Kemenag RI	Manado, Garut, Banjar Baru (Kalsel), Pekalongan, Bangka, Bandung Barat	LPBI NU Pusat & Kemenag RI
	1.2 Jumlah kabupaten yang mendapatkan workshop	kabupaten	-	6	6	6	-				
Kegiatan 2: Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup	2.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing kabupaten	orang	-	180	180	180	-		Kemenag RI	Manado, Garut, Banjar Baru (Kalsel), Pekalongan, Bangka, Bandung Barat	LPBI NU Pusat & Kemenag RI
	2.2 Jumlah kabupaten yang mendapatkan pelatihan	kabupaten	-	6	6	6	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengembangan Rencana Kesinambungan Pertanian / Bisnis	1.1 Jumlah produsen terlatih yang memiliki pengetahuan tentang Strategi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dan API (Adaptasi Perubahan Iklim)	Orang	-	-	-	-	-	250	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sulawesi Tengah (Sigi, Donggala, Palu, Tojo Una- Una, Parigi Moutong Maluku Utara (Ternate, Halmahera Utara) NTT (TTS, Kupang, Sumba Timur)	Wahana Visi Indonesia
	1.2 Jumlah Rencana Kesinambungan Pertanian / Usaha dikembangkan dan difungsikan	Rencana	-	-	-	-	-				Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Dukungan masukan, alat dan informasi iklim bagi petani / pemilik usaha	2.1 Jumlah produsen yang telah memanfaatkan iklim musim dan ramalan cuaca	Produsen	-	-	-	-	-	250			Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 3: Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam PRB - API											
Kegiatan 1: Workshop PB & PRB di daerah target	1.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan PRB	orang	-	120	120	120	120	25,000	DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Kampanye media isu PRB di daerah- Pelatihan Media Sosial	2.1 Jumlah peserta yang mendapat pelatihan Medsos terdiri dari beberapa aktor, Aparatur 15%, Media 45% Organisasi Kaum Disabilitas 5% Ormas 35&	orang	-	110	110	110	110			b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	
Kegiatan 3: Kampanye media isu PRB di daerah- Pembuatan Medsos /Facebook di 4 (empat) Kabupaten	3.1 Jumlah Portal Bencana di 4 (empat) Kabupaten	unit	-	4	4	4	4				
	3.2 Jumlah follower di 4 (empat) kabupaten	orang	-	8,000	8,000	8,000	8,000				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Pertemuan Rutin Stakeholder di daerah target	4.1 Jumlah peserta yang hadir dalam pertemuan di 4 (empat) kabupaten. (Aktor yang sering terlibat bencana di tingkat kabupaten terdiri dari SKPD/OPD, Media Massa, Organ Kebencanaan, Tokoh Masyarakat dan Dunia Usaha)	orang	-	100	100	100	100		DFAT	Jateng (Kudus, Jepara); Sulsel (Barru & Wajo)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan 5: Pembentukan Forum PRB di daerah target	5.1 Jumlah pembentukan forum dan jumlah Dokumen Deklarasi FPRB di 4 Kabupaten	forum dan dokumen	-	4	4	4	4		DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan 6: Pelatihan PRB dan PDRA	6.1 Jumlah Kajian Risiko desa yang berhasil dibuat oleh alumni	dokumen	-	4	4	4	4				
	6.2 Jumlah peserta pelatihan	orang	-	100	100	100	100				
Kegiatan 7: Pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana dan Sphere	7.1 Jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	-	110	110	110	110				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 8: Pelatihan Teknik Tanggap Darurat Bencana	8.1 Jumlah peserta pelatihan yang terlibat	orang	-	110	110	110	110				
Kegiatan 9: Pembentukan Tim Respon Bencana Komunitas	9.1 Jumlah Tim Respon Bencana Komunitas di 4 (empat) kabupaten	lembaga	-	120	120	120	120		Swadaya	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	9.2 Jumlah dokumen komitmen	dokumen	-	4	4	4	4		DFAT	b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	
Kegiatan 10: Workshop metodologi kajian risiko bencana	10.1 Jumlah peserta workshop di 4 (empat) kabupaten	orang	-	140	140	140	140				
Kegiatan 11: Pelatihan penyusunan kajian risiko bencana	11.1 Jumlah peserta pelatihan di 4 (empat) kabupaten	orang	-	44	44	44	44				
	11.2 Jumlah dokumen kajian risiko	dokumen	-	4	4	4	4				
Kegiatan 12: Rapat Penyusunan kajian risiko bencana	12.1 Jumlah Tim Penyusun dokumen kajian risiko bencana di 4 (empat) kabupaten	orang	-	22	22	22	22		DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target :	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	12.2 Jumlah Dokumen kajian risiko berbasis teknologi informasi di 4 (empat) kabupaten	dokumen	-	4	4	4	4			Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	
	12.3 Jumlah kabupaten yang mengadopsi dokumen kajian risiko berbasis teknologi informasi di 4 (empat) kabupaten	kabupaten	-	4	4	4	4				
	12.4 Jumlah Desa yang mengadopsi dokumen kajian risiko berbasis teknologi informasi di 4 (empat) kabupaten	Desa	-	11	11	11	11				
Kegiatan 13: Pelatihan Penyusunan Sistem Peringatan Dini di daerah Target (Workshop : Pembentukan Tim SPDT:	13.1 Jumlah peserta pelatihan di 4 (empat) kabupaten	orang	-	140	140	140	140		DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	13.2 Jumlah Dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	dokumen	-	4	4	4	4				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Rancangan SPDT dst)	13.3 Jumlah pemerintah kabupaten yang mengadopsi dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	Pemerintah kabupaten	-	4	4	4	4			Kepulauan & Pare-pare)	
	13.4 Jumlah Desa yang mengadopsi dokumen sistem peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	Desa	-	11	11	11	11				
Kegiatan 14: Pembuatan peta dan rute evakuasi di daerah target	14.1 Jumlah Peta dan Rute evakuasi di 4 (empat) kabupaten	Peta	-	11	11	11	11		DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
	14.2 Jumlah warga desa didaerah kawasan bencana banjir yang dapat mengakses alat peringatan dini banjir di 4 (empat) kabupaten	orang	-	32000	32000	32000	32000				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 15: Pembuatan dan pemasangan alat peringatan dini di daerah target (pengadaan: pemasangan:ujicoba)	15.1 Jumlah lokasi pemasangan alat peringatan dini di 4 (empat) kabupaten	titik	-	160	160	160	160		DFAT	a. Yang sudah : Jateng (Kudus & Jepara), Sulsel (Barru & Wajo) b. Target : Jateng (Pati & Demak); Sulsel (Pangkajene Kepulauan & Pare-pare)	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Kabupaten
Kegiatan 16: Pelatihan Penyusunan mekanisme tanggap darurat bencana di daerah target	16.1 jumlah peserta pelatihan yang terlibat di 4 (empat) kabupaten	orang	-	100	100	100	100				
Kegiatan 17: Penyusunan SOP Kedaruratan Bencana di daerah target (workshop penyusunan dokument SOP)	17.1 Jumlah peserta yang terlibat di 4 (empat) kabupaten	orang	-	70	70	70	70				
	17.2 Jumlah SOP Kedaruratan Bencana di 4 (empat) kabupaten	dokumen	-	4	4	4	4				
Kegiatan 18: Persiapan gladi posko (TTX) di daerah target (sosialisasi>Rap at)	18.1 Jumlah tim gladi posko di 4 (empat) kabupaten	orang	-	180	180	180	180				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Membentuk Tim siaga bencana ditingkat Komunitas berbasis rumah ibadah	1.1 Jumlah desa yang mempunyai tim siaga bencana terbentuk dilevel komunitas berbasis rumah ibadah	Desa	12 (2015)	6	-	45	50	17,000	IR Partners	NTB, Padang	Islamic Relief Indonesia
PROGRAM 2: Respond Bencana di wilayah Indonesia											
Kegiatan 1: Pembagian bahan makanan pokok kepada korban bencana alam di Indonesia	1.1 paket bahan makanan terdistribusi pada keluarga korban bencana di Indonesia	KK	-	-	290	-	-	112	IR Australia & IR Malaysia	Aceh	Islamic Relief Indonesia
PROGRAM 3: Mendukung Masyarakat Miskin dalam menghadapi perubahan iklim											
Kegiatan 1: Fasilitasi penilaian Kota Tangguh Bencana dan uji coba indikatornya	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat rencana aksi berdasarkan penilaian Kota Tangguh	Kabupaten /Kota	2016 belum ada	-	3	-	-		Yayasan KARINA	TTS dan Sikka (NTT), Jakarta Utara (DKI Jakarta)	Yayasan KARINA
Kegiatan 2: Pengusulan hasil ujicoba indikator untuk Kota Berkelanjutan	2.1 Policy brief untuk usulan indikator Kota Berkelanjutan (termasuk Kota Tangguh)	Dokumen	2016 belum ada	-	-	1	-	-	Yayasan KARINA	Nasional	Yayasan KARINA

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 4: Partners for Resilience - Strategic Partnership											
Kegiatan 1: Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah	1.1 Dokumen rencana penanggulangan bencana daerah	Dokumen	2016 belum ada	-	1	2	-		Yayasan KARINA	TTS dan Sikka (NTT), Jakarta Utara (DKI Jakarta)	Yayasan KARINA
Kegiatan 2: Pengusulan hasil pembelajaran penyusunan rencana PB untuk perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB	2.1 Policy brief untuk usulan perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB	Dokumen	2016 belum ada	-	-	1	-	-	Yayasan KARINA	Nasional	Yayasan KARINA
PROGRAM 5: Emergency Response Bencana Alam Aisyyiah ke wilayah-wilayah terdampak bencana											
Kegiatan 1: Bantuan Dana dan Logistik	1.1 Penyaluran Bantuan khusus Perempuan, anak, lansia dan difabel	orang	500	700	800	900	1000	70	SWADAYA	SUMUT, NTB, BABEL, ACEH, SUMBAR, KEPRI, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, BALI, SULTRA	AISYIYAH

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penyusunan Panduan PENGELOLAAN bencana UNTUK KELOMPOK RENTAN (DOKUMEN PENGURANGAN RESIKO BENCANA)	2.1 DRAFT PANDUAN PENGELOLAAN BENCANA& PENGURANGAN RESIKO BENCANA	BUKU	1	1	100	150	200	2	SWADAYA	SELURUH INDONESIA	AISYIYAH
Kegiatan 3: Pendampingan Psikososial Bencana Anak & perempuan serta difabel	3.1 Pendampingan anak dan perempuan serta difabel	orang	200	300				40	SWADAYA	BALI, SUMUT, NTB	AISYIYAH
PROGRAM 6: MUHAMMADIYAH AID											
Kegiatan 1: penghimpunan donasi untuk bencana global	1.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	5	5	5	5	500	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: penyaluran bantuan ke daerah bencana/konflik sosial	2.1 Jumlah bantuan yang didistribusikan	paket	-	-	-	-	-	-	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS
Kegiatan 3: melakukan pendampingan di daerah bencana/konflik sosial	3.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	5	5	5	5	200	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, HUBLU, LPB, MPKU, MPM, MEK, MPS
PROGRAM 7: TANGGAP DARURAT BENCANA											
Kegiatan 1: Edukasi tentang kebencanaan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana	1.1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	-	4	4	4	4	160	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB
Kegiatan 2: Membangun posko kebencanaan	2.1 Jumlah posko yang dibangun di lokasi bencana	unit	-	10	10	10	10	2,804	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB
Kegiatan 3: menyalurkan bantuan darurat kebencanaan	3.1 Jumlah paket bantuan yang didistribusikan	paket	-	1000	1000	1000	1000	866	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan: 4 melakukan pendampingan pasca bencana kepada pengungsi	4.1 Jumlah orang yang didampingi	orang	-	1000	1000	1000	1000	400	donasi masyarakat	Seluruh Indonesia	LAZISMU, LPB
PROGRAM 8: Peringatan Dini dan Aksi Dini Banjir Berdasar Prakiraan Cuaca (Forecast-based Finance/FbF)											
Kegiatan 1: Finalized development forecast-based Flood Early warning system at two river basin	1.1 Model yang dapat diandalkan dan telah divalidasi untuk prakiraan hujan dan banjir di DAS Citarum dan Bengawan Solo	Sistem peringatan dini	-	-	-	2	-	125,000	IFRC Headquarter (Jenewa)	DAS Citarum dan Bengawan Solo	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, IFRC
	1.2 Kemitraan dengan otoritas dan pemangku kepentingan terkait untuk menyebarluaskan prakiraan hujan dan banjir	Jumlah kerjasama	-	-	-	2	-		IFRC Headquarter (Jenewa)	DAS Citarum dan Bengawan Solo	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, IFRC
Kegiatan 2: Pengenalan Forecast-based Finance (FbF) kepada pemerintah daerah di dua daerah	2.1 Lokakarya mengenai Forecast-based Finance (FbF) kepada pemerintah daerah di dua daerah aliran sungai	Jumlah lokakarya	-	-	-	2	-		IFRC Headquarter (Jenewa)	DAS Citarum dan Bengawan Solo	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, IFRC

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Menyelenggarakan sejumlah dialog untuk mendorong penguatan kebijakan pengurangan resiko bencana yang mengadopsi pendekatan Pengelolaan Resiko Terpadu (IRM)	1.1 Kertas posisi penguatan pengurangan resiko bencana dengan pendekatan Pengelolaan Resiko Terpadu (IRM) untuk diadopsi Rencana Induk Penanggulangan Bencana	Jumlah dialog dengan kementerian-lembaga terkait pengurangan resiko bencana	-	-	-	4	4	115.000 euro	Netherland Redcross	Jakarta/nasional	PMI Pusat, IFRC
	1.2 Kebijakan pengurangan resiko bencana yang mengadopsi pendekatan Pengelolaan Resiko Terpadu (IRM) dimasukkan dalam rencana revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007	Jumlah kertas Posisi	-	-	-	1	1		Netherland Redcross	Jakarta/nasional	PMI Pusat, IFRC
Kegiatan 2: Penyelenggaraan pelatihan Humanitarian Diplomacy	2.1 Pelatihan Humanitarian Diplomacy bagi PMI dan aliansi PFR	Jumlah pelatihan	-	-	-	1	1		Netherland Redcross	Jakarta/nasional	PMI Pusat, IFRC
	2.2 Relawan PMI melakukan kegiatan mandiri pasca pelatihan	Jumlah relawan	-	-	-	10	10		Netherland Redcross	Jakarta/nasional	PMI Pusat, IFRC

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Menyelenggarakan sejumlah dialog untuk mendorong penguatan koordinasi dan integrasi kebijakan dan praktek pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan	1.1 Jumlah dialog dengan kementerian-lembaga terkait pengurangan resiko bencana	Dialog	-	-	-	4	4	TBD	Netherland Redcross/Red-Cross Climate Centre	Jakarta/nasional	IFRC, PMI Pusat,

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Masukan tertulis untuk penguatan koordinasi dan integrasi pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan dalam proses konsultasi penyusunan RIPB, RAN SDG, dan revisi RAN API	Jumlah masukan tertulis pada proses konsultasi berbeda	-	-	-	3	3		Netherland Redcross	Jakarta/nasiona 1	IFRC, PMI Pusat
Kegiatan 2: Penulisan dan penyebaran contoh praktek cerdas pengurangan resiko bencana	2.1 Praktek cerdas tertulis dan dicetak bersama dengan praktek cerdas lain dari aliansi PfR	Jumlah contoh praktek cerdas tertulis	-	-	-	3	-		Netherland Redcross	Jakarta/nasiona 1	IFRC, PMI Pusat
Kegiatan 3: Mendorong kebijakan dan investasi yang mendukung pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	3.1 Peringatan dini bencana yang terpasang oleh PMI dan pihak lain	Jumlah pihak yang membangun peringatan dini bencana (banjir dan longsor)	-	-	-	3	3		Netherland Redcross	Jakarta/nasiona 1	IFRC, PMI Pusat

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	3.2 Pemerintah daerah yang merencanakan kebijakan dan/atau program yang mendukung pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	(a) Jumlah Pemerintah daerah (b) Jumlah kebijakan atau program	-	-	-	3	3		Netherland Redcross	Jakarta/nasiona 1	IFRC, PMI Pusat
Kegiatan 4: Mendukung penyelenggaraan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim untuk kesiapsiagaan dan kegiatan penghidupan	4.1 Pelatihan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim untuk kesiapsiagaan dan kegiatan penghidupan yang dilakukan bersama organisasi mitra	Jumlah pelatihan	-	-	-	3	3		Netherland Redcross	Jakarta/nasiona 1	IFRC, PMI Pusat
PROGRAM 11: Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Resiko Iklim di Wilayah Perkotaan Jakarta dan Sekitarnya											
Kegiatan 1: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait PRB dan manajemen risiko iklim kepada masyarakat dan SIBAT	1.1 Anggota masyarakat yang dilatih tentang Pengurangan resiko bencana / CRM	Jumlah orang	-	-	-	200	-		American Red Cross	Kab. Bogor: Kel. Pondok Rajeg, Kel. Suhakati, Kel. Karadenan, Desa Kedung Waringin, dan Desa Waringin Jaya Jakarta Utara: RW 01 dan RW 02 Kel. Ancol,	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten
	1.2 dari SIBAT (relawan PMI)	Jumlah kelompok	-	-	-	200	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	dilatih tentang PRB / CRM									RW 13 Pademangan Barat, RW 04 dan RW 05 Kel. Penjaringan	
	1.3. Anggota masyarakat berpartisipasi dalam simulasi bencana	Jumlah orang	-	-	-	1,000	-				
Kegiatan 2: Mengembangkan system peringatan dini banjir berbasis komunitas	2.1 Pesan peringatan dini bencana yang disampaikan dari POSKO	Unit	-	-	-	100	-				
Kegiatan 3: Melakukan mitigasi berbasis lingkungan untuk mitigasi banjir	3.1 Jenis mitigasi skala kecil untuk mitigasi banjir	Jenis mitigasi	-	-	-	5	-				
Kegiatan 4: Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas	4.1 pusat pengumpulan dan daur ulang sampah masyarakat	Unit	-	-	-	10	-				
	4.2 daur ulang dan klien penagihan sampah/ anggota di setiap komunitas	Jumlah orang	-	-	-	800	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 5: Mengarusutama kan PRB dan API ke dalam agenda pembangunan pemerintah daerah	5.1 Prosedur pemerintah daerah terkait kebijakan PRB dan CRM yang dikembangkan	Unit	-	-	-	2	-		American Red Cross	Pemda DKI Jakarta, Pemda Kabupaten Bogor	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupa ten
	5.2 Pemerintah daerah yang memasukkan kebijakan PRB dan CRM dalam proses pengambilan keputusan sebagai hasil kegiatan pengarusutamaan	Unit	-	-	-	4	-				
Kegiatan 6: Melakukan kampanye	6.1 Rumah tangga yang telah mendapatkan pesan PRB dan CRM melalui kunjungan rumah ke rumah	Jumlah orang	-	-	-	4,000	-		American Red Cross	Kab. Bogor: Kel. Pondok Rajeg, Kel. Suhakati, Kel. Karadenan, Desa Kedung Waringin, dan Desa Waringin Jaya Jakarta Utara: RW 01 dan RW 02 Kel. Ancol, RW 13 Pademangan Barat, RW 04 dan RW 05 Kel. Penjaringan	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupa ten

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 12: Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat											
Kegiatan 1: Mengembangkan system peringatan dini berbasis komunitas	1.1 Sistem peringatan dini terpasang	Unit	-	-	-	10	-	338	American Red Cross	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Hamahera Barat	PMI Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten
Kegiatan 2: Melaksanakan mitigasi bencana skala kecil di desa	2.1 Proyek mitigasi skala kecil telah selesai di komunitas yang ditargetkan.	Unit	-	-	-	5	5	1,300			PMI
Kegiatan 3: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait PRB kepada SIBAT	3.1 Kegiatan yang dilakukan oleh tim kesiapsiagaan bencana masyarakat	Unit	-	-	-	25	20				
Kegiatan 4: Melakukan kampanye penyadaran kepada masyarakat	4.1 Anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan memperkenalkan PRB	Jumlah orang	-	-	-	15,000	10,000				
PROGRAM 13: Aksi Kemanusiaan Bencana di Indonesia											
Kegiatan 1: Assesment dan Penyusunan Rencana	1.1 Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen		60	60	60	60	30,000	Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Penanganan Darurat	1.2 Koordinasi Relawan dan stakeholder di daerah terdampak bencana	kabupaten		60	60	60	60			Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	
Kegiatan 2: Mendirikan Posko Kebencanaan	2.1 Jumlah Posko yang didirikan di lokasi bencana	unit		100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Distribusi Bantuan Kemanusiaan (Makanan, Family Kits, Hygine Kits, School Kits dan Psikososial)	3.1 Jumlah Bantuan yang disalurkan	unit posko		100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkuli, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
Kegiatan 4: Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	4.1 Jumlah Penyediaan Air Bersih dan sanitasi	unit posko		100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau,	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Bengkuli, Babel, Sumatra Barat	
Kegiatan 5: Pelayanan medis	5.1 Jumlah Pelayanan Medis	unit posko		100	100	100	100		swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkuli, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 6: Penyusunan Dokumen Rencana RR (Pemulihan)	6.1 Jumlah dokumen rencana operasi darurat bencana	dokumen		60	60	60	60		Swadaya	DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara, Gorontalo, Sumatra Selatan, Riau, Bengkuli, Babel, Sumatra Barat	LPBI NU Pusat dan LPBI NU Daerah
INDIKATOR: 13.2.1 Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia											
PROGRAM 1: Program Masjid Ramah Lingkungan											
Kegiatan 1: Sosialisasi Menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1.1 Jumlah masjid yang melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masjid	-	500	1000	2000	-	150	-	Indonesia	MUI
PROGRAM 2 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI EMBUNG AIR											
Kegiatan 1: Pembangunan insfrastuktur	1.1 Jumlah Embung Air terbangun	Embung	-	-	2	1	-	4,600	The Coca- Cola Foundation	Kabupaten Monogiri dan Sukoharjo, Jawa	Yayasan Obor Tani (YOT),

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pembuatan kesepakatan pembangunan hijau di Kalimantan Timur	1.1 Jumlah rencana kerja untuk Mendukung Pemerintah Kalimantan Timur dalam membuat kebijakan terkait dengan pembangunan hijau dan menginstitutionalis asikannya serta mengarusutamaka n kebijakan tersebut kepada organisasi pemerintahan daerah.	Rencana Kerja	2017	-	-	-	1	-	-	Berau Kalimantan Timur	TNC Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2. Jumlah kesepakatan unutm mendukung Pemerintah Kalimantan Timur dalam mengakses insentif pengurangan karbon berbasis kinerja melalui skema pendanaan Forest Carbon Partnership Facility	Emission reduction purchase agreement	-	-	-	-	1	-	-	Berau Kalimantan Timur	TNC Indonesia
PROGRAM 4: Mendukung Masyarakat Miskin dalam menghadapi perubahan iklim											
Kegiatan 1: Mendukung petani sawah tadah hujan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	1.1 Jumlah Petani sawah tadah hujan didukung dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	KK	0 (2015)	-	-	5,000	5,000	8,500	IR Partners	NTB	Islamic Relief Indonesia
Kegiatan 2: Mendukung petani garam dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	2.1 Jumlah Petani garam didukung dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	KK	0 (2015)	-	-	2,000	3,000	4,250	IR Partners	NTB	Islamic Relief Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Mendukung petani Ikan gerapu dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	3.1 Jumlah Petani Ikan gerapu didukung dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	KK	0 (2015)	-	-	2,000	2,000	6,800	IR Partners	NTB	Islamic Relief Indonesia
PROGRAM 5: Nestlé Policy in Environmental Sustainability											
Kegiatan 1: Penurunan emisi gas rumah kaca di pabrik	1.1 Persentase pemantauan penurunan emisi GRK di pabrik Nestlé sebesar 5% setiap tahunnya hingga mencapai 319 ton CO2 di tahun 2020 melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh setiap pabrik	%		Berhasil	5% (dari tahun sebelu mnya)	5% (dari tahun sebelum nya)	5% (dari tahun sebelu mnya)	-	PT Nestlé Indonesia	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Kejayan, Jawa Timur 'PT Nestlé Indonesia - Pabrik Panjang, Lampung 'PT Nestlé Indonesia - Pabrik Cikupa, Banten 'PT Nestlé Indonesia - Pabrik Karawang, Jawa Barat	PT Nestlé Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Panjang, Lampung	2.1. Persentase penurunan GRK dari keberhasilan penggantian bahan bakar mesin boiler dari batu bara menjadi ampas kopi, cangkang kelapa sawit dan pellet kayu sebagai bahan bakar boiler utama di Pabrik Nestlé Panjang, Lampung	% Penurunan total emisi gas rumah kaca di pabrik (per GJ)	2012	6,584	4.431 (ytd Agustu s)	5% (dari tahun sebelum nya)	5% (dari tahun sebelu mnya)	-	PT Nestlé Indonesia	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Panjang, Lampung	PT Nestlé Indonesia
	1.3. Persentase penurunan GRK dari penggantian bahan bakar roaster kopi dari solar/LFO menjadi gas alam (CNG)										
Kegiatan 3: Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Kejayan, Jawa Timur	3.1. Persentase penurunan GRK dari Pemasangan system energy dashboard untuk memantau emisi yang dihasilkan oleh produksi	% Total penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pabrik (per GJ)	2016	83,485	46,428 (ytd Agustu s)	5% (dari tahun sebelum nya)	5% (dari tahun sebelu mnya)	-	PT Nestlé Indonesia	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Kejayan, Jawa Timur	PT Nestlé Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang		100	100	100	100	15,000	Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten		30	30	30	30				
Kegiatan 2: Pelatihan PRB - API	2.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang		30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten		50	50	50	50				
Kegiatan 3: Penyusunan Rencana PRB - API Sekolah dan Madrasah	3.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang		30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	3.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten		50	50	50	50				
Kegiatan 4: Penyusunan SOP dan Mekanisme Penanganan Bencana	4.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang		30	30	30	30		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	4.2 Jumlah sekolah/madrasah	kabupaten		50	50	50	50				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	yang mendapatkan sosialisasi										
Kegiatan 5: Simulasi Penanganan Bencana di Sekolah dan Madrasah	5.1 Jumlah peserta yang terlibat di masing-masing sekolah/madrasah	orang		150	150	150	150		Swadaya	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	LPBI NU Pusat
	5.2 Jumlah sekolah/madrasah yang mendapatkan sosialisasi	kabupaten		50	50	50	50				
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN											
INDIKATOR : 14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung (Indikator global yang akan dikembangkan)											
PROGRAM 1: Bank Sampah											
Kegiatan 1: Edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan menerapkan prinsip 3R	1.1 Jumlah bank sampah yang terbentuk	Unit	-	1,633	2,615	2,800	3,400	-	Internal Perusahaan	Medan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Magelang, lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado.	Yayasan Unilever Indonesia, Yayasan Artajaya, Yayasan Rumah Pelangi, LPTT, Persada, Yayasan Lohjinawi, Wehasta, Spektra, Bali Wastu Lestari, Ecco Walibar, Yayasan
	1.2 Jumlah nasabah bank sampah	Orang		73,228	344,274	-	-	-			
	1.3 Jumlah reduksi sampah	Ton		4,363	6,125	-	-	-			
	1.4 Manfaat ekonomi yang diperoleh	Rupiah		6,45	8,38	-	-	-			

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
											Peduli Negeri.
PROGRAM 2: Bersih Sampah Laut											
Kegiatan 1: Sosialisasi & Edukasi	1.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang		60	60	60	60	1,500	Swadaya	Jawa Barat, DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten		3	3	3	3				
Kegiatan 2: Aksi Bersih Sampah Laut	2.1 Jumlah peserta yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	orang		100	100	100	100				
	2.2 Jumlah kabupaten yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	kabupaten		3	3	3	3				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengelolaan KKP dan pemanfaatan ruang laut secara efektif	1.1 Jumlah rekomendasi untuk dukungan zonasi tata ruang laut berbasis ekosistem di tingkat nasional dan provinsi	Rekomenda si	-	-	-	-	1	-	-	Nasional	TNC Indonesia
PROGRAM 5: PENGUATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI											
Kegiatan 1: Mendesain roadmap 30 juta hektar kawasan konservasi dan peningkatan efektivitas 35 kawasan konservasi	1.1 Kajian spasial kawasan konservasi dan roadmap menuju 30 juta hektar KKP dan KKP yang efektif	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	Nasional	WCS Indonesia
INDIKATOR : 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan											
PROGRAM 1: Mengikutsertakan perusahaan perikanan dan kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan (termasuk pengumpulan data dan metoda panen) di Indonesia											
Kegiatan 1: Mengembangk an teknologi pengkajian pasokan ikan yang inovatif dan mendukung pengelolaan perikanan	1.1 Jumlah alat yang dikembangkan sistem teknologi untuk mendukung ketertelusuran ikan kakap-kerapu laut dalam	alat	-	-	-	1	-	-	-	Bali, Kupang (NTT), Sulawesi Utara	TNC Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
berkelanjutan serta bekerja sama dengan Dir. SDI-KKP untuk pengelolaan perikanan per- Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di 6 WPP (573, 712, 713, 714, 715, 718)	1.2 Jumlah dukungan untuk pembentukan struktur Lembaga Pengelola Perikanan dan operasionalisasi Kelompok Kerja dalam LPP	surat keputusan	-	-	-	-	1	-	-	Nasional	TNC Indonesia
PROGRAM 2: Penanaman Terumbu Karang Buatan											
Kegiatan 1: Edukasi dan sosialisasi	1.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang	-	20	20	20	20	1000	Swadaya	Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten	-	3	3	3	3				
Kegiatan 2: Aksi Penanaman Terumbu Karang Buatan	2.1 Jumlah peserta yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	orang	-	20	20	20	20		Swadaya	Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur	LPBI NU Pusat
	2.2 Jumlah kabupaten yang terlibat aksi	kabupaten	-	3	3	3	3				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Mengimplementasikan konsep Territorial User Rights for Fishing + Reserve (TURF-R) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan	1.1 Menetapkan No Take Zone di wilayah perikanan tradisional masyarakat di beberapa sites	Ha	0	1,000	2,000	3,000	5,000	-	BMUB (Tentative)	Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh	RARE Indonesia
PROGRAM 3: Konservasi Kawasan Pesisir dengan Penanaman Mangrove											
Kegiatan 1: Sosialisasi Konservasi Kawasan Pesisir dengan Penanaman Mangrove	1.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang		60	60	60	60	4,000	Swadaya & MFF UNDP	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur	LPBI NU Pusat & MFF
	1.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten		6	6	6	6				
Kegiatan 2: Kajian Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	2.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang		60	60	60	60				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten		6	6	6	6				
Kegiatan 3: Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir	3.1 Jumlah Mangrove yang ditanam di masing-masing kabupaten	pohon		15,000	15,000	15,000	1,500				
	3.2 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam penanaman mangrove			100	100	100	100				
Kegiatan 4: Pendampingan kepada masyarakat	4.1 Jumlah kabupaten	kabupaten		6	6	6	6				
INDIKATOR : 14.6.1.(a) Jumlah kepatuhan pelaku usaha											
PROGRAM 1: BOGOR 7 PROVINCIAL WIDE COHORT											
Kegiatan 1: Kampanye penyadartahuan kepada	1.1 Peningkatan pengetahuan nelayan terhadap manfaat wilayah No Take Zone	% increase	10	30	30	30	30	-	BMUB (Tentative)	Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh	RARE Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Mendukung petani garam dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	1.1 Jumlah Petani garam didukung dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	KK	0 (2015)	-	-	2,000	3,000	4,250	IR Partners	NTB	Islamic Relief Indonesia
Kegiatan 2: Mendukung petani Ikan gerapu dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	2.1 Jumlah Petani Ikan gerapu didukung dalam beradaptasi dengan perubahan iklim	KK	0 (2015)	-	-	2,000	2,000	6,800	IR Partners		
INDIKATOR : 14.c.1 Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS											
PROGRAM 1: PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN											
Kegiatan 1: Mengkomunikasikan pembelajaran hasil lapangan terhadap pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	1.1 Jumlah mitra pemerintah & non pemerintah yang mengerti tentang TURF+R	% increase	0	0	0	5	10	-	BMUB (Tentative)	Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh	RARE Indonesia
TUJUAN 15. EKOSISTAM DARATAN											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
INDIKATOR : 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan											
PROGRAM 1: <i>Building with Nature</i>											
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk restorasi kawasan pesisir dan mendukung perlindungan green belt melalui mekanisme BioRights (penghijauan dengan skema pemberian hibah bersyarat)	1.1 Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi kegiatan (desa)	2016	-	9	9	9				Wetlands International Indonesia
Kegiatan 2: restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	2.1 Luas restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	Hektar	2016	-	-	-	100				Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Perlindungan dan pemulihan gambut, melalui pendekatan 3R, yakni Rewetting (pembasahan kembali lahan gambut), Revegetation (penanaman kembali/ revegetasi di lahan gambut) dan Revitalization of local livelihoods (revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat).	1.1 Jumlah lokasi kegiatan Perlindungan dan pemulihan gambut, melalui pendekatan 3R, yakni Rewetting (pembasahan kembali lahan gambut), Revegetation (penanaman kembali/ revegetasi di lahan gambut) dan Revitalization of local livelihoods (revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat).	Lokasi	10	-	10	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
PROGRAM 4: Partners for Ressilience/building with nature											
Kegiatan 1: advokasi/ penguatan kebijakan kebijakan untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem	1.1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem	Kab/Kota	2016	-	-	1	5	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
mangrove dan atau gambut	mangrove dan atau gambut										
	1.2 Jumlah provinsi yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Provinsi	2016	-	-	-	5	-	-	-	
Kegiatan 2: Dokumentasi praktik restorasi ek mangrove dan gambut	2.1 Jumlah Dokumen restorasi ekosistem mangrove dan gambut	dokumen	2016	-	-	-	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pemetaan ekosistem mangrove-pantai utara jawa/gambut (sumatera, Kalimantan) beserta statusnya	3.1 Jumlah penyusunan peta eksosistem mangrove dan gambut	Peta	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 4: Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	4.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 5: Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	5.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 6: Penyusunan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	6.1 Jumlah penyusunan laporan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 7: Workshop terkait identifikasi solusi dalam menjawab permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	7.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 8: Peningkatan kapasitas terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	8.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia
	8.2 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan pemahaman stakeholder terkait penerapan kebijakan baru terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 9: CEPA (Communication , Education, Public Awareness) Program kampanye dan penyadar tahuan terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut (pers realease, media dan social media, dialog public, pameran)	9.1 Jumlah pelaksanaan paket kegiatan untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman da kesadaran masyarakat terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Paket	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk restorasi kawasan pesisir dan mendukung perlindungan green belt melalui mekanisme BioRights (penghijauan dengan skema pemberian hibah bersyarat)	1.1 Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi kegiatan (desa)	2016	-	9	9	9	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 2: restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	2.1 Luas restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	Hektare	2016	-	-	-	100	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Advokasi/pengu atan kebijakan kebijakan untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut dalam kerangka Pengurangan Risiko Bencana	3.1 Jumlah desa yang memiliki peraturan desa untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Desa	2016	-	-	-	13	-	-	-	Wetlands International Indonesia
PROGRAM 2: Dana Masyarakat gambut Indonesia											
Kegiatan 1: Perlindungan dan pemulihan gambut, melalui pendekatan 3R, yakni Rewetting (pembasahan kembali lahan gambut), Revegetation (penanaman kembali/ revegetasi di lahan gambut) dan Revitalization of local livelihoods (revitalisasi sumber mata	Jumlah lokasi kegiatan Perlindungan dan pemulihan gambut, melalui pendekatan 3R, yakni Rewetting (pembasahan kembali lahan gambut), Revegetation (penanaman kembali/ revegetasi di lahan gambut) dan Revitalization of local livelihoods (revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat).	Lokasi	10	-	10	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
pencarian masyarakat).											
PROGRAM 3: Mangrove for Future											
Kegiatan 1: Perlindungan, pemulihan dan pengelolaan ekosistem mangrove											Wetlands International Indonesia
PROGRAM 4: Partners for Ressilience/building with nature											
Kegiatan1: advokasi/pengu atan kebijakan kebijakan untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	1.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Kab/Kota	2016	-	-	1	5	-	-	-	Wetlands International Indonesia
	1.2. Jumlah provinsi yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem	Provinsi	2016	-	-	-	5	-	-	-	

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	mangrove dan atau gambut										
Kegiatan 2: Dokumentasi praktik restorasi ek mangrove dan gambut	2.1. Jumlah Dokumen restorasi ekosistem mangrove dan gambut	dokumen	2016	-	-	-	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 3: Pemetaan ekosistem mangrove-pantai utara jawa/gambut (sumatera, Kalimantan) beserta statusnya	3.1 Jumlah penyusunan peta eksosistem mangrove dan gambut	Peta	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 4: Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	4.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 5. Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	5.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 6. Penyusunan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	6.1 Jumlah penyusunan laporan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 7: Workshop terkait identifikasi solusi dalam menjawab permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	7.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 8: Peningkatan kapasitas terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	8.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	8.2 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan pemahaman stakeholder terkait penerapan kebijakan baru terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	
Kegiatan 9: CEPA (Communication, Education, Public Awareness) Program kampanye dan penyadar tahun terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut (pers realease, media dan social	9.1 Jumlah pelaksanaan paket kegiatan untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Paket	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk restorasi kawasan pesisir dan mendukung perlindungan green belt melalui mekanisme BioRights (penghijauan dengan skema pemberian hibah bersyarat)	1.1 Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi kegiatan (desa)	2016	-	9	9	9	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 2: restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, per baikan hidrologi, liveli ood	2.1 Luas restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbai kan hidrologi, livelihoo d	Hektare	2016	-	-	-	100	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: advokasi/pengu atan kebijakan kebijakan untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	1.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Kab/Kota	2016	-	-	1	5	-	-	-	Wetlands International Indonesia
	1.2. Jumlah provinsi yang memiliki produk hukum daerah untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Provinsi	2016	-	-	-	5	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 2: Dokumentasi praktik restorasi ek mangrove dan gambut	2.1. Jumlah Dokumen restorasi ekosistem mangrove dan gambut	dokumen	2016	-	-	-	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Pemetaan ekosistem mangrove-pantai utara jawa/gambut (sumatera, Kalimantan) beserta statusnya	3.1 Jumlah penyusunan peta eksosistem mangrove dan gambut	Peta	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 4: Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	4.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem mangrove kasus di Kota Serang, Kabupaten Demak	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 5. Analisa pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	5.1 Jumlah penyusunan Dokumen laporan pemetaan kebencanaan pada ekosistem gambut di sumater dan kalimantan	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 6. Penyusunan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	6.1 Jumlah penyusunan laporan Valuasi ekonomi, indetifikasi solusi dan masalah pada ekosistem gambut dan mangrove kasus di 6 kabupaten	Dokumen	2016	-	1	-	-	-	-	-	Wetlands International Indonesia
Kegiatan 7: Workshop terkait identifikasi solusi dalam menjawab permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	7.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 8: Peningkatan kapasitas terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	8.1 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia
	8.2 Jumlah pelaksanaan workshop untuk peningkatan pemahaman stakeholder terkait penerapan kebijakan baru terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Jumlah workshop	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 9: CEPA (Communication , Education, Public Awareness) Program kampanye dan penyadar tahuan terkait perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut (pers realease, media dan social media, dialog public, pameran)	9.1 Jumlah pelaksanaan paket kegiatan untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman da kesadaran masyarakat terkait perlindungan, pengelolaan, pemulihan ekosistem mangrove dan gambut	Paket	2016	-	-	1	1	-	-	-	Wetlands International Indonesia
INDIKATOR : 15.5.1* Persentase populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species											
PROGRAM 1: Program Pembinaan Habitat dan Populasi badak											
Kegiatan 1: Melanjutkan Kegiatan semi- captive breeding badak sumatera di SRS TN Way Lambas.	1.1 Persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas	% Populasi Badak Sumatera	2016	2	2	2	2	14,000	International Rhino Foundation (IRF)	TN Way Kambas	Ditjen KSDAE, YABI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Operasionalisasi Intelligence and Enforcement Unit (ILEU) dan meningkatkan kerjasama dg para penegak hukum.	1.1 Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus	%	2016	5	5	5	5	3,500	International Rhino Foundation (IRF)	TN Bukit Barisan Selatan dan TN Way Kambas	Ditjen KSDAE, YABI.

MATRIKS BAGIAN 3: INDIKATOR TPB/SDGs YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Belum semua indikator TBP/SDGs Indonesia sudah dirumuskan metadatanya karena masih menunggu kesepakatan global tentang indikator tersebut (sebagian besar adalah indikator SDGs Tier III) atau karena pada saat perumusan indikator, Tim belum berhasil merumuskan metadatanya. Dalam buku “Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia”, indikator tersebut termasuk kategori “indikator yang akan dikembangkan”. Secara bertahap indikator dengan kategori akan dikembangkan tersebut akan dirumuskan metadatanya melalui proses pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan dunia usaha, pakar dan akademisi) dibantu oleh Organisasi PBB yang mengampu indikator tersebut. Meski masih dalam kategori “indikator yang akan dikembangkan”, sudah terdapat program atau kegiatan yang diindikasikan terkait dengan beberapa indikator tersebut, baik dikerjakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Seperti halnya perumusan metadata tahap pertama, perumusan metadata tahap kedua akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi baik *offline* maupun *online* untuk disepakati bersama. Berikut adalah daftar indikator yang akan dikembangkan untuk Pilar Lingkungan:

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.

Kode Indikator	Nama Indikator
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).

11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.

Tujuan 11. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

12.2.1	Jejak material (material footprint).
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.
	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.
12.4.1	
12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.

12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.
--------	---

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD. (Indikator ini tidak relevan untuk Indonesia)
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal. (Indikator ini tidak relevan untuk Indonesia)

Tujuan 14. Eksosistem Lautan

14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.

14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara. (Indikator ini tidak relevan untuk Indonesia)
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan. (Indikator ini tidak relevan untuk Indonesia)

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.
15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya .
15.2.1	Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.
	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
15.a.1	
15.b.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.

SALINAN

ANAK LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
Indikator SDGs: 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
PROGRAM 1: Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana										
Kegiatan 1: Penindakan Tindak Pidana Umum	1.1 Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Penanganan Tindak Pidanan Umum	185.203	184.163	140.866	224.371	224,371	4.750.000	APBN	POLRI
	1.2 Kasus Pembunuhan (338 KUHP)	Kasus	1.321 (86%)	1.197 (97%)	766 (99%)	766 (99%)	766 (99%)	270,805	APBN	POLRI
Indikator SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM 1: Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	1.1 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	Jumlah Personel	575 giat (x 1000 org)	950 giat	1.218 giat	120.000	120.000	120.000	APBN	POLRI
	1.2 Pengamanan Konflik Sosial	Kegiatan	8	21	18	18	18	370.210	APBN	POLRI
	1.3 Pengamanan Unras Anarkis	Kegiatan	3 kali	4 kali	2 kali	2	2	199.390	APBN	POLRI
Kegiatan 2: Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	2.1 Jumlah Layanan Pembinaan Fungsi Baharkam Polri	Layanan	6.222	7.450	9.850	10,722	10.722	328.195	APBN	POLRI
	2.2 Pengaturan	Kegiatan	1.007.051	602,369	2.169.187	2.169.187	2.169.187	250.000	APBN	POLRI
	2.3 Penjagaan	Kegiatan	1.400.871	156,762	2.965.769	2.965.769	2.965.769	341.063	APBN	POLRI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	1.1 Pengamanan Gangguan Kamdagri Berintensitas Tinggi	Jumlah Personel	28.749	49.325	51.627	4.515	4.515	370.210	APBN	POLRI
	1.2 Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Personel	26.343 (78 kali)	46.919 (75 kali)	49.221 (77 kali)	49.221 (77 kali)	49.221 (77 kali)	831.625	APBN	POLRI
	1.3 Pengamanan Konflik Sosial	Jumlah Personel	2.406 org (10 kali)	2.406 org (10 kali)	2.406 org (15 kali)	2.406 org (15 kali)	2.406 org (15 kali)	370.210	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM 1: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Kegiatan 1 : Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	1.1 Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak	Survei	1	1	1	1	-	26000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2.1 Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	2	1	2	2	2470	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.2 Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Dokumen	1	1	1	1	1	600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	2.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kegiatan	2	2	2	2	2	1190	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.4 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2	2	920	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 3: Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah	3.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Provinsi	28	30	32	34	34	100000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 4: (Baru) Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	4.1 Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Baru)	Dokumen	1 (2017)	-	1	NA	NA	340	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4.2 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan	Kegiatan	2 (2017)	-	2	NA	NA	6600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	kekerasan dalam rumah tangga (Baru)									
	4.3. Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang ditindaklanjuti (Baru)	Dokumen	2 (2017)	-	2	NA	NA	400	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 5: (Baru) Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	5.1 Jumlah dokumen profil Perlindungan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (Baru)	Dokumen	1 (2017)	-	1	NA	NA	250	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.2 Jumlah K/L dan Pemda yang disosialisasikan tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (Baru)	K/L dan Pemda	6 (2017)	-	6	NA	NA	400	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 6: (Baru) Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	6.1 Jumlah profil kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui elektronik (termasuk TPPO) (Baru)	Dokumen	1 (2017)	-	1	NA	NA	500	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	6.2 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Baru)	Kegiatan	2 (2017)	-	2	NA	NA	4212,8	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6.3 Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Baru)	K/L dan Pemda	6 (2017)	-	6	NA	NA	600	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan 7: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	7.1 Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi bidang perlindungan hak pekerja perempuan yang ditindaklanjuti (Baru)	Dokumen	2 (2017)	-	2	NA	NA	1000	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapat sosialisasi/advokasi tentang kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan (Baru)	K/L dan Pemda	10 (2017)	-	10	NA	NA	1350	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Potensi Keamanan										
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1.299.641	1.299.641	610,000	APBN	POLRI
	1.2 kegiatan Bintibmas tentang Premanisme	Jumlah Personil	20	20	20	20	20	4,475,000	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.										
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK (Matriks KL/II.M.L.047-30)										
Kegiatan 1: Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	1.1 Jumlah kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan*	Kebijakan	3	2	1	1	1	3,400	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus yang di review**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	450	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan**	Kebijakan	-	-	1	NA	NA	147	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	(Baru) 1.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan**	Kebijakan	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
	1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak*	Dokumen	2	3	3	3	3	950	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum**	Dokumen	2	1	1	1	1	1,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil ABK di 6 provinsi**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	450	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	455	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah profil pornografi anak**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.2 Jumlah profil perlindungan anak dalam konflik sosial**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak*	Kegiatan	5	7	6	6	6	3,150	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah KIE terkait isu penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif**	Kegiatan	-	-	1	NA	NA	150	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus di desa model PATBM**	Kegiatan	-	-	32	NA	NA	4,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui radio elektronik dan media publik tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak**	Kegiatan	-	-	3	NA	NA	9,123	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.3 Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak dari pornografi di 9 provinsi**	Media	-	-	5	NA	NA	3,000	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti*	Dokumen	6	6	6	6	6	2,750	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi pelaksanaan penanganan anak korban stigmatisasi dan anak korban jaringan terorisme**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan ABK**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	500	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Hasil pemantauan dan evaluasi PATBM**	Dokumen	-	-	2	NA	NA	1,212	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 1.4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang ditindaklanjuti**	Dokumen	-	-	1	NA	NA	100	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Peningkatan Perlindungan Anak di daerah	2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya*	Provinsi	28	30	32	34	34	100,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum yang di review**	Provinsi	-	-	8	NA	NA	1,200	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan sarana bermain bagi anak yang bisa diakses anak berkebutuhan khusus dan minoritas di daerah perbatasan**	Provinsi	-	-	4	NA	NA	1,000	APBN	Kementerian PP dan PA
	(Baru) 2.1 Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Stranas PKtA bagi Kabupaten/Kota**	Provinsi	-	-	10	NA	NA	2,000	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penindakan Tindak Pidana Umum	1.1 Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Penanganan TP	77.222	95.450	103.355	224.371	224.371	4.750	APBN	POLRI
	1.2 Kasus Penganiayaan Berat (353 Ayat 1 KUHP)	Kasus	14.574 (70%)	14.299 (66%)	14.283 (75%)	14.283 (75%)	14.283 (75%)	270.805	APBN	POLRI
PROGRAM 2: Program Pemberdayaan Potensi Keamanan										
Kegiatan 1: Pembinaan Potensi Keamanan	1.1 Jumlah Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Kegiatan	-	-	-	1.299.6 41	1.299.6 41	610	APBN	POLRI
	1.2 Giat Penyuluhan, dalam rangka Sambang &FGD kontra radikal	Kegiatan	Tim 5 org (Sasaran 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasara n 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasara n 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasara n 120 org) di 13 Polda	Tim 5 org (Sasara n 120 org) di 13 Polda	847.403	APBN	POLRI
	1.2 Door to door system (DDS)	Kegiatan	8.218.129	50.283. 521	53.338. 326	53.338. 326	53.338. 326	488.149	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.										
PROGRAM 1: Pembinaan Hukum Nasional										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.1 Peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi. (Matriks K/L Hal. II.M.L.013-44 dan II.M.L.013-45)	Orang	3,450	8,005	3.021	3.021	3.021	209,500	APBN	Kementerian Hukum dan HAM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.1 Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	perkara	10.748	26.451	15.844	10.947	11.125	18,700	APBN	Mahkamah Agung
	1.2 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu	perkara	29.556	84.382	60.456	31.826	32.432	75,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.3 Layanan Bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama	jam layanan	77.344	195.923	158.237	116.666	123.878	58,000	APBN	Mahkamah Agung
PROGRAM 2: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum										
Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.1 Layanan Pos Bantuan Hukum	jam layanan	12.275	1.214	373	108.675	108.675	54,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.2 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	perkara		27.229	53.246	5.458	5.458	35,000	APBN	Mahkamah Agung
	1.3 Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	perkara	103.374	113.148	98.236	873	873	3,400	APBN	Mahkamah Agung
INDIKATOR SDGs: 16.3.2. (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	1.1. Jumlah Kementerian/Lembaga /Organisasi/Pemerintah Daerah (KLOP) yang melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi	K/L/O/PD	10	10	10	10	10	130.000	APBN	Komisi Pemberantasan Korupsi
INDIKATOR SDGs: 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
PROGRAM 1: Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal										
Kegiatan 1: Penyusunan Rancangan APBN	1.1 Akurasi Perencanaan APBN	Persen	95	95	96	97	98	30.077,52	RM	Direktorat Penyusunan APBN
Kegiatan 2: Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	2.1 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L	Persen	15	12,5	-	-	-	8.750,28	RM	Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III
Kegiatan 3: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	3.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	6.739,89	RM	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Kegiatan 4: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	5.554,84	RM	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN	5.1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	Persen	10 (2017)	-	10	7.5	5	2.593,72	RM	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Instansi BPK.										
PROGRAM 1: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah										
Kegiatan 1: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.1. Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Maturitas SPIP level 3	Persen	2 (2016)	2	32	55	85	226,755	APBN	BPKP
	1.2. Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kapabilitas APIP level 3	Persen	8 (2016)	8	21	56	85	254,507	APBN	BPKP
PROGRAM 2: Pengelolaan Perbendaharaan Negara										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	1.1 Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan Opini Audit yang Baik	Indeks	3,5 (2016)	3,5	3,5	3,5	3,5	106,557	APBN	Kemenkeu
PROGRAM 3: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah										
Kegiatan 1: Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.1 Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	Provinsi/Kabupaten/Kota	20 Provinsi 250 Kab/Kota	22 Provinsi 275 Kab/Kota	24 Provinsi 300 Kab/Kota	26 Provinsi 325 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota	10.775,3	APBN	Kemendagri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2 Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Provinsi/Kabupaten/Kota	18 Provinsi 175 Kab/Kota	21 Provinsi 200 Kab/Kota	25 Provinsi 250 Kab/Kota	27 Provinsi 280 Kab/Kota	29 Provinsi 305 Kab/Kota	10.203,2	APBN	Kemendagri
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
PROGRAM 1: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	1.1. IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada K/L dan Pemerintah Provinsi (*termasuk komponen pelayanan asistensi/bimtek/coaching clinic implementasi SAKIP)	IP	210 (2017)	-	210	400	400	6.531,5	APBN	KemenPAN RB
	1.2. IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	IP	480 (2017)	-	480	624	624	28.136,4	APBN	KemenPAN RB
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (Instansi LKPP).										
PROGRAM 1: Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
Kegiatan 1: Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	1.1. LPSE yang Terstandarisasi (*terdiri dari komponen standarisasi layanan	LPSE	180	460	610	635	-	21.617,3	APBN	LKPP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	security dan capacity LPSE)									
	1.2. Cloud Data Center LPSE (*terdiri dari komponen analisa dan desain sistem, penguatan kapasitas infrastruktur dan cloud LPSE, pengembangan dan implementasi, serta penguatan layanan LPSE)	Provinsi	18 (2016)	18	34	34	34	117.011,9	APBN	LKPP
	1.3. Penyedia yang Terkualifikasi (*merupakan output dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Mangement System (VMS). VMS adalah data penyedia terpusat, yang memuat informasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data/ informasi mengenai identitas, kualifikasi,	Penyedia	67.200 (2016)	67.200	112.000	123.200	134.400	21.539,1	APBN	LKPP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	serta riwayat kinerja penyedia, yang berfungsi untuk mengurangi proses prakualifikasi dan mempercepat proses lelang)									
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga/dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
PROGRAM 1: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	1.1. Jumlah IP yang diberikan asistensi pelaksanaan reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemerintah Provinsi (*termasuk komponen pelayanan asistensi/bimtek/coaching clinic pelaksanaan RB)	IP	150 (2017)	-	150	400	400	23.061,5	APBN	KemenPAN RB

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. Jumlah IP yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi-nya	IP	180 (2017)	-	180	262	312	16.693,1	APBN	KemenPAN RB
PROGRAM 2: Program Bina Otonomi Daerah										
Kegiatan 1: Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah	1.1 Jumlah daerah provinsi yang mendapat status berkinerja tinggi	Provinsi	28 provinsi	28 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	28.904,6	APBN	Kemendagri
	1.2 Jumlah daerah kabupaten/kota yang mendapat status berkinerja tinggi	kabupaten/kota	65 kota dan 291 kabupaten	65 kota dan 291 kabupaten	65 kota dan 291 kabupaten	91 kota dan 423 kabupaten	91 kota dan 423 kabupaten	40.345,4	APBN	Kemendagri
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik										
PROGRAM 1: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	1.1. UPP yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (*terdapat komponen pengolahan data nasional)	UPP	300 (2017)	300	300	300	300	6,817	APBN	KemenPAN RB
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
PROGRAM 1: Pengawasan Pelayanan Publik										
Kegiatan 1: Pencegahan Mal-administrasi	1.1. Survey Kepatuhan K/L/Pemda terhadap Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	survey	1 (2017)	1	1	1	1	68.900	APBN	Ombudsman RI

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi										
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	1.1. UPP yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (*komponen terdiri dari sosialisasi kebijakan, coaching clinic, monitoring dan tindaklanjut)	UPP	300 (2017)	300	300	300	300	49.900,0	APBN	KemenPAN RB
PROGRAM 3: Bina Pembangunan Daerah										
Kegiatan 1: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II	1.1 Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	5.087,50	APBN	Kemendagri
Kegiatan 2: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III	2.1 Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	6.076,70	APBN	Kemendagri
Kegiatan 3: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	3.1 Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan	kabupaten/kota	10 (2016)	10	30	70	110	3.544,40	APBN	Kemendagri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengarusutamaan gender bidang hukum	1.1 Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	1	1	1	1	1800 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	2.1 Jumlah kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkunganyang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untukdiharmonisasika n menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1	3490 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 3: Pengarusutamaan gender bidang IPTEK	3.1 Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	2	2	1	1	3380 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 4: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan	4.1 Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	4100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 5: Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	5.1 Jumlah kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	4	4	2	2	3350 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 6: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	6.1 Jumlah kebijakan yang disusun untuk mendukung Industri Rumah tangga di tingkat Pusat	Kebijakan	1	2	1	1	1	3380	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 7: Pengarusutamaan gender bidang Pendidikan	7.1 Jumlah kebijakan bidang pendidikan dan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	2	2	2	2250 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 8: Pengarusutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	8.1 Jumlah kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	3	3	3	2	5900 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 9: Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	9.1 Jumlah kebijakan yang ditelaah tentang 30% keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Kebijakan	2	2	2	1	1	2100 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 10: Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	10.1 Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	2	2	3	4	3	5060 (Telah di tag di indikator 5.1.1*)	APBN	Kementerian PP dan PA
INDIKATOR SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik										
PROGRAM 1 : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)										
Kegiatan 1 : Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	1.2 Indeks Demokrasi Indonesia	Skor	72.82	70.09	74.3	74.60	75	52,107,773	APBN	Kemenko Polhukam
	1.2 (i) Indeks Lembaga Demokrasi	Skor	66.87	62.05	77	78	79			
	1.2 (ii) Indeks Kebebasan Sipil	Skor	80.30	76.45	85	86	87			
	1.2 (iii) Indeks Hak-hak Politik	Skor	70.63	70.11	66	67	68			
PROGRAM 2: Program Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum, Kemendagri)										

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Fasilitasi Politik Dalam Negeri	1.2 Penguatan Pokja Demokrasi (Bimbingan, Supervisi dan evaluasi kinerja pemma dalam pengembangan demokrasi (IDI))	Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	10 provinsi	15 provinsi	10.024	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	34	28.700	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	Persen	74,27 (a)	74,5 (a)	75,41 (a)	NA	NA	22.200		Tidak ada data target kepemilikan akta khusus untuk anak umur 5 tahun ke bawah
Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Kependudukan	2.1 Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Dukumentasi Kebijakan Informasi Kependudukan	Laporan	6	6	3	3	3	16.100	APBN	Kementerian Dalam Negeri
kegiatan 3: Pengembangan Sistem Administrasi	3.1 Sarpras Siak Di 514 Kab/Kota, serta	Kab/Kota	514	514	514	514	514	1.492.600	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kependudukan (SAK) Terpadu	DC dan DRC Kependudukan									
	4.2 Terlaksananya sosialisasi di 34 provinsi tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Daerah	548 (2017)	-	548	548	548	2.900	APBN	Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs: 16.9.1. (a) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 16.9.1. (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	34	21.065.959	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	Persen	72,3	74	75	76	77,4	16.654.602		
	1.3 Tersedianya kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak yang lengkap dan harmonis	Kebijakan	1	-	-	-	-	129,3	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.4 Terlaksananya sosialisasi di 34 provinsi tentang hak anak untuk	Daerah	-	-	548	548	548	2.978.037	APBN	Kementerian Dalam Negeri

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Penyelesaian Pelanggaran HAM	1.1 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Paniai	kasus	-	-	-	3	3	3,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.2 Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	penyelidikan	3 (2015)	3	4	4	4	7,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.3 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	kasus	400 (2015)	3850	1024	600	610	27,000	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.4 Pengaduan yang dikelola oleh Komnas HAM	pengaduan	-	7500	7500	7500	7500	6,700	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	1.5 Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi	kasus	48 (2016)	48	102	77	85	8,800	APBN	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
PROGRAM 2: Program Pemajuan HAM. (Matriks Hal. II.M.L.013-40)										
Kegiatan 1: Program Pemajuan HAM.	1.1 Prosentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	Persen	50	50	50	50	50	4,400	APBN	Kemenkumham (Ditjen HAM)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Pelayanan Komunikasi Masyarakat	2.2 Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM	Kasus	180 (2017)	-	180	180	180			Kemenkumham (Ditjen HAM)
PROGRAM 3: Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.										
Kegiatan 1: Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Matriks KL Hal. II.M.L.006-22)	1.1 Jumlah penanganan perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat, dan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara	-	-	-	2	2	200	APBN	Kejaksaan Republik Indonesia
INDIKATOR SDGs: 16.10.1. (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEKAKAN HAM (Matriks KL Hal. II.M.L.074-7)										
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah laporan pemantauan yang dihasilkan dalam 12 bulan terakhir	Laporan	1	1	1	1	1	2,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 12 bulan terakhir	Pengaduan	10	10	10	10	10	1,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.3 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau	Pengguna	10	10	10	10	10	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pengetahuan mengenai KtP									
PROGRAM 2: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Pengembangan Konsep penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Konsep	1	1	2	2	2	2,000	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/keompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Inisiatif	1	1	3	3	3	1,000	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.										
PROGRAM 1 : Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik										
Kegiatan 1 : Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	1.1 Prosentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan	Persen	47	50,38	70	75	80	2,250	APBN (KOMINFO)	KOMIS INFORMASI PUSAT (KIP)

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Keterbukaan Informasi Publik									
Kegiatan 2: Diseminasi UU KIP kepada Badan Publik	2.1 Jumlah Badan Publik yang menerima informasi tentang ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	N/A	189	80	80	100	1,000	APBN (KOMINFO)	KIP
PROGRAM 2 : Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik										
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	1.1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP melalui kegiatan seminar/forum	Orang	2000	3500	2000	2000	2000	15,000	APBN	Ditjen IKP Kemkominfo
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
PROGRAM 1 : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik										
Kegiatan 1 : Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Informasi Publik	1.1 Prosentase terselesaikannya kasus/ sengketa teregister ditahun berjalan	Persen	56,63	54,02	65	65	65	2,750	APBN (KOMINFO)	KIP
Kegiatan 2: Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	2.1 Penerima Bimtek Perki tentang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan	Orang	30	0	40	40	50	1,250	APBN (KOMINFO)	KIP

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	1.1 Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP di Badan Publik Negara melalui Bimtek	Orang	250	209	307	250	250	10,000	APBN	Ditjen IKP Kemkominfo
INDIKATOR SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.										
PROGRAM 1: Mempertahankan Akreditasi A Paris Principles Komisi Nasional Hak Asasi Manusia										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	1.1. Terpilihnya Komisioner Komnas HAM yang independen	Orang	7 (2017)	-	7	-	-	1,100	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	2.1. Implementasi Jejaring Komnas HAM melalui Forum Lembaga HAM Nasional (K/L/I/D)	Kegiatan	6 (2017)	-	6	Meningkat	Meningkat	2,170	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 3: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	3.1 Implementasi Jejaring Komnas HAM melalui SEANF, ICC, APF, Regional Concultative Meeting, International Conference dan UN Session	Kegiatan		-	7	Meningkat	Meningkat	3,390	APBN	Komnas HAM
kegiatan 4: Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	4.1 Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan	Instansi	40% (2017)	-	40%	-	meningkat	4,352	APBN	Komnas HAM

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	pemenuhan hak kelompok minoritas									
	4.3 TOT terkait HAM kepada aparatur dan masyarakat	Orang	51 orang (2015)	- (level komponen, tidak ada target)	- (level komponen, tidak ada target)	tidak dianggarkan secara khusus	tidak dianggarkan secara khusus	1,653	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 5: Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5.1 Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	Persen	14 (2015)	5	15	16	meningkat	8,702	APBN	Komnas HAM
Kegiatan 6: Akuntabilitas NHRI kepada Publik	6.1 Penyusunan Laporan Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	650	APBN	Komnas HAM
	6.2 Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	290	APBN	Komnas HAM
PROGRAM 2: Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP										
Kegiatan 1: Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP	1.1 Penguatan Mekanisme HAM Nasional Dengan Mandat Khusus Penghapusan KtP	Dokumen	1	1	1	1	1	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 1: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.2. 7. Peningkatan layanan Komnas Perempuan sebagai women human rights resource centre	Layanan	12	12	12	12	12	1,000	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 16.b.1. Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional										
PROGRAM 1: Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM										
Kegiatan 1: Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	1.1 Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai KtP	Pengguna	10 (2015)	10	10	10	10	500	APBN	Komnas Perempuan
	1.2 jumlah pengguna layanan usia 18-24 tahun yang mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan	Orang	10 (2015)	10	10	10	10	500	APBN	Komnas Perempuan
INDIKATOR SDGs: 16.b.1. (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional										
PROGRAM 1: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Rekomendasi	2	2	2	2	2	1,000	APBN	Komnas Perempuan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Indikator SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
PROGRAM 3:											
Kegiatan 1: Pelatihan Literasi Digital	1.1 Output: Para santri memiliki pemahaman bagaimana cara kerja media digital dan bagaimana memanfaatkan untuk dakwah cinta tanah air	Kegiatan	1	2	2	7	7	720	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	19 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
Kegiatan 2: Pelatihan Islam dan Gerakan Cinta Tanah Air	2.1 Output: Makin kuat cinta tanah air di kalangan pesantren.	Kegiatan	0	0	1	5	7	455	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	13 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
Indikator SDGs: 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
PROGRAM 2: Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis ormas dan pondok pesantren											
Kegiatan 1: Pengembangan Media ormas dan pondok pesantren: Memfasilitasi pengembangan TV MUI, mimbar Ulama	1.1. Jumlah mimbar ulama MUI yang terbit dan memuat penyuluhan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis ormas dan pondok pesantren	eksemplar		1.000	2.000	3.000	3.000	1.200	75% dana APBN dan 25% dana Pendamping (I - Tersedia)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
MUI, media sosial, dll untuk sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis ormas dan pondok pesantren	2.1 Jumlah siaran TV MUI untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis ormas dan pondok pesantren	kegiatan		10	20	30	40	swadaya	(III - Belum tersedia sumber)	Nasional	MUI
PROGRAM 5: Penguatan Konten Media Sosial untuk Perlindungan Kekerasaan											
Kegiatan 1 Pelatihan Pengarusutamaan Konten Damai untuk Keamanan.	1.1. sejumlah kader dilatih	Orang	100 (2016)	100	200	300	400	500	Donor Agensi, swadaya	Nasional	Lakpesdam NU
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
PROGRAM 1: Communities attitude and practices to protect children											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk orang tua / pengasuh untuk menunjukkan	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah orang tua / pengasuh yang menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan positif	Orang tua/ Pengasuh	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	722	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
pola asuh yang positif	1.2 Indikator Kegiatan :Jumlah orang tua yang dilatih dalam kursus / lokakarya yang menangani disiplin positif	Orang tua/ Pengasuh	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat untuk dilengkapi perlindungan anak	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah tindakan/praktek masyarakat terkait perlindungan anak	Tindakan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	144	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	2.2 Indikator Kegiatan : Jumlah orang dewasa dan anak-anak yang dapat mengidentifikasi risiko perlindungan anak di komunitas mereka	Orang	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	2.3 Indikator Kegiatan : Proporsi anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam perubahan sikap / perilaku terhadap isu perlindungan anak	Anggota Masyarakat	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk anak-anak diperlengkapi untuk mengambil tindakan terhadap isu perlindungan anak	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah inisiatif yang dipimpin anak untuk memperkuat kecakapan hidup & perlindungan anak	Inisiatif	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	2.262	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.2 Indikator Kegiatan : Jumlah anak atau remaja yang telah menyelesaikan kurikulum kecakapan hidup dalam 6 bulan atau lebih	Anak	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.3 Jumlah anak, remaja dan pemuda yang berpartisipasi secara bermakna dalam tindakan yang mendukung mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak	Anak	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 4 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk pemimpin masyarakat	4.1 Indikator Kegiatan : Jumlah Congregational Hope Action Team (CHATs) -Kongresi Tim Aksi Harapan yang melaksanakan rencana aksi (dengan kurikulum Channel	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	760	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
(pemimpin Iman, pemimpin adat) diperlengkapi untuk mengambil tindakan terhadap perlindungan anak	of Hope (CoH)/Saluran Harapan, area kompetensi)										
	4.2 Indikator Kegiatan : Jumlah relawan aktif karena Congregational Hope Action Team /CHATs (oleh tipe relawan)	Orang	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 2: Perlindungan Hukum terhadap anak di lingkungan ormas dan lembaga keislaman											
Kegiatan 1: Simposium Perlindungan Hukum terhadap Anak	1.1 Jumlah ormas dan Lembaga Keislaman yang ada di Indonesia	Orang	200 (2016)			200	200	200	Kemenkumham dan Polri (I - Tersedia)	Nasional	MUI
Kegiatan 2: Lokakarya Hukum anti kekerasan terhadap anak	2.1 Jumlah ormas dan Lembaga Keislaman yang ada di Indonesia	Orang	200 (2016)			200	200	200	Kemenkumham dan Polri (I - Tersedia)	Nasional	MUI
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.											
PROGRAM 1: Penguatan Ketahanan Keluarga Dengan Perspektif Keadilan & Kesenjangan											
Kegiatan 2: Kampanye dan Pendidikan Publik tentang Pengasuhan Anak Tanpa Kekerasan	2.1. Jumlah social media campaign tentang Relasi Suami-Istri yang Sehat dan Berperspektif	jumlah kampanye social media				4	8		belum	pusat	NU - Lembaga Kemaslahatan Keluarga

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	3.1 Tersosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak kepada pengurus dan anggota PGRI	Kegiatan Nasional dan provinsi	-	3	1 nasional , 10 provinsi	1 nasional , 14 provinsi	1 nasional , 10 provinsi	0	PGRI bekerja sama dengan instansi/ organisasi terkait (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus Besar PGRI dan 34 Pengurus PGRI Provinsi
Kegiatan 4: Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.1 Terjalinnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kegiatan	-	3	3	3	3	0	Pengurus PGRI dengan instansi terkait (III- belum tersedia sumber)	Jakarta dan 34 Provinsi	Pengurus PGRI dengan instansi terkait
PROGRAM 5: Child and social protection services											
Kegiatan 1: Pembentukan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah desa / kelurahan yang menerapkan sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan (laporan, rujuk dan	Desa	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	1.311	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	tindak lanjuti) isu perlindungan anak										
	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah pemangku kepentingan yang mengerti CPMS-Child Protection Minimum Standard (standar minimum perlindungan anak)	Pemangku Kepentingan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	1.3 Indikator Kegiatan : Proporsi komite Perlindungan Anak yang memenuhi standar minimum	Komite	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Pembentukan mekanisme Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kasus pelecehan anak yang dilaporkan yang dirujuk ke institusi / struktur yang relevan	Laporan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	1.603	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	2.2 Indikator Kegiatan : Jumlah pemangku kepentingan yang mampu menyediakan dukungan psikososial untuk anak-anak dan masyarakat	Pemangk u Kepenting an	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 3: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat untuk diperlengkapi untuk mengambil tindakan untuk layanan perlindungan sosial	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok yang memimpin pengawasan terhadap perlindungan anak	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	1.960	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
	3.2 Indikator Kegiatan : Jumlah inisiatif advokasi untuk layanan perlindungan sosial yang lebih baik yang dipimpin oleh kelompok rentan atau individu	Inisiatif	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 6: Pro child policy/regulation implemented at local and national level											
Kegiatan 1: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan bagi masyarakat	1.1 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok masyarakat yang bisa menyampaikan suaranya dalam upaya advokasi	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	1.717	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
(termasuk anak-anak) untuk dilengkapi dalam proses pengembangan kebijakan / regulasi	1.2 Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok anak memberikan suaranya dalam upaya advokasi	Kelompok	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2 : Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk koalisi masyarakat sipil (termasuk media) di tingkat kabupaten dan nasional untuk mengadvokasi kebijakan berpihak pada anak	2.1 Indikator Kegiatan : Jumlah tindakan kolaboratif merencanakan kebijakan berpihak pada anak yang dikembangkan dalam koalisi di tingkat kabupaten dan nasional	Rencana	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	563	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 3: Kaji lapangan, pengembangan modul, pelatihan dan bantuan untuk masyarakat (termasuk anak-anak) diperlengkapi untuk memantau pelaksanaan kebijakan berpihak pada anak	3.1 Indikator Kegiatan : Jumlah tindakan untuk memantau penerapan kebijakan oleh kelompok masyarakat dan anak-anak	Tindakan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	2.427	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I - Tersedia)	9 propinsi, 38 Kabupaten /kota	Wahana Visi Indonesia
PROGRAM 7 :Penguatan Dukungan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Anak untuk Menegakkan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Resiko Migran, Exploitasi dan Perdagangan Anak											
Kegiatan 1: (prevention) Memperkuat komunitas, Anak, OMS dalam pencegahan melalui pendidikan komunitas, peer watch,	1.1 1870 anak terlibat di dalam usaha penyadaran terhadap bahaya perdagangan anak dan mengetahui kerentanan anak yang bermigrasi	Anak	-	1870	-	-	-	5,274	TDH NL	kepulauan riau dan kalimantan, Kota Semarang, Kubu Raya-Pontianak, Kendal-Jawa tengah, Sungai Bunru-Karawang,	indonesia ACT
	1.2 Inisiasi dan penguatan 20 forum anak di tingkat desa/kelurahan	forum	-	20	-	-	-				

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
kampanye, publikasi	1.3 penguatan Jaringan perlindungan anak di 27 desa/kelurahan	desa/kelu rahan	-	27	-	-	-			Bantul dan Guunung Kidul Yogja, Jakarta Utara, Surabaya, Mataram, Kupang, Indramayu	
	1.4 forum anak yang menjadi fokus di dalam program memberikan masukan terkait dengan program-program jaringan perlindungan anak	-	-	-	-	-	-				
INDIKATOR SDGs: 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
PROGRAM 1: Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan											
Kegiatan 1: Sekolah perempuan berbasis masyarakat	1.1 Sejumlah sekolah perempuan	Sekolah	5 (2016)	5	10	13	20	2,000	donor agensi, swadaya	jember, tasik, cilacap, cimahi, matram, sampit, aceh	lakpesdam NU
PROGRAM 2: Down to Zero											
Kegiatan 19: Baseline on functioning and efectiveness on CBCPM	19.1 Dokumen Rekomendasi CBCPM					1			Plan International	JAKARTA & NTB	Yayasan Plan International Indonesia
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											
PROGRAM 1: Adanya pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi PEREMPUAN korban & pejuang terkait kekerasan dan diskriminasi											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumberdaya bagi lembaga pengada layanan / women crisis center untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.1 Organisasi lembaga pengada layanan / women crisis center yang memperoleh dukungan sumber daya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Catur Daya (Dana, Pengetahuan, Jaringan & Kerelawanan)	2016	6 lembaga (@Rp.20 jt)	6 lembaga (@Rp. 20jt)	5 lembaga (@Rp. 20jt-50jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt-50jt)	Rp. 20.000.000 s/d Rp. 250.000.000,-	Donasi Publik (I - Tersedia)	Kabupaten/ Kota/Desa	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
PROGRAM: 2											
Kegiatan 1: advokasi rencana aksi daerah untuk pelayanan terpadu	1.1 Dokumen RAD untuk untuk pelayanan terpadu	Dokumen RAD	0 (2016)	0	1	4	13	2,000		13 kabupaten kota	lakpesdam NU
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. (Matriks K/L Hal. II.M.L.013-44 dan II.M.L.013-45)											
PROGRAM 1: Advokasi Kelompok yang mengalami eklusi sosial											
Kegiatan 1: peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami eklusi sosial.	1.1 Indikator. Sejumlah kelompok yang terekslusi mendapatkan latihan. Sejumlah layanan didapatkan oleh kelompok yang		1000	2000	7000	10.000	20000	5,000	donor agensi, swadaya	Nasional	lakpesdam NU

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	mengalami eklusi sosial										
PROGRAM 2: Advokasi TKI											
Kegiatan 2: Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena masalah/kasus	2. 1 Jumlah kasus yang ditangani	kasus			20	20	20	80	donasi masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia & negara penempatan	LAZISMU, MIGRANT CARE, UNIMIG
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.											
PROGRAM 1: Menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua											
Kegiatan 1: Pelatihan Advokat untuk perkara Ekonomi Syariah	1.1 Jumlah Advokat yang memahami ekonomi syariah	Orang/2 hari	200 (2017)		200	100	100	1.500.000/orang	Kemenkumham (I - Tersedia)	Nasional	MUI
Kegiatan 2: Pelatihan Notaris untuk pembuatan akta syariah	2.1 Jumlah Notaris untuk pembuatan akta syariah	Orang/2 hari	200 (2017)		200	100	100	1.500.000/orang	Kemenkumham (I - Tersedia)	Nasional	MUI
INDIKATOR SDGs: 16.4.1 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$). (Indikator Global yang Akan Dikembangkan)											
PROGRAM 1: Admisibilitas Penanganan Barang Bukti Elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KEMITRAAN)											

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penyusunan Rancangan UU Tentang Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik	1.1 Rancangan undang-undang dan naskah akademis tentang penanganan barang bukti elektronik.	Dokumen				1		761.850.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 2: Penyusunan Peraturan pelaksana dan SOP Penangana dan Pengelolaan BBE	2.1 Peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh MA dan Kominfo mengadopsi standar penanganan dan pengelolaan BBE	Dokumen					1	697.150.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
	2.2 SOP KPK dalam penanganan dan pengelolaan BBE sudah mengadopsi standar internasional penanganan BBE	Dokumen					1		(I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 3: Menyusun formulasi konsep dan panduan laboratorium digital forensik yang disesuaikan dengan	3.1 Adanya rancangan konsep dan panduan lab digital forensik yang menyesuaikan dengan standar internasional.	Dokumen /laporan				1		279.750.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
standard internasional											
Kegiatan 4: Peningkatan kapasitas Aparat penegak hukum dalam penanganan dan pengelolaan Barang Bukti Elektronik	4.1 Kurikulum Pelatihan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik	Kurikulu m dan jumlah orang				40		774.050.000	Pemerintah Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
	4.2 Jumlah aparat penegak hukum yang mendapat pelatihan penanganan dan pengelolaan Bukti Elektronik										
PROGRAM 2: Perbaikan Efektifitas Penanganan Pemulihan Aset Lintas Negara Menejemen Bantuan Hukum Timbal Balik Oleh Kejaksaan RI dan Institusi yang Relevan (SIGAP)											
Kegiatan 1 : Penguatan Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung RI	1.1 Dokumen Rencana aksi Penguatan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI	Dokumen				1		1.798.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2 : Pengembangan Protokol Kordinasi diantara Institusi Terkait dalam hal pemulihan aset lintas negara dan Bantuan Hukum Timbal Balik	2.1 Protokol Kordinasi Pemulihan Aset dan bantuan hukum timbal balik antar-institusi	Dokumen /MoU/ SKB/laporan Pilot project				1		1.677.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 3 : Pelatihan Pemulihan Aset dan Bantuan Hukum Timbal Balik bagi para pelatih di institusi penegak hukum dan lembaga terkait	3.1 Kurikulum dan Modul Training of Trainers Pemulihan Aset dan bantuan hukum timbal balik	Dokumen /Modul				1		641.595.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui IDLO (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
INDIKATOR SDGs: 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
PROGRAM 1: Talkshow Online dengan KPK											
Kegiatan 1:	1.1 Melakukan Talkshow Online dengan KPK	Pemirsa				1100	1200		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1:	1.2 Talkshow dan Sosialisasi Online Program-Program mereka	Pemirsa				1000	1000		Swadaya (III - Belum tersedia sumber)	Online	Indonesia Berbicara
INDIKATOR SDGs: 16.7.2. (a) Indeks Lembaga Demokrasi. 16.7.2. (b) Indeks Kebebasan Sipil. 16.7.2. (c) Indeks Hak-hak Politik.											
PROGRAM 1: INSPIRE											
Kegiatan 1: Membangun dan Memfasilitasi Forum Dialog antar politisi muda lintas partai di DPR RI untuk membahas isu dan agenda nasional melawan ekstrimisme	1.1 Adanya rekomendasi/usulan kebijakan melawan ekstrimisme dari proses dialog reguler Forum INSPIRASI politisi muda lintas partai DPR RI	Rekomen dasi				4		230.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan
Kegiatan 2 : Membangun dan Memfasilitasi Ruang Dialog antara Politisi lintas partai dengan masyarakat	2.1 Adanya masukan kebijakan melawan ekstrimisme yang diterima melalui dialog reguler antara politisi lintas partai dan masyarakat sipil dan konstituen	Rekomen dasi				6		141.000.000	Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (I - Tersedia)	Jakarta	Kemitraan

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pengumpulan data tentang pengurus SB yang terintimidasi karena berserikat	1.1. Indikator kegiatan: Data yang terkumpul	kasus				10	15		(III - Belum tersedia sumber)	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Batam, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Maluku,	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
										Papua Barat dan NTT	
INDIKATOR SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1 : Memberikan dukungan sumber daya bagi setiap inisiatif untuk pemenuhan Hak EKOSOB Korban Pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Organisasi korban/lembaga pendamping korban memperoleh dukungan sumber daya untuk membantu korban pelanggaran HAM masa lalu mendapatkan akses dan layanan sosial (Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dll)	Catur Daya (Dana, Pengetahuan, Jaringan & Kerelawanan)	2016	6 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	6 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	5 lembaga (@Rp.20 jt- Rp.500jt)	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & Dinasi Publik (I - Tersedia)	Kebupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

MATRIKS BAGIAN 2: PROGRAM DAN KEGIATAN NONPEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Memberikan dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu	1.1 Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	Adanya kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal	2016	-	1 kebijakan/wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	1 kebijakan/wilayah kerja	Rp.3M-5M	Lembaga Donor & Dinasi Publik (I - Tersedia)	Kabupaten/ Kota	Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
PROGRAM 2: Penegakan Hukum dalam Peningkatan Toleransi dan tangkal Radikalisme											
Kegiatan 1: Sarasehan Penegakan Hukum dan HAM dalam kehidupan beragama	1.1 Jumlah tokoh masyarakat lintas Agama	orang	200 (2016)			250	250	250	Polisi dan Kemenag (I - Tersedia)	Nasional	MUI

MATRIKS BAGIAN 3: INDIKATOR TPB/SDGs YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Belum semua indikator TBP/SDGs Indonesia sudah dirumuskan metadatanya karena masih menunggu kesepakatan global tentang indikator tersebut (sebagian besar adalah indikator SDGs Tier III) atau karena pada saat perumusan indikator, Tim belum berhasil merumuskan metadatanya. Dalam buku “Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia”, indikator tersebut termasuk kategori “indikator yang akan dikembangkan”. Secara bertahap indikator dengan kategori akan dikembangkan tersebut akan dirumuskan metadatanya melalui proses pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan dunia usaha, pakar dan akademisi) dibantu oleh Organisasi PBB yang mengampu indikator tersebut. Meski masih dalam kategori “indikator yang akan dikembangkan”, sudah terdapat program atau kegiatan yang diindikasikan terkait dengan beberapa indikator tersebut, baik dikerjakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Seperti halnya perumusan metadata tahap pertama, perumusan metadata tahap kedua akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi baik offline maupun online untuk disepakati bersama. Berikut adalah daftar indikator yang akan dikembangkan untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola:

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.

Kode Indikator	Nama Indikator
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.

Kode Indikator	Nama Indikator
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati